



Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 18 Tahun 2021
Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD

Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran serta untuk mengakomodir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil dari proses pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
- b. bahwa Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini.

BAB IV PENYUSUNAN RKPD Pasal 4

RKPD Tahun 2022 mengacu pada :

- (1) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Provinsi.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Kabupaten/kota; dan
- (3) Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2022 merupakan hasil pembahasan dalam Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang dirumuskan pada minggu ketiga bulan Maret 2021.

Pasal 6

RKPD Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

BAB V
PENETAPAN RKPD
Pasal 7

RKPD Tahun 2022 ditetapkan setelah RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Juli 2021

★BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 18

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN	II-1
INDRAGIRI HILIR.....	
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana.....	II-15
2.1.1.3 Kondisi Demografi.....	II-17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-22
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..	II-22
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-40
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-52

2.1.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-56
2.1.3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-56
2.1.3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-141
2.1.3.3	Layanan Urusan Pilihan.....	II-194
2.1.3.4	Urusan Penunjang.....	II-214
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-227
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-227
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-230
2.1.4.3	Iklim Investasi.....	II-232
2.1.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia.....	II-237
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-276
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-441
2.3.1	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-442
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-446
2.3.2.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-446
2.3.2.2	Aspek Pelayanan Umum.....	II-449
2.3.2.3	Aspek Daya Saing.....	II-463
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-2
3.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.....	III-4
3.1.2	Kemiskinan, IPM, Gini Ratio dan Pengangguran Terbuka	III-9

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-12
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-18
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-20
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	IV-4
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-18
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-18
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022	IV-20
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	IV-21
BAB V	RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2020	II-3
Tabel 2.2	Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir	II-12
Tabel 2.3	Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-15
Tabel 2.4	Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-16
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Sensus Tahun 1990, 2000 dan 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir	II-18
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-19
Tabel 2.7	Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-20
Tabel 2.8	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020	II-21
Tabel 2.9	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	II-25
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.11	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Dasar	II-76
Tabel 2.12	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018	II-79
Tabel 2.13	Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam mencapai SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir	II-84

Tabel 2.14	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008	II-102
Tabel 2.15	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016	II-103
Tabel 2.16	Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2015 - 2017	II-105
Tabel 2.17	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang PU-PR	II-115
Tabel 2.18	Pencapaian Indikator SPM Bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018	II-116
Tabel 2.19	Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir	II-118
Tabel 2.20	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-125
Tabel 2.21	Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017	II-125
Tabel 2.22	Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir	II-126
Tabel 2.23	Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018	II-132
Tabel 2.24	Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir	II-133
Tabel 2.25	Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Sosial	II-137
Tabel 2.26	Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018	II-138
Tabel 2.27	Permasalahan/hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir	II-139
Tabel 2.28	Perkembang Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-146

Tabel 2.29	Perkembangan Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-147
Tabel 2.30	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Dalam Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-201
Tabel 2.31	Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-220
Tabel 2.32	Mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing - masing komponen	II-221
Tabel 2.33	Rincian Interpretasi dan Karakteristik instansi	II-222
Tabel 2.34	Perkembangan Realisasi, Target dan Capaian kinerja indikator Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-223
Tabel 2.35	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha	II-233
Tabel 2.36	Capaian Pelaksanaan Program DMIJ Bidang Infrastruktur Tahun 2015 - 2018	II-235
Tabel 2.37	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-239
Tabel 2.38	Rekap Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar, Kesehatan, PU-PR, Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018	II-262
Tabel 2.39	Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Triwulan IV Tahun 2019	II-268
Tabel 2.40	Pencapaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2020	II-438
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir	III-4
Tabel 3.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut	III-6

Tabel 3.3	IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tembilahan Mei 2021, Tahun Kalender 2021, dan tahun ke tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	III-9
Tabel 3.4	Perekmbangan Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir	III-10
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir	III-10
Tabel 3.6	Gini Ratio Kabupaten Indragiri Hilir	III-11
Tabel 3.7	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir	III-11
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	III-22
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Stretegi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 tahun keempat	IV-5
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Tahun 2022	IV-29
Tabel 4.3	Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	IV-54
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	IV-58
Tabel 4.5	Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-62
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Daerah Tahun 2022	IV-81
Tabel 4.7	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2022 dengan PN RKPD 2022	IV-82
Tabel 4.8	Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2022	IV-99
Tabel 4.9	Keselarasn Prioritas Pembangunan daerah dengan program prioritas pada RKPD tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir	IV-114

Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Prioritas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	V-5
Tabel 5.3	Sandingan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Program Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	V-6
Tabel 5.4	Sandingan Prioritas Daerah Untuk Indikator Sasaran Dan Indikator Kinerja program Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	V-14
Tabel 5.5	Data Program/Kegiatan APBD Kab. Inhil Tahun 2022 Penunjang Program/Kegiatan APBD Prov. Riau Tahun 2022	V-21
Tabel 5.6	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022	V-32
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	VI-3

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-9
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	II-2
Gambar 2.2	Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-15
Gambar 2.3	Perkembangan Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 - 2020	II-23
Gambar 2.4	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2018 - 2020	II-24
Gambar 2.5	Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-27
Gambar 2.6	Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-28
Gambar 2.7	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2014 - 2019	II-30
Gambar 2.8	Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-31
Gambar 2.9	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan Tahun 2015 - 2019	II-32
Gambar 2.10	Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-33
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 - 2020	II-34
Gambar 2.12	Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-35
Gambar 2.13	Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020	II-36

Gambar 2.14	Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-37
Gambar 2.15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020	II-38
Gambar 2.16	Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-39
Gambar 2.17	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020	II-40
Gambar 2.18	Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-41
Gambar 2.19	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020	II-42
Gambar 2.20	Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-43
Gambar 2.21	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020	II-44
Gambar 2.22	Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-45
Gambar 2.23	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2018	II-46
Gambar 2.24	Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-47
Gambar 2.25	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020	II-48

Gambar 2.26	Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-49
Gambar 2.27	Perkembangan Cakupan Fasilitas Seni Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-50
Gambar 2.28	Perkembangan Group kesenian di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-50
Gambar 2.29	Kinerja Indikator Cakupan Fasilitas Seni Budaya Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-51
Gambar 2.30	Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 – 2017	II-52
Gambar 2.31	Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-53
Gambar 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018	II-55
Gambar 2.33	Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-56
Gambar 2.34	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2015 – 2018	II-57
Gambar 2.35	Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020	II-58
Gambar 2.36	Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-59
Gambar 2.37	Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-60
Gambar 2.38	Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-61
Gambar 2.39	Perkembangan APS 7 – 12 Tahun dan APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-62

Gambar 2.40	Kinerja Indikator APS 7 – 12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-63
Gambar 2.41	Kinerja Indikator APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-64
Gambar 2.42	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-65
Gambar 2.43	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-66
Gambar 2.44	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-67
Gambar 2.45	Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-68
Gambar 2.46	Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 – 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-69
Gambar 2.47	Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-70
Gambar 2.48	Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-71
Gambar 2.49	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-72
Gambar 2.50	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-73
Gambar 2.51	Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-74
Gambar 2.52	Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-75

Gambar 2.53	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020	II-88
Gambar 2.54	Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-89
Gambar 2.55	Perkembangan Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-90
Gambar 2.56	Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-91
Gambar 2.57	Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-92
Gambar 2.58	Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-93
Gambar 2.59	Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-94
Gambar 2.60	Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-95
Gambar 2.61	Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-96
Gambar 2.62	Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-97
Gambar 2.63	Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-98
Gambar 2.64	Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-99

Gambar 2.65	Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020	II-100
Gambar 2.66	Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-101
Gambar 2.67	Perkembangan Jalan dengan Kondisi Baik Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018	II-107
Gambar 2.68	Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-108
Gambar 2.69	Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018	II-109
Gambar 2.70	Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-110
Gambar 2.71	Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-111
Gambar 2.72	Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018	II-112
Gambar 2.73	Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-113
Gambar 2.74	Kinerja Indikator Ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-114
Gambar 2.75	Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-120
Gambar 2.76	Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Tetangga Tahun 2012 – 2017	II-121
Gambar 2.77	Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-122

Gambar 2.78	Kinerja Indikator Rumah tangga Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018	II-123
Gambar 2.79	Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-124
Gambar 2.80	Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-127
Gambar 2.81	Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-128
Gambar 2.82	Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-129
Gambar 2.83	Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-131
Gambar 2.84	Kinerja Indikator Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-135
Gambar 2.85	Kinerja Indikator PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-136
Gambar 2.86	Perkembangan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2019	II-142
Gambar 2.87	Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-143
Gambar 2.88	Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-144
Gambar 2.89	Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-145

Gambar 2.90	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020	II-148
Gambar 2.91	Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-149
Gambar 2.92	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020	II-150
Gambar 2.93	Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-151
Gambar 2.94	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-152
Gambar 2.95	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2012 – 2017	II-153
Gambar 2.96	Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-154
Gambar 2.97	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2012 – 2017	II-155
Gambar 2.98	Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-156
Gambar 2.99	Kinerja Indikator Luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-157
Gambar 2.100	Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-158
Gambar 2.101	Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-159
Gambar 2.102	Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-160
Gambar 2.103	Kinerja Indikator Kepemilikan KTP di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-162

Gambar 2.104	Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-164
Gambar 2.105	Kinerja Indikator Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-165
Gambar 2.106	Kinerja Indikator Pertambahan Jumlah Desa “Maju” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-166
Gambar 2.107	Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-167
Gambar 2.108	Kinerja Indikator Posyandu Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-168
Gambar 2.109	Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-169
Gambar 2.110	Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-171
Gambar 2.111	Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-172
Gambar 2.112	Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-173
Gambar 2.113	Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-175
Gambar 2.114	Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-176
Gambar 2.115	Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-177

Gambar 2.116	Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-178
Gambar 2.117	Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-180
Gambar 2.118	Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-181
Gambar 2.119	Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-182
Gambar 2.120	Kinerja Indikator PMA di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-184
Gambar 2.121	Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-186
Gambar 2.122	Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-187
Gambar 2.123	Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-189
Gambar 2.124	Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-190
Gambar 2.125	Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-191
Gambar 2.126	Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-192
Gambar 2.127	Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-193
Gambar 2.128	Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-194
Gambar 2.129	Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-195
Gambar 2.130	Kinerja Indikator Produktivitas Padi di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-198

Gambar 2.131	Kinerja Indikator Produksi Beras di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-199
Gambar 2.132	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-202
Gambar 2.133	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-205
Gambar 2.134	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-206
Gambar 2.135	Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-208
Gambar 2.136	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-209
Gambar 2.137	Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-210
Gambar 2.138	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-211
Gambar 2.139	Kinerja Indikator Produksi Perikanan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-213
Gambar 2.140	Kinerja Indikator Konsumsi Ikan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-214
Gambar 2.141	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-215
Gambar 2.142	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-218
Gambar 2.143	Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-219
Gambar 2.144	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-224

Gambar 2.145	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja indikator Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-225
Gambar 2.146	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-226
Gambar 2.147	Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tetangga dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019	II-228
Gambar 2.148	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-229
Gambar 2.149	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-230
Gambar 2.150	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019	II-231
Gambar 2.151	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-232
Gambar 2.152	Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji melalui Program DMIJ 2014-2018	II-245
Gambar 2.153	Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMIJ 2014-2017	II-236
Gambar 2.154	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020	II-238

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Daerah.

Dalam menyusun RKPD digunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD tahun 2022 ini mengacu kepada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 - 2025, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022. Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan mengacu RKPD 2022 ini untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2018-2023 mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, selanjutnya penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan pada akhirnya adalah penetapan RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005- 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional.

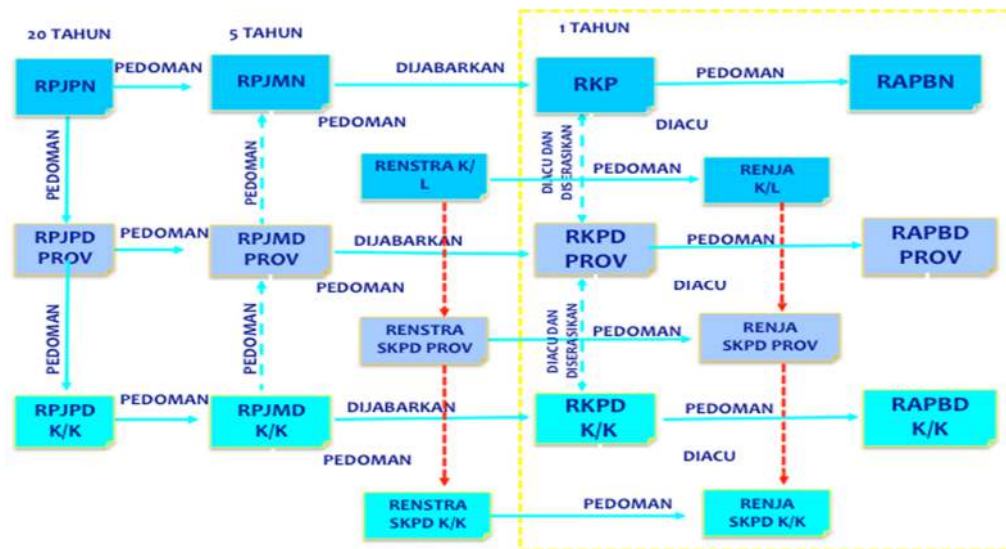
Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;

2. RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018–2023.
4. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2022 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 sesuai RPJMD periode tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah:

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dari 3 aspek utama yaitu aspek Kondisi Umum Kondisi Daerah, aspek Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan aspek Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dari 4 aspek yaitu aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

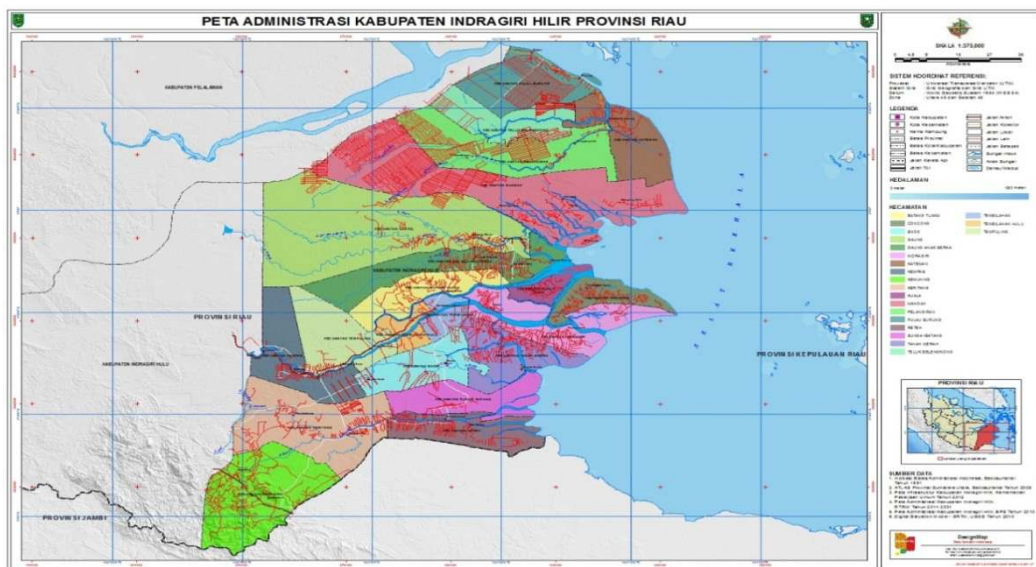
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai letak, luas dan batas wilayah administrasi, Kondisi geografis, Kondisi topografi, Kondisi geologi, Kondisi Hidrologi, Jenis Tanah, Daya Dukung Lahan, dan Kondisi klimatologi.

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36' Lintang Utara - 1°07' Lintang Selatan dan 102°32' Bujur Timur - 104°10' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM². Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah

dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi 'oleh jalan Nasional 'Lintas Timur'. Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Indragiri Hilir 2020

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	918,96	6,79	16	1
2	Kemuning	907,17	6,71	11	1
3	Reteh	529,29	3,91	11	3
4	Sungai Batang	413,35	3,06	7	1
5	Enok	457,76	3,38	10	4
6	Tanah Merah	502,07	3,71	9	1
7	Kuala Indragiri	814,34	6,02	7	1
8	Concong	280,38	2,07	5	1
9	Tembilahan	169,57	1,25	-	8
10	Tembilahan Hulu	148,71	1,10	4	2
11	Tempuling	586,62	4,34	5	4
12	Kempas	576,60	4,26	10	2
13	Batang Tuaka	406,22	3,00	12	1
14	Gaung Anak Serka	671,48	4,96	9	3
15	Gaung	2.093,52	15,48	15	1
16	Mandah	1.747,39	12,92	16	1
17	Kateman	491,90	3,64	8	3
18	Pelangiran	865,16	6,40	15	1
19	Teluk Belengkong	412,92	3,05	13	-
20	Pulau Burung	531,68	3,93	14	-
	Jumlah	13.525,10	100,00	197	39

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

b. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), dan daerah hutan payau (*mangrove*). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 - 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 - 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 - 8 %.

c. Kondisi Geologi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan-cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh mangrove (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan

hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan-cekungan dan sumber daya hayati di atasnya mengalami penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumber daya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau *leaching*. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis alluvium, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang keduanya mempunyai umur Kuartar. Tanah dan batuan yang tampak di permukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur

dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai *unconfined strength* kurang dari 0.5 kg/cm²).

Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu - abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/*sticky*, dan kadang - kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm². Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm² dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryo, 1986).
- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur.

Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.

- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut**, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90%) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

d. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumber daya air di wilayah kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined*

groundwater. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumber daya air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

e. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah Aluvial (*Entisol*) dan Gley Humus (*Inceptisol*). Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini hanya terdapat di bagian barat ke arah selatan (Kecamatan Keritang). Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan alluvial lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk meander. Secara teknis lapisan permukaan alluvial lunak (lapisan sabuk meander, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut. Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang terdapat tanah Podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Orgasol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah gleihumus dan organosol termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut

sangat rendah, yaitu antara 3,5 - 6, sehingga bersifat asam. Di daerah Reteh, lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan walaupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus memperhatikan agar pengaturan kedalaman air tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan gleihumus tanah organosol yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

f. Daya Dukung Lahan

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral yaitu tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan seperti tanah latosol (merah) dan tanah andosol (hitam). Sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim maupun topografinya. Secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: kelompok marin, kubah gambut, alluvial, dataran dan perbukitan.

1. Kelompok Marin, terletak disepanjang pantai dengan ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses pengangkatan. Satuan lahan pada kelompok ini dapat dibedakan antara lain beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan delta. Kelompok ini luasnya mencapai 17.09% dari luas lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan umumnya adalah berupa dataran pasang-surut dengan kemiringan lahan yang umumnya kurang dari 3%.
2. Kelompok Kubah Gambut, terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Tanah organosol atau tanah gambut ini merupakan jenis tanah yang paling dominan terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, mencapai 75.32% dari luas wilayahnya dan umumnya mempunyai ketebalan lebih dari 2 meter.
3. Kelompok Alluvial, terbentuk dari endapan alluvial sungai dan terletak di sepanjang jalur- jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah ini cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok ini merupakan satuan fisiografi yang terkecil di Indragiri Hilir, yaitu hanya sekitar 0.57% dari luas wilayah.

Tabel 2.2.
Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Satuan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Keterangan
1	Marin	233.714	17,09	Umumnya kelerengan < 3% dan sebagian kecil < 8%
2	Kubah Gambut	1.030.039	75,32	Didominasi oleh oligotrofik air tawar dengan kedalaman > 2 meter
3	Alluvial	7.795	0,57	Umumnya Kelerengan < 3%
4	Dataran	58.121	4,25	Umumnya Kelerengan < 3% dan terdapat di bagian selatan
5	Perbukitan	37.881	2,77	Umumnya kelerengan 16-25% dan terdapat dibagian selatan
Total		1.367.551	100	

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2017)

4. Kelompok Dataran, berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya <3%. Luasnya mencapai 4.25% dari luas wilayah.
5. Kelompok Perbukitan, seperti halnya kelompok dataran, kelompok perbukitan berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya 16-25%, terutama yang berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu dan provinsi Jambi (TNBT). Luasnya mencapai 2.77% dari luas total wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

g. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan

curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *run off* dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2015 - 2019, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 93 - 149 hari hujan per tahunnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata hari hujan kabupaten Indragiri Hulu yang berkisar antara 171 - 210 hari hujan per tahun. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 93 hari hujan dengan curah hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap.

Tabel 2.3.
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

No.	Bulan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)
1	Januari	7,00	66,00	16,00	216,00	10,00	137,70	9,00	123,40	11,00	171,80
2	Februari	6,00	83,00	23,00	174,00	11,00	169,00	10,00	141,80	9,00	138,20
3	Maret	11,00	150,00	11,00	181,00	14,00	226,40	14,00	215,90	10,00	170,00
4	April	11,00	153,00	10,00	160,00	12,00	183,10	13,00	214,10	12,00	188,70
5	Mei	10,00	150,00	11,00	161,00	10,00	120,80	11,00	154,00	9,00	142,50
6	Juni	7,00	117,00	8,00	85,00	8,00	98,70	8,00	91,20	8,00	88,00
7	Juli	4,00	39,00	9,00	133,00	6,00	86,80	7,00	99,10	5,00	62,10
8	Agustus	6,00	104,00	9,00	141,00	9,00	142,10	7,00	102,10	6,00	84,50
9	September	3,00	28,00	11,00	135,00	11,00	183,70	10,00	169,70	5,00	79,90
10	Oktober	3,00	30,00	12,00	150,00	10,00	184,80	12,00	226,60	8,00	110,90

No.	Bulan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)
11	November	11,00	181,00	16,00	241,00	13,00	240,60	13,00	264,40	11,00	169,70
12	Desember	14,00	206,00	13,00	144,00	13,00	191,90	13,00	218,80	12,00	162,90
Jumlah		93,00	1307,00	149,00	1921,00	127,00	1965,60	127,00	2021,10	106,00	1569,2

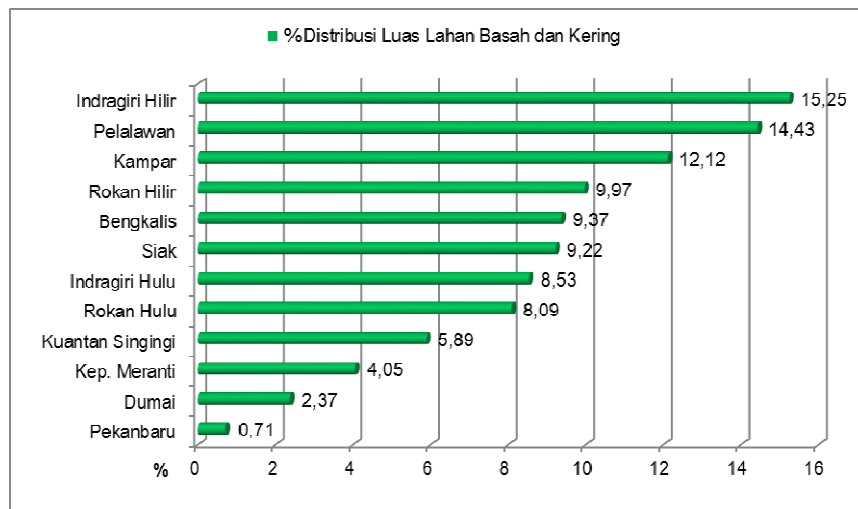
Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2015 - 2021)

Selama periode 2015 – 2019, rata-rata hari hujan dan curah hujan yang relatif rendah atau musim kemarau, umumnya mulai terjadi pada bulan Juni hingga bulan September, kecuali pada tahun 2015 yang lebih panjang hingga bulan Oktober. Sejalan dengan hari hujan, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dibawah normal dengan kisaran sebesar 1.307 mm/tahun – 2.021 mm/tahun dengan rata-rata sebesar 1.744 mm/tahun, lebih rendah dibanding curah hujan di kabupaten Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 2.292 mm/tahun. Curah hujan yang jauh dibawah normal umumnya terjadi pada bulan Juni – September. Musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September ini yang ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan kejadian tahun 2014 dan 2015.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan pertanian khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki total luas lahan kering dan lahan basah Kabupaten Indragiri terluas di Riau yaitu seluas 1.355.095,84 hektar atau 15,25% dari total luas lahan kering dan lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan basah seluas 1.321.623,13 hektar atau 15,18% dari total lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri

Hilir juga memiliki total luas lahan kering seluas 33,457,33 hektar atau 18,63% dari total lahan kering Provinsi Riau.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2017)

Gambar 2.2.

Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Potensi lahan basah dan lahan kering yang sebagian telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa, kelapa sawit dan tanaman pangan. Produksi hasil perkebunan kelapa dan kelapa sawit ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh daerah. Oleh karena itu, meneruskan untuk mewujudkan kawasan industri Kuala Enok perlu terus dilakukan.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten

Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir. Selama periode 2014 – 2017, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 23 kali yang terjadi di lima kecamatan yaitu di kecamatan Tanah Merah sebanyak 13 kali, Kuala Indragiri sebanyak 4 kali, Enok sebanyak 3 kali dan di kecamatan Mandah serta Tempuling yang masing-masingnya sebanyak 1 kali.

Bencana gelombang pasang surut terjadi sebanyak 2 kali di dua kecamatan yaitu kecamatan Concong dan Kateman. Bencana puting beliung terjadi sebanyak 14 kali yaitu di kecamatan Mandah dan reteh yang masing-masingnya terjadi sebanyak 3 kali, Enok dan Kuala Indragiri yang masing-masingnya sebanyak 2 kali dan Tanah Merah, Concong, Gaung dan Kateman yang masing-masingnya terjadi sekali. Bencana banjir terjadi sekali yaitu di kecamatan Tempuling. Meski Kabupaten Indragiri Hilir bukan daerah dengan potensi bencana yang besar namun antisipasi terhadap kejadian bencana longsor, gelombang pasang surut, angin puting beliung dan bencana banjir perlu terus dilakukan.

Tabel 2.4.

Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Gelombang Pasang Surut	Angin Puting Beliung	Kebakaran Hutan dan Lahan
1	Keritang	-	-	-	-	26
2	Kemuning	-	-	-	-	5
3	Rete	1	-	-	2	2
4	Sungai Batang	-	-	-	-	4
5	Enok	-	-	-	1	6
6	Tanah Merah	15	-	-	2	1
7	Kuala Indragiri	6	-	-	2	1
8	Concong	-	-	1	1	2
9	Tembilahan	2	4	-	2	5
10	Tembilahan Hulu	5	-	-	2	4
11	Tempuling	3	3	-	-	31
12	Kempas	1	-	-	-	20
13	Batang Tuaka	1	-	-	1	16
14	Gaung Anak Serka	-	-	-	-	4
15	Gaung	1	-	-	1	12
16	Mandah	-	-	-	2	10

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Gelombang Pasang Surut	Angin Puting Beliung	Kebakaran Hutan dan Lahan
17	Kateman	-	-	1	2	5
18	Pelangiran	-	-	-	1	5
19	Teluk Belengkong	-	-	-	-	2
20	Pulau Burung	-	-	-	-	11
	Kab. Indragiri Hilir	35	7	2	19	172

Sumber: BPBD Kabupaten Indragiri Hilir (2021)

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang banyak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2020. Kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dari jumlah titik api di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat. Kondisi ini perlu perhatian serius untuk diantisipasi karena saat ini dan kedepan, pembukaan lahan gambut pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir akan terus terjadi. Menurut data BPBD Indragiri Hilir tahun 2021, selama periode 2016 – 2020, Kecamatan Tempuling, Keritang dan Kempas adalah 3 kecamatan dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan terbanyak. Bencana tanah longsor merupakan bencana kedua yang sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir setelah kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, Kecamatan Tanah Merah adalah daerah yang paling sering mengalami bencana tersebut.

2.1.1.3. Kondisi Demografi

Hasil sensus penduduk tahun 1990 - 2000, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,7% per tahun. Pada periode 2000 – 2010, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,9% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2000 – 2010 lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu (4,97%) dan Provinsi Riau (4,75%).

Tabel 2.5.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Sensus Tahun 1990, 2000 dan
2010 di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			Laju Pertumbuhan (%)	
		1990	2000	2010	1990-2000	2000-2010
1	Keritang	55,425	52,696	61,453	-0.5	1.7
2	Kemuning	n.a	11,293	29,656	n.a	16.3
3	Reteh	61,200	42,755	42,211	-3.0	-0.1
4	Sungai Batang	n.a	12,586	1,826	n.a	-0.6
5	Enok	33,620	32,750	32,968	-0.3	0.1
6	Tanah Merah	31,540	31,724	29,948	0.1	-0.6
7	Kuala Indragiri	32,197	19,186	18,688	-4.0	-0.3
8	Concong	n.a	10,937	12,804	n.a	1.7
9	Tembilahan	67,518	51,429	69,524	-2.4	3.5
10	Tembilahan Hulu	n.a	29,176	42,654	n.a	4.6
11	Tempuling	42,073	25,398	29,543	-4.0	1.6
12	Kempas	n.a	24,572	32,602	n.a	3.3
13	Batang Tuaka	20,211	21,786	26,317	0.8	2.1
14	Gaung Anak Serka	54,438	21,057	21,339	-6.1	0.1
15	Gaung	n.a	34,576	38,559	n.a	1.2
16	Mandah	36,103	43,327	38,568	2.0	-1.1
17	Kateman	42,843	31,104	43,813	-2.7	4.1
18	Pelangiran	n.a	21,438	42,132	n.a	9.7
19	Teluk Belengkong	n.a	10,953	16,124	n.a	4.7
20	Pulau Burung	n.a	26,958	21,585	n.a	-2.0
	Kab. Indragiri Hilir	477,168	555,701	662,305	1.7	1.9

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2012 - 2016)

Kondisi lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir karena Kabupaten Indragiri Hilir “belum” menjadi ‘sasaran’ migrasi penduduk luar Provinsi Riau. Dimasa yang akan datang dengan semakin berkembangnya perekonomian dan khususnya industri kelapa sawit dan kelapa, akan menarik migrasi penduduk ke Indragiri Hilir. Fenomena ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kemuning selama periode 2000 - 2010 yaitu sebesar 16,26%. Kecamatan-kecamatan yang relatif kurang bergerak perekonomiannya cenderung bermigrasi penduduknya sehingga laju pertumbuhan penduduk minus. Kecamatan - kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan minus selama periode 2000 - 2010 adalah kecamatan Pulau Burung (-1,99%), Mandah (-1,1%), Sungai Batang (0,6%), Tanah Merah (-0,56%) dan Kuala Indragiri (-0,26%).

Tabel 2.6.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keritang	66.017	66.823	67.616	61.203	63.103
2	Kemuning	32.946	33.643	34.388	35.893	38.499
3	Reteh	45.109	45.601	46.077	34.970	35.974
4	Sungai Batang	12.629	12.763	12.892	10.098	10.066
5	Enok	31.812	35.664	36.470	33.999	33.846
6	Tanah Merah	31.812	32.147	32.470	24.916	25.236
7	Kuala Indragiri	20.010	20.226	20.435	14.345	14.679
8	Concong	13.817	13.988	14.156	11.660	11.764
9	Tembilahan	75.108	76.122	77.135	75.864	77.862
10	Tembilahan Hulu	46.262	46.921	47.585	45.781	46.662
11	Tempuling	31.799	32.187	32.569	31.848	31.633
12	Kempas	35.255	35.725	36.194	37.574	38.671
13	Batang Tuaka	28.431	28.787	29.139	26.727	27.190
14	Gaung Anak Serka	22.726	22.977	23.221	22.476	22.591
15	Gaung	41.396	41.886	42.367	36.930	38.367
16	Mandah	40.716	41.127	41.520	33.416	34.531
17	Kateman	47.393	48.051	48.711	37.007	39.284
18	Pelangiran	45.979	46.777	47.604	28.718	35.318
19	Teluk Belengkong	17.485	17.735	17.604	8.579	9.229
20	Pulau Burung	22.870	23.084	17.987	17.837	20.404
	Kab. Indragiri Hilir	713.034	722.234	731.396	740.598	654.909

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2017 - 2021)

Selama periode 2016 – 2019, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat yaitu dari 713.034 orang menjadi 740.598 orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95% per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau pada periode yang sama yang masing-masingnya 1,41% per tahun, 3,74% per tahun dan 1,76% per tahun. Namun, pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 654.909 orang atau menurun 11,60% dari tahun 2019.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat kepadatannya selama periode 2016 - 2020 berkisar antara 48 - 64 jiwa/Km² dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, penduduk terpadat menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat di kecamatan Tembilahan yang merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebesar 459 jiwa/Km² diikuti oleh Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 314 jiwa/Km², Kecamatan Kateman dengan 80 jiwa/Km² dan Kecamatan Keritang 69 jiwa/Km². Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kuala Indragiri dan Kecamatan Gaung dengan 18 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Tabel 2.7.
Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keritang	121	123	124	113	69
2	Kemuning	63	64	65	68	42
3	Reteh	111	112	113	86	68
4	Sungai Batang	87	87	88	69	24
5	Enok	40	40	41	69	74
6	Tanah Merah	44	44	45	65	50
7	Kuala Indragiri	39	40	40	28	18
8	Concong	86	87	88	73	42
9	Tembilahan	381	386	391	384	459
10	Tembilahan Hulu	256	260	263	253	314
11	Tempuling	47	47	47	46	54
12	Kempas	97	98	99	103	67
13	Batang Tuaka	27	27	28	25	67
14	Gaung Anak Serka	37	38	38	37	34
15	Gaung	28	41	41	36	18
16	Mandah	40	28	28	23	20
17	Kateman	84	86	87	66	80

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2016	2017	2018	2019	2020
18	Pelangiran	87	88	90	54	41
19	Teluk Belengkong	35	36	36	17	22
20	Pulau Burung	44	44	45	34	38
Kab. Indragiri Hilir		61	62	63	64	48

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2017 - 2021)

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 69,39% terkategori umur produktif dan 30,61% terkategori tidak produktif. Hal yang mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat 'baby boom' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 26,23%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian lebih dalam pembangunan ke depan.

Tabel 2.8.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	28.484	26.982	55.466
2	5 - 9	29.434	28.071	57.505
3	10 - 14	30.142	28.688	58.830
4	15 - 19	29.361	27.760	57.121
5	20 - 24	30.502	28.619	59.121
6	25 - 29	28.751	26.372	55.123
7	30 - 34	28.077	26.149	54.226
8	35 - 39	26.284	24.950	51.234
9	40 - 44	25.513	24.218	49.731
10	45 - 49	22.627	20.993	43.620
11	50 - 54	18.586	17.072	35.658
12	55 - 59	14.562	12.994	27.556
13	60 - 64	11.199	9.847	21.046

No.	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
14	65 - 69	8.446	6.790	15.236
15	70 - 74	4.385	3.416	7.801
16	75+	3.246	2.389	5.635
Indragiri Hilir		339.599	315.310	654.909

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

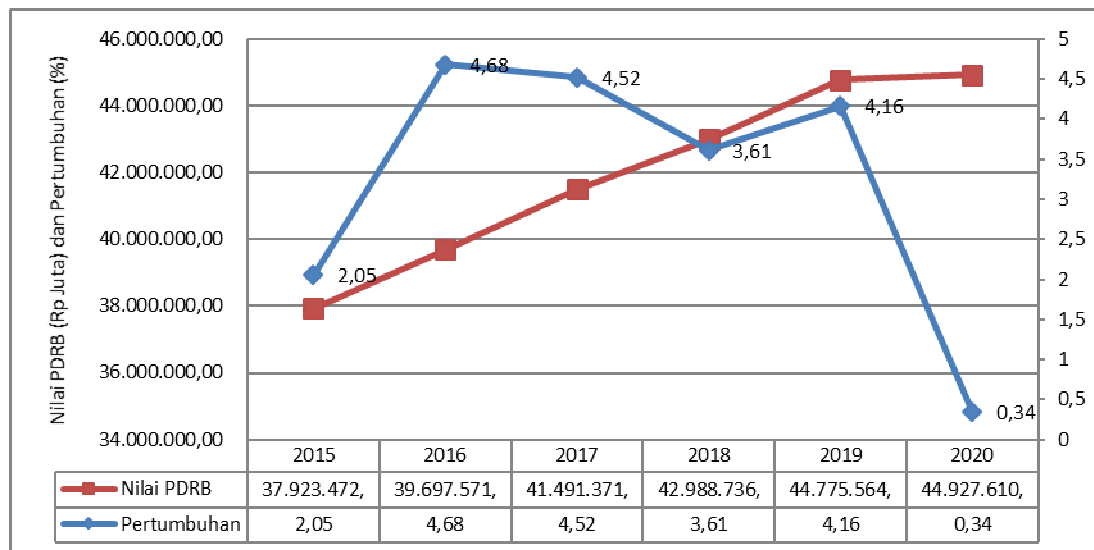
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita harga konstan tahun 2010, indeks ketimpangan Williamson, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan.

a. Pertumbuhan PDRB

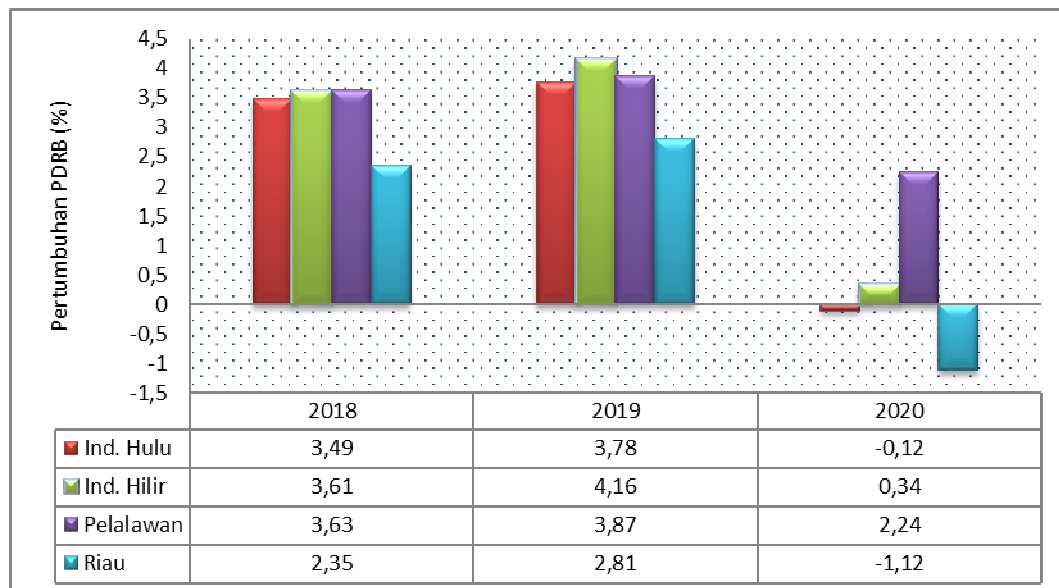
Selama periode 2015 – 2020, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga konstan dengan tren meningkat. Namun pertumbuhan PDRB ini memiliki tren berfluktuatif menurun. Penurunan pertumbuhan PDRB secara signifikan pada tahun 2020 terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah sebagai upaya dari meminimalisir penyebaran virus. Kondisi ini berdampak besar pada permintaan barang dan jasa karena masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.3.
Perkembangan Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2020

Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir lebih baik dibanding Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau. Pada tahun 2020, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Hanya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 0,34% dan 2,24%. Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,12% dan minus 1,12%. Kabupaten Indragiri Hilir masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi 46,78% terhadap PDRB. Sedangkan Kabupaten Pelalawan ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masing – masing sebesar 48,65% dan 40,62%.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.4.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2018 - 2020

Selama periode 2016 - 2020, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan tren kontribusinya semakin menurun yaitu dari 48,09% pada tahun 2015 menjadi 44,76% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 46,78% pada 2020. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menurun namun kontribusi pertanian yang besar telah menyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian yang seharusnya diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Namun kenyataannya kontribusi industri pengolahan berfluktuatif menurun yaitu dari 24,48% pada tahun 2016 menurun menjadi 23,59% pada tahun 2019. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemunduran dalam transformasi ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri.

Tabel 2.9.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2020

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,09	48,03	44,74	44,68	46,78
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,83	1,97	0,96	0,79
C	Industri Pengolahan	24,82	24,48	24,11	23,59	24,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	5,34	5,57	6,12	6,27	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,12	15,50	16,91	17,53	16,14
H	Transportasi dan Pergudangan	1,09	1,08	1,14	1,15	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,44	0,48	0,47	0,38
J	Informasi dan Komunikasi	0,55	0,56	0,61	0,64	0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,55	0,60	0,59	0,58
L	Real Estat	0,78	0,80	0,86	0,88	0,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,0029	0,003	0,0034	0,0035	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	1,85	1,73	1,78	1,76	1,66
P	Jasa Pendidikan	0,56	0,56	0,61	0,63	0,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,14	0,15	0,16	0,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,43	0,46	0,52	0,53	0,42
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Selama periode 2016 – 2020, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan konstruksi yang merupakan lapangan usaha terbesar ketiga dan keempat pembentuk Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir. Relatif terbatasnya sumber - sumber lapangan usaha yang hanya

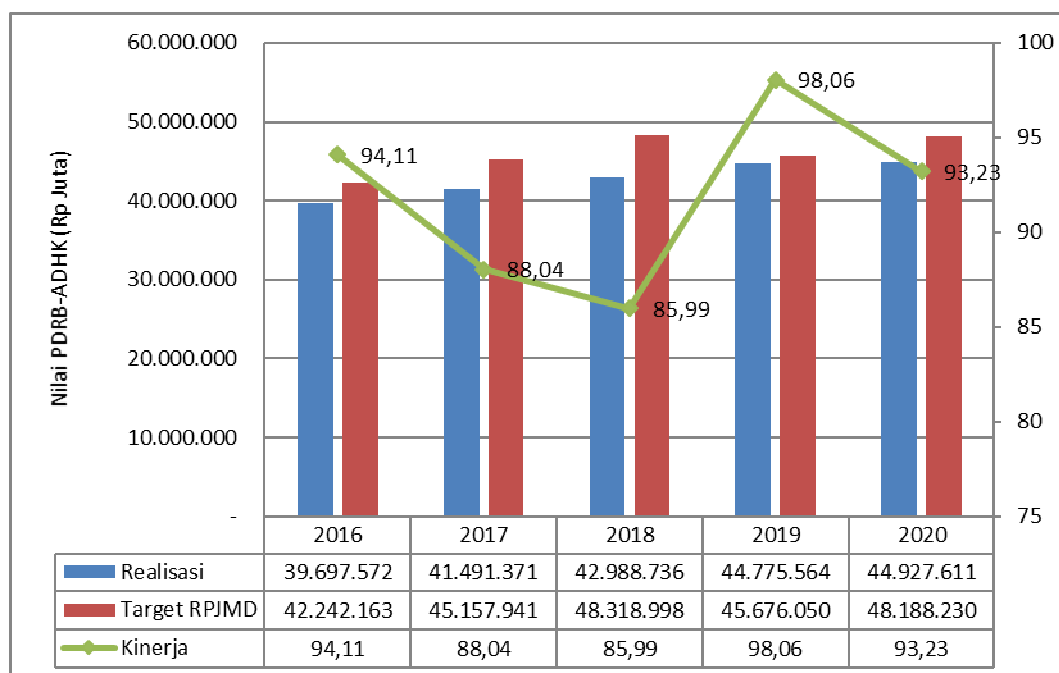
mengandalkan pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi maka dipandang perlu upaya - upaya mengerakkan lapangan usaha potensial yang belum tersentuh dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam pembentukan PBRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.10.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,71	3,64	2,04	4,00	3,49
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	43,54	47,89	0,45	-7,75
C	Industri Pengolahan	4,33	3,73	3,22	4,28	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,84	4,33	6,40	0,28	6,89
E	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	15,71	-1,90	1,62	0,40
F	Konstruksi	6,26	6,66	4,04	4,87	-3,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	7,12	6,90	4,87	-8,30
H	Transportasi dan Pergudangan	4,77	3,88	2,16	2,23	- 18,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	6,79	4,51	2,54	- 17,99
J	Informasi dan Komunikasi	6,07	6,57	5,42	6,81	8,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,46	-2,87	3,88	0,17	1,63
L	Real Estat	5,29	5,84	4,31	6,03	0,95
M,N	Jasa Perusahaan	6,47	8,03	9,10	2,67	- 20,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	0,37	1,60	0,72	1,18	-3,29
P	Jasa Pendidikan	5,41	3,46	5,87	4,64	1,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,90	0,92	6,30	9,96	12,36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,90	9,13	8,61	6,06	- 20,66
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	4,68	4,56	3,61	4,19	0,34

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dari pertumbuhannya yang tinggi dari rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 melanda, lapangan usaha jasa perusahaan dan jasa lainnya mengalami kontraksi cukup dalam yaitu 20,83% dan 20,66%. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 12,36%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan pembatasan interaksi yang diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah juga dilakukan secara daring. Lapangan usaha ini adalah sektor perlu mendapat perhatian, namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi prioritas utama.

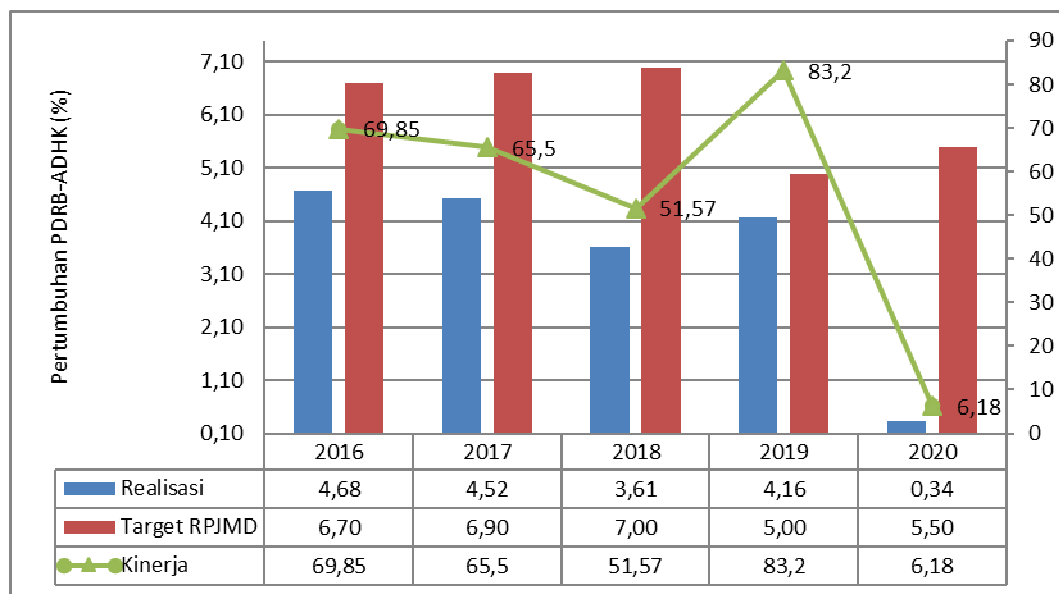


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.5.

Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 42.242.163 (juta) pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp 48.318.997 (juta) pada tahun 2018. Kemudian target RPJMD untuk tahun 2019 dan 2020 disesuaikan menjadi Rp 45.676.050 (juta) dan Rp 48.188.230 (juta), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023. Realisasi nilai PDRB tahun 2016 sebesar Rp 39.697.572 (juta) dan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34% maka nilai PDRB 2020 Rp 44.927.611 (juta). Realisasi kinerja selama periode 2016 - 2020 berkisar antara 85,99% - 98,06% yang terkategori dari Tinggi - Sangat Tinggi. Selama periode 2014 - 2018, rata-rata kinerja indikator nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 92,40% yang terkategori Sangat Baik.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.6.

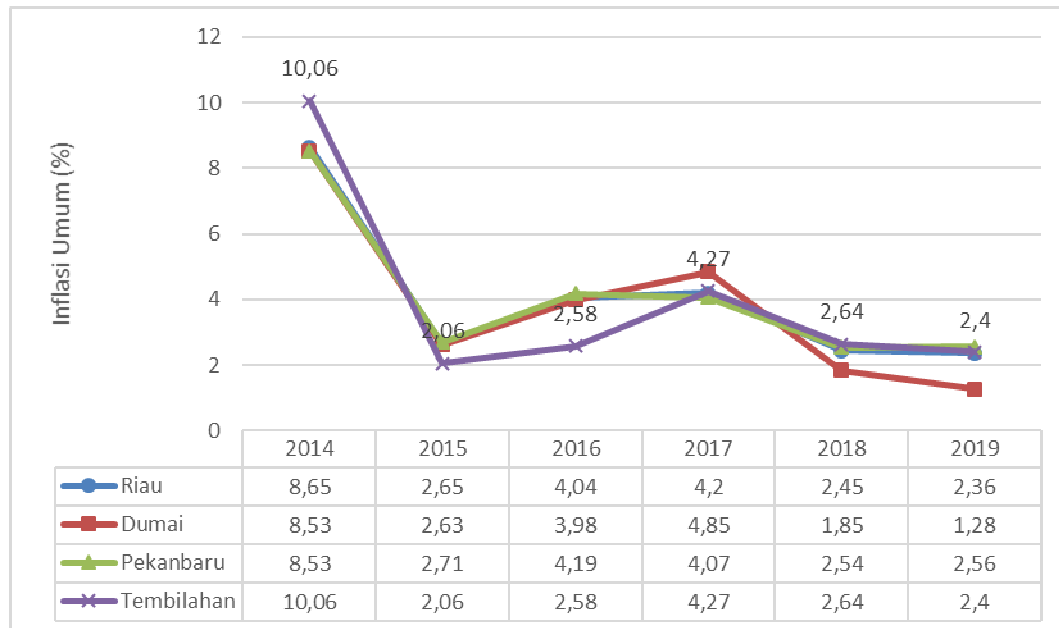
Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan ditargetkan berkisar antara 5,00% hingga 7,00%. Pada tahun 2016 - 2018, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK

Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami penurunan dari 4,68% - 3,61%. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mulai pulih sehingga realisasi kinerja nya juga meningkat dengan sebesar 83,20% yang terkategori Sedang. Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat dari pandemi COVID-19 menjadi 0,34% dengan realisasi kinerja hanya 6,18%.

b. Inflasi

Selama periode 2014 - 2019, inflasi di Tembilahan - Indragiri Hilir berada terkategori inflasi ringan, kecuali tahun 2014 yang terkategori inflasi sedang. Bila dibandingkan daerah lain, secara umum inflasi di Tembilahan relatif lebih rendah. Pada tahun 2014, yang merupakan inflasi tertinggi pada periode ini, dimana andil inflasi menurut kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran bahan makanan (15,64%) diikuti transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (10,97%) dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (9,14%). Pada tahun 2017, andil inflasi menurut kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberi andil sebesar 2,84% diikuti pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,38%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,32%). Oleh karena itu, untuk lebih menjaga agar inflasi di Indragiri Hilir tetap rendah dengan kategori inflasi ringan maka kelompok pengeluaran bahan makanan; transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar perlu menjadi perhatian khususnya dalam hal kelancaran distribusinya.

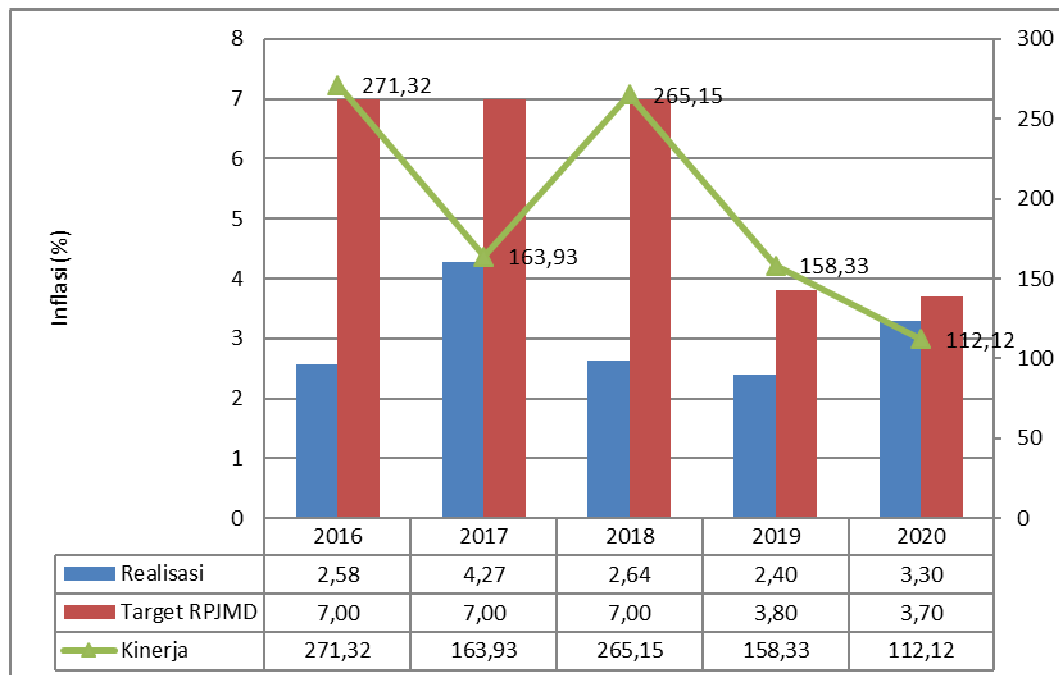


Sumber: BPS Prov. Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2020)

Gambar 2.7.

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2014 – 2019

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,0% serta untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar 3,80% dan 3,70% yang masih terkategori inflasi ringan. Selama periode 2016 – 2020, inflasi di Indragiri Hilir berkisar antara 2,40% - 4,27%. Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja umumnya terkategori sangat tinggi.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.8.

Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

c. PDRB Per kapita

Selama periode 2015 – 2019, PDRB atas dasar harga konstan per kapita Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2015, PDRB per kapita sebesar Rp 53,89 juta per kapita/tahun meningkat menjadi Rp 60,48 juta per kapita/tahun pada tahun 2019. PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu maupun PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan. Selama periode 2015 – 2019, meski nilai PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terkecil namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dibanding Indragiri Hulu maupun Pelalawan. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita meningkat sebesar 2,33% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya sebesar 1,42% per tahun dan Pelalawan yang pertumbuhannya -1% per tahun.

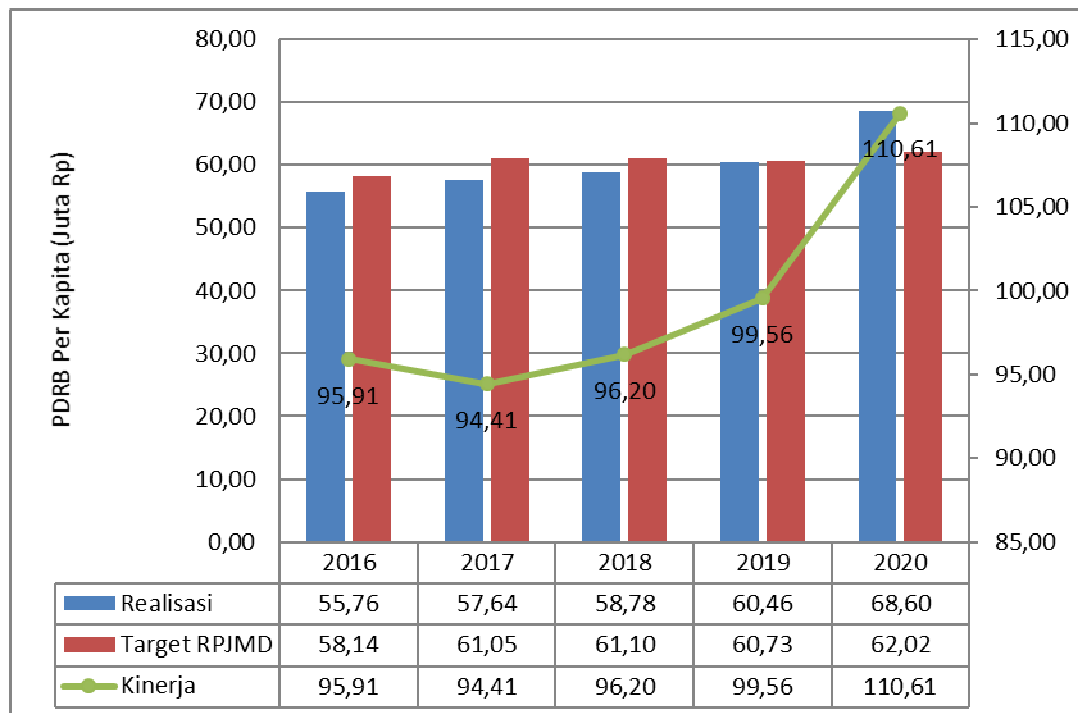


Sumber: BPS Prov. Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2020)

Gambar 2.9.

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan Tahun 2015 - 2019

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditargetkan PDRB per kapita harga konstan tahun 2016 sebesar Rp 58,14 juta/kap/tahun, meningkat menjadi Rp 61,10 juta/kap/tahun pada tahun 2018. Kemudian untuk tahun 2019 disesuaikan menjadi 60,73 juta/kap/tahun dan sebesar 62,02 juta/kap/tahun pada tahun 2020 sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi PDRB per kapita tahun 2016 - 2020 berkisar antara Rp 55,76 juta/kap/tahun – Rp 62,02 juta/kap/tahun. Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja PDRB per kapita terkategori sangat tinggi.



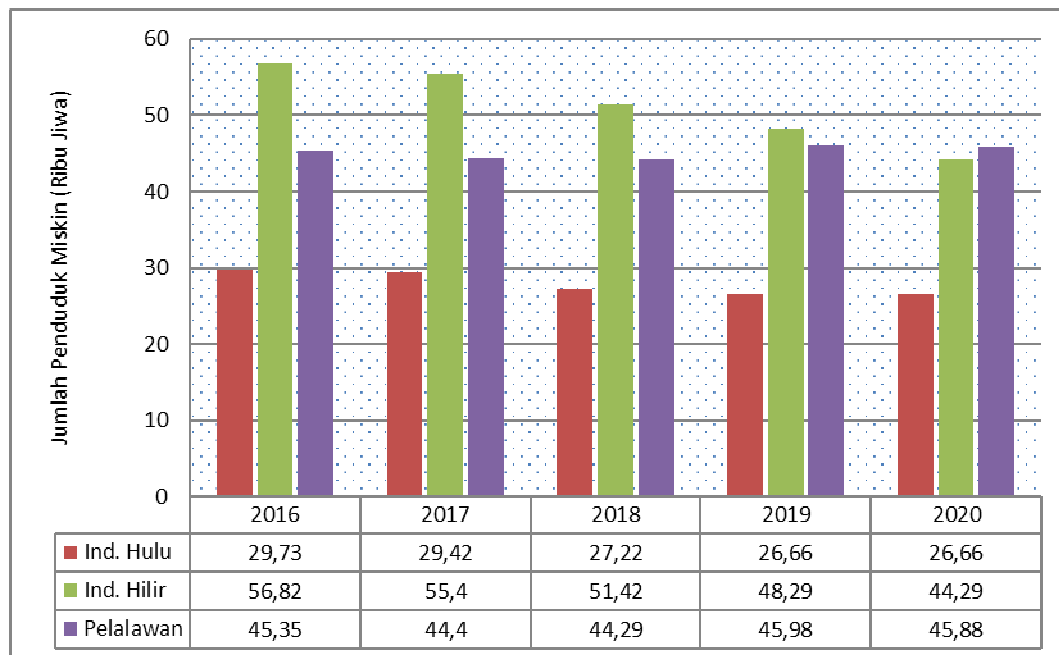
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.10.

Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

d. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 – 2019 memiliki tren menurun. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir sebanyak 56,85 ribu jiwa, menurun menjadi 48,29 ribu jiwa tahun 2019. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang tertinggi dibanding dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten sekitarnya. Selama periode 2015 – 2019, rata-rata pertumbuhan penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir menurun sebesar 3,2% per tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dengan rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin selama periode 2015 – 2019 sebesar 3,4% per tahun.

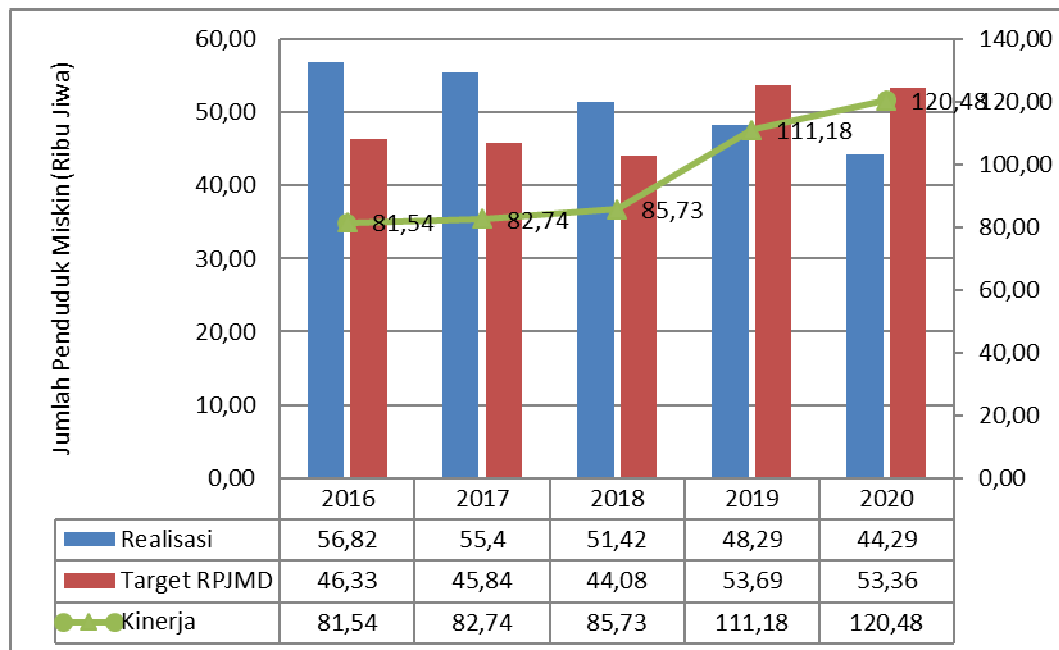


Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.11.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 46,33 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi 44,08 ribu jiwa pada tahun 2018, dan disesuaikan dengan target pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 target untuk tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 53,69 dan 53,36 ribu jiwa. Selama periode 2016 – 2020, realisasi jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir menurun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir berjumlah 44,29 ribu jiwa sehingga capaian kinerja sebesar 120,48% dan terkategori Sangat Tinggi.

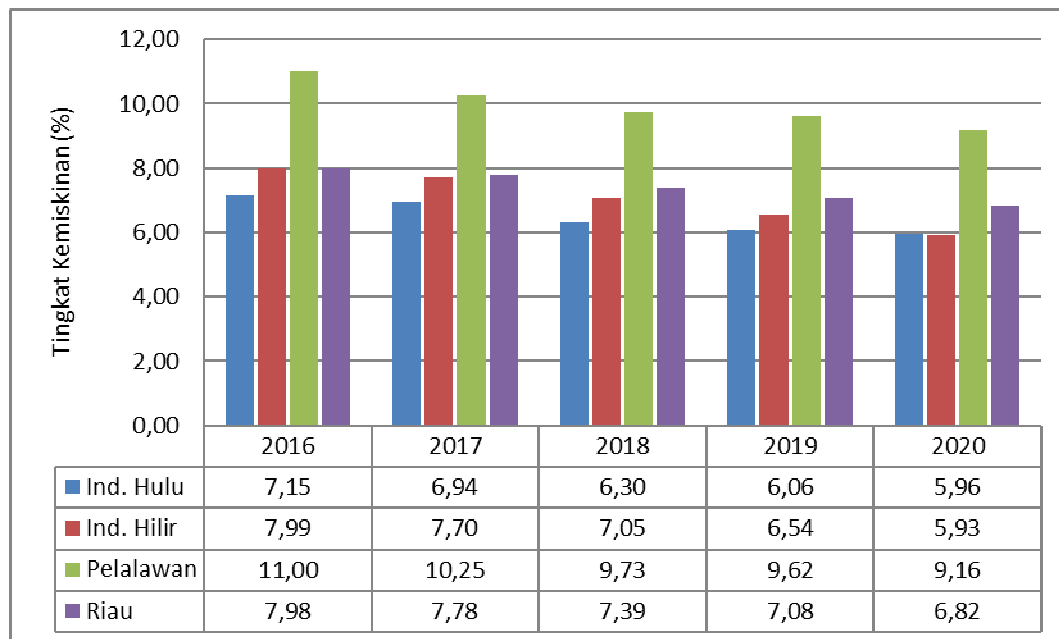


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.12.

Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir dan persentase kemiskinan memiliki tren berfluktuatif menurun. Selama periode 2016 – 2020, persentase kemiskinan atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 7,99% pada tahun 2016, turun menjadi 5,93% pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan penurunannya sebesar - 7,74% per tahun. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Indragiri Hilir ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau yaitu 6,82%.

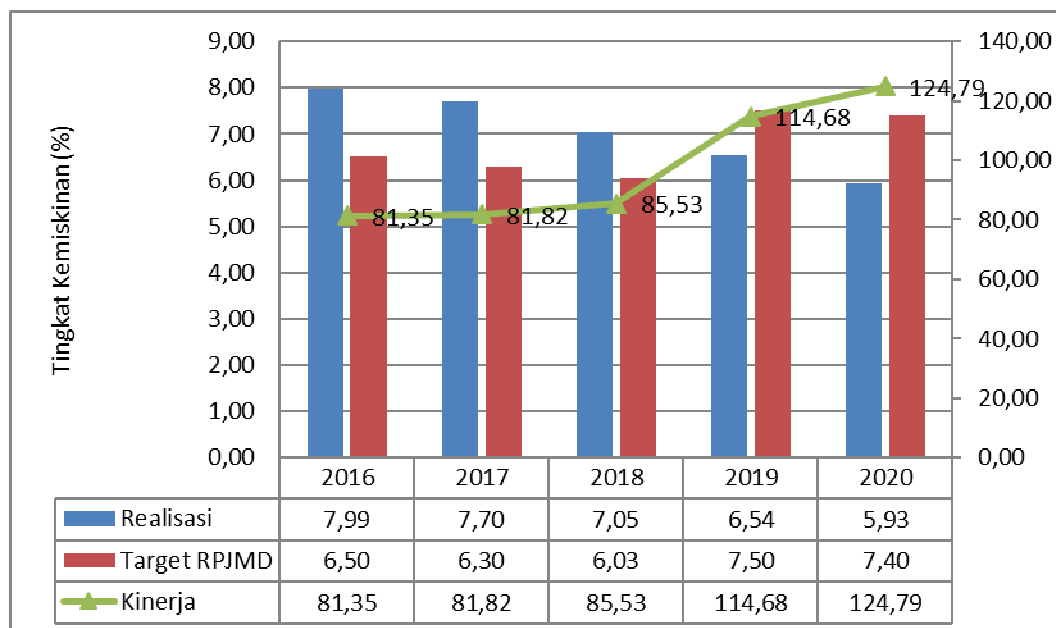


Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.13.

Perkembangan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Sejalan dengan perkembangan realisasi jumlah penduduk miskin, dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan persentase kemiskinan di Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 6,50% dan menurun menjadi 6,03% pada tahun 2018. Target persentase kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023 adalah 7,50% dan 7,40%. Realisasi persentase kemiskinan tahun 2016 sebesar 7,99%, lebih tinggi dibanding target dengan realisasi kinerja sebesar 81,35% dan terkategori tinggi. Pada periode 2017 – 2020, realisasi persentase kemiskinan meningkat dibanding tahun 2016 dengan realisasi kinerja berada pada kisaran antara 81,82% - 124,79% dan terkategori tinggi – sangat tinggi.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.14.

Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

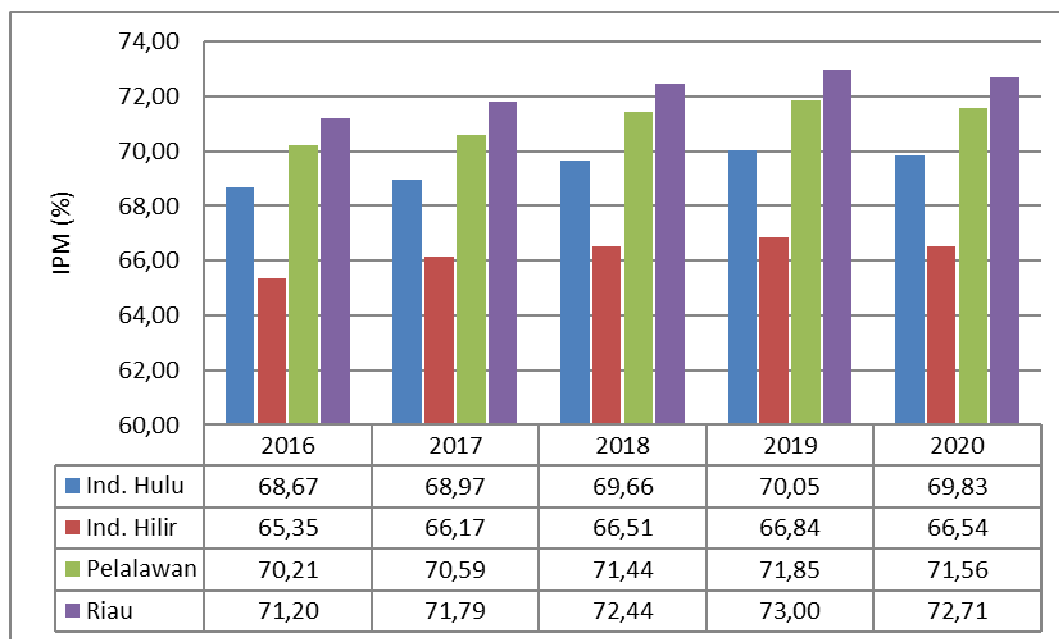
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial menganalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, APK SD/MI, APK SMP/MTs, angka harapan hidup, prevalensi balita gizi buruk dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

a. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2016 - 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat. Tahun 2016, IPM Indragiri Hilir sebesar 65,35 meningkat menjadi 66,84 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, IPM Kabupaten Indragiri Hilir mengalami sedikit penurunan menjadi 66,54. Pada periode 2016 - 2020, capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir yang berkisar antara 65,35 - 66,84 termasuk dalam kelompok dengan kategori "Sedang". Selama periode 2016 - 2020, capaian IPM Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan IPM Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau. IPM Kabupaten Pelalawan yang

sudah diatas 70 pada tahun 2016, bersama Provinsi Riau, termasuk dalam kelompok capaian IPM dengan kategori “Tinggi”. Dari Keempat komponen pembentuk IPM yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita, semua nilainya berada dibawah nilai kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan IPM Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,45% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.



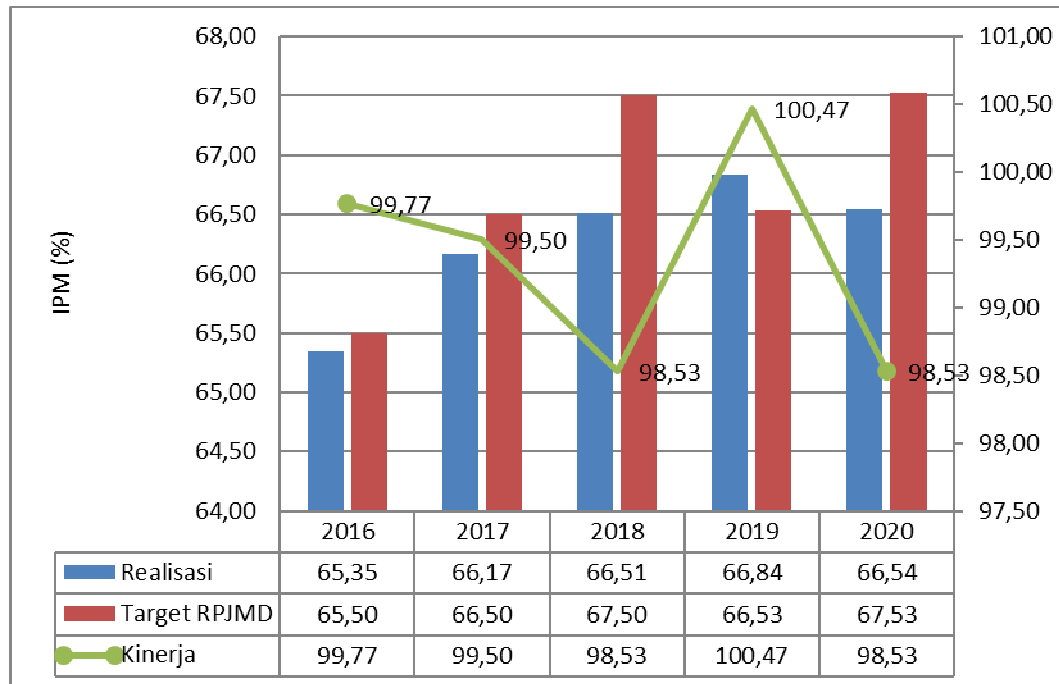
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.15.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan capaian IPM yaitu sebesar 65,50 pada tahun 2016, meningkat menjadi 67,50 % pada tahun 2018. Selama periode 2016 – 2017, capaian IPM Indragiri Hilir mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerjanya berkisar antara 99,50% - 99,77% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019, capaian IPM Indragiri Hilir sebesar 66,84% melampaui target yang telah ditetapkan sehingga

kinerjanya sebesar 100,47% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun, pada tahun 2020, realisasi kinerja IPM mengalami penurunan menjadi 66,54, dengan kinerja sebesar 98,53%. Capaian kinerja IPM ini harus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode pembangunan berikutnya.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

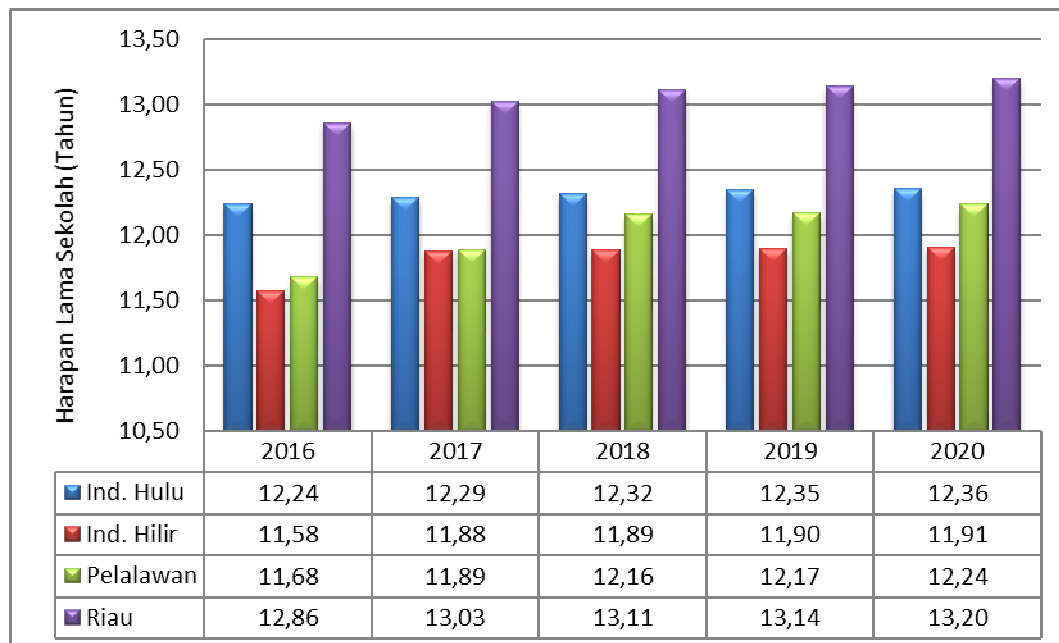
Gambar 2.16.

Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

b. Harapan lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 2016 - 2020, HLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Namun bila dibandingkan dengan kondisi pembangunan pendidikan dengan Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau memperlihatkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir adalah yang terendah sehingga perlu dilakukan percepatan dimasa yang akan datang. Selama periode 2016 -

2020, rata-rata pertumbuhan HLS Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0.99% per tahun.

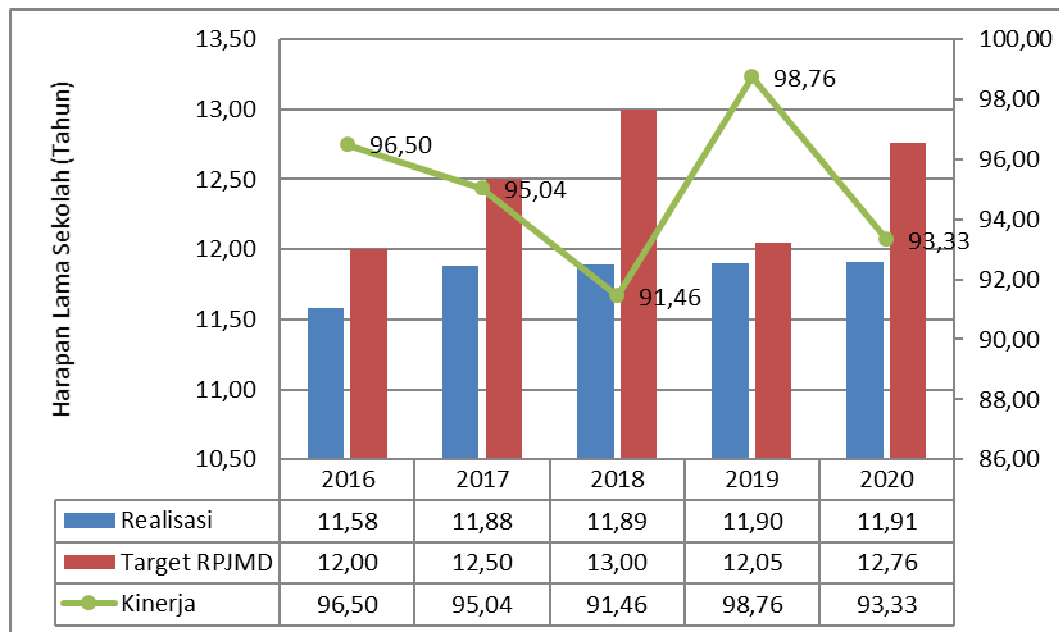


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.17.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan HLS dengan tren meningkat dari 12,00 pada tahun 2016 menjadi 13,00 tahun pada tahun 2018. Realisasi HLS trennya meningkat meski dengan slope yang lebih rendah dibanding slope target, ditambah dengan target yang terus meningkat maka capaian kinerja terus menurun. Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator HLS sebesar 96,50% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2016 hingga 2018 terus menurun dimana pada tahun 2018 mencapai 91,46 meski masih terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023 adalah 12,76 dan terealisasi sebesar 11,91 dengan capaian kinerja 93,33%.



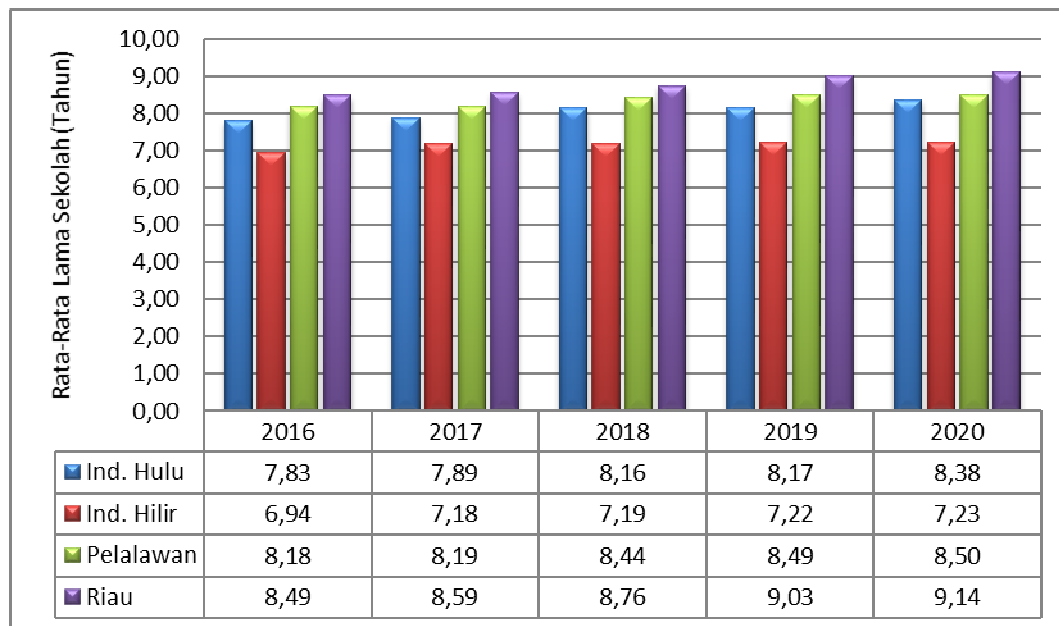
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.18.

Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selama periode 2016 - 2020, RLS kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat meski dengan slope yang hampir datar. Posisi RLS kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi yang terendah dibandingkan dengan RLS kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau, sehingga kondisi ini perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan bidang pendidikan periode berikutnya. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,44% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten tetangga (Indragiri Hulu 1,10% per tahun dan Pelalawan 0,97% per tahun), meski lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan RLS Provinsi Riau (1,61% per tahun).



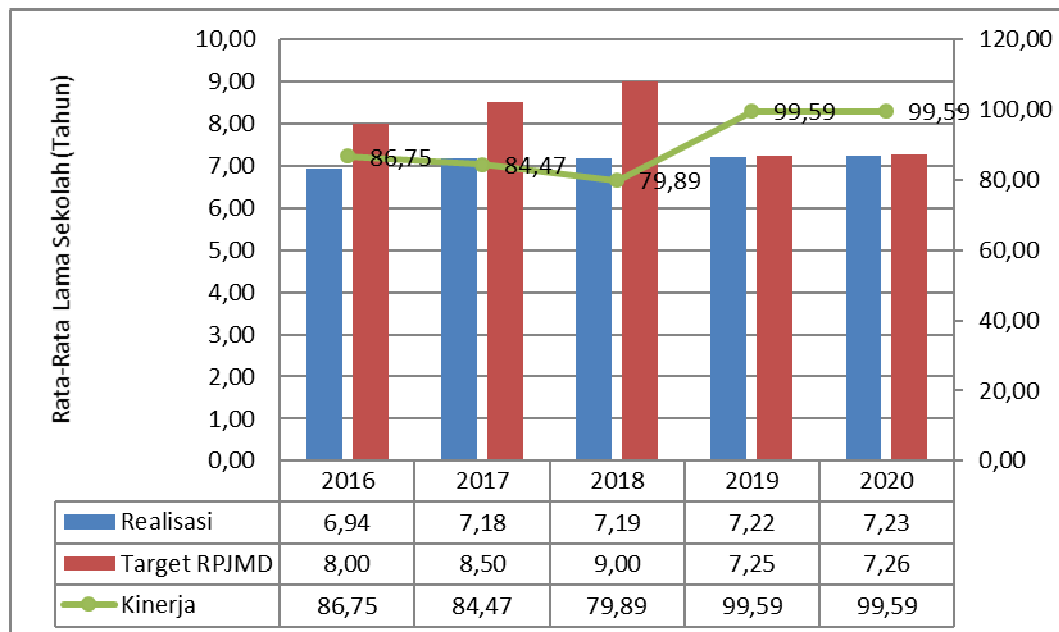
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.19.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan bahwa RLS terus meningkat yaitu dari 8,00 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,00 tahun pada tahun 2018. Realisasi RLS meningkat dari 6,94 tahun pada tahun 2016 menjadi 7,18 tahun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 hanya meningkat menjadi 7,19. Pada tahun 2020, realisasi RLS meningkat menjadi 7,23 tahun. Capaian RLS hingga tahun 2020 ini masih dibawah Wajib Belajar 9 tahun, dalam artian, rata – rata penduduk Kabupaten Indragiri Hilir hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bila dianalisis dari capaian kinerja, kondisinya menunjukkan bahwa RLS kabupaten Indragiri Hilir trennya terus menurun hingga tahun 2018, kemudian kembali meningkat tahun 2019 seiring telah diturunkannya target yang akan dicapai. Pada periode 2016 – 2018, realisasi kinerjanya terus menurun dari 86,75% pada tahun 2016 menjadi 79,89% pada tahun 2018 yang semua terkategori tinggi. Kemudian realisasi kinerja kembali membaik hingga mencapai 99,56% pada tahun 2019, yang terkategori sangat tinggi. Relatif rendahnya RLS

dan masih dibawah wajib belajar 9 tahun, harus menjadi perhatian dan prioritas pada pembangunan periode berikutnya.



Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

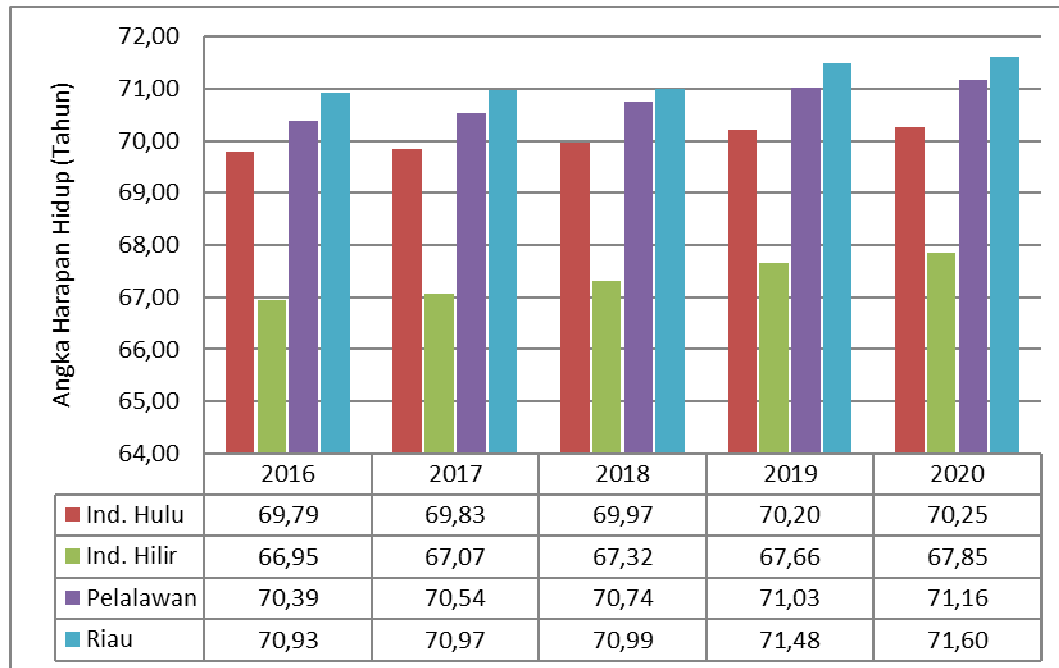
Gambar 2.20.

Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

d. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Selama periode 2016 – 2020, AHH kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 66,95 tahun pada tahun 2016 menjadi 67,85 tahun pada tahun 2020. Capaian AHH kabupaten Indragiri Hilir ini adalah yang terendah dibanding capaian AHH Kabupaten Indragiri Hulu (70,25 tahun) dan Pelalawan (71,16 tahun) serta Provinsi Riau (71,60 tahun). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan AHH kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,24% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan UHH Kabupaten Indragiri Hulu (0,13% per tahun) dan Pelalawan (0,23% per

tahun) serta Provinsi Riau (0,20% per tahun). Posisi AHH Kabupaten Indragiri Hilir yang terendah dibanding capaian AHH kabupaten sekitarnya perlu menjadi dorongan untuk dilakukan percepatan pada pembangunan bidang kesehatan pada periode berikutnya.



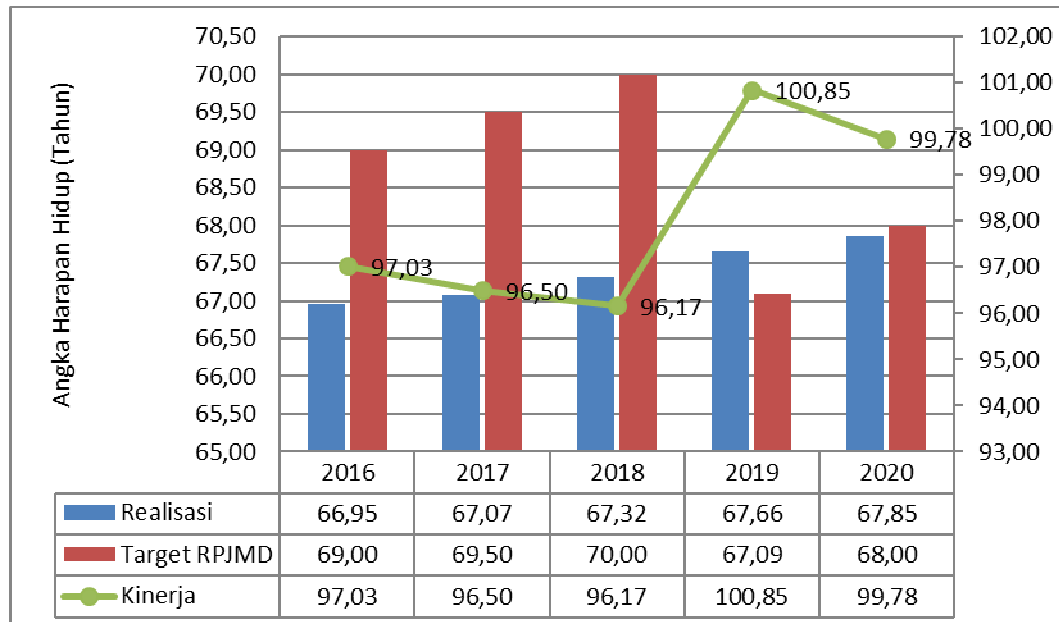
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.21.

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan AHH dengan tren meningkat yaitu dari 69,00 tahun pada tahun 2016 menjadi 70 tahun pada tahun 2018. Meski realisasi capaian AHH terus meningkat yaitu dari 66,95 tahun pada tahun 2016 menjadi 67,32 tahun 2018, namun peningkatan target jauh lebih tinggi sehingga realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2014 , realisasi kinerja sebesar 98,43% yang terkategori sangat tinggi, menurun realisasi kinerja menjadi 96,17% pada tahun 2018 yang kategori capaiannya masih sangat tinggi. Namun, pada tahun 2020, target telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023 menjadi 68,00 tahun, sehingga realisasi kinerja meningkat menjadi 99,78%. Meski capaian

kinerja terkategori tinggi namun dengan posisi AHH yang terendah dibanding AHH Kabupaten sekitarnya yang menggambarkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah sehingga perlu menjadi perhatian serius pada pembangunan periode berikutnya.



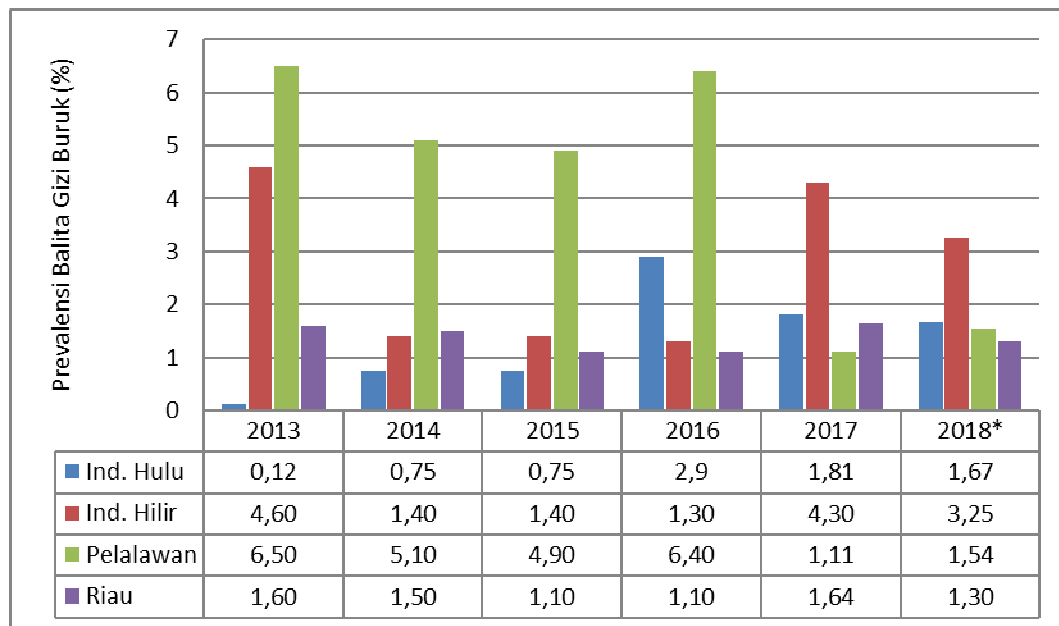
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.22.

Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

e. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi yang didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Parameter berat badan /tinggi badan berdasarkan z score, dimana gizi buruk (sangat kurus) yaitu $< - 3$ SD. Selama periode 2013 - 2016, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Indragiri Hilir menurun terus menerus yaitu dari 4,60% pada tahun 2013 menjadi 1,3% pada tahun 2016. Capaian penurunan prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Indragiri Hilir ini tahun 2016, relatif lebih baik bila dibandingkan capaian prevalensi gizi buruk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun demikian, capaian prevalensi balitas gizi buruk Kabupaten Indragiri Hilir relatif lebih rendah dibanding capaian Provinsi Riau.

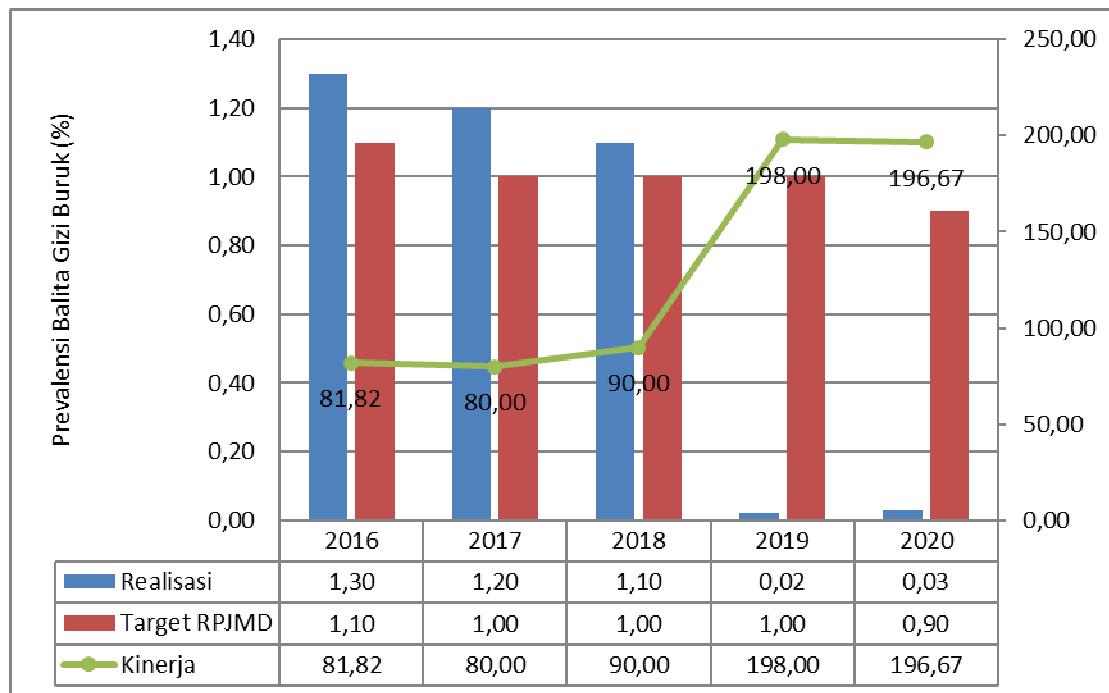


Sumber: Dinas kesehatan Provinsi Riau (2019)

Gambar 2.23.

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2013 – 2018

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa target prevalensi balita gizi buruk menurun dari 1,00% pada tahun 2019 menjadi 0,90% pada tahun 2020. Realisasi capaian prevalensi balita gizi buruk berfluktuatif menurun dari 1,30% pada tahun 2016 menjadi 1,10% pada tahun 2018 dengan realisasi kinerja berkisar antara 80,% - 90,00% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2019, prevalensi balita gizi buruk menurun sangat signifikan menjadi 0,02%, dengan realisasi kinerja mencapai 198%. Pada tahun 2020, prevalensi balita gizi buruk mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,03% dengan realisasi kinerja menjadi 196,67% yang juga terkategori sangat tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

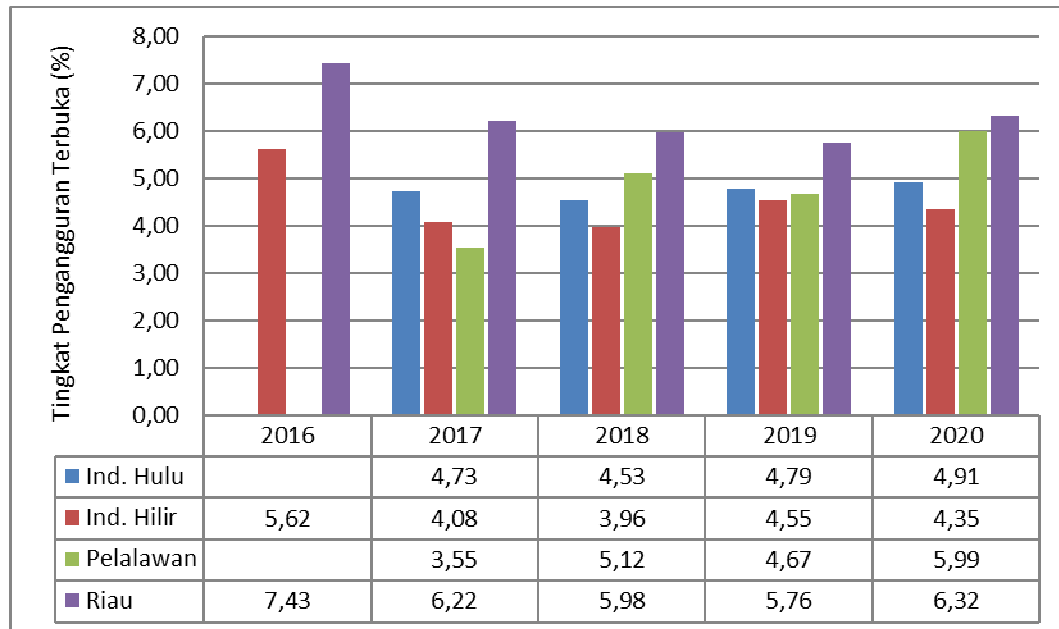
Gambar 2.24.

Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 – 2020

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Selama periode 2016 - 2020, TPT Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yang bermakna kuantitas dan tingkat pengangguran menurun. Pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hilir sebesar 5,62%, meningkat menjadi 3,96% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 4,55% pada tahun 2019, kemudian kembali menurun menjadi 4,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2018, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir (4,08%) adalah yang terendah dibanding TPT Provinsi Riau (6,20%) dan Indragiri Hulu (4,70%) serta Pelalawan (5,30%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan TPT Kabupaten Indragiri Hilir

meningkat sebesar 1.86% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan TPT kabupaten Indragiri Hulu sebesar 3,86% per tahun. Namun, Provinsi Riau lebih baik dengan TPT yang terus mengalami penurunan rata - rata sebesar 1,59% per tahun.

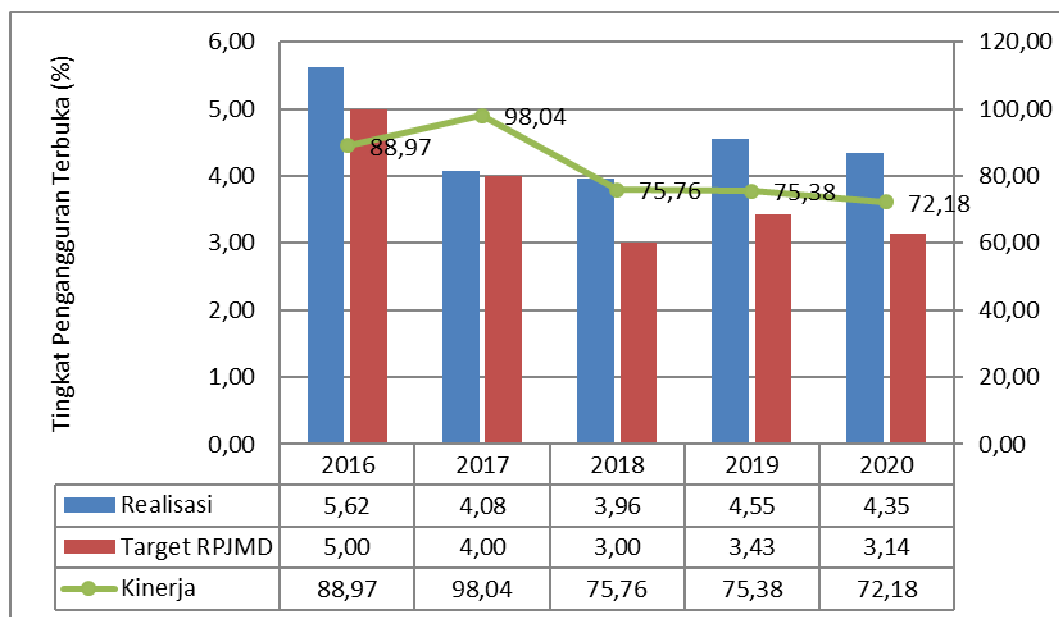


Sumber: BPS Prov. Riau (2021)

Gambar 2.25.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan TPT Kabupaten Indragiri Hilir dengan tren menurun yaitu dari 5,00% pada tahun 2016 menjadi 3,0% pada tahun 2018. Realisasi TPT yang berfluktuatif meningkat dan target yang semakin menurun menjadikan realisasi kinerja memiliki tren menurun. Pada tahun 2016 dengan realisasi kinerja sebesar 88,97% dan terkategori Tinggi, meningkat menjadi 98,04% pada tahun 2017, yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019, realisasi TPT Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami penurunan menjadi 3,96% dengan kinerja sebesar 75,76% pada tahun 2017 dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,55% dengan realisasi kinerja sebesar

75,38% yang terkategori Sedang. Tahun 2020, realisasi TPT semakin meningkat menjadi 4,35%, meskipun target RPJMD tahun 2019 telah dinaikkan menjadi 3,14%, hal ini mengakibatkan kinerja menjadi kian memburuk yaitu sebesar 72,18% yang terkategori sedang. Kondisi TPT yang berfluktuatif meningkat dengan capaian kinerja yang cenderung menurun ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan periode berikutnya.



Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.26.

Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

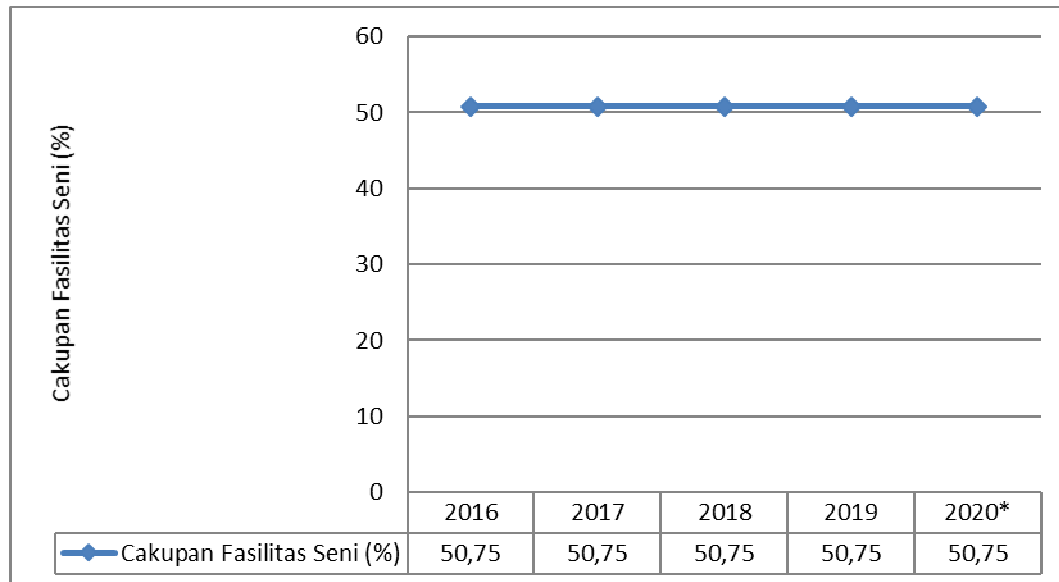
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari seni budaya yang direpresmentasikan dari cakupan fasilitasi seni dan olahraga yang direpresentasikan dari jumlah lapangan olahraga.

a. Seni Budaya

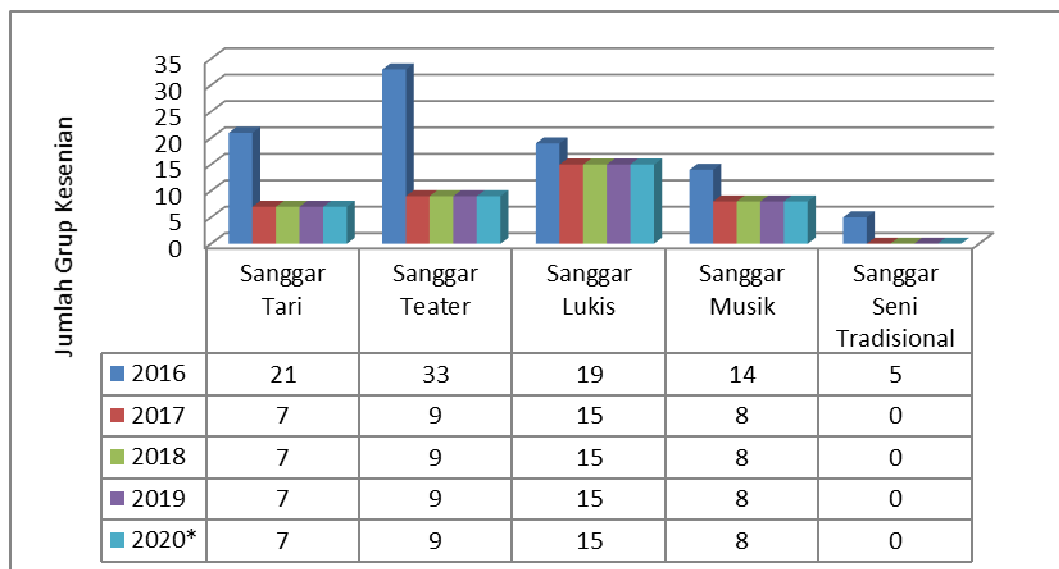
Selama periode 2016 – 2020, perkembangan fasilitasi seni budaya oleh pihak terkait relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti. Fasilitasi seni budaya yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan -

kegiatan seni budaya yang telah dilakukan sebelumnya seperti festival bakaroh, sampan, menongkah, seribu telur dan karnaval budaya. Padahal masih banyak seni budaya Indragiri Hilir yang perlu diangkat sehingga akan dapat menjadi daya tarik wisata ke Indragiri Hilir.



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

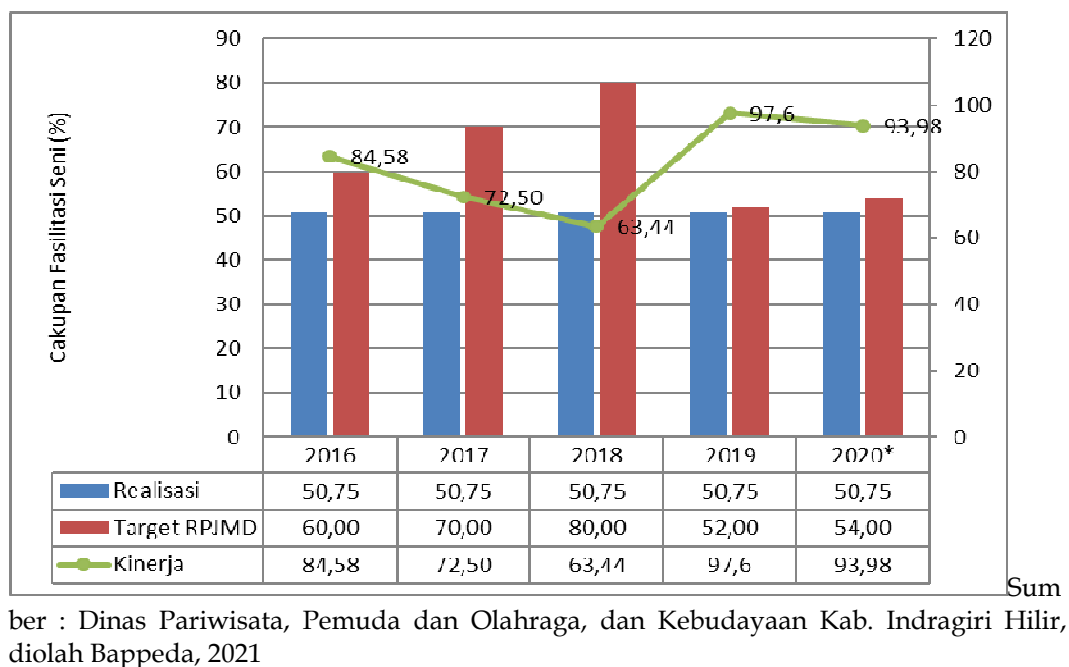
Gambar 2.27.
Perkembangan Cakupan Fasilitas Seni Budaya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.28.
Perkembangan Group kesenian di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

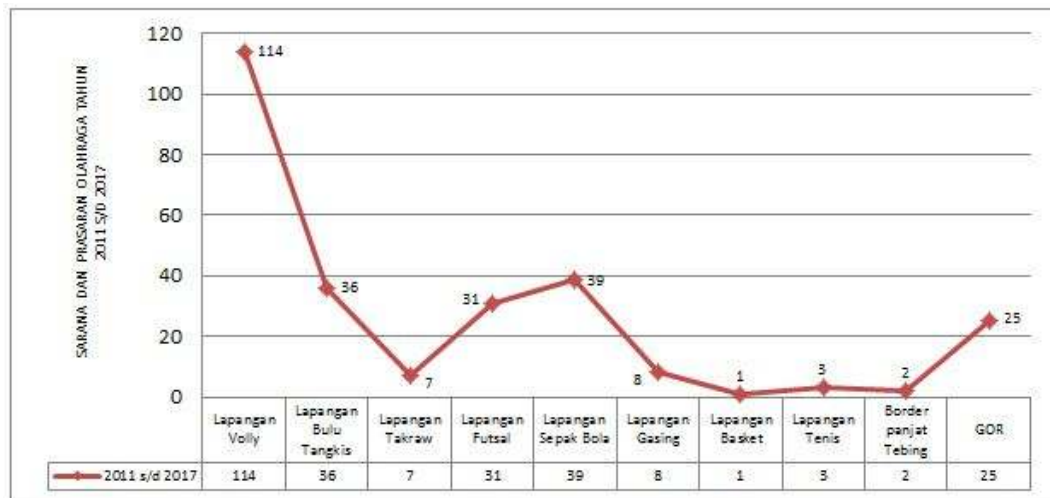
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan bahwa cakupan fasilitasi seni pada tahun 2016 sebesar 60% meningkat menjadi 80% pada tahun 2018. Realisasi cakupan fasilitasi seni stagnan sebesar 50,75%. Target RPJMD terhadap cakupan fasilitasi seni terus meningkat dan disisi lain realisasi tetap sebesar 50,75% maka realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2016 sebesar 84,58% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2018 menurun menjadi 63,44% dan terkategori sedang. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, realisasi kinerja meningkat menjadi 97,60% kemudian kembali menurun menjadi 93,98% seiring dengan penurunan target yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023. Alasan tidak tersedianya dana untuk fasilitasi cakupan seni adalah hal yang paling menonjol disamping alasan lain seperti keterbatasan sumberdaya manusianya. Kedepan, dalam upaya menarik wisatawan ke Indragiri Hilir dan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau, perlu upaya peningkatan kinerja cakupan fasilitasi seni di Kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 2.29.
Kinerja Indikator Cakupan Fasilitasi Seni Budaya
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

b. Olahraga

Selama periode 2013 – 2016, perkembangan penyediaan lapangan olahraga sebagai representasi perkembangan pembinaan olahraga di Indragiri Hilir memiliki tren terus meningkat. Pada tahun 2013, jumlah lapangan olahraga (sepakbola, volly, badminton, tenis, takraw, futsal dan lainnya) meningkat dari 913 unit menjadi 961 unit pada tahun 2016. Selama periode ini, rata - rata pertumbuhan jumlah lapangan olahraga meningkat sebesar 1,18% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Indragiri Hilir 0,66% per tahun. Kondisi ini cukup menggembirakan yang menggambarkan bahwa penduduk Indragiri Hilir memiliki animo yang tinggi berolahraga. Namun hal yang penting dalam pembinaan olahraga adalah melakukan olahraga prestasi yang menghasilkan atlet - atlet berkaliber juara Provinsi Riau dan Nasional atau bahkan juara internasional.

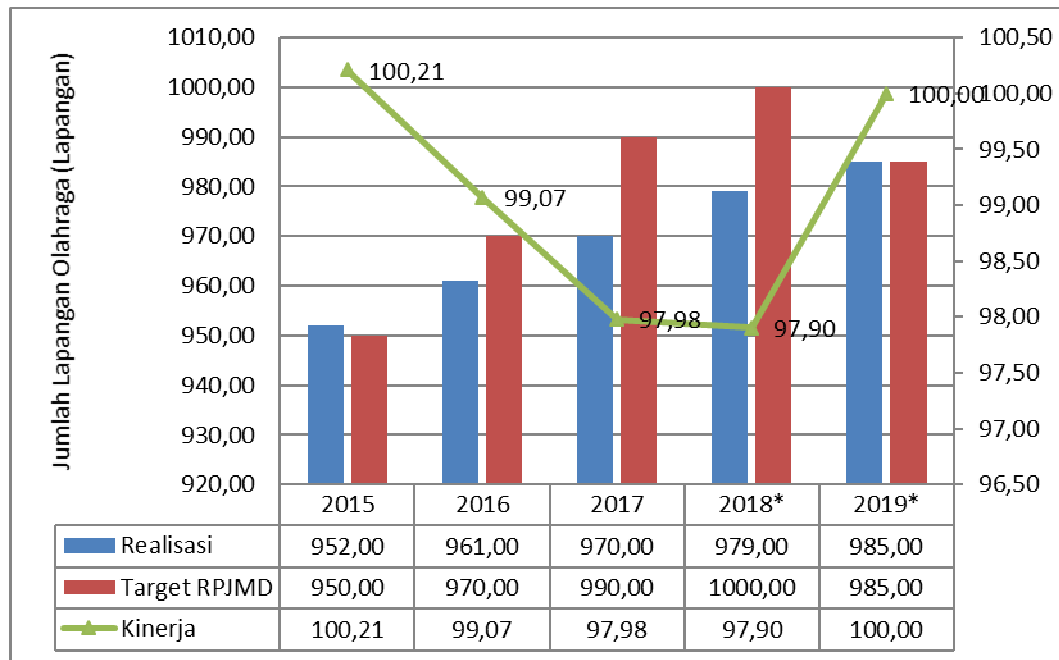


Gambar 2.30.

Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa jumlah lapangan olahraga menjadi indikator kinerja daerah. Pada tahun 2015 telah ditargetkan jumlah lapangan olahraga sebanyak 950 unit, meningkat menjadi 1000 unit pada tahun 2018. Realisasi jumlah lapangan

olahraga sedikit dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 97,90% - 100,21% yang semuanya terkategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja indikator ini seharusnya diikuti dengan pembinaan yang mengarah kepada pembinaan atlet - atlet berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Upaya pembinaan atlet - atlet berprestasi ini perlu menjadi perhatian pada pembangunan ke depan.



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2020

Gambar 2.31.

Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri 4 layanan yaitu (i) layanan urusan wajib dasar, (ii) layanan urusan wajib non dasar, (iii) layanan urusan pilihan dan (iv) urusan penunjang.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar terdiri dari 6 urusan dasar yaitu (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv)

perumahan rakyat dan pemukiman, (v) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan (vi) sosial.

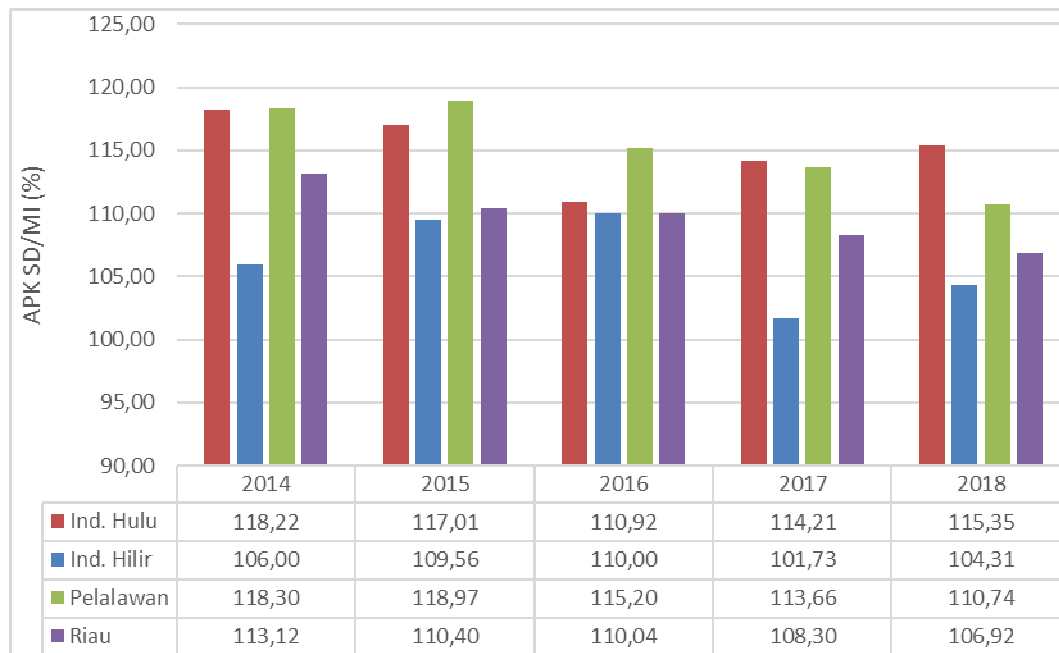
a. Pendidikan

Layanan urusan wajib dasar bidang urusan pendidikan dianalisis melalui indikator kinerja (a) Angka Partisipasi Kasar (APK), (b) Angka partisipasi murni (APM), (c) Angka partisipasi sekolah (APS), (d) Angka putus sekolah, (e) Rasio ketersediaan sekolah, (f) Rasio guru terhadap Murid dan (g) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

- Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK yang dibahas terdiri dari APK SD/MI dan APK SMP/MTs.

Selama periode 2014 – 2018, APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2014, APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 106,00% meningkat menjadi 110,00% tahun 2016. Tahun 2017, APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 101,73%, kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan pada angka 104.31%. Capaian APK SD/MI Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan capaian APK SD/MI kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APK SD/MI menurun sebesar 0,32% per tahun. Penurunan rata-rata pertumbuhan APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terendah setelah Kabupaten Indragiri Hulu (-0,49% per tahun). Rata-rata pertumbuhan APK SD/MI Kabupaten Pelalawan sebesar -1,39 dan Provinsi Riau sebesar -1,12%.

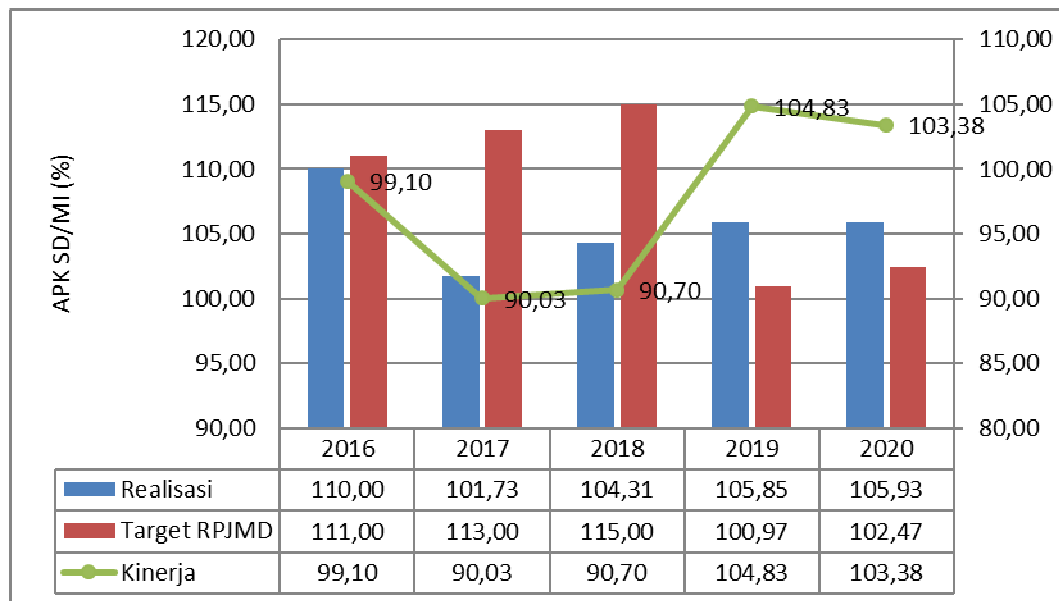


Sumber: BPS Provinsi Riau 2020 <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/03/08/67/angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-riau-2015-2017.html>

Gambar 2.32.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan bahwa APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2016 – 2018, trennya terus meningkat dari 111% pada tahun 2016 menjadi 115% pada tahun 2018. Realisasi APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun sehingga realisasi kinerja menjadi turun. Pada tahun 2014 – 2017, realisasi kinerja menurun dari 99,07% menjadi 90,03% terkategori sangat tinggi - tinggi. Pada tahun 2018, realisasi kinerja sedikit mengalami kenaikan menjadi 90,70%. Pada tahun 2019, sejalan dengan telah disesuaikannya target APK SD/MI dalam RPJMD tahun 2019 – 2023 menjadi 100,97%, realisasi kinerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 104,83% yang terkategori sangat tinggi.

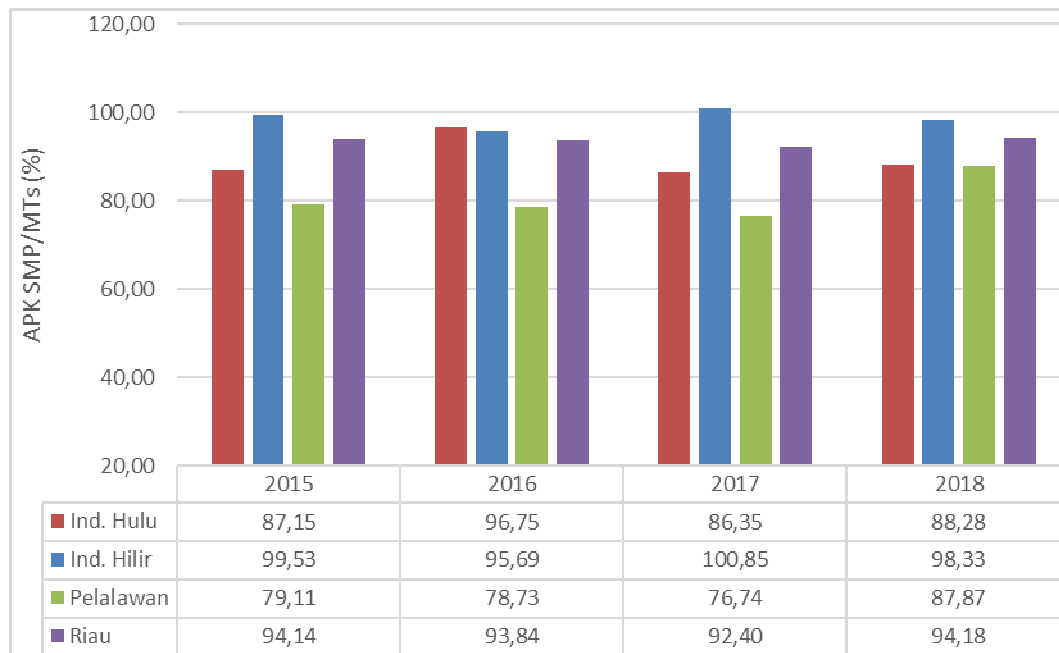


Sumber: (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021)

Gambar 2.33.

Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Selama periode 2015 - 2018, APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 99,53% pada tahun 2015 menjadi 100,85% pada tahun 2017, kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 98,33%. Bila dibandingkan dengan capaian APK SD/MI, maka capaian APK SMP/MTs relatif lebih rendah. Hal yang menonjol dibanding indikator - indikator sebelumnya, indikator APK SMP/MTs inilah yang nilainya lebih tinggi dibanding semua Kabupaten sekitarnya bahkan juga dengan Provinsi Riau. Selama periode 2015 - 2018, rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat 1,76% per tahun. Capaian rata - rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir (1,76% per tahun) adalah yang tertinggi dibanding capaian APK SMP/MTs Indragiri Hulu dan Pelalawan serta Provinsi Riau dengan rata - rata pertumbuhan menurun.

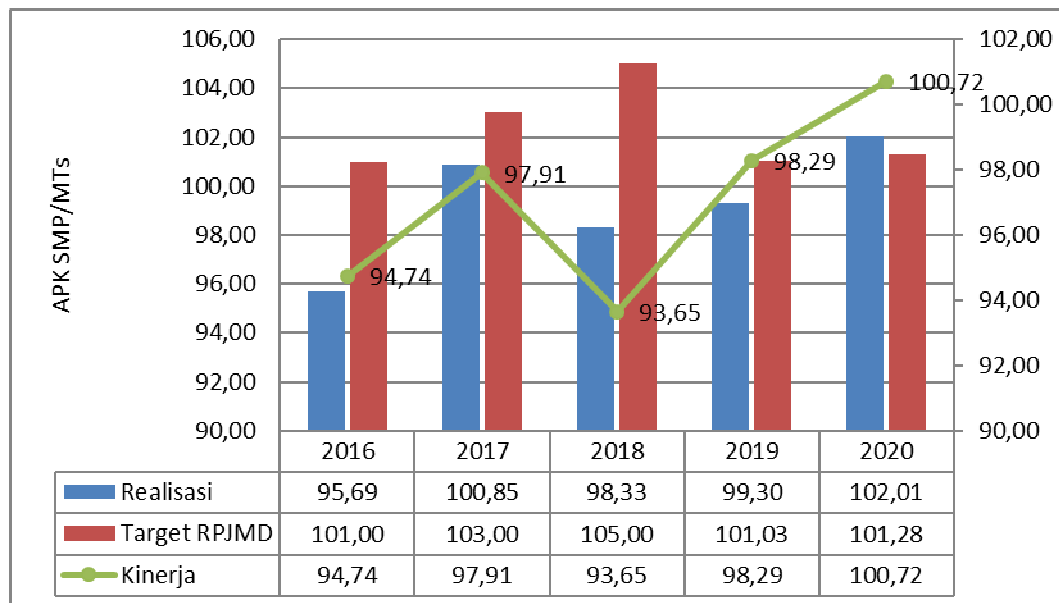


Sumber: BPS Provinsi Riau 2020 <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2018/03/08/67/angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-riau-2015-2018.html>

Gambar 2.34.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2015 – 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan APK SMP/MTs trennya meningkat dari 101% pada tahun 2016 menjadi 105% pada tahun 2018. Realisasi capaian APK SMP/MTs Indragiri Hilir trennya berfluktuatif meningkat. Selama periode 2016 – 2018, realisasi kinerja APK SMP/MTs bekisar antara 95,69% – 100,85% yang semua capaian terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020, target APK SMP/MTs sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 – 2023 adalah 101,03% dan 101,28% dengan realisasi kinerja menjadi 98,29% dan 102,01% yang juga terkategori sangat tinggi. Capaian kinerja SMP/MTs perlu dipertahankan dan bahkan ditingkat pada pembangunan periode berikut agar upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun dan rata-rata lama sekolah pada IPM terus meningkat sehingga IPM Kabupaten Indragiri Hilir naik lebih tinggi lagi.



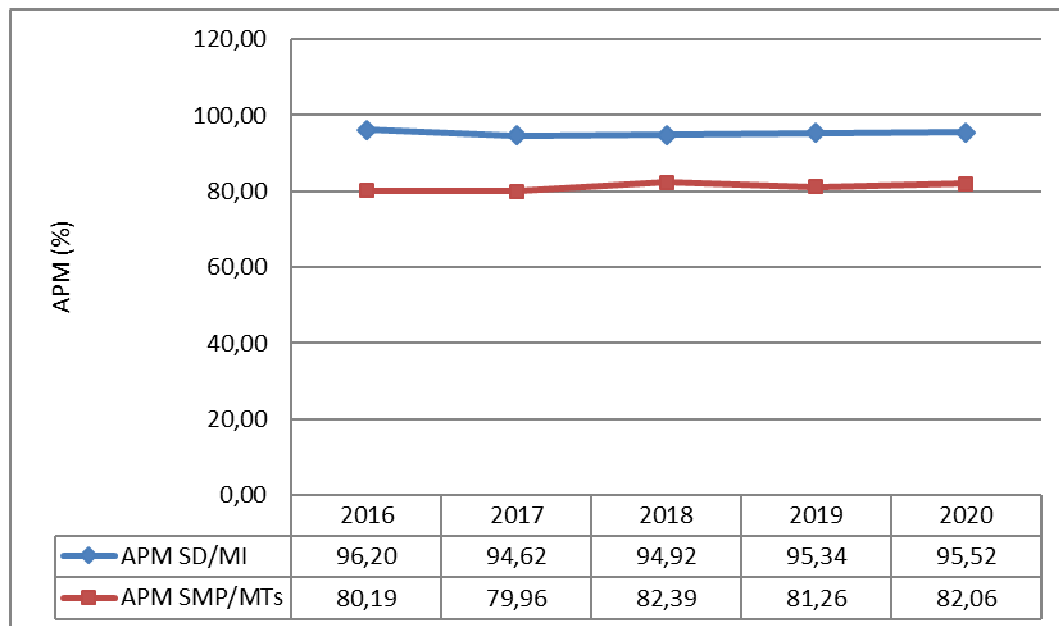
Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.35.

Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

- Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Selama periode 2016 - 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir memiliki meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 96,20% menurun menjadi 94,62% pada tahun 2017, kemudian mengalami peningkatan menjadi 95,52% pada tahun 2020. Selama periode ini terdapat 3,80% - 4,48% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian APM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2019 sebesar 95,34%, lebih rendah dibanding APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 98,44% dan 97,32%. Oleh karena itu, upaya meningkatkan APM SD/MI hingga mencapai 100% perlu terus dilakukan agar semua penduduk umur SD/MI dapat bersekolah sehingga juga mendorong terhadap pencapaian wajib belajar dan IPM Indragiri Hilir. Selama periode 2016 - 2020, rata-rata pertumbuhan APM SD/MI Indragiri Hilir menurun sebesar 0,31% per tahun.

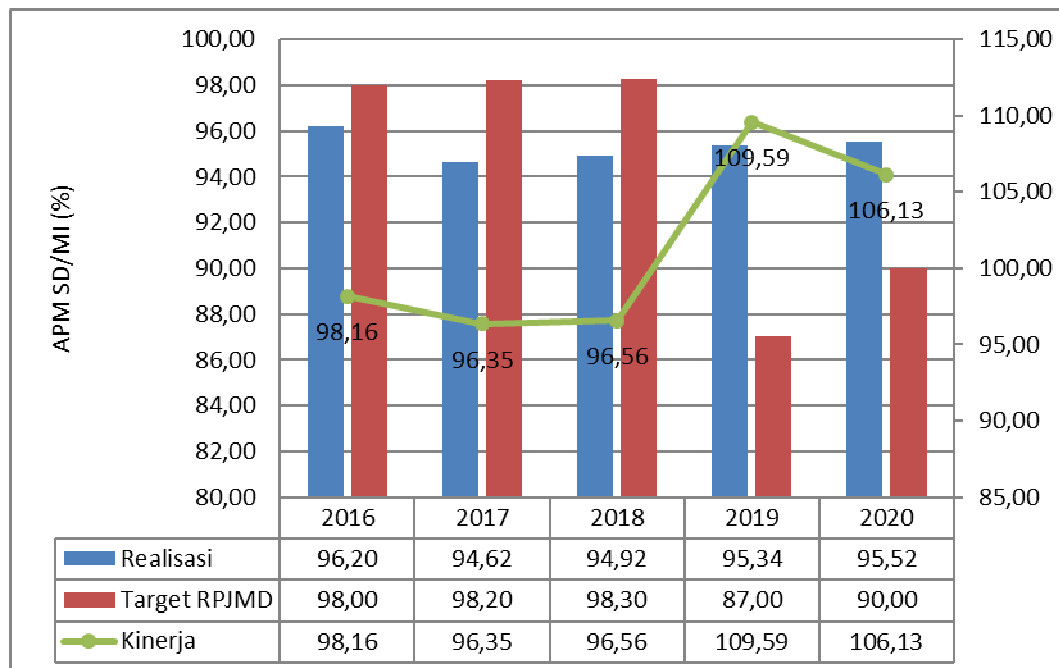


Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.36.

Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Pada periode yang sama, APM SMP/MTs memiliki tren berfluktuatif meningkat dengan nilai berkisar antara dari 79,96% menjadi 82,39%. Meski tren APM SMP/MTs memiliki tren yang meningkat namun nilai APM SMP/MTs lebih rendah dibanding APM SD/MI. Selama periode 2016 – 2020 ini, terdapat 17,61% - 20,04% penduduk umur sekolah SMP/MTs yang belum sekolah. Upaya menggesa peningkatan APM SMP/MTs menjadi 100% sehingga wajib belajar 9 tahun tercapai dan IPM meningkat lebih cepat sangat diperlukan. Capaian APM SMP/MTs Indragiri Hilir tahun 2019, lebih tinggi dibanding capaian APM SMP/MTs Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masing sebesar 76,33% dan 79,94%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APM SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,54% per tahun

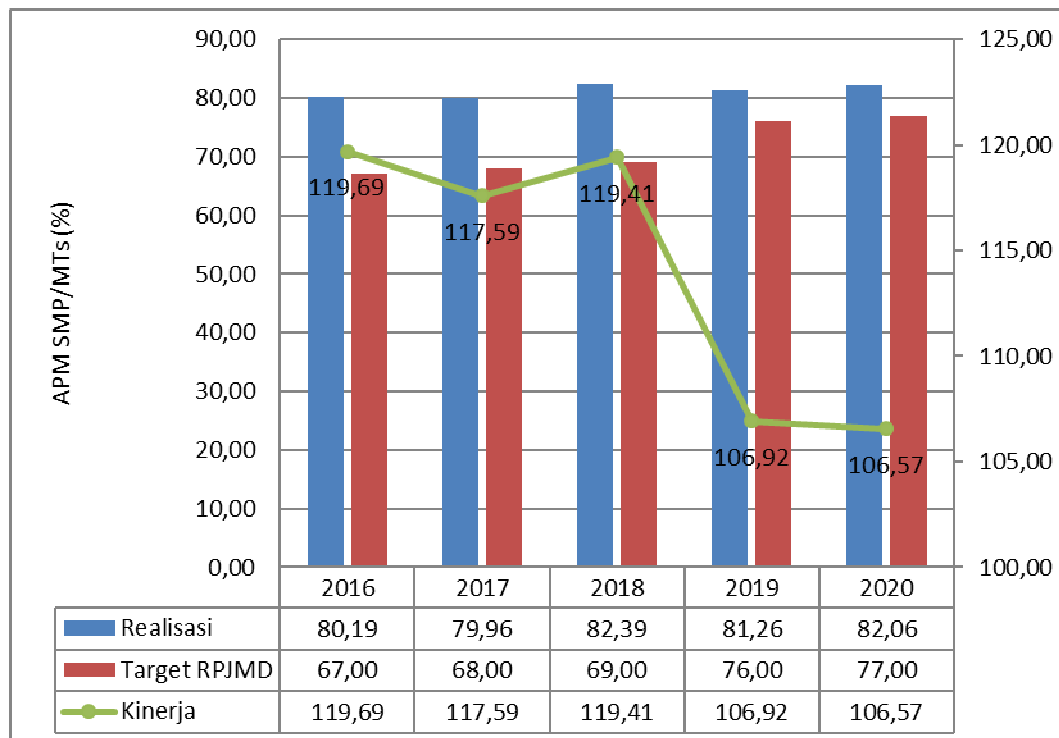


Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.37.

Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Pada RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditargetkan APM SD/MI meningkat dari 87% pada tahun 2019 menjadi 90,00% pada tahun 2020. Selama periode 2016 - 2017, realisasi APM SD/MI memiliki tren menurun, dari 96,20% menjadi 94,62%. Pada tahun 2018 - 2020, realisasi APM SD/MI meningkat sedikit menjadi 94,92% dan 95,52%. Selama periode 2016 - 2018, capaian realiasi kinerja berkisar antara 96,35% - 98,16% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019 - 2020, capaian realisasi kinerja meningkat signifikan menjadi 106,13% - 109,59% seiring dengan diturunkannya target pada RPJMD 2019 - 2023. Meski capaian kinerja terkategori Sangat Tinggi, namun upaya pencapaian APM SD/MI mencapai 100% harus terus diupayakan agar pencapaian wajib belajar dan percepatan peningkatan nilai IPM.



Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.38.

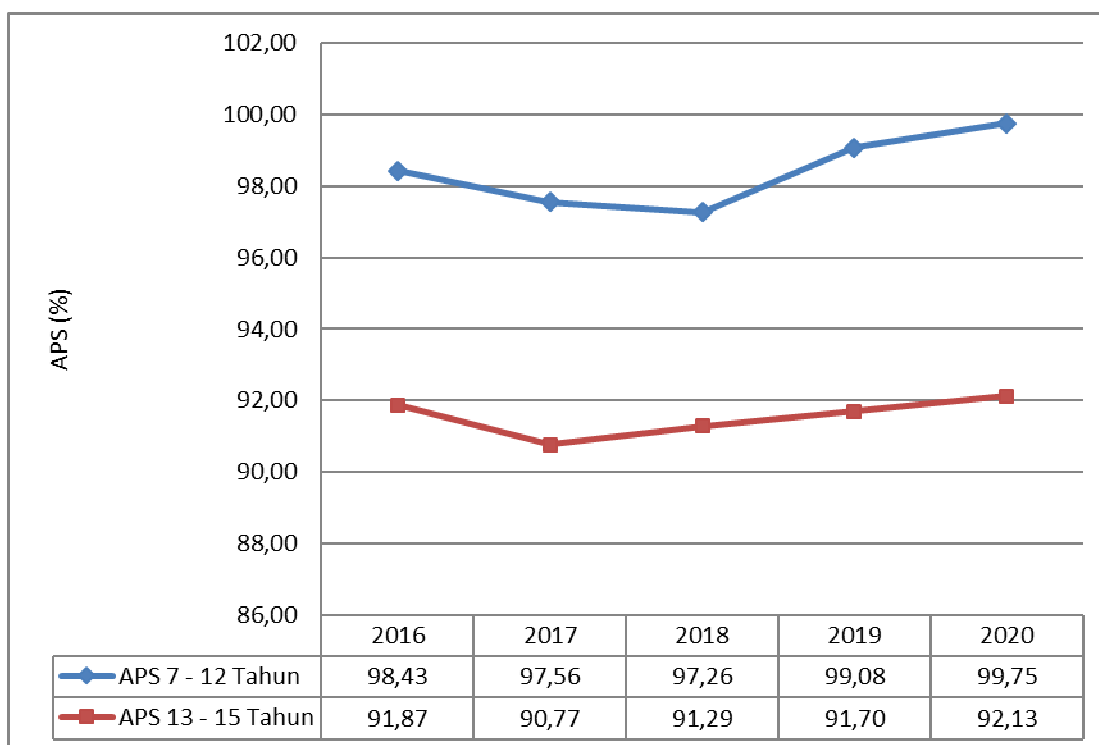
Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 juga telah ditargetkan APM SMP/MTs dengan tren meningkat yaitu dari 76% pada tahun 2019 menjadi 77% pada tahun 2020. Realisasi capaian APM SMP/MTs selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 80,19% pada tahun 2016 meningkat menjadi 82,06% pada tahun 2020. Realisasi kinerja APM SMP/MTs berkisar antara 106,57% - 119,69% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja APM SMP/MTs mengalami penurunan menjadi 106,57% seiring dengan ditingkatkannya target yang akan dicapai dalam RPJMD yaitu 77%, namun realisasi kinerja ini masih terkategori sangat tinggi.

- Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun) yang masih

menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2016 – 2020, APS 7 – 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, nilai APS 7 – 12 tahun Indragiri Hilir sebesar 98,43% menurun menjadi 97,26% pada tahun 2018. Capaian APS 7 – 12 tahun selama periode ini sekaligus menggambarkan bahwa terdapat sebesar 1,57% hingga 2,74% penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak sedang sekolah di SD/MI. Capaian APS 7 – 12 tahun Indragiri Hilir tahun 2019 (99,08%) adalah lebih tinggi dibanding capaian APS 7 – 12 Kabupaten Indragiri Hulu (98,44%), namun masih lebih rendah dari capaian Kabupaten Pelalawan (99,44%) dan Provinsi Riau (99,36%) . Selama periode 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhan APS 7 – 12 tahun meningkat sebesar 0,026% per tahun.



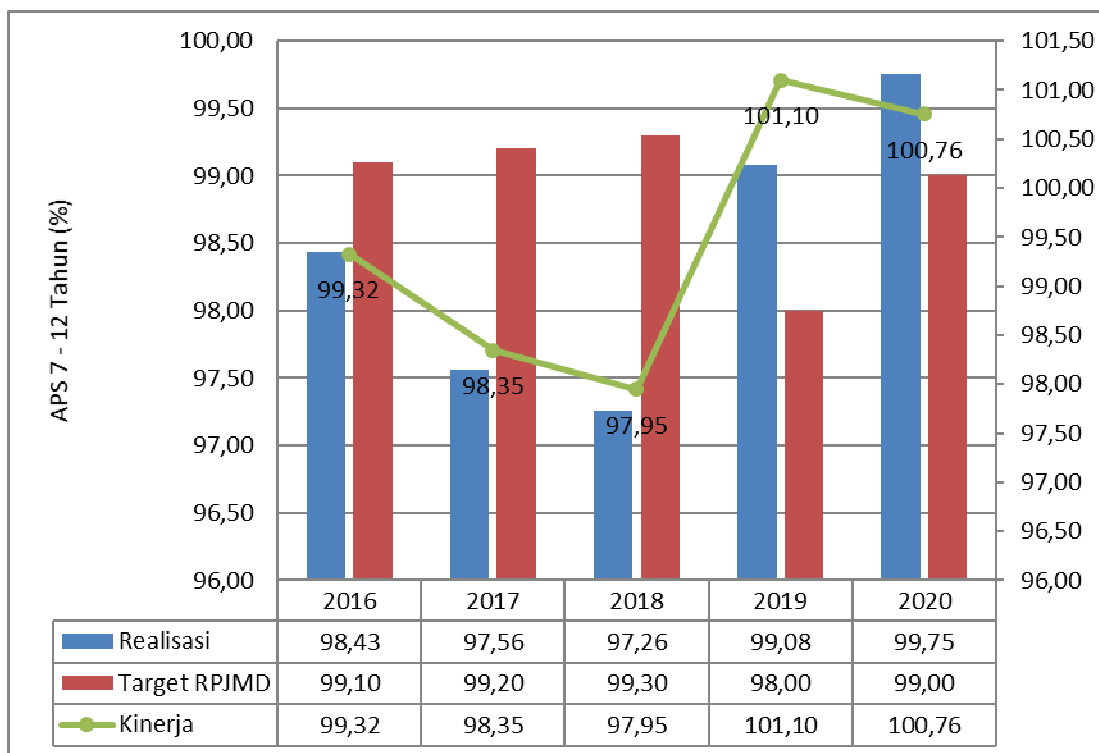
Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.39.

Perkembangan APS 7 – 12 Tahun dan APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Pada periode yang sama, APS 13 – 15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir justru trennya meningkat yaitu dari 91,87% pada tahun 2016 menjadi

92,13% pada tahun 2020. Meski capaian APS 13 – 15 tahun Indragiri Hilir meningkat namun nilainya lebih rendah dibanding APS 7 – 13 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk umur 13 – 15 tahun yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs jauh lebih besar yaitu 7,87% - 8,13%. Oleh karena itu, upaya peningkatan APS 13 – 15 tahun harus menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan Indragiri Hilir ke depan. Capaian APS 13 – 15 tahun 2019 Indragiri Hilir ini adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitarnya (Pelalawan 98,63% dan Indragiri Hulu 95,71%) dan Provinsi Riau (95,37%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APS 13 – 15 tahun meningkat sebesar 0,35% per tahun.

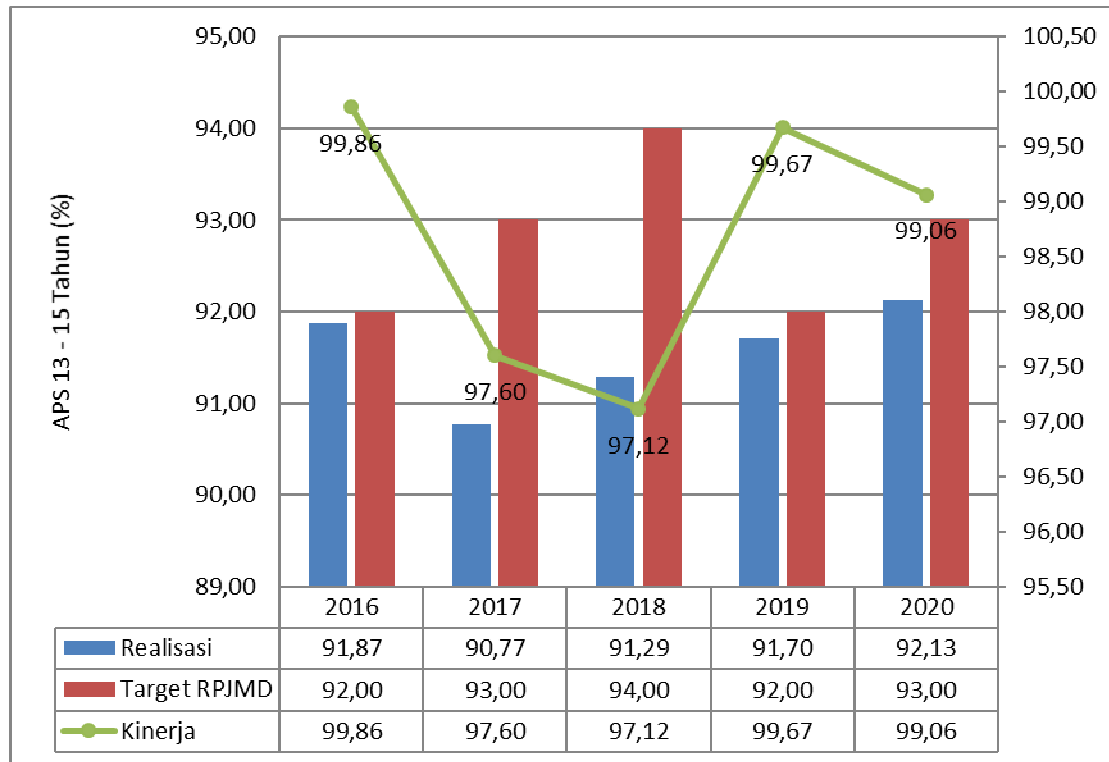


Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.40.
Kinerja Indikator APS 7 – 12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan target APS 7 – 12 tahun Indragiri Hilir yaitu sebesar 98,00%

pada tahun 2019 meningkat menjadi 99,00% pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2020, capaian realisasi APS 7 – 12 tahun berfluktuatif meningkat. Realisasi kinerja berkisar antara 97,95% - 101,10% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.41.

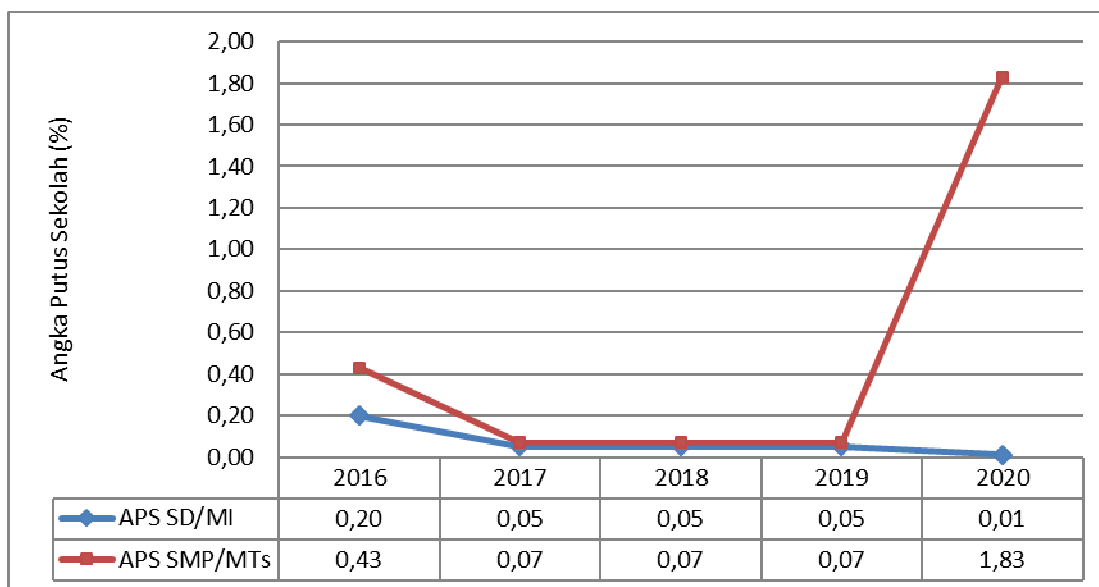
Kinerja Indikator APS 13 – 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditargetkan APS 13 - 15 tahun sebesar 92% pada tahun 2019 dan 93% pada tahun 2020. Realisasi APS SMP/MTs berfluktuatif meningkat dan umumnya dibawah target RPJMD. Meski capaian APS 13 – 15 tahun dibawah target namun realisasi kinerjanya terkategori Sangat Tinggi dengan rentang realisasi kinerja berkisar antara 97,12% - 99,86%.

- Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun yang sudah

tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selama periode 2016 – 2020, APTS SD/MI memiliki tren berfluktuatif menurun yaitu dari 0,20% pada tahun 2016 menjadi 0,01% pada tahun 2020. Meski APTS SD/MI sudah terkategori rendah, namun upaya menurunkan APTS SD/MI perlu terus dilanjutkan. Pada tahun 2017, Capaian APTS SD/MI ini sedikit lebih rendah dibanding capaian APTS Provinsi Riau (0,042%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APTS SD/MI menurun sebesar 30,35% per tahun.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

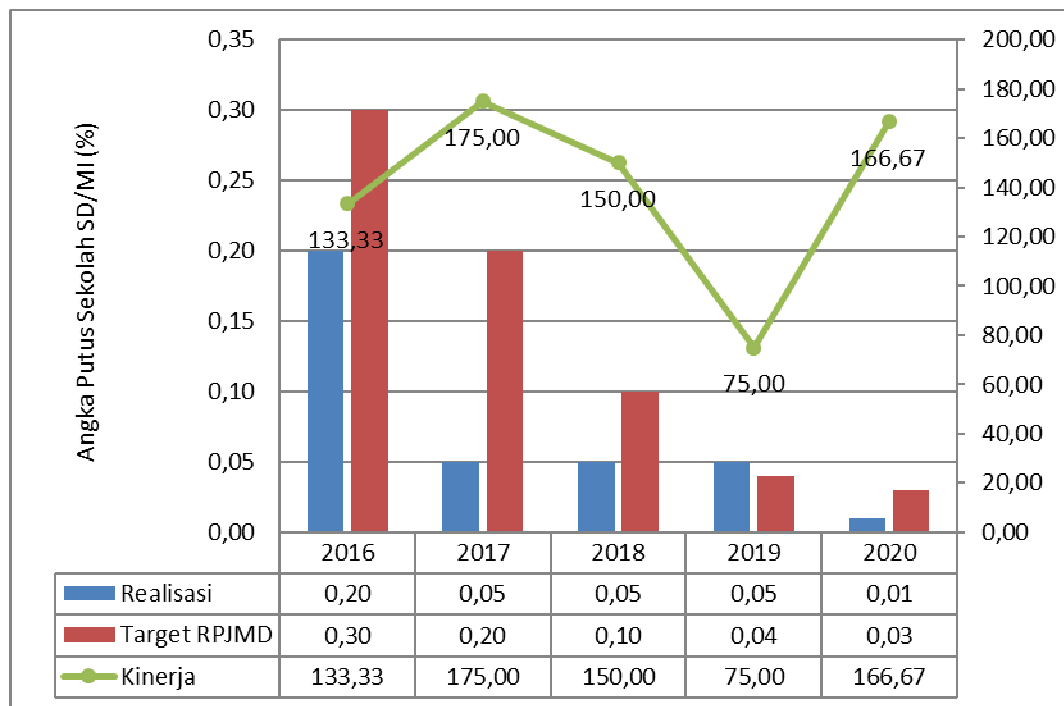
Gambar 2.42.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Pada periode yang sama, APTS SMP/MTs memiliki tren yang sama dengan APTS SD/MI yang memiliki tren berfluktuatif menurun, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat putus sekolah di SMP/MTs lebih tinggi dibanding ditingkat SD/MI. Pada tahun 2017, capaian APTS SMP/MTs Indragiri Hilir (0,07%) relatif sama dengan APTS SMP/MTs Provinsi Riau (0,07%).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa APTS SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari

0,04% pada tahun 2019 menjadi 0,03% pada tahun 2020. Realisasi kinerja APTS SD/MI 2016 - 2018 berkisar antara 133,33% - 175% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019, realisasi APTS SD/MI meningkat menjadi 0,05%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 75% yang terkategori Sedang. Pada tahun 2020, realisasi indikator angka putus sekolah SD/MI menurun menjadi 0,01% dengan kinerja sebesar 166,67% yang terkategori Sangat Tinggi.



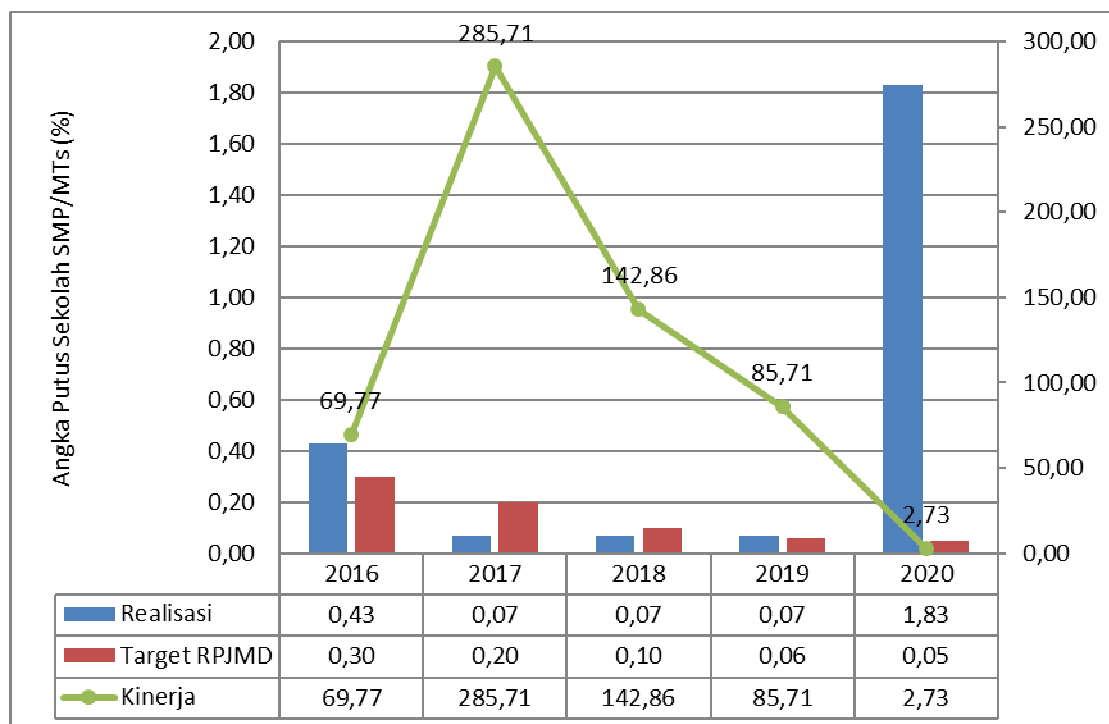
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.43.

Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa angka APTS SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun dari 0,06% pada tahun 2019 menjadi 0,05% pada tahun 2020. Realisasi APTS SMP/MTs tahun 2015 - 2016 masih dibawah target sehingga realisasi kinerja berkisar antara 58,82 - 69,77% yang terkategori rendah - sedang. Pada tahun 2016, realisasi APTS SMP/MTs sebesar

0,43% dengan realisasi kinerja 69,77% yang terkategori sangat tinggi. Untuk tahun 2017 - 2018, capaian realisasi sebesar 0,10% - 0,20% dengan realisasi kinerja berkisar antara 142,86% - 285,71% dengan kategori Sangat Tinggi. Namun, pada tahun 2019 - 2020, capaian realisasi indikator ini mengalami penurunan menjadi 0,07% - 1,83%. Hal ini menggambarkan bahwa pada saat pandemi COVID-19 banyak siswa SMP/MTs yang putus sekolah. Diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs ini.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

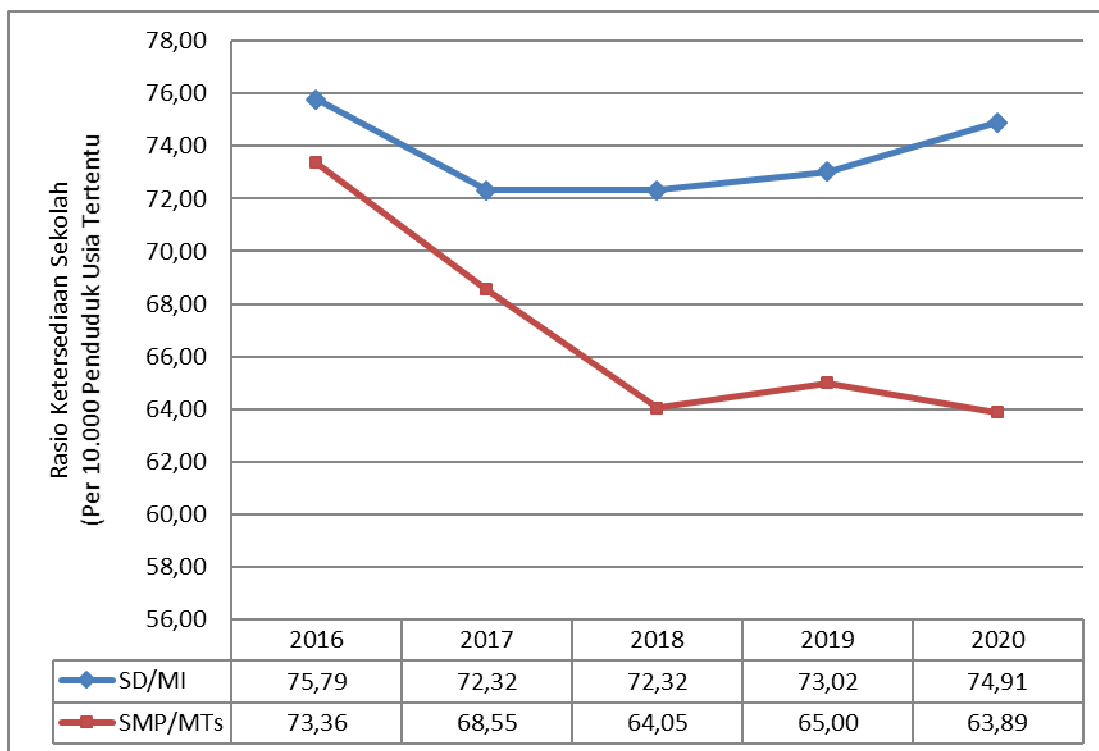
Gambar 2.44.

Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

- Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar (7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2016 - 2020, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia

7 - 12 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SD/MI memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 75,79% menurun menjadi 72,32% pada tahun 2018 atau setiap sekolah SD/MI melayani 126,85 orang penduduk usia 7 - 12 tahun, meningkat menjadi 139,67 orang penduduk usia 7 - 12 tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian, selain ketersediaan sekolah adalah rendahnya persentase SD/MI bangunan baik yaitu hanya sebesar 23,53%, terendah diantara kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu sebesar 28,40% dan Pelalawan sebesar 34% serta Provinsi Riau (29%). Selama periode 2012 - 2017, rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir menurun sebesar -0,23% per tahun.



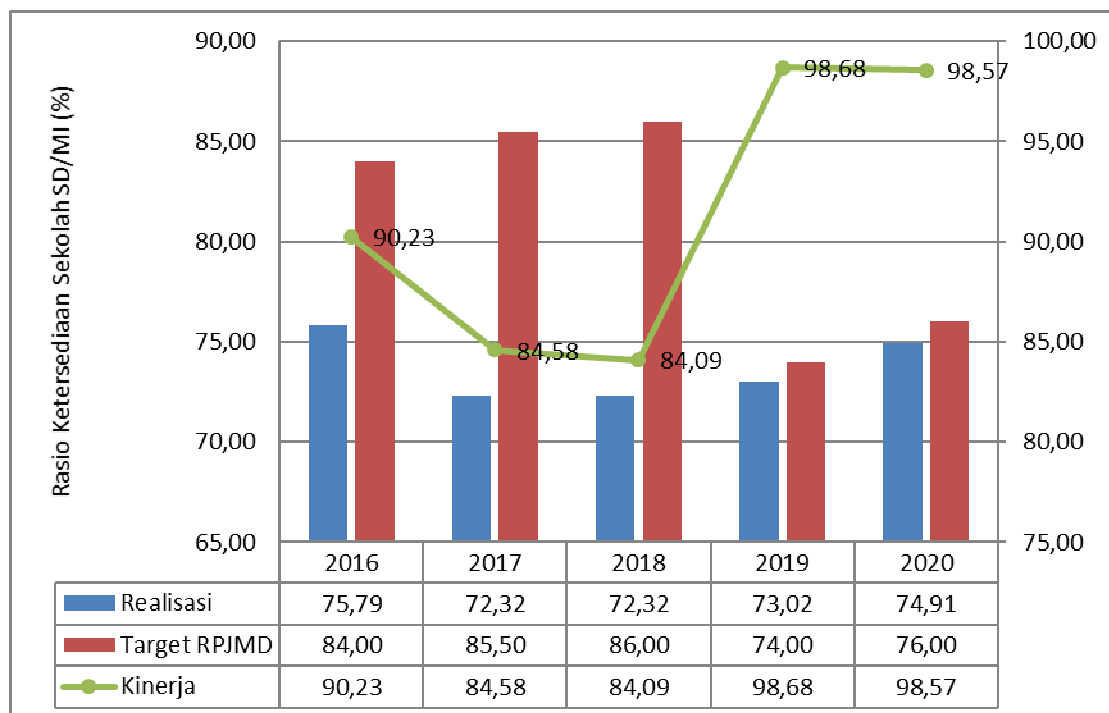
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.45.

Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13 - 15 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SMP/MTs memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 73,36% menurun

menjadi 63,89% pada tahun 2020. Namun angka rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding dengan angka rasio ketersediaan sekolah SD/MI. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah SMP/MTs hanya mampu menampung sebesar 66,52% hingga 71,36% dari penduduk usia 13 – 15 tahun atau setiap sekolah SMP/MTs melayani sebanyak 135,47 – 158,24 orang penduduk umur 13 – 15 tahun. Sama halnya dengan permasalahan diatas adalah rendahnya persentase bangunan dengan kondisi yang baik. Pada tahun 2017, persentase bangunan sekolah SMP/MTs dengan kondisi baik di Indragiri Hilir sebesar 20,15%, lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu (25,85%) dan Pelalawan (39,76%) serta Provinsi Riau (28,54%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir menurun sebesar 2,73% per tahun.



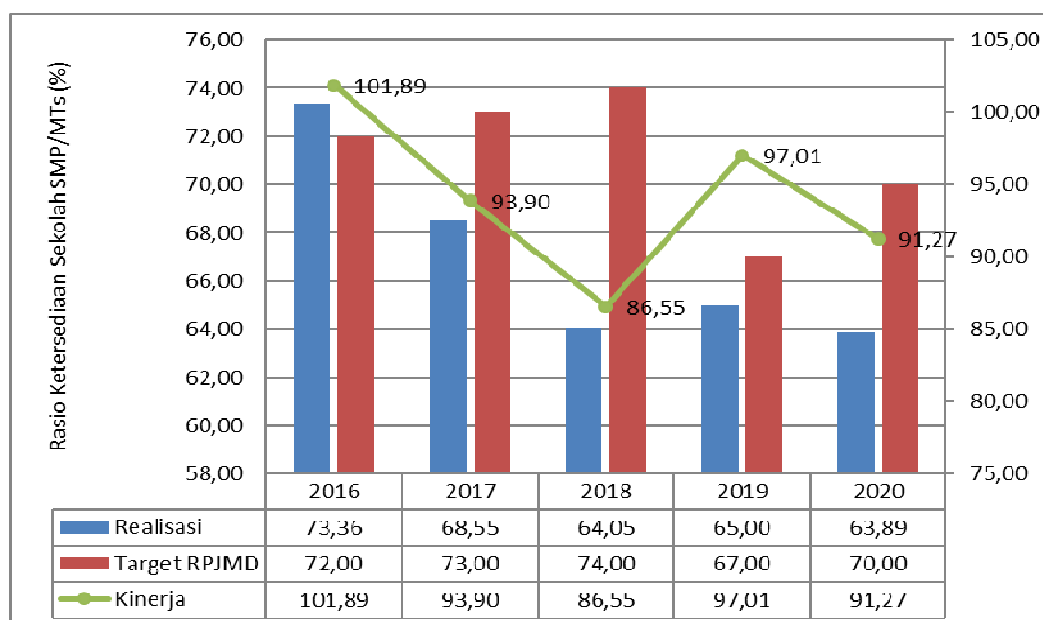
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.46.

Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 – 12 tahun
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SD/MI terus meningkat yaitu dari 84,00% pada tahun 2016 menjadi 86% tahun 2018. Realisasi kinerja rasio ketersediaan sekolah SD/MI memiliki tren menurun dimana pada tahun 2016 – 2018, realisasi kinerja sebesar 84,09% - 90,23% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja rasio ketersediaan SD/MI meningkat menjadi 98,57%.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs juga terus meningkat yaitu dari 72% pada tahun 2016 menjadi 74% tahun 2018. Realisasi capaian kinerja indikator ini selama periode 2016 sedikit diatas target yaitu sebesar 101,89% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs menurun menjadi 63,89% dengan realisasi kinerja sebesar 91,27% dan terkategori Sangat Tinggi.



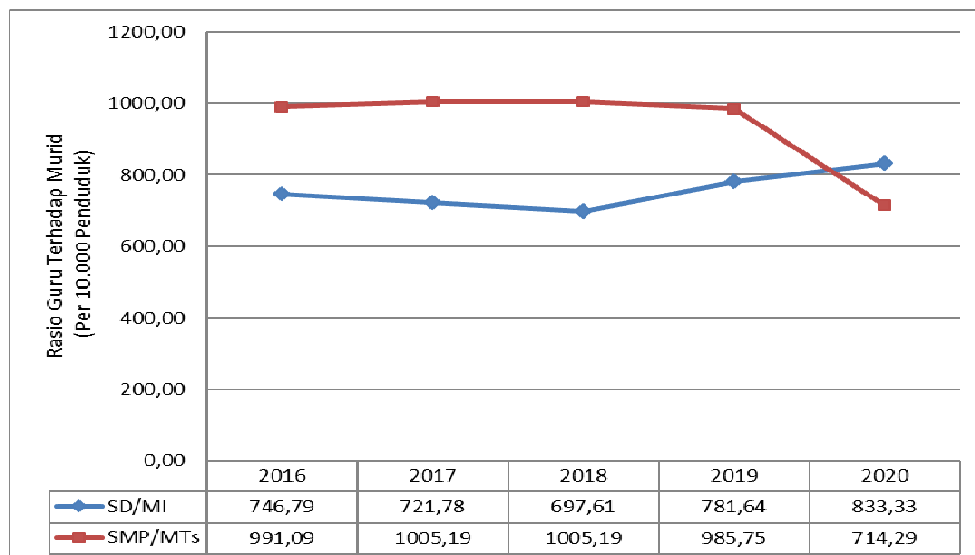
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.47.

Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah rasio antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar dengan jumlah pendudukan yang masuk kategori umur pendidikan dasar (7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar disamping mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru. Selama periode 2016 - 2018, rasio guru terhadap 10.000 murid SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yaitu dari 772,67 pada tahun 2016 menjadi 697,61 pada tahun 2018. Rasio sebesar 746,79 ini bermakna bahwa setiap 10.000 murid SD/MI dilayani oleh rata-rata sebanyak 746,79 orang guru atau setiap guru melayani 13 murid SD/MI. Selama periode ini, seorang guru SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir melayani sebanyak 12 - 14,33 orang murid SD/MI, yang merupakan rasio yang cukup baik. Namun permasalahan yang umum terjadi adalah rasio ini kurang baik untuk daerah sulit dan rendah atau baik di daerah perkotaan. Selama periode 2016 - 2020, rata-rata pertumbuhan rasio guru terhadap murid ditingkat SD/MI meningkat sebesar 2,22% per tahun.

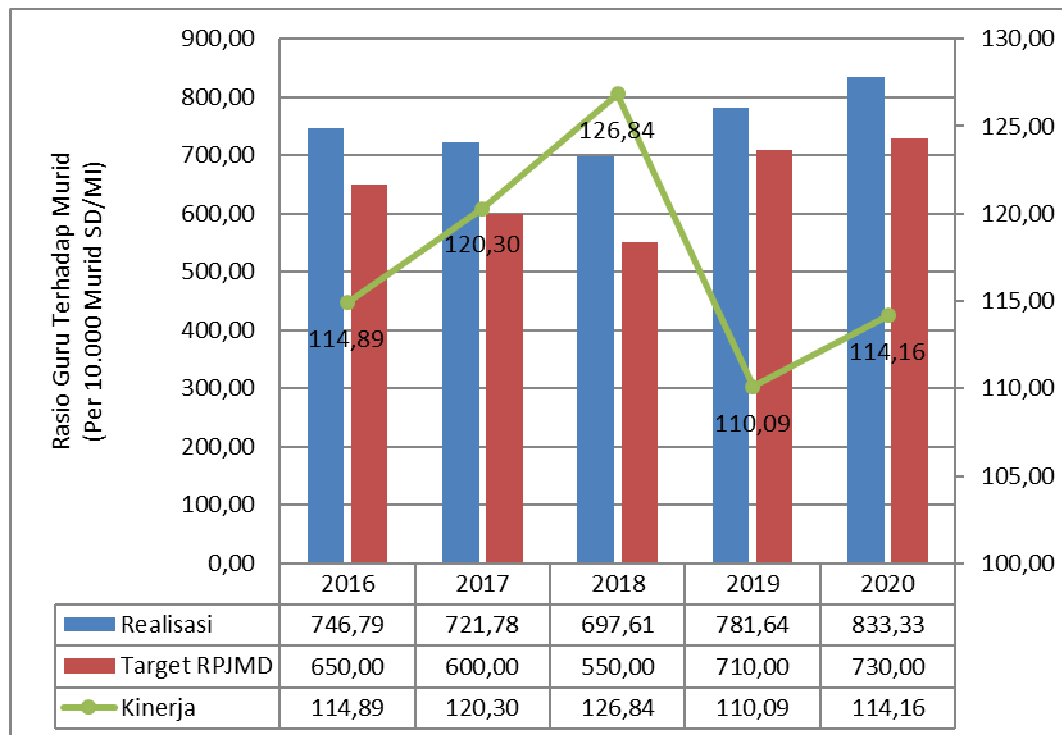


Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.48.

Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SD/MI (Guru per 10.000 murid SD/MI) meningkat dari 710 tahun 2019 menjadi 730 pada tahun 2020 guru per 10.000 murid SD/MI. Realisasi capaian indikator rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2016 - 2020 diatas target dengan capaian kinerja sebesar 110,09% - 126,84% yang terkategori Sangat Tinggi.



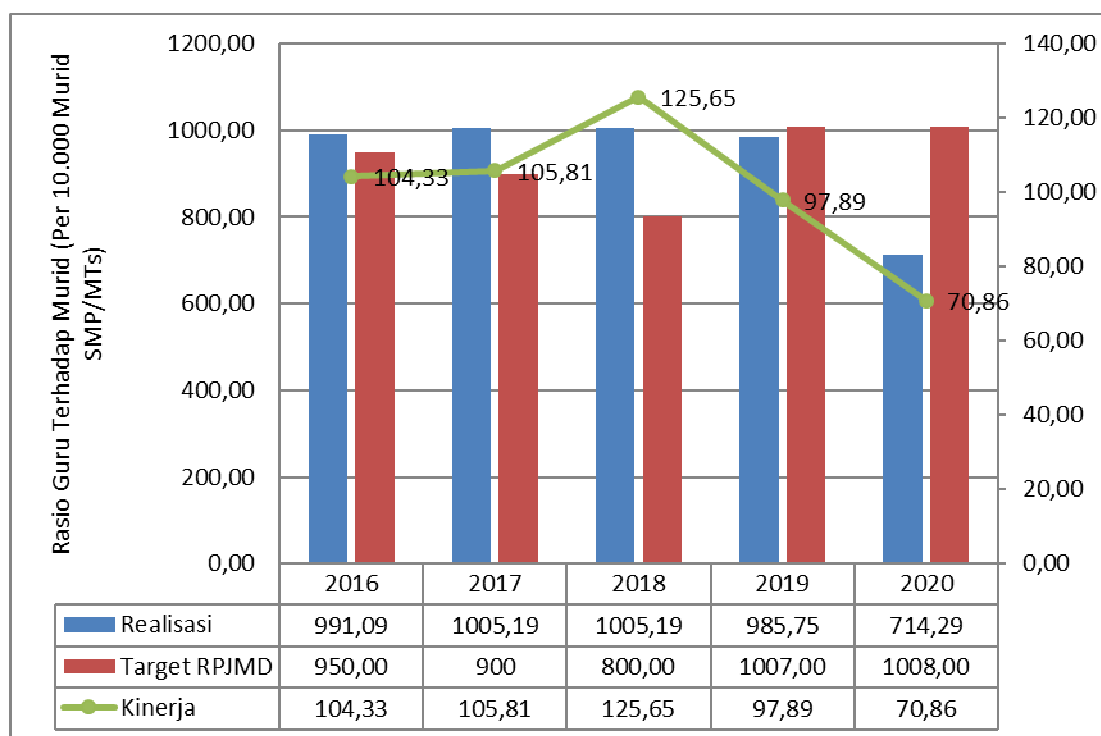
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.49.

Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs (Guru per 10.000 murid SMP/MTs) menurun dari 1.000 pada tahun 2015 menjadi 800 pada tahun 2018 guru per 10.000 murid SMP/MTs. Realisasi indikator guru terhadap murid SMP/MTs ini berada melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 - 2018 yaitu sebesar 104,33% - 125,65% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019, capaian indikator rasio guru

terhadap murid SMP/MTs menurun menjadi 985,75 sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 97,89% dan terkategori Sangat Tinggi. Namun, pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 714,29 dengan realisasi kinerja sebesar 70,86% yang terkategori Sedang.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

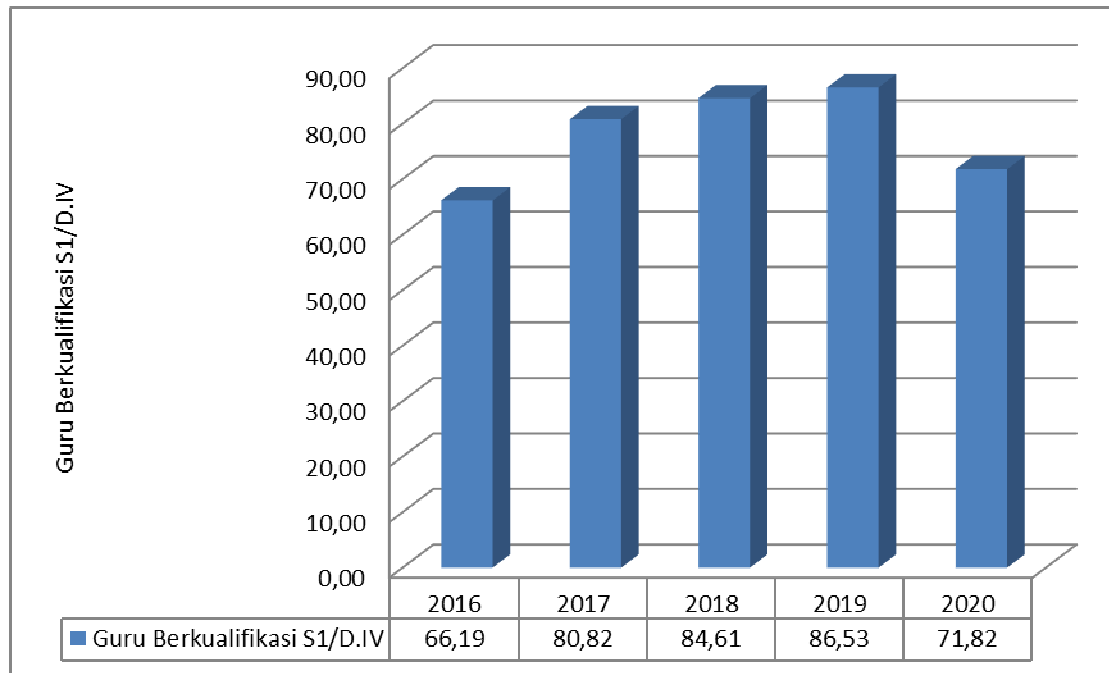
Gambar 2.50.

Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau Diploma Empat (D.IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) memiliki

sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



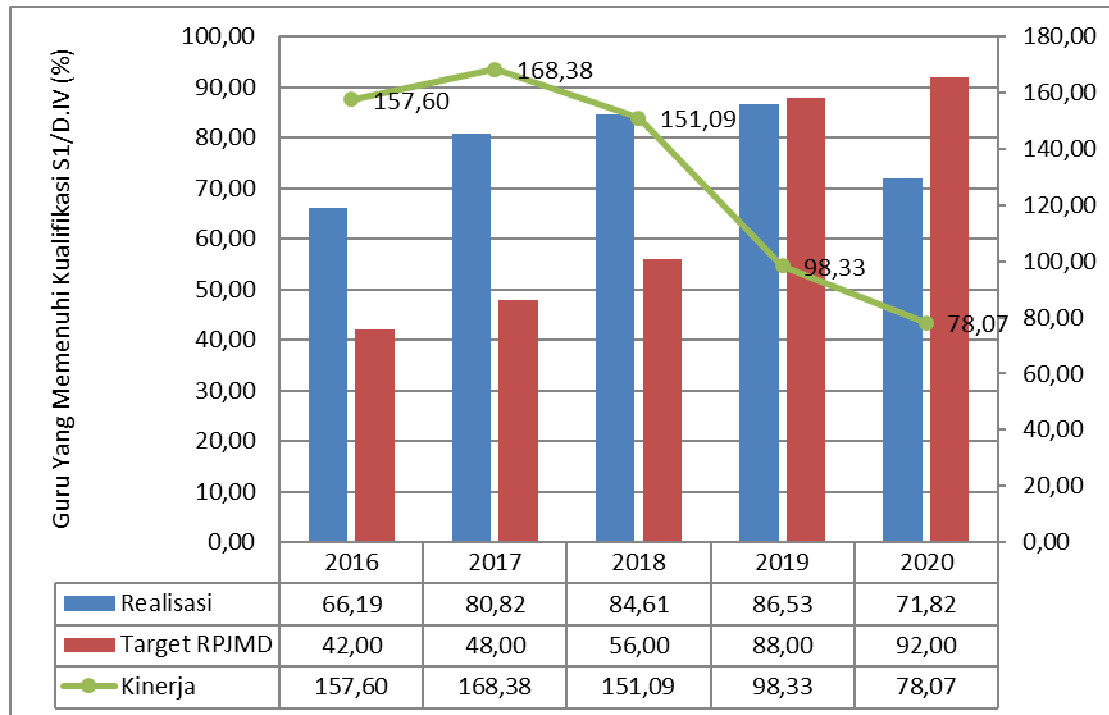
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.51.

Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Selama periode 2016 – 2019, perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV memiliki tren terus meningkat. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase guru (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 dan UU No. 14 tahun 2005 serta PP No. 19 tahun 2015, sebesar 66,19%, meningkat menjadi 86,53% pada tahun 2019. Capaian persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV Indragiri Hilir tahun 2017 ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan (90,58%), Indragiri Hulu (87,21%), dan Kuansing (84,26%) serta Provinsi Riau (91,58%). Bila dibandingkan capaian antara guru SD/ MI dengan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa persentase capaian persentase Guru tingkat SD/MI yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebesar 76,93%,

adalah yang terendah diikuti guru SMP/MTs (84,36%) dan guru SMA/MA/SMK (92,54%). Selama periode 2016 - 2020, rata-rata pertumbuhan guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV meningkat sebesar 1,65% per tahun.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.52.

Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV ditargetkan meningkat dari 88% pada tahun 2019 menjadi 92% pada tahun 2020. Pada tahun 2016 - 2019, capaian realisasi indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja berkisar antara 98,33% - 168,38% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2020, realisasi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV mengalami penurunan menjadi 71,82% dengan realisasi kinerja sebesar 78,07% yang terkategori Sedang.

- SPM Pendidikan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggungjawab Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. di dalamnya mencakup : (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Selain jenis pelayanan pendidikan diatas, di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah. Jenjang pendidikan dasar terdiri dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan total jumlah indikator SD/MI 27 indikator dan SMP/MTs 28 indikator. Batas waktu pencapaian SPM bidang pendidikan dasar adalah tahun 2015. Rincian mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut.

Tabel 2.11.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM
Bidang Pendidikan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
I	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota		
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100	2015
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	2015
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100	2015

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100	2015
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	2015
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	2015
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2015
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100	2015
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	100	2015
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2015
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2015
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100	2015
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	2015
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	2015
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan		
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100	2015
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	2015
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	100	2015
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100	2015
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100	2015

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : - Kelas I - II : 18 jam per minggu - Kelas III : 24 jam per minggu - Kelas IV - VI : 27 jam per minggu - Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100	2015
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100	2015
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100	2015
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100	2015
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	2015
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100	2015
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	100	2015
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100	2015

Selama Periode 2014 - 2018, pencapaian SPM pendidikan dasar Kabupaten Indragiri hilir ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tahun 2017, capaian indikator tingkat SD terhadap 27 indikator, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 24 indikator (88,88%) dan ada 11 indikator (40,74% yang telah mencapai target nasional. Pada tingkat SMP, dari total 28 indikator kinerja, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 24 indikator (85,71%) dengan 8 indikator telah mencapai target nasional. Khusus untuk tingkat MI dan MTs tidak disajikan karena berada pada tupoksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 2.12.
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2014 - 2018

No	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018*
	A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota						
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	-	-	-	-	-
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	-	-	-
		MTs	-	-	-	-	-
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	19,73	30,12	96,71	89,73	89,73
		MI	-	-	-	-	-
		SD	19,73	34,36	68,99	89,73	89,73
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	30,56	95,56	96,32	96,69	96,69
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	30,56	80,00	91,18	96,69	96,69
		MTs	-	-	-	-	-
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	-	14,81	41,18	55,88	55,88
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	14,07	35,29	55,88	55,88
		MTs	-	-	-	-	-
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	31,91	37,64	69,77	81,58	81,58
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	25,93	75,74	79,78	79,78
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	23,70	68,38	-	-
		MTs	-	-	-	-	-
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	36,94	36,94	83,91	98,06	98,06
		MI	-	-	-	-	-
		SD	88,39	95,56	96,71	98,06	98,06
		MI	-	-	-	-	-

No	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018*
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	-	20,74	57,35	73,53	73,53
		MTs	-	-	-	-	-
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	40,46	48,84	91,09	97,29	97,29
		MI	-	-	-	-	-
		SD	40,46	47,88	63,18	97,29	97,29
		MI	-	-	-	-	-
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	-	57,78	69,12	76,84	76,84
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	65,93	74,26	76,84	76,84
		MTs	-	-	-	-	-
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	-	57,78	25,74	36,03	36,03
		MTs	-	-	-	-	-
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	50,87	54,83	62,21	74,03	74,03
		MI	-	-	-	-	-
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SMP	-	57,78	97,06	99,26	99,26
		MTs	-	-	-	-	-
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	94,44	91,23	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
13	Pemerintah kab/kota	SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018*
	memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	30,75	32,43	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	30,75	33,33	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
	B. Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan						
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	51,71	51,71	59,51	31,49	31,49
		MI	-	-	-	-	-
		SD	0,08	33,33	0,47	31,49	31,49
		MI	-	-	-	-	-
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SMP	-	7,96	8,39	17,09	17,09
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	14,07	18,38	17,09	17,09
		MTs	-	-	-	-	-
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	16,05	19,31	29,07	33,91	33,91
		MI	-	-	-	-	-
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	9,86	13,13	17,64	19,36	19,36
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	16,16	21,48	72,06	90,44	90,44
		MTs	-	-	-	-	-

No	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018*
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	26,69	30,50	71,51	73,26	73,26
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	21,48	72,06	88,24	88,24
		MTs	-	-	-	-	-
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :		24,76	30,17	83,56		
	Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	24,76	32,43	81,59	87,40	87,40
	Kelas III : 24 jam per minggu	MI	-	-	-	-	-
	Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	24,76	21,48	91,11	94,81	94,81
	Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	-	-	-	-	-
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	24,76	32,43	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	21,48	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	62,48	74,32	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	72,59	99,26	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	50,48	100,00	99,42	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SMP	50,48	100,00	92,65	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	99,26	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
25	Setiap guru menyampaikan	SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2014	2015	2016	2017	2018*
	laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS						
		SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
	IP 27.1						
		SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
	IP 27.2						
		SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
	IP 27.3						
		SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator, solusinya uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13.
Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam pencapaian
SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
1.	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	- Persentase ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	Kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketinggian rata-rata 0-3 dpl, dengan kondisi daratan merupakan lahan gambut	Perlunya pendanaan pembangunan sarana prasarana sekolah yang cukup besar
2.	Rasio rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	- Persentase peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	Penyebaran penduduk usia sekolah yang tidak merata	Perlunya penyelenggaraan sekolah filial atau sekolah non induk
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	- Persentase SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	Jumlah tenaga guru mata pelajaran IPA yang masih kurang	Penerimaan guru PNS atau Non PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan IPA linier dengan

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	- Persentase SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	Ketersediaan anggaran yang belum dapat memenuhi kebutuhan ruang kepala sekolah dan ruang guru beserta perabotannya	Mengalokasikan sumber pendanaan melalui sumber pendanaan dari sumber lain seperti, Dana Alokasi Khusus, APBN, dan APBD Provinsi Riau
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	- Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan <u>kualifikasi akademik S-1 atau D-IV</u> dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan <u>kualifikasi akademik S-1 atau D-IV</u> dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Kepala SD/MI yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
11.	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Kepala SMP/MTs yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
12.	Di setiap kabupaten/kota semua <u>pengawas sekolah</u> dan	- Persentase setiap kabupaten/kota semua <u>pengawas sekolah</u> dan	Masih terdapat Pengawas Sekolah yang belum berkualifikasi	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
	madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
13.	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	- Persentase Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	Ketersediaan anggaran belum maksimal dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	- Persentase Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	Keterbatasan tenaga pengawas dan keterbatasan pendanaan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi

b. Kesehatan

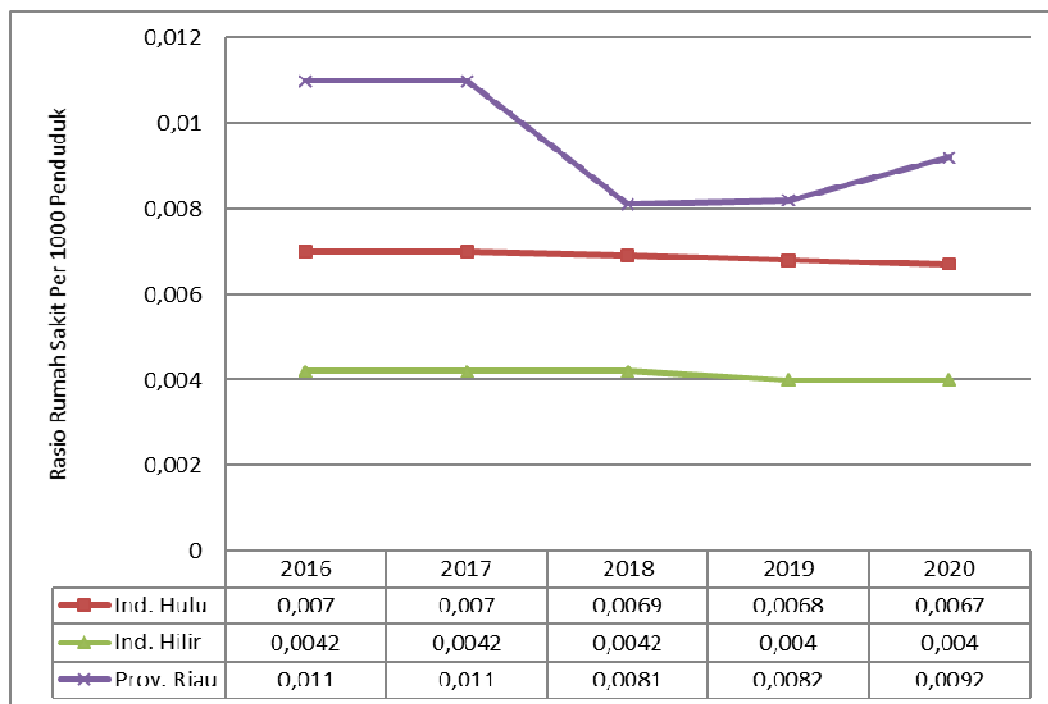
Layanan urusan wajib dasar bidang kesehatan dianalisis dari aspek (i) rumah sakit, (ii) Puskesmas, (iii) Dokter, Perawat dan Bidan, (iv) cakupan.

- Rasio Rumah Sakit

Pada tahun 2020, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 rumah sakit pemerintah. Selama periode 2016 - 2020, jumlah rumah sakit tidak mengalami perubahan dan yang berubah adalah jumlah penduduk yang meningkat. Selama periode 2016 - 2020, rasio rumah sakit per 1.000

penduduk di Indragiri Hilir relatif tetap yaitu sebesar 0,0042 yang berarti setiap 1 rumah sakit melayani sebanyak 218.303 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2020, capaian rasio rumah sakit Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 0,0067 dan 0,0092.

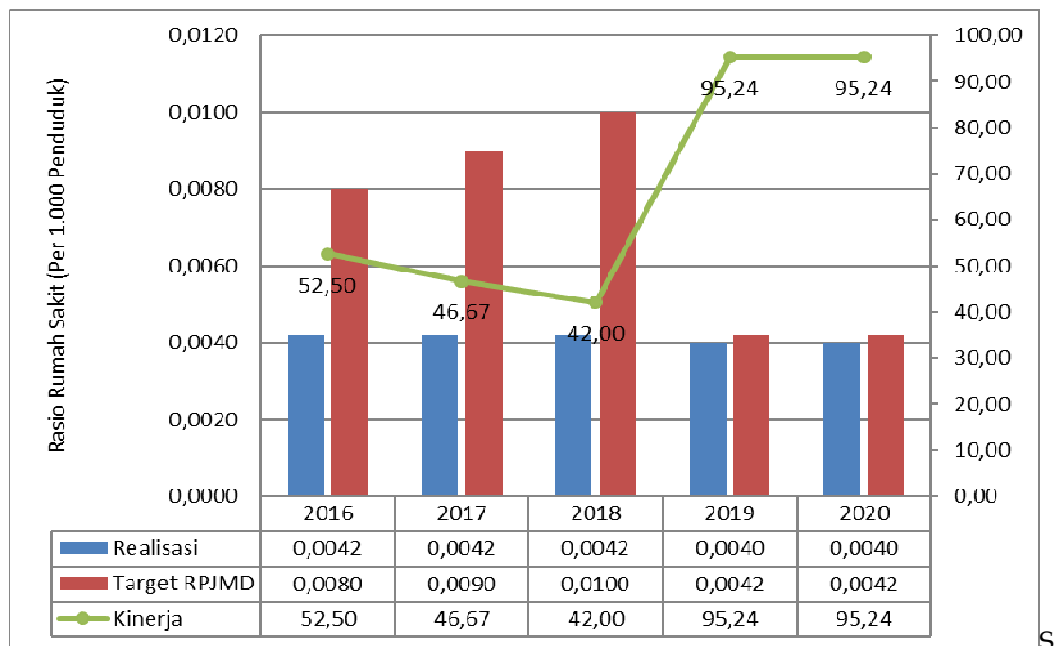
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 654.909 jiwa maka dibutuhkan jumlah tempat tidur sebanyak 655 tempat tidur. Total tempat tidur ketiga rumah sakit umum daerah di Indragiri Hilir sebanyak 257 tempat tidur sehingga masih kurang sebanyak 398 tempat tidur. Oleh karena itu, upaya peningkatan jumlah tempat tidur sehingga ideal 1 tempat tidur per 1.000 penduduk disamping peningkatan sarana dan prasarana layanan rumah sakit perlu mendapat perhatian pada pembangunan ke depan.



Sumber : Provinsi Riau dalam Angka, Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.53.
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk telah ditetapkan sama sebesar 0,0042. Pada tahun 2016 - 2018, realisasi rasio rumah sakit per 1.000 penduduk sebesar 0,0042 dengan realisasi kinerja berkisar antara 42% - 52,50% yang terkategori sedang. Pada tahun 2019 dan 2020, realisasi kinerja kembali meningkat seiring dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 yaitu 95,24% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.54.

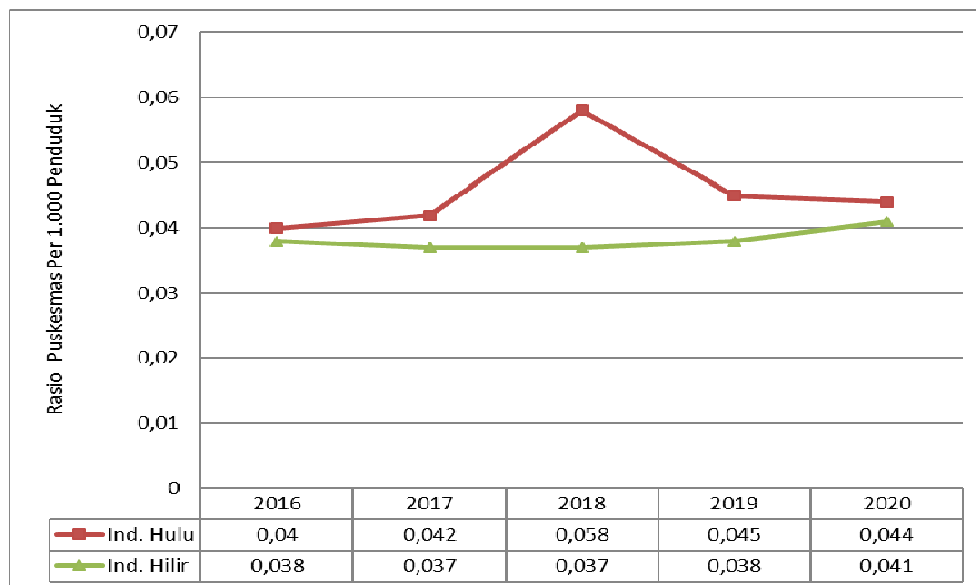
Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rasio Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Selama periode 2016 – 2020, perkembangan rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2020, jumlah puskesmas di Indragiri Hilir sebanyak 31 puskesmas lebih banyak dari jumlah kecamatan (20 kecamatan). Rasio puskesmas per 1.000 penduduk sebesar 0,038 atau 1

puskesmas rata - rata melayani sebanyak 27.424 penduduk pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,041 atau setiap puskesmas melayani sebanyak 21.126 penduduk pada tahun 2020. Capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini masih dibawah capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.

Rasio puskesmas Indragiri hilir sebesar 0,038 - 0,041 per 1.000 penduduk artinya setiap satu puskesmas melayani 38 - 41 dalam 1.000 penduduk. Apabila kita bagi dengan jumlah penduduk maka, rasio 1 puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir melayani penduduk dengan jumlah berkisar antara 21.126 - 27.424. Rentang jumlah penduduk yang dilayani oleh puskesmas di Indragiri Hilir ini masih memenuhi standar nasional (1 puskesmas melayani 30.000 penduduk). Meski rasio puskesmas telah memenuhi standar nasional dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Kondisi puskesmas, peralatan dan obat-obatan belum mampu memenuhi standar sebuah puskesmas yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas harus menjadi agenda pembangunan ke depan.

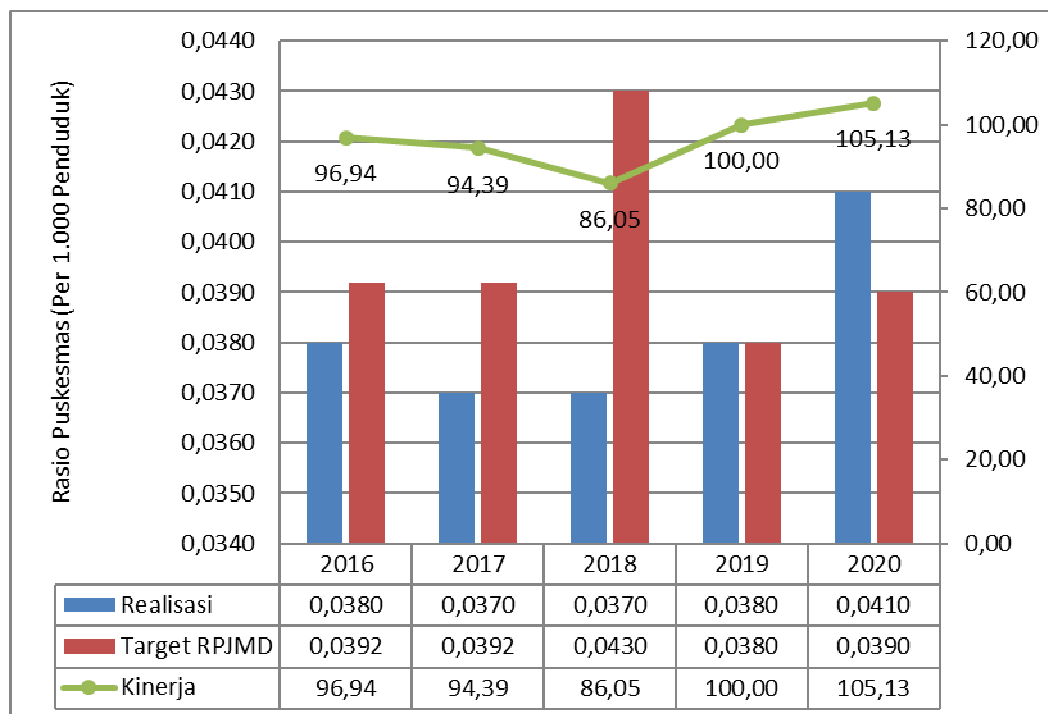


Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.55.

Perkembangan Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk ditargetkan terus meningkat yaitu dari 0,038 pada tahun 2019 menjadi 0,039 pada tahun 2020. Selama periode 2016 hingga 2018, capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 86,05 - 96,94% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2019 - 2020, capaian rasio puskesmas per 1000 penduduk telah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan realisasi kinerja berkisar antara 100% - 105,13% dan terkategori sangat tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

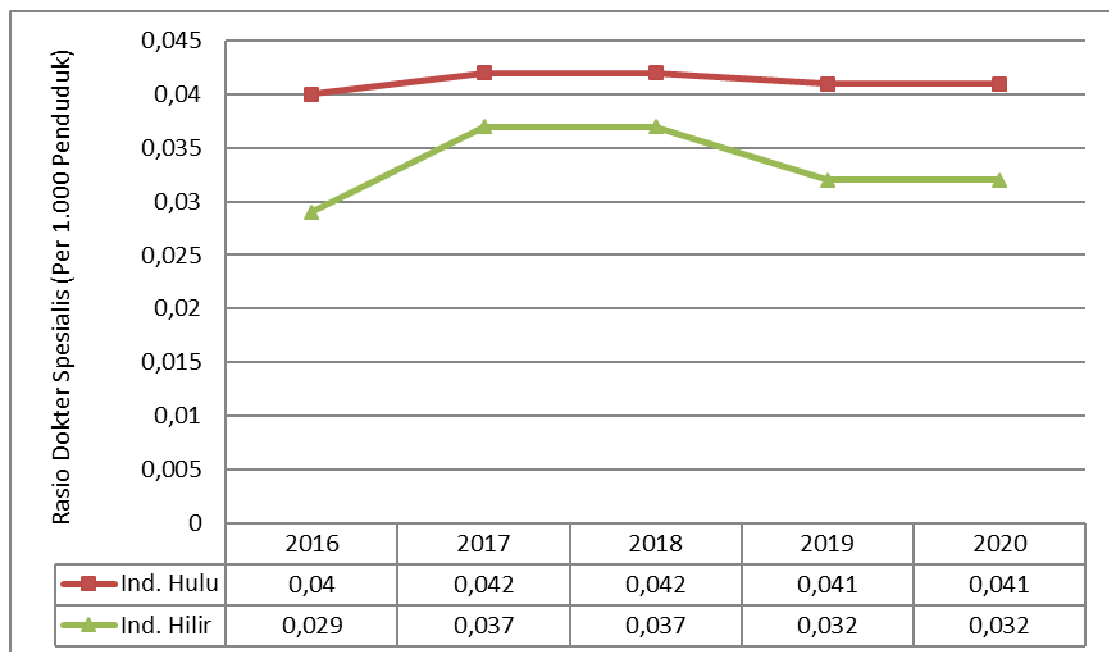
Gambar 2.56.

Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

- Rasio Dokter Spesialis

Selama periode 2016 - 2020, jumlah dokter spesialis yang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 34 - 42 orang. Selama periode ini, rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif meningkat berkisar antara yaitu dari 0,029 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,032 pada tahun 2020 yang bermakna bahwa setiap 1 orang

dokter spesialis melayani penduduk berkisar antara 15.593 – 20.972 penduduk. Kondisi rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.946 penduduk). Dibandingkan dengan capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu, capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu. Agar mencapai jumlah ideal, maka jumlah dokter spesialis di Indragiri Hilir sebanyak 52 orang dokter spesialis dari berbagai keahlian. Kondisi ini perlu menjadi target pada pembangunan kesehatan ke depan.



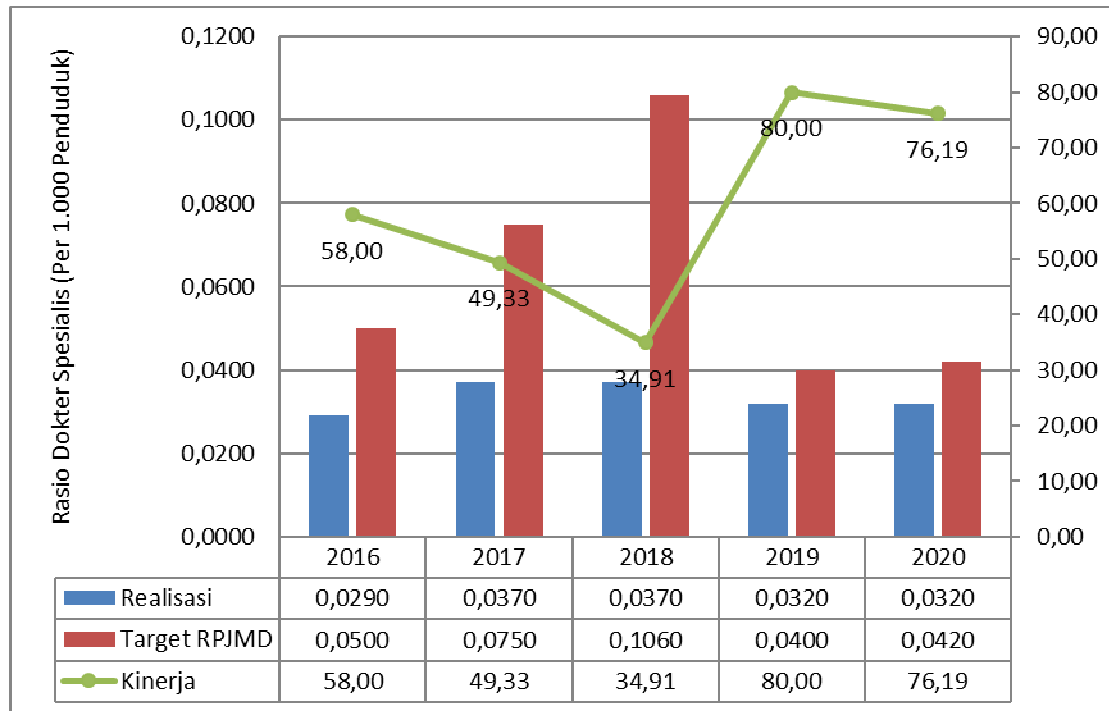
Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021

Gambar 2.57.

Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter spesialis per 1.000 sebesar terus meningkat meski jauh dari ideal yaitu sebesar 0,040 pada tahun 2019 dan sebesar 0,042 pada tahun 2020. Selama periode 2016 sampai pada tahun 2020, capaian target indikator rasio dokter spesialis masih dibawah target dimana pada tahun 2016 – 2018 memiliki realisasi kinerja sebesar 34,91% -

58,00% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019, capaian realisasi kinerja meningkat menjadi 80%, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian target yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

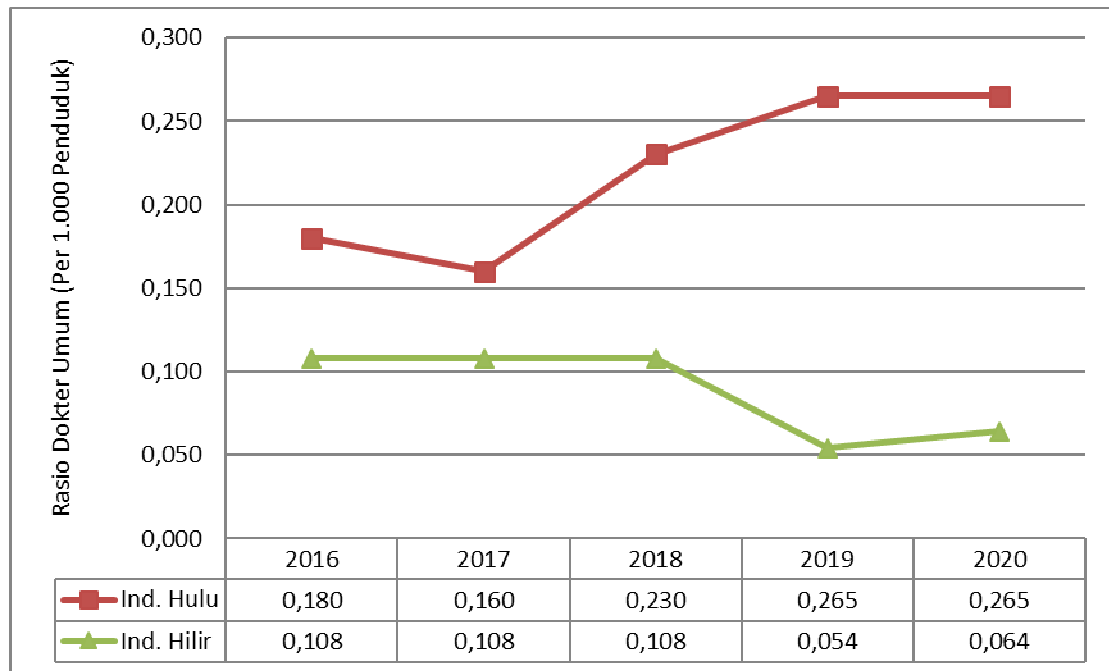
Gambar 2.58.

Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rasio Dokter Umum

Selama periode 2016 – 2020, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, jumlah dokter umum di Indragiri Hilir sebanyak 60 orang dengan rasio dokter umum per 1.000 penduduk sebesar 0,108 yang berarti setiap 1 orang dokter melayani sebanyak 11.883 orang penduduk. Jumlah dokter umum meningkat menjadi 87 orang pada tahun 2018 atau 1 dokter melayani 8.406 orang penduduk. Capaian rasio dokter umum Indragiri Hilir dimana setiap 1 orang dokter umum melayani antara 8.289 – 11.883 orang penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional (1 orang dokter umum melayani 2.500 orang penduduk). Capaian rasio

dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini pada tahun 2016 - 2020, dibawah capaian rasio Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, upaya pencapaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir perlu diupayakan terus untuk dicapai. Idealnya sesuai standar nasional, jumlah dokter umum di Indragiri Hilir tahun 2018 sebanyak 292 dokter, masih kurang sebanyak 205 orang dokter umum.



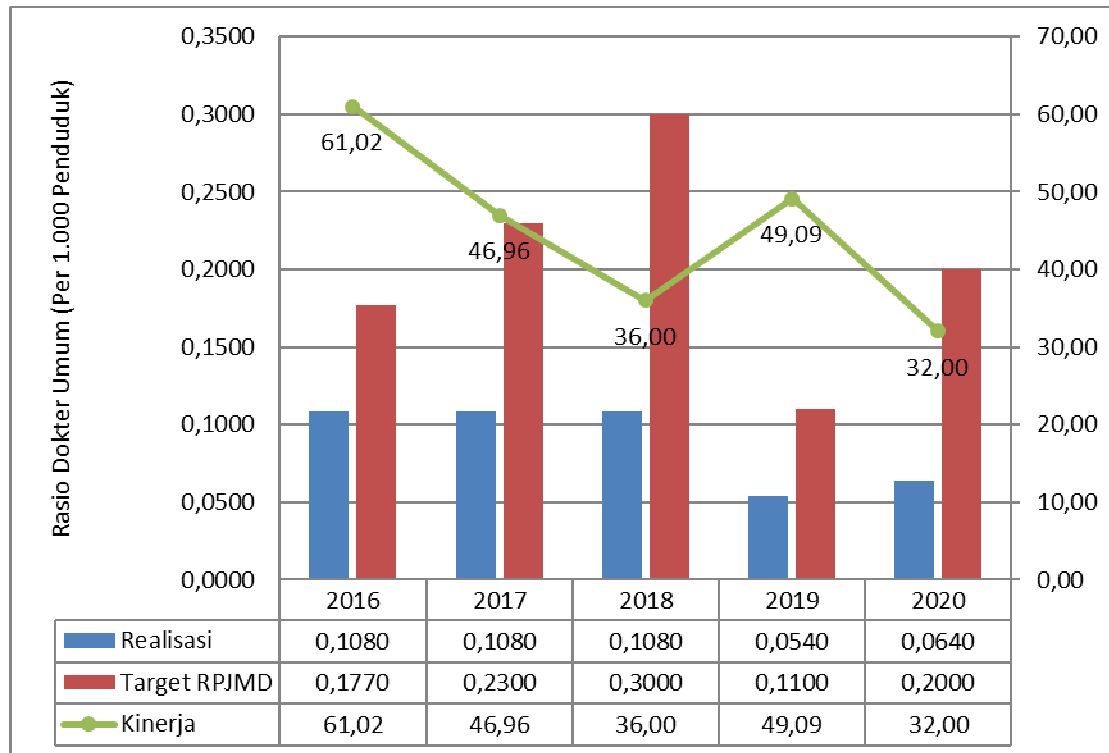
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021

Gambar 2.59.

Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter umum per 1.000 penduduk terus meningkat dari 0,11 pada tahun 2019 terus meningkat menjadi 0,20 pada tahun 2020. Realisasi rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berfluktuatif menurun dan terus dibawah target RPJMD. Pada tahun 2016 hingga 2018, realisasi kinerja berkisar 36,00% - 61,02% dan terkategori Sangat Rendah - Sedang. Pada tahun 2019, capaian realisasi rasio dokter umum sebesar 0,054 dengan realisasi kinerja sebesar 49,09% dan terkategori Rendah. Namun, pada tahun 2020, realisasi capaian rasio

dokter umum per 1.000 penduduk kembali meningkat menjadi 0,064% dengan capaian kinerja menurun menjadi 32% seiring dengan meningkatnya target dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

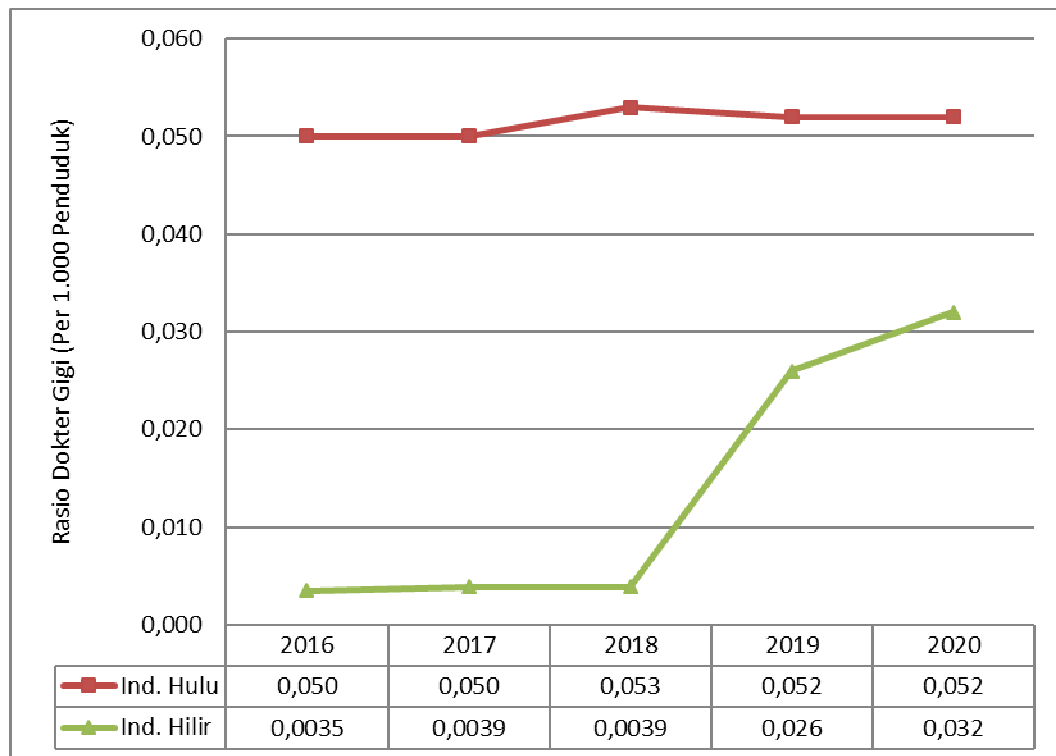
Gambar 2.60.

Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rasio Dokter Gigi

Selama periode 2016 – 2020, rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah dokter gigi di Indragiri Hilir sebanyak 17 orang dengan rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,02 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 41.396 orang penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter gigi meningkat menjadi 33 orang dengan rasio sebesar 0,039 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 22.164 penduduk Indragiri Hilir. Capaian layanan 1 orang dokter gigi melayani 21.830 – 41.943 penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional

(1 dokter gigi untuk melayani 9.090 penduduk). Bila dibandingkan dengan Indragiri Hulu, capaian rasio dokter gigi Indragiri Hilir lebih rendah dibandingkan dengan capaian rasio dokter gigi Indragiri Hulu. Menurut standar nasional, pada tahun 2019 Indragiri Hilir masih perlu tambahan sebanyak 48 orang dokter gigi.



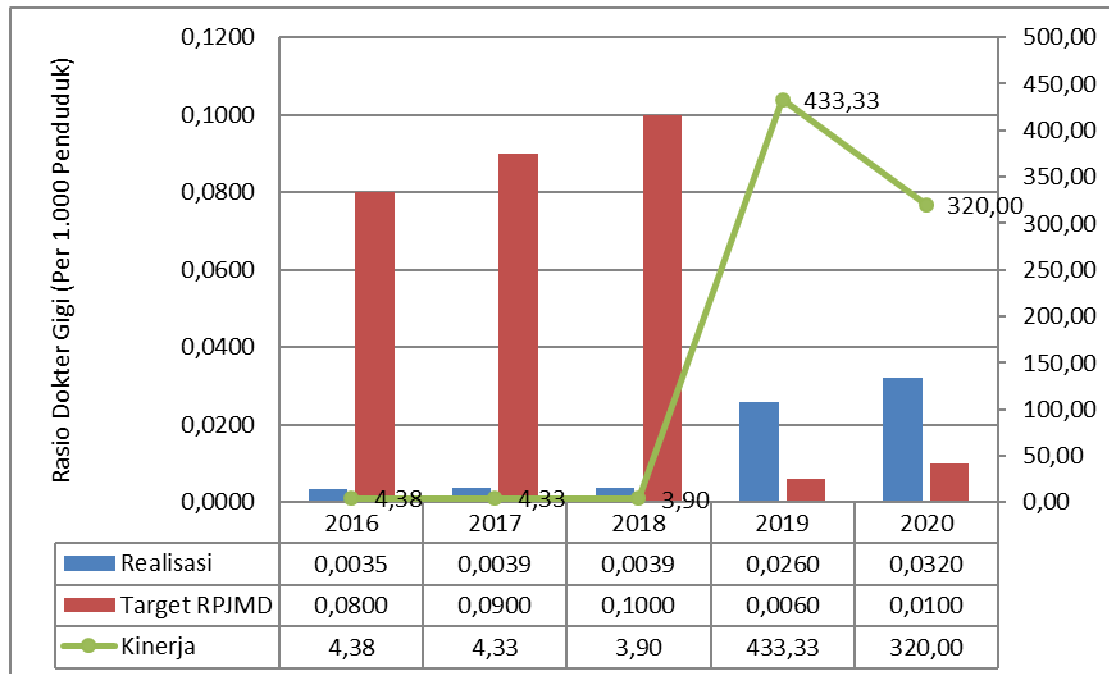
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021

Gambar 2.61.

Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir telah ditetapkan terus meningkat meski belum mencapai rasio ideal yaitu dari 0,006 tahun 2019 menjadi 0,01 pada tahun 2020. Realisasi rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir tahun 2016 - 2018 berada dibawah target dengan dengan realisasi kinerja berkisar antara 3,90% - 4,38% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator dokter gigi per 1.000 penduduk sebesar 433,33%

dan terkategori Sangat Tinggi seiring dengan telah disesuaikan target dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 menjadi 0,006 sehingga realisasi kinerja meningkat signifikan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

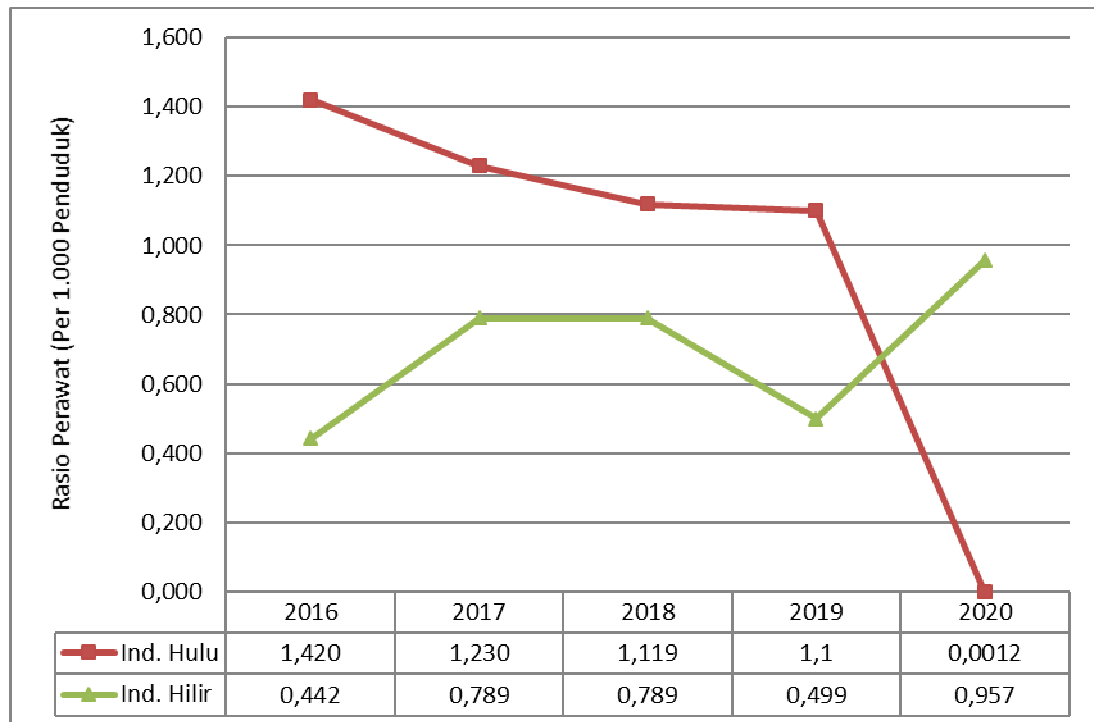
Gambar 2.62.

Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rasio Perawat

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Selama periode 2016 – 2020, rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah perawat di Indragiri Hilir sebanyak 323 orang dengan rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,442 yang berarti 1 orang perawat melayani sebanyak 2.178 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah perawat menurun menjadi 315 orang dengan rasio sebesar 0,44 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani sebanyak 2.292 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah

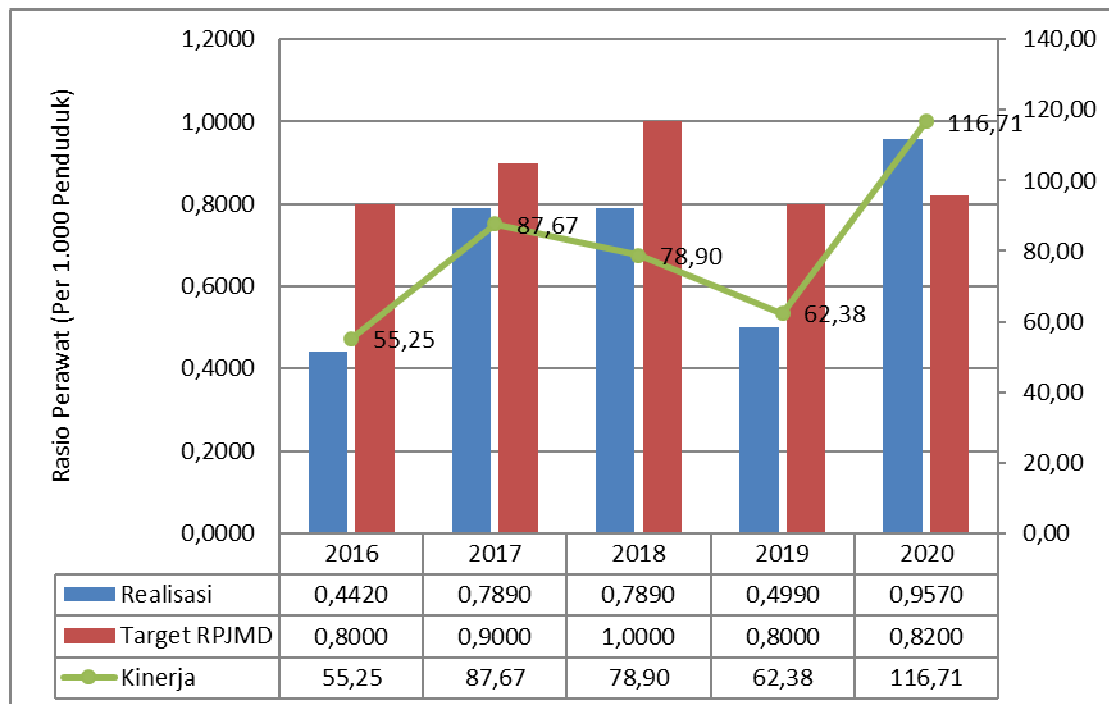
perawat meningkat drastis sebanyak 887 orang dengan perkiraan rasio sebesar 0,789 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani 825 penduduk. Hal ini sudah memenuhi standar nasional (1 perawat melayani 900,90 penduduk). Bila capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir dibandingkan dengan capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hulu menunjukkan bahwa capaian Indragiri Hilir relatif lebih rendah.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021
Gambar 2.63.

Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 0,800 pada tahun 2019 menjadi 0,820 pada tahun 2020. Realisasi rasio perawat per 1.000 Indragiri Hilir selama periode 2016 - 2019 terus dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 55,25% - 87,67% yang terkategori Rendah hingga Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja sudah melebihi target yaitu berkisar antara 116,71% yang terkategori Sangat Tinggi. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah perawat yang sangat signifikan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

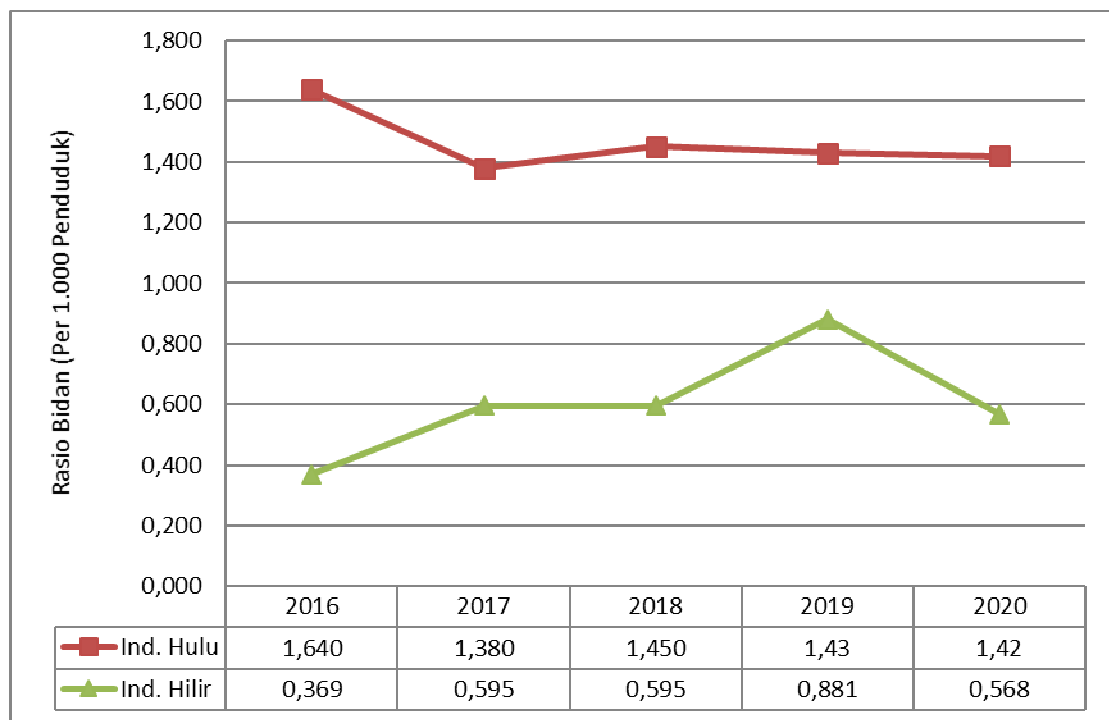
Gambar 2.64.

Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rasio Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selama periode 2016 – 2020, rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah bidan di Indragiri Hilir sebanyak 180 orang dengan rasio sebesar 0,369 atau setiap 1 orang bidan melayani sebanyak 3.910 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah bidan meningkat menjadi 430 orang dengan rasio bidan per 1.000 penduduk sebesar 0,24 atau setiap 1 orang bidan melayani sebanyak 1.680 penduduk Indragiri Hilir. Rentang pelayanan 1 orang bidan untuk 1.680 – 3.910 penduduk Indragiri Hilir ini terkategori dibawah standar nasional (1 orang bidan melayani sebanyak 833,33 penduduk). Namun, pada tahun 2018, jumlah bidan di Indragiri Hilir meningkat sangat signifikan menjadi 1.137 orang. Hal ini berarti setiap 1 orang bidan dapat melayani 643

penduduk. Capaian ini telah memenuhi standar nasional. Capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir relatif masih dibawah capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hulu, kecuali untuk tahun 2018, capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir diperkirakan berada diatas capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.

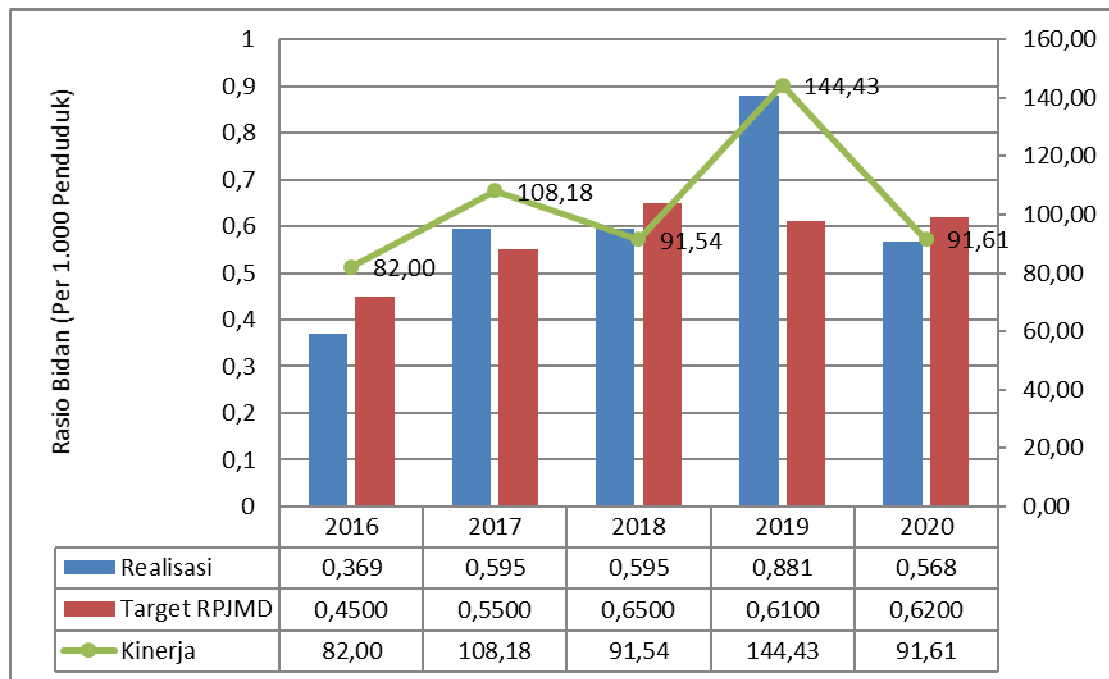


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dalam Angka, 2021
Gambar 2.65.

Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum akan ideal yaitu dari 0,61 pada tahun 2019 menjadi 0,62 pada tahun 2020. Realisasi indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 0,369 dengan realisasi kinerja sebesar 82% yang terkategori Tinggi pada tahun 2016, meningkat menjadi 0,881 dengan realisasi kinerja sebesar 144,43% yang terkategori Sangat Tinggi 2019. Namun, realisasi kinerja indikator rasio

bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir turun menjadi 91,61% meski masih terkategori Sangat Tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.66.

Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- SPM Bidang Kesehatan

Selama periode 2013 – 2017, SPM bidang kesehatan memiliki 2 Peraturan Menteri Kesehatan yaitu Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dasar dengan 22 indikator kinerja (termasuk sub indikator) yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah tahun 2010 – 2015 dengan nilai capaian berkisar Antara 0 – 100%. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan
Menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
I	Pelayanan Kesehatan Dasar		
	1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95	2015
	2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80	2015
	3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	2015
	4 Cakupan pelayanan ibu nifas	90	2015
	5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	2010
	6 Cakupan kunjungan bayi	90	2010
	7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	2010
	8 Cakupan pelayanan anak balita	90	2010
	9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	2010
	10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	2010
	11 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	2010
	12 Cakupan peserta KB Aktif	70	2010
	13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit		
	A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	2010
	B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	2010
	C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100	2010
	D. Penderita DBD yang Ditangani	100	2010
	E. Penemuan Penderita Diare	100	2010
	14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	2015
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan		
	15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	2015
	16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100	2015
III	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB		
	17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	2015
IV	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
	18 Cakupan Desa Siaga Aktif	40	2015

Pada tahun 2014, dari 22 indikator yang ditetapkan dalam Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 22 indikator (100%). Namun demikian, belum semua pelayan tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari 22 indikator, baru 5 indikator (22,73%) yang telah memenuhi target nasional, selebihnya belum mencapai target nasional.

SPM bidang kesehatan menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 direvisi menjadi Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa terdapat 12 jenis layanan dasar dengan 12 indikator kinerja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah tahun 2016 - 2020 dengan nilai capaian berkisar Antara 0 - 100%. Dalam pelaksanaan, mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengacu ke Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan
Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	2020	Dinkes Kab/Kota
2		Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	Sesuai standar pelayanan peralinaan a	Ibu bersalin	2020	Dinkes Kab/Kota
3		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Bayi baru lahir	2020	Dinkes Kab/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
4		Pelayanan kesehatan balita	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	2020	Dinkes Kab/Kota
5		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	2020	Dinkes Kab/Kota
6		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	2020	Dinkes Kab/Kota
7		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas	2020	Dinkes Kab/Kota
8		Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	2020	Dinkes Kab/Kota
9		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	2020	Dinkes Kab/Kota
10		Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	2020	Dinkes Kab/Kota
11		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	Sesuai standar skrining kesehatan dengan TB	Orang dengan TB	2020	Dinkes Kab/Kota
12		Pelayanan kesehatan orang	100	Sesuai standar mendapat	Orang berisiko terinfeksi	2020	Dinkes Kab/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
		dengan risiko terinfeksi HIV		kan pemeriksaan HIV	HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)		

Selama periode 2015 - 2018, capaian ke 12 indikator bidang kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.15. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 12 indikator (100%). Namun demikian, belum semua indikator tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Dari 12 indikator, baru 4 indikator (30%) yang telah memenuhi target nasional.

Tabel 2.16.
Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2015 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM			
		2015	2016	2017	2018*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73,96	71	77	77
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	68	76	76
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	71,14	79	72	72
4	Pelayanan kesehatan balita	73,46	48	55	55
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	28,53	93	81	81
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	61,47	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	29,06	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	45,78	100	35	35
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100,00	100	12	12
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	33,21	100	100	100

No.	Indikator SPM	Capaian SPM			
		2015	2016	2017	2018*
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	46,65	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	-	45	38	38

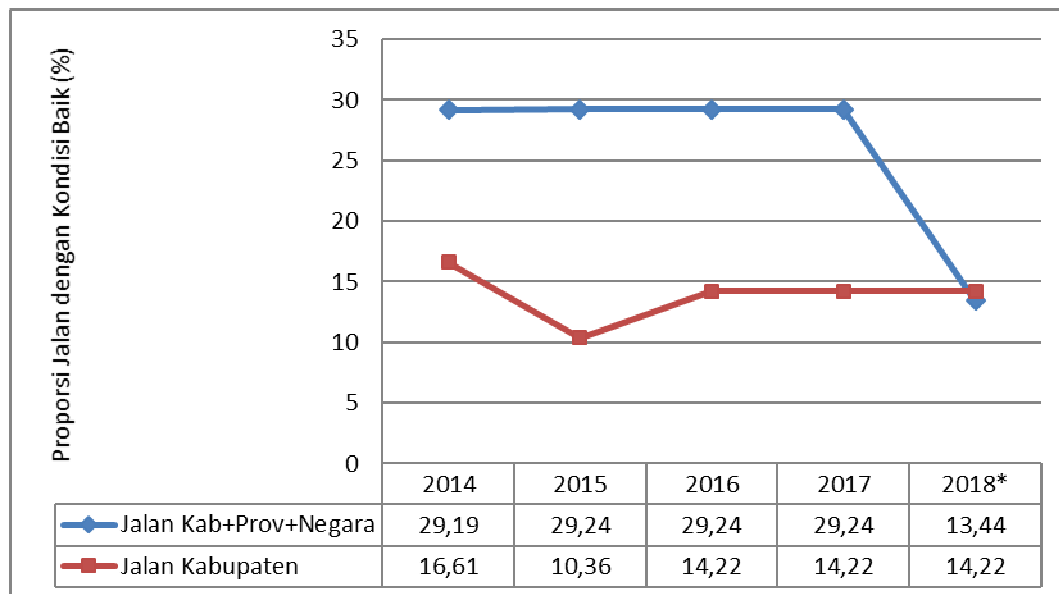
Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan Antara lain yaitu (i) masih kurangnya ketersediaan Anggaran untuk masing-masing program. (ii) penyebaran Sumber Daya Manusia belum merata di Sarana dan Prasarana Kesehatan sehingga masih minimnya pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. (iii) belum terintegrasinya SPM ke dalam renstra SKPD. Solusi dari permasalahan diatas adalah penerapan 10% APBD untuk kesehatan dan menerapkan SPM secara maksimal dan terintegrasi ke dalam renstra SKPD terkait

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan urusan wajib dasar bidang Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang dianalisis dengan beberapa aspek yaitu (i) Kondisi jalan Kabupaten, (ii) Jembatan, (iii) Irigasi dan (iv) RuangTerbuka Hijau.

- Jalan Kabupaten

Jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air. Pada tahun 2018, panjang jalan di Kabupaten Indragiri Hilir sepanjang 1.872,05 Km yang terdiri dari 214,23 Km (11,44%) jalan Negara, 467,23 Km (24,96%) jalan Provinsi dan 1.190,59 Km (63,60%) jalan Kabupaten. Selama periode 2015 – 2018, seluruh jalan di Kabupaten di Indragiri Hilir (Negara, Provinsi dan Kabupaten) dengan kondisi baik proporsinya sebesar 29,24% pada tahun 2015 dan menurun proporsinya menjadi 13,44% pada tahun 2018.

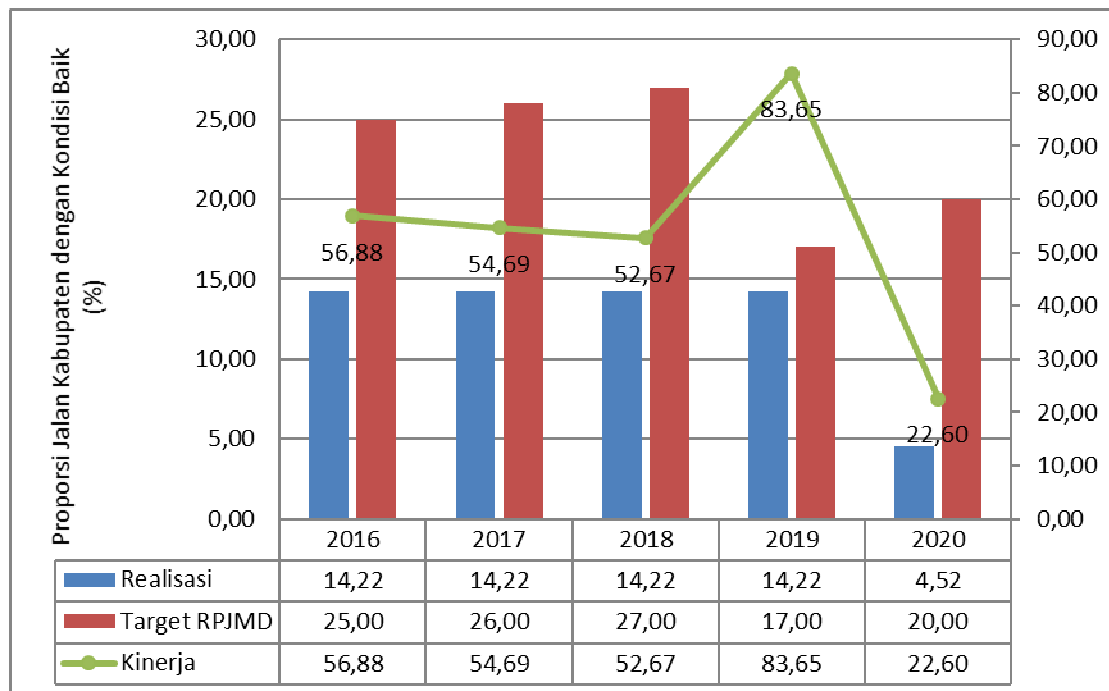


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2015 - 2020)

Gambar 2.67.

Perkembangan Jalan dengan Kondisi Baik Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi baik, proporsinya ditargetkan terus meningkat dari 17% pada tahun 2019 menjadi 20% pada tahun 2020. Selama periode 2016 - 2020, realisasi proporsi jalan kabupaten dengan kondisi baik terus dibawah target yaitu sebesar 4,52% - 14,22%. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik berkisar antara 22,60% - 83,65% dengan kategori Sangat Rendah - Sedang. Rata - rata nilai realisasi kinerja sebesar 58,21% dengan kategori Rendah.

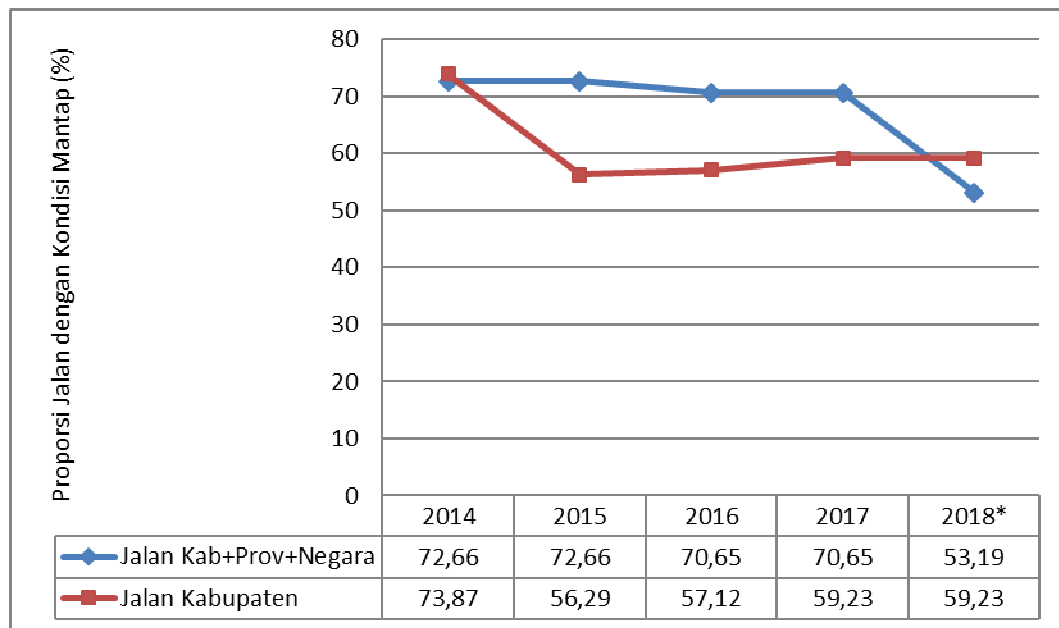


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Gambar 2.68.

Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Pada periode yang sama (2014 – 2018), panjang jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) untuk seluruh status jalan (Negara, Provinsi dan Kabupaten) di Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun yaitu dari 1.276,74 Km dengan proporsi sebesar 72,66% pada tahun 2014, menurun menjadi 633,27 Km dengan proporsi sebesar 53,19% pada tahun 2018. Capaian kondisi seluruh status jalan ini lebih tinggi dibanding dengan capaian panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap. Pada tahun 2015, panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap mempunyai proporsi sebesar 56,29% terus meningkat proporsinya menjadi 57,12% pada tahun 2016 dan menjadi 59,23% pada tahun 2017. Secara keseluruhan, jalan dengan kondisi mantap, baik pada semua status jalan maupun jalan kabupaten masih dibawah standar yang ditetapkan secara nasional yaitu 80% jalan dengan kondisi mantap. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan kondisi jalan dengan status mantap dengan proporsi sekitar 80% perlu terus diupayakan.

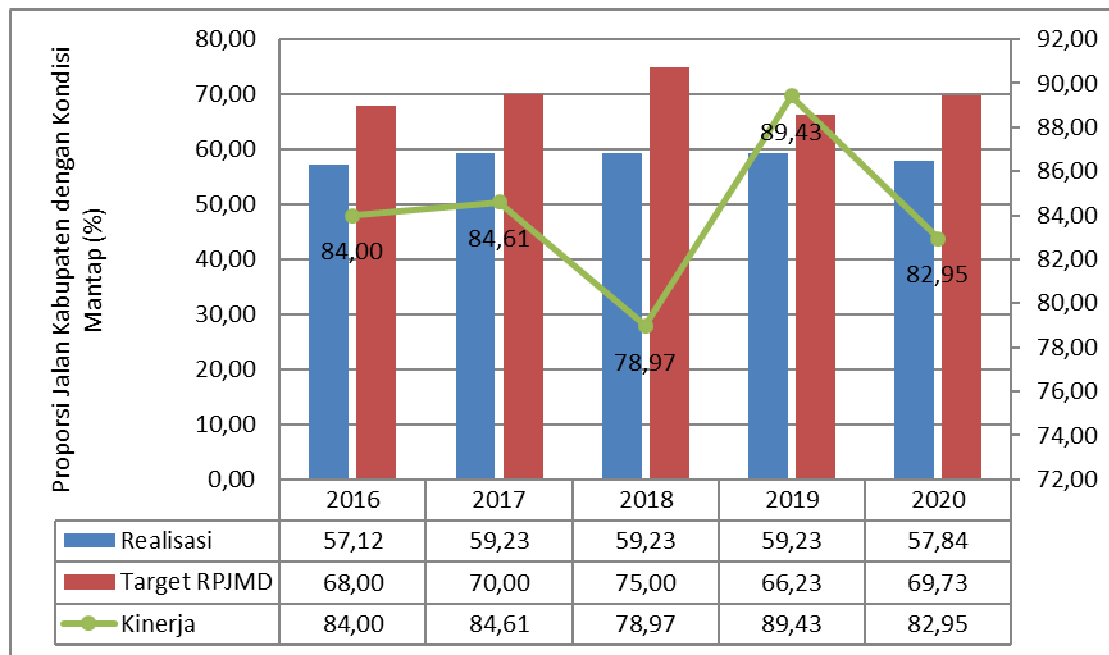


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2015 - 2020)

Gambar 2.69.

Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi mantap, proporsinya ditargetkan terus meningkat yaitu dari 66,23% pada tahun 2019 menjadi 69,73% pada tahun 2020. Pada periode 2016 - 2020, realisasi indikator jalan kabupaten dengan kondisi mantap terus dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 78,97% - 89,43% yang terkategori Tinggi.



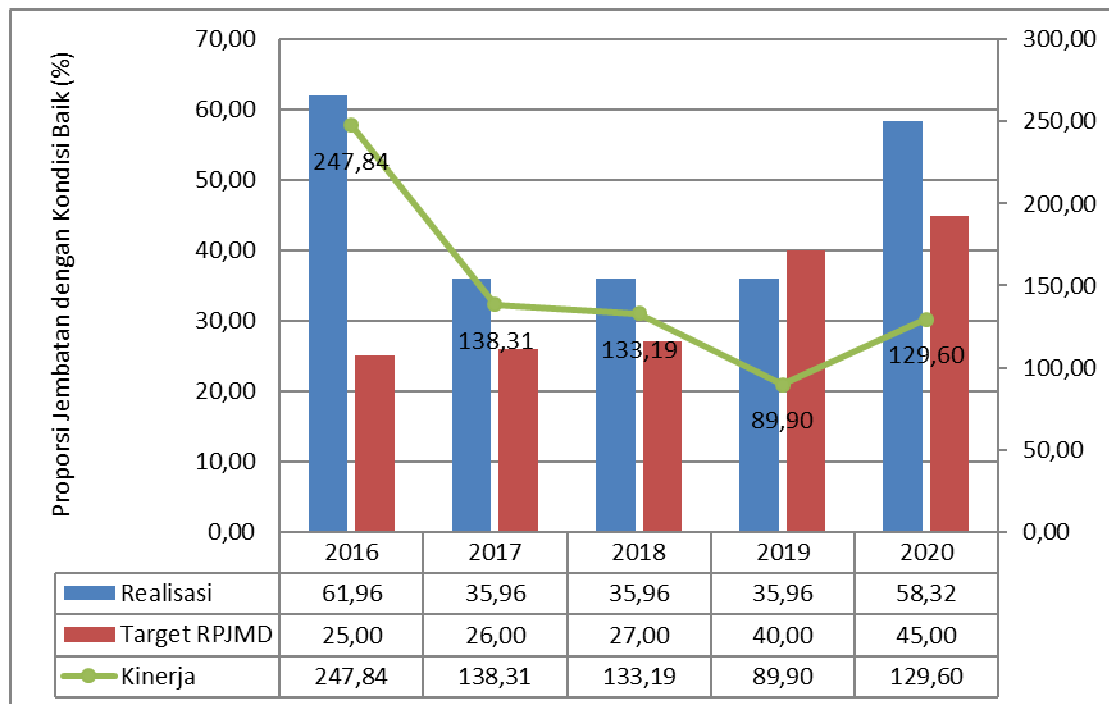
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Gambar 2.70.

Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Jembatan

Secara umum, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Selama periode 2016 – 2020, jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan kondisi baik memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, proporsi jembatan dengan kondisi baik sebesar 61,96% menurun menjadi 35,96% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, proporsi jembatan dengan kondisi baik meningkat menjadi 58,32%. Selama periode 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhan proporsi jembatan dengan kondisi baik menurun sebesar -9,05% per tahun. Penurunan proporsi jembatan dengan kondisi baik dan mantap harus menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya agar transportasi dari dan menuju Indragiri Hilir dapat terus lancar.



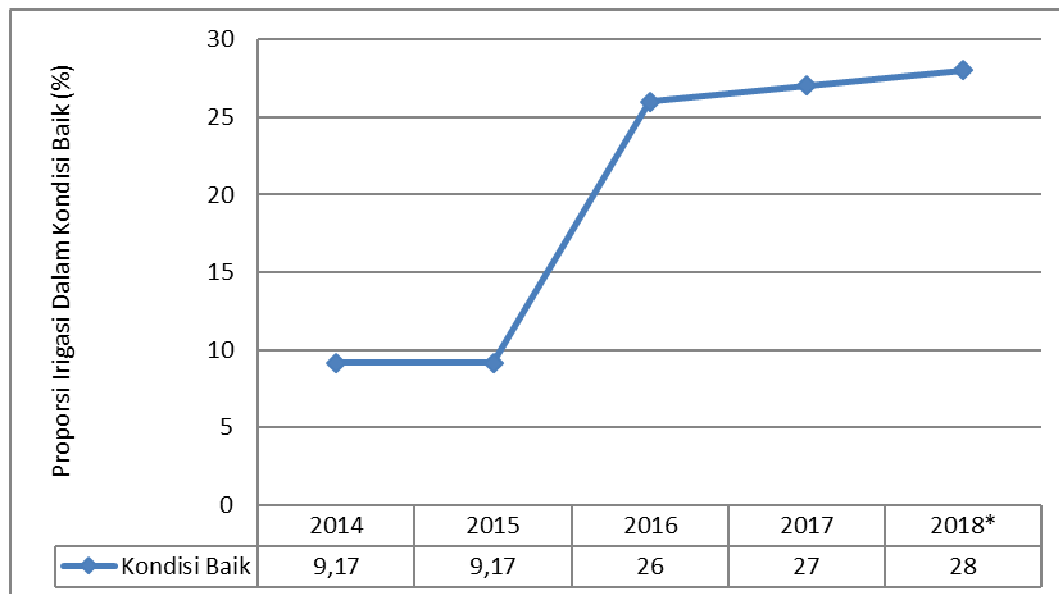
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Gambar 2.71.

Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Selama periode 2014 – 2018, irigasi di Indragiri Hilir dengan kondisi baik proporsinya berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2014, proporsinya sebesar 9,17% meningkat menjadi 27% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, diperkirakan proporsi irigasi dengan kondisi baik meningkat menjadi 28%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator luas irigasi dengan kondisi baik menurun sebesar 25,01% per tahun. Rendahnya proporsi luas irigasi dengan kondisi baik dan penurunannya yang tajam perlu mendapat perhatian dalam pembangunan agar produksi padi dapat terus ditingkatkan

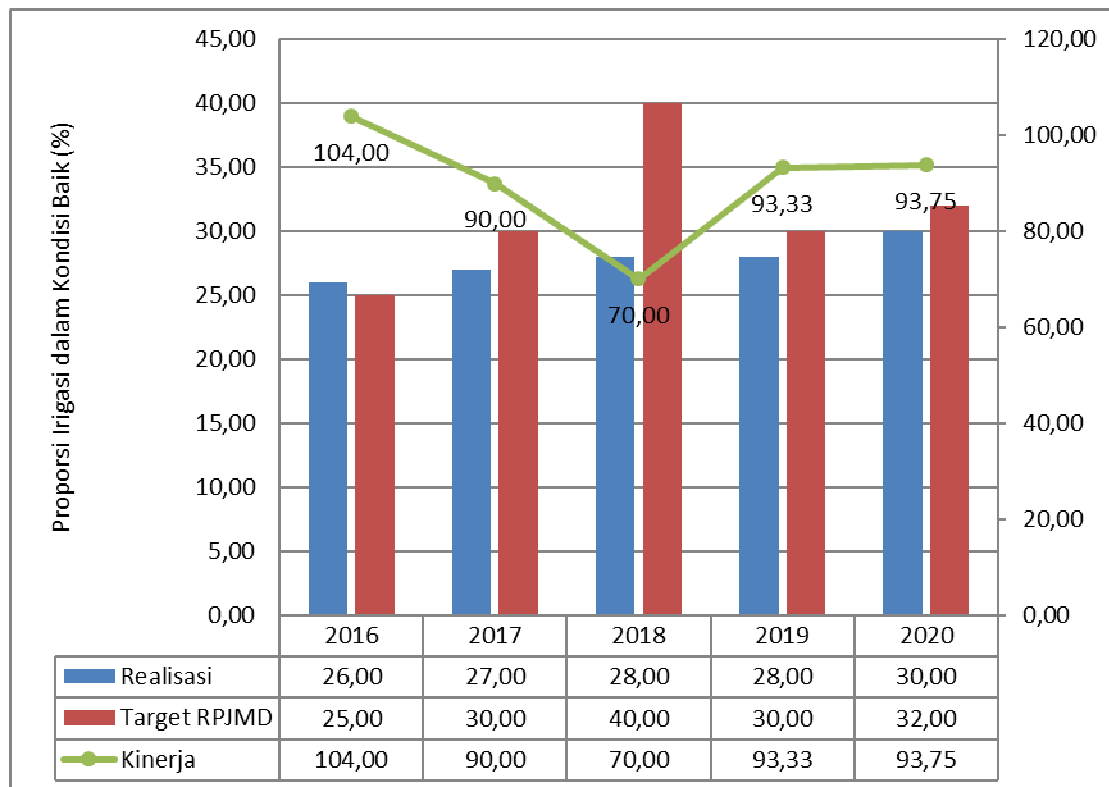


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2015 - 2019) dan LKPJ (2015 - 2019)

Gambar 2.72.

Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator luas irigasi dalam kondisi baik telah ditetapkan meningkat dari 30% pada tahun 2019 menjadi 32% pada tahun 2020. Realisasi indikator luas irigasi dengan kondisi baik memiliki tren meningkat meski umumnya masih dibawah target kecuali untuk tahun 2016 yang capaiannya diatas target. Kinerja tahun 2016 yang capaian realiasi kinerja sebesar 104,00% yang terkategori Sangat Tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2017 - 2020, 70% - 93,75%. Rata - rata realisasi kinerja indikator luas irigasi dengan kondisi baik sebesar 83,69% dan terkategori Tinggi.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Gambar 2.73.

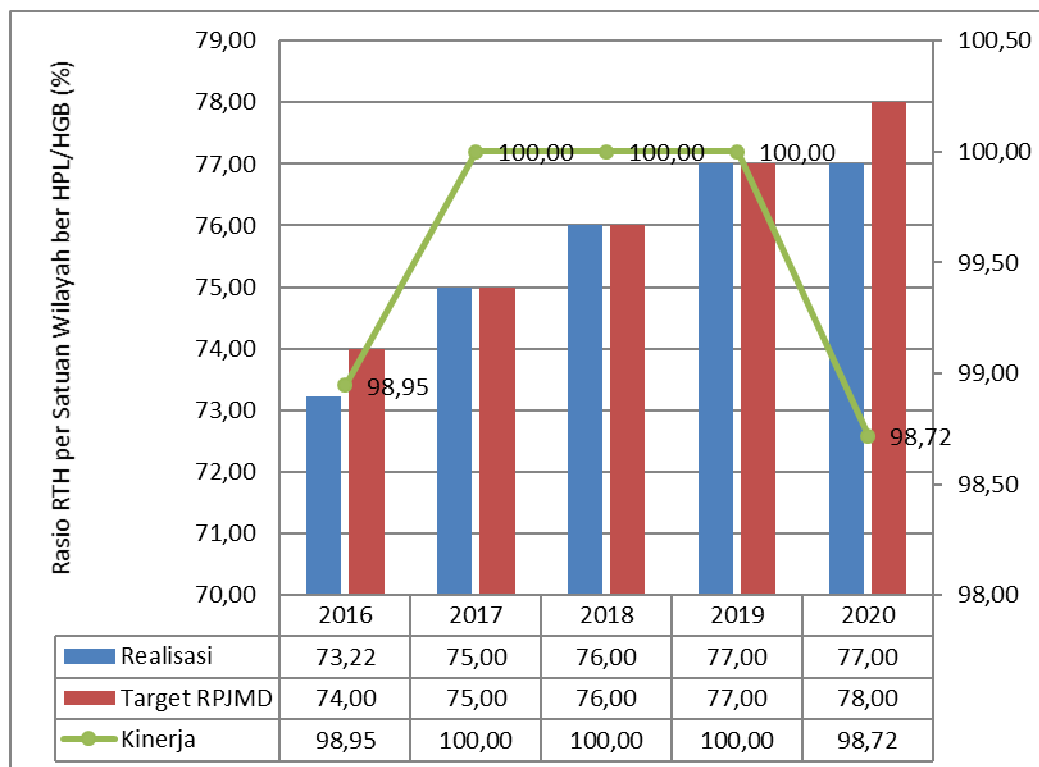
Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria (a) Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, (b) berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan (c) didominasi komunitas tumbuhan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 74% pada tahun 2016 menjadi 78% pada tahun 2020. Realisasi capaian indikator rasio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB terus dibawah target dan relatif sama

dengan target pada tahun 2017 - 2019. Selama periode ini, realisasi kinerja rasio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir berkisar antara 98,72% - 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator yang tinggi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.74.

Kinerja Indikator Ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- SPM PU-PR

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM PU-PR terdiri dari 9 jenis pelayanan

dasar yang terdiri atas 16 indikator (termasuk anak indikator) dengan batas waktu pencapaian tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.17 dibawah ini.

Tabel 2.17.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang PU-PR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator, Target dan Tahun Pencapaian	
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (100%) tahun 2019
		2	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 70% tahun 2019
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	3	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang. 60% tahun 2019
		4	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten/ kota 100% tahun 2019
3	Penyediaan air minum	5	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman target 81,77 % tahun 2019
4	Penyediaan sanitasi	6	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai target 60% tahun 2019
		7	persentase pengurangan sampah di perkotaan target 20% tahun 2019
		8	persentase pengangkutan sampah target 70 % tahun 2019
		9	persentase pengoperasian TPA target 70 % tahun 2019
		10	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
			Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota target 50 % tahun 2019
			Pengurangan Luas Genangan target 50 % tahun 2019
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yang diterbitkan target 60 % tahun 2019
6	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan target 10 % tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator, Target dan Tahun Pencapaian	
7	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) target 60 % tahun 2019
		14	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap target 100% tahun 2019
8	Informasi Penataan Ruang	15	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital target 100% tahun 2019
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan target 50% tahun 2019

Pencapaian indikator SPM bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2014 – 2018 ditunjukkan pada Tabel 2.18. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 6 indikator (37,50%) dengan jumlah indikator mencapai target nasional sebanyak 2 indikator (12,50%).

Tabel 2.18.
Pencapaian Indikator SPM Bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	59,28	59,28	-	-
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	-	-	-	93,48	93,00
3	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	33,06	65,08	65,08	58,86	59,00
4	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	-	24,14	24,14	-	-
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	-	-	-	-
6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-	-	-	-
7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	67,05	-	-	-	-
8	Persentase pengangkutan sampah	67,05	-	-	-	-

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
9	Persentase pengoperasian TPA	-	-	-	-	-
10a	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	33,25	1,96	1,96	-	-
10b	Pengurangan luas genangan	-	-	-	-	-
11	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	38,35	166,67	166,67	100,00	100,00
12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	-	-	-
13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-	-	-	-
14	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	42,60	40,01	40,01	37,26	37,26
15	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	-	-	-	77,39	77,39
16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	42,34	-	-	-	-

Permasalahan/hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM hingga tahun 2018 menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.19 dibawah ini.

Tabel 2.19.
Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	HAMBATAN	SOLUSI
1 Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat	1 Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	-
	2 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Sidementasi yang terlalu cepat sehingga terjadi pendangkalan saluran irigasi	Operasional dan pemeliharaan saluran irigasi secara berkala dan tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
2 Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	3 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Anggaran kurang memadai dan kondisi geografis yang sulit serta proses lelang yang selalu lambat, sehingga pengerjaan selalu dipenghujung waktu.	meningkatkan jumlah anggaran serta mempercepat proses lelang, sehingga bisa dikerjakan tepat waktu.
	4 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	Pembebasan Lahan pada Penyediaan Jalan	Tersedianya Lahan sebelum Pembangunan jalan
3 Penyediaan air minum	5 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	-
4 Penyediaan sanitasi	6 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-
	7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	-
	8 Persentase pengangkutan sampah	-	-
	9 Persentase pengoperasian TPA	-	-
	10 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	-
5 Penataan Bangunan dan Lingkungan	11 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
6 Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-
7 Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13 Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-
	14 Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	-
8 Informasi Penataan Ruang	15 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
9 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW

d. Perumahan Rakyat dan Pemukiman

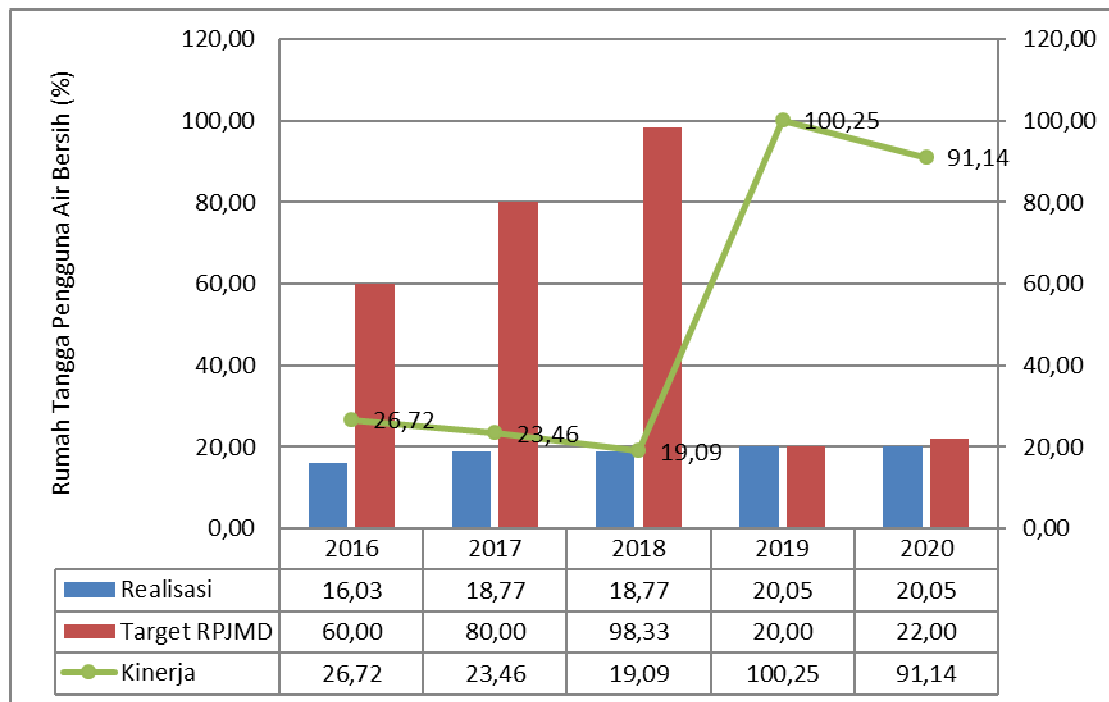
Layanan urusan wajib dasar bidang Perumahan dan Pemukiman dianalisis dari tiga indikator utamanya yaitu (i) Rumah tangga pengguna air bersih, (ii) Rumah tidak layak huni dan (iii) Rumah tangga pelanggan listrik PLN.

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi

persyaratan untuk pengairan sawah, untuk *treatment* air minum dan untuk *treatment* air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fisika dan biologis. Pengertian air bersih secara umum adalah air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia. Secara fisik air tersebut tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Secara Kimia adalah (a) PH netral (bukan asam/basa) dan (b) tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya. Selama periode 2015 – 2019, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari 60% pada tahun 2016 menjadi 22% pada tahun 2020. Pada tahun 2016 - 2018, capaian indikator rumah tangga pengguna air bersih sebesar 16,03% - 18,77% dengan realisasi kinerja berkisar antara 19,09% - 26,72%. Pada tahun 2019, realisasi sebesar 20,05%, dengan capaian kinerja 100,25% yang terkategori Sangat Tinggi. Hal ini terjadi karena penyesuaian target dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023. Upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap penggunaan air bersih perlu mendapat prioritas pada pembangunan ke depan.



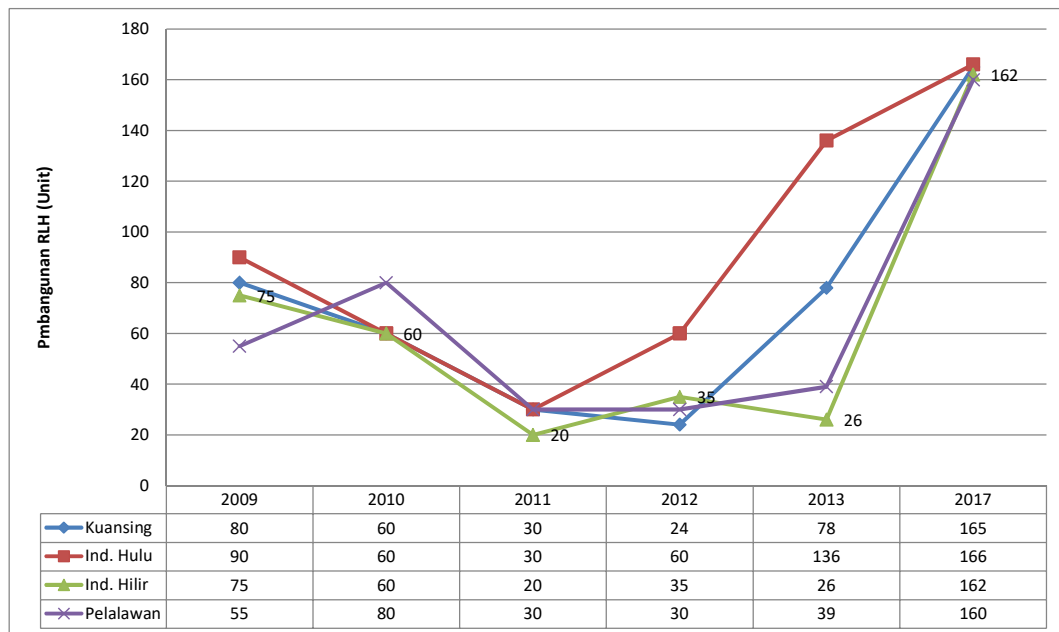
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.75.

Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni dapat didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Selama periode 2009 – 2017, tidak termasuk tahun 2014 – 2016, jumlah pembangunan rumah layak huni (RLH) di Indragiri Hilir bervariasi setiap tahunnya dengan sumber dana APBD Kabupaten dan Provinsi dan APBN. Selama periode ini, jumlah RLH yang dibangun untuk keluarga miskin sebanyak 378 unit, jumlah yang paling sedikit dibanding jumlah RLH yang dibangun di Kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu sebanyak 542 unit, Kuantan Sengingi sebanyak 437 unit dan Pelalawan sebanyak 394 unit. Disisi lain jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir adalah yang terbanyak dibanding Kabupaten sekitarnya yaitu sebanyak 55,40 ribu jiwa.

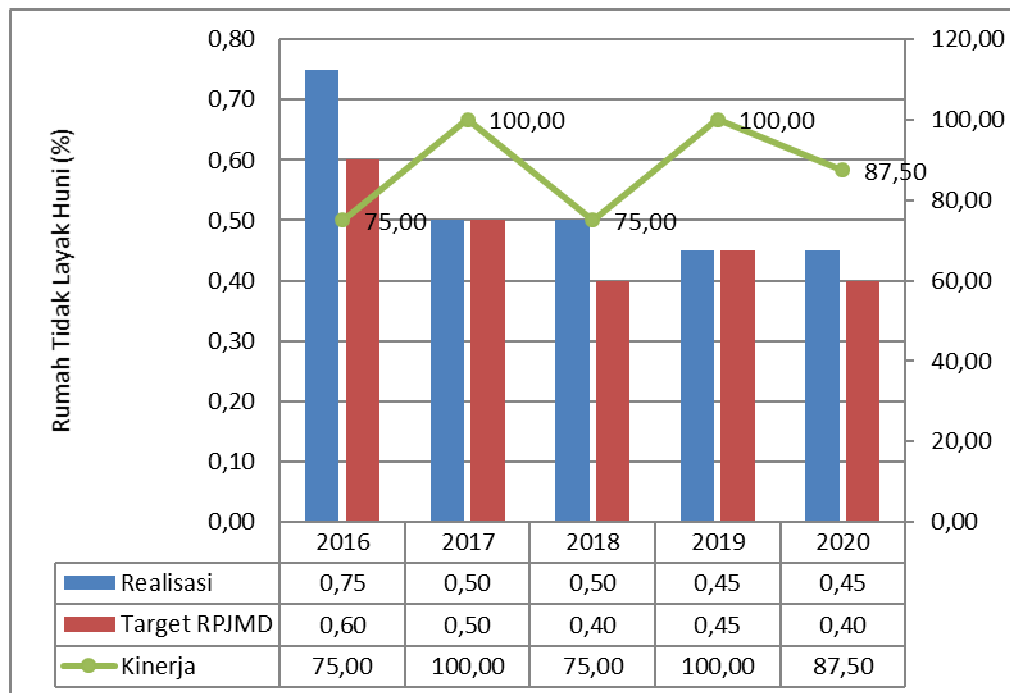


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.76.

Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Tetangga Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rumah tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 0,60% pada tahun 2016 menjadi 0,40% pada tahun 2020. Realisasi capaian indikator rumah tidak layak huni lebih rendah dan/atau sama dengan target. Pada tahun 2016, capaian realisasi kinerja rumah tidak layak huni yang tersisa relatif dibawah target yaitu sebesar 0,75% dengan capaian realisasi kinerja 75% Sedang. Pada tahun 2019, capaian indikator rumah tidak layak huni sama dengan target sehingga realisasi kinerja sekitar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja indikator rumah tidak layak huni sebesar 87,50% dengan kategori Tinggi.



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diolah Bappeda, 2021

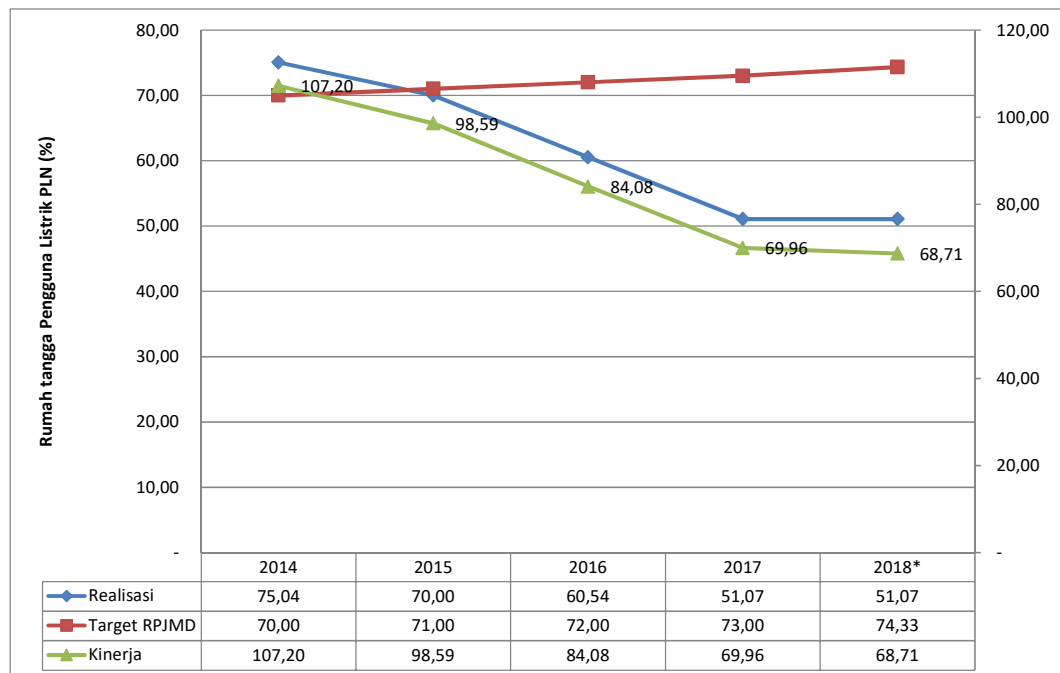
Gambar 2.77.

Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN

Selama periode 2014 – 2018, persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik PLN terus menurun. Pada tahun 2012, rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN sebesar 75,04% dan ditahun-tahun berikutnya persentasenya menurun hingga 51,07% pada tahun 2018. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rumah tangga pelanggan listrik PLN trus meningkat dari 70% pada tahun 2014 menjadi 74,33% pada tahun 2018. Capaian realisasi kinerja indikator rumah tangga pelanggan listrik PLN menurun dari 107,20 dengan kategori tinggi pada tahun 2014 menjadi 84,08% pada tahun 2016 dengan kategori Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja indikator ini menurun menjadi 69,96% dan 2018 menjadi 68,71% yang keduanya terkategori Sedang. Penurunan persentase rumah tangga pelanggan listrik PLN harus menjadi perhatian pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga akses rumah tangga terhadap listrik

PLN dapat terus meningkat sehingga produktivitas rumah tangga juga meningkat.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2014 - 2018) dan LKPJ (2014 - 2018)

Gambar 2.78.

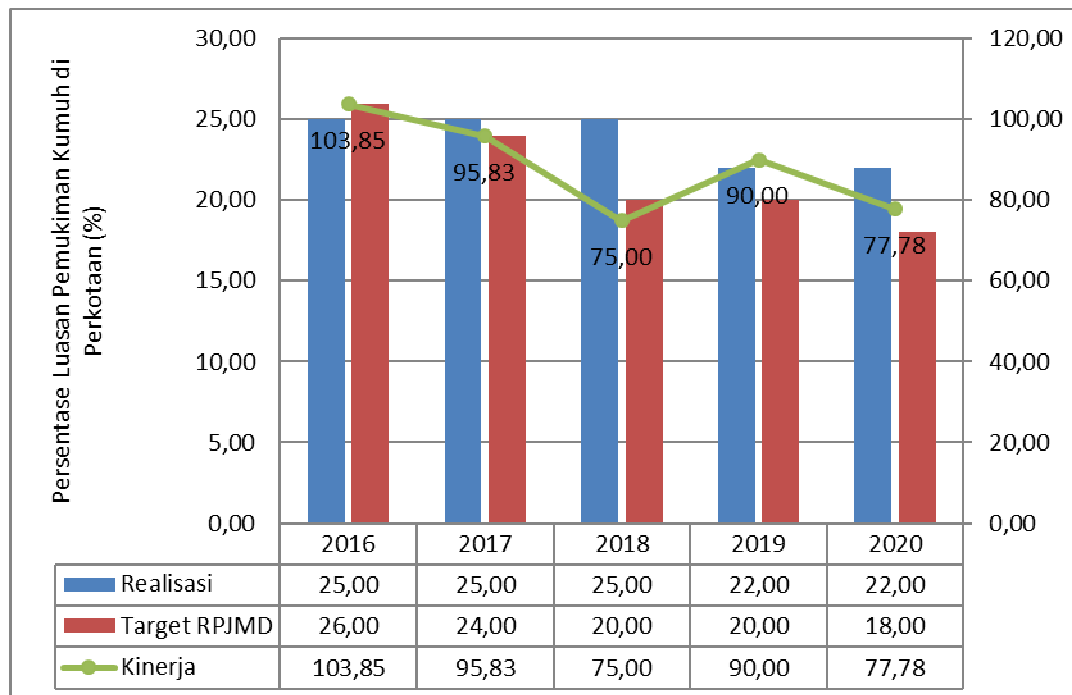
Kinerja Indikator Rumah tangga Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

- Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Selama periode 2016 - 2020, persentase luasan lingkungan permukiman kumuh di perkotaan di Indragiri Hilir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase lingkungan permukiman kumuh

di perkotaan di Indragiri Hilir sebanyak 25,00% menurun menjadi 22,00% pada 2020. Realisasi kinerja berkisar antara 77,78% - 103,85% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Persentase luasan lingkungan pemukiman kumuh di perkotaan harus terus diturunkan kedepannya agar kualitas hidup dapat ditingkatkan.



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.79.

Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- SPM Bidang Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2010 tentang /Kota, dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah

Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 2 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 3 indikator dan batas waktu pencapaian SPM tahun 2009–2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau		
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009–2025
2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70	2009–2025
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
3	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	2009–2025

Pencapaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.21. Pada tahun 2017, dari 3 indikator pelayanan dasar bidang perumahan, seluruhnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Capaian semua indikator masih dibawah target nasional.

Tabel 2.21.
Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	na	na	25,17	21,00	21,00
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	na	na	6,78	4,36	4,36
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	na	na	0,10	0,10	0,10

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian SPM Perumahan Rakyat beserta solusi ditunjukkan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.22.
Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di
Kabupaten Indragiri Hilir

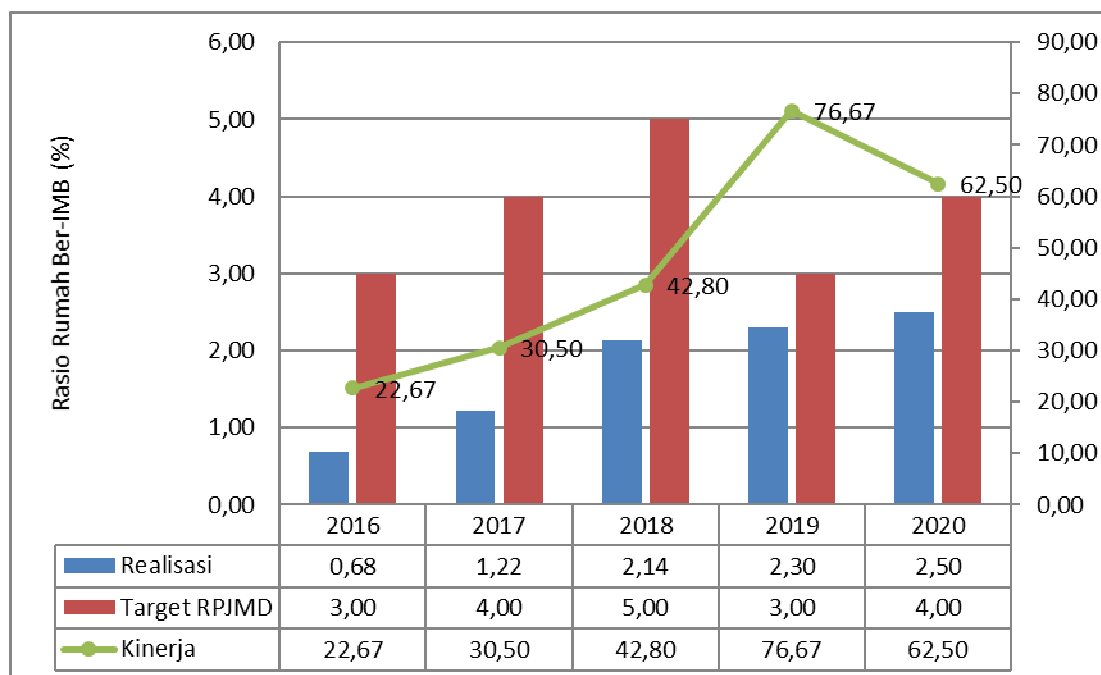
No	Masalah	Sub Masalah	Solusi
1	Perumahan Rakyat belum memenuhi standar layak huni	Mahalnya bahan konstruksi di daerah pedesaan sehingga masyarakat kesulitan membangun rumah bersetandar	Membantu masyarakat membangun rumah layak huni berstandar
		Struktur tanah yang tidak memungkinkan membangun beton atau semenisasi rumah	Diupayakan membangun rumah dengan penimbunan sabut dan pasir curug
2	Sulitnya akses jalan	Sulitnya akses cepat jalan lingkungan pemukiman	Membangun jalan lingkungan dan menunjang keberhasilan distribusi dan perekonomian masyarakat
3	Tidak adanya jamban (toilet)	Dekatnya sumber air sungai	Membuat kesadaran hidup bersih dan sehat
			Membuat tempat mandi cuci kakus (MCK)
4	Sulitnya air bersih	Jenis air di Kabupaten Indragiri Hilir adalah payau (berlumpur)	Membangun pipa air bersih dengan sumur bor
			Membantu masyarakat membuat penampungan air hujan
5.	Lemahnya administrasi pembangunan tempat pemakaman umum	Tidak adanya pembatas tanah bangunan tempat pemakaman umum	Membuat pagar pembatas antar wilayah penguburan jenazah dengan batas tanah masyarakat
6.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan kecamatan di wilayah pedesaan	Partisipasi Rekreasi pada masyarakat di Kecamatan tertentu	Terbuka Hl jau dengan mementingkan aspek pertumbuhan perdagangan dan jasa transfortasi
			Membuat Taman Rekreasi di Kawasan Perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari empat indikator penting yaitu ((i) Rasio rumah ber IMB, (iii) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, (iii) Cakupan penegakan daerah dan peraturan kepala daerah, dan (iv) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Rasio Rumah Ber IMB

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio rumah ber IMB terus meningkat yaitu dari 3% pada tahun 2019 menjadi 4% pada tahun 2020.



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.80.

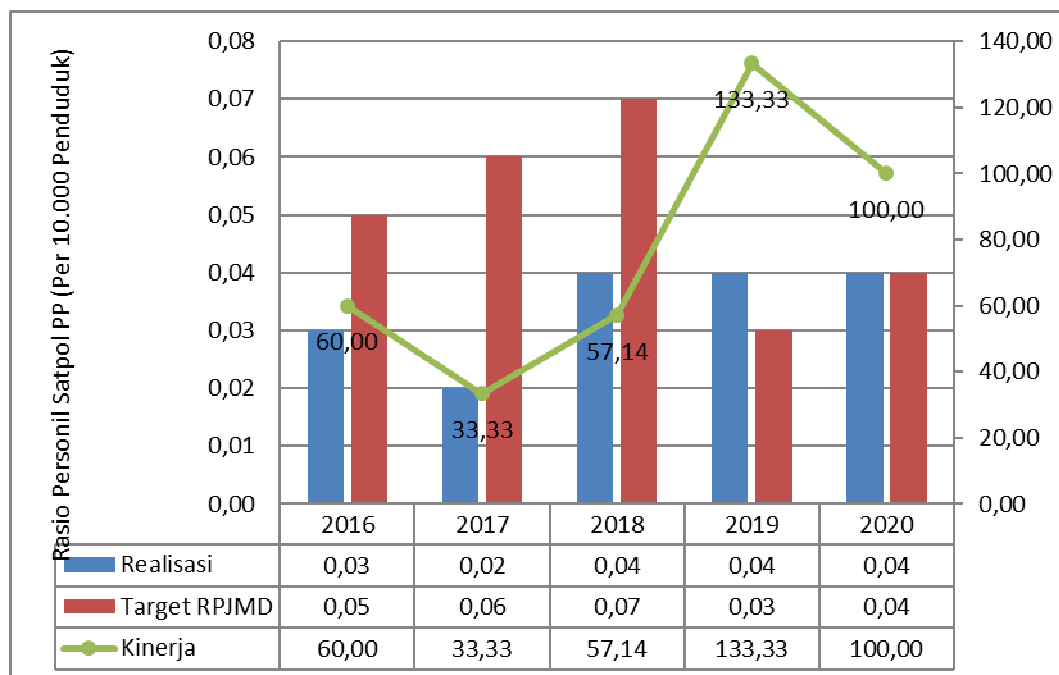
Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Selama periode 2016 – 2020, capaian indikator rasio rumah ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan tetapi masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada periode ini, realisasi kinerja indikator rasio rumah ber IMB berkisar antara 6,50% - 42,80% yang

terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019, diperkirakan capaian realisasi sebesar 2,3%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 76,67% yang terkategori Sedang. Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan periode mendatang.

- Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk terus meningkat dari 0,03 tahun 2019 menjadi 0,04 tahun 2020.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.81.

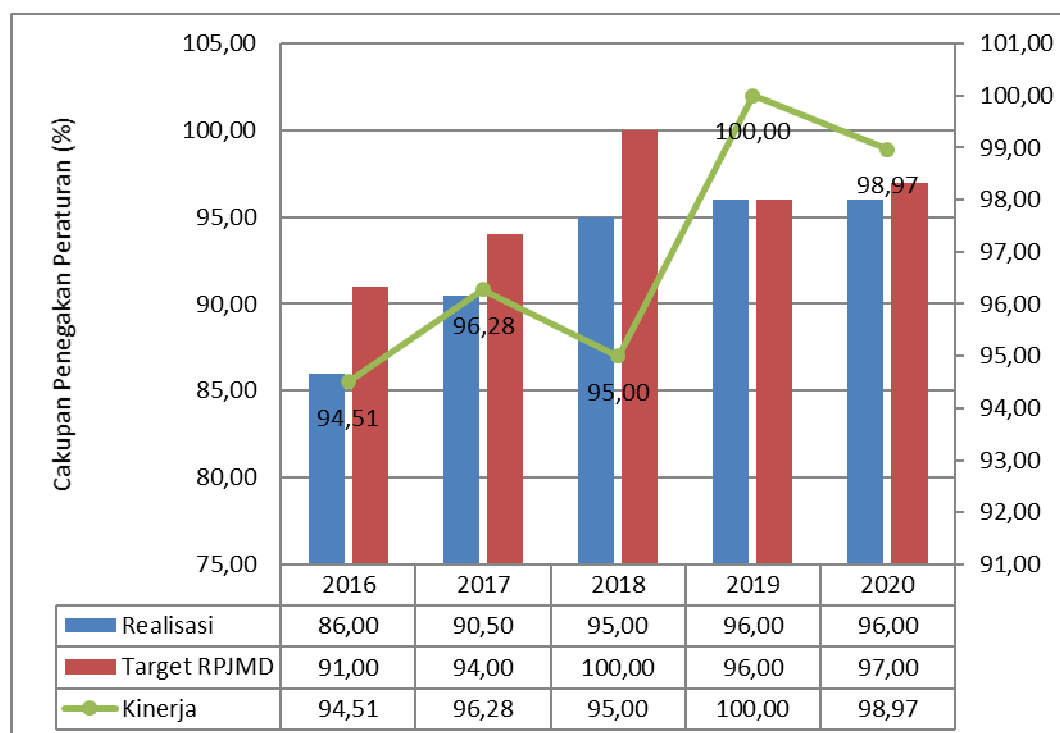
Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Realisasi indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2018 terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2016 – 2018, realisasi kinerja

indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir berkisar antara 33,33% - 60,00% yang terkategori Rendah - Sedang. Pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini telah melampaui target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu mencapai 133,33% yang terkategori Sangat Tinggi. Tahun 2020, realisasi kinerja indikator ini telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh RPJMD.

- Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 96% pada tahun 2019 menjadi 97% pada tahun 2020.



Sumber : (Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.82.

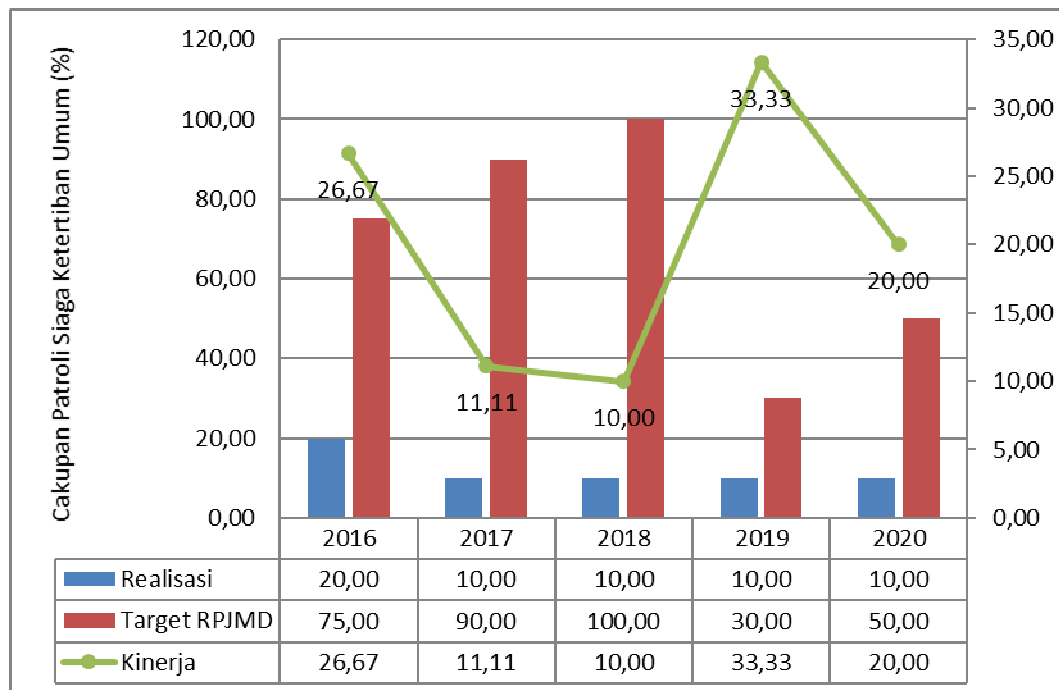
Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Selama periode 2015 – 2018, capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Meski capaian indikator ini terus meningkat namun peningkatannya lebih rendah dibanding target sehingga realisasi kinerja memiliki tren menurun. Pada periode 2015 – 2018, realisasi kinerja berkisar antara 94,51% - 96,29% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019, realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun, pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dalam capaian realisasi yaitu 96% dengan kinerja sebesar 98,97%. Capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang Sangat Tinggi harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

- Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok satuan polisi pamong praja disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan antara lain (a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, (b) antar batas wilayah dan (c) tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 kali patroli dalam sehari diseluruh kecamatan pada Kabupaten maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus meningkat yaitu dari 30% pada tahun 2019 menjadi 50% pada tahun 2020.



Sumber : (Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.83.

Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Selama periode 2015 - 2018, capaian indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus dibawah target yang ditetapkan dan bahkan semakin membesar gapnya. Pada tahun 2015, realisasi indikator patroli siaga ketertiban di Indragiri Hilir sebesar 40% dengan realisasi kinerja sebesar 66,67% dan terkategori Sedang. Pada tahun - tahun berikutnya realisasi indikator terus menurun sehingga realisasi kinerja juga terus menurun yaitu dari 35,56% yang terkategori Rendah menjadi 13,33% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019, realisasi kinerja sedikit mengalami peningkatan menjadi 33,33% sejalan dengan penurunan pada target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023. Namun, pada tahun 2020, realisasi kinerja kembali menurun. Rendahnya capaian indikator ini

sangat terkait erat dengan jumlah satpol PP yang jauh dari ideal sebagaimana diatur dalam permendagri No. 60 tahun 2012.

- SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdapat 3 jenis pelayanan dasar dengan total indikator berjumlah 11 indikator Batas waktu pencapaian target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tahun 2014 – 2020. Daftar jenis layanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditunjukkan pada Tabel 2.23.

Selama periode 2013 – 2017, capaian indikator SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.23. Dari 11 indikator kinerja SPM Bidang pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan seluruh indikator (100%) dengan 6 indikator (54,55%) telah mencapai target nasional. Tugs pelayanan bidang Pemerintahan Dalam negeri dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 2.23.

Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
	Pelayanan Dokumen Kependudukan					
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	83,12	83,12	32,05	83,95	83,95
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	76,85	76,85	8,48	217,00	217,00
3	Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	100,00	100,00	2,67	45,35	45,35
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat					
5	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	86,00	86,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20
7	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60
	Penanggulangan Bencana Kebakaran					
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	56,25	51,95	50,00	50,00	50,00
11	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dasar dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.24.

Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasi Pengamanan dan Pengawasan	Belum terpenuhinya standar kesejahteraan petugas khusus nya yang masih berstatus Non PNS	Peningkatan Alokasi Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan honorer Satpol.PP / Banpol.PP
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman	Masih lambat nya respon menanggapi laporan masyarakat	Pembentukan Unit Reaksi Cepat Satpol.PP

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
	Masyarakat	tentang gangguan Tibumtranmas	
	Cakupan Penegakan PERDA / PERKADA	Penegakan masih sebatas Surat Peringatan tanpa belum sampai pemberian sanksi	Pembentukan Sekretariat PPNS agar dapat menindaklanjuti pelanggaran PERDA sampai gelar Sidang Tipiring

f. Sosial

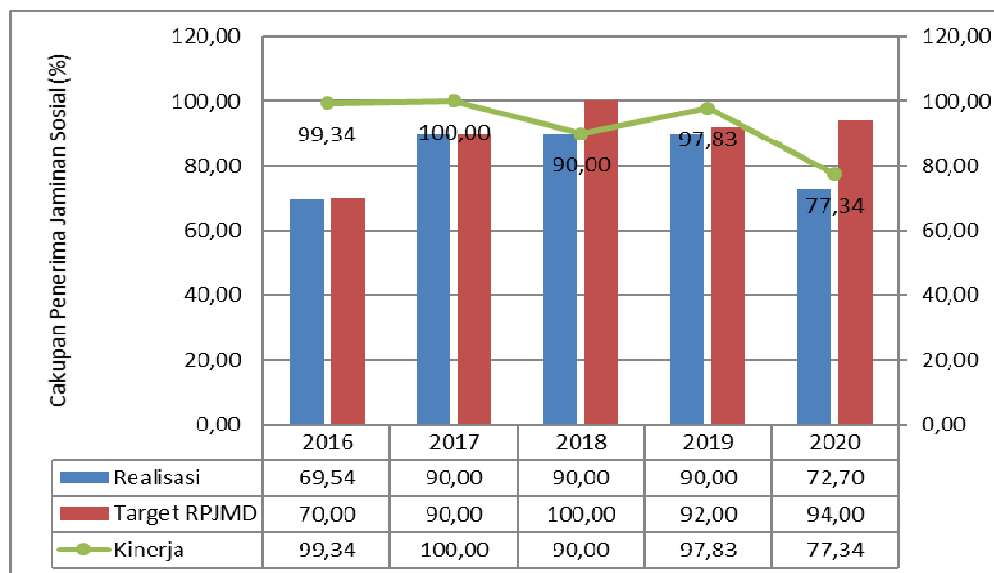
Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari dua indikator penting yaitu (i) Penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan (ii) PMKS yang menerima bantuan sosial.

- Penerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat yaitu dari 92% pada tahun 2019 menjadi 94% pada tahun 2020. Indikator ini ditetapkan agar menjamin indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial di Kabupaten Indragiri Hilir menerima jaminan sosial .

Selama periode 2016 - 2019, realisasi kinerja capaian indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hampir mendekati target yang telah ditetapkan yaitu berkisar sebesar 97,83% - 99,34% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja indikator

penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai target 100%. Namun, pada tahun 2020, realisasi kinerja mengalami penurunan seiring dengan peningkatan pada target yang akan dicapai. Realisasi kinerja indikator ini sebesar 77,34%. Secara keseluruhan, rata - rata capaian realisasi kinerja indikator ini sebesar 82,45% dan terkategori Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini tinggi, namun upaya terus meningkatkan kinerja harus terus dilakukan agar penyandang cacat mendapat perlindungan sosial.



Sumber : (Dinas Sosial Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.84.

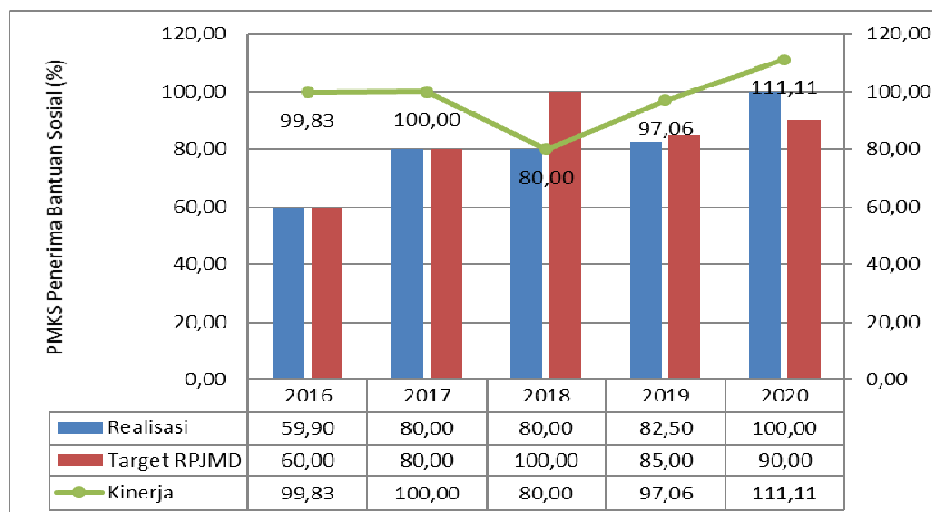
Kinerja Indikator Penyandang Cacat Baik Fisik maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

- PMKS yang Menerima Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator PMKS

yang menerima bantuan sosial terus meningkat yaitu dari 85% pada tahun 2019 menjadi 90% pada tahun 2020. Indikator ini ditetapkan dalam RPJMD untuk menjamin agar PMKS yang ada di Indragiri Hilir mendapat pembinaan dan bantuan sosial. Pada tahun 2018, untuk menjamin penanganan PMKS di Indragiri Hilir maka di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir telah ditempatkan sebanyak 20 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dimana jumlah ini sama dengan jumlah kecamatan di Indragiri Hilir yang sebanyak 20 kecamatan.

Selama periode 2016 – 2020, realisasi capaian indikator ini memiliki tren berfluktuatif meningkat, angka capaian berkisar 59,90% - 100,00%, dengan realisasi kinerja indikator sebesar 80,00% - 111,11% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 111,11%. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja indikator PMKS penerima bantuan sosial sebesar 80,48% yang terkategori Tinggi. Capaian indikator PMKS penerima bantuan sosial yang tinggi selama periode 2015 – 2019 perlu terus ditingkatkan pada periode berikutnya.



Sumber : (Dinas Sosial Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.85.

Kinerja Indikator PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara minimal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa yang dimaksud Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Daftar jenis layanan dan indikator SPM Bidang Sosial ditunjukkan pada Tabel 2.25. berikut.

Tabel 2.25.
Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:			
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	¹ Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100	2017
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	² Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	100	2017
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:			
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	³ Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	2017
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	⁴ Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	2017
3	Penanggulangan korban Bencana:			

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	2017
	b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	2017
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:			
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	2017

Selama periode 2014 – 2018, capaian indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.26. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan 7 indikator (100%) pada SPM bidang sosial dan 2 indikator (28,57% sudah mencapai target nasional,

Tabel 2.26.
Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	63,3	80,01	100	97	97
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	1,1	100	100	98	98
3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	96	96

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2014	2015	2016	2017	2018*
4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	-	100	100
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	85,71	98	98
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	34	100	-	97	97

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.27. dibawah ini.

Tabel 2.27.

Permasalahan/hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan	Indikator		Hambatan	Solusi
1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang				
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Letak Daerah pada Perairan Pasang Surut satu kendala lambatnya distribusi Bansos kepada PMKS	Menignkatnya Koordinasi dengan pihak kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Pemberdayaan Sosial masyarakat melalui KUBE belum berjalan secara maksimal karena belum serius Kecamatan ada Pendamping KUBE	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan pihak Kecamatan dan membentuk petugas Pendamping KUBE

Jenis Pelayanan	Indikator		Hambatan	Solusi
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Menyacu kepada isu no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Panti yang dikelola oleh pemerintah merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bantuan Sosial bagi Panti-panti swasta
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Belum terbentuknya wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKSMB)	Mengupayakan Secepatnya melalui Koordinasi dengan pihak kecamatan membentuk WKSMB
3. Penanggulangan korban Bencana:				
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Sulitnya Proses Administrasi untuk Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana pada BPKAD Kab. Inhil menyebabkan Bantuan Sosial tidak maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaporan Bencana secara berkala
b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Sulitnya proses pencairan dana tanggap darurat Bencana, walaupun Evakuasi Korban sudah dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana daerah	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan Tim penanggulangan bencana alam proses bantuan Tanggap darurat Bencana berjalan dengan yang diharapkan
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				

Jenis Pelayanan	Indikator		Hambatan	Solusi
- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Masih Banyaknya PMKS yang belum menerima jaminan sosial terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan peralatan e-KTP, sehingga tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait agar masyarakat yang belum dapat menerima Jaminan Sosial dapat masih data Nasional Penerima bantuan iuran Jaminan Kesejahteraan nasional (PBI-JKN)

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan wajib non dasar terdiri dari 18 layanan yaitu (i) Tenaga Kerja, (ii) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (iii) Pangan, (iv) Pertanahan, (v) Lingkungan Hidup, (vi) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (vii) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (viii) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (ix) Perhubungan, (x) Komunikasi dan Informatika, (xi) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (xii) Penanaman Modal, (xiii) Kepemudaan dan Olahraga, (xiv) Statistik, (xv) Persandiaan, (xvi) Kebudayaan, (xvii) Perpustakaan dan (xviii) Kearsipan

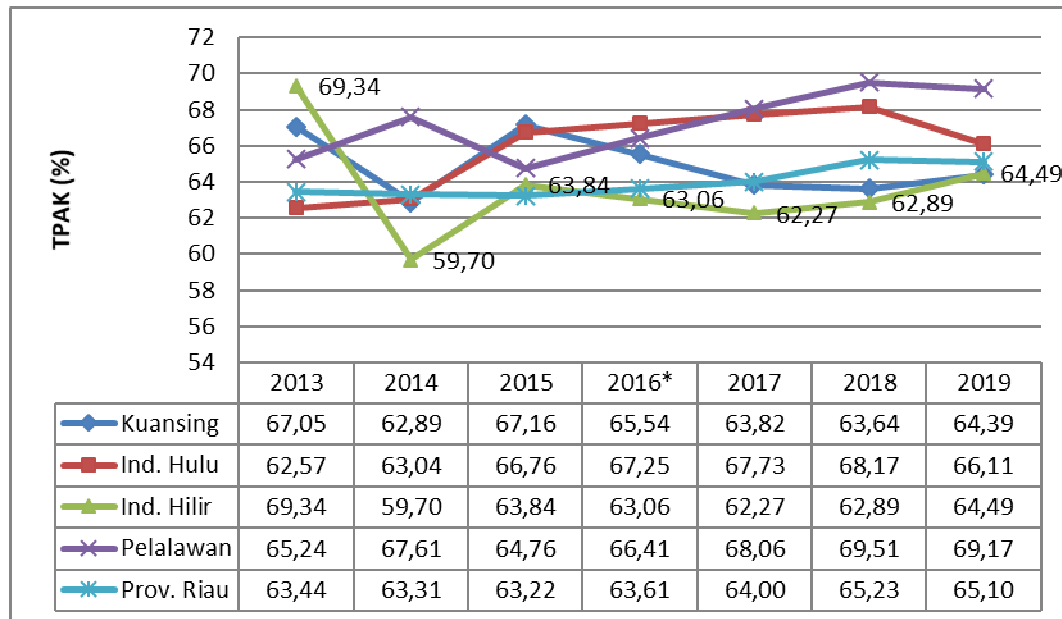
a. Tenaga Kerja

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, (ii) Pencari kerja yang ditempatkan dan (iii) Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga

kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

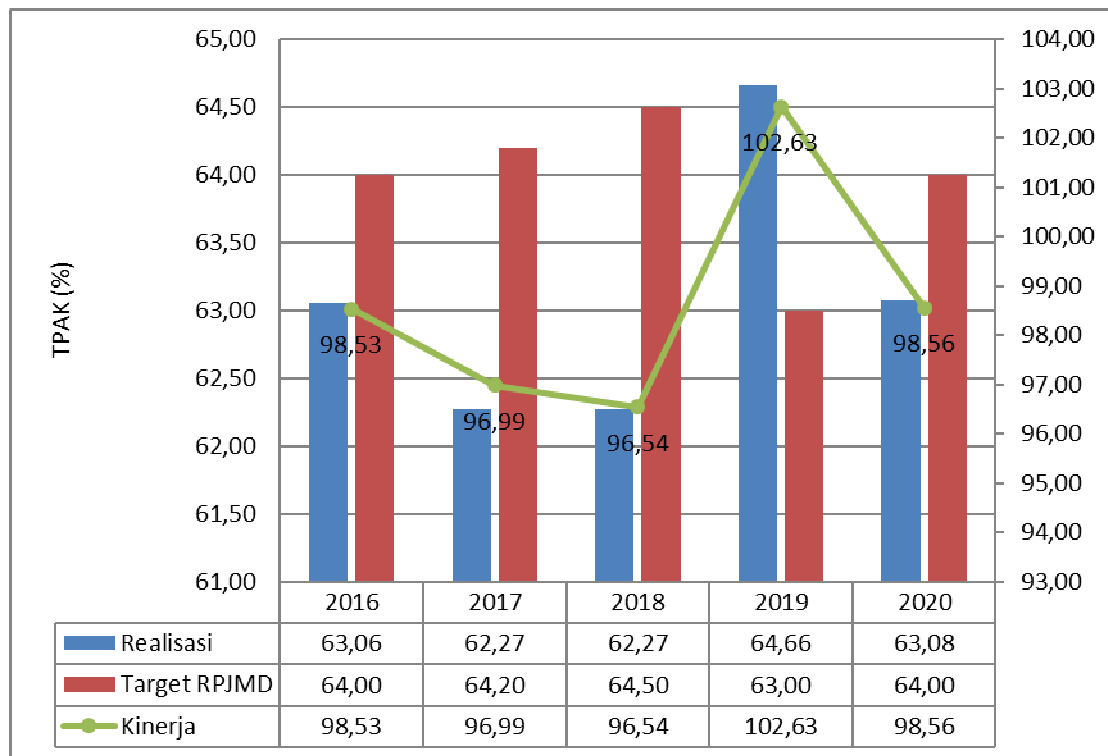


Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.86.

Perkembangan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2019

Selama periode 2013 – 2019, TPAK Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013 TPAK Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 69,34% yang berarti, dari 100 orang penduduk Indragiri Hilir berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang tersedia untuk memproduksi. Pada tahun 2014, TPAK menurun tajam menjadi 59,70%. Selama periode 2015 – 2019, TPAK Indragiri Hilir nilainya berfluktuatif dari 63,84% pada tahun 2015 menjadi 64,49% pada tahun 2019. Capaian TPAK Indragiri Hilir tahun 2018 adalah yang terendah dibanding capaian TPAK Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau.



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.87.

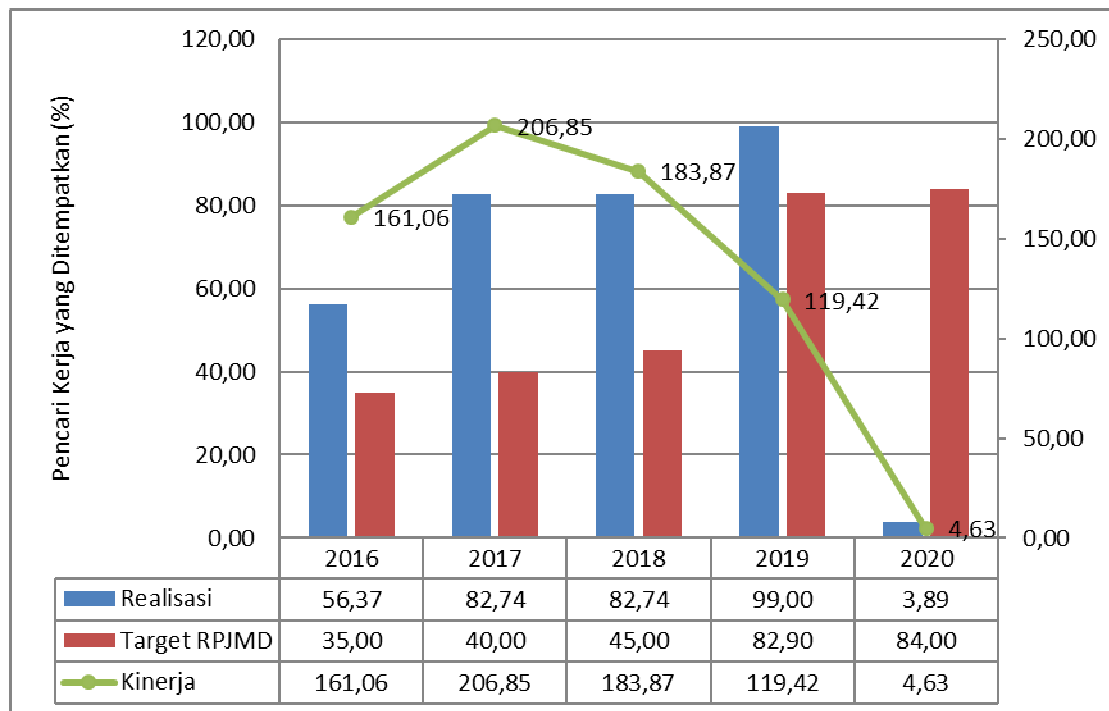
Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator TPAK terus meningkat dari 63,00% pada tahun 2019 menjadi 64,00% pada tahun 2020. Pada tahun 2016 – 2020, realisasi TPAK Indragiri Hilir sedikit berada dibawah target kecuali untuk tahun 2019 dengan realisasi kinerja berkisar antara 96,54% - 102,63% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019, realisasi kinerja TPAK Indragiri Hilir telah mencapai diatas target yang ditentukan yaitu 102,63% dan terkategori Sangat Tinggi. Pencapaian TPAK dan kinerja yang Sangat Tinggi ini perlu dipertahankan.

- Pencari kerja yang ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan (Peraturan

Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja).



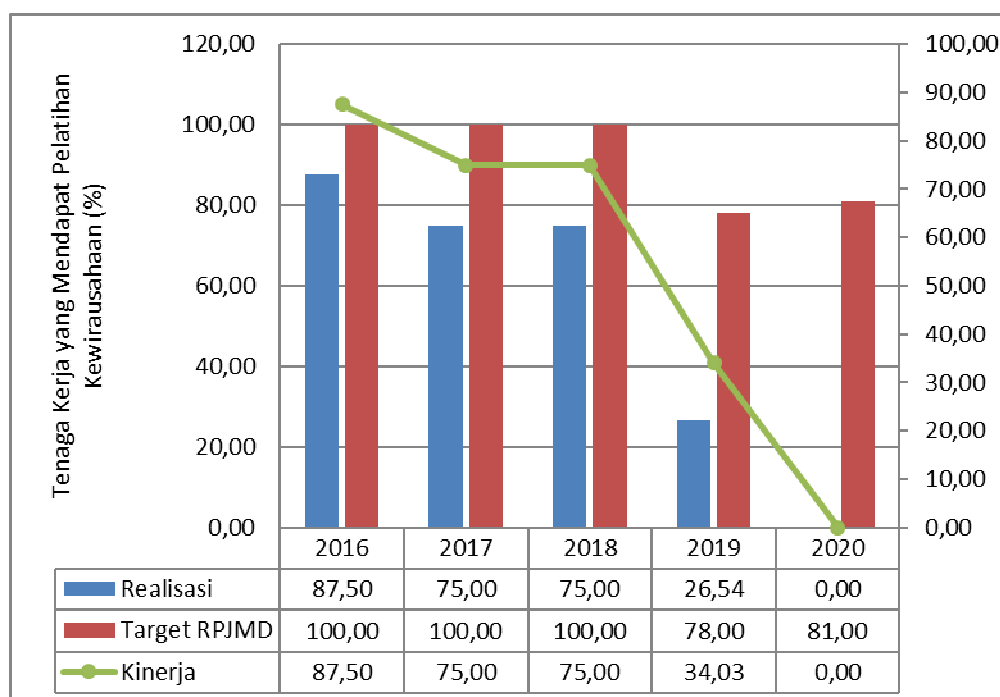
Sumber : Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.88.
Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir terus meningkat dari 35% pada tahun 2016 menjadi 84% pada tahun 2020. Pada periode 2016 – 2019, realisasi indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir berada sama diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 119,42% – 206,85% dan terkategori Sangat Tinggi. Namun, pada tahun 2020, capaian kinerja indikator ini menurun menjadi 4,63%. Hal ini terjadi karena anggaran yang dialokasikan di-*recofussing* untuk penanganan pandemi COVID-19.

- Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan

Selama periode 2016 – 2020, realisasi indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan memiliki tren berfluktuatif menurun yaitu dari 87,50% pada tahun 2016 menjadi 26,54% pada tahun 2019. Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan adalah tetap pada angka 100% sampai tahun 2018. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2016 adalah 87,50% dengan kategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018, realisasi kinerja indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan terus menurun dari 87,50% menjadi 75% dengan kategori Tinggi – Sedang. Pada tahun 2019, realisasi kinerja indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 34,03%. Upaya untuk meningkatkan indikator ini perlu senantiasa dilakukan sehingga tenaga yang dilatih dapat membuka lapangan usaha mandiri.



Sumber : Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.89.

Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, (ii) Persentase Kursi Yang Diduduki di DPRD, (iii) Indeks Pembangunan Gender, (iv) Indeks Pemberdayaan Gender dan (v) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Selama periode 2016 - 2020, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 52,17% pada tahun 2016, meningkat menjadi 58,11% pada tahun 2020. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lebih besar dibanding persentase laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Indragiri Hilir tergolong Sangat Tinggi.

Tabel 2.28.

Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	3.884	3.332	3.185	3.111	2.856
Perempuan	4.236	4.100	3.999	4.071	3.962
Jumlah	8.120	7.432	7.184	7.182	6.818
Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	52,17	55,17	55,67	56,68	58,11

Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, diolah Bappeda, 2021

- Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003, pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat paling sedikit 30% perempuan.

Selama periode 2014 – 2018, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 9,76%. Namun, untuk periode 2019 mengalami peningkatan menjadi 11,11% Selama periode 2014 – 2018, keterwakilan perempuan di DPRD Indragiri Hilir masih relatif rendah. Bila proporsi perempuan di DPRD Indragiri Hilir dibandingkan dengan kabupaten tetangga menunjukkan bahwa kondisi ini lebih tinggi dibanding Kabupaten Pelalawan (5,71%) namun lebih rendah dibanding Kabupaten Indragiri Hulu (12,50%) dan Provinsi Riau (28,13%)

Tabel 2.29.
Perkembangan Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	41	41	41	40	40
Perempuan	4	4	4	5	5
Jumlah	45	45	45	45	45
Proporsi Kursi yg Diduduki Perempuan di DPRD	9,76	9,76	9,76	11,11	11,11

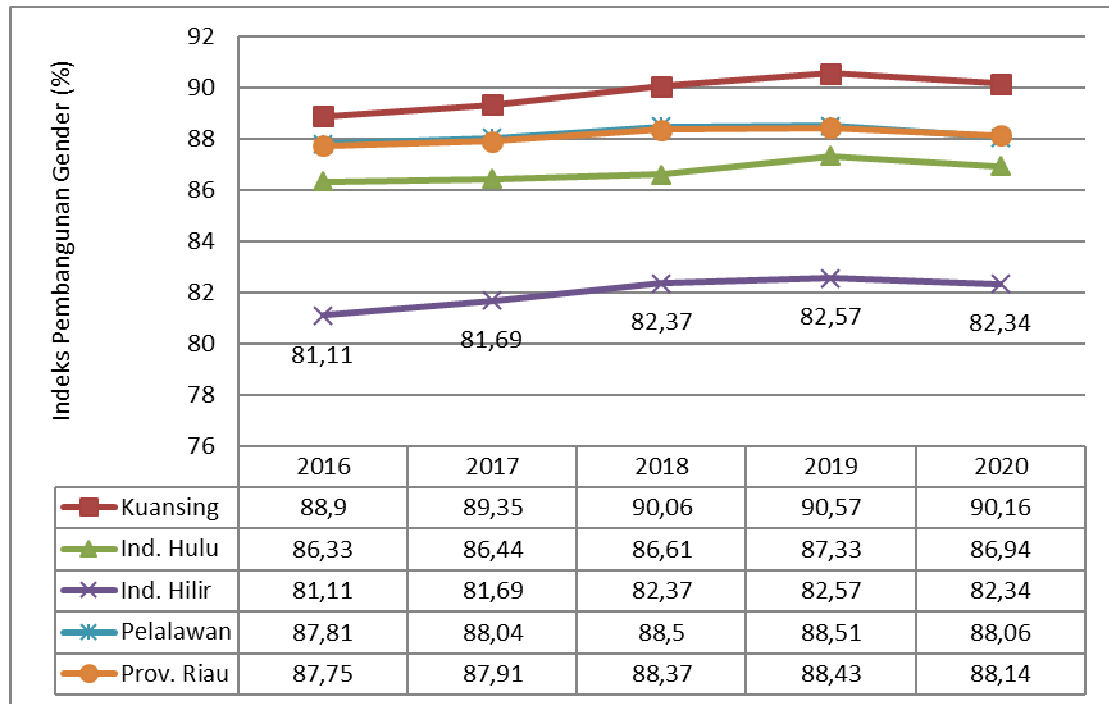
Sumber: Indragiri Hilir Dalam Angka, diolah Bappeda, 2021

- Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen.

Selama periode 2016 – 2020, IPG Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 81,11% pada tahun 2016 meningkat menjadi 82,34% pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan IPG Kabupaten sekitarnya

serta IPG Provinsi Riau memperlihatkan bahwa IPG Indragiri Hilir adalah yang terendah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pembangunan perempuan di Indragiri Hilir dari bidang ekonomi dan non ekonomi perlu terus ditingkatkan khususnya dalam peran serta perempuan dalam bekerja.



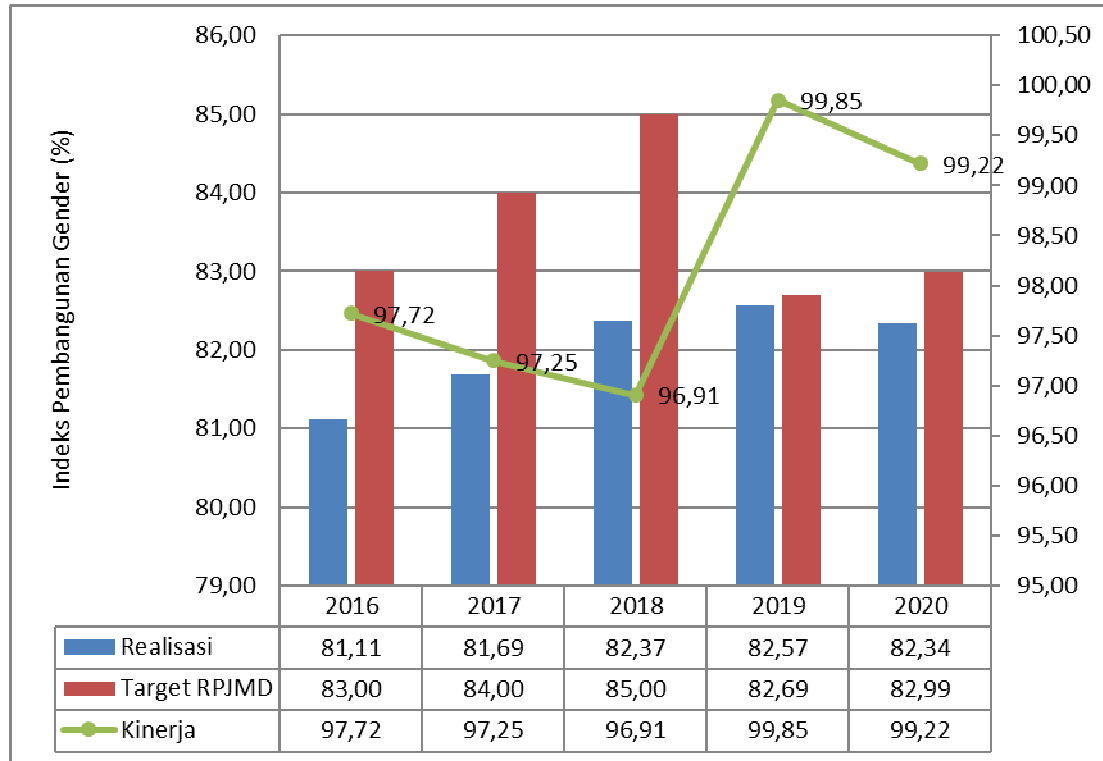
Sumber : BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar 2.90.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan indikator IPG Kabupaten Indragiri Hilir dari 82,69% pada tahun 2019, meningkat menjadi 82,99% pada tahun 2020. Selama periode ini, capaian indikator IPG Indragiri Hilir berada dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 - 2020, capaian indikator IPG sebesar 81,11% - 82,57% dengan realisasi kinerja sebesar 96,91% - 99,85% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 - 2018, realisasi meningkat lambat dan disisi lain target meningkat lebih tinggi sehingga realisasi kinerja menurun dari 97,72% menjadi 96,91% dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian realisasi kinerja IPG Indragiri Hilir selama periode ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan nilainya sehingga dapat melampaui IPG Kabupaten Sekitarnya.



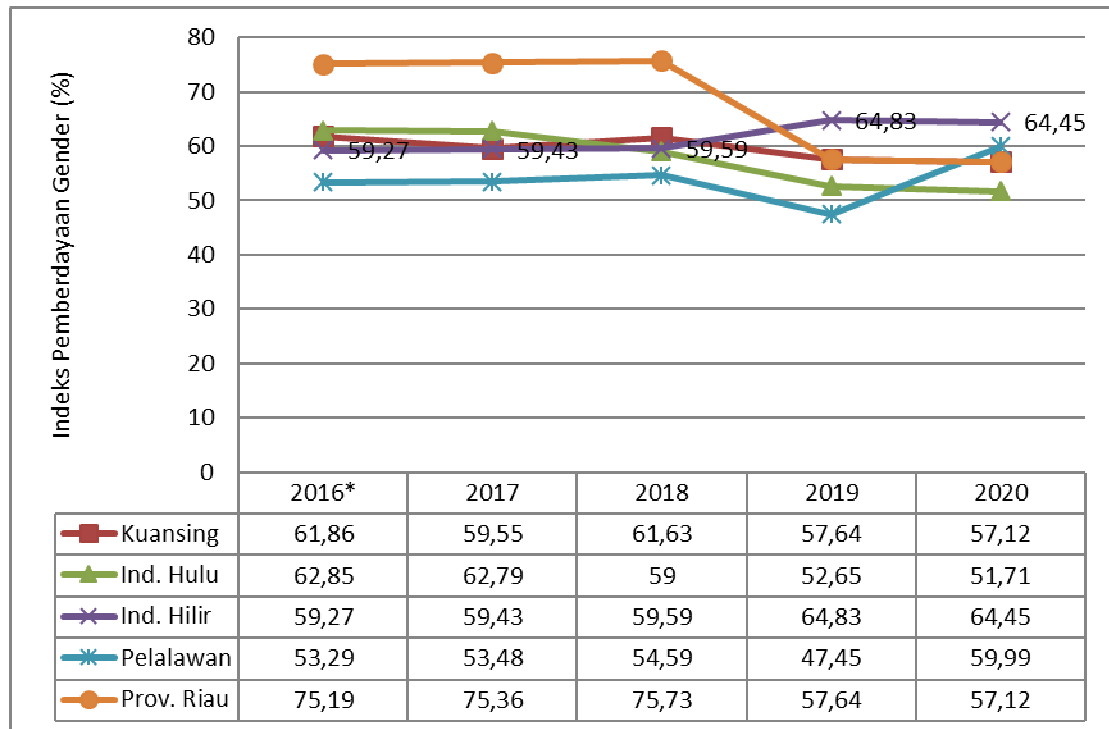
Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.91.
Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode 2016 – 2020, IDG Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 59,27% pada tahun 2016, meningkat menjadi 64,45 pada tahun 2020. Bila capaian IDG Indragiri Hilir ini dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten sekitarnya menunjukkan bahwa IDG Indragiri Hilir lebih tinggi dari IDG Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, bahkan Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020. Selama periode ini, rata-rata

pertumbuhan indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 2,53% per tahun.

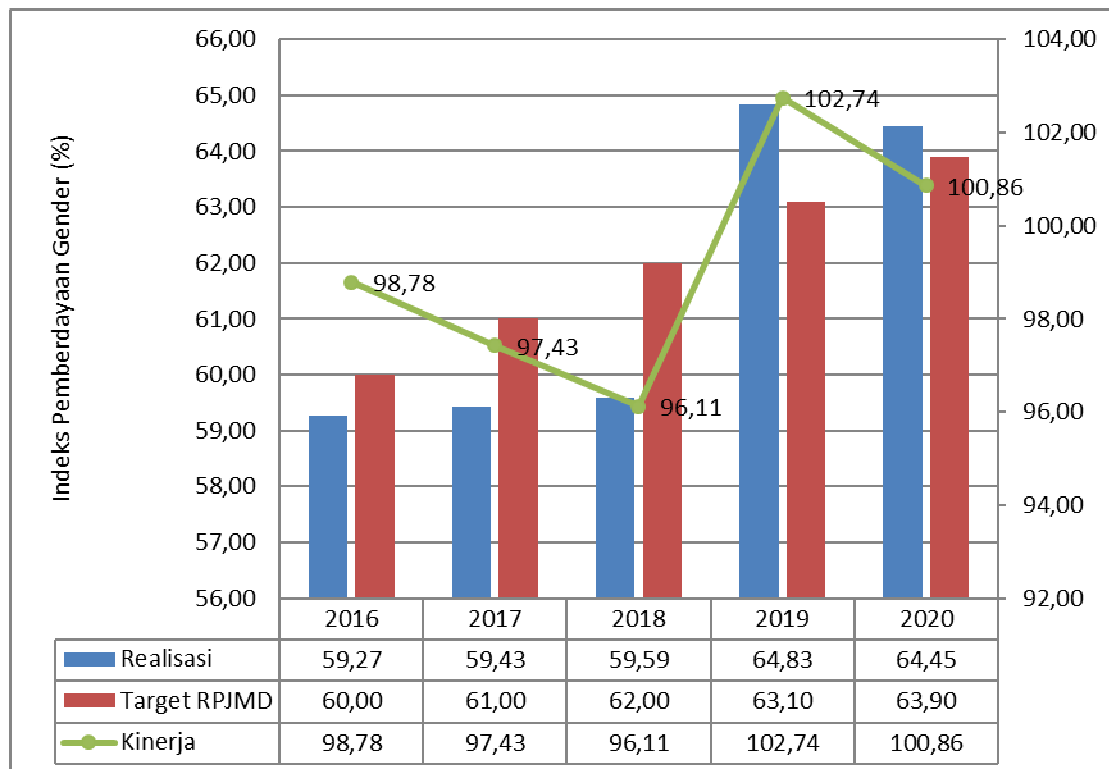


Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.92.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator IDG Indragiri Hilir meningkat dari 63,10% pada tahun 2019 menjadi 63,90% pada tahun 2020. Realisasi indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2016 – 2018 sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun, pada tahun 2019 – 2020, capaian realisasi sudah berada di atas target yang telah ditetapkan. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator IDG Indragiri Hilir berkisar antara 96,11% - 102,74% dan terkategori Sangat Tinggi. Tingginya capaian kinerja indikator IDG ini perlu terus dipertahankan sehingga IDG Indragiri Hilir dapat terus meningkat melebihi IDG Kabupaten Sekitarnya.



Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.93.

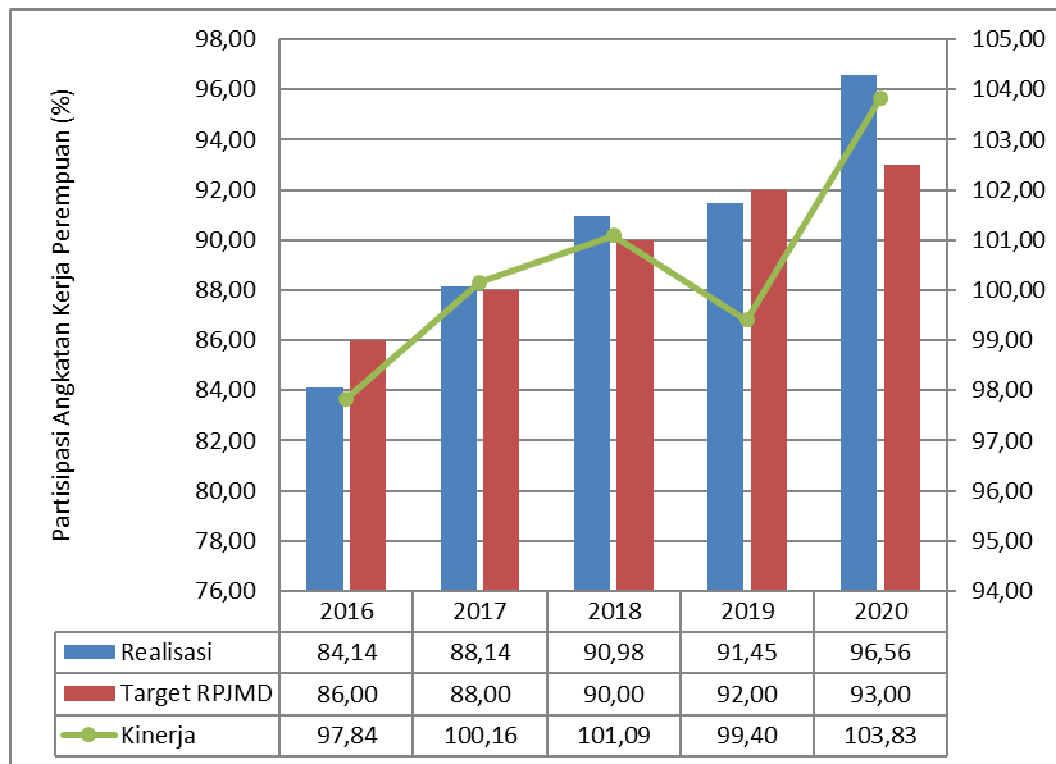
Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Bank Dunia menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya partisipasi itu karena terhambat masih kurangnya layanan pengasuhan anak baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hanya sekitar 53,5 persen perempuan usia kerja di Indonesia yang menjadi bagian dari angkatan kerja atau jauh di bawah rata-rata 67,7 persen untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Selama periode 2016 sampai dengan 2020, indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Indragiri Hilir terus mengalami peningkatan. Selama periode ini realisasi kinerja indikator partisipasi angkatan kerja perempuan berkisar antara 97,84% - 103,83% dan terkategori pencapaian yang Sangat Tinggi. Capaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan agar IPG dan IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat lebih

cepat lagi dan melampaui IDG dan IPG Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.94.

Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

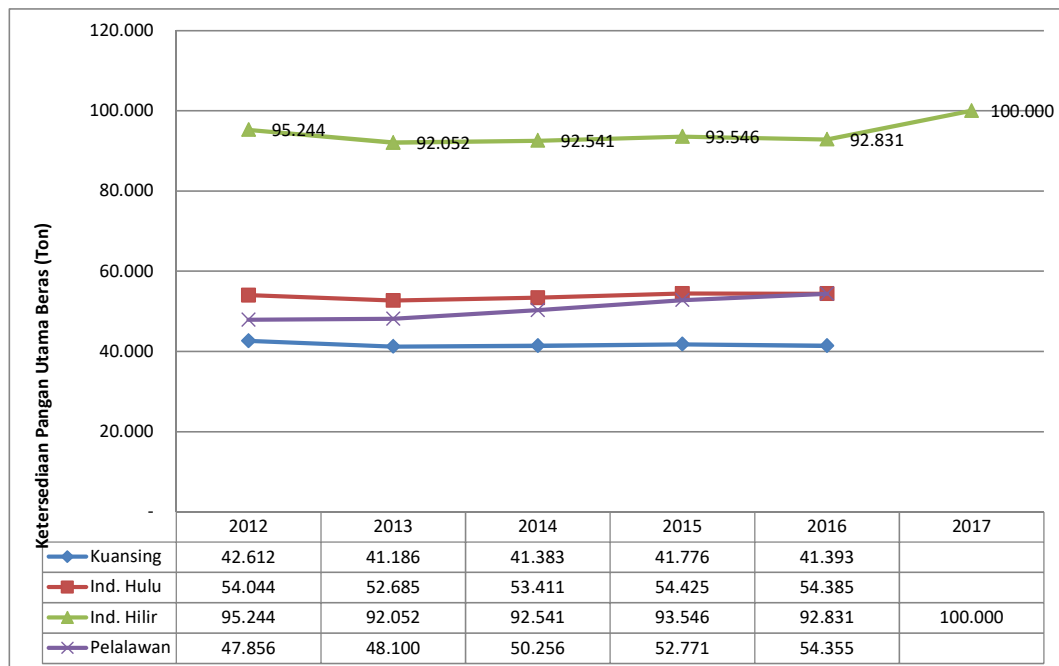
c. Pangan

Layanan urusan wajib non dasar bidang pangan dianalisis dari indikator (i) ketersediaan pangan utama dan (ii) skor Pola Pangan Harapan (PPH)

- Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir, selama periode 2012 – 2017, trendnya berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2012, ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 95,244 ton menurun menjadi 92,052 ton pada tahun 2013 dan seterusnya meningkat menjadi 100.000 ton pada tahun 2017. Bila

indikator ketersediaan pangan utama beras Kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan dengan Kabupaten tetangga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama beras di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi. Hal ini dimungkinkan karena produksi beras di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terbesar di Riau dengan rasio produksi terhadap konsumsi sebesar 0,85% yang berarti bahwa produksi beras Indragiri Hilir baru mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras di Indragiri Hilir sebesar 85%. Kekurangannya disuplai oleh Bulog dan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Upaya untuk berswasembada pangan di Indragiri Hilir perlu terus diupayakan agar ketersediaan pangan ini dapat terus terjamin.



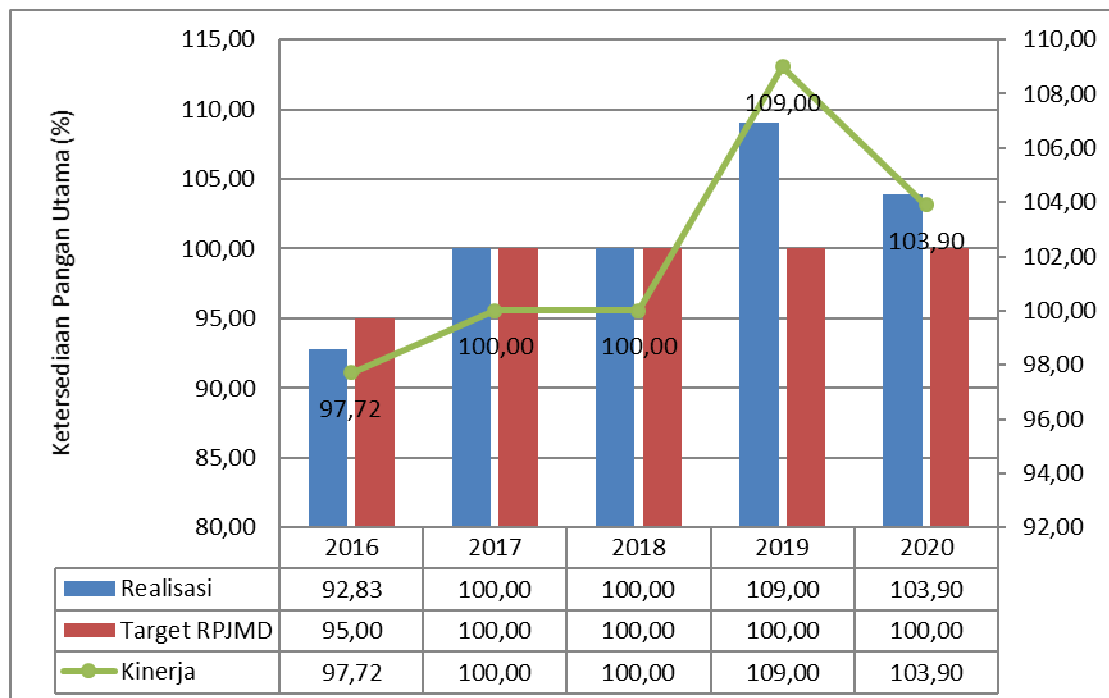
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2017) dan LKJP (2013 - 2017)

Gambar 2.95.

Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan indikator ketersediaan pangan utama beras sebesar 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selama periode ini, capaian indikator

ketersediaan pangan utama umumnya sama atau diatas target RPJMD kecuali pada tahun 2016 sehingga realisasi kinerja berkisar antara 97,72% - 109,00% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ketersediaan pangan utama beras ini Sangat Tinggi, namun upaya untuk terus berupaya untuk meningkatkan produksi sehingga rasio produksi sama atau lebih tinggi dibanding konsumsi perlu terus diupayakan.



Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

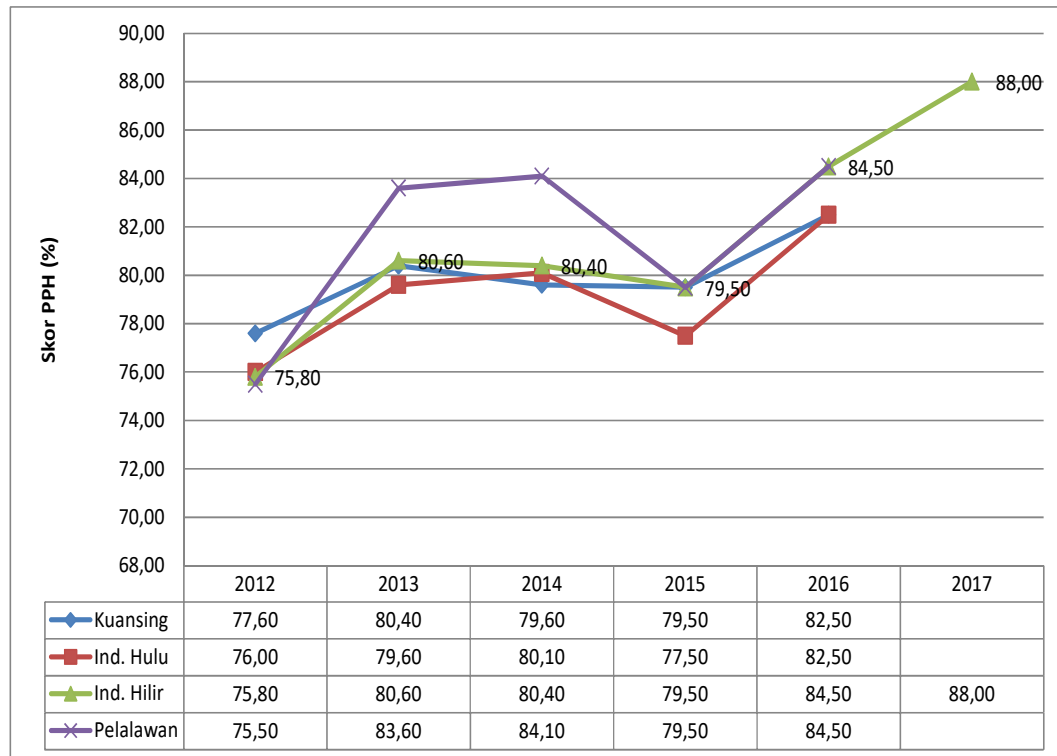
Gambar 2.96.
Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi

konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Selama periode 2012 -2017, skor PPH Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2012 - 2015, posisi skor PPH Indragiri Hilir adalah doiposisi tengah dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Pada tahun 2016 - 2017, skor PPH Indragiri Hilir bergerak dengan percepatan yang lebih tinggi sehingga pada tahun 2016/2017 , skornya tertinggi dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan skor PPH Kabupaten Indragiri Hilir 2,52% per tahun.



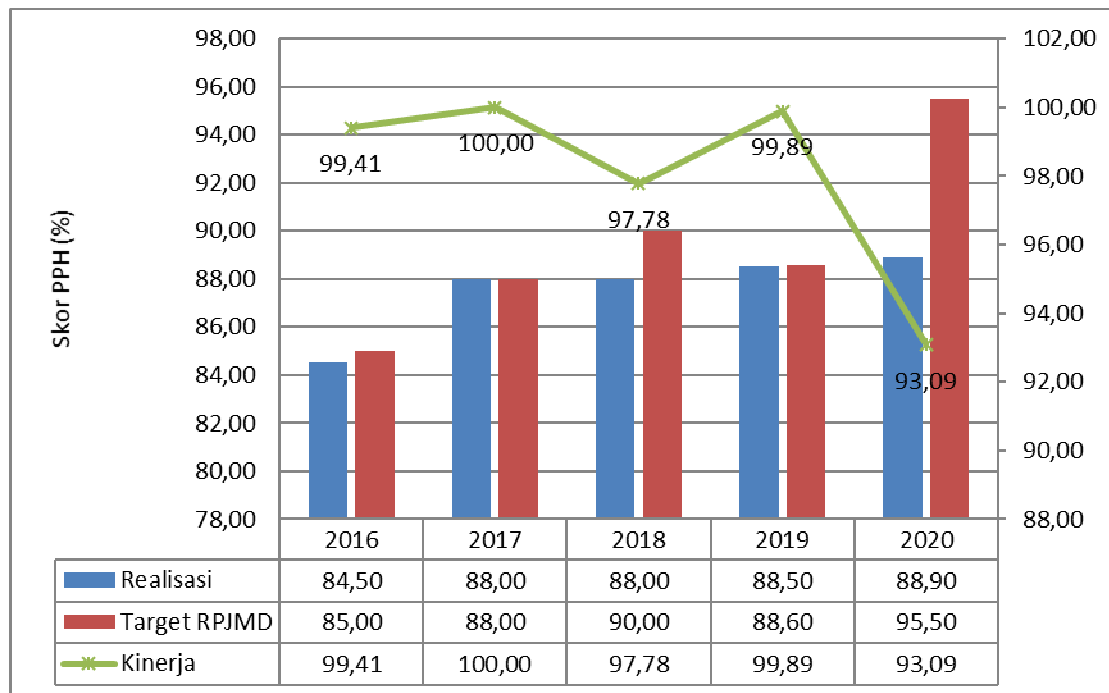
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.97.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023, indikator Skor PPH ini telah ditetapkan meningkat yaitu dari 88,60% pada

tahun 2019 meningkat menjadi 95,50% pada tahun 2020. Realisasi skor PPH pada periode ini berfluktuatif meningkat dengan realisasi kinerja berkisar antara 93,09% - 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator skor PPH yang Sangat Tinggi ini perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong kepada peningkatan angka harapan hidup.



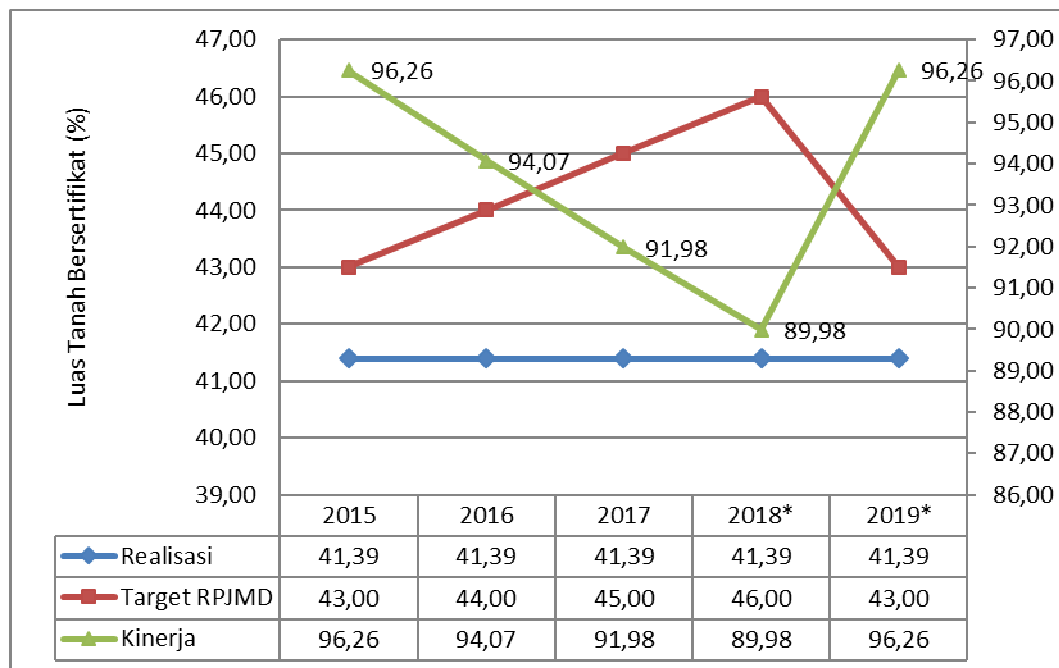
Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.98.
Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

d. Pertanian

Layanan urusan wajib non dasar bidang pertanian dianalisis dari indikator persentase luas tanah bersertifikat. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase luas tanah bersertifikat di kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 43% pada tahun 2015 menjadi 46% pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi capaian indikator persentase luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir relatif konstan. Target yang terus meningkat dengan capaian yang konstan maka realisasi kinerja terus menurun yaitu

dari 96,26% menjadi 89,98% yang terkategori dari Sangat Tinggi hingga Tinggi. Pada tahun 2019, diperkirakan realisasi kinerja meningkat menjadi 96,26% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya peningkatan indikator luas tanah bersertifikat perlu terus ditingkatkan lebih baik melalui Prona maupun program daerah karena indikator ini merupakan surat tanda bukti pemegang hak tanah bagi masyarakat.



Sumber : LKPJ Inhil (2015 - 2019)

Gambar 2.99
Kinerja Indikator Luas tanah bersertifikat
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

e. Lingkungan Hidup

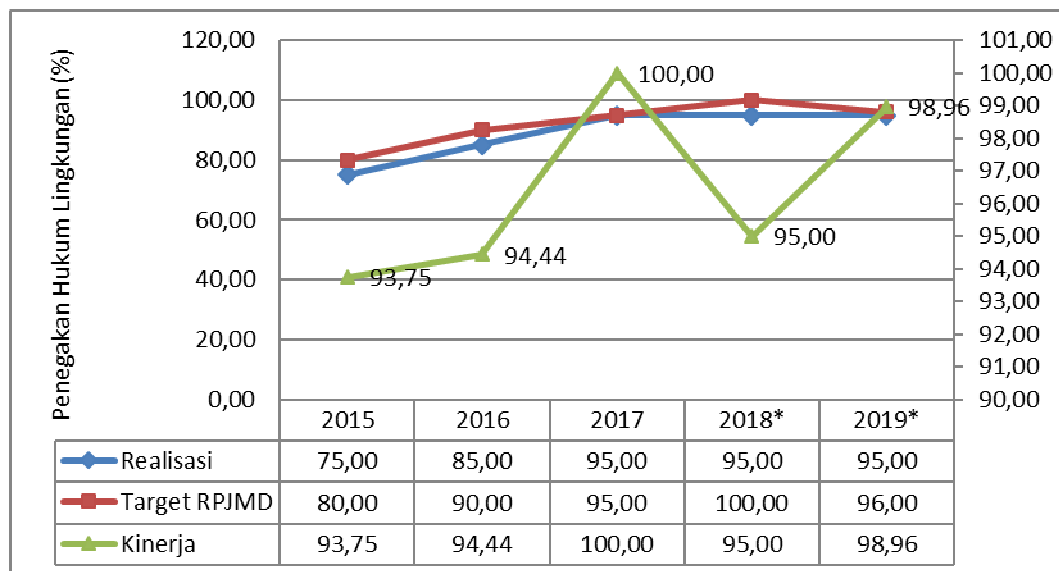
Layanan urusan wajib non dasar bidang Lingkungan Hidup dianalisis dari indikator (i) penegakan hukum lingkungan dan (ii) penanganan sampah.

- Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui

pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, telah ditetapkan bahwa indikator penegakan hukum lingkungan terus meningkat yaitu dari 80% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2015 sampai dengan perkiraan untuk tahun 2018 dan 2019, realisasi indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat dan berada dibawah target kecuali pada tahun 2017 yang relatif sama dengan target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator penegakan hukum berkisar antara 93,75% - 100,00% yang terkategori Tinggi – Sangat Tinggi. Meski capaian penegakan hukum lingkungan rata-ratanya terkategori Sangat Tinggi, namun upaya penegakan hukum lingkungan ini harus terus dilakukan meski dengan keterbatasan tenaga fungsional pengawas lingkungan daerah. Upaya menambah kuantitas tenaga fungsional pengawas lingkungan perlu mendapat perhatian kedepannya.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2014 - 2018)

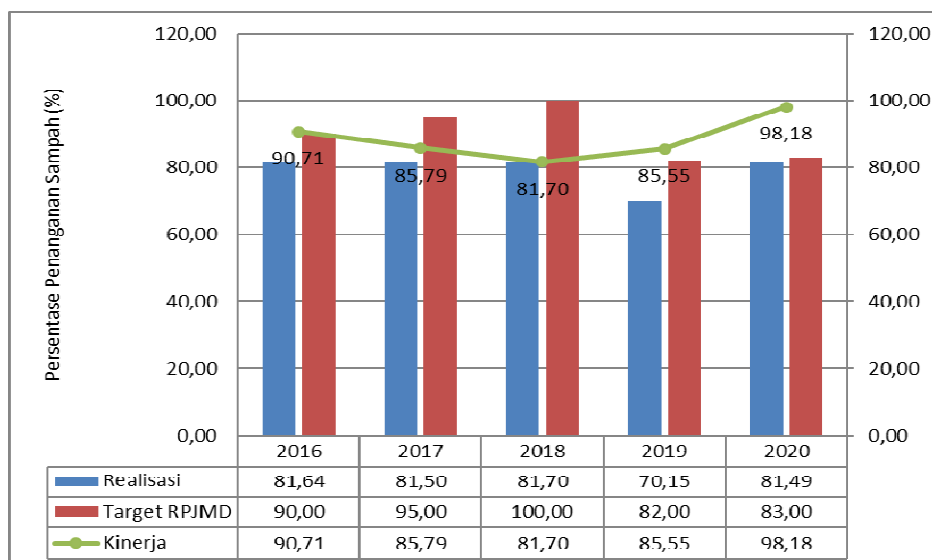
Gambar 2.100.

Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

- Penanganan Sampah

Sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) atau pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan dapat mengakibatkan (i) tempat berkembang dan bersarang serangga dan tikus, (ii) menjadi sumber polusi dan bencana alam, seperti tanah, air, dan udara, dan (iii) menjadi sumber dan tempat hidup kuman - kuman yang membahayakan kesehatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator persentase penanganan sampah terus meningkat yaitu dari 82% pada tahun 2019 menjadi 83% pada tahun 2020. Pada periode 2016 - 2020, realisasi indikator persentase penanganan sampah trennya berfluktuatif menurun dan posisinya terus dibawah target yang ditetapkan. Realisasi kinerja persentase penanganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 81,70% - 98,18% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Masih rendahnya pencapaian indikator penangan sampah ini dibanding target perlu menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.101.

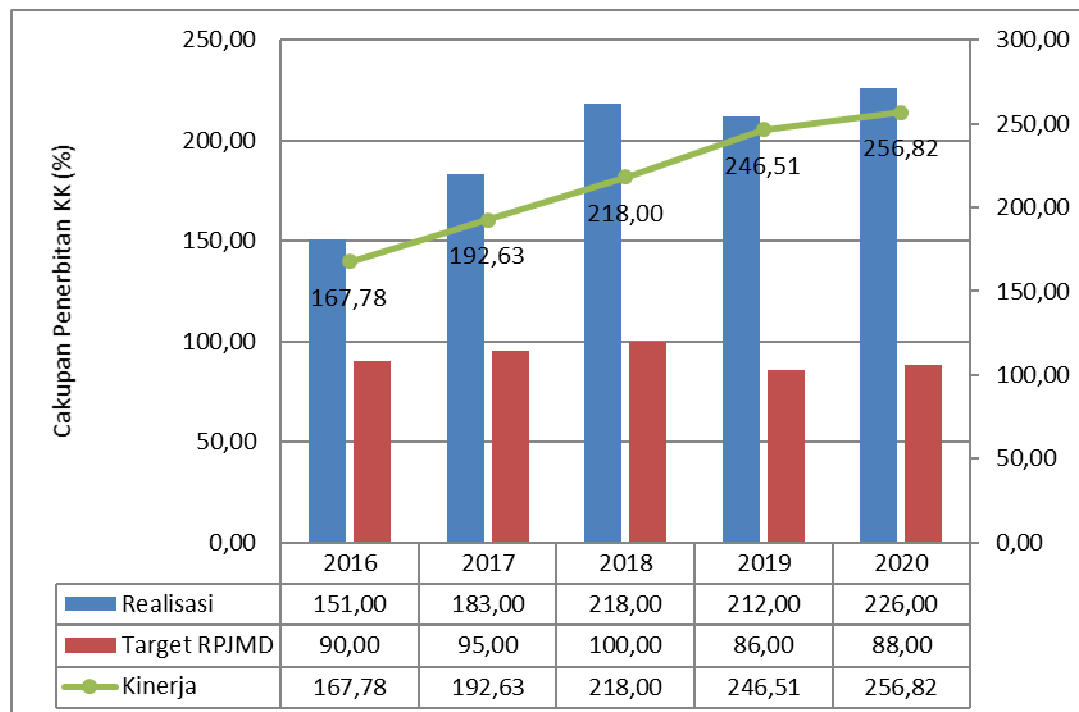
Kinerja Indikator Persentase Penangan Sampah
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan urusan wajib non dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianalisis dari indikator (i) Cakupan penerbitan kartu keluarga, (ii) Kepemilikan KTP dan (iii) Kepemilikan Akta kelahiran.

- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penerbitan kartu keluarga secara bertahap dimiliki dari 90% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2018. Target indikator ini untuk tahun 2019 dan 2020, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023 adalah 86,00% dan 88,00%.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Bappeda, 2021

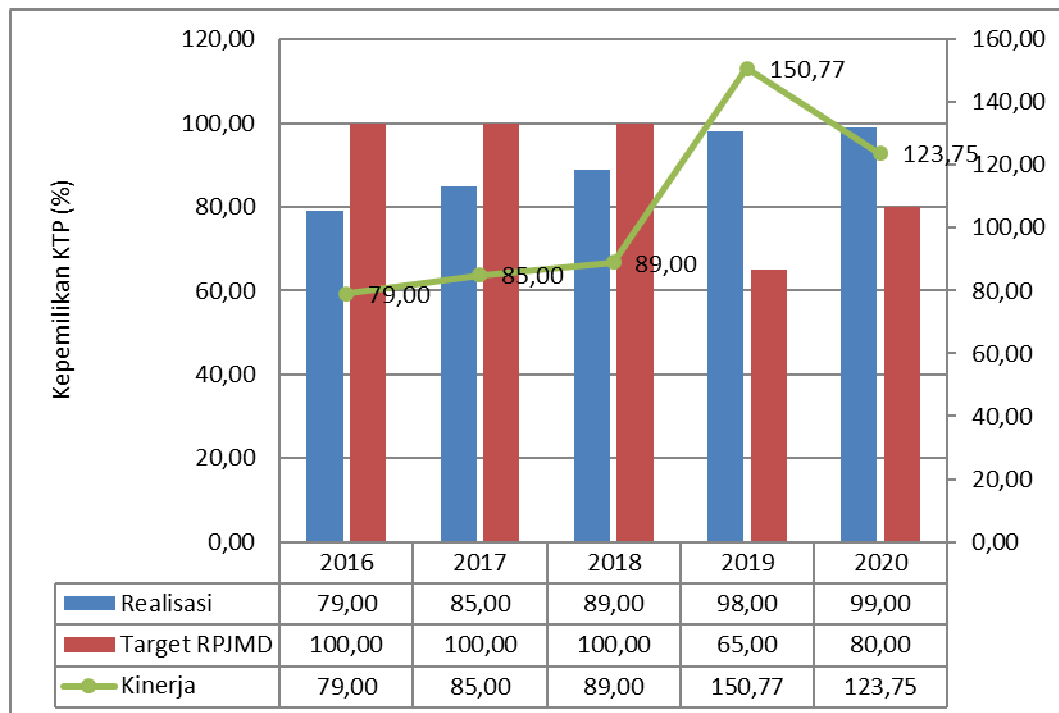
Gambar 2.102.

Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Realisasi capaian indikator cakupan penerbitan kartu keluarga di Indragiri Hilir selama periode 2016 2020 sampai perkiraan untuk tahun 2018 dan 2019 memiliki tren meningkat dan telah berada di atas target yang ditetapkan RPJMD. Pada tahun 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 167,78% - 256,82% dengan kategori Sangat Tinggi.

- Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia setidaknya telah menerbitkan 3 versi KTP. KTP lama atau KTP Kabupaten (1978), KTP dari blangko kertas dan laminasi plastik, photo di lem, tanda tangan/cap jempol dan data tercetak di komputer serta berlaku di tiap Kabupaten/Kota. Versi kedua adalah KTP nasional tahun 2004 dengan karakteristik photo dicetak pada kartu, tanda tangan/cap jempol, data dicetak dengan komputer, berlaku nasional. Versi ketiga dan terbaru adalah KTP Elektronik (2011) dimana photo dicetak dikartu, data tercetak di komputer, berlaku secara nasional, mampu menyimpan data dan data dapat dibaca/ditulis dengan *Card Reader*. Namun kenyataan pelaksanaan KTP elektronik ini hingga saat ini masih bermasalah sehingga banyak penduduk yang belum memiliki KTP elektronik ini.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.103.
Kinerja Indikator Kepemilikan KTP
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

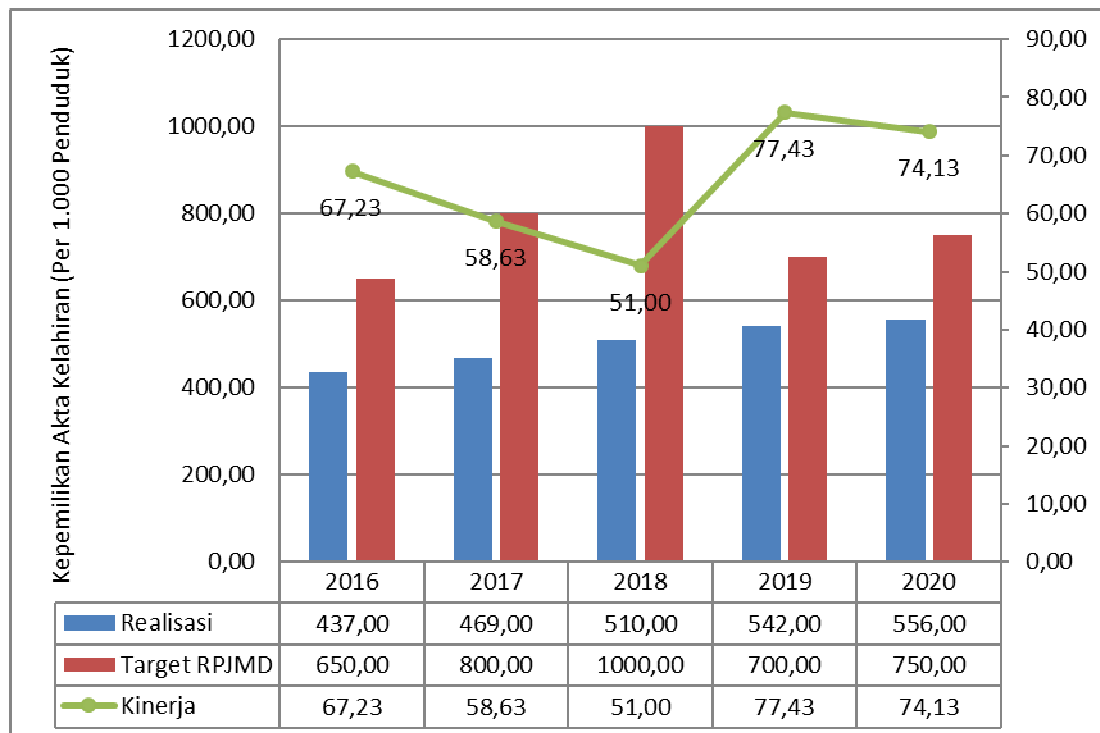
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan KTP ditargetkan 100% mulai dari tahun 2015 – 2018. Realisasi indikator kepemilikan KTP tahun 2015 masih Sangat Tinggi yaitu sebesar 99,92% karena penduduk disamping menggunakan KTP versi KTP Nasional dan KTP Kabupaten serta KTP elektronik. Mulai 2016 – 2018, pemberlakuan KTP elektronik disemua institusi menjadikan KTP versi sebelumnya tidak lagi digunakan. Disisi lain, penerbitan KTP elektronik mengalami kendala seperti ketiadaan blangko KTP. Kondisi ini menjadikan persentase kepemilikan KTP di Indragiri Hilir sebagaimana Kabupaten lainnya di Indonesia menurun menjadi 79% dan terkategori Sedang. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, capaian realisasi kinerja meningkat menjadi 123,75% dan 150,77% yang terkategori Sangat Tinggi. Hal ini dapat tercapai seiring dengan terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses kepengurusan KTP bagi penduduk yang berada di daerah, dengan cara kepengurusan cukup di desa tempat tinggal dan layanan secara online.

- Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Manfaat Akta Kelahiran: (i) Identitas Anak, (ii) Administrasi Kependudukan untuk KTP dan KK, (iii) Keperluan Sekolah, (iii) Pendaftaran Pernikahan di KUA, (iv) Mendaftar Pekerjaan, (v) Persyaratan Pembuatan Paspor, (vi) Mengurus Hak Ahli Waris, (viii) Mengurus Asuransi, (ix) Mengurus Tunjangan Keluarga, (x) Mengurus Hak Dana Pensiun dan (xi) Melaksanakan Ibadah Haji.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan akta kelahiran ditetapkan terus meningkat yaitu dari 700 akte kelahiran per 1.000 penduduk pada tahun 2019 meningkat menjadi 750 akta per 1.000 penduduk pada 2020, yang berarti 750 penduduk dari 1.000 penduduk mempunyai akta kelahiran. Selama periode 2016 - 2020, realisasi indikator kepemilikan akta kelahiran memiliki tren meningkat akan tetapi masih dibawah target RPJMD. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 51,00% - 77,43% pada tahun 2016 - 2020 yang terkategori Rendah - Sedang. Pada kondisi ini, kepemilikan akta kelahiran di Indragiri Hilir sebesar 556 per 1.000 penduduk, masih terdapat sekitar 444 penduduk dari setiap 1.000 penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran. Mengingat pentingnya akte kelahiran bagi setiap penduduk maka upaya peningkatan kinerja indikator ini perlu terus dilakukan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.104.
Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

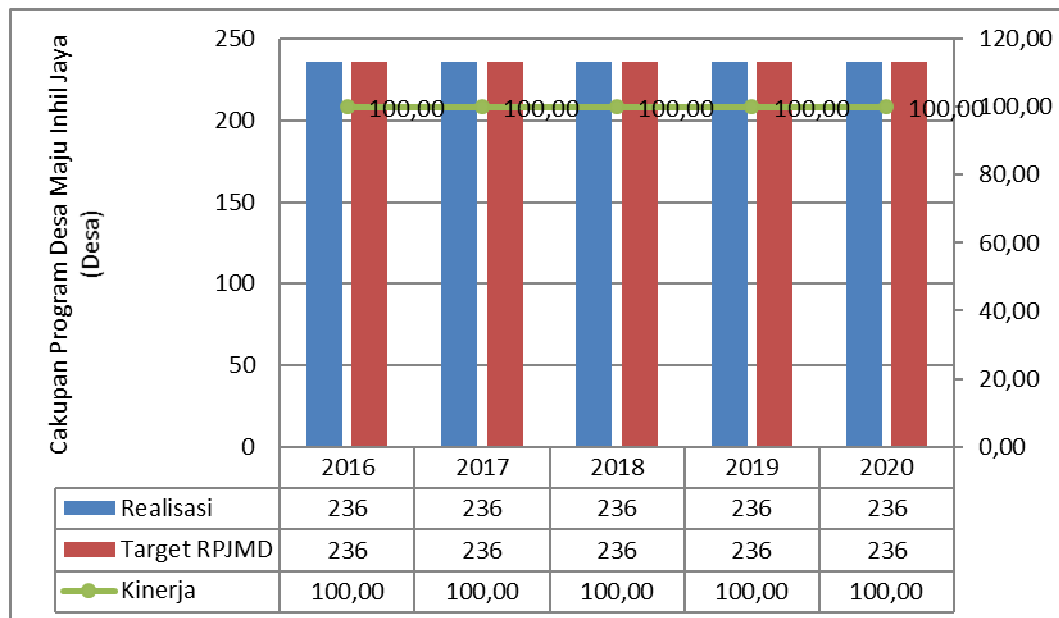
Layanan urusan wajib non dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianalisis dari indikator (i) Cakupan program 'Desa Maju Inhil Jaya', (ii) Jumlah desa 'Maju', (iii) PKK aktif dan (iv) Posyandu aktif.

- Cakupan Program "Desa Maju Inhil Jaya"

Program Desa Maju Inhil Jaya merupakan program inisiasi Pemerintah Indragiri Hilir untuk mensiasati permasalahan pembangunan infrastruktur perdesaan di Indragiri Hilir yang dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006 di Indragiri Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan program desa maju inhil jaya sebanyak desa dan kelurahan yang

ada di Indragiri Hilir yaitu sebanyak 236 desa dan kelurahan. Realisasi indikator cakupan Desa Maju Inhil Jaya mencakup semua desa kelurahan dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi.

Setelah lebih dari 12 tahun berjalannya program ini di Indragiri Hilir, hampir sebagian infrastruktur perdesaan telah terbangun. Namun demikian perlu disadari bahwa dengan kondisi alam Indragiri Hilir yang keras menjadikan umur ekonomis infrastruktur yang dibangun tidaklah terlalu lama sehingga program seperti ini masih tetap dibutuhkan masyarakat perdesaan. Program ini dipandang juga perlu pengembangan untuk porsi pengembang ekonomi masyarakat dengan mendorong industri di perdesaan.



Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

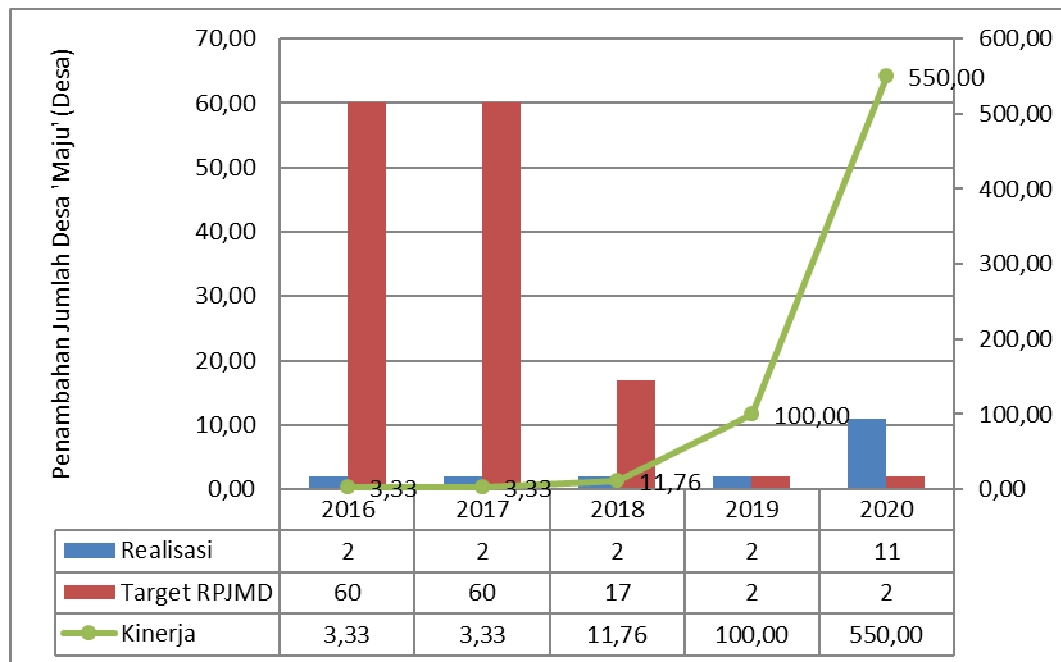
Gambar 2.105.

Kinerja Indikator Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Jumlah Desa “Maju”

Sejalan dengan pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya dengan pendekatan pemberdayaan akan membawa desa kearah kemajuan dari semua aspek. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan target untuk indikator pertambahan jumlah desa ‘maju’

akan meningkat sebanyak 2 desa setiap tahunnya. Selama tahun 2019 dan 2020, realisasi indikator penambahan jumlah desa maju di Indragiri Hilir memiliki tren meningkat. Realisasi kinerja indikator ini juga terus meningkat sepanjang periode 2019 - 2020 yaitu dari 110,00% menjadi 550,00% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

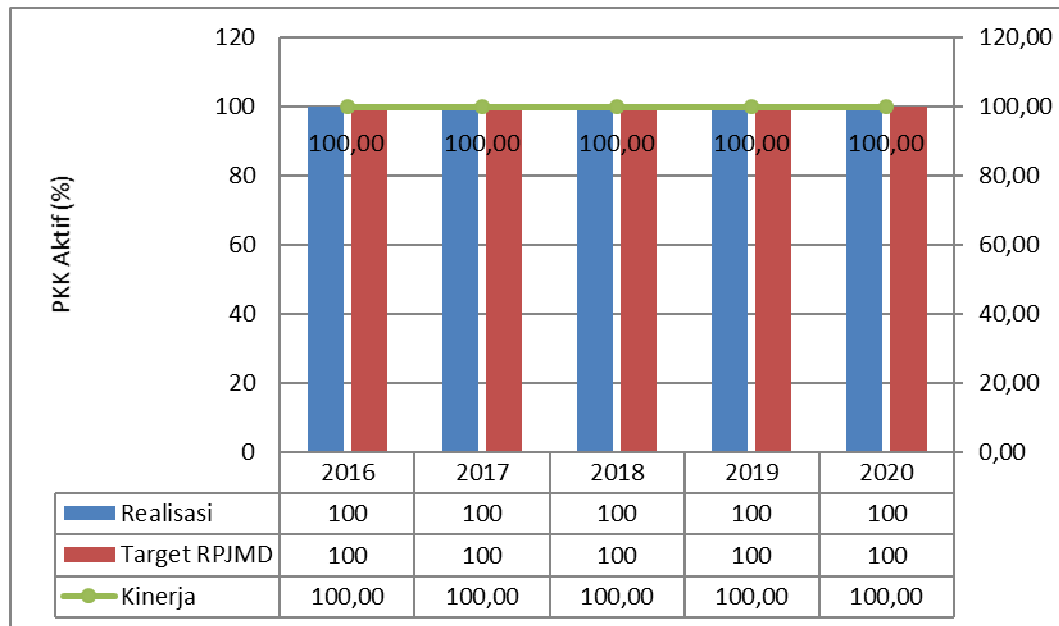
Gambar 2.106.

Kinerja Indikator Pertambahan Jumlah Desa “Maju” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- PKK Aktif

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa target untuk PKK aktif di Kabupaten Indragiri Hilir tetap 100%. Indikator ini ditetapkan juga sebagai upaya pencapaian indikator jumlah desa maju di Indragiri Hilir.

Selama periode ini, realisasi indikator persentase PKK aktif relatif sama dengan target RPJMD. Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator persentase PKK aktif adalah 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, upaya-upaya peningkatan kualitas kegiatan PKK aktif perlu dilakukan sehingga akan mampu mendorong pencapaian indikator Desa Maju.



Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.107.

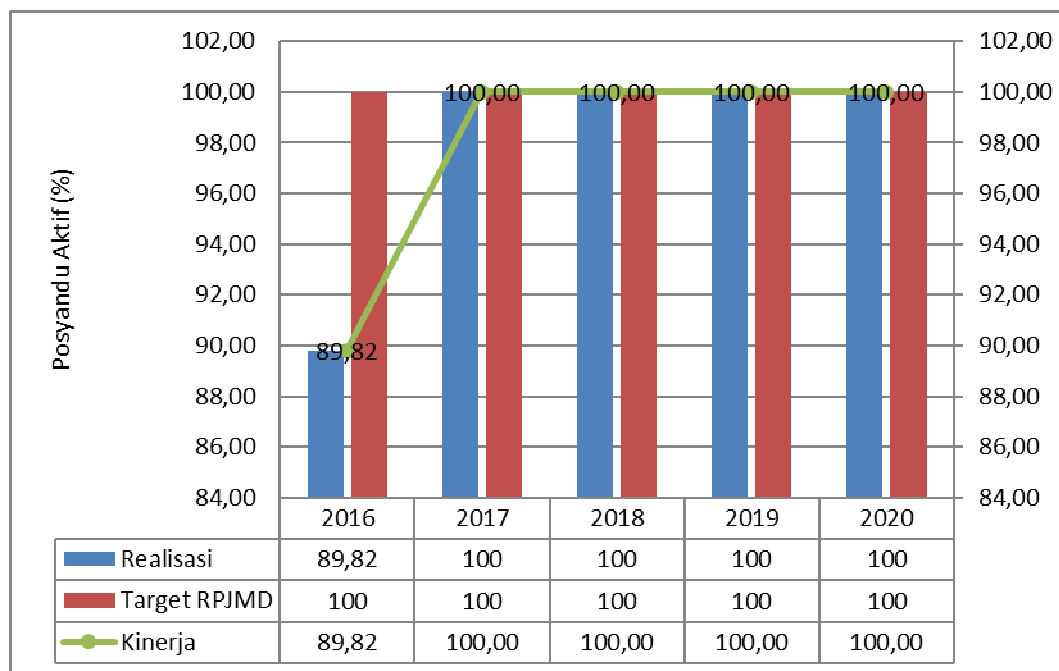
Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain (i) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, (ii) Membudayakan NKBS, (iii) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan (iv) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan

gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Mengingat pentingnya peran Posyandu yang aktif maka dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator posyandu aktif tetap 100% sampai tahun 2023.

Selama periode 2016 hingga 2020, realisasi capaian indikator posyandu aktif Indragiri Hilir memiliki tren meningkat dan mulai tahun 2017 sudah sesuai dengan target dalam RPJMD. Selama periode 2016, realisasi kinerja sebesar 89,82% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2017 hingga 2020, realisasi sudah mencapai 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator dan kinerjanya sangat tinggi namun upaya meningkatkan kualitas kegiatan posyandu perlu dilakukan sehingga tujuan sebenar posyandu lebih tercapai.



Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.108.

Kinerja Indikator Posyandu Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

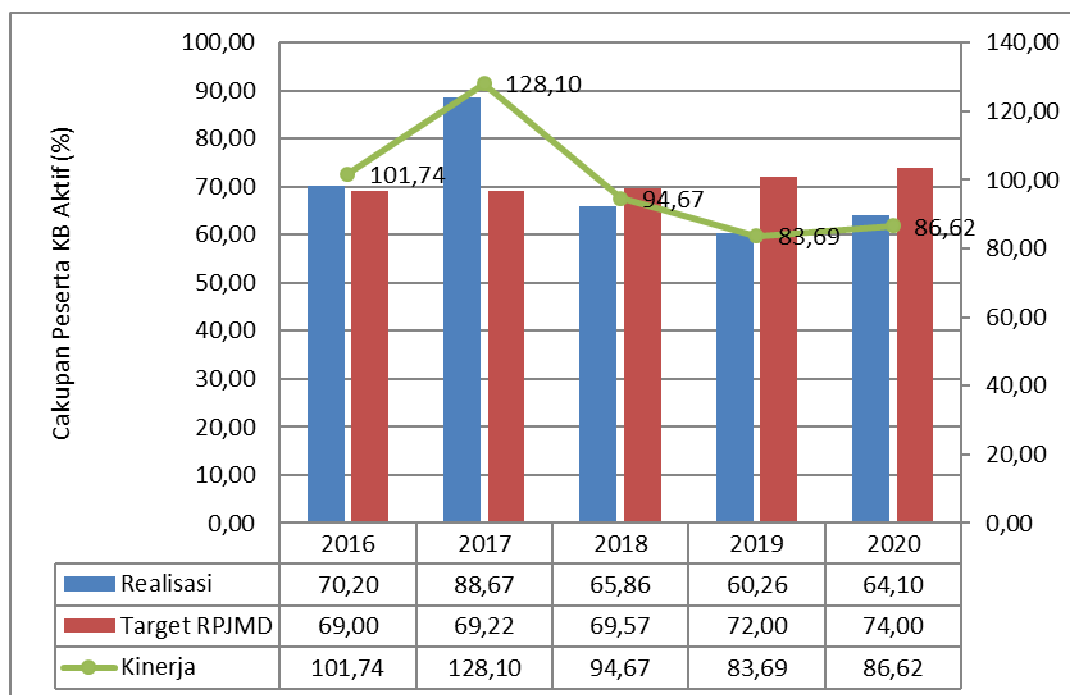
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianalisis dari indikator (i) Cakupan peserta KB

aktif, (ii) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri, dan (iii) Ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan.

- Cakupan Peserta KB Aktif

Pengertian program keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Oleh karena pentingnya KB maka dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan Indikator cakupan peserta KB aktif yang terus meningkat dari 72,00% pada tahun 2019 menjadi 74,00% pada tahun 2020.



Sumber : Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.109.

Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

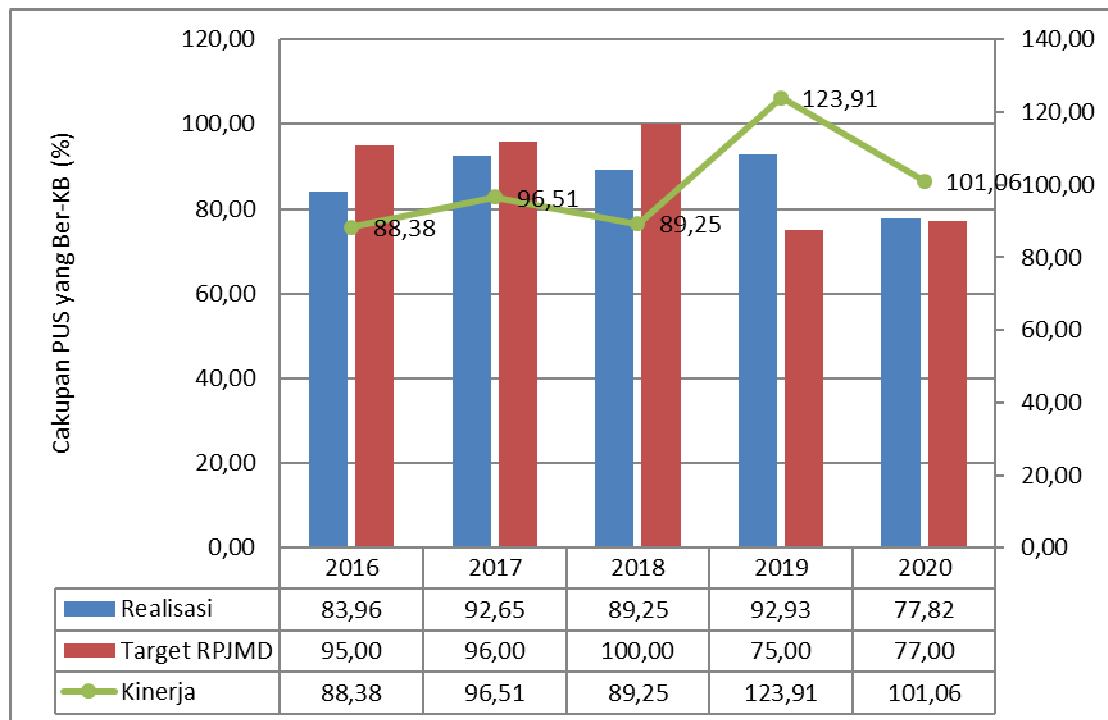
Selama periode 2016 - 2020, realisasi capaian indikator cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016 - 2020, capaian indikator berkisar antara 60,26% -

88,67% dengan realiasi kinerja berkisar antara 83,69% - 128,10% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi, namun upaya peningkatan cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir perlu terus dilanjutkan agar tujuan keluarga berencana dapat terus tercapai.

- Cakupan Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB

Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur (PUS) yang sudah ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Tujuan UPPKS adalah (i) mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, (ii) mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, (iii) meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan (iv) mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB terus meningkat yaitu dari 75% pada tahun 2019 menjadi 77% pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2018, realisasi indikator ini mempunyai tren berfluktuatif menurun dan dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB berkisar antara 88,38% yang terkategori Tinggi menjadi 96,51% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2019 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 123,91% seiring dengan penyesuaian target yang ditetapkan dalam RPJMD. Upaya untuk terus meningkat cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB perlu terus ditingkat agar pencapaian tujuan dari indikator ini dapat diwujudkan.



Sumber : Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

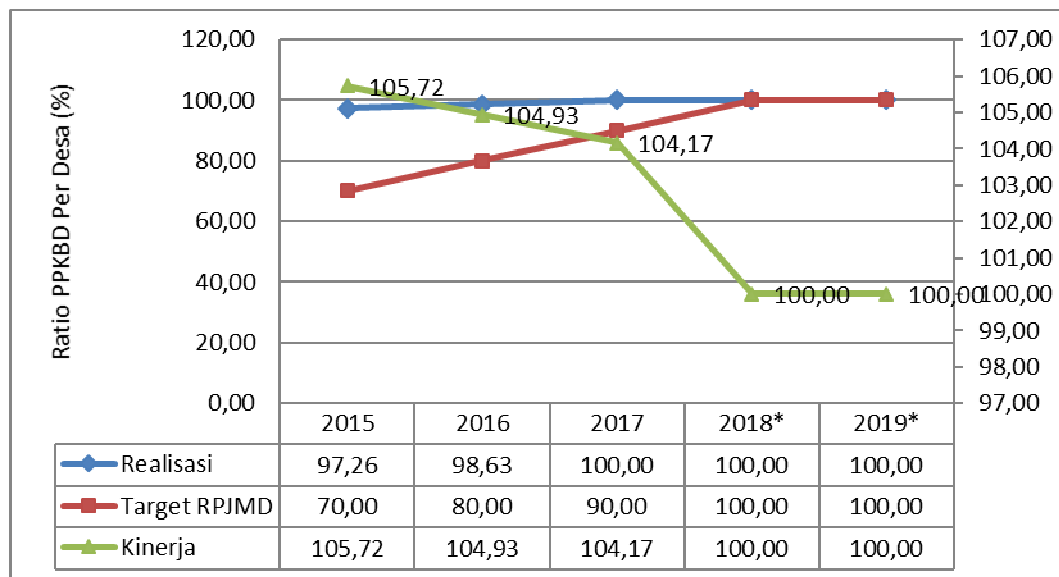
Gambar 2.110.

Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Ratio PPKBD Per Desa/Kelurahan

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seseorang atau beberapa kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat Desa/Kelurahan. Peran dan fungsi PPKBD adalah (i) Kepengurusan, (ii) Penyuluhan, motivasi dan konseling, (iii) pelayanan ulang/rujukan, (iv) pendataan dan pencatatan, (v) pertemuan rutin, (vi) kegiatan program KB dan (vii) kegiatan mandiri. Dalam rangka mensukseskan program KB sekaligus mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dilapangan maka memberadayaan PPKBD per desa/kelurahan penting untuk dilakukan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan terus meningkat dari 70% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2015 sampai dengan perkiraan untuk tahun 2018 dan 2019, realisasi kinerja indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan memiliki tren yang meningkat dan sama dan/atau diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 100% - 105,72% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2014 - 2018)

Gambar 2.111.

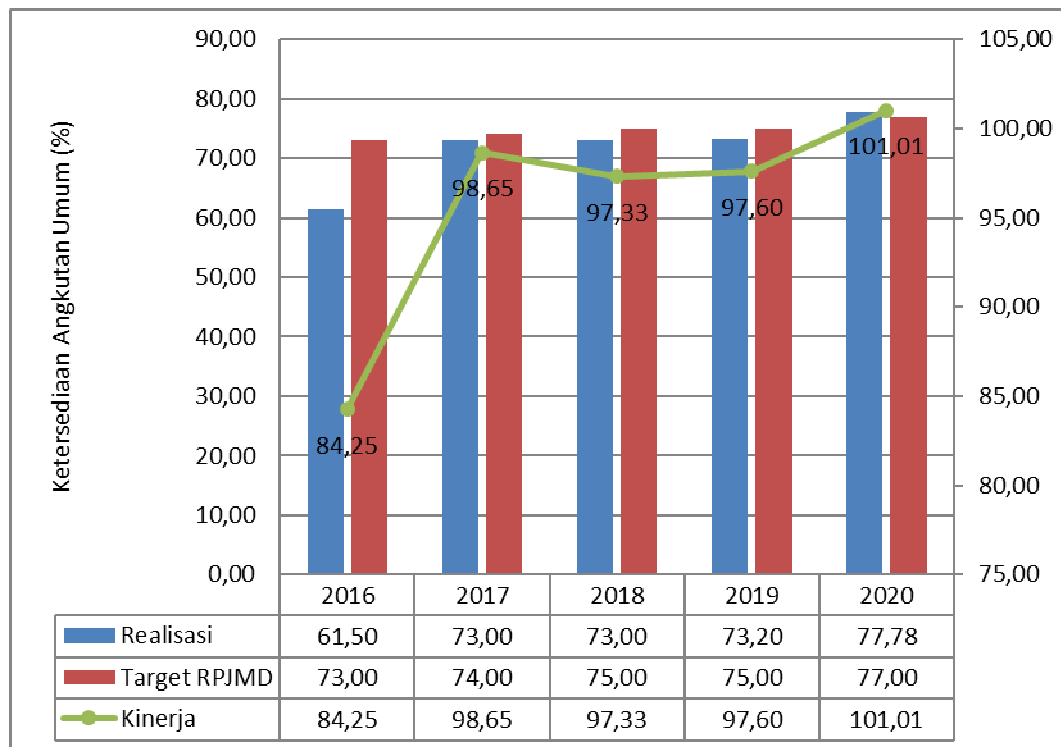
Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

i. Perhubungan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Perhubungan dianalisis dari indikator (i) Tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota, (ii) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota, dan (iii) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

- Angkutan Umum

Angkutan Umum atau transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat dari 75% pada tahun 2019 menjadi 77% pada tahun 2020.



Sumber : (Dinas Perhubungan Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.112.

Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

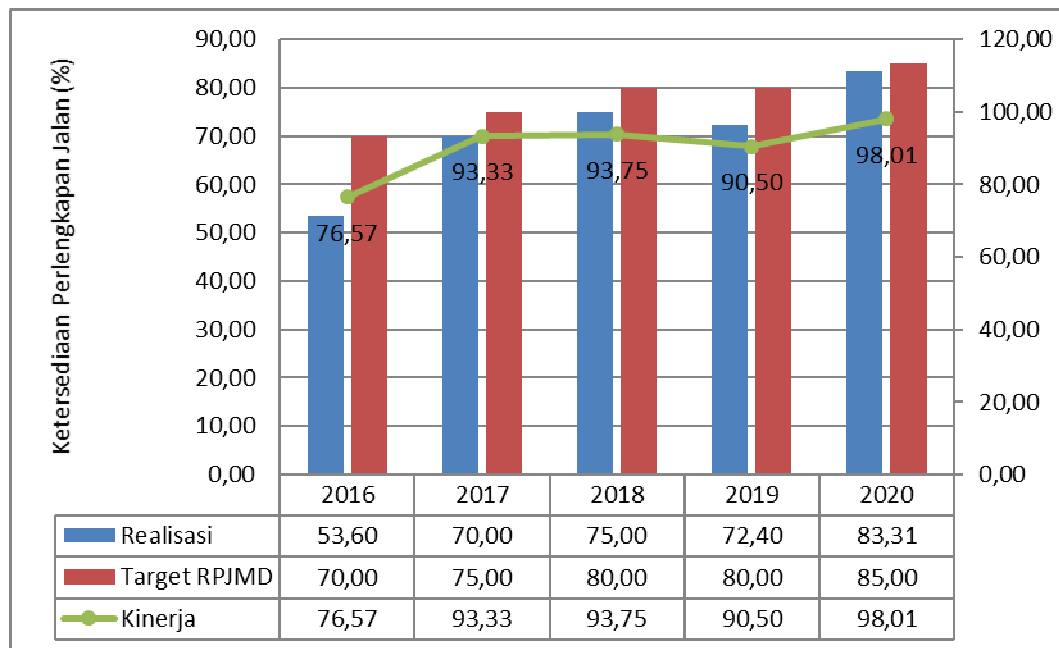
Selama periode 2016 hingga tahun 2020, realisasi indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat meski masih dibawah target RPJMD. Selama periode tersebut, realisasi indikator ini terus meningkat dari 61,50% pada tahun 2016 menjadi 77,78% pada tahun 2019, realisasi kinerja juga berkisar antara 84,25% - 101,01% yang

terkategori Sedang – Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota harus terus ditingkatkan sebagai wujud pembangunan yang berkeadilan di Indragiri Hilir.

- Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Menurut peraturan pemerintah No. 26 tahun 1985 tentang jalan, pada Pasal 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan jalan ialah rambu-rambu lalu lintas dan marka serta yang tidak berkaitan langsung dengan pemakai jalan seperti rambu, marka, patok KM, dan pagar pengaman (*guard rail*) serta penghalang lalu lintas (*traffic barrier*). Penerangan jalan umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 70% pada tahun 2016 menjadi 85% pada tahun 2020. Selama periode ini, realisasi indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan Kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat namun masih dibawah target RPJMD, yaitu dari 53,60% pada tahun 2016 menjadi 83,31% pada tahun 2020. Pada tahun 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 76,57% - 98,01% yang terkategori Sedang hingga Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota perlu untuk terus dilakukan agar nyaman dan keselamatan di jalan Kabupaten Indragiri Hilir meningkat.



Sumber : (Dinas Perhubungan Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.113.

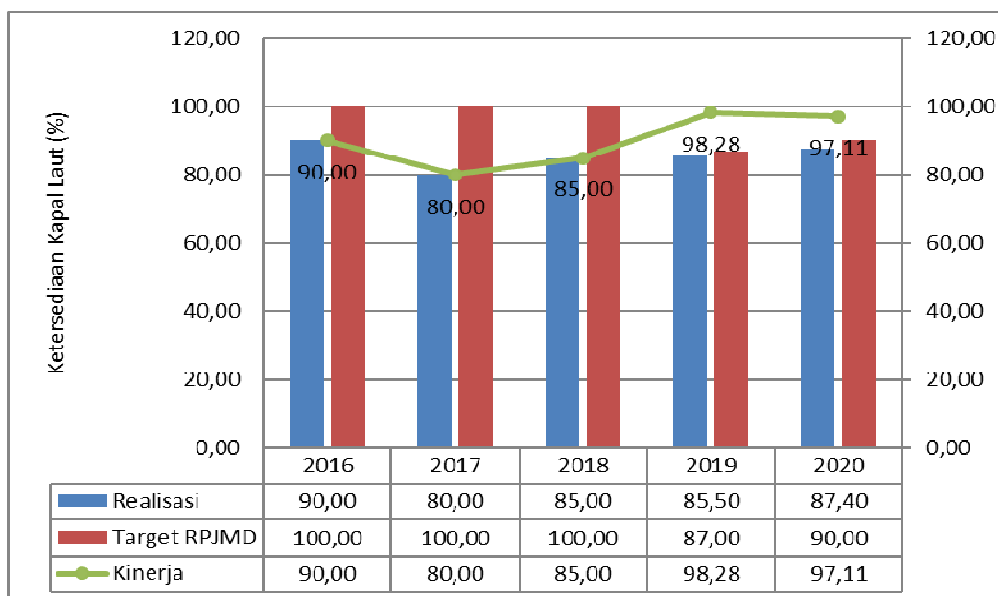
Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Kapal laut

Indragiri Hilir yang sebagian besar wilayahnya perairan dan laut maka indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan menjadi sangat penting. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator ini nilainya sempurna yaitu dari 100% sampai tahun 2018. Kemudian untuk tahun 2019 dan 2020, disesuaikan menjadi 87% dan 90% sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023.

Selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020, realisasi indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur

pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator ini sebesar 85,50% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020, capaian indikator ini meningkat dari 85,50% - 87,40% dengan realisasi kinerja menjadi 97,11% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya terus meningkatkan tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan harus terus ditingkatkan dalam upaya membuka isolasi daerah.



Sumber : (Dinas Perhubungan Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.114.

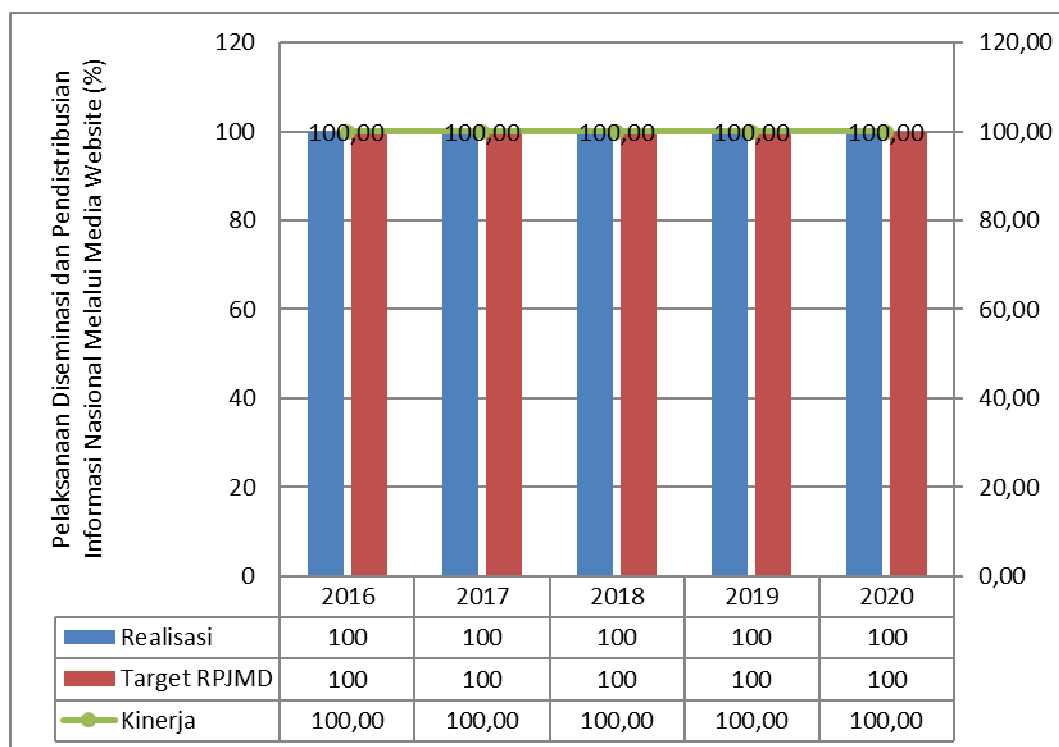
Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

j. Komunikasi dan Informatika

Layanan urusan wajib non dasar bidang Komunikasi dan Informatika dianalisis dari indikator (i) pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media *online*) dan (ii) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

- Diseminasi dan Distribusi Informasi

Diseminasi (*dissemination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sedangkan distribusi informasi adalah proses dimana informasi yang telah disampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web di Indragiri Hilir ditargetkan terlaksana 100%. Selama periode 2016 – 2020, realisasi indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web terlaksana 100% sehingga realisasi kinerja nya juga sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

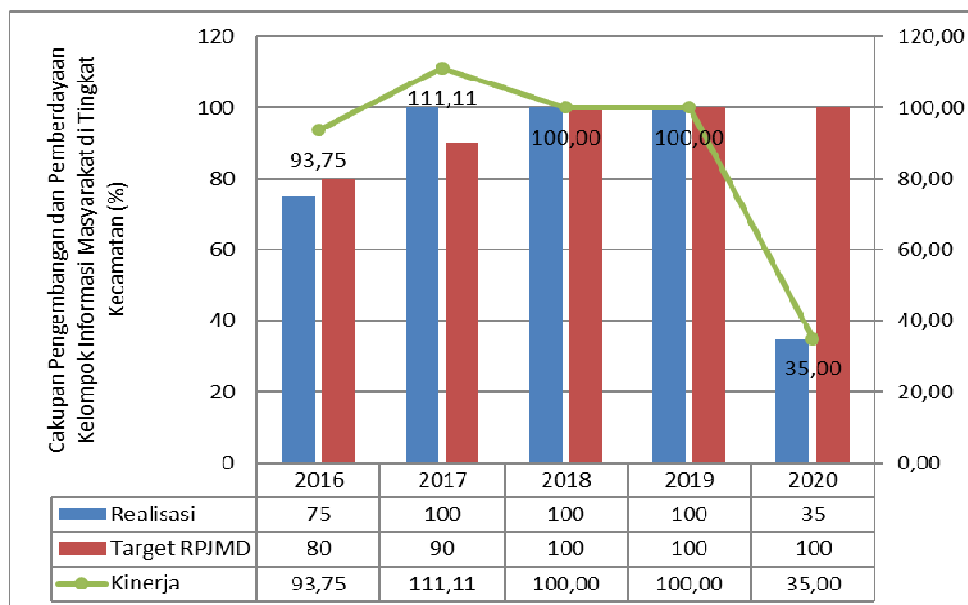
Gambar 2.115.

Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- **Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat**

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebagai indikator penting yang ditargetkan terlaksana sebesar 80% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2018. Target untuk tahun 2019 dan 2020, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023 adalah 100%.

Selama periode 2016 - 2019, realisasi indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan memiliki tren meningkat dan/atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 - 2019, realisasi indikator ini berkisar antara 75,00% - 100,00% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, realisas dan kinerja indikator ini hanya 35% yang terkategori Rendah.



Sumber : (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.116.

Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

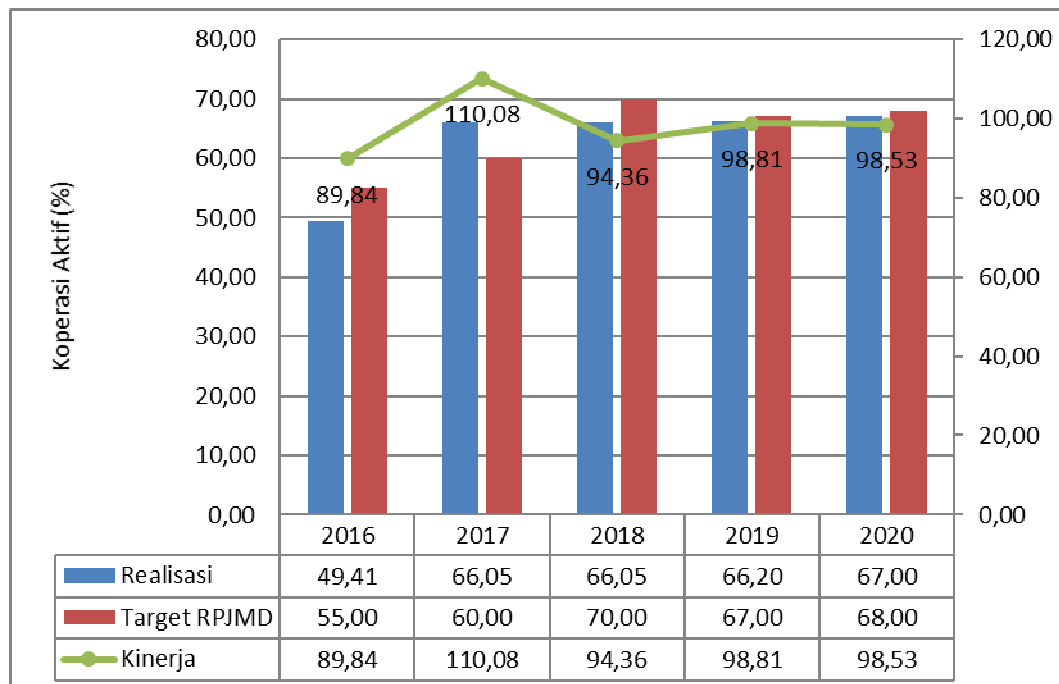
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan urusan wajib non dasar bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianalisis dari indikator (i) Koperasi Aktif dan (ii) Usaha Mikro dan Kecil.

- Koperasi Aktif

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 25/Per/M.KUKN/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi menyatakan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut mengadakan rapat RAT (Rapat Tahunan Anggota) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan indikator koperasi aktif sebagai indikator yang terus meningkat persentasenya. Pada tahun 2019, persentase koperasi aktif ditargetkan sebesar 67%, meningkat menjadi 68% pada tahun 2020.

Selama periode 2016 - 2020, realisasi indikator persentase koperasi aktif mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja sebesar 89,84% - 110,08% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini sudah diatas target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 110,08% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode pembangunan berikutnya diupayakan untuk mendorong semua koperasi di Indragiri Hilir menjadi koperasi aktif.

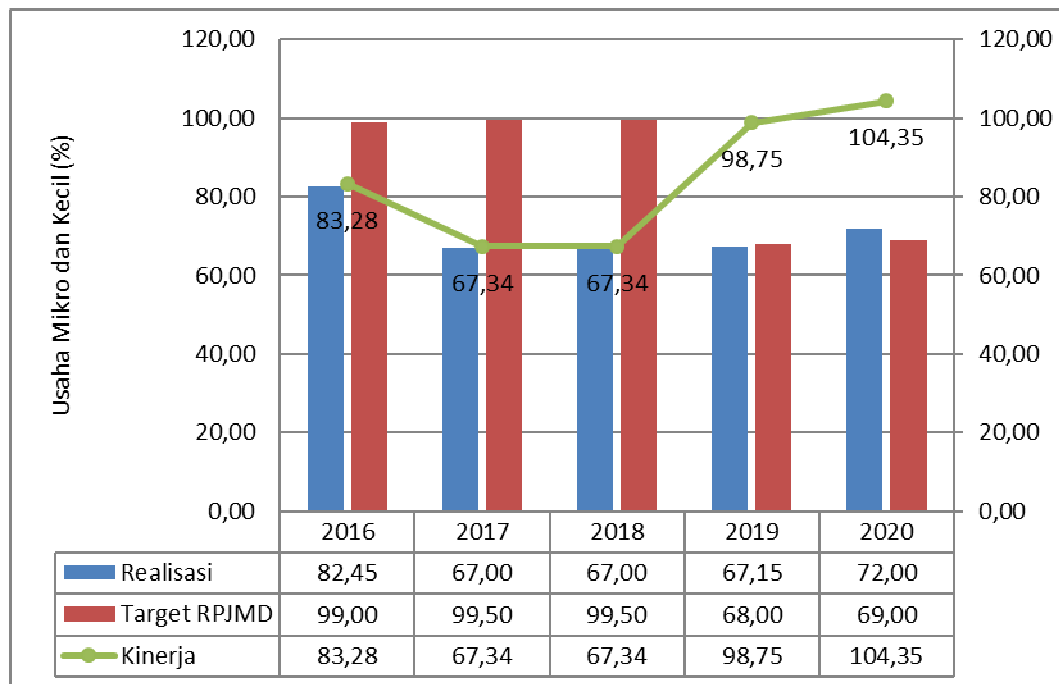


Sumber : (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.117.
Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2016 – 2020

- Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang dengan kriteria aset maksimal Rp. 50 juta dan kriteria omset maksimal Rp. 300 juta. Usaha kecil adalah yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta dan omset maksimal Rp. 1 miliar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator persentase Usaha Mikro dan Kecil penting dalam pembangunan di Indragiri Hilir. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 99,00% meningkat menjadi 99,50% pada tahun 2018.



Sumber : (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.118.
Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2016 – 2020

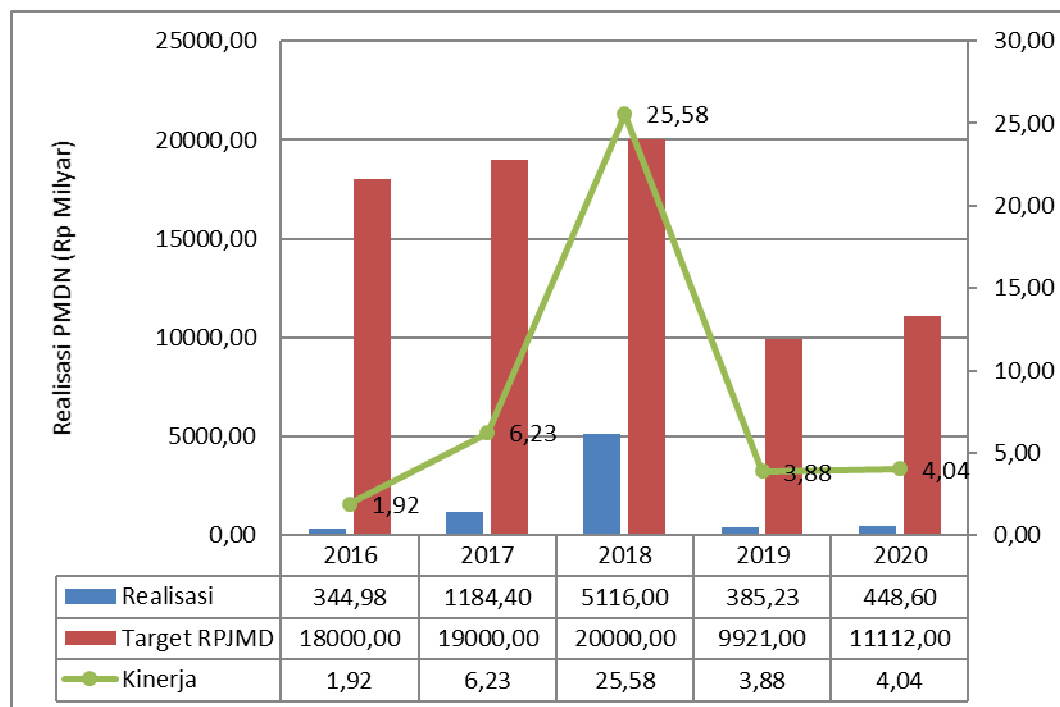
Selama periode 2016 – 2019, realisasi indikator persentase usaha mikro dan kecil berada dibawah target RPJMD dengan realisasi kinerja berkisar antara 67,00% - 82,45% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Pada tahun 2020, realisasi kinerja indikator ini mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu 104,35%, seiring dengan penyesuaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi kinerja indikator persentase usaha mikro dan kecil sebesar 83,22% yang terkategori Tinggi. Meski persentase usaha mikro dan kecil capaian kinerjanya terkategori tinggi namun upaya pembinaan UMK menjadi usaha yang lebih berdaya saing perlu terus dilakukan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.

1. Penanaman Modal

Layanan urusan wajib non dasar bidang Penanaman Modal dianalisis dari indikator (i) Realisasi PMDN dan (ii) Realisasi PMA.

- Realisasi PMDN

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Untuk penanaman modal dalam negeri tidak ada ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan indikator penanaman modal dalam negeri terus meningkat yaitu dari Rp. 9.921 (milyar) pada tahun 2019 menjadi Rp. 11.112 (milyar) tahun 2020.



Sumber : (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.119.
Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

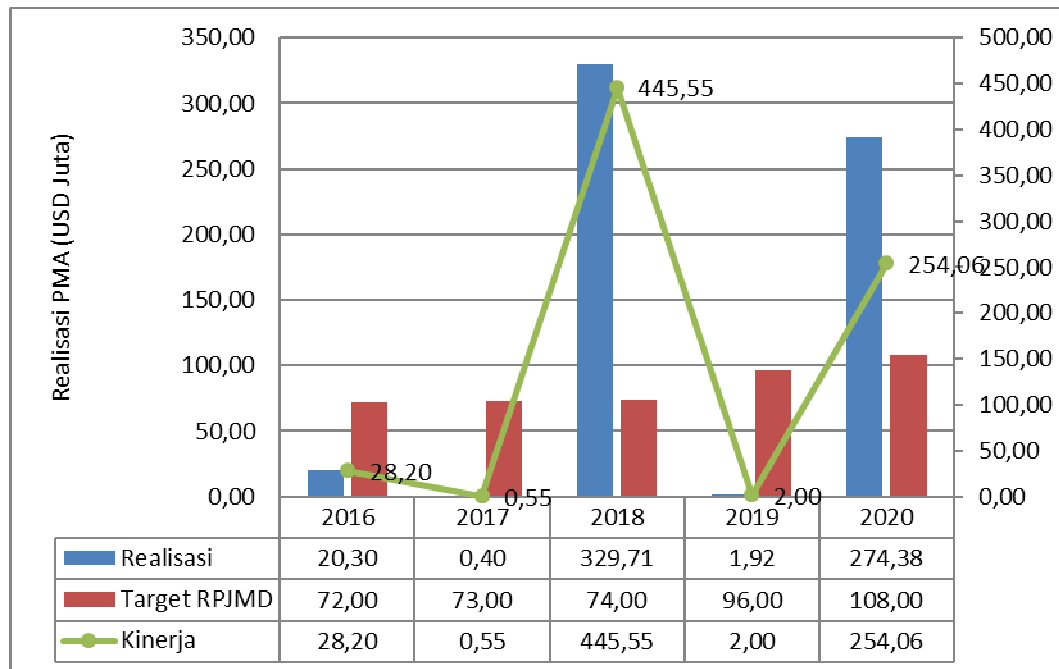
Selama periode 2016 – 2020, realisasi indikator penanaman modal dalam negeri berfluktuatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hingga 2018, realisasi indikator ini mengalami peningkatan perlahan dari 344,98 Milyar rupiah menjadi 5116 Milyar rupiah dengan kinerja berkisar 1,92% - 25,58% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2019, mengalami penurunan menjadi 385,23 Milyar dengan realisasi kinerja 3,88%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 448,60 Milyar rupiah dengan realisasi kinerja sebesar 4,04%. Kondisi ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak investor yang melakukan penarikan dana untuk menghindari resiko dana hilang. Upaya untuk terus menarik investasi PMDN harus terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indragiri Hilir.

- Realisasi PMA

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penanaman modal dalam negeri. Total nilai investasi lebih besar dari Rp. 10 milyar diluar tanah dan bangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator realisasi PMA meningkat dari USD 96 juta pada tahun 2019 menjadi USD 108 juta pada tahun 2020.

Pada tahun 2018 – 2019, jumlah realisasi PMA terjun bebas seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidakpastian sehingga banyak investor menarik dananya untuk menghindari kerugian. Selama periode 2018 – 2019, realisasi PMA menurun dari USD 329,71 juta menjadi USD 1,92 juta. Realisasi kinerja indikator ini selama periode ini berkisar antara 2% - 445,55% yang terkategori Sangat Rendah – Sangat Tinggi.

Pada tahun 2020, seiring dengan upaya relaksasi kebijakan yang dilakukan pemerintah, terdapat kenaikan jumlah PMA menjadi USD 274,38 juta sehingga realisasi kinerja menjadi 254,06% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan PMA perlu terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.



Sumber : (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.120.
Kinerja Indikator PMA di Kabupaten di Indragiri Hilir
Tahun 2015 – 2019

m. Kepemudaan dan Olahraga

Layanan urusan wajib non dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga seharusnya diukur dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikat, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga. Namun seluruh indikator ini belum tersedia datanya, hanya pada tahun 2017 tercatat beberapa indikator yang tersedia.

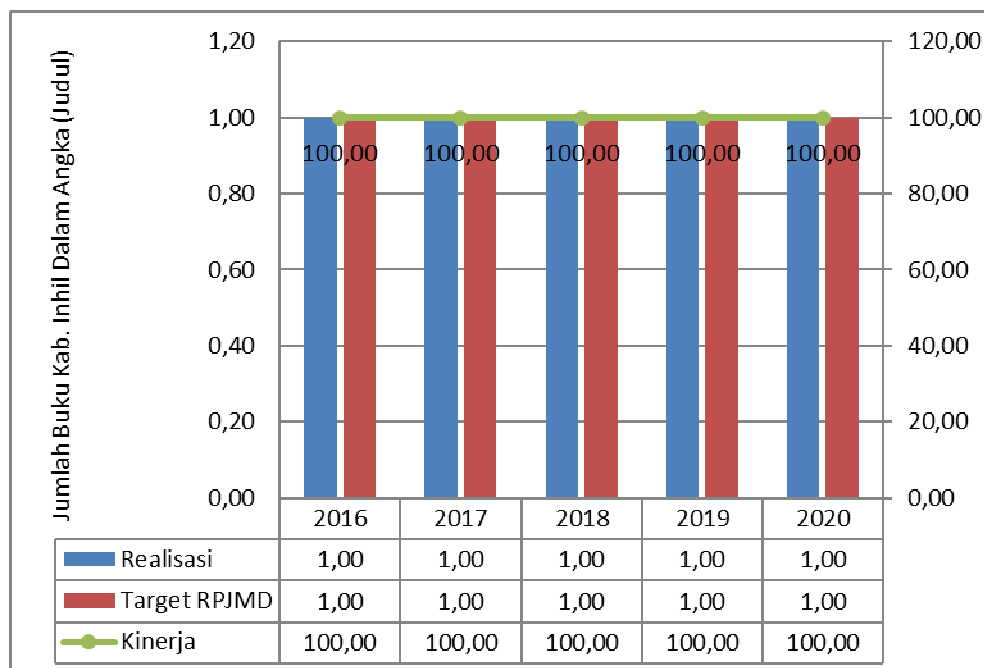
Pada tahun 2017, jumlah prestasi olahraga Indragiri Hilir sebanyak 6 prestasi yaitu (i) Juara III bolavoli putri pada pejuaraan piala Gubernur Riau, (ii) Juara 1 futsal Putra pada kejuaraan tingkat pelajar se Provinsi Riau, (iii) juara 1 Futsal Putra pada kejuaraan tingkat mahasiswa se Provinsi Riau, (iv) Juara umum pada kejuaraan Lemkari se-Sumatera, (v) Juara III lomba *presenting* putri pada perlombaan *English Festival* tingkat Provinsi dan (vi) Juara III *Singing Contest* Putra pada perlombaan *English Festival* tingkat Provinsi. Secara umum kondisi lapangan, persentase organisasi yang aktif, cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikat, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan atlet mudah dan jumlah atlit berprestasi di Indragiri Hilir relatif masih minim. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator kepemudaan dan olahraga diatas perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga Indragiri Hilir ke depan.

n. Statistik

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Buku “Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka” dan (ii) Kecamatan Dalam Angka.

- Buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka menjadi indikator dalam bidang statistik. Selama periode 2016 – 2020, Buku Indragiri Hilir dalam angka selalu terbit dalam edisi cetak dan online sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan cepat dan murah. Setiap tahunnya, BPS bekerjasama dengan pemerintah Indragiri Hilir juga mempublikasikan Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir dan PDRB Indragiri Hilir serta publikasi - publikasi lainnya.



Sumber : (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.121.

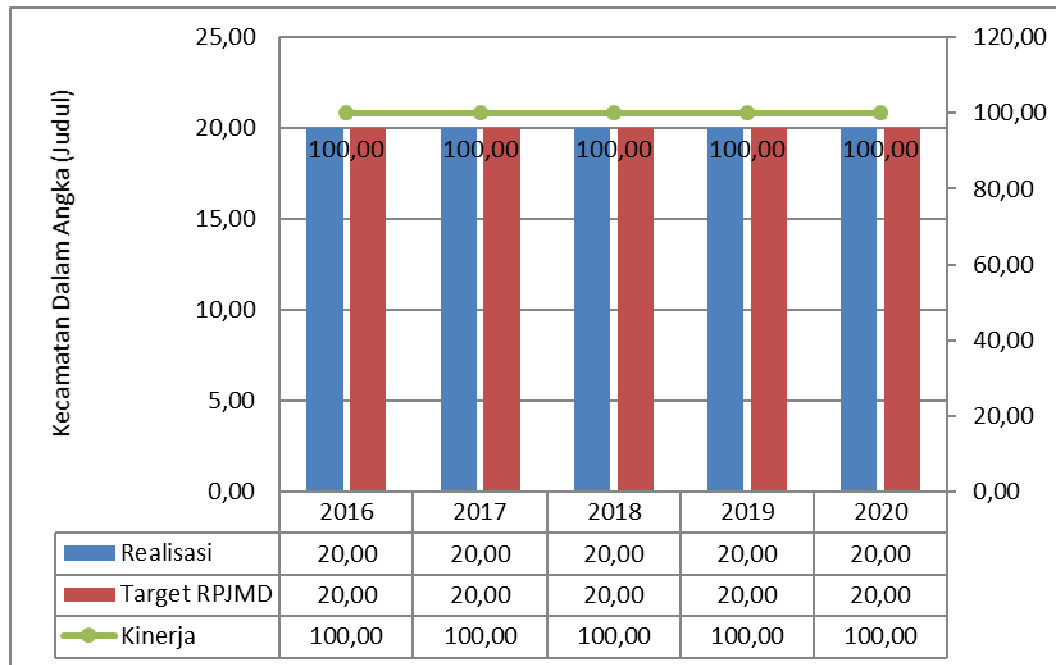
Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka sebagai indikator dalam bidang Statistik. Selama periode ini, realisasi indikator buku Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Agar evaluasi RPJMD dan RKPD dapat dilakukan dengan baik setiap tahunnya, perlu dilakukan kerjasama dengan BPS untuk pengukuran beberapa indikator penting sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017.

- Kecamatan Dalam Angka

Sejalan dengan penerbitan Buku Indragiri Hilir Dalam Angka, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama dengan BPS Indragiri Hilir juga menerbitkan dan mempublikasikan buku Kecamatan dalam Angka untuk ke-20 Kecamatan di Indragiri Hilir. Buku Kecamatan Dalam Angka ini diikuti dengan buku Statistik Daerah Kecamatan sebanyak 20

judul. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator penerbitan dan publikasi 20 judul buku kecamatan dalam angka sebagai indikator penting dalam bidang Statistik.



Sumber : (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.122.
Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Realisasi indikator penerbitan dan publikasi ke-20 buku Kecamatan dalam angka terealisasi penuh sehingga realisasi kinerja 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Kedepan, statistik tingkat kecamatan juga menyediakan data - data yang terkait dengan indikator yang diperlukan dalam evaluasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

o. Persandian

Persandian atau juga dikenal dengan sebutan kriptologi adalah ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Bidang urusan persandian diukur menggunakan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat

daerah. Indikator ini relatif kurang digunakan dan tidak tersedia data yang dimaksud.

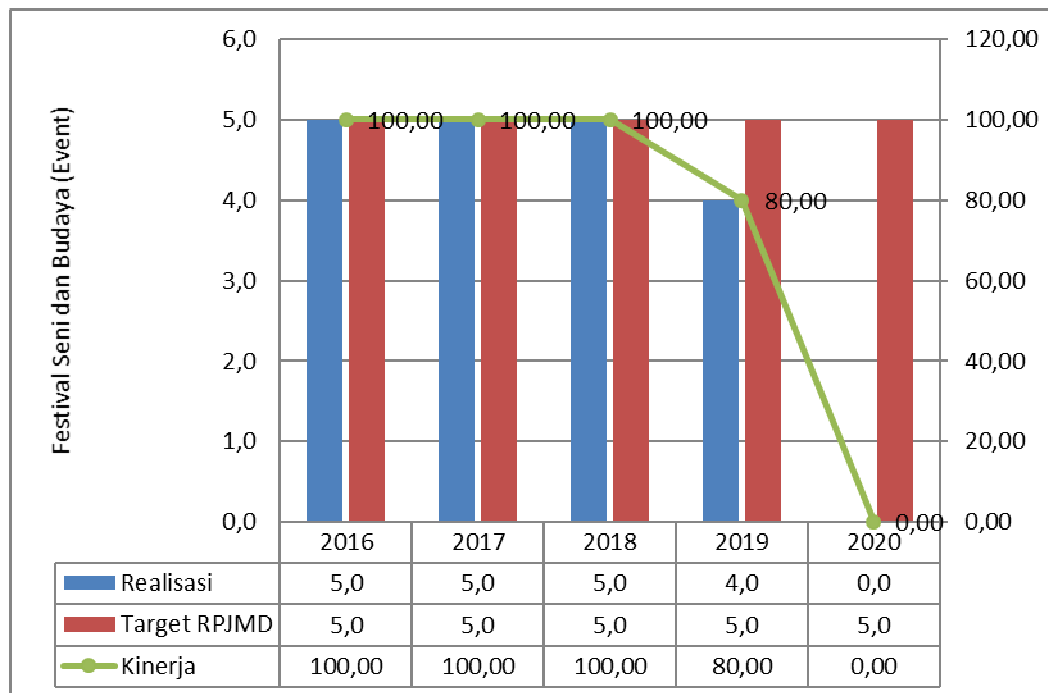
p. Kebudayaan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Kebudayaan diwakili oleh indikator (i) Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan (ii) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

- Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Setiap tahun, Pemerintah Indragiri Hilir melaksanakan berbagai festival seni dan budaya seperti (i) festival bumi gemilang, (ii) festival berdah, (iii) penampilan sanggar seni tari Citra Sehati di Taman Mini Indonesia, (iv) lomba seni teater klasik dan (vi) lomba lagu bupati Singer, musik gebyar merdeka serta panggung hiburan rakyat. Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini menjadi indikator dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023.

Realisasi capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya di Indragiri Hilir sesuai dengan target sehingga realisasi kinerjanya sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi, kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang mengharuskan kita untuk membatasi keramaian, sehingga berbagai acara atau event kesenian tidak dapat dilaksanakan.



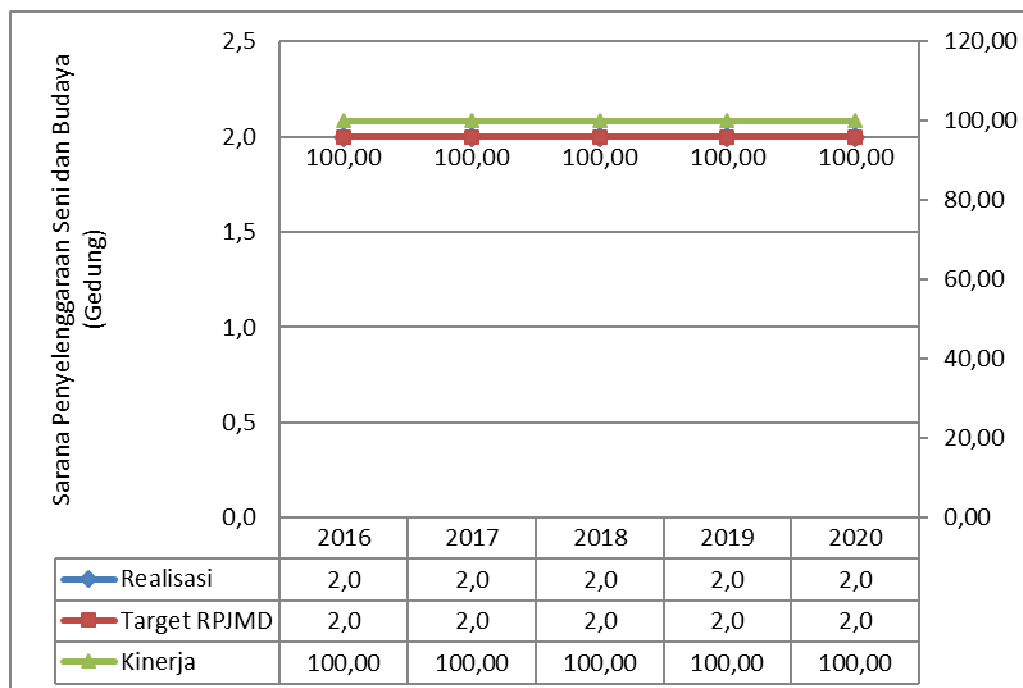
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.123.

Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2020 telah ditetapkan indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebagai indikator penting yang diukur setiap tahun tingkat pencapaian kinerjanya. Selama periode 2016 – 2020, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Indragiri Hilir sebanyak dua unit dan realisasinya juga dua unit sehingga realisasi kinerjanya 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi namun pemanfaatan sarana seni dan budaya untuk pertunjukan masih sangat terbatas. Oleh karena itu pembinaan terhadap seni dan budaya perlu ditingkatkan dan dipertunjukkan kepada masyarakat.



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.124.

Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 – 2019

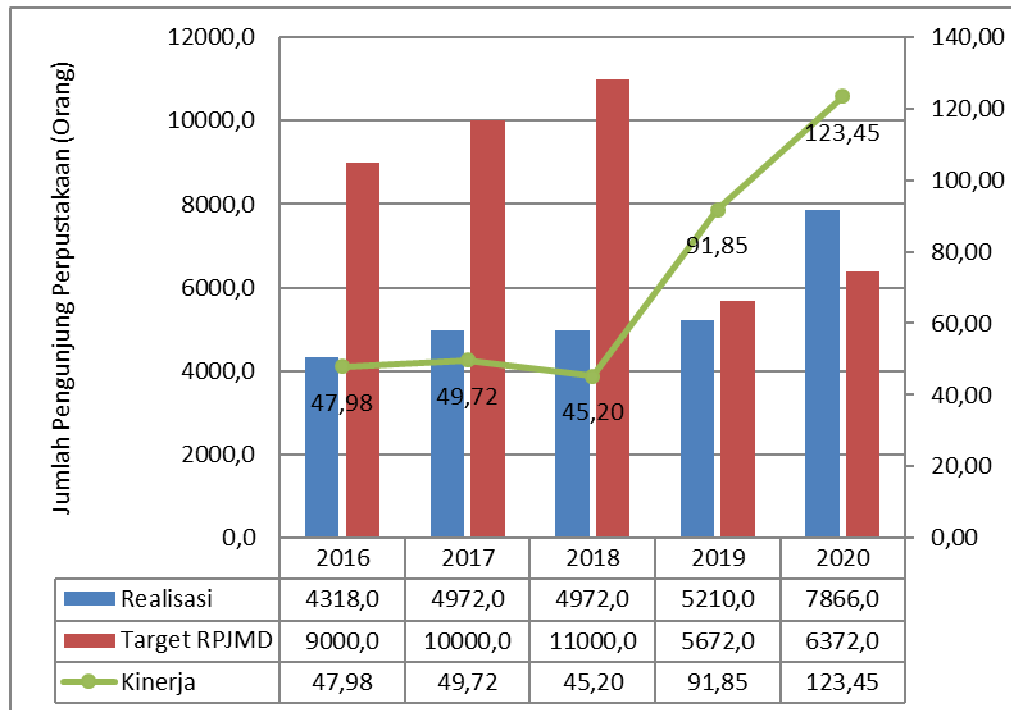
q. Perpustakaan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Perpustakaan diwakili oleh indikator (i) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan (ii) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.

- Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Indragiri Hilir meningkat dari 5.672 pengunjung pada tahun 2019 menjadi 6.372 pengunjung pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2020, realisasi indikator jumlah pengunjung perpustakaan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tercatat jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 4.318 pengunjung, meningkat menjadi 7.866 pengunjung. Realisasi kinerja indikator ini berkisar 45,20% - 123,45%. Penambahan jumlah koleksi buku dan pengembangan perpustakaan digital yang

terkoneksi dengan perpustakaan lainnya diharapkan dapat menjadi salah satu strategi yang dapat menarik minat pengunjung ke perpustakaan Indragiri Hilir.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, diolah Bappeda, 2021

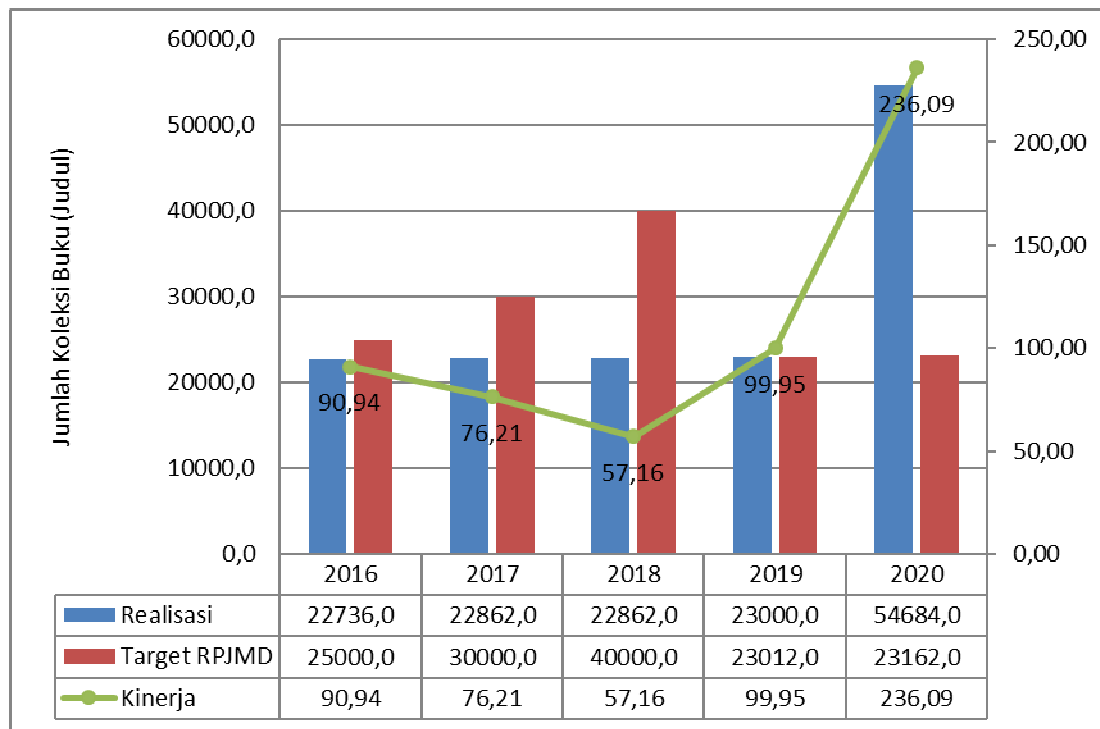
Gambar 2.125.

Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan indikator jumlah buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir meningkat dari 23.012 judul buku pada tahun 2019 menjadi 23.162 judul buku pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2020, capaian realisasi indikator jumlah koleksi buku yang tersedia ini memiliki tren meningkat. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir berkisar antara 57,16% - 236,09% yang terkategori Rendah hingga Sangat Tinggi dengan rata-rata terkategori Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja terkategori Tinggi namun jumlah pengunjung perpustakaan relatif sepi. Oleh karena itu upaya menarik

minat pengunjung melalui peningkatan pelayanan seperti perpustakaan digital dan terkoneksi dengan perpustakaan lain perlu diupayakan.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.126.

Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

r. Kearsipan

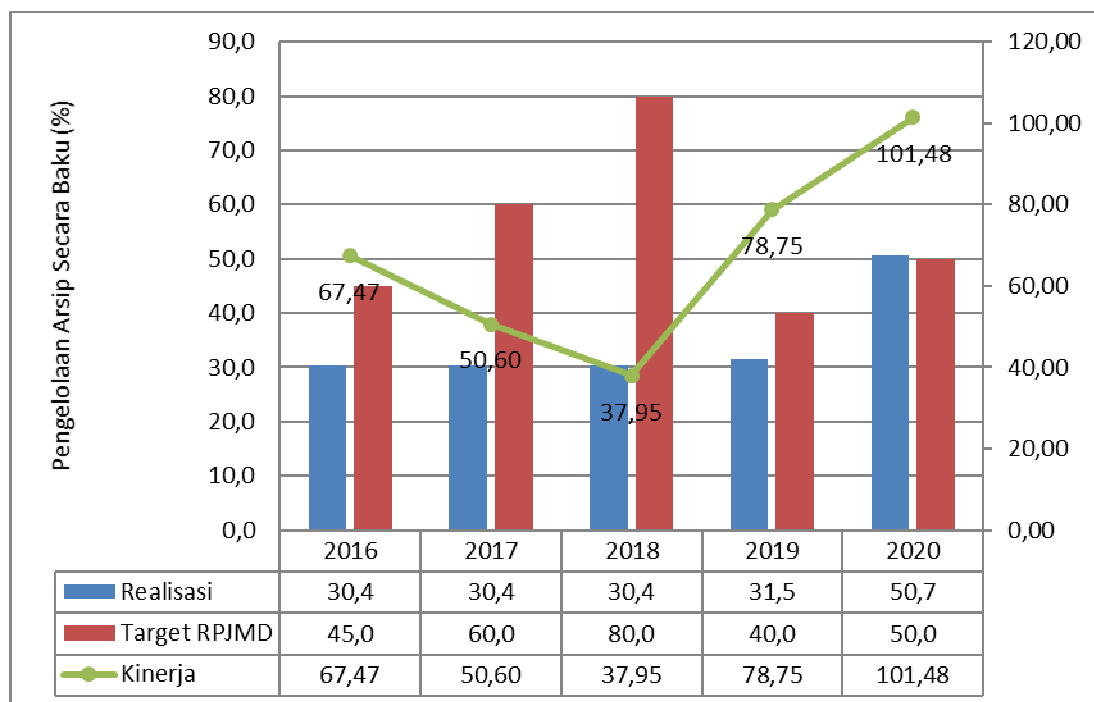
Layanan urusan wajib non dasar bidang Kearsipan diwakili oleh indikator (i) Pengelolaan arsip secara baku dan (ii) Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

- Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan adalah suatu proses penyimpanan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan kembali, yang meliputi penciptaan (pembuatan dan penerimaan), penyimpanan (*filling*) dan penemuan kembali (*finding*), penyelamatan (pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan), dan penyusutan arsip (pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan). Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan

indikator pengelolaan arsip secara baku meningkat dari 40% pada tahun 2019 menjadi 50% pada tahun 2020.

Selama periode 2016 - 2019, realisasi indikator ini berada dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD dimana realisasi kinerjanya sebesar 37,95% - 78,75% yang terkategori Sangat Rendah hingga Tinggi dengan rata-rata kinerja terkategori Sedang. Upaya peningkatan realisasi kinerja indikator ini perlu terus dilakukan pada periode yang akan datang.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, diolah Bappeda, 2021

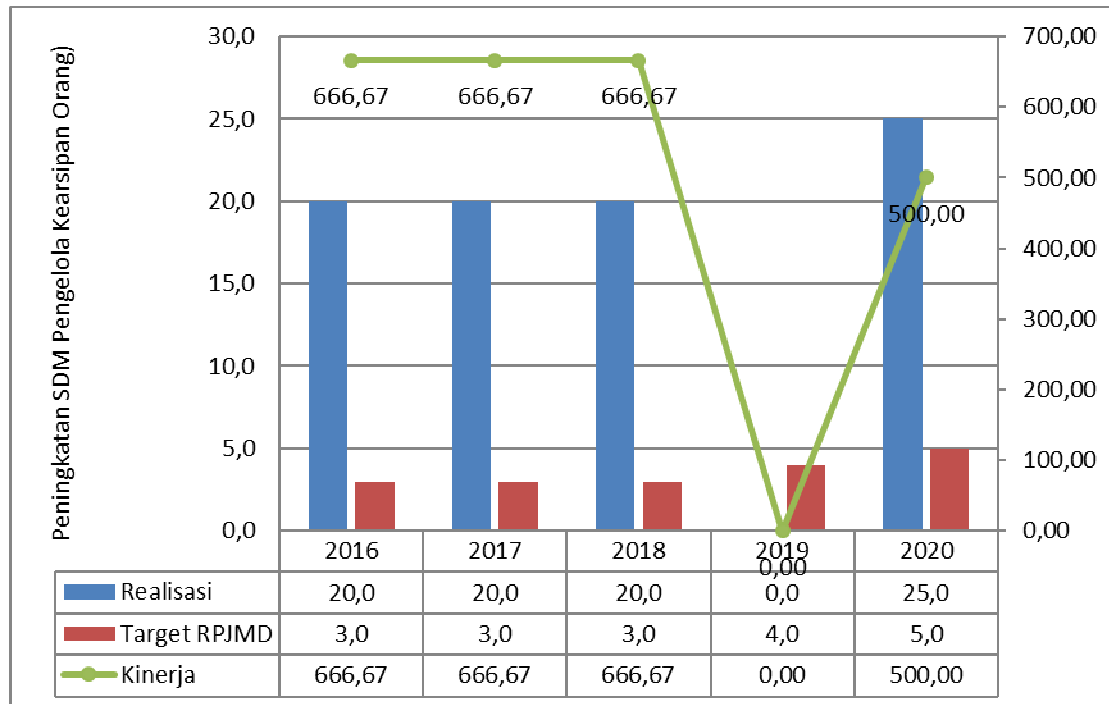
Gambar 2.127.

Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

- Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 4 orang pada tahun 2019 dan 5 orang pada tahun 2020. Realisasi indikator ini pada tahun 2016 - 2018 sebanyak 20 orang dengan capaian kinerja sebesar 666,67% yang terkategori Sangat Tinggi. Realisasi indikator ini adalah hasil dari pelatihan mengenai pengelolaan kearsipan. Tahun 2019, realisasi indikator ini adalah 0 dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran

untuk penanganan COVID-19. Pada tahun 2020, capaian kinerja sebanyak 500% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan dapat dilakukan dengan fungsional kearsipan buka sekedar pegawai pengelola kearsipan.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.128.

Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

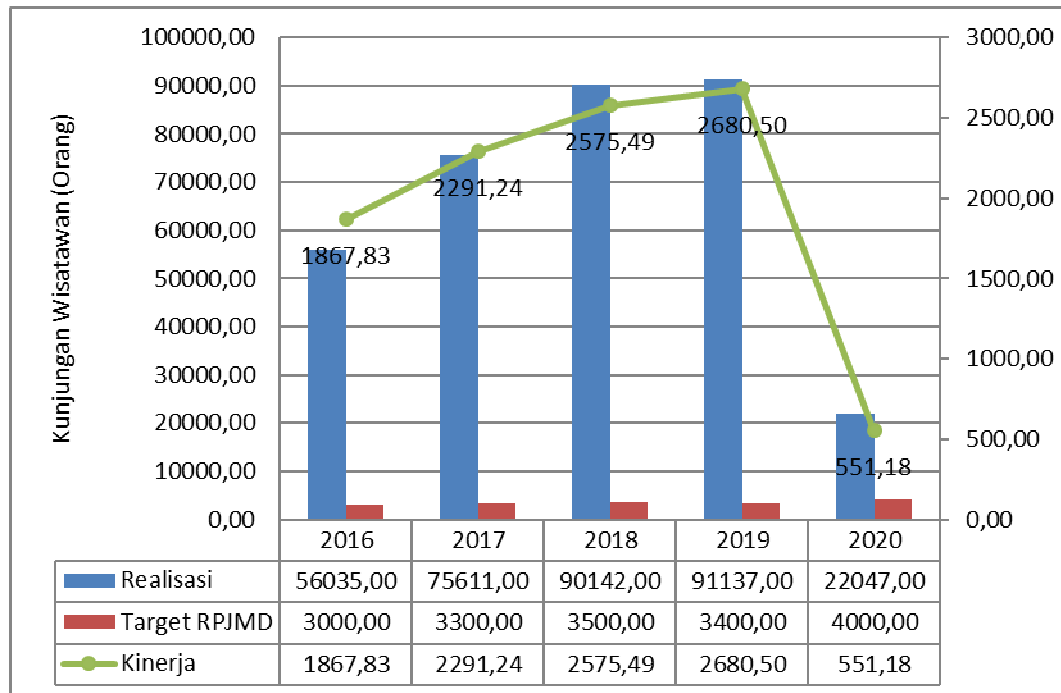
2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan terdiri dari (i) Pariwisata, (ii) Pertanian, (iii) Perdagangan, (iv) Perindustrian, (v) Transmigrasi, dan (vi) Kelautan dan Perikanan.

a. Pariwisata

Layanan urusan pilihan bidang pariwisata digambarkan dari indikator Kunjungan Wisatawan. Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit

berbunga Indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari.



Sumber : (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.129.
Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa target indikator kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 3.000 wisatawan pada tahun 2016 menjadi 3.500 wisatawan pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 4.000 orang pada tahun 2020, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi indikator memiliki tren berfluktuatif meningkat, dimana pada tahun 2016 – 2019, capaiannya jauh diatas target.

Selama periode 2016 – 2019, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 1867,83% - 2680,50% dan terkategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk tahun 2020, terdapat penurunan jumlah wisatawan, sehingga realisasi menjadi 22.047 orang, seiring dengan pembatasan sosial yang diberlakukan guna menekan penyebaran virus COVID-19. Meski capaian

kinerja indikator kunjungan wisatawan terkategori Sangat Tinggi, namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif masih belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Masih jauh kalah bila dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga seperti Pelalawan yang mempunyai objek wisata yang dikenal dan dikunjungi wisatawan manca negara seperti Ombak Bono dan Taman Nasional Tesso Nilo. Begitu juga dengan Indragiri Hulu dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

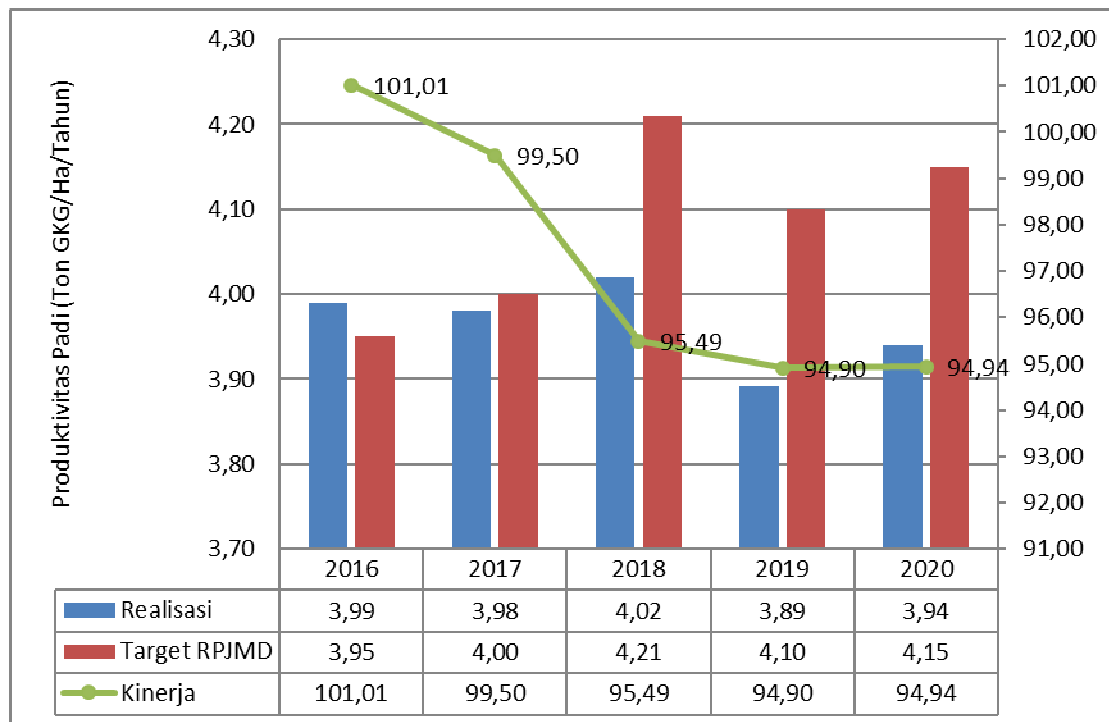
b. Pertanian

Layanan urusan pilihan bidang pertanian digambarkan dari indikator (i) Produktivitas Padi, (ii) Produksi beras, (iii) Produktivitas Kelapa, (iv) Produktivitas kelapa sawit dan (v) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

- Produktivitas Padi

Indragiri Hilir merupakan sentra tanaman padi di Provinsi Riau. Pada tahun 2016, luas panen padi sawah di Indragiri Hilir seluas 24.988,9 hektar dengan kontribusi sebesar 34,44% dari total luas tanam Provinsi Riau. Luas panen padi sawah Indragiri Hilir jauh lebih luas dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu dan Pelalawan yang masing-masing hanya seluas 1.895,5 hektar dan 645,8 hektar. Produksi gabah Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 100.383 ton dengan kontribusi terhadap produksi gabah Provinsi Riau sebesar 30,81%, jauh lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan yang masing - masingnya sebesar 7.174 ton dan 29.819 ton. Namun dari segi produktivitas, produktivitas padi sawah Indragiri Hilir sebesar 40,17 kwintal/hektar masih dibawah produktivitas padi sawah Pelalawan yang sebesar 44,87 kwintal/hektar, meski lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu yang sebesar 37,17 kwintal/hektar.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator produktivitas padi sawah Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari 4,10 ton/hektar tahun 2019 menjadi 4,15 ton pada tahun 2020. Realisasi indikator produktivitas padi sawah di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2016, produktivitas padi sawah di Indragiri Hilir berada diatas target RPJMD, namun pada tahun 2017 - 2020, capaian indikatornya mengalami tren berfluktuatif menurun. Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja produktivitas padi sawah berkisar antara 94,90% - 101,01% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, namun perlu disadari bahwa produktivitas target relatif jauh lebih rendah dibanding potensi disamping produksi yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, upaya menggenjot lagi produktivitas dengan revitalisasi irigasi dan penerapan teknologi perlu terus dilakukan sehingga produktivitas padi sawah dapat mencapai produktivitas potensinya.

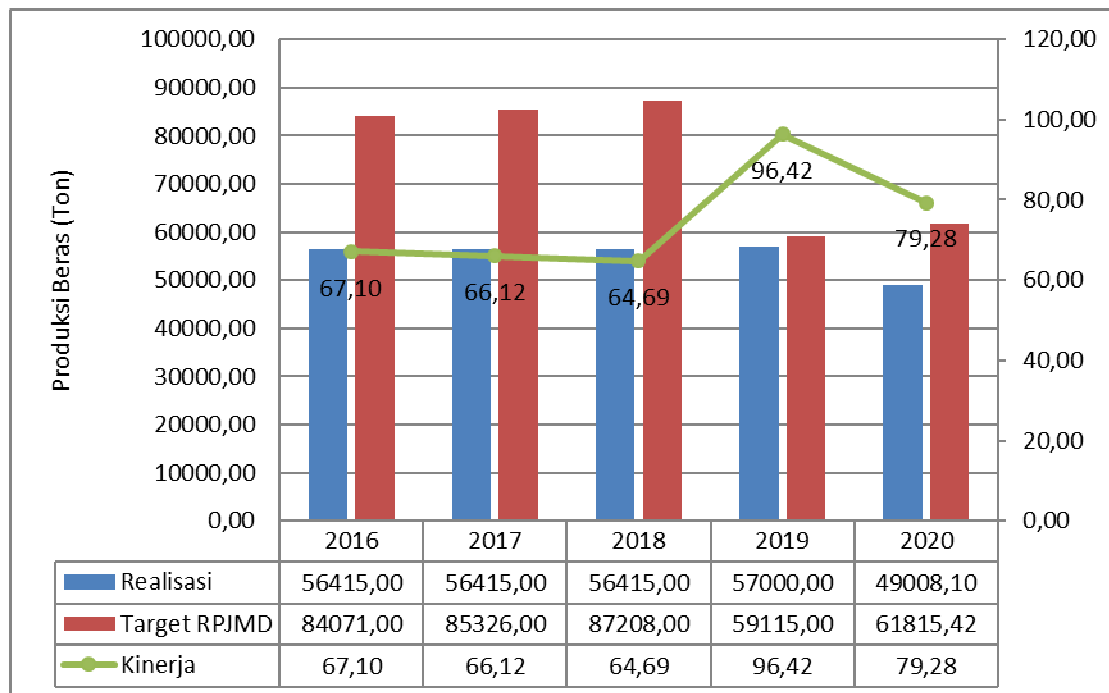


Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.130.
Kinerja Indikator Produktivitas Padi
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Produksi Beras

Meski Indragiri Hilir merupakan sentra padi terbesar di Provinsi Riau dengan produksi beras terbesar di Riau, namun produksi berasnya belum mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk sebesar 654.909 jiwa dibutuhkan beras sebanyak 74.659,63 ton beras, jika mengacu kepada standar yang dikeluarkan BPS yakni konsumsi beras per orang 114 kg per tahun atau 312 gr per hari. Sementara kemampuan produksi beras Indragiri Hilir sebesar 49.008,10 ton, dan kekurangan sebesar 25.651,53 ton atau defisit sebesar 34,35%. Capaian ini lebih baik dibanding Indragiri Hulu yang defisit sebesar 80,20% dan Pelalawan defisit sebesar 54,43%.



Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.131.

Kinerja Indikator Produksi Beras di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa produksi beras Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 59.115 ton pada tahun 2019 menjadi 61.815,42 ton pada tahun 2020. Realisasi indikator produksi beras Indragiri Hilir berfluktuatif menurun dan berada dibawah target. Realisasi kinerja indikator ini selama 2016 – 2018 berkisar antara 64,69% - 67,10% yang terkategori Sedang. Pada tahun 2019, mengalami kenaikan produksi menjadi 57.000 ton dengan realisasi kinerja mencapai 96,42% yang terkategori Sangat Tinggi. Selama periode ini, rata - rata capaian kinerja indikator produksi beras di Indragiri Hilir terkategori Sedang. Upaya terus meningkatkan produksi beras harus terus dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kedepan Indragiri Hilir dapat berswasembada beras.

- **Peternakan**

Indragiri Hilir merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang memiliki potensi besar dikembangkan untuk peternakan sapi. Pada tahun 2017, populasi sapi di Indragiri Hilir sebanyak 7.394 ekor. Populasi ternak sapi Indragiri Hilir ini relatif sangat rendah dibanding potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kalah jauh dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu yang mencapai 50.000 ekor.

Populasi Ternak sapi Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 7.394 ekor, jumlah betina produktif dari jumlah suatu data kegiatan 3.000 ekor yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang di batasi aliran parit-parit (sungai), menyulitkan peternak untuk melakukan kawin alam ternak sapinya. Sehingga angka kelahiran ternak sapi di Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai 28% dari betina produktif. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau angka kelahiran ternak di Indragiri Hilir sangat jauh tertinggal dengan Kabupaten lain yang Sarana dan Prasarana pendukungnya yang lebih memadai. Untuk peningkatan angka kelahiran tersebut pula dilakukan berbagai upaya: (i) pengadaan pejantan untuk wilayah – wilayah yang sulit untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan, (ii) perluasan wilayah Inseminasi Buatan (IB) dengan dukungan petugas, Sarana dan Prasarana IB yang memadai dan (iii) mengoptimalkan kinerja petugas pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)

- **Kelapa**

Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2017, luas lahan kelapa di Indragiri Hilir seluas 440.696 hektar dengan produksi sebesar 359.397 ton (BPS Provinsi Riau, 2018). Luas lahan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017, memiliki porsi sebesar 84,76% dari total luas areal kelapa Provinsi Riau dengan kontribusi produksi sebesar 86,41%. Perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam di

Kabupaten Indragiri Hilir mencakup hampir seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Kemuning yang luasan dan produksinya relatif kecil. Perkebunan kelapa ini telah menjadi urat perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah petani sebanyak 65.417 petani.

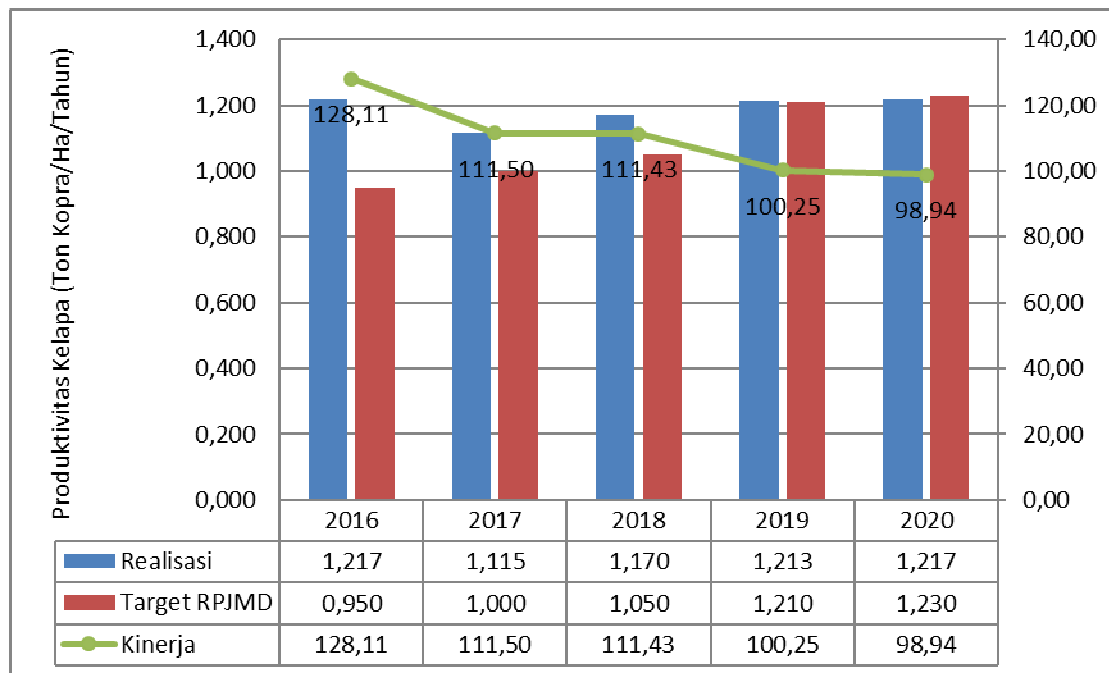
Tabel 2.30.

Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Dalam Menurut Kecamatan Tahun 2017.

No	Kecamatan	Luas Areal (Hektar)				Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani
		TBM	TM	TTR	Jumlah			
1	Keritang	922	21.230	852	23.004	21.315.081	1.004	5.502
2	Kemuning	3	15	-	18	18.210	1.214	27
3	Reteh	1.005	21.422	1.501	23.928	29.797.487	1.391	4.883
4	Sungai Batang	361	14.573	487	15.421	19.600.860	1.345	3.147
5	Enok	1.310	23.998	5.587	30.895	23.182.039	966	6.305
6	Tanah Merah	256	11.034	133	11.422	16.206.177	1.469	4.272
7	Kuala Indragiri	450	5.947	6.742	13.139	5.863.989	986	2.681
8	Concong	171	9.345	194	9.710	11.800.008	1.263	1.982
9	Tembilahan	175	6.785	620	7.580	9.058.002	1.335	1.547
10	Tembilahan Hulu	87	4.345	604	5.036	5.018.602	1.155	1.028
11	Tempuling	959	8.647	884	10.491	10.376.784	1.200	2.141
12	Kempas	234	1.698	340	2.273	2.068.651	1.218	464
13	Batang Tuaka	25	12.429	1.539	13.993	12.602.803	1.014	2.856
14	Gaung Anak Serka	1.901	9.679	5.598	17.178	7.715.224	797	3.506
15	Gaung	403	22.120	4.761	27.285	19.863.879	898	5.568
16	Mandah	1.018	26.264	7.061	34.343	31.516.884	1.200	7.946
17	Kateman	3.048	9.790	18.783	31.621	11.855.230	1.211	6.453
18	Pelangiran	2.416	11.405	2.329	16.150	17.552.064	1.539	3.296
19	Teluk Belengkong	45	4.023	550	4.618	6.098.155	1.516	942
20	Pulau Burung	-	3.637	628	4.265	4.364.388	1.200	879
Jumlah		14.789	228.386	59.193	302.370	265.874.517	1.196	65.417

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023, telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 1,210 ton/ha/tahun pada tahun 2019 menjadi 1,230 ton/ha/tahun pada tahun 2020. Realisasi indikator produktivitas kelapa Indragiri Hilir sudah diatas target pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Realisasi kinerja indikator produktivitas kelapa indragiri Hilir ini berkisar antara 100,25% - 128,11% yang terkategori Sangat Tinggi. Namun, untuk tahun 2020, realisasi kinerja indikator ini mengalami sedikit penurunan

sejalan dengan target yang meningkat, yaitu sebesar 98,94% yang masih terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.132.

Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel diatas bahwa perkebunan kelapa merupakan urat nadi perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang diusahakan hampir diseluruh kecamatan dan desa. Meski data statistik menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir memiliki tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas meningkat sebesar 0,12% per tahun, namun capaian produktivitas saat ini masih dibawah potensinya yaitu sebanyak 9000 – 11.000 butir atau 1,5 – 2,0 ton kopra/hektar/tahun. Rendahnya produktivitas kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi petani kelapa antara (i) luasnya tanaman tua dan rusak - TTR, (ii) banyaknya tanggul yang rusak sehingga banyak tanaman kelapa yang terancam rusak, dan (iii) serangan hama.

Luasan tanaman kelapa dalam yang terkategori tua dan rusak meski tren luasnya terus menurun yaitu dari 95.675 hektar pada tahun 2013 atau 24,27% dari total luas kelapa dalam (394.244 hektar) menurun menjadi 93.405 hektar (23,78%) pada tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 59.193 hektar (19,58%) pada tahun 2017. Selama periode 2013 – 2017, luasan dan porsi tanaman kelapa dalam yang terkategori tua dan rusak di Kabupaten Indragiri tergolong besar sehingga perlu dilakukan *replanting* atau peremajaan kembali sehingga produktivitasnya diharapkan kembali meningkat.

Pada masa yang hampir bersamaan, perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam dihadapkan kepada banyak tanggul - tanggul yang sudah rusak sehingga mengancam tidak kurang dari 100.000 hektar tanaman kelapa terinstruksi air laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperbaiki tanggul dan trio tata airnya. Pada tahun 2017, sekitar 60.000 hektar perkebunan kelapa dalam rakyat masih memerlukan perbaikan tanggul dan trio tata air yang rusak dan kurang berfungsi.

Relatif rendahnya produktivitas kelapa juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya serangan hama kelapa khususnya serangan hama kumbang tanduk. Kondisi cuaca yang cenderung lembab dan semakin luas *replanting* kelapa sawit, dimana dalam pembenaman batang kelapa kurang sesuai SOP, maka batang kelapa sawit sisa *replanting* ini menjadikan media yang baik untuk berkembang biaknya kumbang tanduk. Hama kumbang tanduk inilah yang menyerang tanaman kelapa dalam rakyat.

Hal yang terus menjadi perbincangan adalah harga jual kelapa bulat petani yang cenderung rendah. Akibat tekanan harga beli kelapa yang sudah lama rendah, menjadikan kebun - kebun kelapa kurang mendapat perhatian oleh petani. Kondisi harga jual kelapa rakyat yang rendah karena pasar kelapa bulat di Indragiri Hilir yang Monopsoni dan

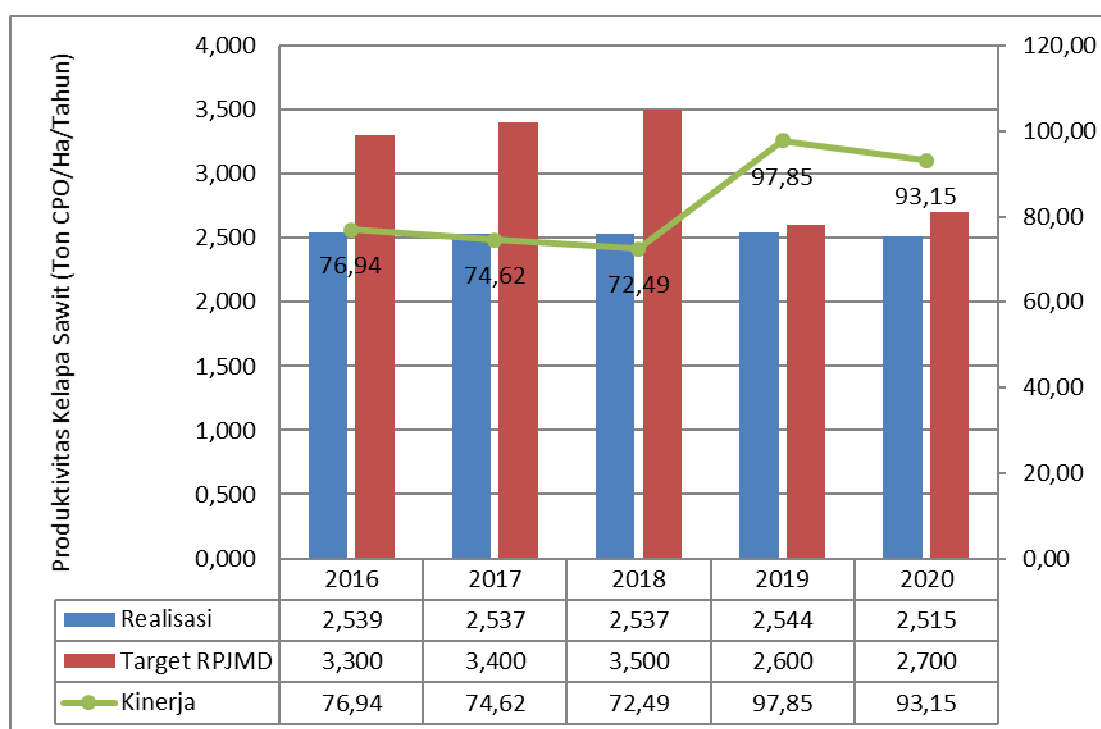
akan mengarah ke Monopoli. Campur tangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar posisi tawar petani menjadi lebih baik perlu dilakukan antara melalui resi gudang. Upaya mendorong industri mikro/kecil berbasis kelapa di pedesaan adalah bentuk lainnya mendorong berkembang dan berjayanya kembali industri kelapa Indragiri Hilir. Oleh karena itu, revitalisasi industri kelapa yang diikuti dengan penerapan penetapan harga jual kelapa yang wajar harus menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ke depannya.

- Kelapa Sawit

Provinsi Riau telah menjadi barometer industri kelapa sawit Indonesia. Pada tahun 2017, luas areal kelapa sawit Provinsi Riau seluas 2.493.176 hektar atau 20,26% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia dengan produksi sebesar 8.721.148 ton atau 24,66% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Luas dan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa areal kelapa sawit Indragiri Hilir seluas 227.806 hektar atau 9,49 % dari total luas areal kelapa sawit Provinsi Riau dengan produksi sebesar 721.084 atau 9,29% dari total produksi minyak sawit Provinsi Riau. Luas areal dan produksi kelapa sawit Indragiri Hilir ini diatas Indragiri Hulu (117.820 hektar dan 424.022 ton), namun masih jauh dibawah luas areal dan produksi minyak sawit Pelalawan (306.977 hektar dan 1.249.219 ton).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa sawit di Indragiri Hilir didorong meningkat yaitu dari 2,60 ton/hektar pada tahun 2019 menjadi 2,70 ton/hektar tahun 2020. Realisasi capaian indikator produktivitas kelapa sawit ini umumnya dibawah target yang telah ditetapkan. Selama periode ini, realisasi kinerja produktivitas kelapa sawit berkisar antara 72,49% - 97,85% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Namun perlu dicatat bahwa capaian produktivitas kelapa sawit Indragiri Hilir khususnya

diperkebunan rakyat tahun 2016 yaitu sebesar 3,34 ton per hektar, masih jauh rendah bila dibanding dengan capaian produktivitas perkebunan besar di Indragiri Hilir sendiri yaitu sebesar 4,24 ton, bahkan di Pelalawan sudah mencapai 4,42 ton per hektar. Oleh karena itu, upaya *replanting* perkebunan kelapa sawit rakyat di Indragiri Hilir perlu direncanakan sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.



Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

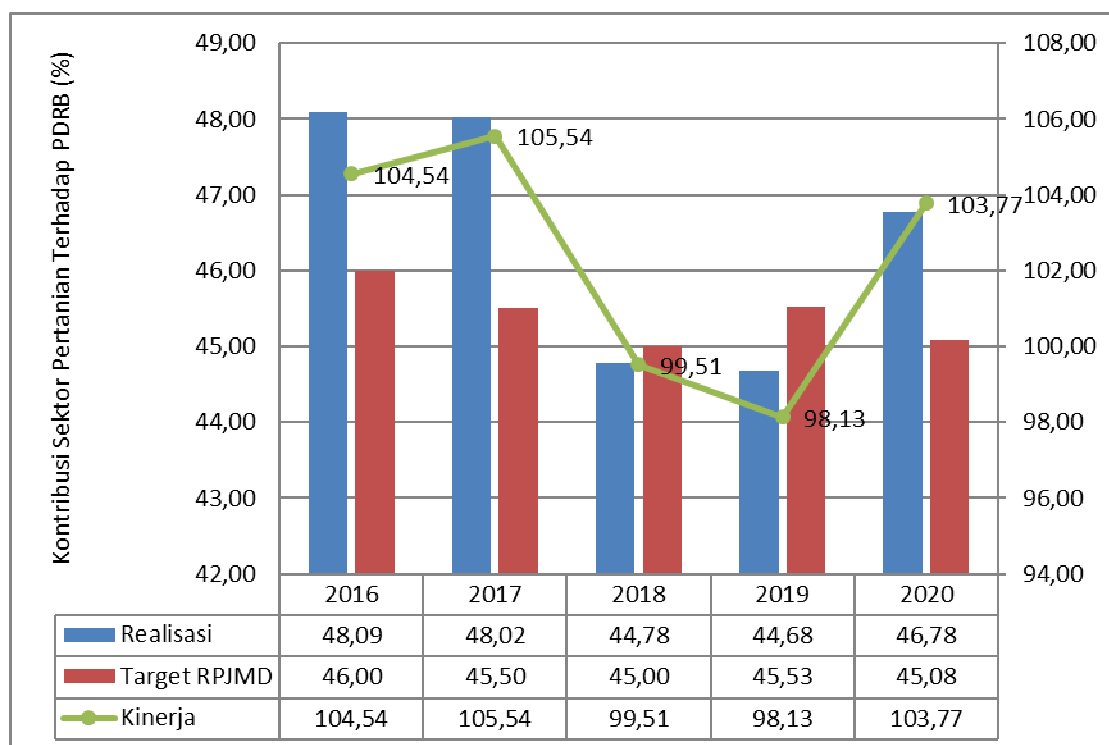
Gambar 2.133.

Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa Sawit
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Indragiri Hilir menurut lapangan usaha dengan tren berfluktuatif menurun. Kontribusi sektor pertanian menurut sub sektor menunjukkan bahwa subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57% diikuti perikanan (24%), kehutanan (11%), tanaman pangan (4%), tanaman hortikultura (1%) dan peternakan (1%) serta jasa pertanian dan perburuan (1%).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB menurun dari 45,53% pada tahun 2019 menjadi 45,08% pada tahun 2020. Realisasi indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir memiliki tren yang relatif sama dengan target yaitu menurun dengan capaian yang masih diatas target. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir ini berkisar antara 98,13% - 105,54% yang terkategori Sangat Tinggi. Masih tingginya kontribusi sektor pertanian khususnya dari sub sektor perkebunan maka sudah seharusnya sub sektor ini mendapat perhatian yang cukup dalam pembangunan dan didorong untuk berkembangnya industri hilir.



Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka, 2021

Gambar 2.134.

Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

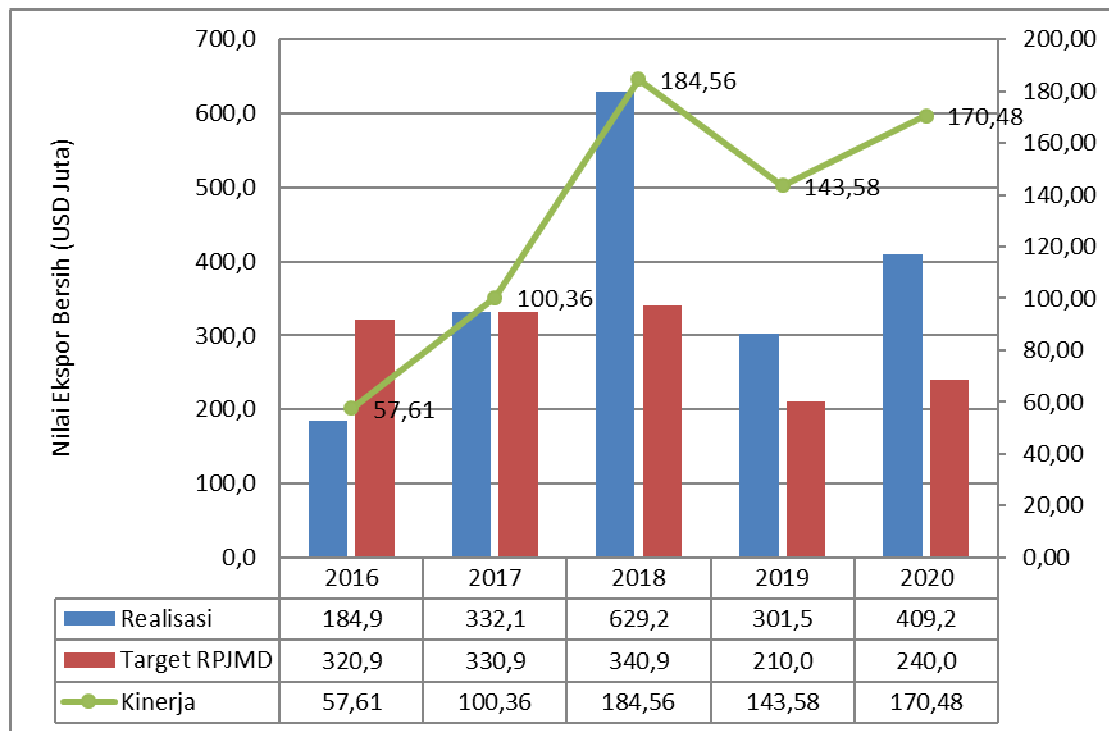
c. Perdagangan

Layanan urusan pilihan bidang perdagangan diwakili oleh indikator (i) Nilai ekspor bersih perdagangan dan (ii) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

- Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan atau disebut juga neraca perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023, telah ditetapkan bahwa indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir adalah terus meningkat atau surplus yaitu dari USD 210.000.000 pada tahun 2019 menjadi USD 240.000.000 tahun 2020.

Selama periode 2016 – 2018, realisasi indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir memiliki tren meningkat. Capaian realisasi pada periode ini senilai USD 184.900.000 – USD 629.200.000 dengan realisasi kinerja berkisar antara 57,61% - 184,56% yang terkategori Rendah – Sangat Tinggi. Namun, realisasi kinerja ekspor bersih untuk tahun 2019 mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 tetapi dengan capaian realisasi kinerja yang meningkat seiring dengan diturunkannya target dalam RPJMD yaitu 143,58% yang terkategori Sangat Tinggi. Semakin menurunnya nilai dari ekspor bersih perdagangan atau neraca perdagangan Indragiri Hilir ini harus segera diantisipasi melalui program - program pembangunan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang memberi nilai tambah pada output pertanian yang berorientasi ekspor.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.135.

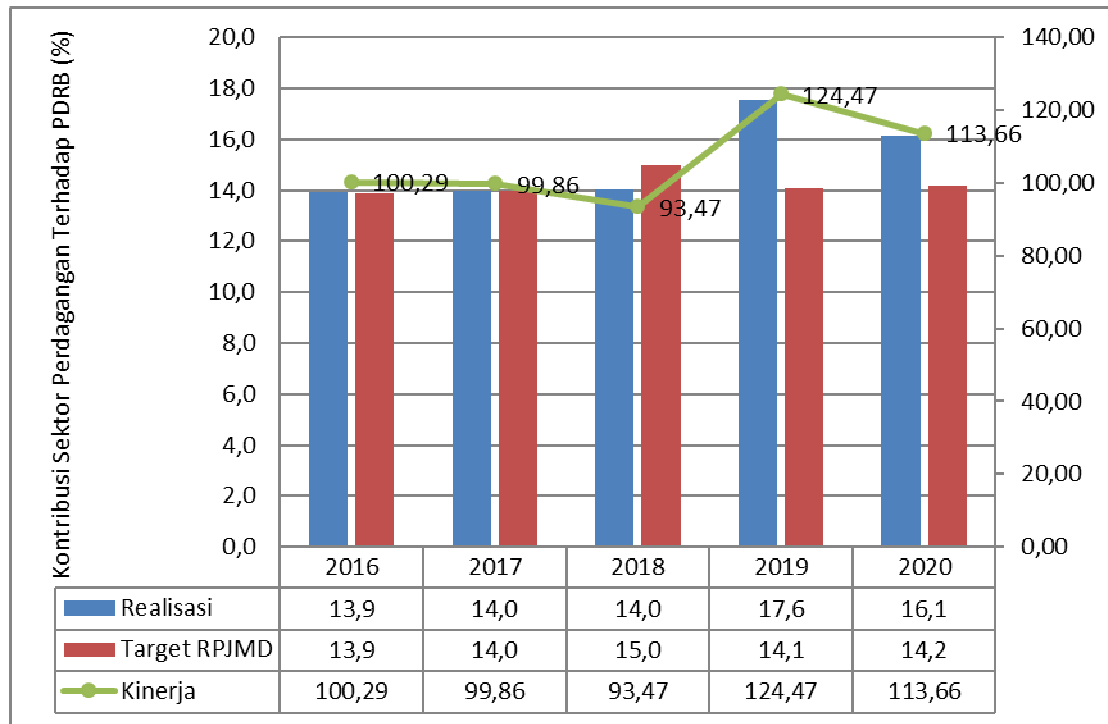
Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000 = 100) menggunakan klasifikasi usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) yang terdiri dari 9 lapangan usaha. PDRB tahun dasar 2010 = 100 menggunakan KBLI 2009 yang terdiri dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran pada KLUI 1990 dipecah menjadi 2 lapangan usaha pada KBLI 2009 yang terdiri dari (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (ii) transportasi dan pergudangan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa indikator kontribusi perdagangan terhadap PDRB terus meningkat dari 14,10% pada tahun 2019 menjadi 14,20% pada tahun 2020. Realisasi indikator ini memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 13,91% pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,60% pada tahun 2019 dan

mengalami sedikit penurunan menjadi 16,10% pada tahun 2020. Realisasi kinerja indikator ini selama periode 2016 – 2020 berkisar antara 93,47% - 124,47% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.136.

Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

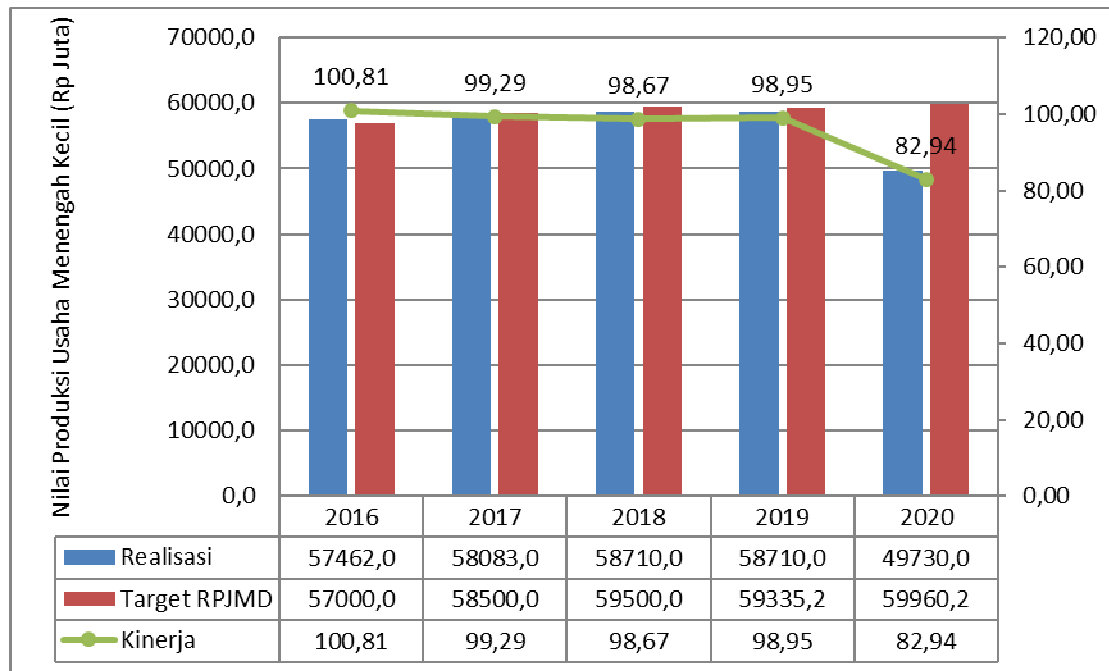
d. Perindustrian

Layanan urusan pilihan bidang industri diwakili oleh indikator (i) Nilai produksi usaha menengah kecil dan (ii) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

- Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa target untuk indikator nilai produksi usaha industri menengah kecil sebesar Rp 59.335.200.000 pada 2019 dan sebesar Rp 59.960.200.000 tahun 2020. Capaian realisasi dari indikator ini pada tahun 2016 – 2020 memiliki tren yang berfluktuatif menurun. Realisasi kinerja

indikator ini berkisar antara 82,94% - 100,81% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Upaya untuk meningkatkan nilai produksi usaha menengah kecil Indragiri Hilir perlu mendapat perhatian karena potensi yang ada saat ini belum terkelola dengan baik. Upaya menggerakkan usaha menengah kecil melalui program Desa Maju Inhil Jaya adalah suatu strategi terbaik dilakukan.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

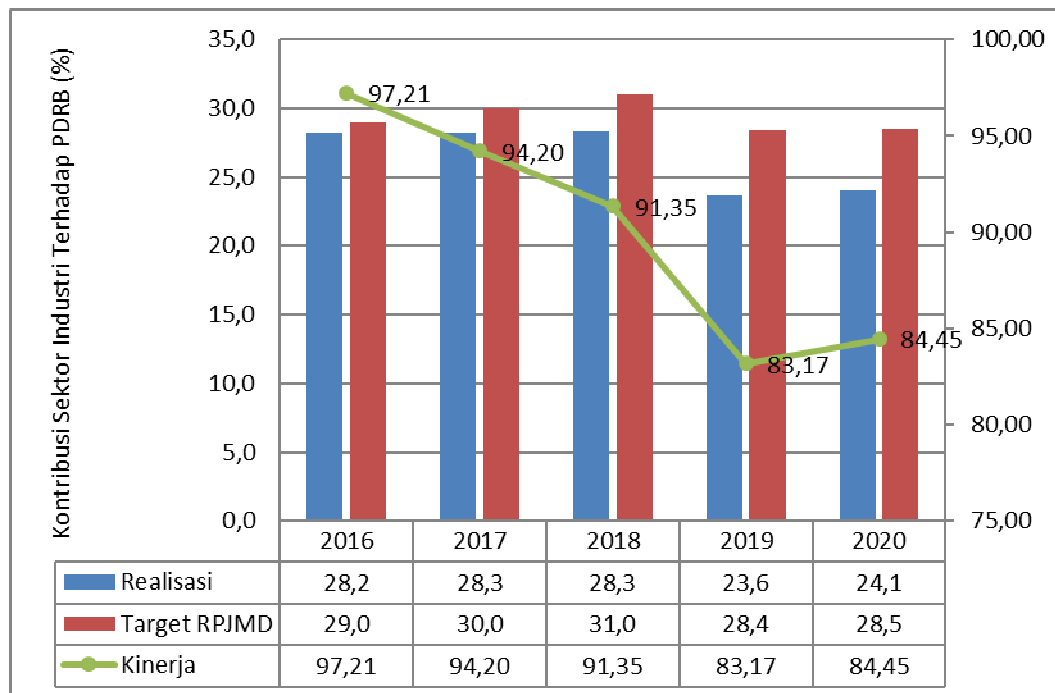
Gambar 2.137.

Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

- Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri yang dalam KLUI 1990 yang dimaksud adalah sektor industri pengolahan yang dalam KBLI dipecah menjadi menjadi 4 yaitu (i) Industri pengolahan, (ii) pengadaan listrik dan gas, (iii) pengadaan air dan (iv) informasi dan komunikasi. Kontribusi Sektor industri ini dalam PDRB Indragiri Hilir menempati posisi kedua setelah sektor pertanian. Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 28,40% pada tahun 2019 menjadi 28,50%

pada tahun 2020. Target ini menandakan bahwa Indragiri Hilir bertransformasi dari pertanian ke industri pertanian.



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.138.

Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Selama periode 2016 - 2020, realisasi indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB memiliki tren berfluktuatif menurun yaitu dari 28,20% pada tahun 2016 meningkat menjadi 24,10% pada tahun 2020. Selaras dengan peningkatan capaian indikator dan target, maka realisasi kinerja cenderung menurun yaitu dari 97,21% pada tahun 2016 menjadi 84,45% pada tahun 2020 yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Meski kontribusi sektor industri Sangat Tinggi, namun pencapaian ini dapat jauh lebih tinggi karena sumberdaya yang tersedia masih banyak diekspor dengan nilai tambah rendah seperti kelapa bulat dan CPO. Upaya mewujudkan kawasan industri yang saat ini masih terbengkalai perlu terus diupayakan.

e. Transmigrasi

Indikator yang biasa digunakan untuk bidang transmigrasi adalah kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Data ini relatif tidak tersedia dalam penyajian PDRB. Pada tahun 2016, tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebuah kegiatan yaitu Transmigrasi Lokal dengan nilai sebesar Rp 46.913.500 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 90,40%.

f. Kelautan dan Perikanan

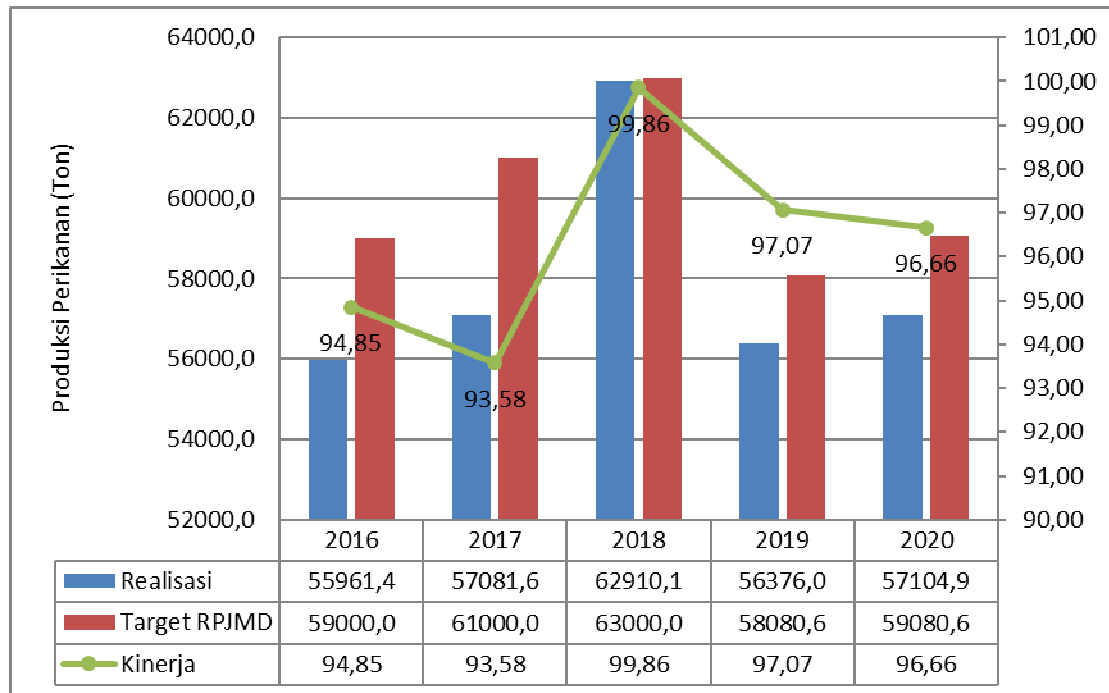
Layanan urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan diwakili oleh indikator (i) Produksi perikanan dan (ii) Konsumsi ikan.

- Produksi Perikanan

Indragiri Hilir merupakan salah satu produsen ikan di Provinsi Riau setelah Rokan Hilir. Produksi ikan Indragiri Hilir jauh diatas Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan. Sumber produksi ikan Indragiri Hilir berasal dari perikanan laut dan perairan umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator produksi ikan Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 59.000 ton pada tahun 2016 menjadi 63.000 ton pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 ditetapkan target untuk produksi ikan sebesar 58.080,60 ton dan 59.080,60 ton.

Selama periode 2016 - 2020, realisasi indikator produksi ikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Selama periode ini, capaian indikator produksi ikan Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD. Capaian kinerja indikator ini berkisar antara 93,58% - 99,86% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini rata-rata sebesar 96,40% dan terkategori Sangat Tinggi, namun untuk terus meningkatkan produksi ikan dari tangkap dilaut dan perairan umum harus tetap dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengembangan perikanan budidaya harus menjadi agenda pembangunan

ke depan sehingga produksi ikan dapat terus meningkat dan kesejahteraan nelayan tetap terjamin.



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.139.

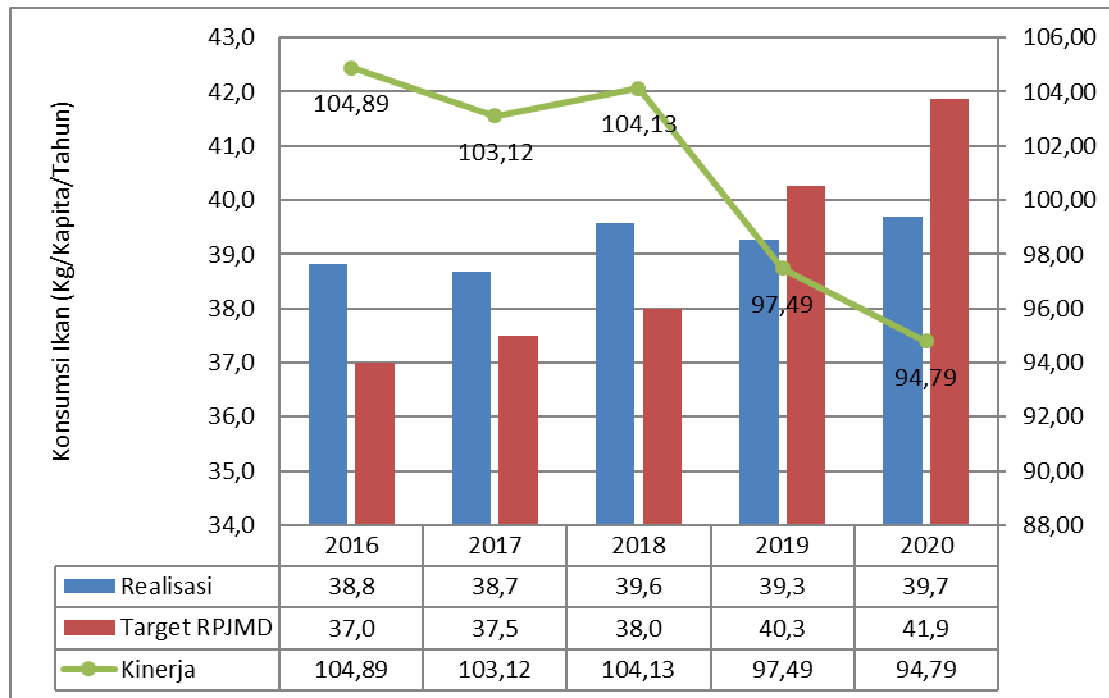
Kinerja Indikator Produksi Perikanan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Konsumsi Ikan

Indragiri Hilir yang merupakan produsen ikan di Provinsi Riau sehingga suplai ikan ke masyarakat selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga murah. Ketersediaan protein per kapita Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 95,52 gram/kapita, dimana ketersediaan ini lebih besar dari ketersediaan protein per kapita di Indragiri Hulu (93,42 gram/kapita) dan Pelalawan (94,31 gram/kapita). Dari ketersediaan protein per kapita sebesar 95,52 gram tersebut, sebanyak 37,15 gram berasal dari ikan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan indikator konsumsi ikan di Indragiri Hilir meningkat dari 40,30 kilogram per kapita per tahun pada 2019, menjadi 41,90 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2020. Pada tahun 2016 - 2018, realisasi indikator konsumsi ikan Indragiri Hilir telah berada di atas target yang

ditetapkan dalam RPJMD, namun pada periode 2019 – 2020 mengalami penurunan seiring dengan target yang meningkat. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator konsumsi ikan berkisar antara 94,79% - 104,89% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ini sudah Sangat Tinggi namun capaian indikator ini harus terus ditingkatkan sehingga konsumsi protein dari ikan dapat terus meningkat.



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.140.

Kinerja Indikator Konsumsi Ikan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

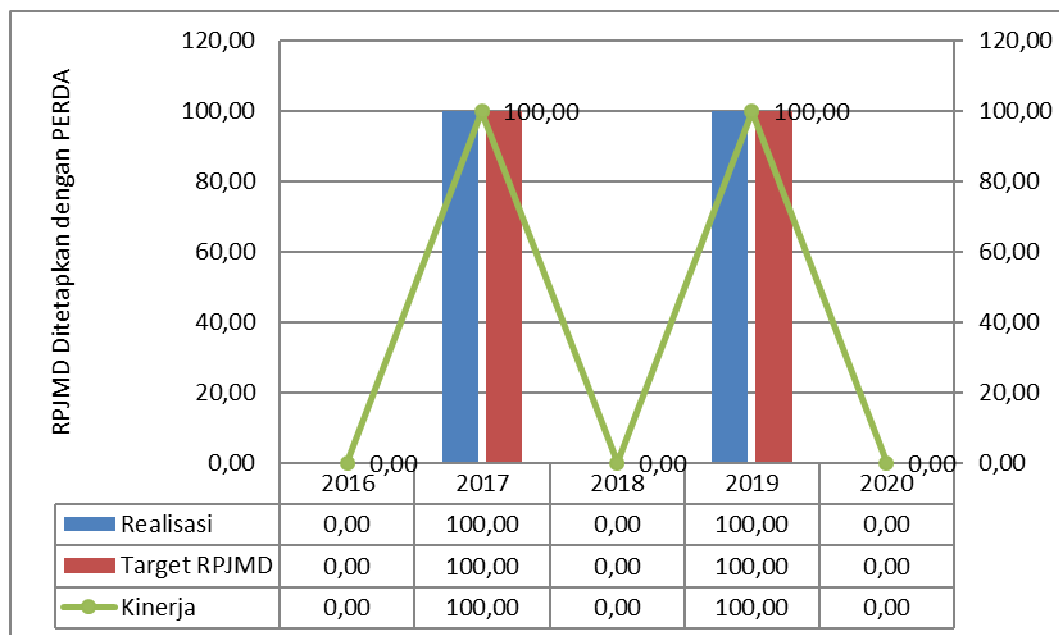
2.1.3.4. Urusan Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Layanan urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan diwakili dari indikator (i) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, (ii) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan (iii) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

- RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/perkada telah ditetapkan dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 sebagai indikator dalam bidang Perencanaan Pembangunan. RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014. Pada tanggal 20 September 2017, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indragiri Hilir mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2.141.

Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Selama periode 2016 – 2020, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki RPJMD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Realisasi kinerja indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian kinerja indikator ini sangat tinggi namun disadari bahwa dalam penyusunan dokumen RPJMD, Bappeda Indragiri Hilir masih sangat tergantung sepenuhnya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional penelitian bidang perencanaan perlu menjadi perhatian dalam periode berikutnya.

- RKPD

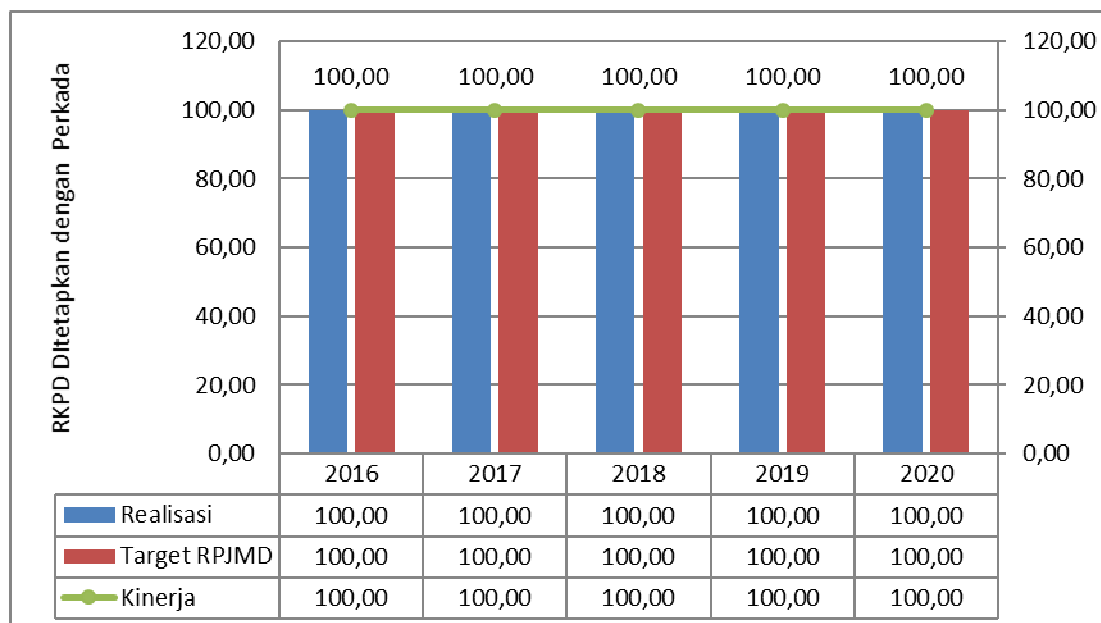
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain (i) merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD, (ii) menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan, (iii) mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, (iv) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD dan (v) menjadi bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa Indikator tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada menjadi salah satu indikator dalam bidang perencanaan pembangunan. Selama periode 2016 – 2020,

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang berkaitan dengan RKPD sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 20 tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016.
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 27 tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017.
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 16 tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 46 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 39 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada Realisasi kinerja indikator menjadikan realisasi kinerja indikator ini sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian indikator ini sangat tinggi dan RKPD Indragiri Hilir mendapat penghargaan di tingkat Provinsi Riau, namun dalam penyusunan RKPD masih banyak tergantung dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, kedepan perlu diperbanyak fungsional perencana yang berkualitas dalam menyusun dokumen - dokumen perencanaan.



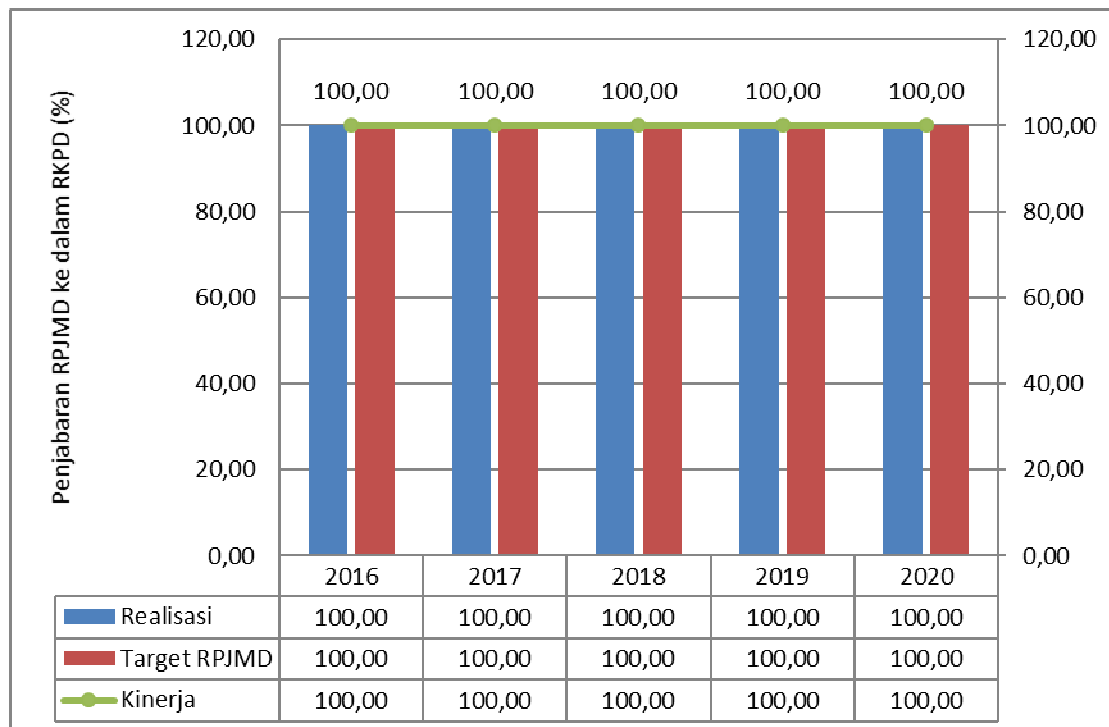
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2021

Gambar 2.142.

Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Dalam pedoman penyusunan RKPD telah digariskan bahwa program dalam RKPD harus mengacu kepada program dalam RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2020 telah ditetapkan bahwa indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dilaksanakan 100%. Hal ini mempunyai makna bahwa program yang dilaksanakan dalam RKPD harus ada dalam RPJMD. Realisasi capaian indikator ini selama periode 2016 – 2020 adalah sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD terlaksana 100% dan terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2021

Gambar 2.143.

Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD
di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

b. Keuangan

Layanan urusan Penunjang Bidang Keuangan diwakili dari Opini BPK. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Jenis Opini BPK adalah (i) Wajar tanpa pengecualian atau WTP (*unqualified opinion*), (ii) Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*advised opinion*) dan Tidak Menyatakan pendapat (*disclamer of opinion*)

Pada tahun 2016 – 2020, opini BPK yang diterima adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah

saji yang material atas pos – pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat mempertahankan hasil pemeriksaan dari BPK ini.

Tabel 2.31.
Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK
Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Target RPJMD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kinerja	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi

Sumber: LKPJ Indragiri Hilir (2017-2021)

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan capaian indikator opini BPK yaitu WDP pada tahun 2016 dan WTP pada tahun 2017 – 2018. Opini BPK juga ditargetkan WTP dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023. Realisasi capaian indikator opini BPK Indragiri Hilir lebih awal dari target RPJMD dimana pencapaian opini BPK dengan prediket WTP dapat dicapai pada tahun 2016 - 2020. Capaian kinerja indikator opini BPK Indragiri Hilir terkategori Sangat Tinggi.

Pencapaian opini BPK Indragiri Hilir dibanding Kabupaten tetangga menunjukkan bahwa pencapaian Opini BPK Indragiri Hilir tahun 2016 sampai dengan 2020 sama dengan yang dicapai Indragiri Hulu yang mendapat opini BPK dengan prediket WTP. Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, capaian opini BPK mereka sudah 7 kali berturut dengan prediket WTP yaitu dari tahun 2014 – 2020.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan urusan Penunjang Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan diwakili oleh indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing - masing komponen sebagaimana ditunjukkan dibawah ini :

Tabel 2.32.

Mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing - masing komponen

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan kerja	30%	a. Rencana strategis (10%) b. Perencanaan kinerja tahunan (20%)
2.	Pengukuran kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan laporan (3%) b. Kualitas laporan (7,5%) c. Pemanfaatan laporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan evaluasi (3%)
5.	Capaian kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Setelah proses pelaksanaan evaluasi selesai secara keseluruhan, MENPAN & RB memberikan peringkat nilai dengan sebutan: AA, A, B, CC, C, dan D, dengan rincian Interpretasi dan Karakteristik instansinya sebagai berikut:

Tabel 2.33.
Rincian Interpretasi dan Karakteristik instansi

No	Skor	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi
1	➤ 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2	➤ 75 - 85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	➤ 65 - 75	B	Baik: akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems.
4	➤ 50 - 65	CC	Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5	➤ 30 - 50	C	Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0 - 30	D	Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Selama periode 2016 - 2019, capaian indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif konstan pada prediket CC. Pada tahun 2016, nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir masih tetap CC (41,07) dan meningkat menjadi CC (50,01). Pada tahun 2020, nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dengan mendapat prediket B, dimana realisasi kinerja telah sama dengan target yang telah ditetapkan dan terkategori Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan prediket nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus terus dilakukan agar mendapat prediket yang lebih tinggi pada masa yang akan datang.

Tabel 2.34.

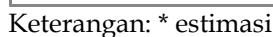
Perkembangan Realisasi, Target dan Capaian kinerja indikator Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	C	CC	CC	CC	B
Target RPJMD	CC	B	B	B	B
Kinerja	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2021

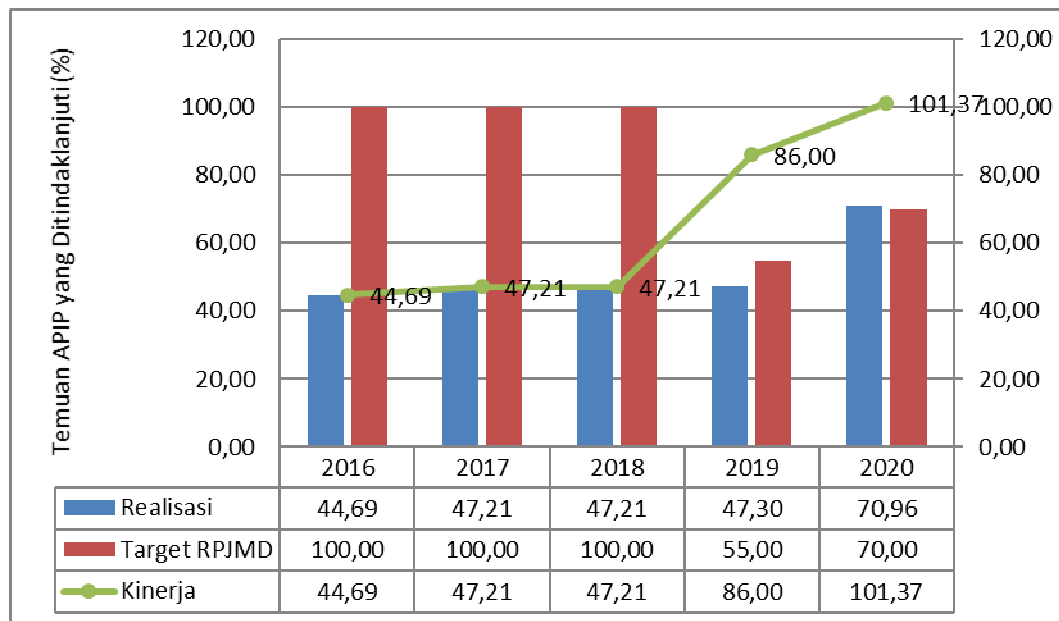
d. Penelitian dan Pengembangan

Layanan urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan diwakili oleh indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Selama periode 2015 – 2019, indikator pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Indragiri Hilir relatif masih dibawah yang ditargetkan yaitu semua hasil kelitbangan dimanfaatkan untuk pembangunan. Realisasi kinerja pemanfaatan hasil kelitbangan berkisar antara 65% - 86,67% yang terkategori Rendah - Sedang. Periode pembangunan kedepan, hasil penelitian harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan sehingga hasil pembangunan akan lebih optimal dan lebih berdaya guna.



Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten di Indragiri
Hilir Tahun 2015 - 2019

Layanan urusan Penunjang Bidang Pengawasan diwakili oleh indikator Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati.



Sumber : (Inspektorat Daerah Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021)

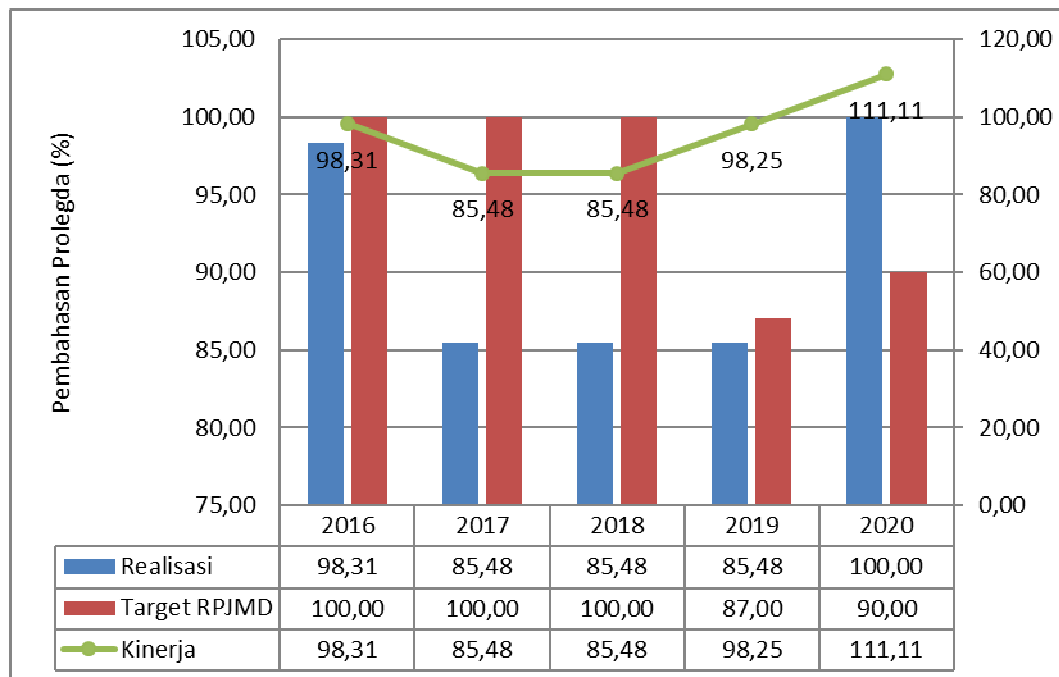
Gambar 2.145.

**Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator
Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020**

Selama periode 2016 – 2020, realisasi persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti memiliki tren berfluktuatif meningkat yaitu dari 44,69% pada tahun 2016 menjadi 70,96% pada tahun 2020. Sebagaimana target umumnya, seharusnya persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti adalah 100%. Realisasi kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti yaitu dari 44,69% pada tahun 2016 yang terkategori Sangat Rendah. Kemudian terus meningkat menjadi 101,37% pada tahun 2020.

f. Sekretariat Dewan

Layanan urusan Penunjang Bidang Sekretariat Dewan diwakili oleh indikator Rasio Pembahasan Prolegda. Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.



Sumber : (Sekretariat DPRD Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021)

Gambar 2.146.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Selama periode 2016 – 2020, perkembangan indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat cenderung stagnan. Pada tahun 2016, realisasi pembahasan prolegda Indragiri Hilir capaiannya 98,31%, menurun menjadi 85,48% pada tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan menjadi 100% pada tahun 2020. Seharusnya, prolegda yang telah diagendakan dapat dibahas pada tahun berkenaan. Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 85,48% - 111,11% dan terkategori Tinggi – Sangat Tinggi. Meski capaian indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terkategori tinggi, namun tren indikator ini yang menurun perlu diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan DPRD. Bila rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terus menurun persentasenya akan menghambat kinerja pemerintah.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah antara lain terdiri dari fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis melalui pengeluaran per kapita dan nilai tukar petani (NTP).

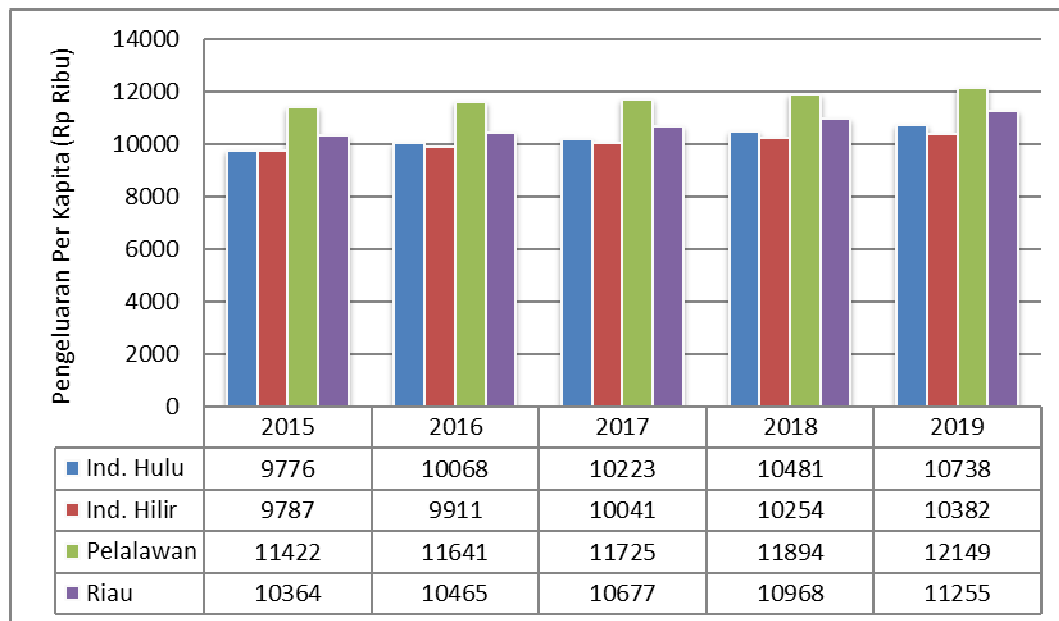
a. Pengeluaran Per Kapita

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata - rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Selama periode 2015 - 2019, pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari Rp 9.787.000 pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 10.382.000 pada tahun 2019. Selama periode ini, rata - rata pertumbuhan pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,19% per tahun.

Capaian pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2015 sedikit diatas Kabupaten Indragiri Hulu dan dibawah Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Namun pada periode 2016 - 2019, posisi pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terendah atau dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi ini didorong oleh relatif tingginya rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 1,89% per tahun, yang

lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Indragiri Hilir (1,19% per tahun) dan Provinsi Riau (1,66% per tahun).

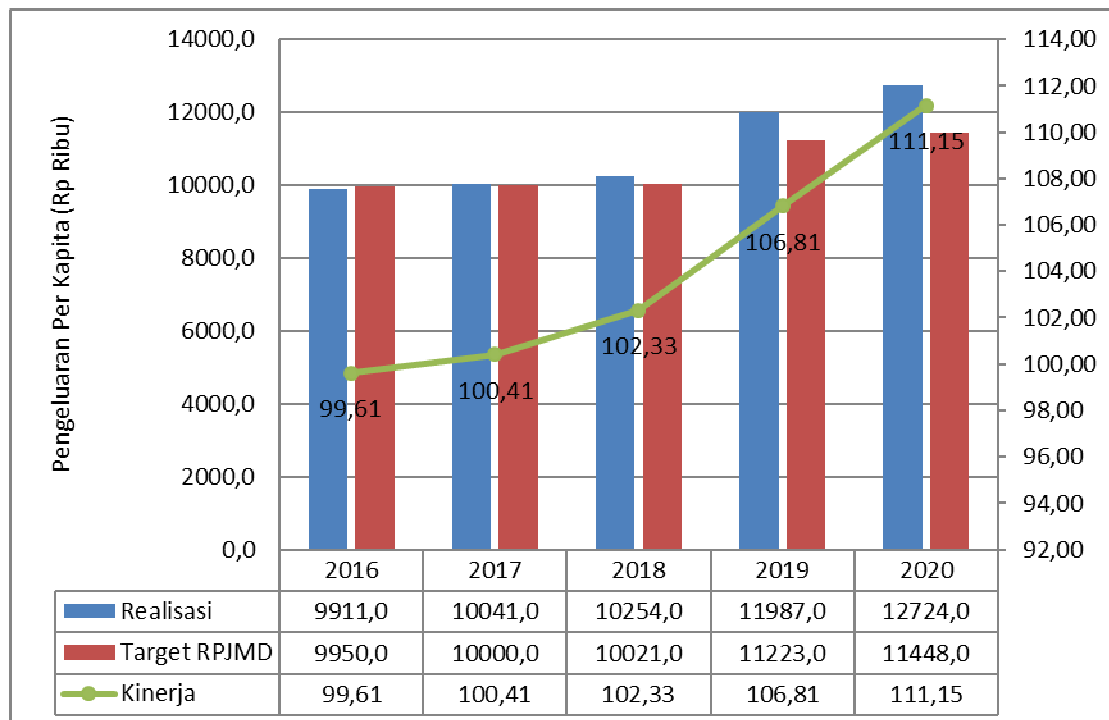


Sumber: <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2017/05/17/34/pengeluaran-perkapita-yang-disesuaikan-2010---2019-metode-baru-.html>

Gambar 2.147..

Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tetangga dan Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan meningkat dari Rp 9.950.000 pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp 11.448.000 pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2020, realisasi indikator pengeluaran per kapita sudah berada diatas target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2016, dengan capaian kinerja sebesar 99,61% - 111,15% yang terkategori Sangat Tinggi.



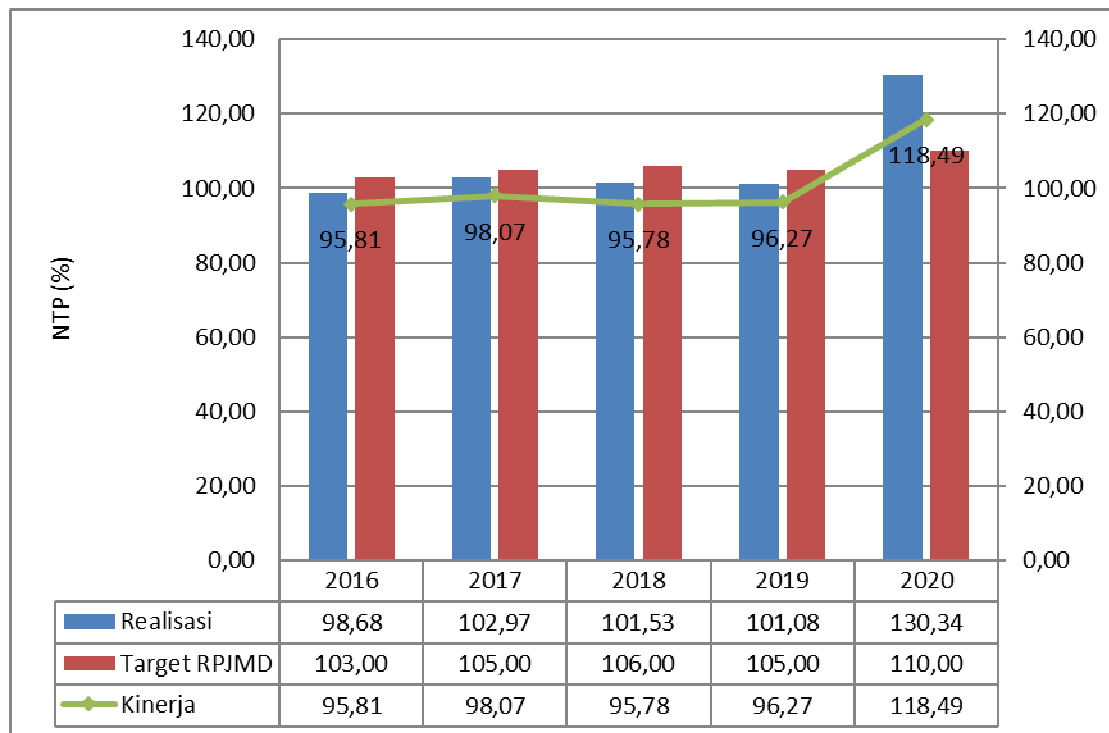
Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.148.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 - 2020

b. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayar oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.



Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Indragiri Hilir, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.149.

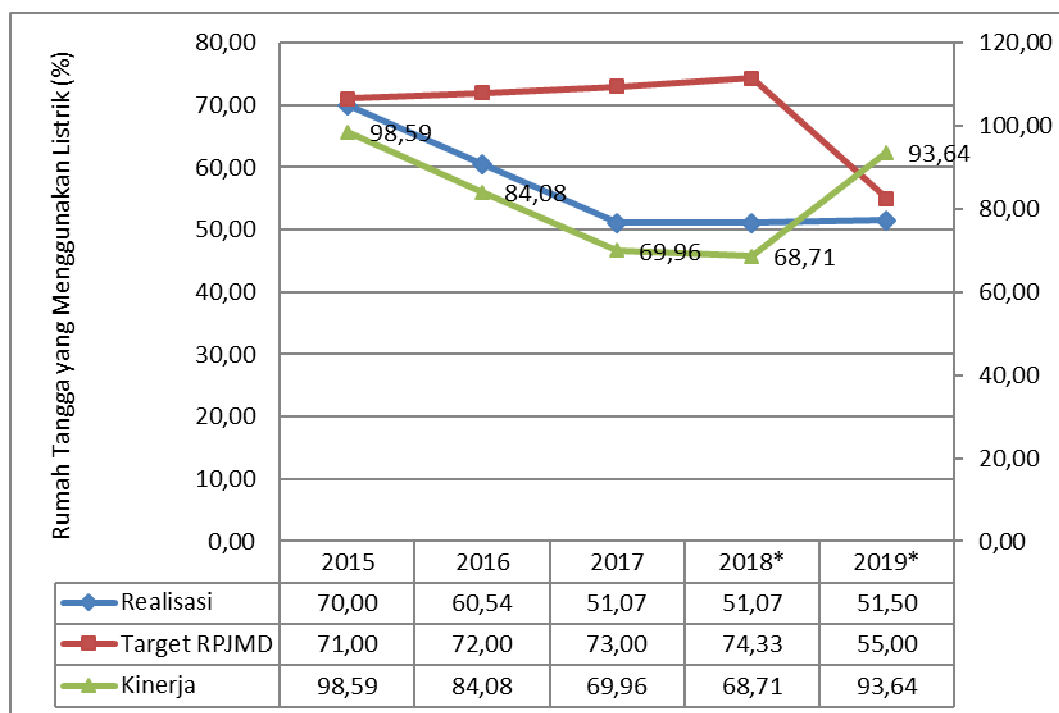
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator NTP terus meningkat yaitu dari 105,00 pada tahun 2019 menjadi 110,00 pada tahun 2020. Selama periode ini, realisasi indikator NTP meningkat secara berfluktuatif namun masih dibawah target, kecuali untuk realisasi pada tahun 2020. Meski realisasi indikator NTP dibawah target namun capaian kinerja berkisar antara 95,78% - 118,49% yang terkategori Sangat Tinggi.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023, telah ditetapkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus meningkat dari 71% pada tahun 2015 menjadi 74,33% pada tahun 2018. Pada periode ini, realisasi menunjukkan angka yang terus menurun yaitu dari 71% tahun 2015 terus menurun menjadi 51,07% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, diperkirakan capaian realisasi indikator ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 51,50%. Capaian realisasi kinerja berkisar antara 68,71% - 98,59% yang terkategori Rendah - Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan fasilitas infrastruktur terutama untuk pengadaan listrik baru harus terus diupayakan pada periode pembangunan kedepannya.



Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2017-2020

Gambar 2.150.

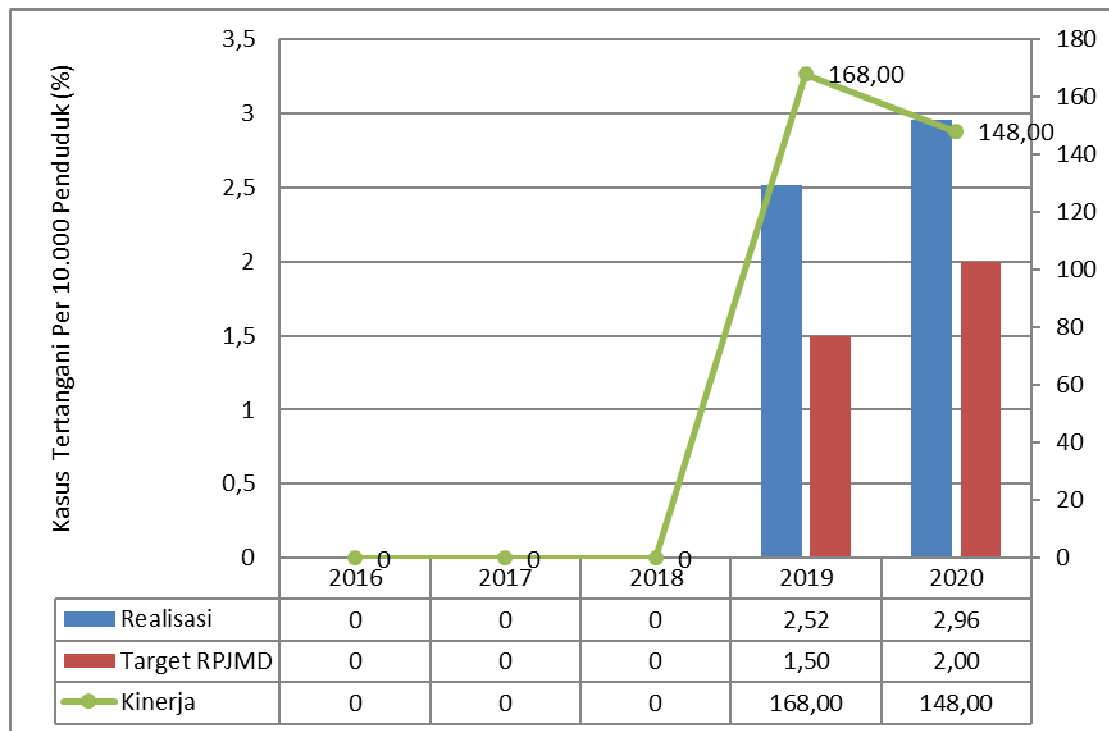
Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 - 2019

2.1.4.3. Iklim Investasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan menggunakan indikator jumlah kasus tertangani per 10.000 penduduk dan jumlah Perda yang mendukung iklim investasi.

a. Jumlah Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan bahwa indikator jumlah kasus tertangani per 10.000 penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan meningkat dari 1,5% pada tahun 2019 menjadi 2% pada tahun 2020. Selama periode ini, realisasi indikator jumlah kasus tertangani per 10.000 penduduk meningkat dari 2,52% menjadi 2,96% di tahun 2020. Namun, realisasi kinerjanya mengalami penurunan seiring dengan peningkatan target RPJMD. Sehingga realisasi kinerja mengalami penurunan dari 168% menjadi 148% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.151.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

b. Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi

Kondisi daerah yang kondusif akan mendorong meningkatnya investasi karena investor ingin modal yang telah ditanamkan dapat kembali lagi. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dan supremasi hukum harus ditegakkan serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Indragiri Hilir maka disusun beberapa peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Peraturan tersebut penting karena menjadi pedoman bagi aparatur maupun masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas usaha sehingga jelas mana yang boleh dan mana yang dilarang. Beberapa peraturan daerah tersebut antara lain sebagaimana Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
1	2 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Indragiri
2	4 Tahun 2013	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
3	7 Tahun 2013	Bangunan Gedung
4	1 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kab. Inhil Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	2 Tahun 2014	Retribusi Pelayanan Pasar
6	3 Tahun 2014	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7	8 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
8	9 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Puri Husada Tembilahan
9	1 Tahun 2015	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah
10	5 Tahun 2015	Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya
11	9 Tahun 2015	Perubahan ke empat atas Perda Kab. Inhil Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
12	10 Tahun 2015	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada PT. Bank Riau Kepri
13	11 Tahun 2015	Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Indragiri
14	6 Tahun 2016	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
15	10 Tahun 2016	Pencabutan Perda Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan
16	11 Tahun 2016	Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat
17	6 Tahun 2017	Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
18	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	9 Tahun 2017	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
20	1 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PT. Bank Riau Kepri
21	2 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PD. BPR Gemilang
22	3 Tahun 2018	Tata Niaga Kelapa

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir (2018)

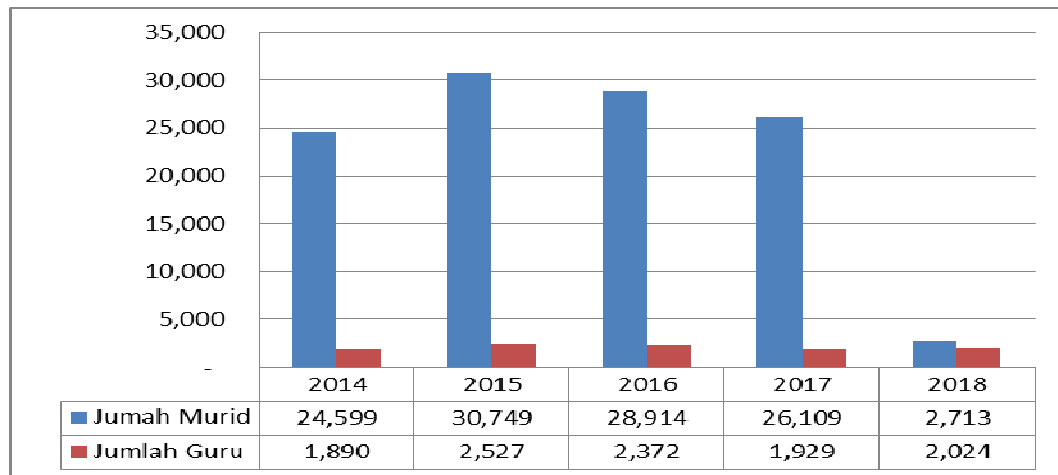
Guna percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir maka telah di-Perda-kan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya melalui Perda Nomor 5 Tahun 2015. Program ini memberikan kewenangan kepada desa sekaligus pendanaannya sehingga Pemerintahan Desa diharapkan dapat mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah desanya.

Program DMIJ bertujuan sebagai penggerak agar pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

Program DMIJ dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pola Pendampingan. Pendamping Program DMIJ direkrut secara profesional terhadap pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat yang sudah berpengalaman dalam mendampingi masyarakat seperti Program PNPM Mandiri, RIS PNPM, PISEW, Program

Pemberdayaan Desa, PAMSIMAS, anggota LSM penggerak dan pelaku Pemberdayaan, dan lain-lain

Program DMIJ tidak hanya membangun sarana infrastruktur, tapi juga memadukan arahan pembinaan yang kemudian diintegrasikan dengan program Posyandu maupun pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).



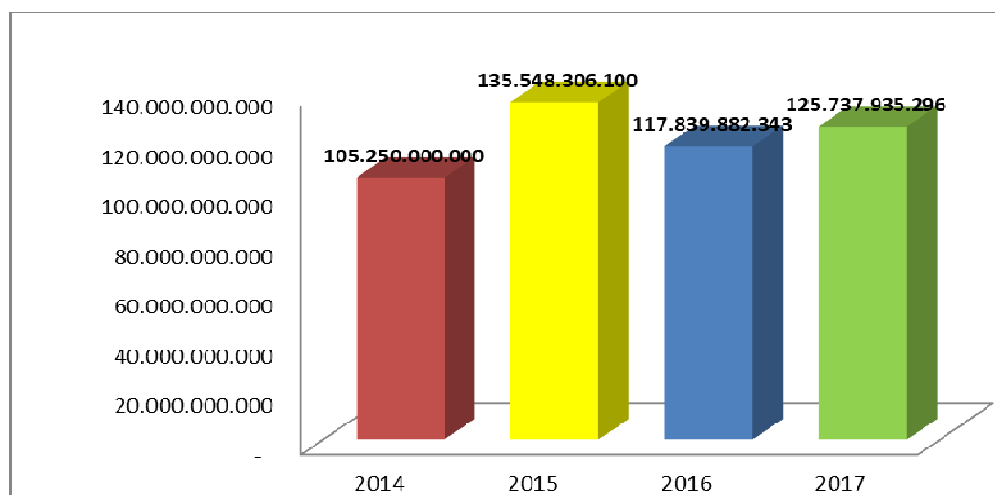
Gambar 2.152.
Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji
melalui Program DMIJ 2014-2018

Tabel 2.36.
Capaian Pelaksanaan Program DMIJ Bidang Infrastruktur
Tahun 2015 - 2018

No.	Jenis Kegiatan	2015			2016			2017			2018		
		Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)
1	Jalan Rabat Beton	-	73,552	-	-	51,184	-	-	10,705	-	-	105,781	-
2	Jalan Sirtu	-	7,171	-	-	12,062	-	-	2,820	-	-	14,435	-
3	Badan Jalan/Tanggul	-	22,337	-	-	33,182	-	-	7,071	-	-	177,646	-
4	Jerambah	-	1,610	-	2	2,521	-	-	586	-	-	6,425	-
5	Jembatan	111	1,667	-	30	466	-	14	-	-	122	-	-
6	Box Culvert / Gorong-gorong	8	-	-	1	5	-	59	-	-	97	-	-
7	Tembok Penahan Tanah/Turap	-	1,102	-	2	1,980	-	9	5	49	9	1,583	-
8	Dermaga	33	-	-	6	16	-	7	3	-	17	328	-
9	Air Bersih	30	-	-	36	120	-	5	-	-	48	-	-
10	MCK	-	-	-	12	6	-	2	-	-	5	-	-

No.	Jenis Kegiatan	2015			2016			2017			2018		
		Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)
11	Drainase	-	294	-	10	-	-	800	159	-	965	1,980	-
12	Pasar Desa	5	-	320	1	10	90	3	-	-	13	39	450
13	Listrik Desa	-	-	-	4	3	6	5	-	-	5	-	-
14	Halaman	-	-	-				-	-	477	-	80	1,149
15	Normalisasi Kanal	-	-	-	75	4,319	1,777	-	1,238	-	-	36,850	-
16	Lain-lain Sarana/Prasarana	34	6,393	1,517	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Gedung Pendidikan	9	-	734	-	-	-	2	216	54	-	-	-
18	Perpustakaan Desa	-	-	-	1	62	814	-	-	-	17	216	1,226
19	Lain-lain Pendidikan	2	-	249	-	-	-	26	-	-	-	-	-
20	Gedung Kesehatan	1	-	35	1	-	-	3	-	-	27	-	100
21	Lain-lain Kesehatan	4	7	40	4	78	728	-	-	-	-	-	-
22	Kantor Desa	22	-	1,000	4	29	150	5	-	564	3	-	386
23	Balai Desa / Gedung Serbaguna	7	-	885	1	96	-	2	-	174	1	-	-
24	Pagar	-	254	-	1	-	-	2	40	-	-	-	-
25	Gapura/Gerbang	6	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	564
26	Pesanggrahan	14	-	169				2	-	63	2	-	174
27	Bak Air	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-
28	Lain-Lain	35	-	668				-	-	-	1	-	-
TOTAL											2	-	63

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2018)



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2018)

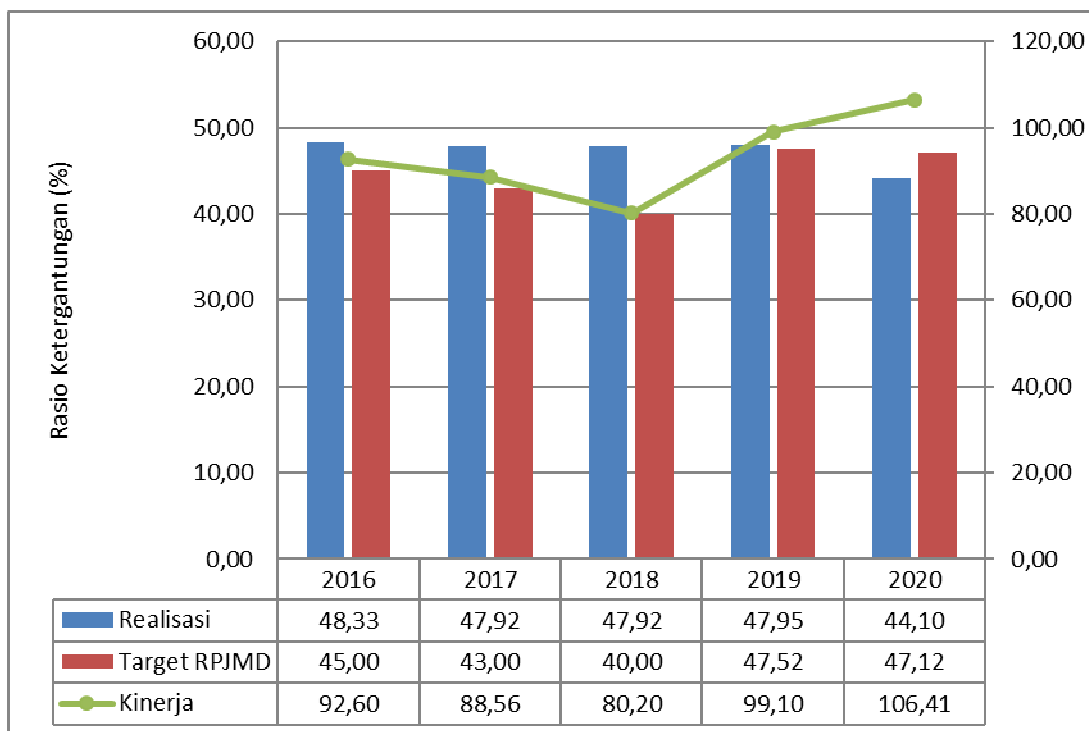
Gambar 2.153.

Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMII 2014-2017

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Analisis kinerja sumberdaya manusia dilakukan menggunakan indikator rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Perhitungan rasio ketergantungan diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja). Angka ketegantungan ini menunjukkan berapa banyak beban penduduk usia non produktif (bukan tenaga kerja) yang harus ditanggung oleh seorang penduduk produktif (tenaga kerja).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan target yang akan dicapai yaitu sebesar 47,52% pada tahun 2019 dan 47,12% pada tahun 2020. Realisasi indikator ini pada periode 2016 – 2020 memiliki tren berfluktuatif menurun. Hal ini berarti jumlah orang yang berusia non produktif yang ditanggung oleh orang berusia produktif semakin mengalami penurunan. Realisasi kinerja indikator pada periode ini berkisar antara 80,20% - 106,41% yang terkategori Sedang – Sangat Tinggi.



Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, diolah Bappeda, 2021

Gambar 2.154.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

Hasil Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan capaian kinerja (target kinerja dan realisasi kinerja) penyelenggaraan urusan pemerintah selama periode 2015 – 2019 dirangkum dalam Tabel 2.37. dan capaian kinerja SPM pada Tabel 2.38. berikut:

Tabel 2.37.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 – 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	42242.00	45157.00	48318.00	45676.05	48188.23	39698.00	41497.00	42989.00	44776.00	44928.00	<
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	6.70	6.90	7.00	5,00	5.50	4.68	4.52	3.61	4.16	0.34	<
1.1.3.	Inflasi (%)	7.00	7.00	7.00	3.80	3.70	2.58	4.27	2.64	2.40	3.30	>
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	58.14	61.05	61.1	60.73	62.02	55.76	57.64	58.78	60.48	68.60	>
1.1.5.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	46.33	45.84	44.08	53,69	53.36	56.82	55.40	51.42	48.29	44.29	>
1.1.6.	Tingkat Kemiskinan (%)	6.50	6.30	6.03	7,50	7,40	7.99	7.70	7.05	6.54	5.93	>
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	65.5	66.5	67.5	66,53	67.53	65.39	66.17	65.51	66.84	66.54	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.00	12.5	13.00	12.05	12.76	11.58	11.88	11.89	11.90	11.91	<
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.00	8.5	9.00	7.25	7.26	6.94	7.18	7.19	7.22	7.23	<
1.2.4.	APK SD/MI (%)	111.00	113.00	115.00	100.97	102.47	110.00	101.73	104.31	105.85	105.93	>
1.2.5.	APK SMP/MTs (%)	101.00	103.00	105.00	101.03	101.28	95.69	100.85	98.33	99.30	102.01	>
1.2.6.	Usia Harapan Hidup (Tahun) Angka Harapan Hidup	69.00	69.5	70.00	67,09	68,00	66.95	61.07	67.32	67.66	67.85	<
1.2.7.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1.1	1.00	1.00	1,00	0.90	1.30	4.30	3.25	0.02	0.03	>
1.2.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.00	4.00	3.00	3.43	3.14	5.62	4.08	3.96	4.55	4.35	<
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	60.00	70.00	80.00	52.00	54.00	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75	<
1.3.2.	Jumlah Lapangan Olahraga (Lapangan)	970.00	990.00	1,000.00	985,00	990.00	961.00	970.00	979.00	985.00	985.00	=
II	Aspek Pelayanan Umum											
2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar											
2.1.1.	Pendidikan											
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	98.00	98.2	98.3	87,00	90.00	96.20	94.62	94.92	95.34	95.52	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	67.00	68.00	69.00	76,00	77.00	80.19	79.96	82.39	81.26	82.06	>
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	99.10	98.20	99.30	98,00	99.00	98.43	97.56	97.26	99.08	99.75	>
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	92.00	93.00	94.00	92,00	93.00	91.87	90.77	91.29	91.70	92.13	<
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.30	0.20	0.10	0,04	0.03	0.20	0.05	0.05	0.05	0.01	<
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0.30	0.20	0.10	0,04	0.05	0.43	0.07	0.07	0.07	1.83	<
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	84.00	85.50	86.00	74,00	76.00	75.79	72.32	72.32	72.32	74.91	<
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (%)	72.00	73.00	74.00	67,00	70.00	73.36	68.55	64.05	65.00	63.89	<
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	650.00	600.00	550.00	710.00	730.00	746.79	721.78	697.61	781.64	833.33	<
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	950.00	900.00	800.00	1007.00	1008.00	991.90	1005.19	1003.46	985.75	714.29	<
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	42.00	48.00	56.00	88,00	92.00	66.19	80.82	84.61	86.53	71.82	<
2.1.2.	Kesehatan											
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0.008	0.009	0.01	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0040	0.0040	<
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0.0392	0.0392	0.043	0.038	0.0390	0.0380	0.0370	0.0370	0.0380	0.0410	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0.05	0.075	0.106	0.04	0.0420	0.0290	0.0370	0.0370	0.0320	0.0320	<
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0.177	0.23	0.3	0.11	0.2000	0.1080	0.1080	0.1080	0.0540	0.0640	<
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0.08	0.09	0.1	0.006	0.0100	0.0035	0.0039	0.0039	0.0260	0.0320	<
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0.8	0.9	1.00	0.8	0.0820	0.4420	0.7890	0.7890	0.4990	0.9570	>
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0.45	0.55	0.65	0.61	0.0620	0.3690	0.5950	0.5950	0.8810	0.5680	<
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	25.00	26.00	27.00	17,00	20.00	14.22	14.22	14.22	14.22	4.52	<
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	68.00	70.00	75.00	66.23	69.73	57.12	59.23	59.23	59.23	57.84	<
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	25.00	26.00	27.00	40,00	45.00	61.96	35.96	35.96	35.96	58.32	>
2.1.3.4.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	25.00	30.00	40.00	30.00	32.00	26.00	27.00	28.00	28.00	30.00	<
2.1.3.5.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	74.00	75.00	76.00	77	78.00	73.22	75.00	76.00	77.00	77.00	>
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman											
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	60.00	80.00	98.33	20.00	22.00	16.03	18.77	18.77	20.05	20.05	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0.6	0.5	0.4	0.45	0.40	0.75	0.50	0.50	0.45	0.45	=
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	26.00	24.00	20.00	20.00	18.00	25.00	25.00	25.00	22.00	22.00	>
2.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	3.00	4.00	5.00	3.00	4.00	0.68	1.22	2.14	2.30	2.50	<
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0.05	0.06	0.07	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	=
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	91.00	94.00	100.00	96.00	97.00	86.00	90.50	95.00	96	96.00	<
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	75.00	90.00	100.00	30.00	50.00	20.00	10.00	10.00	10	10.00	<
2.1.6.	Sosial											
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	70.00	90.00	100.00	92.00	94.00	69.54	90.00	90.00	90	72.70	<
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	60.00	80.00	100.00	85.00	90.00	59.90	80.00	80.00	82.50	100.00	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2.2.1.	Tenaga Kerja											
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.00	64.20	64.50	63,00	64.00	63.06	62.27	62.27	64.66	63.08	<
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	35.00	40.00	45.00	83.00	84.00	56.37	82.74	82.74	99.00	3.89	<
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	100.00	100.00	100.00	78,00	81.00	87.50	75.00	75.00	26.54	0.00	<
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	83.00	84.00	85.00	82.69	82.99	81.79	80.80	82.37	82.57	82.34	=
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	60.00	61.00	62.00	63.10	63.90	n/a	59.43	59.59	64.82	64.45	>
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	86.00	88.00	90.00	92,00	93.00	84.14	88.14	90.98	91.45	96.56	>
2.2.3.	Pangan											
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	95.00	100.00	100.00	100,00	100.00	92.83	100.00	100.00	109.00	103.90	>
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85.00	88.00	90.00	88,60	95.50	84.50	88.00	88.00	88.50	88.90	<
2.2.4.	Pertanahan											
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	44.00	45.00	46.00	43,00	44.00	41.39	41.39	41.39	41.39	41.39	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.5.	Lingkungan Hidup											
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	90.00	95.00	100.00	96,00	97.00	75.00	85.00	95.00	95.00	95.00	<
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	90.00	95.00	100.00	82,00	83.00	81.64	81.50	81.70	70.15	81.49	<
2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	90.00	95.00	100.00	86,00	88.00	151.00	183.00	218.00	212.00	226.00	>
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	100.00	100.00	100.00	65,00	80.00	79.00	85.00	89.00	98.00	99.00	>
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	650.00	800.00	1,000.00	700,00	750.00	437.00	469.00	510.00	542.00	563.00	<
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236.00	236.00	236.00	236,00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	=
2.2.7.2.	Jumlah Desa Maju (Desa)	120.00	180.00	197.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	>
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	100.00	100.00	100.00	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	100.00	100.00	100.00	100,00	100.00	89.82	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69.00	69.22	69.57	72,00	74.00	70.20	88.67	65.86	60.26	64.10	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	95.00	96.00	100.00	75,00	77.00	83.96	92.65	89.25	92.93	77.82	>
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	97.26	98.63	100.00	100.00	100.00	=
2.2.9.	Perhubungan											
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	73.00	74.00	75.00	75,00	77.00	61.50	73.00	73.00	73.20	77.78	=
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	70.00	75.00	80.00	80,00	85.00	53.60	70.00	75.00	72.40	83.31	<
2.2.9.3.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	100.00	100.00	100.00	87,00	90.00	90.00	80.00	85.00	85.50	87.40	<
2.2.10	Komunikasi dan Informatika											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	=
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100	35.00	<
2.2.11.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah											
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	55.00	60.00	70.00	67.00	68.00	49.41	66.05	66.05	66.20	67.00	<
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.00	99.5	99.5	68.00	69.00	82.45	67.00	67.00	67.15	72.00	>
2.2.12.	Penanaman Modal											
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	18.00	19.00	20.00	9.921	11112.00	344.98	1184.40	5116.00	385.23	448.60	<
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	72.00	73.00	74.00	96.00	108.00	20.30	0.40	329.71	1.92	274.38	>
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga											
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	n/a	n/a	n/a	5.00	6.00	4.00	3.00	5.00	0.00	0.00	<
2.2.14	Statistik											
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20.00	20.00	20.00	20,00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	=
2.2.15	Persandian											
2.2.16	Kebudayaan											
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	<
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2.00	2.00	2.00	2,00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	=
2.2.17.	Perpustakaan											
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	9.00	10.00	11.00	5.672,00	6.372,00	4318.00	4972.00	4972.00	5210.00	7866.00	<
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (Buku)	25.00	30.00	40.00	23.012,00	23.162,00	22736.00	22862.00	22862.00	23000,00	54684.00	>
2.2.18.	Kearsipan											
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	45.00	60.00	80.00	40,00	50.00	30.36	30.36	30.36	31,50	50,74	>
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	3.00	3.00	3.00	4	5.00	20.00	20.00	20.00	0.00	25.00	>
2.3.	Layanan Pilihan											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.1.	Pariwisata											
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.00	3.30	3.50	3500.00	4000.00	56035.00	75611.00	90142.00	91137.00	22047.00	>
2.3.2.	Pertanian											
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	3.95	4.00	4.21	4,10	4.15	3.99	3.98	4.02	3.89	3.94	<
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	84.07	85.33	872.09	59115,42	61812.42	56415.00	56415.00	56415.00	57000	49008.10	<
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	0.95	1.00	1.05	1,21	1.23	1.21	1.11	1.17	1.21	1.2	<
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar)	3.3	3.4	3.5	2.60	2.70	2.53	2.53	2.537	2.54	2.51	<
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	46.00	45.5	45.00	45.53	45.08	48.09	48.02	44.78	44.68	46.78	>
2.3.3.	Perdagangan											
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	320.93	330.93	340.93	210.00	240.00	184.88	332.12	629.23	301.51	409.15	>
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	13.9	14.00	15.00	14.10	14.20	13.94	13.98	14.02	17.55	16.14	>
2.3.4.	Perindustrian											
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	57.00	58.50	59.50	59335,22	59960.22	57462.00	58083.00	58710.00	58.710	49730.00	<
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	29.00	30.00	31.00	28,41	28.48	28.19	28.26	28.32	23.63	24.05	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.5.	Transmigrasi											
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan											
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	59.00	61.00	63.00	58.080,60	59.080,60	55961.37	57081.60	62910.05	56375.97	57104.85	<
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	37.00	37.5	38.00	40.27	41.87	38.81	38.67	39.57	39.26	39.69	<
2.4.	Urusan Penunjang											
2.4.1.	Perencanaan Pembangunan											
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	=
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.4.2.	Keuangan											
2.4.2.1.	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.4.3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (SK)	n/a	n/a	n/a	6.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan											
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	85.00	90.00	100.00	75,00	85.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	<
2.4.5.	Pengawasan											
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	100.00	100.00	100.00	55,00	70.00	44.69	47.21	47.21	47.30	70.96	=
2.4.6.	Sekretariat Dewan											
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	100.00	100.00	100.00	87,00	90.00	98.31	85.48	85.48	85.48	100.00	>
III.	Aspek Daya Saing											
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	9950.00	10000.00	10021.00	11223,66	11448.14	9911.00	10041.00	10254.00	11987.00	12724.00	>
3.1.2.	Nilai Tukar Petani (%)	103.00	105.00	106.00	105,00	110.00	98.68	102.97	101.53	101.08	130.34	>
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	72.00	73.00	74.33	55,00	60.00	60.54	51.07	51.07	51.50	51.50	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target					Realisasi					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
	(%)											
3.3.	Fokus Iklim Investasi											
3.3.1.	Jumlah Tindak Pidana (Kasus)	320.00	300.00	280.00	1.50	2.00	n/a	n/a	n/a	2.52	2.96	>
3.4.	Fokus Sumberdaya Manusia											
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	45.00	43.00	40.00	47,52	47.12	48.33	47.92	47.92	47.95	44.10	<

Tabel 2.38.

Rekap Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar, Kesehatan, PU-PR, Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
I	Pendidikan												
	A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota												
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah	SD	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	<
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
		SMP	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
	terpencil	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100	100	100	100	100	19,73	30.12	96.71	89.73	89.73	<
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	19,73	34.36	68.99	89.73	89.73	<
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	30,56	95.56	96.32	96.69	96.69	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-			
		SMP	100	100	100	100	100	30,56	80	91.18	96.69	96.69	=
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan	SMP	100	100	100	100	100	-	14.81	41.18	55.88	55.88	<
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	14.07	35.29	55.88	55.88	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
	eksperimen peserta didik;	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	100	100	100	100	100	31,91	37.64	69.77	81.58	81.58	<
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	25.93	75.74	79.78	79.78	<
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	23.7	68.38	-	-	<
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	100	100	100	100	100	36,94	36.94	83.91	98.06	98.06	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	88,39	95.56	96.71	98.06	98.06	=

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	100	100	100	100	100	-	20.74	57.35	73.53	73.53	<
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100	100	100	100	100	40,46	48.84	91.09	97.29	97.29	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	40,46	47.88	63.18	97.29	97.29	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100 -	100	100	100	100	- -	57.78	69.12	76.84	76.84	<
		MTs	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	-	100	100	100	100	-	65.93	74.26	76.84	76.84	<
		MTs	100	-	-	-	-	-	-	-			
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi	SMP	-	100	100	100	100	-	57.78	25.74	36.03	36.03	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
	akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	MTs	100	-	-	-	-	50,87	-	-	-	-	
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	-	100	100	100	100	-	54.83	62.21	74.03	74.03	<
		MI	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SMP	-	100	100	100	100	-	57.78	97.06	99.26	99.26	=
		MTs	100	-	-	-	-	94,44	-	-	-	-	
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	-	100	100	100	100	-	91.23	100	100	100	=
		MI	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	=
		MI	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
		SMP	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	=
		MTs	100	-	-	-	-	30,75	-	-	-	-	
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	-	100	100	100	100	-	32.43	100	100	100	=
		MI	100	-	-	-	-	30,75	-	-	-	-	
		SMP	-	100	100	100	100	-	33.33	100	100	100	=
		MTs	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
	B. Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan		100					51,71					
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	-	100	100	100	100	-	51.71	59.51	31.49	31.49	<
		MI	100	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	
		SD	-	100	100	100	100	-	33.33	0.47	31.49	31.49	<
		MI	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SMP	-	100	100	100	100	-	7.96	8.39	17.09	17.09	<
		MTs	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	-	100	100	100	100	-	14.07	18.38	17.09	17.09	<
		MTs	100	-	-	-	-	16,05	-	-	-	-	
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	-	100	100	100	100	-	19.31	29.07	33.91	33.91	<
		MI	100	-	-	-	-	9,86	-	-	-	-	
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	-	100	100	100	100	-	13.13	17.64	19.36	19.36	<
		MI	100	-	-	-	-	60,74	-	-	-	-	
		SMP	-	100	100	100	100	-	21.48	72.06	90.44	90.44	<
		MTs	100	-	-	-	-	26,69		-	-	-	

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	-	100	100	100	100	-	30.5	71.51	73.26	73.26	<
		MI	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	-	100	100	100	100		21.48	72.06	88.24	88.24	<
		MTs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :		100	100	100	100	100	24,76	30.17	83.56			
	Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	100	100	100	100	100	24,76	32.43	81.59	87.4	87.4	<
	Kelas III : 24 jam per minggu	MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	100	100	100	100	100	24,76	21.48	91.11	94.81	94.81	=
	Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100	100	100	100	100	24,76	32.43	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	21.48	100	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100	100	100	100	100	62,48	74.32	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	72.59	99.26	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	100	100	100	100	100	50,48	100	99.42	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SMP	100	100	100	100	100	50,48	100	92.65	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100	100	99.26	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
	menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	IP 27.1	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IP 27.2	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IP 27.3	SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Kesehatan												
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	100	100	100	100	100	-	73.96	71	77	77	<
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	-	100	100	100	100	100	-	100	68	76	76	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	100	100	100	100	100	-	71.14	79	72	72	<
4	Pelayanan kesehatan balita	-	100	100	100	100	100	-	73.46	48	55	55	<
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	100	100	100	100	100	-	28.53	93	81	81	<
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	100	100	100	100	100	-	61.47	100	100	100	=
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	100	100	100	100	100	-	29.06	100	100	100	=
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	-	100	100	100	100	100	-	45.78	100	35	35	<
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	-	100	100	100	100	100	-	100	100	12	12	<
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	-	100	100	100	100	100	-	33.21	100	100	100	=
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	-	100	100	100	100	100	-	46.65	100	100	100	=
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	-	100	100	100	100	100	-	-	45	38	38	<
III	PU-PR	-											
1	Persentase Tersedi any air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	100	100	100	100	100	-	59.28	59.28	-	-	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	-	70	70	70	70	70	-	-	-	93.48	93	>
3	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	-	60	60	60	60	60	33,06	65.08	65.08	58.86	59	=
4	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten/ kota	-	100	100	100	100	100	-	24.14	24.14	-	-	<
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-	<
6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	<
7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	20	20	20	20	20	67,05	-	-	-	-	<
8	Persentase pengangkutan sampah	-	70	70	70	70	70	67,05	-	-	-	-	<
9	Persentase pengoperasian TPA	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	<
10a	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	50	50	50	50	50	33,25	1.96	1.96	-	-	<
10b	Pengurangan luas genangan	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	<
11	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	-	60	60	60	60	60	38,35	166.67	166.67	100	100	>
12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	<
14	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	100	100	100	100	100	42,60	40.01	40.01	37.26	37.26	<
15	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	-	100	100	100	100	100	-	-	-	77.39	77.39	<
16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	50	50	50	50	50	42,34	-	-	-	-	<
IV	Perumahan Rakyat	-											
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		100	100	100	100	100	n/a	n/a	25.17	21	21	<
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		70	70	70	70	70	n/a	n/a	6.78	4.36	4.36	<
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		100	100	100	100	100	n/a	n/a	0.1	0.1	0.1	<
V	Pemerintahan Dalam negeri												
	A. Pelayanan Dokumen Kependudukan												
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga		100	100	100	100	100	83,12	83.12	32.05	83.95	83.95	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk		100	100	100	100	100	76,85	76.85	8.48	217	217	>
3	Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran		90	90	90	90	90	100	100	2.67	45.35	45.35	<
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian		70	70	70	70	70	100	100	n/a	100	100	
	B. Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat												
5	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	86	86	100	100	100	=
6	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		3,00	3	3	3	3	0,4	0.4	0.4	0.2	0.2	<
7	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota		1,0	1	1	1	1	1	1	0.6	0.6	0.6	<
	C. Penanggulangan Bencana Kebakaran												
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota		80	80	80	80	80	150	150	150	150	150	>
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)		75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	>
10	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		85	85	85	85	85	56,25	51.95	50	50	50	<
11	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)		90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	>
VI	Sosial	-											
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	-	98,60	98.6	98.6	80	80	63	80	100	97	97	>

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	-	7,30	7.3	7.3	20	40	1,1	100	100	98	98	>
3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	100,00	100	100	80	80	100	100	100	96	96	>
4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	100,00	100	100	60	60	100	100	100	100	100	>
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100,00	100	100	80	80	100	100	-	100	100	=
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	100,00	100	100	80	80	100	100	86	98	98	=
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	52,10	52.1	52.1	40	40	34	100	-	97	97	=

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Telaahan hasil evaluasi mencakup (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan. (v) implimentasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dan (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

RKPD tahun 2020 merupakan RKPD tahun Kedua RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019 - 2023. Total nilai APBD tahun 2020 sebesar Rp 1.2 triliyun. Rata-rata capaian kinerja seluruh program dan kegiatan pada Triwulan IV 2020 77.85% dan terkategori Tinggi. Rata - rata realisasi anggaran sebesar 76.77% dan terkategori Tinggi. Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2020 masing-masingnya sebesar 3,90% dan 3,38%, dimana keduanya terkategori Sangat rendah.

Realisasi program dan kegiatan Melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan terdiri daeri 375 program (72,12%) dan 2.087 kegiatan (74,54%). Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan sebanyak 63 program (12,12%) dan 370 kegiatan (13,21%). Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan sebanyak 82 program (15,77%) dan 343 kegiatan (12,25%).

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV 2020 adalah (1) Adanya Kegiatan

yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi COVID-19 termasuk Rasionalisasi Anggaran (2) Kesalahan dalam penentuan target kinerja (3) Khusus untuk kecamatan penyebab tidak tercapainya target adalah masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola). Kinerja program dan kegiatan yang terpenuhi atau melebihi target kinerja pada umumnya program-program seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Implementasi dari rata-rata realisasi seluruh program dan kegiatan dan realisasi anggaran yang terkategori sedang maka tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD s/d tahun 2020 terkategori Tinggi yakni Capaian Kinerja 77,85% dan Realisasi anggaran 76.77%. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi sehingga akan mudah untuk mengukur dan menargetkan kinerja selanjutnya.

Secara ringkas, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2020
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9 = 8/7 x 100%)		(10 = 6 + 8)		(11=10/5 x100%)		(12)	(13)
1.	0.00.00.1.01.01.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	14.052,25	85	1.167,28	100	6.711,49	67	1.559,05	66,90	23,23	75,95	2.726,33	75,95	19,40	DINAS PENDIDIKAN	
	0.00.00.1.01.01.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	6405	51,24	1281	9,60	1200	9,60	1200	9,60	100,00	100,00	2481	19,20	38,74	37,47		
	0.00.00.1.01.01.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	240	768,00	48	106,00	12	192,00	12	124,27	100,00	64,73	60	230,27	25,00	29,98		
	0.00.00.1.01.01.01.01.007.	1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	1020	1.527,80	204	120,00	17	285,40	17	276,56	100,00	96,90	221	396,56	21,67	25,96		
	0.00.00.1.01.01.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	50	288,46	10	56,49	10	62,51	9	62,51	94,47	100,00	19	119,00	38,89	41,25		
	0.00.00.1.01.01.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	30	159,10	6	30,60	5	32,50	5	32,50	100,00	100,00	11	63,10	36,67	39,66		
	0.00.00.1.01.01.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	51	407,37	9	65,41	33	141,14	33	140,37	99,46	99,46	42	205,78	82,00	50,52		
	0.00.00.1.01.01.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	17	400,10	3	74,67	14	74,67	14	73,94	99,02	99,02	17	148,62	99,19	37,15		
	0.00.00.1.01.01.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	25	173,87	5	34,50	10	21,51	10	21,51	100,98	100,00	15	56,01	60,39	32,21		
	0.00.00.1.01.01.01.01.013.	1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	5.212,38	0	7,73	0	4.995,53	0	-	0,00	0,00	0	7,73	0,00	0,15		
	0.00.00.1.01.01.01.01.015.	1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	120	182,89	24	36,10	25	37,30	24	37,30	97,33	100,00	48	73,39	40,28	40,13		
	0.00.00.1.01.01.01.01.016.	1.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	27666	215,70	5504	39,79	5128	40,00	3205	24,99	62,50	62,49	8709	64,78	31,48	30,03		
	0.00.00.1.01.01.01.01.017.	1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	432	308,82	77	60,72	85	60,72	85	60,72	100,03	100,00	162	121,44	37,60	39,32		
	0.00.00.1.01.01.01.01.018.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	363	1.877,08	65	336,31	53	284,22	42	222,55	78,32	78,30	106	558,86	29,29	29,77		
	0.00.00.1.01.01.01.01.019.	1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	120	1.440,00	-	-	30	360,00	30	360,00	100,00	100,00	30	360,00	25,00	25,00		
	0.00.00.1.01.01.01.01.020.	1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	666	919,45	133	165,38	119	90,40	116	88,22	97,73	97,59	249	253,59	37,43	27,58		
	0.00.00.1.01.01.01.01.027.	1.16 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	600	120,00	120	24,00	2	24,00	2	24,00	100,00	100,00	122	48,00	20,33	40,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				89,36		87,41		89,36		87,41						39,00			
Predikat kinerja				T		T		T		T						SR			
	0.00.00.1.01.01.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	100	21.799,30	20	71,17	100	8.980,97	11	7.576,98	11,00	84,37	16	7.648,15	15,50	35,08		
	0.00.00.1.01.01.01.02.024.	2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	15	359,20	2	71,17	3	70,57	3	58,57	97,54	83,00	5	129,74	32,84	36,12		
	0.00.00.1.01.01.01.02.042.	2.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	861,55	0	-	1	216,55	1	215,75	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.01.01.02.052.	2.3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	87	20.578,55	0	-	140	8.693,85	118	7.302,66	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				32,51		27,67		32,51		27,67						10,95			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR									
	0.00.00.1.01.01.01.05.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	604,25	100	117,25	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.01.01.05.019.	3.1 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	5	604,25	1	117,25	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	0.00.00.1.01.01.01.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	1.341,99	34	242,14	100	200,30	67	204,09	67,27	101,89	50	446,23	50,49	33,25		
	0.00.00.1.01.01.01.06.001.	4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	25	605,03	5	118,21	5	53,30	5	57,14	92,21	107,19	10	175,35	38,44	28,98		
	0.00.00.1.01.01.01.06.005.	4.2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip SKPD	Jumlah Sekolah yang akan dilakukan inventarisasi	55	736,96	8	123,93	11	146,99	12	146,95	108,90	99,97	20	270,88	36,85	36,76		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,55	103,58	100,55	103,58			36,85	36,76		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST						
	0.00.00.1.01.01.01.07.	5. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	100	1.446,21	0	-	100	282,94	104	261,05	103,71	92,26	52	261,05	51,85	18,05		
	0.00.00.1.01.01.01.07.001.	5.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Jenis Dokumen Program Kerja yang disusun	20	1.446,21	0	-	5	282,94	5	261,05	103,71	92,26	5	261,05	25,93	18,05		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								103,71	92,26	103,71	92,26			25,93	18,05		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST						
	1.01.01.1.01.01.01.	URUSAN PENDIDIKAN								0	-								
	1.01.01.1.01.01.01.15.	6. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	34.241,59	27	2.353,48	100	6.932,76	27	3.575,28	26,99	51,57	54	5.928,75	21,43	17,31		
	1.01.01.1.01.01.01.15.001.	6.1 Pembangunan Gedung Sekolah PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun	27	4.307,97	2	358,44	10	685,98	3	678,93	30,00	98,97	5	1.037,36	18,52	24,08		
	1.01.01.1.01.01.01.15.003.	6.2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah PAUD	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun	19	3.300,89	4	21,80	3	595,57	0	583,28	0,00	97,94	4	605,08	21,05	18,33		
	1.01.01.1.01.01.01.15.009.	6.3 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir PAUD	Jumlah Paket Pekerjaan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir PAUD	21	2.244,49	5	378,58	2	268,57	0	149,80	0,00	55,78	5	528,39	23,81	23,54		
	1.01.01.1.01.01.01.15.018.	6.4 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD	20	235,89	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.019.	6.5 Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah paket pengadaan Mebeleur Sekolah PAUD	16	600,00	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.039.	6.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah PAUD	Jumlah TK Negeri Penerima Operasional Perlengkapan Sekolah	1	1,48	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.042.	6.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang di rehab	26	3.533,54	3	41,88	3	917,49	2	913,24	66,67	99,54	5	955,12	19,23	27,03		
	1.01.01.1.01.01.01.15.058.	6.8 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Hari Anak Nasional	800	757,09	150	148,07	150	47,06	0	26,73	0,00	56,81	150	174,80	18,75	23,09		
	1.01.01.1.01.01.01.15.059.	6.9 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Sosialisasi BinteK Manajemen Pengelola Paud	410	1.080,84	80	224,45	40	109,09	40	107,73	100,00	98,75	120	332,18	29,27	30,73		
	1.01.01.1.01.01.01.15.060.	6.10 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Sosialisasi Dapodik PAUD di Kab. Inhil	222	899,81	40	132,62	80	232,75	80	208,44	100,00	89,56	120	341,06	54,05	37,90		
	1.01.01.1.01.01.01.15.062.	6.11 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Paud	410	1.164,26	80	219,77	80	213,88	80	188,54	100,00	88,15	160	408,31	39,02	35,07		
	1.01.01.1.01.01.01.15.063.	6.12 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Gebyar PAUD dan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	539	1.328,14	105	211,30	100	174,72	80	168,93	80,00	96,69	185	380,23	34,32	28,63		
	1.01.01.1.01.01.01.15.065.	6.13 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Akreditasi Lembaga PAUD	204	688,21	40	125,47	40	103,29	40	100,81	100,00	97,60	80	226,28	39,22	32,88		
	1.01.01.1.01.01.01.15.067.	6.14 Penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kelembagaan PAUD	Jumlah Peserta Apresiasi Bunda PAUD dan Forum PAUDI	1033	921,37	201	163,26	201	146,70	151	125,78	75,12	85,74	352	289,04	34,08	31,37		
	1.01.01.1.01.01.01.15.068.	6.15 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Dana Alokasi Khusus)	Jumlah TK Negeri Penerima BOP PAUD	18	9.179,00	0	-	18	835,80	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.069.	6.16 Penunjang Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD	Jumlah Visitasi dan Monitoring Lembaga PAUD	368	796,51	72	146,83	71	150,17	71	137,36	100,00	91,47	143	284,19	38,86	35,68		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.01.1.01.01.01.15.073.	6.17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah PAUD Negeri	Jumlah TK Negeri Penerima Operasional Perlengkapan Sekolah	18	936,57	4	181,02	18	186,15	18	185,71	100,00	99,76	22	366,73	120,00	39,16		
	1.01.01.1.01.01.01.15.074.	6.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya Pendidikan Anak Usia Dini (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Lembaga PAUD yang di rehab	17	1.261,04	0	-	17	1.261,04	17	-	100,00	0,00	17	-	100,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.075.	6.19 Pembangunan Area Bermain Beserta (APE) Luar Ruang Pendidikan Anak Usia Dini (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Ruang APE yang dibangun	4	240,00	0	-	4	240,00	4	-	100,00	0,00	4	-	100,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.076.	6.20 Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa Beserta Sanitasinya Pendidikan Usia Dini (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Toilet (Jamban) Siswa PAUD yang dibangun	5	444,50	0	-	5	444,50	5	-	100,00	0,00	5	-	100,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.15.077.	6.21 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan APE PAUD	16	320,00	0	-	16	320,00	16	-	100,00	0,00	16	-	100,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)				69,54		64,26		69,54		64,26				42,39		18,45	
		Predikat kinerja				S		R		S		R				SR		SR	
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	1.01.01.1.01.01.01.16.	7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	627.997,80	77	81.949,94	100	141.092,08	78	83.212,49	77,63	58,98	77	165.162,43	30,94	26,30		
	1.01.01.1.01.01.01.16.007.	7.1 Pembangunan Jamban Sekolah SD	Jumlah Jamban Sekolah SD yang dibangun	5	465,90	1	93,76	1	2,98	1	2,98	100,00	100,00	2	96,74	40,00	20,76		
	1.01.01.1.01.01.01.16.012.	7.3 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMP	Jumlah Jamban Sekolah SMP yang dibangun	34	1.094,40	0	5,94	6	182,40	6	181,68	100,00	99,60	6	187,62	17,65	17,14		
	1.01.01.1.01.01.01.16.020.	7.3 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Jumlah Perlengkapan Sekolah SMP yang diadakan	10	-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.070.	7.4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	Jumlah Siswa, Pembina dan Pelatih Seleksi dan Pembinaan Peserta Lomba Bidang Sains, Olahraga dan Seni Siswa SD	615	1.396,53	120	203,66	42	219,52	138	210,30	328,57	95,80	258	413,96	41,95	29,64		
	1.01.01.1.01.01.01.16.073.	7.5 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Jumlah Monitoring Kurikulum 2013 Tingkat SMP	142	385,26	28	52,97	80	151,36	28	150,66	35,00	99,54	56	203,64	39,44	52,86		
	1.01.01.1.01.01.01.16.077.	7.7 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di Daerah Terpencil	Jumlah jasa Tenaga Pendidik SD dan SMP Marginal di Daerah Terpencil	205	2.972,79	41	590,40	41	611,19	41	597,67	100,00	97,79	82	1.188,07	40,00	39,96		
	1.01.01.1.01.01.01.16.080.	7.7 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP/MTs	Jumlah Siswa/i Peserta Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP/MTs	59110	1.432,96	11500	271,44	12000	144,52	11730	57,02	97,75	39,45	23230	328,45	39,30	22,92		
	1.01.01.1.01.01.01.16.081.	7.8 Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat SMP/MTs	Jumlah peserta lomba mewakili Kabupaten Inhil Ke Tingkat Propinsi	129	967,08	16	143,31	33	111,70	24	107,92	72,73	96,62	40	251,22	31,01	25,98		
	1.01.01.1.01.01.01.16.095.	7.9 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD/MI	75000	3.202,03	11900	606,15	11800	178,19	11800	143,28	100,00	80,40	23700	749,43	31,60	23,40		
	1.01.01.1.01.01.01.16.104.	7.10 Penyedian bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SDLB	Jumlah SD/SDLB penerima bantuan operasional sekolah (BOS)	100	145,99	20	132,79	-	-	0	-	0,00	0,00	20	132,79	20,00	90,96		
	1.01.01.1.01.01.01.16.105.	7.11 Manajemen Pengelolaan Dana BOS dan PIP jenjang SMP	Jumlah Sekolah yang dibina BOS dan PIP jenjang SMP	160	1.184,08	32	210,58	135	129,23	156	123,24	115,56	95,37	188	333,83	117,50	28,19		
	1.01.01.1.01.01.01.16.109.	7.13 Pembangunan Gedung Sekolah SMP	Jumlah Gedung dan Ruang Penunjang sekolah lainnya bagi peserta didik SMP/MTs yang dibangun	21	4.276,06	3	135,13	5	770,71	2	768,80	40,00	99,75	5	903,93	23,81	21,14		
	1.01.01.1.01.01.01.16.110.	7.13 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	Jumlah Ruang Kelas SD/MI yang dibangun	76	28.496,36	1	594,27	82	2.697,96	12	2.320,41	14,63	86,01	13	2.914,68	17,11	10,23		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.01.1.01.01.01.16.111.	7.14 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs yang dibangun	54	15.824,42	0	492,67	33	3.034,98	10	1.735,63	30,30	57,19	10	2.228,31	18,52	14,08		
	1.01.01.1.01.01.01.16.112.	7.15 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Jumlah Paket Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD/MI	53	6.402,91	17	1.503,31	13	1.390,68	11	1.261,37	84,62	90,70	28	2.764,68	52,83	43,18		
	1.01.01.1.01.01.01.16.113.	7.17 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	Jumlah Paket Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP/MTs	31	5.461,44	5	786,00	8	1.903,75	4	1.118,57	50,00	58,76	9	1.904,57	29,03	34,87		
	1.01.01.1.01.01.01.16.114.	7.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD	Jumlah Sekolah SD/MI yang direhab	66	10.699,35	0	458,71	22	707,88	2	306,05	9,09	43,24	2	764,77	3,03	7,15		
	1.01.01.1.01.01.01.16.115.	7.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang direhab	41	7.231,22	0	91,26	17	1.874,86	3	857,36	17,65	45,73	3	948,63	7,32	13,12		
	1.01.01.1.01.01.01.16.116.	7.19 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD	0	-	0	1,66			0	-	0,00	0,00	0	1,66	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.118.	7.20 Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	Jumlah paket pengadaan Mebeleur Sekolah SD/MI	28	2.303,05	6	386,85	6	665,23	7	606,21	116,67	91,13	13	993,06	46,43	43,12		
	1.01.01.1.01.01.01.16.119.	7.21 Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP	Jumlah paket pengadaan Mebeleur Sekolah SMP/MTs	51	3.442,19	10	108,49	4	616,98	10	602,71	250,00	97,69	20	711,21	39,22	20,66		
	1.01.01.1.01.01.01.16.121.	7.22 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SMP/SMPLB	jumlah paket buku pelajaran SMP/SMPLB yang disediakan	5	153,26	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.122.	7.23 Peningkatan Pelaksanaan Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD	Jumlah Monitoring pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SD/MI	776	1.794,50	117	340,44	134	195,21	86	185,49	64,18	95,02	203	525,93	26,16	29,31		
	1.01.01.1.01.01.01.16.123.	7.24 Peningkatan Pelaksanaan Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP	Jumlah Monitoring pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMP/MTs	375	1.336,68	64	212,43	72	147,48	82	146,17	113,89	99,11	146	358,60	38,93	26,83		
	1.01.01.1.01.01.01.16.139.	7.25 Biaya Operasional Sekolah SD Negeri	Jumlah Sekolah penerima BOS SD Negeri	520	264.532,00	104	40.352,64	467	75.886,88	520	72.856,00	111,35	96,01	624	113.208,64	120,00	42,80		
	1.01.01.1.01.01.01.16.140.	7.26 Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri	Jumlah Sekolah penerima BOS SMP Negeri	108	94.060,00	22	12.292,90	107	23.952,85	108	22.048,00	100,93	92,05	130	34.340,90	120,00	36,51		
	1.01.01.1.01.01.01.16.141.	7.27 Penyediaan Bantuan Siswa Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Indonesia Pintar	2046	625,03	300	97,07	519	70,66	200	65,77	38,54	93,08	500	162,83	24,44	26,05		
	1.01.01.1.01.01.01.16.142.	7.28 Koleksi Perpustakaan Sekolah (Buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) SD	Jumlah Paket Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD	129	3.075,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.143.	7.29 Koleksi Perpustakaan Sekolah (Buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) SMP	Jumlah Paket Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP	147	3.535,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.144.	7.30 Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia SMP	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia	30	3.660,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.145.	7.31 Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Bimtek Kegiatan Mutu Satuan Pendidikan Dasar	415	1.264,54	80	206,06	80	96,86	20	82,57	25,00	85,24	100	288,63	24,10	22,82		
	1.01.01.1.01.01.01.16.146.	7.32 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	41	7.925,00	0	-	15	564,54	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.147.	7.33 Bimtek Penilaian Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Bimtek Penilaian Pembelajaran Bagi Guru SD	276	584,17	40	63,85	40	60,83	20	53,30	50,00	87,62	60	117,15	21,74	20,05		
	1.01.01.1.01.01.01.16.148.	7.34 Manajemen Pengelolaan Dana BOS Jenjang SD	Jumlah Sekolah yang dibina	1502	589,87	0	-	519	124,32	410	113,49	79,00	91,29	410	113,49	27,30	19,24		
	1.01.01.1.01.01.01.16.149.	7.35 Pengadaan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP	Jumlah paket pengadaan peralatan UNBK SMP	12	5.630,15	0	-	6	2.310,50	6	2.282,52	100,00	98,79	6	2.282,52	50,00	40,54		
	1.01.01.1.01.01.01.16.151.	7.36 Pembangunan Ruang Ibadah SMP	Jumlah Ruang Ibadah SMP/MTs yang dibangun	119	1.404,60	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.154.	7.37 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun	80	15.520,00	16	3.104,00	15	1.776,00	16	1.776,00	106,67	100,00	32	4.880,00	40,00	31,44		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.01.1.01.01.01.16.155.	7.38 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Toilet (Jamban) SD yang dibangun	40	4.472,00	8	894,40	8	864,40	8	864,40	100,00	100,00	16	1.758,80	40,00	39,33		
	1.01.01.1.01.01.01.16.156.	7.39 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat, Beserta Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab	510	40.141,82	102	7.612,11	100	6.139,55	102	6.139,55	102,00	100,00	204	13.751,66	40,00	34,26		
	1.01.01.1.01.01.01.16.157.	7.40 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Perpustakaan SD yang direhab	30	2.798,25	6	559,65	5	786,00	6	786,00	120,00	100,00	12	1.345,65	40,00	48,09		
	1.01.01.1.01.01.01.16.158.	7.41 Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Guru SD yang direhab	5	528,50	0	-	1	211,40	1	211,40	100,00	100,00	1	211,40	20,00	40,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.159.	7.42 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Sanitasinya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Toilet (Jamban) SD yang direhab	80	830,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.160.	7.43 Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Kelas SMP yang direhab	155	18.287,75	34	2.579,70	37	2.910,00	17	2.910,00	45,95	100,00	51	5.489,70	32,90	30,02		
	1.01.01.1.01.01.01.16.161.	7.44 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhab	20	4.354,27	4	653,42			0	-	0,00	0,00	4	653,42	20,00	15,01		
	1.01.01.1.01.01.01.16.162.	7.45 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Perpustakaan SMP yang direhab	5	912,50	1	128,13	1	390,00	2	390,00	200,00	100,00	3	518,13	60,00	56,78		
	1.01.01.1.01.01.01.16.163.	7.46 Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Guru SMP yang direhab	15	3.065,25	3	436,56	3	390,00	2	390,00	66,67	100,00	5	826,56	33,33	26,97		
	1.01.01.1.01.01.01.16.164.	7.47 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Jamban Siswa/Guru SMP yang direhab	25	2.200,00	5	319,42			0	-	0,00	0,00	5	319,42	20,00	14,52		
	1.01.01.1.01.01.01.16.165.	7.48 Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabot SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Kantor SMP yang direhab	25	5.185,00	5	746,08			0	-	0,00	0,00	5	746,08	20,00	14,39		
	1.01.01.1.01.01.01.16.166.	7.49 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah RKB SMP yang dibangun	35	8.000,00	6	1.009,17			0	-	0,00	0,00	6	1.009,17	17,14	12,61		
	1.01.01.1.01.01.01.16.167.	7.50 Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang dibangun	10	3.310,00	2	416,13	2	1.440,00	4	1.440,00	200,00	100,00	6	1.856,13	60,00	56,08		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.01.1.01.01.01.16.168.	7.51 Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Ruang Perpustakaan SMP yang dibangun	10	2.985,00	1	225,82	2	1.270,00	4	1.270,00	200,00	100,00	5	1.495,82	50,00	50,11		
	1.01.01.1.01.01.01.16.169.	7.52 Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Jamban Siswa/Guru yang dibangun	5	605,00	1	87,78	1	688,40	8	688,40	800,00	100,00	9	776,18	180,00	128,29		
	1.01.01.1.01.01.01.16.170.	7.53 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika SMP	30	4.499,88	6	899,98			0	-	0,00	0,00	6	899,98	20,00	20,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.171.	7.54 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi SMP	35	5.249,86	7	1.049,97			0	-	0,00	0,00	7	1.049,97	20,00	20,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.172.	7.55 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP	20	4.668,40	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.173.	7.56 Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika SMP	10	37,84	2	7,57			0	-	0,00	0,00	2	7,57	20,00	20,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.174.	7.57 Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP	45	405,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.175.	7.58 Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (PJOK) SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (PJOK) SMP	45	900,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.176.	7.59 Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP	40	800,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.177.	7.60 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP (Dana Alokasi Khusus - DAK Reguler)	Jumlah Paket Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP	10	260,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.178.	7.61 Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SD (Dana Alokasi Khusus - DAK Afirmasi)	Jumlah Rumah Dinas Guru SD yang dibangun	35	5.515,61	7	785,33	7	510,00	7	510,00	100,00	100,00	14	1.295,33	40,00	23,48		
	1.01.01.1.01.01.01.16.179.	7.62 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD (Dana Insentif Daerah)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SD Yang Dibangun	0	156,50	0	-	0	156,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	3	-	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.180.	7.63 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP (Dana Insentif Daerah)	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs yang dibangun	8	-	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.181.	7.64 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD (Dana Insentif Daerah)	Jumlah Sekoah Yang direhab	15	793,34	0	-	15	793,34	9	616,23	60,00	77,68	9	616,23	60,00	77,68		
	1.01.01.1.01.01.01.16.182.	7.65 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP (Dana Insentif Daerah)	Jumlah Sekolah SMP/MTs yang direhab	3	-	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.183.	7.66 Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya Sekolah Dasar (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya Sekolah Dasar	5	905,00	0	-	5	905,00	5	905,00	100,00	100,00	5	905,00	100,00	100,00		
	1.01.01.1.01.01.01.16.184.	7.67 Pembangunan ruang guru beserta perabotnya Sekolah Dasar (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Pembangunan ruang guru beserta perabotnya Sekolah Dasar	3	582,00	0	-	3	582,00	3	582,00	100,00	100,00	3	582,00	100,00	100,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.01.1.01.01.16.185.	7.68 Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya Sekolah Dasar (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya Sekolah Dasar	9	663,00	0	-	9	663,00	9	596,00	100,00	89,89	9	596,00	100,00	89,89		
	1.01.01.1.01.01.16.186.	7.69 Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Sekolah Menengah Pertama (Dana Alokasi Khusus - Reguler)	Jumlah Laboratorium SMP/MTs yang dibangun	1	316,10	0	-	1	316,10	1	316,10	100,00	100,00	1	316,10	100,00	100,00		
	1.01.01.1.01.01.16.187.	7.70 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya Sekolah Dasar (Dana Alokasi Khusus - Afirmasi)	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya Sekolah Dasar	11	953,89	0	-	11	953,89	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.16.188.	7.71 Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya Sekolah Menengah Pertama (Dana Alokasi Khusus - Afirmasi)	Jumlah Rumah Dinas Guru SD yang dibangun	3	542,25	0	-	3	542,25	2	-	66,67	0,00	2	-	66,67	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										106,67	84,69	106,67	84,69			33,45	27,40		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Tidak melakukan Perubahan Target Kinerja di RKPD/RENIA Ketika Perubahan APBD																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																			
	1.01.01.1.01.01.18.	8. Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	5.327,09	95	656,66	100	504,82	97	496,37	97,03	98,33	96	1.153,03	38,46	21,64		
	1.01.01.1.01.01.18.003.	8.1 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Kursus dan kelembagaan	219	861,74	40	172,40	40	117,45	40	117,45	100,00	100,00	80	289,86	36,53	33,64		
	1.01.01.1.01.01.18.008.	8.3 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Pelatihan	208	748,98	40	143,98	40	110,25	40	108,92	100,00	98,79	80	252,89	38,46	33,77		
	1.01.01.1.01.01.18.014.	8.3 Pengembangan Pendidikan Keluarga	Jumlah Peserta Sosialisasi	237	776,00	45	146,00	45	121,97	45	120,64	100,00	98,91	90	266,64	37,97	34,36		
	1.01.01.1.01.01.18.017.	8.4 Pengembangan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)	Jumlah Peserta Sosialisasi	162	1.027,78	30	194,28	30	155,15	30	149,36	100,00	96,27	60	343,64	37,04	33,43		
	1.01.01.1.01.01.18.018.	8.5 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang menerima BOP		1.912,60	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	98,49	100,00	98,49			30,00	27,04		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Tidak melakukan Perubahan Target Kinerja di RKPD/RENIA Ketika Perubahan APBD																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																			
	1.01.01.1.01.01.20.	9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI)	9596	10.171,81	667	505,57	2000	1.206,81	833	1.061,32	41,67	87,94	1500	1.566,89	15,63	15,40		
			Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	1483		769		309		714		231,10		1484		100,03			
	1.01.01.1.01.01.20.001.	9.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Monitoring pelaksanaan tunjangan profesi dan aneka tunjangan Guru PNS dan Non PNS	25	126,86	5	126,61	0	-	0	-	0,00	0,00	5	126,61	20,00	99,80		
	1.01.01.1.01.01.20.002.	9.3 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	480	1.195,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.20.003.	9.3 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	163	622,81	30	99,02	40	283,89	33	274,01	82,50	96,52	63	373,03	38,65	59,90		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.01.1.01.01.01.20.006.	9.4 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)	Jumlah Guru yang lulus PPG dan mendapat sertifikat pendidik	210	2.250,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.20.007.	9.5 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah Peserta Pelatihan	260	695,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.01.1.01.01.01.20.008.	9.9 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Peserta Pelatihan	124	1.290,00	0	-	50	432,52	31	173,29	62,00	40,07	31	173,29	25,00	13,43		
	1.01.01.1.01.01.01.20.010.	9.9 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit Guru (DUPAK), Panitia Penghargaan (Setya Lencana Karya Setya), dan Tim Penilai Karya Inovatif Publikasi Ilmiah Angka Kredit	148	1.153,39	0	-	35	197,83	37	195,03	105,71	98,58	37	195,03	25,00	16,91		
	1.01.01.1.01.01.01.20.014.	9.8 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru PNS dan Non PNS yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)	449	981,76	50	192,35	80	109,16	89	107,03	111,25	98,05	139	299,38	30,96	30,49		
	1.01.01.1.01.01.01.20.015.	9.9 Pembinaan Organisasi Pendidik	Jumlah Organisasi Pendidikan	15	1.066,80	3	87,59	3	148,68	3	98,80	100,00	66,45	6	186,38	40,00	17,47		
	1.01.01.1.01.01.01.20.016.	9.10 Manajemen Pengelolaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Monitoring pelaksanaan tunjangan profesi dan aneka tunjangan Guru PNS dan Non PNS	136	789,70	0	-	105	234,72	34	213,16	32,38	90,81	34	213,16	25,00	26,99		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								82,31	81,75	82,31	81,75			20,46	26,50		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Tidak melakukan Perubahan Target Kinerja di RKPD/RENJA Ketika Perubahan APBD																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	1.01.01.1.01.01.01.21.	10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	100	41.361,93	100	17.722,88	100	18.436,67	100	17.014,59	100,00	92,29	40	34.737,48	40,16	83,98		
	1.01.01.1.01.01.01.21.004.	10.1 Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Sosialisasi	179	602,87	35	109,49	39	96,52	0	16,09	0,00	16,67	35	125,58	19,55	20,83		
	1.01.01.1.01.01.01.21.007.	10.2 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan	260	3.772,67	40	784,36	40	449,07	52	410,48	130,00	91,41	92	1.194,84	35,38	31,67		
	1.01.01.1.01.01.01.21.009.	10.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	320	689,79	63	125,30	66	87,76	35	82,61	53,03	94,13	98	207,91	30,63	30,14		
	1.01.01.1.01.01.01.21.014.	10.4 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan	Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif dan Guru Bantu Daerah Penerima Honor	19710	26.140,00	4385	15.325,20	3942	15.846,00	3942	14.679,60	100,00	92,64	8327	30.004,80	42,25	114,79		
	1.01.01.1.01.01.01.21.016.	10.5 Pemberian Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	5731	10.156,60	1109	1.378,54	1122	1.957,32	1122	1.825,82	100,00	93,28	2231	3.204,35	38,93	31,55		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								184.348,82	114.961,21								
		Rata-rata capaian kinerja (%)								76,61	77,62	76,61	77,62			33,35	45,80		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Tidak melakukan Perubahan Target Kinerja di RKPD/RENJA Ketika Perubahan APBD																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
2.	0.00.00.1.01.02.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	92	30.562,84	87	10.002,80	90	7.991,40	87	8.500,38	96,92	106,37	87	18.503,18	37,86	60,54	DINAS KESEHATAN	
	0.00.00.1.01.02.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	7500	67,50	1500	15,00	1500	7,50	1500	7,50	100,00	100,00	3000	22,50	40,00	33,33		
	0.00.00.1.01.02.01.01.002.	1.3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	2.608,40	36	470,20	3	375,60	3	375,05	100,00	99,85	39	845,25	21,67	32,40		
	0.00.00.1.01.02.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	75	230,40	13	35,31	15	40,20	15	40,20	100,00	100,00	28	75,51	37,57	32,78		
	0.00.00.1.01.02.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	150	312,78	30	41,74	30	44,78	30	43,52	100,00	97,19	60	85,26	40,00	27,26		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.02.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	1115	254,50	223	53,50	223	21,00	126	11,75	56,50	55,95	349	65,25	31,30	25,64		
	0.00.00.1.01.02.01.01.010.	1.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	37	238,34	7	50,50	37	32,43	37	32,43	100,00	100,00	22	82,93	59,46	34,79		
	0.00.00.1.01.02.01.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	210212	191,45	42042	32,60	8000	8,85	8000	8,85	100,00	100,00	50042	41,45	23,81	21,65		
	0.00.00.1.01.02.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	300	84,00	60	11,91	5000	12,00	4955	11,89	99,10	99,08	5015	23,80	40,00	28,33		
	0.00.00.1.01.02.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan Kantor	102783	265,50	18500	72,61	11000	30,50	10646	29,51	96,78	96,77	29146	102,12	28,36	38,46		
	0.00.00.1.01.02.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	52	230,00	10	60,00	50	20,00	51	20,00	102,00	100,00	61	80,00	46,92	34,78		
	0.00.00.1.01.02.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	241	1.112,94	48	438,47	65	106,17	66	105,26	101,54	99,14	114	543,73	47,30	48,86		
	0.00.00.1.01.02.01.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	2810	24.442,60	564	8.564,80	12	7.228,76	12	7.756,39	100,00	107,30	576	16.321,19	20,50	66,77		
	0.00.00.1.01.02.01.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	405	524,43	81	156,16	142	63,61	130	58,02	91,79	91,22	211	214,19	52,18	40,84		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								95,98	95,88	95,98	95,88			37,62	35,84		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.01.02.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	92	9.656,47	66,24	3.543,30	90	609,22	69	539,47	77,15	88,55	136	4.082,76	147,48	42,28		
	0.00.00.1.01.02.01.02.002.	2.1 Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	4	2.020,00	0	-	5	47,80	0	47,46	0,00	99,29	0	47,46	0,00	2,35		
	0.00.00.1.01.02.01.02.003.	2.2 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	25	1.410,80	5	609,69	2	68,34	1	66,94	50,00	97,95	6	676,63	24,00	47,96		
	0.00.00.1.01.02.01.02.005.	2.3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	20	681,00	4	488,31	3	80,00	3	90,86	113,57	113,57	7	579,16	37,04	85,05		
	0.00.00.1.01.02.01.02.007.	2.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	33	747,54	7	688,62	0	-	0	-	0,00	0,00	7	688,62	21,21	92,12		
	0.00.00.1.01.02.01.02.009.	2.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	23	921,20	5	986,24	0	55,60	0	-	0,00	0,00	5	986,24	21,74	107,06		
	0.00.00.1.01.02.01.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	52	473,40	10	139,51	10	1,40	0	-	0,00	0,00	10	139,51	19,23	29,47		
	0.00.00.1.01.02.01.02.024.	2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	183	426,28	30	48,32	18	186,08	62	165,23	346,75	88,79	92	213,54	50,28	50,09		
	0.00.00.1.01.02.01.02.041.	2.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	166	965,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.01.02.042.	2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	773	284,25	155	127,51	0	-	0	-	0,00	0,00	155	127,51	20,05	44,86		
	0.00.00.1.01.02.01.02.050.	2.1 Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	25	603,00	5	455,10	5	100,00	5	99,44	100,00	99,44	10	554,54	40,00	91,96		
	0.00.00.1.01.02.01.02.052.	2.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	1.124,00	0	-	10	70,00	4	69,55	40,00	99,36	4	69,55	6,67	6,19		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								92,90	85,48	92,90	85,48						
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T						
	0.00.00.1.01.02.01.05.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan Keterampilan Khusus	72	3.424,68	14	2.411,04	72	234,31	197	613,26	273,59	261,73	211	3.024,29	294,33	88,31		
	0.00.00.1.01.02.01.05.001.	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	131	2.458,94	26	1.878,51	30	223,01	30	613,26	100,00	274,99	56	2.491,76	42,75	101,33		
	0.00.00.1.01.02.01.05.003.	3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	10	965,74	2	532,53	2	11,30	0	24,44	0,00	216,25	2	556,97	20,00	57,67		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	245,62	50,00	245,62			31,37	79,50		
		Predikat kinerja								SR	ST	SR	ST						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.02.01.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	92	1.177,16	61	181,33	90	222,82	89	205,66	98,81	92,30	75	386,99	32,67	32,87		
	0.00.00.1.01.02.01.06.001.	4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	15	375,72	3	108,36	3	59,32	3	59,32	100,00	100,00	6	167,68	40,00	44,63		
	0.00.00.1.01.02.01.06.004.	4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	351,44	1	72,97	1	38,91	1	32,77	100,00	84,22	2	105,74	40,00	30,09		
	0.00.00.1.01.02.01.06.006.	4.3 Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	16	450,00	0	-	28	124,60	27	113,57	96,43	91,15	27	113,57	168,75	25,24		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		98,81		91,79		98,81		91,79									
		Predikat kinerja		ST		ST		ST		ST									
	0.00.00.1.01.02.01.07.	5. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Jumlah dokumen penunjang program kerja	36	313,52	0	-	9	167,45	9	160,58	100,00	95,89	9	160,58	25,00	51,22		
	0.00.00.1.01.02.01.07.001.	5.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	36	313,52	0	-	9	167,45	9	160,58	100,00	95,89	9	160,58	25,00	51,22		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00		95,89		100,00		95,89									
		Predikat kinerja		ST		ST		ST		ST									
	1.01.02.1.01.02.01.	KESEHATAN																	
	1.01.02.1.01.02.01.15.	6. Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di Puskesmas	64	48.330,81	23	8.792,86	65	9.485,07	63	9.192,77	97,22	96,92	86	17.985,63	53,73	37,21		
	1.01.02.1.01.02.01.15.001.	6.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jinragannya	90	10.728,71	60	1.081,73	90	2.917,25	90	2.754,03	100,00	94,41	150	3.835,77	166,67	35,75		
	1.01.02.1.01.02.01.15.005.	6.3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian	698	400,04	60	208,29	50	15,94	50	14,33	100,00	89,91	110	222,62	15,76	55,65		
	1.01.02.1.01.02.01.15.007.	6.3 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Jinragannya	90	36.836,41	60	7.323,53	90	6.538,50	90	6.414,24	100,00	98,10	150	13.737,77	166,67	37,29		
	1.01.02.1.01.02.01.15.011.	6.4 Peningkatan Produksi Distribusi Kefarmasian	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian	231	365,65	1	179,30	18	13,39	16	10,17	88,89	76,00	17	189,47	7,36	51,82		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		97,22		89,60		97,22		89,60						89,11		45,13	
		Predikat kinerja		ST		T		ST		T						T		SR	
	1.01.02.1.01.02.01.16.	7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	1.333.755	263.181,78	333.355	65.778,98	263.060	54.488,22	116.993	49.700,55	44	91	450.348	115.479,53	33,77	43,88		
	1.01.02.1.01.02.01.16.002.	7.1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA	27	758,98	27	324,63	10	62,95	9	54,24	90	86	36	378,88	133,33	49,92		
	1.01.02.1.01.02.01.16.006.	7.3 Revitalisasi Sistem Kesehatan	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya	27	1.763,29	25	696,22	25	471,74	25	454,64	100	96	50	1.150,86	74,07	65,27		
	1.01.02.1.01.02.01.16.009.	7.3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang dibentuk tim pembina UKS Kabupaten	27	399,85	27	49,84	10	73,86	10	64,94	100	88	19	114,78	27,41	28,71		
	1.01.02.1.01.02.01.16.010.	7.4 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal	Jumlah peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan	92	6.500,00	100	1.155,76	100	300,00	28	28,78	28	10	128	1.184,54	27,83	18,22		
	1.01.02.1.01.02.01.16.012.	7.5 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Persentase Peningkatan Cakupan BBL yang mendapat IMD	80	694,47	95	267,11	80	64,49	80	52,45	100	81	175	319,56	218,75	46,01		
			Persentase Peningkatan Cakupan Bayi usia 6 bulan yang mendapat Asi eksklusif	95	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.01.16.016.	7.6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase Tertunggulangnya Biaya Pelayanan Kesehatan dan Rujukan	92	99.502,19	100	33.730,15	100	26.947,97	100	25.242,47	100	94	100	58.972,62	43,48	59,27		
	1.01.02.1.01.02.01.16.018.	7.7 Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Farmasi	Jumlah Gudang Farmasi yang dikelola dan dipelihara	28	846,34	28	592,26	12	72,12	12	65,34	100	91	40	657,60	142,86	77,70		
	1.01.02.1.01.02.01.16.019.	7.8 Pengelolaan dan Pemeliharaan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dikelola dan dipelihara	25	4.862,55	25	242,27	12	134,84	12	522,52	100	388	37	764,78	148,00	15,73		
	1.01.02.1.01.02.01.16.022.	7.9 Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Terhadap Petugas Puskesmas	27	879,63	27	404,38	3	110,30	3	106,98	100	97	30	511,36	111,11	58,13		
	1.01.02.1.01.02.01.16.053.	7.10 Bantuan Operasional Kesehatan (Dana Alokasi Khusus)	Persentase penyelesaian biaya operasional kesehatan di wilayah Kab.Inhil	92	114.405,00	100	21.889,30	100	18.126,42	98	17.051,15	98	94	198	38.940,45	215,22	34,04		
	1.01.02.1.01.02.01.16.054.	7.11 Jaminan Persalinan (Dana Alokasi Khusus)	Cakupan Persalinan yang ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten	92	24.440,00	95	4.507,76	100	4.746,46	89	4.175,65	89	88	184	8.683,41	200,00	35,53		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
			Cakupan Kunjungan Bayi	95	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.16.055.	7.12 Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Tradisional	27	448,66	14	233,03	3	96,58	3	94,60	100	98	17	327,62	62,96	73,02		
	1.01.02.1.01.02.01.16.056.	7.13 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	29	895,68	28	625,01	28	51,95	28	48,98	100	94	56	674,00	193,10	75,25		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
			Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.16.057.	7.14 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas	28	915,28	27	517,61	28	81,61	28	66,59	100	82	55	584,19	196,43	63,83		
	1.01.02.1.01.02.01.16.058.	7.15 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase Pembiayaan operasional gudang farmasi bersumber dari dana pusat	92	550,00	80	86,00	100	133,91	19	25,84	19	19	99	111,84	108,12	20,33		
	1.01.02.1.01.02.01.16.059.	7.16 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sungai Iliran	Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	92	2.813,67	100	457,67	100	506,83	78	166,11	78	33	178	623,78	193,48	22,17		
	1.01.02.1.01.02.01.16.060.	7.17 Revitalisasi Sistem Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya (DAK)	25	265,21	-	-	25	265,21	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.16.061.	7.18 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak Menular (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	28	804,00	-	-	28	804,00	28	663,00	100	82	28	663,00	100,00	82,46		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
			Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (DAK)	80	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.16.062.	7.19 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas (DAK)	28	100,00	-	-	28	100,00	28	67,16	100	67	28	67,16	100,00	67,16		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.01.16.063.	7.20 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	10	150,00		-	10	150,00	7	94,34	70	63	7	94,34	70,00	62,89		
	1.01.02.1.01.02.01.16.064.	7.21 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (DAK)	60	92,60		-	60	92,60	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.16.065.	7.22 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Pembinaan Puskesmas Mampu PONE D (DAK)	6	89,31		-	6	89,31	6	84,60	100	95	6	84,60	100,00	94,72		
	1.01.02.1.01.02.01.16.066.	7.23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA	80	184,61		-	80	184,61	50	96,36	63	52	50	96,36	62,50	52,20		
			Peningkatan Cakupan Rematri mendapat tablet tambah Darah (DAK)	80	-		-			0	-	0	0	0	-	0,00	#DIV/0!		
	1.01.02.1.01.02.01.16.067.	7.24 Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum (DAK)	70	231,25		-	70	231,25	62	-	89	0	62	-	88,57	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.16.068.	7.25 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (gema cermat) bagi masyarakat se-kabupaten indragiri hilir yang dilaksanakan	4	127,12		-	4	127,12	4	106,65	100	84	4	106,65	100,00	83,90		
	1.01.02.1.01.02.01.16.069.	7.26 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan (DAK)	140	150,06		-	140	150,06	115	111,63	82	74	115	111,63	82,14	74,39		
	1.01.02.1.01.02.01.16.070.	7.27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan (DAK)	100	79,26		-	100	79,26	89	64,13	89	81	89	64,13	89,00	80,92		
	1.01.02.1.01.02.01.16.071.	7.28 Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Kota (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase penyelesaian biaya operasional kesehatan di wilayah Kab.Inhil	100	232,78		-	100	232,78	83	191,40	83	82	83	191,40	83,00	82,22		
Rata-rata capaian kinerja (%)				83,76				82,17		84		82				82,54			
Predikat kinerja				T				T		T		T							
	1.01.02.1.01.02.01.17.	8. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	92	1.198,10		749,52	90	134,42	16	62,83	18	47	16	812,35	17,12	67,80		
	1.01.02.1.01.02.01.17.001.	8.1 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	5	520,80	1	338,73	1	58,04	1	49,66	100	86	2	388,39	40,00	74,58		
	1.01.02.1.01.02.01.17.002.	8.2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	10	621,46	2	410,79	28	20,54	18	13,16	64	64	20	423,96	200,00	68,22		
	1.01.02.1.01.02.01.17.004.	8.3 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dana	Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Bimtek Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar di Kabupaten Indragiri Hilir	35	55,84		-	35	55,84	32	-	91	0	32	-	91,43	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				85,24				49,88		85,24		49,88				49,71		47,60	
Predikat kinerja				T				SR		T		SR				SR			
	1.01.02.1.01.02.01.18.	9. Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	12	1.400,00		-	8	29,43	12	25,66	154	87	12	25,66	102,6	1,8		
	1.01.02.1.01.02.01.18.001.	9.1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	70	650,00		-	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.18.002.	9.2 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Jumlah kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi	70	750,00		-	70	29,43	68	25,66	97	87	68	25,66	97,14	3,42		
Rata-rata capaian kinerja (%)				97,14				87,18		97		87				48,57		1,71	
Predikat kinerja				ST				T		ST		T							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.01.19.	10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	38	3.277,42		1.367,78	40	804,52	14	787,25	35	98	14	2.155,04	36	66		
	1.01.02.1.01.02.01.19.001.	10.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	50	933,87	10	478,74	10	586,02	10	562,86	100	96	20	1.041,60	40	112		
	1.01.02.1.01.02.01.19.002.	10.2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah pelaksanaan penyuluhan Pola Hidup Sehat	1273	925,16	857	368,83	399	53,89	397	90,77	99	168	1254	459,60	99	50		
	1.01.02.1.01.02.01.19.004.	10.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Puskesmas dengan kemampuan/kesadaran, disiplin dan kinerja tenaga kesehatannya di UPT Puskesmas se-Kab. Inhil yang ditingkatkan	30	489,07	27	102,01	28	56,27	28	46,98	100	83	55	148,99	183	30		
	1.01.02.1.01.02.01.19.005.	10.4 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hidup Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan	267	929,31	166	418,21	140	108,34	121	86,65	86	80	287	504,85	107	54		
Rata-rata capaian kinerja (%)				96,48		106,98		96		107		43		62					
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		SR		R					
	1.01.02.1.01.02.01.20.	11. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	68	3.406,99		-	70	141,44	27	136,10	38,57	96,22	27	136,10	39,70	3,99		
	1.01.02.1.01.02.01.20.001.	11.1 Pemenuhan SDM Kesehatan	Persentase rasio ketersediaan tenaga kesehatan	92	742,32		-	100	125,32	100	122,97	100,00	98,12	100	122,97	108,70	16,57		
	1.01.02.1.01.02.01.20.002.	11.2 Pemerataan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kesehatan di setiap Fasyankes (sesuai standar)	92	461,07		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.02.1.01.02.01.20.003.	11.3 Pendayagunaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan Daerah Khusus (Nusantara Sehat)	Persentase pemenuhan dokter kesehatan untuk Layanan Paripurna	92	2.203,60		-	100	16,12	82	13,13	82	81,45	82	13,13	89,13	0,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)				91,00		89,79		91		90		26,38		5,72					
Predikat kinerja				ST		T		ST		T									
	1.01.02.1.01.02.01.21.	12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	72	4.487,03		1.980,96	70	705,29	11	474,75	15	67,31	11	2.455,71	15	55		
	1.01.02.1.01.02.01.21.005.	12.1 Peningkatan Pengawasan Sarana TTU/TPM, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	70	1.600,59	60	427,80	70	386,82	51	318,52	73	82,34	111	746,32	159	47		
	1.01.02.1.01.02.01.21.006.	12.2 Peningkatan, Pengembangan Sanitasi Dasar dan Air Minum	Persentase pelaksanaan pengawasan sanitasi dasar dan air minum	70	2.126,18	60	1.402,45	70	227,17	40	127,91	57	56,31	100	1.530,36	143	72		
	1.01.02.1.01.02.01.21.007.	12.3 Pengelolaan, Pengawasan Limbah dan Sampah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelaksanaan pengawasan limbah dan sampah fasyankes	60	760,27	60	150,71	60	91,30	21	28,32	35	31,01	81	179,03	135	24		
Rata-rata capaian kinerja (%)				55,00		56,55		55		57		58		47					
Predikat kinerja				R		R		R		R									
	1.01.02.1.01.02.01.22.	13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Angka Kesakitan	68	28.824,84		3.773,79	60	30.705,39	42	1.741,82	70	5,67	42	5.515,61	62	19		
	1.01.02.1.01.02.01.22.001.	13.1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah Fogging Fokus DBD - Workshop Fogging - Bimbingan Teknis Fogging - Konsultasi Fogging yang dilaksanakan	104	1.327,94	60	812,34	220	338,63	220	326,41	100	96,39	280	1.138,75	269	86		
	1.01.02.1.01.02.01.22.004.	13.2 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten Indragiri Hilir	92	304,90	100	143,01	100	10,00	100	8,18	100	81,80	200	151,19	217	50		
	1.01.02.1.01.02.01.22.005.	13.3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya Penanggulangan Terhadap Penularan Penyakit Menular Langsung dan Tidak Langsung	29	1.456,93	27	515,76	27	160,21	27	150,33	100	93,83	54	666,08	186	46		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.01.22.006.	13.4 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus	Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya Penanggulangan Terhadap Penularan Penyakit Menular Wabah Virus Langsung dan Tidak Langsung	28	20.110,31		-	28	20.110,31	28	-	100	-	28	-	100	0		
	1.01.02.1.01.02.01.22.008.	13.5 Peningkatan Imunisasi	Jumlah pelaksanaan penunjang program imunisasi	16	780,01	8	359,78	5	100,00	5	91,39	100	91	13	451,17	81	58		
	1.01.02.1.01.02.01.22.009.	13.6 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan	444	446,67	256	222,98	150	530,00	106	610,55	71	115	362	833,52	82	187		
	1.01.02.1.01.02.01.22.012.	13.7 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97413	430,00	100	42,61	36183	75,87	35439	67,79	98	89	35539	110,40	36	26		
	1.01.02.1.01.02.01.22.014.	13.8 Penanggulangan dan Pemberantasan Filariasis	Persentase pelaksanaan kegiatan Transmission Assessment Urvev/TAS	90	280,00	60	341,40	90	43,53	67	31,87	74	73	127	373,27	141	133		
	1.01.02.1.01.02.01.22.016.	13.9 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1551	976,32	35	286,68	1120	253,88	1120	322,26	100	127	1155	608,95	74	62		
	1.01.02.1.01.02.01.22.017.	13.10 Sistem Registrasi Sample (SRS)	Jumlah prevalensi dan distribusi kejadian kematian yang disebabkan penyakit dan kecelakaan	52	220,38	7	48,37	50	4,42	25	2,38	50	54	32	50,75	62	23		
	1.01.02.1.01.02.01.22.019.	13.11 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20571	761,71	600	571,07	700	25,47	650	23,57	93	93	1250	594,63	6	78		
	1.01.02.1.01.02.01.22.020.	13.12 Peningkatan Cakupan Tatalaksana dan Kualitas Program Pengendalian Malaria	Persentase Penderita Malaria diobati sesuai standar 100% dan mampu mempertahankan status eliminasi malaria	92	729,67	75	429,79	100	125,57	86	107,11	86	85	161	536,90	175	74		
	1.01.02.1.01.02.01.22.021.	13.13 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan (DAK)	700	50,00	-	-	700	50,00	630	-	90	0	630	-	90	0		
	1.01.02.1.01.02.01.22.022.	13.14 Peningkatan Imunisasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah pelaksanaan penunjang program imunisasi (DAK)	5	50,00	-	-	5	50,00	5	-	100	0	5	-	100	0		
	1.01.02.1.01.02.01.22.023.	13.15 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan (DAK)	50	850,00	-	-	50	8.777,50	45	-	90	0	45	-	90	0		
	1.01.02.1.01.02.01.22.024.	13.16 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase pelaksanaan BIAS di kabupaten indragiri hilir (DAK)	100	50,00	-	-	100	50,00	100	-	100	0	100	-	100	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)				90,74		62,49		91		62		45		51					
Predikat kinerja				T		R		T		R		SR		R					
	1.01.02.1.01.02.01.23.	14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	92	17.822,61		8.627,59	90	1.127,03	42	562,11	47	50	42	9.189,71	46	52		
	1.01.02.1.01.02.01.23.003.	14.1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sosialisasi/pelatihan data informasi perizinan dibidang kesehatan bagi tenaga puskesmas yang dilaksanakan	30	678,10	27	509,93	28	50,00	28	48,39	100	97	55	558,32	183	82		
	1.01.02.1.01.02.01.23.009.	14.2 Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Pemutakhiran Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan	92	342,93	100	135,06	100	34,62	100	32,83	100	95	200	167,89	217	49		
	1.01.02.1.01.02.01.23.010.	14.3 Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten	Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	4	1.000,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0		
	1.01.02.1.01.02.01.23.011.	14.4 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan	27	2.538,18	27	1.278,28	0	-	0	-	0	-	27	1.278,28	100	50		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.01.23.012.	14.5 Penyusunan Standar Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah puskesmas uang menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	30	7.500,00	27	1.205,25	27	895,43	15	431,37	56	48	42	1.636,62	140	22		
	1.01.02.1.01.02.01.23.013.	14.6 Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi	Jumlah puskesmas yang dinilai berprestasi	36	345,19	27	123,50	3	51,24	3	49,53	100	97	30	173,03	83	50		
	1.01.02.1.01.02.01.23.014.	14.7 Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan kualitas Akses Jaringannya	27	5.418,21	25	5.375,57	5	95,74	5	-	100	-	30	5.375,57	111	99		
Rata-rata capaian kinerja (%)				91,11		67,29		91		67		91		67		48		50	
Predikat kinerja				ST		S		ST		S		ST		S		SR		SR	
	1.01.02.1.01.02.01.25.	15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	148	191.154,27		29.860,16	30	36.157,03	0	30.482,55	0,00	84,31	0	60.342,71	0,00	31,57		
	1.01.02.1.01.02.01.25.001.	15.1 Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	128	9.775,59	4	8.674,39	2	203,93	0	202,46	0,00	99,28	4	8.876,85	3,13	90,81		
	1.01.02.1.01.02.01.25.002.	15.2 Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas yang dibangun dan direlokasi	9	4.280,04	1	238,30	4	206,21	0	205,41	0,00	99,61	1	443,71	11,11	10,37		
	1.01.02.1.01.02.01.25.004.	15.3 Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah puskesmas yang disediakan	22	6.698,00	1	345,14	4	172,75	0	172,75	0,00	100,00	1	517,89	4,55	7,73		
	1.01.02.1.01.02.01.25.006.	15.4 Pengadaan Puskesmas Keliling (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah puskesmas yang disediakan (DAK)	15	7.049,30	3	619,10	1	1.300,00	0	1.080,00	0,00	83,08	3	1.699,10	20,00	24,10		
	1.01.02.1.01.02.01.25.007.	15.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah sarana Puskesmas yang disediakan	45	14.665,00	1	1.306,57	20	2.725,54	0	509,74	0,00	18,70	1	1.816,31	2,22	12,39		
	1.01.02.1.01.02.01.25.008.	15.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah sarana Puskesmas Pembantu yang disediakan	57	44.956,93	1	978,15	20	12.597,15	0	12.558,52	0,00	99,69	1	13.536,67	1,75	30,11		
	1.01.02.1.01.02.01.25.014.	15.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	19	989,56	1	253,65	10	454,32	0	452,24	0,00	99,54	1	705,90	5,26	71,33		
	1.01.02.1.01.02.01.25.015.	15.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan pemeliharaan	27	500,31	1	99,61	5	87,58	0	86,61	0,00	98,90	1	186,22	3,70	37,22		
	1.01.02.1.01.02.01.25.021.	15.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi	40	9.013,30	-	-	16	47,27	0	46,77	0,00	98,94	0	46,77	0,00	0,52		
	1.01.02.1.01.02.01.25.024.	15.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	15	1.150,00	-	-	3	200,00	0	199,86	0,00	99,93	0	199,86	0,00	17,38		
	1.01.02.1.01.02.01.25.025.	15.11 Pembangunan Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Pembangunan Puskesmas Bersumber Dana DAK	10	46.160,00	2	8.958,72	0	-	0	-	0	-	2	8.958,72	20,00	19,41		
	1.01.02.1.01.02.01.25.035.	15.12 Pengadaan Alat Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	70	20.668,08	60	4.027,58	70	8.256,49	0	8.058,94	0,00	97,61	60	12.086,52	85,71	58,48		
	1.01.02.1.01.02.01.25.036.	15.13 Pengadaan Alat Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	70	1.241,24	60	293,77	70	27,27	0	18,29	0,00	67,08	60	312,07	85,71	25,14		
	1.01.02.1.01.02.01.25.037.	15.14 Penunjang Dasar Bidang Kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes	10	2.058,37	1	553,57	2	675,84	0	361,75	0,00	53,53	1	915,32	10,00	44,47		
	1.01.02.1.01.02.01.25.038.	15.15 Penunjang Dasar Bidang Kesehatan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah kegiatan penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes (DAK)	80	12.825,00	16	2.227,44	1	702,70	0	682,30	0,00	97,10	16	2.909,74	20,00	22,69		
	1.01.02.1.01.02.01.25.039.	15.16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah sarana Puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang disediakan	40	6.523,56	3	1.284,17	8	5.900,00	0	5.846,92	0,00	99,10	3	7.131,09	7,50	109,31		
	1.01.02.1.01.02.01.25.040.	15.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan (DAK)	28	80,00	-	-	28	80,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.25.041.	15.18 Pembangunan Rumah Dinas (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Rumah Dinas yang Dibangun	8	2.400,00	-	-	8	2.400,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.25.042.	15.19 Pembangunan Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	Jumlah Puskesmas yang Dibangun	1	60,00	-	-	1	60,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.01.25.043.	15.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Dana Insentif Daerah/DID)	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	1	60,00	-	-	1	60,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		69,06		0,00		69,06		0,00		14,03		29,07			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET		
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)				
		Predikat kinerja																			
	1.01.02.1.01.02.01.28.	16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	88	867,34		252,18	90	65,89	25	61,32	28	93	25	313,50	28	36				
	1.01.02.1.01.02.01.28.005.	16.1 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Jumlah Pembinaan Puskesmas Mampu PONED	30	545,31	1	190,98	6	13,58	6	13,09	100	96	7	204,06	23	37				
	1.01.02.1.01.02.01.28.009.	16.2 Kemitraan dan Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan	Jumlah Organisasi Profesi kesehatan yang bermitra dan dibina	85	322,04	5	61,21	80	52,30	60	48,23	75	92	65	109,44	76	34				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			
		Predikat kinerja																			
	1.01.02.1.01.02.01.30.	17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	68	244,81		39,63	70	26,09	54	21,35	77	82	54	60,98	79	25				
	1.01.02.1.01.02.01.30.008.	17.1 Pembinaan, Pemantauan dan Pelayanan Usia Lanjut	Persentase dari evaluasi program lansia	60	244,81	60	39,63	60	26,09	60	21,35	100	82	120	60,98	200	25				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			
		Predikat kinerja																			
	1.01.02.1.01.02.01.32.	18. Program Peningkatan Keselamatan	Persentase AKI dan AKB	46	1.287,27		333,92	15	37,01	52	37,01	347	100	52	370,93	114	29				
	1.01.02.1.01.02.01.32.004.	18.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan Program KIA	100	1.287,27	95	333,92	80	37,01	80	37,01	100	100	175	370,93	175	29				
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			
		Predikat kinerja																			
	1.01.02.1.01.02.01.33.	19. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	80	136.642,88		25.263,28	100	27.342,75	55	28.270,10	55,27	103,39	55	53.533,38	69,09	39,18				
	1.01.02.1.01.02.01.33.002.	19.1 Pelayanan BLUD Puskesmas Kempas Jaya	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kempas Jaya	92	7.571,34	80	1.334,81	100	1.532,38	66	1.519,82	66,19	99,18	146	2.854,63	158,90	37,70				
	1.01.02.1.01.02.01.33.003.	19.2 Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Salak	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Salak	92	7.169,19	80	1.354,68	100	1.462,03	95	1.794,84	95,41	122,76	175	3.149,52	190,67	43,93				
	1.01.02.1.01.02.01.33.004.	19.3 Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Hulu	92	11.374,24	80	2.032,38	100	2.533,70	75	2.309,35	75,27	91,15	155	4.341,74	168,77	38,17				
	1.01.02.1.01.02.01.33.005.	19.4 Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Tembilahan Kota	92	9.212,21	80	1.777,09	100	1.896,95	91	2.204,73	90,70	116,22	171	3.981,82	185,54	43,22				
	1.01.02.1.01.02.01.33.006.	19.5 Pelayanan BLUD Puskesmas Gajah Mada	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Gajah Mada	92	8.701,27	80	1.708,99	100	1.842,99	83	2.675,67	83,25	145,18	163	4.384,66	177,44	50,39				
	1.01.02.1.01.02.01.33.007.	19.6 Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Piring	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Piring	92	7.040,30	80	1.344,30	100	1.391,90	66	1.123,93	66,32	80,75	146	2.468,23	159,05	35,06				
	1.01.02.1.01.02.01.33.008.	19.19 Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Pinang	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Pinang	92	2.571,09	80	507,95	100	527,57	69	640,52	68,77	121,41	149	1.148,47	161,71	44,67				
	1.01.02.1.01.02.01.33.009.	19.8 Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Lahang	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Lahang	92	6.946,11	80	1.356,66	100	1.276,52	64	1.451,78	63,59	113,73	144	2.808,44	156,07	40,43				
	1.01.02.1.01.02.01.33.010.	19.9 Pelayanan BLUD Puskesmas Sapat	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sapat	92	4.173,51	80	803,96	100	796,55	82	864,83	82,12	108,57	162	1.668,79	176,22	39,99				
	1.01.02.1.01.02.01.33.011.	19.10 Pelayanan BLUD Puskesmas Concong Luar	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Concong Luar	92	3.368,48	80	570,14	100	669,81	71	636,35	71,26	95,01	151	1.206,49	164,42	35,82				
	1.01.02.1.01.02.01.33.012.	19.11 Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Merah	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Merah	92	4.786,84	80	739,61	100	979,76	57	628,51	56,72	64,15	137	1.368,11	148,60	28,58				
	1.01.02.1.01.02.01.33.013.	19.12 Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Enok	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kuala Enok	92	3.913,64	80	701,42	100	784,27	76	688,35	76,34	87,77	156	1.389,77	169,93	35,51				
	1.01.02.1.01.02.01.33.014.	19.13 Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru	92	7.075,55	80	1.333,10	100	1.623,84	90	1.829,94	89,89	112,69	170	3.163,05	184,67	44,70				
	1.01.02.1.01.02.01.33.015.	19.14 Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Keritang	92	2.439,90	80	480,95	100	477,67	100	755,93	100,00	158,25	180	1.236,88	195,65	50,69				
	1.01.02.1.01.02.01.33.016.	19.15 Pelayanan BLUD Puskesmas Enok	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Enok	92	3.763,77	80	645,02	100	619,49	79	541,79	78,86	87,46	159	1.186,81	172,67	31,53				
	1.01.02.1.01.02.01.33.017.	19.16 Pelayanan BLUD Puskesmas Pengalihan Enok	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Penealihan Enok	92	4.882,00	80	937,08	100	853,53	62	988,16	61,72	115,77	142	1.925,25	154,05	39,44				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.01.33.018.	19,12 Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Kijang	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Kijang	92	10.652,57	80	1.727,36	100	2.026,71	68	1.429,06	68,43	70,51	148	3.156,42	161,34	29,63		
	1.01.02.1.01.02.01.33.019.	19,18 Pelayanan BLUD Puskesmas Benteng	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Benteng	92	3.301,48	80	600,69	100	640,97	79	505,66	78,86	78,89	159	1.106,34	172,68	33,51		
	1.01.02.1.01.02.01.33.020.	19,19 Pelayanan BLUD Puskesmas Selensen	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Selensen	92	4.634,28	80	784,19	100	1.170,23	92	1.006,02	92,14	85,97	172	1.790,22	187,11	38,63		
	1.01.02.1.01.02.01.33.021.	19,2 Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Mandah	92	8.411,84	80	1.756,71	100	1.300,41	52	987,97	52,22	75,97	132	2.744,68	143,72	32,63		
	1.01.02.1.01.02.01.33.022.	19,21 Pelayanan BLUD Puskesmas Batang Tumu	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Batang Tumu	92	1.832,44	80	336,94	100	254,36	86	350,89	85,94	137,95	166	687,84	180,37	37,54		
	1.01.02.1.01.02.01.33.023.	19,22 Pelayanan BLUD Puskesmas Pelangiran	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pelangiran	92	2.845,30	80	545,44	100	544,05	87	743,30	87,01	136,62	167	1.288,74	181,53	45,29		
	1.01.02.1.01.02.01.33.024.	19,23 Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Guntung	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Guntung	92	4.357,39	80	797,63	100	1.125,13	79	1.319,15	78,85	117,24	159	2.116,79	172,66	48,58		
	1.01.02.1.01.02.01.33.025.	19,24 Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Burung	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Pulau Burung	92	3.802,74	80	702,17	100	736,09	86	873,65	86,09	118,69	166	1.575,82	180,54	41,44		
	1.01.02.1.01.02.01.33.026.	19,25 Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD Puskesmas Teluk Belengkong	92	1.815,41	80	384,00	100	275,82	67	399,90	67,48	144,98	147	783,89	160,30	43,18		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								76,94	107,48	76,94	107,48			34,12	39,61		
		Predikat kinerja								T	ST	T	ST			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.01.46.	20. Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT	133	11.150,85		772,55	5	476,20	7	2.258,02	126,91	474,17	7	3.030,57	5,22	27,18		
	1.01.02.1.01.02.01.46.001.	20.1 Penyusunan Profil Daerah	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Pkm	5	486,94	1	145,24	0	32,03	1	195,63	1,00	610,78	2	340,87	40,00	70,00		
	1.01.02.1.01.02.01.46.002.	20,2 Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi (BANKEU) dan APBN (DAKL)	15	1.445,96	3	627,31	0	167,39	2	154,76	1,00	92,46	5	782,08	33,33	54,09		
	1.01.02.1.01.02.01.46.003.	20,3 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu	92	3.917,63	-		17	154,53	78	552,40	458,82	357,47	78	552,40	84,78	14,10		
	1.01.02.1.01.02.01.46.004.	Pengembangan Jaringan Komunikasi Data	Jumlah Akses Jaringan di wilayah kerja puskesmas yang ditingkatkan	28	5.300,31	-		5	122,25	23	1.355,22	460,00	1108,56	23	1.355,22	82,14	25,57		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								92,08	542,31	92,08	542,31			60,06	40,94		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			R	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								170.950,99									
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								84,10	115,08	84,10	115,08			46,62	39,07		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								ST	ST	ST	ST			R	R		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja :																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																	
3.	0.00.00.1.01.02.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	19	36.025,78	17	8.666,93	19	8.182,67	17	6.775,56	87,26	82,80	7	15.442,49	35,35	42,87	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN	
	0.00.00.1.01.02.02.01.001.	1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	640	46,80	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.02.01.002.	1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	600	4.611,00	120	1.727,74	120	1.843,00	120	1.753,75	100,00	95,16	240	3.481,50	40,00	75,50		
	0.00.00.1.01.02.02.01.006.	1,3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	18	90,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.02.02.01.008.	1,4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung Pelayanan dan Manajemen yang terjaga kebersihannya	3	1.938,05	1	389,04	2	370,25	2	369,49	100,00	99,79	3	758,53	100,00	39,14		
	0.00.00.1.01.02.02.01.010.	1,5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	20	60,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.02.01.011.	1,6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	8000	150,00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.02.01.012.	1,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	65	369,42	13	139,87	25	139,42	25	139,18	100,00	99,83	38	279,05	58,46	75,54		
	0.00.00.1.01.02.02.01.013.	1,8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37	429,50	7	422,84	0	-	0	-	0	-	7	422,84	18,92	98,45		
	0.00.00.1.01.02.02.01.015.	1,9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	620	45,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.02.01.016.	1,10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	400	120,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.02.01.017.	1,11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2190	5.774,89	438	1.936,57	1080	953,15	694	611,38	64,26	64,14	1132	2.547,95	51,69	44,12		
	0.00.00.1.01.02.02.01.018.	1,12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	227	1.501,28	45	541,73	85	617,05	71	511,90	84,09	82,96	116	1.053,63	51,31	70,18		
	0.00.00.1.01.02.02.01.019.	1,13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	788	20.839,44	32	3.509,15	177	4.259,80	177	3.389,85	100,00	79,58	335	6.899,00	42,46	33,11		
	0.00.00.1.01.02.02.01.027.	1,14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	4	50,40	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				91,39		86,91		91,39		86,91		91,39		86,91		25,92		31,15	
Predikat kinerja				ST		T		ST		T		ST		T		SR		SR	
	0.00.00.1.01.02.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	19	2.085,40	0	-	20	1.385,30	20	1.308,33	100,00	94,44	20	1.308,33	105,26	62,74		
	0.00.00.1.01.02.02.02.024.	2,1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	32	180,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.02.02.042.	2,2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	1.426,37	0	-	1	976,37	1	963,90	100,00	98,72	1	963,90	25,00	67,58		
	0.00.00.1.01.02.02.02.052.	2,3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	54	479,03	0	-	14	408,93	14	344,43	100,00	84,23	14	344,43	25,93	71,90		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		91,48		100,00		91,48		100,00		91,48		25,46		69,74	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST		ST		SR		S	
	0.00.00.1.01.02.02.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	24	100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.02.03.002.	3,1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	25	100,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.02.03.003.	3,2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	15	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
	0.00.00.1.01.02.02.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	17	870,39	15	429,67	17	260,00	15	233,10	90,00	89,65	12	662,77	69,66	76,15		
	0.00.00.1.01.02.02.05.001.	4,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Jam Karyawan/karyawati yang mendapat pendidikan pelatihan formal	597	763,32	119	420,10	150	260,00	135	233,10	90,00	89,65	254	653,20	42,55	85,57		
	0.00.00.1.01.02.02.05.002.	4,2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	560	107,07	112	9,57	0	-	0	-	0	-	112	9,57	20,00	8,93		
Rata-rata capaian kinerja (%)				90,00		89,65		90,00		89,65		90,00		89,65		31,27		47,25	
Predikat kinerja				T		T		T		T		T		T		SR		SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.02.02.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	80	21,60	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.02.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	24	21,60	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.02.02.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	80	25,20	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.02.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	20	25,20	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.02.	KESEHATAN								0	-					SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.02.16.	7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	21	200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.02.1.01.02.02.16.017.	7.1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Linen yang tersedia (Lembar)	700	200,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran program dan kegiatan																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: ketidak tersediaan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	1.01.02.1.01.02.02.19.	8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	100	570,07	19	221,37	100	98,65	57	56,31	57,04	57,08	26	277,68	25,89	48,71		
	1.01.02.1.01.02.02.19.001.	8.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	857	291,40	171	163,14	161	49,60	147	45,15	91,11	91,03	318	208,29	37,07	71,48		
	1.01.02.1.01.02.02.19.002.	8.2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah peserta penyuluhan tentang hidup sehat	5505	278,67	975	58,23	1100	49,05	251	11,16	22,81	22,75	1226	69,39	22,27	24,90		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								56,96	56,89	56,96	56,89			29,67	48,19		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : optimalisasi kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pandemi Covid19 sehingga kurang optimalnya pelayanan yang dilaksanakan																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	1.01.02.1.01.02.02.22.	9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll (%)	20	29.996,39	14	8,65	20	29.940,48	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.02.1.01.02.02.22.006.	9.1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus	Jumlah Peralatan dan Obat-obatan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus	18	2.849,41	0	-	18	2.849,41	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.22.007.	9.2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus (Dana Insentif Daerah/DID)	Jumlah Tenaga,Peralatan dan Obat-obatan Penanggulangan Penyakit Menular Wabah Virus yang disediakan	133	27.076,99	0	-	133	27.076,99	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.22.012.	9.3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi HIV AIDS	80	14,08	56	8,65	80	14,08	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Alat Kesehatan dan Bahan Operasional Pelayanan																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Peraturan Regulasi yang terus mengalami perubahan																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	1.01.02.1.01.02.02.23.	10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	61	1.007,48	0	-	100	96,37	20,00	47,04	20,00	48,81	20,00	47,04	32,68	4,84		
	1.01.02.1.01.02.02.23.009.	10.1 Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Elemen terakreditasi	100	827,48	0	-	100	46,37	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.02.23.011.	10.2 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Sistem Informasi Kesehatan	4	180,00	0	-	1	50,00	1	47,04	100,00	94,08	1	47,04	25,00	26,13		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
		A. Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sistem berjalan dengan baik																	
		B. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pandemi covid19 sehingga mengalami penundaan penilaian akreditasi RS																	
		C. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
		D. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	1.01.02.1.01.02.02.26.	11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	100	102.469,47	27	10.425,95	20	53.549,10	20	38.608,06	100,00	72,10	47	49.034,01	47,00	47,85		
	1.01.02.1.01.02.02.26.001.	11.1 Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan Rumah Sakit	3	17.400,00	1	198,70	0	-	0	-	0,00	0,00	1	198,70	33,33	1,14		
	1.01.02.1.01.02.02.26.004.	11.2 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III) yang dibangun	Jumlah Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III) yang dibangun	2	400,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.007.	11.3 Pengembangan Ruang Operasi	Jumlah Pengembangan Ruang Operasi (Unit)	1	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.014.	11.4 Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit	1	198,20	0	-	1	198,20	1	183,82	100,00	92,74	1	183,82	100,00	92,74		
	1.01.02.1.01.02.02.26.016.	11.5 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang dibangun	1	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.018.	11.6 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	Jumlah alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	213	3.833,51	58	789,96	5	2.429,26	5	1.744,88	100,00	71,83	63	2.534,84	29,58	66,12		
	1.01.02.1.01.02.02.26.019.	11.7 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Golongan Obat-obatan Rumah Sakit	45	10.676,70	45	4.765,30	44	3.810,40	44	3.675,97	100,00	96,47	45	8.441,27	98,89	79,06		
	1.01.02.1.01.02.02.26.020.	11.8 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah yang disediakan	1	250,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.021.	11.9 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Jumlah Mebeleur Rumah Sakit yang disediakan	8	300,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.022.	11.10 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lainnya)	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	41	547,94	33	191,63	24	111,25	24	111,04	100,00	99,82	57	302,67	139,02	55,24		
	1.01.02.1.01.02.02.26.024.	11.11 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Persentase dokumen cetak Administrasi Rumah Sakit (%)	80	80,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.027.	11.12 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	50	22.379,23	10	4.475,84	10	1.000,00	10	832,14	100,00	83,21	20	5.307,98	40,00	23,72		
	1.01.02.1.01.02.02.26.036.	11.13 Pemasangan Instalasi gas medis	Jumlah Pemasangan Instalasi Gas Medis	10	150,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.26.042.	11.14 Pengadaan Alat Non Medik	Jumlah Alat-alat Non Medik (Unit)	146	253,90	2	4,50	0	-	0	-	0,00	0,00	2	4,50	1,37	1,77		
	1.01.02.1.01.02.02.26.043.	11.15 Pembangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah bangunan Rumah Sakit yang dibangun	2	45.000,00	0	-	2	45.000,00	2	31.061,68	100,00	69,03	2	31.061,68	100,00	69,03		
	1.01.02.1.01.02.02.26.044.	11.16 Pengadaan Ambulance (DAK)	Jumlah Ambulance yang diadakan	1	1.000,00	0	-	1	1.000,00	1	716,30	100,00	71,63	1	716,30	100,00	71,63		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
		A. Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Peralatan dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik																	
		B. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pandemi Covid19 sehingga kurang optimalnya pelayanan yang dilaksanakan																	
		C. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
		D. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	1.01.02.1.01.02.02.27.	12. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	100	1.769,60	1	140,00	20	200,00	20	148,44	100	74,22	21	288,44	21	16,30		
	1.01.02.1.01.02.02.27.001.	12.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	5	790,00	1	140,00	1	200,00	1	148,44	100,00	74,22	2	288,44	40,00	36,51		
	1.01.02.1.01.02.02.27.016.	12.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara	8	135,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.02.27.017.	12.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang terpelihara	150	380,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET		
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)				
	1.01.02.1.01.02.02.27.018.	12,4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil jenazah yang terpelihara	3	200,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
	1.01.02.1.01.02.02.27.019.	12,5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur (Unit)	84	95,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
	1.01.02.1.01.02.02.27.020.	12,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara	110	169,60	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	74,22	100,00	74,22			6,67	6,09		
		Predikat kinerja										ST	S	ST	S			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.02.33.	13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	100	385.773,13	100	64.290,71	20	64.441,51	20	58.088,91	100,00	90,14	40	122.379,62	40,00	31,72				
	1.01.02.1.01.02.02.33.001.	13.1 Pelayanan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	100	385.773,13	100	64.290,71	100	64.441,51	100	58.088,91	100,00	90,14	40	122.379,62	40,00	31,72				
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	90,14	100,00	90,14			40,00	31,72		
		Predikat kinerja										ST	T	ST	T						
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program																			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										92,29	83,36	92,29	83,36			16,28	21,23		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										ST	T	ST	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan																			
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: pandemi covid19 sehingga banyaknya perubahan regulasi yang dilakukan																			
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																			
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																			
4.	0.00.00.1.01.02.03.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	95	16.886,33	17	2.713,11	19	2.359,79	16	1.819,61	85,34	77,11	33	4.532,71	34,75	26,84	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG			
	0.00.00.1.01.02.03.01.001.	1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	3258	15,95	652	2,39	408	2,00	368	1,80	90,20	90,09	1020	4,19	31,31	26,26				
	0.00.00.1.01.02.03.01.002.	1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	120	357,30	24	79,58	25	83,30	25	71,85	100,00	86,26	49	151,43	40,83	42,38				
	0.00.00.1.01.02.03.01.010.	1,3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	29	91,09	9	27,60	2	18,49	2	25,53	100,00	138,05	11	53,13	37,93	58,33				
	0.00.00.1.01.02.03.01.011.	1,4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	70377	71,56	14075	21,71	1580	12,10	1134	8,68	71,77	71,71	15209	30,39	21,61	42,46				
	0.00.00.1.01.02.03.01.012.	1,5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	5	19,00	1	1,00	1	1,00	1	0,91	100,00	90,50	2	1,91	40,00	10,03				
	0.00.00.1.01.02.03.01.013.	1,6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	56	88,63	0	13,90	0	-	0	-	0	-	0	13,90	0,00	15,68				
	0.00.00.1.01.02.03.01.014.	1,7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	149	58,82	21	13,24	1	9,60	1	6,09	100,00	63,41	22	19,33	14,97	32,86				
	0.00.00.1.01.02.03.01.016.	1,8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	21708	178,12	3575	28,50	270	24,88	231	21,10	85,56	84,81	3806	49,60	17,53	27,85				
	0.00.00.1.01.02.03.01.017.	1,9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12730	619,29	1604	84,05	47	99,48	20	40,21	41,50	40,42	1623	124,27	12,75	20,07				
	0.00.00.1.01.02.03.01.018.	1,1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	328	1.345,93	66	316,43	4	214,24	4	262,44	100,00	122,50	70	578,87	21,34	43,01				
	0.00.00.1.01.02.03.01.019.	1,11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	587	14.040,65	117	2.124,70	53	1.894,70	53	1.381,01	100,00	72,89	170	3.505,71	28,96	24,97				
		Rata-rata capaian kinerja (%)										88,90	86,06	88,90	86,06			24,29	31,26		
		Predikat kinerja										T	T	T	T						
	0.00.00.1.01.02.03.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	96	321,19	10	72,75	20	24,80	20	24,26	98	97,82	30	97,01	31	30,20				
	0.00.00.1.01.02.03.02.022.	2,1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	7	100,19	1	40,00	0	-	0	-	0,00	0,00	1	40,00	14,29	39,92				
	0.00.00.1.01.02.03.02.024.	2,2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	103	61,30	21	18,05	5	22,50	2	8,08	40,00	35,91	23	26,13	22,33	42,63				
	0.00.00.1.01.02.03.02.028.	2,3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	224	60,30	45	14,70	4	1,30	1	0,40	25,00	30,77	46	15,10	20,33	25,04				
	0.00.00.1.01.02.03.02.042.	2,4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	4,00	0	-	16	15,78	16	15,78	100,00	100,00	3	3,16	78,90	78,90				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.02.03.02.052.	2.5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	95,40	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								70,00	67,96	70,00	67,96			50,62	60,77		
		Predikat kinerja								S	S	S	S			SR	R		
	0.00.00.1.01.02.03.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	40	139,00	20	51,00	0	-	0	-	0,00	0,00	20	51,00	50,00	36,69		
	0.00.00.1.01.02.03.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	347	139,00	69	51,00	0	-	0	-	0,00	0,00	69	51,00	19,88	36,69		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			19,88	36,69		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.02.03.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	74	144,16	0	-	72	2,16	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.03.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	77	144,16	0	-	5	9,96	5	9,96	100,00	100,00	5	9,96	5,99	6,91		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			5,99	6,91		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.03.	KESEHATAN																	
	1.01.02.1.01.02.03.19.	5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyampaian Informasi kesehatan	60	26,50	38	16,65	100	9,661,13	0	-	0,00	0,00	38	16,65	62,83	62,83		
	1.01.02.1.01.02.03.19.001.	5.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	56	26,50	35	16,65	1	0,50	0	-	0,00	0,00	35	16,65	62,83	62,83		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			62,83	62,83		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.03.22.	6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi penanggulangan penyakit menular	80	3,40	0	-	100	1,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.03.22.016.	6.1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4	3,40	0	-	1	1,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	1.01.02.1.01.02.03.23.	7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	20	375,00	20	374,41	0,00	-	0	-	20,00	374,41	100	374,41	500,00	99,84		
	1.01.02.1.01.02.03.23.001.	7.1 Penyusunan Standar Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit Dokumen yang disediakan	1	375,00	1	374,41	0,00	-	0	-	0,00	0,00	1	374,41	100,00	99,84		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	99,84		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			ST	ST		
	1.01.02.1.01.02.03.26.	8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	26.043,74	18	773,71	20	6.751,50	12	5.546,92	60,26	82,16	30	6.320,63	30,05	24,27		
	1.01.02.1.01.02.03.26.001.	8.1 Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Fasilitas Rumah Sakit DED yang disediakan	5	244,20	1	196,03	0	-	0	-	0,00	0,00	1	196,03	20,00	80,27		
	1.01.02.1.01.02.03.26.004.	8.2 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)	Jumlah Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III) yang dibangun	10	0,50	0	-	1	0,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.03.26.016.	8.3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang dibangun	4	1,00	0	-	1	1,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.03.26.018.	8.4 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	10	519,96	2	157,83	1	1.657,27	1	911,44	100,00	55,00	3	1.069,27	30,00	205,65		
	1.01.02.1.01.02.03.26.019.	8.5 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Obat-obatan Rumah Sakit yang disediakan	5	365,32	1	97,10	1	165,66	1	129,75	100,00	78,32	2	226,86	40,00	62,10		
	1.01.02.1.01.02.03.26.020.	8.6 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah yang disediakan	2	1.135,95	1	272,61	0	-	0	-	0,00	0,00	1	272,61	50,00	24,00		
	1.01.02.1.01.02.03.26.023.	8.7 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit yang disediakan	26	624,00	3	50,14	13	76,80	8	40,21	61,54	52,36	11	90,35	42,31	14,48		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.03.26.027.	8,8 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	380	23.152,82	15	-	1	4.850,27	1	4.465,52	100,00	92,07	77	4.465,52	20,26	19,29		
	1.01.02.1.01.02.03.26.036.	8,9 Pemasangan Instalasi gas medis	Jumlah Pemasangan Instalasi Gas Medis	1	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								51,65	39,68	51,65	39,68			26,08	46,50		
		Predikat kinerja								R	SR	R	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.03.27.	9. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	80	96,13	0	-	16	408,13	8	367,33	50,00	90,00	8	367,33	10,00	382,10		
	1.01.02.1.01.02.03.27.001.	9,1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah Ruangan/bangunan Rumah sakit yang terpelihara	4	4,99	0	-	1	325,99	1	325,99	100,00	100,00	1	325,99	25,00	6528,32		
	1.01.02.1.01.02.03.27.016.	9,2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara	4	4,00	0	-	1	1,00	0	1,00	0,00	100,00	0	1,00	0,00	25,00		
	1.01.02.1.01.02.03.27.017.	9,3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang terpelihara	1	83,14	0	-	1	80,14	1	40,33	100,00	50,33	1	40,33	100,00	48,51		
	1.01.02.1.01.02.03.27.018.	9,4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil lenazah	Jumlah Ambulance/Mobil lenazah yang terpelihara	8	4,00	0	-	2	1,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	62,58	50,00	62,58			31,25	1650,46		
		Predikat kinerja								SR	R	SR	R			SR	ST		
	1.01.02.1.01.02.03.33.	10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	100	11.441,00	18	2.155,04	20	2.500,00	0	-	0,00	0,00	18	2.155,04	18,00	18,84		
	1.01.02.1.01.02.03.33.001.	10.1 Pelayanan	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD RSUD Tengku Sulung	99	11.441,00	86	2.155,04	90	2.500,00	0	-	0,00	0,00	86	2.155,04	87,07	18,84		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			87,07	18,84		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			T	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program							1.338,54		862,01				1.546,09				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								45,07	44,53	45,07	44,53			45,33	223,79		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								SR	SR	SR	SR			R	ST		
A		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik masih belum selesai pengadaannya baik berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog																	
C		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
5.	0.00.00.1.01.02.04.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	15.853,96	7	3.755,26	20	2.393,67	20	3.292,57	100,00	137,55	27	7.047,83	26,68	44,45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA	
	0.00.00.1.01.02.04.01.001.	1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	1800	7,50	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.002.	1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	48	12,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.006.	1,3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	30	10,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.008.	1,4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	50	318,60	10	64,80	10	16,20	10	16,20	100,00	100,00	20	81,00	40,00	25,42		
	0.00.00.1.01.02.04.01.009.	1,5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	42	36,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.010.	1,6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	10	19,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.011.	1,7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	25498	88,91	5101	67,85	70	1,75	70	1,75	100,00	100,00	5171	69,60	20,28	78,27		
	0.00.00.1.01.02.04.01.016.	1,8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	576	12,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.017.	1,9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	40	14,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.01.018.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	168	731,80	34	409,31	5	31,37	5	31,37	100,00	100,00	39	440,68	23,21	60,22		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.02.04.01.019.	1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	457	14.461,35	91	3.213,30	71	2.335,95	71	3.234,85	100,00	138,48	162	6.448,15	35,45	44,59		
	0.00.00.1.01.02.04.01.027.	1.12 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	20	142,80	0	-	4	8,40	4	8,40	100,00	100,00	4	8,40	20,00	5,88		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	107,70	100,00	107,70			11,58	17,87		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.01.02.04.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	976,18	20	264,43	20	24,50	0	-	0,00	0,00	20	264,43	20,00	27,09		
	0.00.00.1.01.02.04.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	4	68,00	0	-	1	17,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.009.	2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	35	377,98	7	264,43	0	-	0	-	0,00	0,00	7	264,43	20,00	69,96		
	0.00.00.1.01.02.04.02.010.	2.3 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	1	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.017.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.022.	2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	60,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.024.	2.6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	8	56,70	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.026.	2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	2	60,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.028.	2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	26	60,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.029.	2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	6	60,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.02.04.02.052.	2.10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	156	203,50	0	-	4	7,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			2,00	7,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.02.04.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	80	242,00	0	-	100	2,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.04.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	500	152,00	0	-	5	2,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.02.04.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	560	90,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.02.04.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	100	518,73	20	352,39	20	8,27	20	5,55	100,00	67,14	40	357,94	40,00	69,00		
	0.00.00.1.01.02.04.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	69	518,73	14	352,39	1	8,27	1	5,55	100,00	67,14	15	357,94	21,74	69,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	67,14	100,00	67,14			21,74	69,00		
		Predikat kinerja								ST	S	ST	S			SR	S		
	1.01.02.1.01.02.04.	KESEHATAN								0	-								
	1.01.02.1.01.02.04.16.	5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	80	30,00		-	0		0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.16.010.	5.1 Pelayanan jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jampersal	Jumlah peserta jamkesmas dan jampersal yang mendapatkan Pelayanan	4	30,00		-	0		0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.04.23.	6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	73	153,00		-	100	5,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.23.001.	6.1 Penyusunan Standar Kesehatan	Persentase Penyusunan Standar Kesehatan	5	153,00		-	1	5,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.04.25.	7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	72	120,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.02.1.01.02.04.25.036.	7.1 Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang disediakan	7	120,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.04.26.	8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	100	87.352,60	100	15.139,11	100	16.239,66	77	13.847,13	77,40	85,27	89	28.986,24	35,48	33,18		
	1.01.02.1.01.02.04.26.001.	8.1 Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Fasilitas Rumah Sakit	11	942,95	3	228,46	1	197,45	1	157,11	100,00	79,57	4	385,57	36,36	40,89		
	1.01.02.1.01.02.04.26.016.	8.2 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang dibangun	4	44,95		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.017.	8.3 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi	4	90,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.018.	8.4 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	10	1.803,62		-	5	1.606,92	4	1.166,77	78,00	72,61	4	1.166,77	39,00	64,69		
	1.01.02.1.01.02.04.26.019.	8.5 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Obat-obatan Rumah Sakit yang disediakan	49	1.080,53		-	10	1.022,59	10	700,14	96,00	68,47	10	700,14	19,59	64,80		
	1.01.02.1.01.02.04.26.020.	8.6 Pengadaan Ambulance/Mobil lenazah	Jumlah Ambulance/Mobil lenazah yang disediakan	60	92,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.021.	8.7 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Jumlah Mebeleur Rumah Sakit yang disediakan	1	60,00		-		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.022.	8.8 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lainnya)	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang disediakan	1	80,00		-		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.023.	8.9 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit yang disediakan	1	50,00		-		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.025.	8.1 Pengembangan Tipe Rumah Sakit	Persentase Pengembangan Tipe Rumah Sakit	3	80,00				-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.027.	8.11 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Alat-alat Rumah Sakit yang disediakan	150	57.038,05	26	9.991,36	30	11.111,01	26	10.798,11	88,00	97,18	53	20.789,47	35,12	36,45		
	1.01.02.1.01.02.04.26.036.	8.12 Pemasangan Instalasi gas medis	Jumlah Pemasangan Instalasi Gas Medis	4	120,00		-		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.26.043.	8.13 Pembangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah bangunan Rumah Sakit (Dana Alokasi Khusus/DAK) yang dibangun	20	28.500,00	4	5.147,75	4	2.301,70	1	1.025,00	25,00	44,53	5	6.172,75	23,06	21,66		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								55,29	51,77	55,29	51,77			11,78	17,58		
		Predikat kinerja								R	R	R	R						
	1.01.02.1.01.02.04.27.	9. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	72	233,21		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.27.016.	9.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara	4	80,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.27.017.	9.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang terpelihara	1	98,21		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.02.1.01.02.04.27.018.	9.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil lenazah	Jumlah Ambulance/Mobil lenazah yang terpelihara	3	55,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.1.01.02.04.33.	10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	100	33.000,00	20	6.191,07	20	6.000,00	20	6.354,42	100,00	105,91	40	12.545,49	40,00	38,02		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.02.1.01.02.04.33.001.	10.1 Pelayanan	Persentase pelaksanaan Pelayanan BLUD RSUD Raja Musa	90	33.000,00	90	6.191,07	90	6.000,00	90	6.354,42	100,00	105,91	90	12.545,49	40,00	38,02		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	105,91	100,00	105,91			40,00	38,02		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								24.673,09									
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								71,06	66,50	71,06	66,50			8,71	14,95		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								S	S	S	S			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik masih belum selesai pengadaanya baik berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
6.	0.00.00.1.01.03.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90	42.552,26	19	9.622,51	18	11.074,69	15	10.173,28	81,95	91,86	34	19.795,79	37,50	46,52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	0.00.00.1.01.03.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	243937	39,60	61787	9,15	65000	13,50	64624	13,42	99,42	99,42	126411	22,57	51,82	57,00		
	0.00.00.1.01.03.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	600	30.714,78	120	7.741,05	10	7.982,46	10	7.832,69	100,00	98,12	130	15.573,73	21,67	50,70		
	0.00.00.1.01.03.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	80	165,44	14	28,29	40	85,00	15	29,92	37,92	35,20	29	58,21	36,46	35,18		
	0.00.00.1.01.03.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	20	182,65	4	35,31	20	73,00	20	52,98	100,00	72,58	10	88,30	48,00	48,34		
	0.00.00.1.01.03.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara /Service	80	46,24	20	15,00	20	12,50	20	12,01	100,00	96,04	40	27,01	50,00	58,40		
	0.00.00.1.01.03.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	142,06	6	68,74	30	63,96	30	63,71	100,00	99,61	14	132,45	48,00	93,23		
	0.00.00.1.01.03.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	408635	146,88	101094	43,37	250000	65,63	199228	52,30	79,69	79,69	300322	95,67	73,49	65,13		
	0.00.00.1.01.03.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	80	241,24	15	45,88	1	63,84	1	38,09	100,00	59,66	16	83,97	19,75	34,81		
	0.00.00.1.01.03.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	92	354,96	23	89,75	25	94,00	12	43,89	48,86	46,69	35	133,64	38,28	37,65		
	0.00.00.1.01.03.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4	90,81	3	59,29	10	72,00	7	46,75	70,00	64,92	4	106,04	100,00	116,76		
	0.00.00.1.01.03.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	678	4.010,99	172	1.044,80	300	783,42	206	535,85	68,67	68,40	378	1.580,65	55,75	39,41		
	0.00.00.1.01.03.01.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	246	4.208,40	0	-	65	1.147,50	65	1.063,50	100,00	92,68	65	1.063,50	26,42	25,27		
	0.00.00.1.01.03.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	1131	1.903,45	262	373,88	274	531,49	158	305,38	57,79	57,46	420	679,26	37,17	35,69		
	0.00.00.1.01.03.01.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	29	304,73	7	68,00	8	86,40	8	82,80	100,00	95,83	15	150,80	51,72	49,49		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								83,03	76,17	83,03	76,17			47,04	53,36		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	R		
	0.00.00.1.01.03.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	90	2.178,08	20	868,98	18	429,45	17	336,25	95,38	78,30	37	1.205,23	41,30	55,33		
	0.00.00.1.01.03.01.02.022.	2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	11	1.066,39	3	458,65	2	63,40	0	3,45	0,00	5,44	3	462,10	27,27	43,33		
	0.00.00.1.01.03.01.02.023.	2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	21	322,68	6	93,90	8	100,80	6	71,44	71,06	70,87	12	165,34	55,64	51,24		
	0.00.00.1.01.03.01.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	46	67,49	12	29,81	20	23,75	17	20,53	86,43	86,43	29	50,34	63,67	74,59		
	0.00.00.1.01.03.01.02.026.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	33	86,61	8	23,62	30	21,00	31	20,93	102,74	99,64	39	44,54	117,64	51,43		
	0.00.00.1.01.03.01.02.052.	2.5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	49	634,91	13	263,00	20	220,50	20	219,91	99,73	99,73	33	482,91	67,24	76,06		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								71,99	72,42	71,99	72,42			66,29	59,33		
		Predikat kinerja								S	S	S	S			T	T		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.03.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai	90	93,54	20	37,50	20	11,50	20	11,48	100,00	99,83	40	48,98	44,44	52,37		
	0.00.00.1.01.03.01.03.005.	3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	1127	93,54	304	37,50	120	11,50	120	11,48	100,00	99,83	424	48,98	37,62	52,37		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,83	100,00	99,83						
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST						
	0.00.00.1.01.03.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	771,31	13	116,08	0	-	0	-	0	-	13	116,08	14,44	15,05		
	0.00.00.1.01.03.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	150	771,31	26	116,08	0	-	0	-	0	-	26	116,08	17,33	15,05		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			17,33	15,05		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.03.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90	736,48	20	221,38	20	163,60	20	162,88	99,98	99,56	40	384,26	44,44	52,17		
	0.00.00.1.01.03.01.06.003.	5.1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	40	736,48	10	221,38	10	163,60	10	162,88	100,00	99,56	20	384,26	50,00	52,17		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,56	100,00	99,56			50,00	52,17		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			S	S		
	1.01.03.1.01.03.01.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	1.01.03.1.01.03.01.15.	6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik	857	362.379,93	53,82	70.514,79	211,9	33.494,03	53	18.677,62	25,04	55,76	107	89.192,41	12,47	24,61		
			Jumlah Jembatan yang terbangun	45	-	23	-		-	1	-	0,00		24	-	53,33			
	1.01.03.1.01.03.01.15.001.	6.1 Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen Perencanaan Jalan	98	2.155,43	21	766,44	23	474,34	23	472,57	100,00	99,63	44	1.239,02	44,90	57,48		
	1.01.03.1.01.03.01.15.004.	6.2 Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan Jembatan	36	1.438,06	6	473,84	20	1.361,53	9	858,05	45,00	63,02	15	1.331,89	41,67	92,62		
	1.01.03.1.01.03.01.15.005.	6.3 Pembangunan Jembatan	Jumlah dan panjang jembatan yang dibangun	41	12.931,36	-	-	6	1.969,25	0	1.975,25	0,00	100,30	0	1.975,25	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.03.01.15.006.	6.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan di evaluasi	20	455,56	20	106,01	20	128,89	20	201,35	100,00	156,22	40	307,36	200,00	67,47		
	1.01.03.1.01.03.01.15.008.	6.5 Pembangunan Jalan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah ruas dan panjang jalan yang di bangun dan tingkatkan	64	180.721,18	7,020	33.020,20	16	3.636,13	16	3.636,13	100,00	100,00	23	36.656,33	35,97	20,28		
	1.01.03.1.01.03.01.15.009.	6.6 Pembangunan Jalan (Pendamping Dana Alokasi Khusus)	Jumlah kegiatan Dana Alokasi Khusus yang didampingi	20	12.128,57	3	307,06	20	26,22	20	35,46	100,00	135,25	23	342,52	115,00	2,82		
	1.01.03.1.01.03.01.15.012.	6.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah kegiatan pembangunan jembatan yang dimonitoring	20	302,62	20	59,73	20	80,21	20	18,85	100,00	23,50	40	78,58	200,00	25,97		
	1.01.03.1.01.03.01.15.014.	6.8 Pembangunan Jalan Wilayah I	Jumlah panjang Jalan Baru Wilayah I yang dibangun	298	3.279,84	1,6	908,63	150	1.046,97	1	311,29	0,33	29,73	2	1.219,92	0,70	37,19		
	1.01.03.1.01.03.01.15.015.	6.9 Pembangunan Jalan Wilayah II	Jumlah panjang Jalan Baru Wilayah II yang dibangun	203	2.546,40	0,35	718,73	150	707,31	0	273,57	0,24	38,68	1	992,30	0,35	38,97		
	1.01.03.1.01.03.01.15.016.	6.1 Pembangunan Jalan Wilayah III	Jumlah panjang Jalan Baru Wilayah III yang dibangun	299	5.162,75	11,196	1.325,25	150	1.072,83	7	710,00	4,55	66,18	18	2.035,25	6,03	39,42		
	1.01.03.1.01.03.01.15.017.	6.11 Peningkatan Jalan Wilayah I	Jumlah ruas dan panjang jalan Wilayah I yang di tingkatkan	848	16.912,05	3,92	5.690,34	300	3.054,90	0	730,25	0,00	23,90	4	6.420,59	0,46	37,96		
	1.01.03.1.01.03.01.15.018.	6.12 Peningkatan Jalan Wilayah II	Jumlah ruas dan panjang jalan Wilayah II yang di tingkatkan	825	29.616,92	9,04	8.571,21	300	10.545,09	160	5.641,61	53,33	53,50	169	14.212,82	20,49	47,99		
	1.01.03.1.01.03.01.15.019.	6.13 Peningkatan Jalan Wilayah III	Jumlah ruas dan panjang Wilayah III jalan yang di tingkatkan	666	22.912,37	9,36	6.267,45	300	6.321,83	160	3.496,10	53,33	55,30	169	9.763,55	25,43	42,61		
	1.01.03.1.01.03.01.15.020.	6.14 Pembangunan Jembatan wilayah I	Jumlah dan panjang jembatan wilayah I yang dibangun	159	22.888,96	6	-	75	1.072,49	75	17,33	100,00	1,62	81	17,33	50,94	0,08		
	1.01.03.1.01.03.01.15.022.	6.15 Pembangunan Jembatan wilayah II	Jumlah dan panjang jembatan wilayah II yang dibangun	302	18.647,52	12	-	75	552,49	0	15,04	0,00	2,72	12	15,04	3,97	0,08		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.03.1.01.03.01.15.023.	6.16 Pembangunan Jembatan wilayah III	Jumlah dan panjang jembatan wilayah III yang dibangun	63	37.621,86	5	-	75	1.438,24	1	279,50	1,33	19,43	6	279,50	9,52	0,74		
	1.01.03.1.01.03.01.15.024.	6.17 Pelaksanaan Pembangunan dan Preservasi Jalan dan Jembatan, dan Penerangan Jalan Umum	Persentase Ruas Jalan yang di terangi	20	5.589,83	10	402,20	20	5,32	26	5,28	130,00	99,25	36	407,48	180,00	7,29		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								52,24	62,84	52,24	62,84			55,03	30,53		
		Predikat kinerja								R	R	R	R						
	1.01.03.1.01.03.01.17.	7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor dalam kondisi baik	473	4.535,40	2203	479,47	115	779,77	0	169,70				649,17				
	1.01.03.1.01.03.01.17.001.	7.1 Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah dokumen perencanaan	36	725,41	0	30,06	9	20,35	0	-	0,00	0,00	0	30,06	0,00	4,14		
	1.01.03.1.01.03.01.17.003.	7.2 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah panjang turap/talud/bronjong di wilayah sungai yang di bangun	321	3.537,44	106,6	449,41	250	707,79	0	167,06	0,00	23,60	107	616,47	33,21	17,43		
	1.01.03.1.01.03.01.17.004.	7.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong di wilayah sungai yang dikendalikan	20	272,56	1	-	20	51,64	0	2,64	0,00	5,12	1	2,64	5,00	0,97		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	9,57	0,00	9,57			12,74	7,51		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	1.01.03.1.01.03.01.18.	8. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	22	37.088,00	4,52	8.959,62	18	8.484,34	4	6.158,94	24,38	72,59	9	15.118,55	41,63	40,76		
			Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	22	-	-	-	18	-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	-		
	1.01.03.1.01.03.01.18.003.	8.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	45	29.874,59	10,365	8.088,69	18	7.006,22	19	4.586,50	104,76	65,46	29	12.675,19	65,40	42,43		
	1.01.03.1.01.03.01.18.004.	8.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dan Panjang Jembatan yang dipelihara	18	5.599,35	0,142	788,13	6	1.012,21	0	1.167,85	3,55	115,38	0	1.955,98	1,99	34,93		
	1.01.03.1.01.03.01.18.005.	8.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pemeliharaan Jalan yang di monitoring dan dievaluasi	20	260,16	20	46,59	20	48,50	20	18,76	100,00	38,68	40	65,35	200,00	25,12		
	1.01.03.1.01.03.01.18.007.	8.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah kegiatan pemeliharaan Jalan yang di monitoring dan dievaluasi	80	67,98	20	36,21	20	31,48	11	12,13	55,00	38,54	31	48,34	38,75	71,11		
	1.01.03.1.01.03.01.18.008.	8.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan yg dipelihara	90	1.285,92	20	-	100	385,92	20	373,70	20,00	96,83	40	373,70	44,44	29,06		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								56,66	70,98	56,66	70,98			70,12	40,53		
		Predikat kinerja								R	S	R	S						
	1.01.03.1.01.03.01.19.	9. Program rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi Turap/Talud/Bronjong yang di rehabilitasi/Pelihara	21	517,64	0	-	20	3,50	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.03.1.01.03.01.19.002.	9.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah turap/talud/bronjong yang dipelihara	16480	517,64	0	-	85	3,50	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.03.1.01.03.01.23.	10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	100	1.770,72		227,35	20	476,56	0	299,89	0,00	62,93	0	527,24	0,00	29,78		
	1.01.03.1.01.03.01.23.004.	10.1 Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang tersedia	2	11,60	-	-	1	6,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.03.01.23.005.	10.2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang disediakan	56	73,90	-	-	1	2,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.03.01.23.010.	10.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang direhabilitasi	28	755,96	-	76,69	5	158,96	0	69,83	0,00	43,93	0	146,52	0,00	19,38		
	1.01.03.1.01.03.01.23.012.	10.4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang direhabilitasi	92	929,26	-	150,66	25	308,60	21	230,06	82,40	74,55	21	380,72	22,39	40,97		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								20,60	29,62	20,60	29,62			5,60	15,09		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET								
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)										
		Predikat kinerja																									
	1.01.03.1.01.03.01.24.	11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan irigasi dan luas irigasi kondisi baik	75	16.802,43		4.007,96	15	2.632,86	0	1.797,11	0,00	68,26	0	5.805,07	0,00	34,55										
	1.01.03.1.01.03.01.24.010.	11.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara	206	325,51	0	178,69	12	23,88	0	-	0,00	0,00	0	178,69	0,00	54,90										
	1.01.03.1.01.03.01.24.015.	11.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah di Bangun	Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara	45	3.408,72	0	652,56	12	1.205,63	0	1.671,79	0,00	138,67	0	2.324,35	0,00	68,19										
	1.01.03.1.01.03.01.24.017.	11.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang di monitoring dan dievaluasi	20	232,12	0	38,55	20	102,49	5	12,99	25,00	12,68	5	51,54	25,00	22,20										
	1.01.03.1.01.03.01.24.018.	11.4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang direhabilitasi dan dipelihara	89540	12.836,08	0	3.138,17	22385	1.300,86	0	112,32	0,00	8,63	0	3.250,49	0,00	25,32										
		Rata-rata capaian kinerja (%)																6,25	39,99	6,25	39,99			6,25	42,65		
		Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR						
	1.01.03.1.01.03.01.25.	12. Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	19	453,04		-	20	3,60	0	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.25.001.	12.1 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Jumlah prasarana pengambilan dan saluran pembawa dibangun	201	271,03	0	-	1	1,80	0	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.25.009.	12.2 Izin pengelolaan air baku/air permukaan	Jumlah izin pengelolaan air baku/air permukaan yang di keluarkan	100	182,01	4	-	20	1,80	0	-	0	-	0	-	0	-										
		Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR						
	1.01.03.1.01.03.01.26.	13. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	373	30.693,87	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.26.001.	13.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	345	22.961,37	0	-	98	1.966,95	9	188,19	10	9,57	9	188,19	3	0,82										
	1.01.03.1.01.03.01.26.002.	13.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan	708	750,00	0	-	177	224,21	0	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.26.003.	13.3 Perencanaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Dokumen DED Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin yang disusun	8	754,75	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.26.004.	13.4 Penyediaan Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Tangki Septik Skala Komunal yang dibangun (Dana Alokasi Khusus)	75	6.227,75	0	-	25	2.287,50	0	-	0	-	0	-	0	-										
		Rata-rata capaian kinerja (%)																9,57	9,57	9,57	9,57			2,72	0,82		
		Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.03.1.01.03.01.27.	14. Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	71	12.247,35	19	-	71	11.407,42	19	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.27.001.	14.1 Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB yang dilaksanakan	360	600,00	21	-	0	-	21	53,68	0	-	42	53,68	12	8,95										
	1.01.03.1.01.03.01.27.002.	14.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RTBL dan IMB	jumlah kegiatan monitoring terhadap izin yang telah dikeluarkan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-										
	1.01.03.1.01.03.01.27.003.	14.3 Pembangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang dibangun	96	9.800,00	7	-	24	11.276,04	24	9.548,57	100	84,68	31	9.548,57	32	97,43										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.03.1.01.03.01.27.004.	14.4 Pendataan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan	333	540,00	21	-	72	131,39	32	57,63	44	43,87	53	57,63	16	10,67		
	1.01.03.1.01.03.01.27.005.	14.5 Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang di rehabilitasi	4	753,10	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.03.1.01.03.01.27.006.	14.6 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tembilahan	4	554,25	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)				72,22		64,27		72,22		64,27						9,98		19,51	
Predikat kinerja				S		R		S		R						SR			
	1.01.03.1.01.03.01.28.	15. Program pengendalian banjir	Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik	459	53.650,72	113,964	18.639,37	75	15.619,54	65414	7.818,65	#####	50,06	65528	26.458,02	14276,24	49,32		
	1.01.03.1.01.03.01.28.007.	15.1 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi	0	-	113,964	18.512,77	0	4.333,03	65414	-	0,00	0,00	65528	18.512,77	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.03.01.28.011.	15.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali yang di monitoring dan dievaluasi	20	527,87	11,00	126,60	20	273,25	10	43,69	50,00	15,99	21	170,29	105,00	32,26		
	1.01.03.1.01.03.01.28.013.	15.3 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Wilayah I	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi Wilayah I	373	12.602,99	1,600	-	25	1.014,42	4	336,96	17,20	33,22	6	336,96	1,58	2,67		
	1.01.03.1.01.03.01.28.014.	15.4 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Wilayah II	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi Wilayah II	41	20.436,88	37,618	-	25	5.484,42	37	4.282,47	149,20	78,08	75	4.282,47	182,73	20,95		
	1.01.03.1.01.03.01.28.015.	15.4 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Wilayah III	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi Wilayah III	45	20.082,99	74,746	-	25	4.514,42	24	3.155,53	95,25	69,90	99	3.155,53	219,02	15,71		
Rata-rata capaian kinerja (%)				77,91		49,30		77,91		49,30						127,08		17,90	
Predikat kinerja				T		SR		T		SR									
	1.01.03.1.01.03.01.30.	16. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	13466	28.303,73	20	-	4666	3.283,63	20	213,35	0,00	0,00	0	213,35	0,00	0,75		
	1.01.03.1.01.03.01.30.003.	16.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	5700	8.441,23	20	-	1400	2.083,20	20	105,65	1,43	5,07	40	105,65	0,70	1,25		
	1.01.03.1.01.03.01.30.009.	16.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Alokasi Khusus)	6000	16.491,19	0	-	1500	49,35	1500	49,35	100,00	100,00	1500	49,35	25,00	0,30		
	1.01.03.1.01.03.01.30.012.	16.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PAMSIMAS	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pamsimas	340	530,99	3	-	85	49,40	3	5,97	3,53	12,08	6	5,97	1,76	1,12		
	1.01.03.1.01.03.01.30.013.	16.4 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Jumlah dokumen DED Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	20	702,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.03.01.30.014.	16.5 Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	8	500,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.03.01.30.015.	16.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur Pedesaan	54	500,00	0	-	11	96,56	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.03.1.01.03.01.30.016.	16.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Insentif Daerah/DID)	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Insentif Daerah/DID)	1766	1.137,83	0	-	1766	1.005,13	100	52,38	5,66	5,21	100	52,38	5,66	4,60		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								5,66	5,21	5,66	5,21			5,66	4,60		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.03.1.01.03.01.31.	17. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	89	557,85	0	68,40	18	55,90	0	32,31	0,00	57,79	0	100,71	0,00	18,05		
	1.01.03.1.01.03.01.31.001.	17.1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Terkait Peraturan Jasa Konstruksi	4	557,85	0	68,40	1	55,90	0	32,31	0,00	57,79	0	100,71	0,00	18,05		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	57,79	0,00	57,79			0,00	18,05		
		Predikat kinerja								SR	R	SR	R			SR	R		
	1.01.03.1.01.03.01.32.	18. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	89	1.014,17	0	164,11	18	126,30	0	83,70	0,00	66,27	0	247,81	0,00	24,43		
	1.01.03.1.01.03.01.32.002.	18.1 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang diberdayakan	49	1.014,17	0	164,11	10	126,30	10	103,52	100,00	81,97	10	267,63	20,41	26,39		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	81,97	100,00	81,97			20,41	26,39		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.01.03.1.01.03.01.33.	19. Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	89	520,47		105,16	18	92,96	0	30,52	0,00	32,83	0	135,68	0,00	26,07		
	1.01.03.1.01.03.01.33.001.	19.1 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang didata	120	520,47		105,16	30	92,96	0	30,52	0,00	32,83	0	135,68	0,00	26,07		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	32,83	0,00	32,83			0,00	26,07		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.03.1.01.03.01.34.	20. Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	100	1.592,60	50	218,03	50	788,29	50	483,68	100,00	61,36	100	701,71	100,00	44,06		
	1.01.03.1.01.03.01.34.008.	20.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW yang tersedia	6	772,98	2	43,84	3	508,58	1	271,40	33,33	53,36	3	315,24	50,00	40,78		
	1.01.03.1.01.03.01.34.010.	20.2 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang yang tersedia	351	819,62	55	174,19	40	279,72	40	212,28	100,00	75,89	95	386,47	27,07	47,15		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								66,67	64,63	66,67	64,63			38,53	43,97		
		Predikat kinerja								S	R	S	R			R	R		
	1.01.03.1.01.03.01.35.	21. Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	89	1.271,39	100	143,82	18	223,94	100	138,22	561,80	61,72	200	282,05	224,72	22,18		
	1.01.03.1.01.03.01.35.002.	21.1 Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen NSPK pemanfaatan ruang yang diterbitkan	102	1.271,39	172	143,82	30	223,94	25	138,22	83,33	61,72	197	282,05	193,14	22,18		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								83,33	61,72	83,33	61,72			193,14	22,18		
		Predikat kinerja								T	R	T	R			ST	SR		
	1.01.03.1.01.03.01.36.	22. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	89	277,06	75	19,44	18	160,86	100	13,85	561,80	8,61	175	33,28	196,63	12,01		
	1.01.03.1.01.03.01.36.006.	22.1 Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	16	277,06	15	19,44	4	160,86	0	13,85	0,00	8,61	15	33,28	93,75	12,01		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	8,61	0,00	8,61			93,75	12,01		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			ST	SR		
	1.01.04.1.01.03.01.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN							13.713,85	0	-								
	1.01.04.1.01.03.01.16.	23. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	90	4.663,10	0	-	90	2.191,16	10	188,19	11,11	8,59	10	188,19	11,11	4,04		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.04.1.01.03.01.16.002.	23.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	98	4.435,24	0	-	98	1.966,95	10	188,19	10,20	9,57	10	188,19	10,20	4,24		
	1.01.04.1.01.03.01.16.010.	23.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan	177	227,86	10	-	177	224,21	10	-	5,65	0,00	20	-	11,30	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								7,93	4,78	7,93	4,78			10,75	2,12		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.04.1.01.03.01.19.	24. Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	70	5.883,37	15	-	70	11.522,69	12	9.659,88	16,68	83,83	27	9.659,88	38,11	164,19		
	1.01.04.1.01.03.01.19.004.	24.1 Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB yang dilaksanakan	90	117,76	9	-	90	115,27	45	53,68	50,00	46,57	54	53,68	60,00	45,59		
	1.01.04.1.01.03.01.19.006.	24.2 Pembangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang dibangun	24	5.604,23	0	-	24	11.276,04	24	9.548,57	100,00	84,68	24	9.548,57	100,00	170,38		
	1.01.04.1.01.03.01.19.007.	24.3 Pendataan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan	72	161,38	6	-	72	131,39	32	57,63	43,87	43,87	38	57,63	52,20	35,71		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								64,62	58,37	64,62	58,37			70,73	83,89		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			S	T		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								103.026,60	56.449,49								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								42,71	46,96	42,71	46,96			41,05	26,99		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik masih belum selesai pengadaannya baik berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
7.	0.00.00.1.01.04.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	92	13.529,22	13	2.304,19	18	2.300,43	18	2.042,02	99,74	88,77	31	4.346,20	33,89	32,12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	0.00.00.1.01.04.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran	12000	64,50	668	3,59	2400	12,90	2400	12,90	100,00	99,99	3068	16,49	25,57	25,57		
	0.00.00.1.01.04.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	240	1.586,07	48	236,94	4	235,80	4	233,15	100,00	98,88	52	470,08	21,67	29,64		
	0.00.00.1.01.04.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Periznannya	140	86,00	22	9,78	30	14,25	30	13,65	100,00	95,79	52	23,43	36,89	27,25		
	0.00.00.1.01.04.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	1200	290,57	240	45,96	4	45,85	4	48,32	100,00	105,39	244	94,29	20,33	32,45		
	0.00.00.1.01.04.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service	3	56,46	2	1,54	3	10,00	3	9,66	100,00	96,56	1	11,20	32,02	19,83		
	0.00.00.1.01.04.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	31	339,91	7	59,73	31	62,70	31	62,32	100,00	99,39	15	122,05	49,03	35,91		
	0.00.00.1.01.04.01.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	364433	243,48	13000	42,80	62500	41,36	62351	41,26	99,76	99,76	75351	84,06	20,68	34,52		
	0.00.00.1.01.04.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	5	46,40	1	8,48	5	8,48	5	10,68	100,00	125,96	2	19,15	48,00	41,27		
	0.00.00.1.01.04.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	104	142,74	3	15,88	18	26,52	15	19,28	83,33	72,70	18	35,16	17,21	24,63		
	0.00.00.1.01.04.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	3	386,72	3	61,60	3	69,11	3	58,76	100,00	85,02	1	120,36	40,00	31,12		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.04.01.01.017.	1,11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan makan dan minum rapat yang disediakan	98	121,24	142	13,20	14	18,13	18	22,40	128,57	123,55	160	35,60	162,98	29,36		
	0.00.00.1.01.04.01.01.018.	1,12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	1164	5.804,02	167	988,92	178	892,95	127	631,19	71,35	70,69	294	1.620,10	25,27	27,91		
	0.00.00.1.01.04.01.01.019.	1,13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga jasa administrasi/ Teknis yang dibayarkan	175	2.508,00	35	486,00	35	501,60	35	501,60	100,00	100,00	70	987,60	40,00	39,38		
	0.00.00.1.01.04.01.01.020.	1,14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	973	1.331,12	98	210,98	199	241,98	213	258,06	106,81	106,65	311	469,04	31,95	35,24		
	0.00.00.1.01.04.01.01.027.	1,15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah jasa petugas Keamanan yang dibayarkan	30	522,00	8	118,80	8	118,80	8	118,80	100,00	100,00	16	237,60	53,33	45,52		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								99,32	98,69	99,32	98,69			41,66	31,97		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.01.04.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	92	2.321,55	14	62,02	18	121,78	17	231,21	93,00	189,86	32	293,23	34,22	12,63		
	0.00.00.1.01.04.01.02.003.	2,1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	250,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.04.01.02.005.	2,2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	20	600,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.04.01.02.007.	2,3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.04.01.02.009.	2,4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	3	66,20	1	12,65	0	-	0	-	0	-	1	12,65	40,00	19,11		
	0.00.00.1.01.04.01.02.022.	2,5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	21	409,15	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.04.01.02.023.	2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	25	166,25	5	30,95	5	33,00	5	27,44	100,00	83,15	10	58,39	40,00	35,12		
	0.00.00.1.01.04.01.02.024.	2,7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	125	93,75	12	8,92	25	18,50	18	12,70	72,00	68,63	30	21,61	24,00	23,06		
	0.00.00.1.01.04.01.02.026.	2,8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	2	67,50	1	9,50	2	20,95	2	20,95	100,00	100,00	3	30,45	171,00	45,11		
	0.00.00.1.01.04.01.02.052.	2,9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11	668,70	-	-	9	170,12	9	170,12	100,00	100,00	9	170,12	81,82	25,44		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								93,00	87,95	93,00	87,95			39,65	16,43		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.1.01.04.01.05.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	92	367,00	14	49,53	0	-	0	-	0	-	14	49,53	15	13,49		
	0.00.00.1.01.04.01.05.001.	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	36	367,00	5	49,53	0	-	0	-	0	-	5	49,53	14	13,49		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			13,89	13,49		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.04.01.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	92	1.140,54	18	218,51	18	215,68	22	264,35	117,29	122,57	40	482,86	43,02	42,34		
	0.00.00.1.01.04.01.06.001.	4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	810,74	1	154,16	1	23,69	1	23,69	100,00	100,00	2	177,85	40,00	21,94		
	0.00.00.1.01.04.01.06.003.	4.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5	329,80	1	64,34	1	240,66	1	240,66	100,00	100,00	2	305,00	40,00	92,48		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			40,00	57,21		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			R	T		
	1.01.03.1.01.04.01.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							4.146,08	0	-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.03.1.01.04.01.16.	5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	9	8.538,55	18,20	512,56	7	4.146,08	7	2.733,24	95,00	65,92	25	3.245,80	276,11	38,01		
	1.01.03.1.01.04.01.16.001.	5.1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen DED Pembangunan Saluran Drainase yang disusun	2	4,75	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	1.01.03.1.01.04.01.16.003.	5.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	9	7.950,93	1,7	471,09	7,00	3.688,08	7	2.600,25	95,00	70,50	7	3.071,34	73,89	38,63		
	1.01.03.1.01.04.01.16.005.	5.3 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Jumlah Lokasi Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di Kab. Inhil	4	317,90	0	-	2	259,42	0	14,87	0,00	5,73	0	14,87	0,00	4,68		
	1.01.03.1.01.04.01.16.006.	5.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	330	264,97	60	41,47	110	198,58	95	118,13	86,00	59,49	155	159,60	46,85	60,23		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		60,33		45,24		60,33		45,24		60,33		45,24		30,18			
		Predikat kinerja		R		SR		R		SR		R		SR		SR			
	1.01.03.1.01.04.01.30.	6. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	2900	6.270,57		3.985,29	0	-	0	-	0	-	0	3.985,29	0	63,56		
	1.01.03.1.01.04.01.30.003.	6.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1400	2.071,12		2.078,70	0	-	0	-	0	-	0	2.078,70	0	100,37		
	1.01.03.1.01.04.01.30.009.	6.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Alokasi Khusus)	1500	4.122,80		1.811,22	0	-	0	-	0	-	0	1.811,22	0	43,93		
	1.01.03.1.01.04.01.30.012.	6.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PAMSIMAS	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pamsimas	43	76,66		95,37	0	-	0	-	0	-	0	95,37	0	124,41		
	1.01.03.1.01.04.01.30.013.	6.3 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Jumlah dokumen DED Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.03.1.01.04.01.30.014.	6.4 Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.03.1.01.04.01.30.015.	6.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Infrastruktur Pedesaan	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR			
	1.01.04.1.01.04.01.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
	1.01.04.1.01.04.01.15.	7. Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat	17	151.620,32	2	15.790,36	3	23.106,79	3	18.457,82	100,00	79,88	5	34.248,18	28,06	22,59		
			Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	85						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.04.1.01.04.01.15.008.	7.1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sederhana Layak Huni	Jumlah monitoring dan evaluasi rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan	499	550,00	0	-	12	0,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.04.1.01.04.01.15.009.	7.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Layak Huni	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang dibangun	6201	16.155,07	55	142,27	5	113,34	1	49,41	20,00	43,59	56	191,68	0,90	1,19		
	1.01.04.1.01.04.01.15.011.	7.3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan pemukiman yang dilaksanakan	984	1.449,43	70	240,94	232	445,48	165	361,46	71,12	81,14	235	602,40	23,88	41,56		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.04.1.01.04.01.15.012.	7.4 Pengembangan Kawasan Pemukiman	Jumlah Kawasan Permukiman yang dikembangkan	3	770,00	0	-			0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	1.01.04.1.01.04.01.15.016.	7.5 Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah I	Panjang Jalan yang di bangun pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah I	98	63.151,70	27,80	10.169,83	23	11.531,71	23	9.976,73	100,00	86,52	51	20.146,56	51,84	31,90		
	1.01.04.1.01.04.01.15.017.	7.6 Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah II	Panjang Jalan yang di bangun pada Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah II	71	31.424,95	7,19	1.542,69	6	5.646,25	6	3.742,81	100,00	66,29	13	5.285,50	18,58	16,82		
	1.01.04.1.01.04.01.15.018.	7.7 Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah III	Panjang Jalan yang di bangun pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah III	35	24.632,09	6,81	3.511,36	9	4.258,51	9	3.378,67	100,00	79,34	16	6.890,03	45,18	27,97		
	1.01.04.1.01.04.01.15.021.	7.8 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	425	901,08	70	142,71	134	337,14	128	191,32	95,52	56,75	198	334,04	46,59	37,07		
	1.01.04.1.01.04.01.15.023.	7.9 Penyusunan Perencanaan Prasarana Pemukiman	Jumlah Dokumen DED Perencanaan Prasarana Per mukiman dan Jalan Jerambah di Kab. Inhil	30	1.786,01	13	40,55	1	656,08	1	646,52	100,00	98,54	14	687,07	46,67	38,47		
	1.01.04.1.01.04.01.15.024.	7.10 Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pemukiman	Luas tanah untuk kawasan pemukiman yang disediakan	10	10.800,00	0	-	11	117,78	11	110,90	100,00	94,16	11	110,90	110,00	1,03		
Rata-rata capaian kinerja (%)										85,83	75,79	85,83	75,79			42,95	24,50		
Predikat kinerja										T	S	T	S			R	SR		
	1.01.04.1.01.04.01.16.	8. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	143	13.054,29	42	3.869,08	25	2.287,50	0	8,54	0,00	0,37	42	3.877,62	29,64	29,70		
	1.01.04.1.01.04.01.16.002.	8.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	93	8.674,27	19	1.760,49	0	-	0	-	0,00	0,00	19	1.760,49	20,30	20,30		
	1.01.04.1.01.04.01.16.007.	8.2 Penyediaan Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Tangki Septik Skala Komunal yang dibangun (Dana Alokasi Khusus)	50	4.151,83	25	2.042,40	25	2.287,50	0	8,54	0,00	0,37	25	2.050,95	49,19	49,40		
	1.01.04.1.01.04.01.16.010.	8.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan	162	228,20	47	66,19	0	-	0	-	0,00	0,00	47	66,19	29,00	29,00		
	1.01.04.1.01.04.01.16.013.	8.4 Perencanaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Dokumen DED Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin yang disusun	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,37	0,00	0,37			24,62	24,67		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.04.1.01.04.01.17.	9. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	23	5.517,17	3	600,77	0	-	0	-	0	-	3	600,77	11	10,89		
	1.01.04.1.01.04.01.17.003.	9.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	Jumlah Penerima Program KOTAKU	40	5.517,17	4	600,77	0	-	0	-	0	-	4	600,77	11	10,89		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			10,89	10,89		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.04.1.01.04.01.18.	10. Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah daya tampung TPU	4	6.900,00	0	79,82	1	827,55	0	696,38	0,00	84,15	0	776,21	1,16	11,25		
	1.01.04.1.01.04.01.18.006.	10.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana Prasarana TPU yang dibangun	93	4.500,00	0	-	4	763,70	2	662,58	59,00	86,76	2	662,58	2,54	14,72		
	1.01.04.1.01.04.01.18.008.	10.2 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	308	650,00		-	13	22,23	10	12,72	80,00	57,22	10	12,72	3,38	1,96		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.04.1.01.04.01.18.009.	10.3 Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pemukiman	Luas tanah untuk kawasan pemukiman yang disediakan	7	1.750,00	0	79,82	5	41,62	4	21,08	76,00	50,65	4	100,90	54,29	5,77		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								71,67	64,88	71,67	64,88			20,07	7,48		
		Predikat kinerja								S	R	S	R			SR	SR		
	1.01.04.1.01.04.01.19.	11. Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	50	205,92	76	312,33	0	-	0	-	0	-	76	312,33	151,67	151,67		
	1.01.04.1.01.04.01.19.004.	11.1 Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB yang dilaksanakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	1.01.04.1.01.04.01.19.005.	11.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RTBL dan IMB	jumlah kegiatan monitoring terhadap izin yang telah dikeluarkan	57	106,08	46	86,00	0	-	0	-	0	-	46	86,00	81,07	81,07		
	1.01.04.1.01.04.01.19.006.	11.3 Pembangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang dibangun	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	1.01.04.1.01.04.01.19.007.	11.4 Pendataan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan	48	99,84	48	100,47	0	-	0	-	0	-	48	100,47	100,63	100,63		
	1.01.04.1.01.04.01.19.008.	11.5 Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang di rehabilitasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.19.009.	11.6 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tembilahan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			30,28	30,28		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.04.1.01.04.01.20.	12. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	14	12.469,59		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.20.001.	12.1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen DED Pembangunan Saluran Drainase yang disusun	7	350,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.20.003.	12.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	14	10.969,59		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.20.005.	12.3 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Jumlah Lokasi Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong di Kab. Inhil	6	600,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.20.006.	12.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	627	550,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.04.1.01.04.01.21.	13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	33	11.611,98		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.21.004.	13.1 Penyusunan Program Pengembangan RTH	Persentase Pengembangan RTH	300	1.178,49		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.21.005.	13.2 Penataan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik dan Sarana Prasarana pendukungnya yang dibangun	27	3.399,97		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.21.006.	13.3 Pemeliharaan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang dipelihara	15	7.033,51		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.01.04.1.01.04.01.21.011.	13.4 Penataan Lampu Taman dan Jalan	Jumlah Lokasi Taman dan Jalan yang ditata lampunya	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.05.1.01.04.01.	LINGKUNGAN HIDUP			2.971,32														
	1.02.05.1.01.04.01.24.	14. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	23	2.971,32	1	1.409,25	6	1.328,09	1	1.398,21	16,67	105,28	2	2.807,46	8,70	94,49		
	1.02.05.1.01.04.01.24.004.	14.1 Penyusunan Program Pengembangan RTH	Persentase Pengembangan RTH	200	45,46	0	-	100	44,05	74	28,62	74,00	64,97	74	28,62	37,00	62,97		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.05.1.01.04.01.24.005.	14.1 Penataan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik dan Sarana Prasarana pendukungnya yang dibangun	13	548,86	1	114,47	1	1,80	1	1,58	100,00	88,05	2	116,05	15,38	21,14		
	1.02.05.1.01.04.01.24.006.	14.2 Pemeliharaan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang dipelihara	10	2.377,00	1	1.294,78	5	1.282,24	5	1.368,01	90,00	106,69	6	2.662,79	55,00	112,02		
	1.02.05.1.01.04.01.24.011.	14.3 Penataan Lampu Taman dan Jalan	Jumlah Lokasi Taman dan Jalan yang ditata lampunya	8	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									88,00	86,57	88,00	86,57		26,85	49,03		
		Predikat kinerja									T	T	T	T		SR	R		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									34.333,90				55.025,47				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									74,77	69,94	74,77	69,94		22,93	24,05		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									S	S	S	S		R	R		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik masih belum selesai pengadaannya baik berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
8.	0.00.00.1.01.05.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi	93	11.337,00	21	1.143,56	19	1.815,32	19	2.023,15	100,56	111,45	40	3.166,71	42,63	27,93	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	0.00.00.1.01.05.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	6750	30,25	1161	6,44	1350	2,65	841	1,65	62,30	62,26	2002	8,09	29,66	26,73		
	0.00.00.1.01.05.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	250,50	36	41,82	36	50,10	36	43,87	100,00	87,56	72	85,69	40,00	34,21		
	0.00.00.1.01.05.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanjang Perizinannya	165	324,56	32	95,62	12	15,05	12	15,05	100,00	100,00	44	110,67	26,87	34,10		
	0.00.00.1.01.05.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	60	122,51	12	32,41	12	4,50	12	1,50	100,00	33,33	24	33,91	40,00	27,68		
	0.00.00.1.01.05.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	190	66,40	38	17,10	12	1,30	12	1,15	100,00	88,46	50	18,25	26,32	27,48		
	0.00.00.1.01.05.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	23	155,63	5	35,48	38	16,58	38	16,58	100,00	100,00	9	52,06	37,39	33,45		
	0.00.00.1.01.05.01.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	4	57,99	1	13,70	16	6,59	16	6,59	100,00	100,00	3	20,29	85,00	35,00		
	0.00.00.1.01.05.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	13	16,93	3	4,73	12	0,20	12	0,20	100,00	100,00	3	4,93	23,08	29,10		
	0.00.00.1.01.05.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	2	20,20	1	3,27	0	-	0	-	0,00	0,00	1	3,27	50,00	16,19		
	0.00.00.1.01.05.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	29618	146,46	5924	35,42	2525	4,97	2488	4,89	98,53	98,52	8412	40,31	28,40	27,52		
	0.00.00.1.01.05.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	665	2.738,99	124	779,72	217	145,36	217	145,36	99,85	100,00	341	925,08	51,23	33,77		
	0.00.00.1.01.05.01.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	603	7.046,00	24	-	136	1.626,45	136	1.785,00	100,00	109,75	257	1.785,00	42,55	25,33		
	0.00.00.1.01.05.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	324	360,59	57	77,87	49	1,30	49	1,30	100,00	100,00	106	79,17	32,58	21,96		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									96,72	89,99	96,72	89,99		39,47	28,66		
		Predikat kinerja									ST	T	ST	T		R	SR		
	0.00.00.1.01.05.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana	56	340,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.01.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	50,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.01.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	65,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.01.02.042.	2.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	100,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.01.02.052.	2.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	125,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.05.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman Pakaian Dinaas Dan Peningkatan Disiplin ASN	37	202,81	20	201,71	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
	0.00.00.1.01.05.01.03.003.	3.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	117515	202,81	23503	201,71	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.05.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	77	2.285,42	19	485,87	15	30,15	37	71,33	236,58	236,58	22	557,20	28,75	24,38		
	0.00.00.1.01.05.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diksar, dan Pembentukan Tim Penilai JFT Satpol.PP	148	550,00	30	99,48	26	29,90	18	20,68	69,16	69,16	48	120,16	32,22	21,85		
	0.00.00.1.01.05.01.05.017.	4.2 Diklat Korsi Satpol PP	Jumlah Pembinaan dan Latihan Rutin Tim Korsi Satpol.PP yang dilaksanakan	240	683,65	48	170,60	12	50,65	12	50,65	100,00	100,00	60	221,25	25,00	32,36		
	0.00.00.1.01.05.01.05.019.	4.3 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Peserta HUT Satpol.PP Tingkat Nasional dan Provinsi	8588	1.051,77	1666	215,79	0	-	0	-	0,00	0,00	1666	215,79	19,40	20,52		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								84,58	84,58	84,58	84,58			28,61	27,11		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
	0.00.00.1.01.05.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan	95	586,20	20	114,96	19	34,20	15	26,40	77,19	77,19	35	141,36	36,58	24,12		
	0.00.00.1.01.05.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan yang disusun	6	586,20	1	114,96	1	34,20	1	26,40	100,00	77,19	2	141,36	33,33	24,12		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	77,19	100,00	77,19			33,33	24,12		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.01.05.1.01.05.01.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN																	
	1.01.05.1.01.05.01.15.	6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	480	7.902,25		2.990,18	126	769,65	0	1.075,71	0,00	139,77	0	4.065,88	0,00	51,45		
	1.01.05.1.01.05.01.15.001.	6.1 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelaksana Siaga Piket / Penjagaan Objek Vital yang dibayarkan	18810	2.398,30	1728	1.804,70	0	-	0	-	0,00	0,00	1728	1.804,70	9,19	75,25		
	1.01.05.1.01.05.01.15.004.	6.2 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Jumlah Patroli Rutin dan Operasi Ketertiban Lingkungan yang dilaksanakan	480	1.436,15	144	355,83	0	-	0	-	0,00	0,00	144	355,83	30,00	24,78		
	1.01.05.1.01.05.01.15.005.	6.3 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan Operasional Pengamanan dan Pengawalan	1117	2.176,62	206	451,19	126	469,65	240	1.075,71	190,48	229,05	446	1.526,89	39,93	70,15		
	1.01.05.1.01.05.01.15.006.	6.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan Pembinaan Satpol.PP / Banpol.PP di Kecamatan	112	916,18	28	303,51	0	-	0	-	0,00	0,00	28	303,51	25,00	33,13		
	1.01.05.1.01.05.01.15.007.	6.5 Peningkatan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Satlinmas	225	610,00	0	-	140	300,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.01.15.008.	6.6 Penanganan Gangguan Keamanan Wilayah	Jumlah Anak / Remaja Penyalahguna Lem, Tuak dan atau Obat yang dibina	218	365,00	25	74,95	0	-	0	-	0,00	0,00	25	74,95	11,47	20,53		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								95,24	114,52	95,24	114,52			19,26	37,31		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.01.05.1.01.05.01.16.	7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	100	4.010,79	4	787,80	20	1.183,33	20	1.041,49	100,00	88,01	24	1.829,29	23,79	45,61		
	1.01.05.1.01.05.01.16.002.	7.1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Operasional Yustisi dan Non Yustisial yang dilaksanakan	152	1.649,50	29	468,00	20	500,40	34	522,00	170,00	104,32	63	990,00	41,45	60,02		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.05.1.01.05.01.16.007.	7.2 Pengawasan dan Pengamatan Lokasi Rawan Gangguan Kanrantibmas	Jumlah Pengamatan dan Pengawasan tempat yang terindikasi pelanggaran PERDA dan gangguan ketertiban umum yang dilaksanakan	80	302,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.01.16.009.	7.3 Sosialisasi dan Penyuluhan Pelaksanaan Perda	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilaksanakan	2	-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.01.16.010.	7.4 Patroli dan Pengawasan Pelaksanaan Perda/Perkada	Jumlah Patroli Pengawasan Pelaksanaan PERDA / PERKADA, Pengawasan Disiplin PNS pada Jam Kerja Efektif dan Pengawasan Pelajar pada Jam Sekolah yang dilaksanakan	511	1.559,29	96	319,80	96	682,93	66	681,95	68,75	99,86	162	1.001,75	31,70	64,24		
	1.01.05.1.01.05.01.16.012.	7.5 Pembentukan Sekretariat PPNS Kabupaten	Terkordinirnya PPNS yang ada di Kab.Inhil	80	500,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						119,38		102,09		119,38	102,09			14,63	24,85		
		Predikat kinerja						ST		ST		ST	ST			SR	SR		
	1.01.05.1.01.05.01.17.	8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan petugas linmas	84	1.086,29	18	175,91	17	297,00	0	31,91	0,00	10,74	18	207,82	21,48	19,13		
	1.01.05.1.01.05.01.17.001.	8.1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Pelantikan Satlinmas Desa / Kelurahan Se-Kab.Inhil	5	1.086,29	1	175,91	1	297,00	0	31,91	0,00	10,74	1	207,82	20,00	19,13		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00		10,74		0,00	10,74			20,00	19,13		
		Predikat kinerja						SR		SR		SR	SR			SR	SR		
	3.00.06.1.01.05.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	3.00.06.1.01.05.01.19.	9. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Pengamanan Tahapan Pemilu / Pilkada dan Pilkadaes	21	1.195,79	21	1.253,14	0	-	0	-	0,00	0,00	21	1.253,14	100,00	104,80		
	3.00.06.1.01.05.01.19.001.	9.1 Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah pelaksanaan Pemantauan penyelenggaraan Pemilu	21	1.195,79	21	1.253,14	0	-	0	-	0,00	0,00	21	1.253,14	100,00	104,80		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00		0,00		0,00	0,00			100,00	104,80		
		Predikat kinerja						SR		SR		SR	SR			ST	ST		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program						4.129,65											
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program						82,65		79,85		82,65	79,85			28,37	29,55		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program						T		T		T	T			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik, (2) penambahan volume pelaksanaan patroli bertambah drastis dalam rangka penanganan pandemi Covid -19																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
9.	0.00.00.1.01.05.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	97	4.713,24	16	768,09	19	895,20	20	862,27	104,28	96,32	36	1.630,37	37,09	34,59	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	0.00.00.1.01.05.02.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	2750	16,11	550	3,03	528	3,03	528	3,03	100,08	100,00	1078	6,07	39,22	37,65		
	0.00.00.1.01.05.02.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	120	339,05	24	46,75	2	44,40	3	39,83	141,57	89,71	27	86,58	22,36	25,54		
	0.00.00.1.01.05.02.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	155	179,60	15	22,30	31	32,07	23	23,26	72,72	72,53	38	45,56	24,34	25,37		
	0.00.00.1.01.05.02.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	10	173,56	2	34,36	12	46,89	11	42,81	92,60	91,29	13	77,16	131,12	44,46		
	0.00.00.1.01.05.02.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	75	47,14	15	4,00	15	3,64	15	3,60	102,95	98,96	30	7,60	40,59	16,12		
	0.00.00.1.01.05.02.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	23	162,41	5	19,76	23	31,40	23	31,40	100,96	100,00	28	51,16	122,70	31,50		
	0.00.00.1.01.05.02.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5	59,13	1	8,08	5	11,45	5	11,42	103,91	99,74	6	19,49	123,91	32,96		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.05.02.01.012.	1,8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	12	46,63	2	10,00	10	5,10	10	5,10	104,12	100,00	12	15,10	103,43	32,39		
	0.00.00.1.01.05.02.01.014.	1,9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	23	41,82		-	12	10,29	12	10,19	100,00	99,03	12	10,19	52,17	24,37		
	0.00.00.1.01.05.02.01.015.	1,1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	5400	23,53	832	3,70	1080	3,60	810	2,70	75,00	75,00	1642	6,40	30,40	27,20		
	0.00.00.1.01.05.02.01.016.	1,11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	20331	335,21	4066	92,78	2430	87,47	2585	93,03	106,36	106,35	6651	185,81	32,71	55,43		
	0.00.00.1.01.05.02.01.017.	1,12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	5030	121,35	1006	19,50	1700	61,86	2206	80,28	129,78	129,78	3212	99,78	63,86	82,22		
	0.00.00.1.01.05.02.01.018.	1,13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	456	2.132,02	91	432,58	31	325,32	30	305,69	95,30	93,97	121	738,28	26,43	34,63		
	0.00.00.1.01.05.02.01.019.	1,14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	40	639,24	0	-	10	150,60	9	137,22	91,12	91,12	9	137,22	22,78	21,47		
	0.00.00.1.01.05.02.01.020.	1,15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	291	396,46	58	71,27	57	78,08	54	72,71	94,22	93,12	112	143,98	38,39	36,32		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,71		96,04		100,71		96,04				58,29		35,17			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST				T		SR			
	0.00.00.1.01.05.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	2.493,92	20	69,36	20	70,16	25	78,75	124,80	112,25	45	148,11	44,96	5,94		
	0.00.00.1.01.05.02.02.003.	2,1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	33	1.468,07		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.005.	2,2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	8	177,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.007.	2,3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	9	10,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.010.	2,4 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	8	20,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.022.	2,5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	51	56,53	10	3,38	5	3,50	5	3,50	100,00	100,00	15	6,88	29,41	12,16		
	0.00.00.1.01.05.02.02.024.	2,6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	116	323,03	23	65,98	15	40,00	21	55,45	141,62	138,62	44	121,43	38,14	37,59		
	0.00.00.1.01.05.02.02.026.	2,7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	12	47,29		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.042.	2,8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	3	82,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.044.	2,9 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Oprasional Dinas yang direhabilitasi	10	100,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.046.	2,1 Penunjang Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	200,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.02.052.	2,11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	10,00		-	1	26,66	1	19,81	100,00	74,29	1	19,81	50,00	198,05		
Rata-rata capaian kinerja (%)				113,87		104,30		113,87		104,30				10,69		22,53			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST				SR		SR			
	0.00.00.1.01.05.02.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	79	581,10	20	58,59	16	109,64	3	17,99	16,41	16,41	23	76,58	28,73	13,18		
	0.00.00.1.01.05.02.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	3976	297,10	72	58,59	0	-	0	-	0,00	0,00	72	58,59	1,81	19,72		
	0.00.00.1.01.05.02.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	1588	284,00	0	-	135	109,64	22	17,99	16,41	16,41	22	17,99	1,40	6,34		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		16,41		16,41		0		-		1,60			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR				SR		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.05.02.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	80	153,15	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.05.02.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	50	86,25	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.05.02.05.006.	4.2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah Petugas yang terlatih	172	66,90	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.05.02.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	492,62	20	64,08	20	26,83	21	26,83	105,14	100,00	41	90,90	41,03	18,45		
	0.00.00.1.01.05.02.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	30	281,41	6	64,08	5	26,83	5	26,83	105,14	100,00	11	90,90	37,52	32,30		
	0.00.00.1.01.05.02.06.003.	5.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	3	78,81	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.06.004.	5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	9	69,36	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.05.02.06.011.	5.4 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	15	63,05	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										105,14	100,00	105,14	100,00			9,38	8,08		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.01.05.02.07.	8. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.05.02.07.001.	8.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.05.1.01.05.02.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1.01.05.1.01.05.02.25.	9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	5.273,77	100,00	937,08	20,00	1.119,34	20	1.386,45	100,00	123,86	38	2.323,53	37,77	44,06		
	1.01.05.1.01.05.02.25.001.	9.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan/Pemberdayaan	4	110,34	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.02.25.002.	9.2 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	4	95,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.02.25.003.	9.3 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran	1	61,32	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.02.25.004.	9.4 Peringatan Hari Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Pemadam kebakaran	5	136,81	0	-	1	20,00	1	18,80	100,00	94,00	1	18,80	20,00	13,74		
	1.01.05.1.01.05.02.25.005.	9.5 Peningkatan Pengelolaan Posko Pemadam Kebakaran	Jumlah perlengkapan Oprasional Posko Pemadam Kebakaran	11	4.534,22	12	875,27	5	1.070,01	5	1.340,81	100,00	125,31	17	2.216,08	154,55	48,87		
	1.01.05.1.01.05.02.25.006.	9.6 Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	Jumlah Tenaga sukarela yang di rekrut	5	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.01.05.1.01.05.02.25.007.	9.7 Pelayanan Rutin Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Peralatan Proteksi kebakaran yang diperiksa	30837	321,08	2500	61,81	2500	29,33	2500	26,84	100,00	91,52	5000	88,65	16,21	27,61		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	103,61	100,00	103,61			27,25	12,89			
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR			
	1.01.05.1.01.05.02.42.	10. Program Penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	65	3.821,30	1,00	1.806,34	13	139,55	13	13,66	100,31	9,79	14	1.820,00	21,60	47,63			
	1.01.05.1.01.05.02.42.001.	10.1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran	72	86,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.01.05.1.01.05.02.42.003.	10.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaporkannya dalam pengawasan	12	55,40	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.01.05.1.01.05.02.42.005.	10.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang disediakan	11	3.436,36	1	1.806,34	7	139,25	7	104,26	100,00	74,88	8	1.910,61	72,73	55,60			
	1.01.05.1.01.05.02.42.006.	10.4 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana Oprasional pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi	4	101,66	0	-	1	0,30	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.01.05.1.01.05.02.42.007.	10.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Kabakaran	sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran yang disediakan	4	141,38	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	37,44	50,00	37,44			14,55	11,12			
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								2.360,71	2.385,95					15,22	12,85			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								81,02	76,30	81,02	76,30			15,22	12,85			
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			SR	SR			
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	0.00.00.1.01.06.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	8.196,03	19	1.192,69	20	1.098,52	17	919,84	86,13	83,73	36	2.112,53	36,23	25,78	DINAS SOSIAL		
	0.00.00.1.01.06.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	8735	42,74	1618	7,05	1620	6,00	1596	5,91	98,52	98,50	3214	12,96	36,80	30,32			
	0.00.00.1.01.06.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	420	849,35	84	86,40	7	104,85	7	85,27	100,00	81,33	91	171,67	21,67	20,21			
	0.00.00.1.01.06.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	48	428,88	7	50,54	6	49,14	4	28,82	72,42	58,65	12	79,36	24,33	18,50			
	0.00.00.1.01.06.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	35	213,71	7	36,96	7	40,00	7	37,87	100,00	94,67	14	74,83	40,00	35,01			
	0.00.00.1.01.06.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	180	85,48	31	6,00	36	16,00	20	8,64	55,73	54,00	51	14,64	28,15	17,13			
	0.00.00.1.01.06.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	40	307,80	40	55,59	40	60,00	40	59,07	98,87	98,45	40	114,65	40,00	37,25			
	0.00.00.1.01.06.01.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	27515	348,00	5393	213,53	36877	31,94	26736	23,16	72,50	72,50	32129	236,69	116,77	68,01			
	0.00.00.1.01.06.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	9	37,40	2	6,64	8	7,00	8	6,30	100,00	89,99	10	12,93	111,11	34,58			
	0.00.00.1.01.06.01.01.013.	1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31	95,66	6	213,25	0	-	0	-	0,00	0,00	6	213,25	19,35	222,93			
	0.00.00.1.01.06.01.01.015.	1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	106	172,64	21	11,80	19	12,57	13	8,50	68,42	67,62	34	20,30	32,05	11,76			
	0.00.00.1.01.06.01.01.016.	1.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	29017	128,21	5803	19,18	3671	25,07	2213	15,10	60,28	60,23	8016	34,28	27,63	26,74			
	0.00.00.1.01.06.01.01.017.	1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2831	847,84	466	21,72	292	34,80	130	15,39	44,36	44,22	595	37,11	21,03	4,38			
	0.00.00.1.01.06.01.01.018.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	374	1.933,51	71	308,74	62	276,79	46	202,77	74,65	73,26	118	511,51	31,43	26,46			
	0.00.00.1.01.06.01.01.019.	1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	137	1.512,72	0	-	21	252,00	21	252,00	100,00	100,00	21	252,00	15,33	16,66			
	0.00.00.1.01.06.01.01.020.	1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	678	950,47	122	112,10	88	128,36	81	117,04	91,57	91,19	203	229,14	29,94	24,11			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.01.06.01.01.027.	1,16 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	15	241,61	3	43,20	3	54,00	3	54,00	100,00	100,00	6	97,20	37,88	40,23		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								82,49	78,97	82,49	78,97			39,59	39,64		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			R	R		
	0.00.00.1.01.06.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	99	2.793,64	20	255,34	20	339,55	10	65,94	50,61	19,42	30	321,28	30,36	11,50		
	0.00.00.1.01.06.01.02.005.	2,1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	17	314,29	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.06.01.02.022.	2,2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	6	1.105,92	1	175,00	2	57,57	1	26,70	50,00	46,38	2	201,70	33,33	18,24		
	0.00.00.1.01.06.01.02.030.	2,3 Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan	Jumlah pemeliharaan Taman makam pahlawan	11	631,93	2	80,34	2	190,00	2	39,24	100,00	20,65	4	119,58	36,36	18,92		
	0.00.00.1.01.06.01.02.052.	2,4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	160	741,50	0	-	20	91,98	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	22,34	50,00	22,34			17,42	9,29		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.01.06.01.05.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	100	657,87	20	105,39	20	87,01	19,56	66,70	97,78	76,66	40	172,09	39,56	26,16		
	0.00.00.1.01.06.01.05.001.	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	5	71,11	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.01.06.01.05.019.	3.2 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	15	586,76	3	105,39	3	87,01	3	66,70	97,78	76,66	6	172,09	39,56	29,33		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								97,78	76,66	97,78	76,66			19,78	14,66		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.1.01.06.01.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	179,41	20	28,80	20	36,00	20	36,00	100,00	100,00	40	64,80	40,00	36,12		
	0.00.00.1.01.06.01.06.001.	4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	25	179,41	5	28,80	5	36,00	5	36,00	100,00	100,00	10	64,80	40,00	36,12		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			40,00	36,12		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			R	SR		
	0.00.00.1.01.06.01.07.	5. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	80	89,11	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.1.01.06.01.07.003.	5.1 Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diverifikasi	80	89,11	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.01.06.1.01.06.01.	SOSIAL								0	-								
	1.01.06.1.01.06.01.15.	6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat yang menerima bantuan	100	5.689,58	16,97	1.749,10	20	778,39	20	696,30	100,00	89,45	37	2.445,40	36,97	42,98		
	1.01.06.1.01.06.01.15.001.	6.1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah Masyarakat Miskin, Perorangan, Keluarga dan KAT yang diberi bantuan	70	957,25	30	409,29	40	177,42	0	149,08	0,00	84,03	30	558,37	42,86	58,33		
	1.01.06.1.01.06.01.15.002.	6.2 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Masyarakat/ Stake Holder dan RTSM yang diberi bantuan.	340	2.220,26	116	758,80	70	299,17	70	255,00	100,00	85,24	186	1.013,80	54,71	45,66		
	1.01.06.1.01.06.01.15.003.	6.3 Pengembangan Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang diberikan bantuan	497	2.512,07	115	581,01	173	301,80	0	292,22	0,00	96,82	115	873,23	23,14	34,76		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								33,33	88,70	33,33	88,70			40,23	46,25		
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			SR	SR		
	1.01.06.1.01.06.01.16.	7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	100	6.385,48	16,90	1.147,12	20	950,48	20	680,61	100,00	71,61	37	1.827,73	36,90	28,62		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.06.1.01.06.01.16.008.	7.1 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang diberikan pelayanan	3124	4.174,79	604	807,51	575	657,34	575	453,67	100,00	69,02	1179	1.261,18	37,74	30,21		
	1.01.06.1.01.06.01.16.010.	7.2 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Penangan Bencana	100	2.210,69	16	339,61	100	293,14	100	226,94	100,00	77,42	58	566,55	23,20	25,63		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00		73,22		100,00		73,22		100,00		73,22		30,47			
	Predikat kinerja			ST		S		ST		S		ST		S		SR			
	1.01.06.1.01.06.01.18.	8. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	100	414,08	16,90	69,58	20	48,50	0	35,46	0,00	73,13	17	105,04	16,90	25,37		
	1.01.06.1.01.06.01.18.007.	8.1 Rehabilitasi dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan	30	414,08	10	69,58	6	48,50	0	35,46	0,00	73,13	10	105,04	33,33	25,37		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00		73,13		0,00		73,13		0,00		73,13		33,33			
	Predikat kinerja			SR		S		SR		S		SR		S		SR			
	1.01.06.1.01.06.01.20.	9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	91	1.158,81	15,54	142,02	18	443,47	0	62,25	0,00	14,04	16	204,27	17,04	17,63		
	1.01.06.1.01.06.01.20.004.	9.1 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan pelayanan.	152	1.158,81	30	142,02	85	443,47	0	62,25	0,00	14,04	30	204,27	19,74	17,63		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00		14,04		0,00		14,04		0,00		14,04		19,74			
	Predikat kinerja			SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR			
	1.01.06.1.01.06.01.21.	10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	100	2.471,54	15,54	434,17	20	326,17	10	255,06	50,00	78,20	26	689,23	25,54	27,89		
	1.01.06.1.01.06.01.21.003.	10.1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan di bidang agama	20	1.938,39	20	287,29	20	266,60	20	209,94	100,94	78,75	40	497,23	40,19	25,65		
	1.01.06.1.01.06.01.21.006.	10.2 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan dan Jumlah Rekomendasi Izin Sumbangan yang diterbitkan	159	533,15	45	146,88	42	59,57	0	45,12	0,00	75,74	45	192,00	28,30	36,01		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			50,47		77,25		50,47		77,25		50,47		77,25		34,24			
	Predikat kinerja			SR		T		SR		T		SR		T		SR			
	1.01.06.1.01.06.01.25.	11. Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang dibina	100	2.778,33	16,94	800,73	20	772,04	20	654,27	100,00	84,75	37	1.454,99	36,94	52,37		
	1.01.06.1.01.06.01.25.001.	11.1 Peningkatan Kapasitas Kemampuan SDM Pendamping	Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang ditingkatkan Kapasitas SDMnya.	271	2.778,33	78	800,73	102	772,04	102	654,27	100,00	84,75	180	1.454,99	66,42	52,37		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00		84,75		100,00		84,75		100,00		84,75		66,42			
	Predikat kinerja			ST		T		ST		T		ST		T		S			
	1.01.06.1.01.06.01.30.	12. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	100	1.155,89	13,91	333,14	20	1.942,00	0	218,20	0,00	11,24	14	551,34	13,91	47,70		
	1.01.06.1.01.06.01.30.001.	12.1 Sosialisasi Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Masyarakat dan Aparatur yang diberikan Sosialisasi Bansos Rastra.	76997	1.155,89	22191	333,14	9578	1.942,00	0	218,20	0,00	11,24	22191	551,34	28,82	47,70		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			0,00		11,24		0,00		11,24		0,00		11,24		28,82			
	Predikat kinerja			SR		SR		SR		SR		SR		SR		R			
	1.01.06.1.01.06.01.32.	13. Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani	100	1.536,47	19,38	297,82	20	279,91	20	262,53	100,00	93,79	39	560,35	39,38	36,47		
	1.01.06.1.01.06.01.32.001.	13.1 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan keluarganya	Jumlah Keluarga Pahlawan, Veteran Pejuang maupun Pembela Kemerdekaan yang diberi Tali Asih.	523	1.536,47	102	297,82	91	279,91	91	262,53	100,00	93,79	193	560,35	36,90	36,47		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00		93,79		100,00		93,79		100,00		93,79		36,90			
	Predikat kinerja			ST		ST		ST		ST		ST		ST		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.01.06.1.01.06.01.33.	14. Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis, Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar	98	1.780,94	17,89	312,81	20	1.136,00	20	682,04	102,04	60,04	38	994,84	38,66	55,86		
	1.01.06.1.01.06.01.33.002.	14.1 Pelayanan Sosial terhadap Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah terbantunya Pemulangan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar	342	1.780,94	60	312,81	80	1.136,00	80	682,04	100,00	60,04	140	994,84	40,96	55,86		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	60,04	100,00	60,04			40,96	55,86		
		Predikat kinerja								ST	R	ST	R			R	S		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program							8.238,03						11.503,90				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								62,62	65,70	62,62	65,70			31,99	31,44		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								R	R	R	R			SR	SR		
11.	0.00.00.1.02.01.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	2.332,10	20	872,38	18	576,40	20	795,27	113,69	137,97	40	1.667,65	44,96	71,51	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
	0.00.00.1.02.01.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	6000	9,60	750	3,00	100	3,00	100	3,00	100,00	100,00	850	6,00	14,17	62,50		
	0.00.00.1.02.01.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	80	240,00	12	51,09	4	60,60	4	66,79	100,00	110,21	16	117,88	20,00	49,12		
	0.00.00.1.02.01.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	68	56,60	17	13,37	27	16,70	23	13,91	85,04	83,29	40	27,27	58,77	48,19		
	0.00.00.1.02.01.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	13	171,00	3	34,40	11	37,80	11	37,80	100,00	100,00	14	72,20	43,08	42,22		
	0.00.00.1.02.01.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	60	35,90	15	9,60	10	6,50	10	6,35	100,00	97,69	25	15,95	42,05	44,43		
	0.00.00.1.02.01.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	31	56,97	31	15,00	31	18,61	31	34,60	100,00	185,91	31	49,60	40,00	87,06		
	0.00.00.1.02.01.01.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	239348	92,48	46546	24,74	51974	17,88	62980	21,66	121,18	121,17	109526	46,40	45,76	50,17		
	0.00.00.1.02.01.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	592	20,00	173	5,00	523	5,00	523	5,00	100,00	100,00	696	10,00	117,57	50,00		
	0.00.00.1.02.01.01.01.013.	1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	-	2	100,20	0	-	0	-	0,00	0,00	2	100,20	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.01.01.01.015.	1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	396	63,60	-	24	3,60	24	3,60	100,00	100,00	24	3,60	6,06	5,66			
	0.00.00.1.02.01.01.01.016.	1.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	16180	159,18	4045	54,90	3912	29,28	3912	29,28	100,00	99,99	7957	84,18	49,18	52,88		
	0.00.00.1.02.01.01.01.017.	1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3772	80,85	943	17,88	1280	20,80	1274	20,70	99,54	99,50	2217	38,58	58,78	47,71		
	0.00.00.1.02.01.01.01.018.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	183	1.041,67	49	496,75	592	242,18	1074	439,42	181,49	181,45	1123	936,17	613,90	89,87		
	0.00.00.1.02.01.01.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	28	77,46	7	3,25	24	57,06	29	66,97	119,12	117,38	36	70,21	127,10	90,65		
	0.00.00.1.02.01.01.01.027.	1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	360	226,80	72	43,20	6	57,40	6	54,60	100,00	95,12	78	97,80	21,67	43,12		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								107,60	113,69	107,60	113,69			83,87	50,91		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			ST	S		
	0.00.00.1.02.01.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	319,42	18	28,78	18	186,61	18	185,87	100,00	99,60	36	214,65	40,00	67,20		
	0.00.00.1.02.01.01.02.010.	2.1 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	4	22,30	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
	0.00.00.1.02.01.01.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	16	181,22	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
	0.00.00.1.02.01.01.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	48	44,70	20	12,88	2	6,00	2	5,97	100,00	99,50	22	18,85	45,83	42,18		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.01.01.02.026.	2,4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	212	52,80	53	15,90	17	5,10	17	5,10	100,00	100,00	70	21,00	33,02	39,77		
	0.00.00.1.02.01.01.02.052.	2,5 Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	4	18,40	0	-	1	175,51	1	174,80	100,00	99,60	1	174,80	25,00	950,01		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,70	100,00	99,70			20,77	206,39		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	ST		
	0.00.00.1.02.01.01.06.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	241,13	20	44,97	18	47,08	16	45,42	90,44	96,48	36	90,39	40,31	37,48		
	0.00.00.1.02.01.01.06.001.	3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20	241,13	5	44,97	5	47,08	5	45,42	100,00	96,48	10	90,39	50,00	37,48		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	96,48	100,00	96,48			50,00	37,48		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			S	SR		
	0.00.00.1.02.01.01.07.	4. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	90	86,03	20	10,35	18	13,63	9	5,95	50,00	43,67	29	16,30	32,22	18,95		
	0.00.00.1.02.01.01.07.001.	4.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	28	86,03	7	10,35	4	13,63	4	12,13	100,00	89,03	11	22,48	39,29	26,13		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	89,03	100,00	89,03			39,29	26,13		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			R	SR		
	1.02.01.1.02.01.01.	KETENAGAKERJAAN					-		736,35	0	-								
	1.02.01.1.02.01.01.15.	5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	82	301,66	13	32,27	20	6,00	0	6,00	0,00	100,00	13	38,27	15,63	12,69		
	1.02.01.1.02.01.01.15.006.	5.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	96	210,66	15	32,27	0	-	0	-	0,00	0,00	15	32,27	15,63	15,32		
	1.02.01.1.02.01.01.15.007.	5.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK	Jumlah peralatan Gedung BLK yang di service	366	91,00	-	-	20	6,00	20	6,00	100,00	100,00	20	6,00	5,46	6,59		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			10,54	10,96		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.01.1.02.01.01.16.	6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	59	1.323,16	0	126,61	12	495,55	0	477,80	0,00	96,42	0	604,42	0,00	45,68		
	1.02.01.1.02.01.01.16.001.	6.1 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah laporan Ketenagakerjaan Daerah yang tersusun	4	135,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.01.1.02.01.01.16.003.	6.2 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	9	245,00	-	2	41,81	0	41,07	0,00	98,23	0	41,07	0,00	16,76			
	1.02.01.1.02.01.01.16.004.	6.3 Penyediaan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga siap pakai melalui sistem permagangan/Jumlah AK 1 yang tersedia untuk pencari kerja	27178	330,20	4036	49,03	3	258,42	3	243,17	100,00	94,10	4039	292,20	14,86	88,49		
	1.02.01.1.02.01.01.16.005.	6.4 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	20	170,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.01.1.02.01.01.16.006.	6.5 Penyelenggaraan Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah pengangsuran tempat yang terserap/jumlah kelompok kerja yang Menerima Pemberian Langsung Melalui Sytem Padat Karya	177	267,96	51	77,58	21	195,33	21	193,57	100,00	99,10	72	271,14	40,68	101,19		
	1.02.01.1.02.01.01.16.007.	6.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan tenaga kerja asing yang tersusun	4	175,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								66,67	97,14	66,67	97,14			9,26	34,41		
		Predikat kinerja								S	ST	S	ST			SR	ST		
	1.02.01.1.02.01.01.17.	7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB	53	871,00	20	282,80	11	234,80	11	220,23	100,00	93,80	30	503,03	57,03	57,75		
	1.02.01.1.02.01.01.17.004.	7.1 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pencerahan tentang peraturan ketenagakerjaan	88	186,81	7	14,82	20	25,47	20	23,22	100,00	91,14	27	38,04	30,68	20,36		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.01.1.02.01.01.17.009.	7.2 Survey KHL Pedoman Penetapan Upah Minimum	Jumlah Survey KHL yang dilakukan	4	495,00	1	119,64	3	168,52	3	159,76	100,00	94,80	4	279,40	40,00	56,45		
	1.02.01.1.02.01.01.17.010.	7.3 Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	32	189,19	25	148,34	10	40,80	10	37,25	100,00	91,30	35	185,59	43,75	98,09		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	92,41	100,00	92,41		38,14	58,30	
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST		R	T	
	2.00.08.1.02.01.01.	TRANSMIGRASI																	
	2.00.08.1.02.01.01.15.	8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	2290	714,98	563	159,13	550	75,53	0	114,18	0,00	151,17	563	273,31	24,58	38,23		
	2.00.08.1.02.01.01.15.001.	8.1 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan	Jumlah masyarakat transmigrasi yang mengikuti penyuluhan/sosialisasi transmigrasi	1438	116,94	213	17,32	225	16,46	0	14,93	0,00	90,70	213	32,24	14,81	27,57		
	2.00.08.1.02.01.01.15.002.	8.2 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah dokumen/pelaporan tentang pembinaan, pengembangan wilayah transmigrasi yang tersedia	4	116,25	1	40,79	1	11,92	1	9,88	100,00	82,88	2	50,66	60,08	43,58		
	2.00.08.1.02.01.01.15.003.	8.3 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah kelompok yang mengelola Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi yang disediakan/dikelola	54	220,00	4	17,29	25	16,52	0	14,14	0,00	85,59	4	31,43	7,86	14,28		
	2.00.08.1.02.01.01.15.005.	8.4 Pengelolaan Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah lokasi Transmigrasi yang dikelola	4	118,50	2	45,86	1	61,28	0	61,28	0,00	100,00	2	107,13	38,70	90,41		
	2.00.08.1.02.01.01.15.006.	8.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi/ Jumlah kepala keluarga yang terbina di wilayah transmigrasi	1438	143,29	380	37,88	225	16,93	0	13,97	0,00	82,49	380	51,85	26,44	36,18		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										20,00	88,33	20,00	88,33		29,58	42,41	
		Predikat kinerja										SR	T	SR	T		SR	SR	
	2.00.08.1.02.01.01.16.	9. Program Transmigrasi Lokal	Cakupan bina transmigrasi	1374	116,25	687	48,61	325	11,12	0	75,56	0,00	679,46	687	124,17	50,00	106,81		
	2.00.08.1.02.01.01.16.001.	9.1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Lokasi yang diberikan penyuluhan	4	116,25	2	48,61	1	11,12	1	75,56	100,00	100,00	3	124,17	75,00	106,81		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00		75,00	106,81	
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST		ST	ST	
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program										1.646,71	1.926,28		3.532,18				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										88,25	97,42	88,25	97,42		39,61	63,75	
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										T	ST	T	ST		SR	R	
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
12.	0.00.00.1.02.05.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	9.780,25	20	1.563,44	100	1.872,47	100	1.718,81	99,72	91,79	119	3.282,25	47,73	33,56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	0.00.00.1.02.05.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	4670	30,49	934	5,00	900	5,00	900	5,00	100,00	100,00	1834	10,00	39,27	32,80		
	0.00.00.1.02.05.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	429,40	36	84,69	12	85,20	12	84,73	100,00	99,45	48	169,42	26,67	39,46		
	0.00.00.1.02.05.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional yang diperpanjang Perizinannya	2	253,88	1	29,58	2	30,63	2	26,47	100,00	86,43	1	56,05	30,00	22,08		
	0.00.00.1.02.05.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	900	116,35	180	4,00	3	27,40	3	27,40	100,00	100,00	183	31,40	20,33	26,99		
	0.00.00.1.02.05.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang dioptimalkan	75	21,50	15	2,00	15	3,00	15	2,96	100,00	98,80	30	4,96	40,00	23,09		
	0.00.00.1.02.05.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Terbeli	49	377,10	6	45,60	49	81,00	49	80,87	100,00	99,83	55	126,47	44,90	33,54		
	0.00.00.1.02.05.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4	97,01	1	18,06	4	15,00	4	14,94	100,00	99,60	3	33,00	62,50	34,01		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.05.01.01.012.	1,8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat/Kelengkapan Listrik yang disediakan	296	20,00	59	2,00	50	3,50	50	3,50	100,00	100,00	109	5,50	36,82	27,50		
	0.00.00.1.02.05.01.01.015.	1,9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang Terbeli	7	56,92	1	10,85	7	11,16	7	10,98	100,00	98,42	4	21,83	57,14	38,36		
	0.00.00.1.02.05.01.01.016.	1,1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar yang Digunakan	513825	3.315,00	96599	606,57	100750	650,00	89366	576,55	88,70	88,70	185965	1.183,12	36,19	35,69		
	0.00.00.1.02.05.01.01.017.	1,11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	144	54,80	29	9,40	25	9,40	25	9,40	100,00	100,00	54	18,80	37,50	34,31		
	0.00.00.1.02.05.01.01.018.	1,12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	459	2.299,53	90	444,09	90	364,25	73	291,65	81,18	80,07	163	735,75	35,52	32,00		
	0.00.00.1.02.05.01.01.019.	1,13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	96	1.152,00	-	-	24	288,00	24	287,78	100,00	99,92	24	287,78	25,00	24,98		
	0.00.00.1.02.05.01.01.020.	1,14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	303	410,27	50	72,40	45	69,73	44	67,37	98,40	96,62	94	139,77	31,11	34,07		
	0.00.00.1.02.05.01.01.027.	1,14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan Gedung Kantor	65	1.146,00	13	229,20	13	229,20	13	229,20	100,00	100,00	26	458,40	40,00	40,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								97,88	96,52	97,88	96,52			37,53	31,92		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.02.05.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	87	496,11	20	27,55	100	46,00	100	45,96	100,00	99,90	24	73,50	27,59	14,82		
	0.00.00.1.02.05.01.02.010.	2.1 Pengadaan meubeler	Jumlah Jenis Meubeler yang Terbeli	5	89,00	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.05.01.02.024.	2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Service dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan	48	240,00	10	27,55	6	46,00	6	45,96	100,00	99,90	16	73,50	33,33	30,63		
	0.00.00.1.02.05.01.02.052.	2,3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli	4	167,11	0,00	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,90	100,00	99,90			11,11	10,21		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.02.05.01.05.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus	92	194,07	20	15,12	0,00	-	0	-	0,00	0,00	20	15,12	21,74	7,79		
	0.00.00.1.02.05.01.05.001.	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	16	194,07	2	15,12	0,00	-	0	-	0,00	0,00	2	15,12	12,50	7,79		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			12,50	7,79		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.02.05.01.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	100	247,55	20	108,80	100	30,06	100	30,06	100,00	100,00	48	138,86	48,00	56,09		
	0.00.00.1.02.05.01.06.001.	4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD	34	247,55	7	108,80	7	30,06	7	30,06	100,00	100,00	14	138,86	41,18	56,09		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			41,18	56,09		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	R		
	0.00.00.1.02.05.01.07.	5. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	20	96,66	20	95,23	0,00	-	0	-	0,00	0,00	20	95,23	100,00	98,52		
	0.00.00.1.02.05.01.07.001.	5.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	10	96,66	10	95,23	0,00	-	0	-	0,00	0,00	10	95,23	100,00	98,52		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	98,52		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			ST	ST		
	1.02.05.1.02.05.01.	LINGKUNGAN HIDUP					-			0	-								
	1.02.05.1.02.05.01.15.	6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah	106	41.001,32		6.045,29	22	6.425,64	0	6.163,98	0,00	95,93	0	12.209,27	0,00	29,78		
	1.02.05.1.02.05.01.15.001.	6,1 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Daerah	1	291,49	1	31,95	0	-	0	-	0,00	0,00	1	31,95	100,00	10,96		
	1.02.05.1.02.05.01.15.002.	6,2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kendaraan dan Sarana Prasarana Penunjang Operasional Lainnya	19	10.250,55	6	874,27	6	380,79	6	352,61	100,00	92,60	12	1.226,88	63,16	11,97		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.05.1.02.05.01.15.004.	6.3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Tersedia	5	5.337,52	1	4.740,66	0	-	0	-	0,00	0,00	1	4.740,66	20,00	88,82		
	1.02.05.1.02.05.01.15.011.	6.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5	865,37	1	398,41	1	55,18	0	41,26	0,00	74,76	1	439,67	20,00	50,81		
	1.02.05.1.02.05.01.15.015.	6.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibavarkan	1333	22.111,38	0	-	328	5.504,79	328	5.465,42	100,00	99,28	328	5.465,42	24,61	24,72		
	1.02.05.1.02.05.01.15.016.	6.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Alat Berat, Kendaraan dan Penunjang Operasional Lainnya yang dipelihara	6	2.145,02	0	-	6	484,87	6	304,69	100,00	62,84	6	304,69	100,00	14,20		
Rata-rata capaian kinerja (%)										75,00	82,37	75,00	82,37			54,63	33,58		
Predikat kinerja										S	T	S	T			R	SR		
	1.02.05.1.02.05.01.16.	7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional	132	2.257,32		259,44	23	293,10	19	266,76	82,61	91,02	19	526,20	14,39	23,31		
	1.02.05.1.02.05.01.16.001.	7.1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penghargaan Kota Bersih	5	319,41	0	-	1	26,11	1	19,88	100,00	76,15	1	19,88	20,00	6,22		
	1.02.05.1.02.05.01.16.003.	7.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Air yang dilaksanakan	1	418,31	1	65,45	1	50,82	1	47,46	100,00	93,40	2	112,91	40,00	26,99		
	1.02.05.1.02.05.01.16.004.	7.3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi Pertahun	93	421,28	19	80,40	15	69,28	15	65,97	100,00	95,24	34	146,37	36,56	34,75		
	1.02.05.1.02.05.01.16.006.	7.4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Penghasil LB3 yang memiliki izin	43	382,55	9	59,86	8	43,83	10	35,97	125,00	82,07	19	95,83	44,19	25,05		
	1.02.05.1.02.05.01.16.007.	7.5 Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Pelayanan Pemeriksa Dokumen dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan	1000	330,00	0	-	220	53,22	363	48,38	165,00	90,91	363	48,38	36,30	14,66		
	1.02.05.1.02.05.01.16.013.	7.6 Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah Pelayanan Pemeriksa Dokumen dan Penerbitan Izin Lingkungan	100	69,93	17	53,73	0	-	0	-	0,00	0,00	17	53,73	17,00	76,83		
	1.02.05.1.02.05.01.16.014.	7.7 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang di Tindak Lanjuti	28	315,85	0	-	6	49,85	4	49,09	66,67	98,48	4	49,09	14,29	15,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)										109,44	76,61	109,44	76,61			29,76	28,58		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.02.05.1.02.05.01.17.	8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Tutupan Lahan Hijau	10	1.465,91	1	103,85	2	141,10	2	102,92	100,00	72,94	3	206,77	30,00	14,11		
	1.02.05.1.02.05.01.17.005.	8.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Pembinaan dan Ketersediaan Data	5	418,00	1	43,01	1	45,71	1	32,33	100,00	70,72	2	75,34	40,00	18,02		
	1.02.05.1.02.05.01.17.006.	8.2 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	8	444,30	1	60,84	1	43,04	0	37,64	0,00	87,45	1	98,47	12,50	22,16		
	1.02.05.1.02.05.01.17.010.	8.3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tutupan Lahan Hijau	5	266,06	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.05.1.02.05.01.17.014.	8.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Sosialisasi/Seminar Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilaksanakan	5	337,55	0	-	1	52,35	1	32,96	100,00	62,96	1	32,96	20,00	9,76		
Rata-rata capaian kinerja (%)										66,67	73,71	66,67	73,71			18,13	12,49		
Predikat kinerja										S	S	S	S			SR	SR		
	1.02.05.1.02.05.01.18.	9. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	90	973,71	90	61,91	90	1.112,23	90	1.112,23	100,00	100,00	90	1.174,14	40,00	120,58		
	1.02.05.1.02.05.01.18.002.	9.1 Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kab. Inhil	3	973,71	1	61,91	1	1.112,23	1	842,39	100,00	75,74	2	904,30	66,67	92,87		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	75,74	100,00	75,74			66,67	92,87		
Predikat kinerja										ST	S	ST	S			S	ST		
	1.02.05.1.02.05.01.19.	10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	10	665,84	1	75,11	2	164,23	2	140,14	100,00	85,33	3	215,26	30,00	32,33		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.05.1.02.05.01.19.001.	10.1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional,Provinsi dan Kabupaten yang ditingkatkan	25	369,90	4	63,64	4	115,64	0	97,07	0,00	83,94	4	160,70	16,00	43,45		
	1.02.05.1.02.05.01.19.002.	10.2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang Disusun	10	295,95	1	11,48	2	48,59	2	43,08	100,00	88,66	3	54,55	30,00	18,43		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	86,30	50,00	86,30			23,00	30,94		
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			SR	SR		
	1.02.05.1.02.05.01.20.	11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan	107	1.063,72	7	59,63	20	78,93	5	58,85	25,00	74,56	12	118,48	11,21	11,14		
	1.02.05.1.02.05.01.20.002.	11.1 Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri	Jumlah pelaksanaan Pengujian Pencemaran Emisi Udara	180	355,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Jumlah Alat Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak yang di uji	5	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.05.1.02.05.01.20.003.	11.2 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah Pengujian Air Limbah dari Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi yng di uji	42	387,55	7	59,63	8	57,46	5	39,00	62,50	67,88	12	98,64	28,57	25,45		
	1.02.05.1.02.05.01.20.005.	11.3 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Jumlah Penyuluhan pada Pelaku Usaha dan Masyarakat	4	321,17	0	-	1	21,47	1	19,85	100,00	92,45	1	19,85	25,00	6,18		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								81,25	80,17	81,25	80,17			13,39	7,91		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program										10.163,75	9.639,71						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								85,70	85,70	86,69	85,70			37,08	37,35		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								ST	ST	T	T			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
13.	0.00.00.1.02.06.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	6.237,64	85	1.282,07	100	1.342,37	97	1.267,54	97,49	94,43	36	2.549,61	36,50	40,87	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	0.00.00.1.02.06.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat/Paket/Pengiriman	3048	17,10	595	620,70	300	3,53	263	3,09	87,81	87,65	858	623,79	28,15			
	0.00.00.1.02.06.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	240	753,76	48	52,80	4	101,50	4	87,87	100,00	86,58	52	140,67	21,67	18,66		
	0.00.00.1.02.06.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya	100	28,15	18	5,56	20	6,83	20	6,73	100,00	98,48	38	12,29	38,33	43,66		
	0.00.00.1.02.06.01.01.007.	1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	8	70,58	-	-	1	9,48	1	9,48	100,00	100,00	1	9,48	12,50	13,43		
	0.00.00.1.02.06.01.01.008.	1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	7	164,04	1	30,54	5	52,27	5	50,97	100,00	97,53	6	81,51	85,71	49,69		
	0.00.00.1.02.06.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	37	275,62	6	10,93	37	45,01	37	44,94	100,00	99,85	43	55,87	117,20	20,27		
	0.00.00.1.02.06.01.01.011.	1.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	142899	73,44	3498	5,77	17872	12,55	17873	12,55	100,00	100,00	21371	18,32	14,96	24,95		
	0.00.00.1.02.06.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	6	7,47	1	41,68	4	2,99	4	2,99	100,00	100,00	5	44,67	80,66	597,90		
	0.00.00.1.02.06.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	180	22,49	31	373,64	24	45,35	24	44,87	100,00	98,95	55	418,52	30,31	0,00		
	0.00.00.1.02.06.01.01.016.	1.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	22715	196,96	4543	2,84	3200	25,12	3200	25,12	100,00	100,00	7743	27,96	34,09	14,19		
	0.00.00.1.02.06.01.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	240	77,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.06.01.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	362	1.517,87	63	99,01	9	232,94	8	184,51	88,89	79,21	71	283,52	19,53	18,68		
	0.00.00.1.02.06.01.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	338	2.769,17	63	34,28	63	752,00	63	741,60	100,00	98,62	126	775,88	37,19	28,02		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.06.01.01.027.	1,14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	1200	264,00	240	4,32	4	52,80	4	52,80	100,00	100,00	244	57,12	20,33	21,64		
										98,21	89,06	98,21	89,06			38,62	65,47		
										ST	T	ST	T			SR	R		
	0.00.00.1.02.06.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	2.788,58	20	584,21	100	204,89	145	277,37	145,41	135,38	33	861,58	33,08	30,90		
	0.00.00.1.02.06.01.02.005.	2,1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	4	70,41	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.06.01.02.009.	2,2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	44	595,29	9	34,85	0	-	0	-	0	-	9	34,85	20,45	5,85		
	0.00.00.1.02.06.01.02.022.	2,3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	100	54,63	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.06.01.02.024.	2,4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	9	133,80	2	26,92	2	26,25	2	26,25	100,00	99,98	4	53,16	44,44	39,73		
	0.00.00.1.02.06.01.02.028.	2,5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12	106,88	2	18,97	12	36,20	12	36,20	100,00	100,00	14	55,17	115,50	51,62		
	0.00.00.1.02.06.01.02.042.	2,6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	26	767,01	5	503,47	0	-	0	-	0	-	5	503,47	19,23	65,64		
	0.00.00.1.02.06.01.02.052.	2,7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	63	1.060,55	-	-	8	142,44	8	214,92	100,00	150,89	8	214,92	12,70	20,27		
										100,00	116,96	100,00	116,96			30,33	26,16		
										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.02.06.01.06.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	340,96	100	64,35	100	64,16	100	64,99	100	101,30	40	129,34	40	37,94		
	0.00.00.1.02.06.01.06.001.	3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	35	340,96	7	64,35	7	64,16	7	64,99	100,00	101,30	14	129,34	40,00	37,94		
										100,00	101,30	100,00	101,30			40,00	37,94		
										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.06.1.02.06.01.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								0	-								
	1.02.06.1.02.06.01.15.	4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	90	10.109,88	80	2.319,53	90	2.253,90	80	1.990,45	88,89	88,31	80	4.309,98	35,56	42,63		
	1.02.06.1.02.06.01.15.001.	4.1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	468485	712,00	496471	539,87	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.06.1.02.06.01.15.008.	4.2 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	80	9.336,51	80	1.779,66	80	2.253,90	80	1.990,45	100,00	88,31	32	3.770,11	40,00	40,38		
	1.02.06.1.02.06.01.15.013.	4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dinas	1	61,37	-	-	0	-	0	-	100,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
										100,00	88,31	100,00	88,31			13,33	13,46		
										ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.02.06.1.02.06.01.16.	5 Program Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80	1.013,08	-	-	100	134,04	100	33,41	100,00	24,93	100	33,41	125,00	3,30		
	1.02.06.1.02.06.01.16.001.	5.1 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	76100	385,35	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Jumlah Pelayanan KTP elektronik	226322	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Jumlah Pelayanan KIA	40904	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.06.1.02.06.01.16.002.	5.2 Peningkatan Pendataan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Penduduk Pindah Datang	32313	61,60	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.06.1.02.06.01.16.003.	5.3 Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan (KK, KTP Elektronik, KIA, Akta, Formulir)	65683	566,13		-	10400	134,04	10400	33,41	100	24,93	10400	33,41	15,83	5,90		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00		24,93		100,00	24,93			3,17	1,18		
		Predikat kinerja						ST		SR		ST	SR			SR	SR		
	1.02.06.1.02.06.01.17.	6. Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	80	308,54		-			0	-								
	1.02.06.1.02.06.01.17.001.	6.1 Peningkatan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah Kutipan Akta Kelahiran	28639	308,54		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja						SR		SR		SR	SR			SR	SR		
	1.02.06.1.02.06.01.18.	7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80	154,22		-			0	-								
	1.02.06.1.02.06.01.18.001.	7.1 Pengintegrasian Dokumen Kependudukan dengan Data SIADK	Jumlah Dokumen Kependudukan yang Terintegrasi	48	154,22		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja						SR		SR		SR	SR			SR	SR		
	1.02.06.1.02.06.01.19.	8. Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	80	309,13		-			0	-								
	1.02.06.1.02.06.01.19.001.	8.1 Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	28	309,13		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja						SR		SR		SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program						3.999,36		3.633,76						SR	SR		
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program						99,64		84,11		99,64	84,11			15,68	18,03		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program						ST		T		ST	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
14	0.00.00.1.02.07.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	93	5.091,07	19	889,66	90	905,22	73	800,80	80,60	88,46	36	1.690,46	39,33	33,20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	0.00.00.1.02.07.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	2500	14,49	500	3,00	415	2,49	415	2,49	100,00	100,00	915	5,49	36,60	37,89		
	0.00.00.1.02.07.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	240	431,16	48	54,43	48	86,76	48	58,29	100,00	67,18	96	112,72	40,00	26,14		
	0.00.00.1.02.07.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanj Periznannya	40	97,70	7	24,79	8	16,00	4	11,67	45,80	72,95	11	36,46	26,66	37,32		
	0.00.00.1.02.07.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	133,00	12	20,00	12	19,63	12	19,63	100,00	100,00	5	39,63	40,00	29,79		
	0.00.00.1.02.07.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	343,67	6	23,58	29	47,57	29	47,48	99,80	99,80	35	71,06	116,48	20,68		
	0.00.00.1.02.07.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	45108	266,25	9022	20,62	29504	18,57	26484	16,67	89,76	89,76	35506	37,29	78,71	14,01		
	0.00.00.1.02.07.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	6	27,60	1	4,80	4	4,80	3	3,91	81,35	81,35	4	8,71	74,24	31,54		
	0.00.00.1.02.07.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	1200	84,96	11	18,03	11	19,98	10	18,93	94,74	94,74	21	36,96	1,79	43,50		
	0.00.00.1.02.07.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	4500	32,00	900	6,97	480	7,76	468	7,57	97,55	97,55	1368	14,54	30,41	45,44		
	0.00.00.1.02.07.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1162	46,24	42	1,33	115	7,25	101	6,35	87,62	87,62	143	7,68	12,27	16,60		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.07.01.01.018.	1,11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	339	1.609,36	68	489,89	32	208,48	22	144,62	69,37	69,37	90	634,51	26,55	39,43		
	0.00.00.1.02.07.01.01.019.	1,12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	60	807,00	0	-	23	275,40	23	283,50	100,00	102,94	23	283,50	38,33	35,13		
	0.00.00.1.02.07.01.01.020.	1,13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	703	897,63	141	162,22	94	130,54	86	119,70	91,70	91,70	227	281,92	32,26	31,41		
	0.00.00.1.02.07.01.01.027.	1,14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	20	300,00	48	60,00	4	60,00	4	60,00	100,00	100,00	10	120,00	52,00	40,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								89,84	89,64	89,84	89,64			43,31	32,06		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
	0.00.00.1.02.07.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	97	2.085,21	97	27,82	90	134,36	85	133,94	94,39	99,69	36	161,75	37,44	7,76		
	0.00.00.1.02.07.01.02.003.	2,1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	100,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.07.01.02.005.	2,2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	1	35,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.07.01.02.010.	2,3 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	1	50,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.07.01.02.022.	2,4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana/Prasarana gedung kantor yang di pelihara	1	966,80		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.07.01.02.024.	2,5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	32	369,50	2	12,00	8	122,60	8	122,20	100,00	99,68	10	134,20	31,25	36,32		
	0.00.00.1.02.07.01.02.028.	2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	303	105,11	60	15,82	4	11,76	4	11,74	100,00	99,79	64	27,55	21,12	26,21		
	0.00.00.1.02.07.01.02.042.	2,7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	50,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.07.01.02.052.	2,8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	408,80		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,73	100,00	99,73			6,55	7,82		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.02.07.01.07.	3. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	96	216,09	20	45,67	90	18,16	90	18,16	100,00	100,00	44	63,83	46,03	29,54		
	0.00.00.1.02.07.01.07.001.	3.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	40	216,09	8	45,67	8	18,16	8	18,16	100,00	100,00	16	63,83	39,78	29,54		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			39,78	29,54		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.07.1.02.07.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							12.273,00	0	-								
	1.02.07.1.02.07.01.16.	4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif Membangun Desa	100	4.765,54	22	709,63	25	557,21	24	545,43	96,00	97,89	46	1.255,07	46,00	26,34		
	1.02.07.1.02.07.01.16.012.	4.1 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat yang Ditampilkan Pada Gelar TTG	2	1.237,78	2	213,29	2	34,60	0	31,89	0,00	92,17	2	245,18	100,00	19,81		
	1.02.07.1.02.07.01.16.013.	4.2 Promosi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Hasil Usaha Desa	Jumlah Desa yang Terdata Produk Hasil Usaha Desa	114	750,99	21	131,38	39	51,69	13	47,71	33,33	92,30	34	179,09	29,82	23,85		
	1.02.07.1.02.07.01.16.014.	4,2 Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Berkembang	197	246,77	96	219,40	0	-	0	-	0,00	0,00	96	219,40	48,73	88,91		
	1.02.07.1.02.07.01.16.015.	4,3 Pengembangan Lembaga BUM Desa	Jumlah BUM Desa yang Aktif Membangunan Desa	317	389,64	15	73,94	102	232,28	10	230,15	9,80	99,08	25	304,08	7,89	78,04		
	1.02.07.1.02.07.01.16.018.	4,4 Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah KP SPAMS yang Terbina	100	795,37	9	71,63	20	31,90	4	30,80	20,00	96,55	13	102,43	13,00	12,88		
	1.02.07.1.02.07.01.16.019.	4,5 Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang Terbentuk	375	680,00		-	75	60,30	12	60,02	16,00	99,54	12	60,02	3,20	8,83		
		4,6	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang Terbina	375	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.07.1.02.07.01.16.020.	4,7 Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	Jumlah Posyantek Desa yang dibentuk	197	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.07.1.02.07.01.16.021.	4,8 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Bum Desa yang Terbina	230	665,00		-	60	146,44	24	144,87	40,00	98,93	24	144,87	10,43	21,78		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										19,86	96,43	19,86	96,43		23,68	28,23	
		Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST		SR	SR	
	1.02.07.1.02.07.01.17.	5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	92	62.001,02	85	11.505,90	90	10.453,97	80	10.337,86	88,89	98,89	165	21.843,76	179,35	35,23		
	1.02.07.1.02.07.01.17.001.	5,1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pembinaan dan Melaksanakan Lomba BB GRM	144	300,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
	1.02.07.1.02.07.01.17.002.	5,2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan yang Diikuti	20	341,79	20	60,56	20	44,71	20	41,80	100,00	93,50	20	102,36	40,00	29,95		
	1.02.07.1.02.07.01.17.004.	5,3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Monioring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Desa	18	732,88	18	139,70	18	123,71	18	103,16	100,00	83,39	18	242,86	40,00	33,14		
	1.02.07.1.02.07.01.17.010.	5,4 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dibina	254	637,04	42	63,96	11	146,33	11	135,12	100,00	92,34	53	199,08	20,87	31,25		
	1.02.07.1.02.07.01.17.013.	5,5 Pelaksanaan dan Pembinaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi	Jumlah Pendamping Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi	990	52.191,03	148	9.201,60	194	8.850,56	146	8.810,64	75,26	99,55	294	18.012,25	29,70	34,51		
	1.02.07.1.02.07.01.17.014.	5,6 Peningkatan Kapasitas Adat dan Sosial Budaya	Jumlah Lembaga Adat dan Sosial Budaya yang Dibina	236	753,46	16	59,73	70	67,28	13	56,47	18,57	83,94	29	116,20	12,29	15,42		
	1.02.07.1.02.07.01.17.015.	5,7 Pelaksanaan TMMD	Jumlah Lokasi Kegiatan Pelaksanaan TMMD	10	5.544,81	2	1.980,35	2	1.221,40	1	1.190,67	50,00	97,48	3	3.171,03	30,00	57,19		
	1.02.07.1.02.07.01.17.016.	5,8 Karya Bhakti TNI	Jumlah Lokasi Kegiatan karya Bhakti TNI	3	1.500,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										73,97	91,70	73,97	91,70		21,61	25,18	
		Predikat kinerja										S	ST	S	ST				
	1.02.07.1.02.07.01.18.	6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan	940	1.643,41	20	76,76	197	184,77	80	181,35	40,61	98,15	100	258,11	10,64	15,71		
	1.02.07.1.02.07.01.18.003.	6,1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mendapatkan Pelatihan	400	500,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.07.1.02.07.01.18.011.	6,2 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Badan Permusyawaratan Desa yang Mendapatkan Pembinaan	200	643,41	7	76,76	40	184,77	20	181,35	50,00	98,15	27	258,11	13,50	40,12		
	1.02.07.1.02.07.01.18.015.	6,3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terbina dan Dilakukan Pengawasan Pemerintahan Desa	197	500,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										50,00	98,15	50,00	98,15		4,50	13,37	
		Predikat kinerja										SR	ST	SR	ST		SR	SR	
	1.02.07.1.02.07.01.19.	7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/Kelurahan	236	4.945,77	118	919,29	236	487,00	38	304,70	16,10	62,57	156	1.223,99	65,89	24,75		
	1.02.07.1.02.07.01.19.002.	7,1 Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah PKK yang terbina dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK	236	2.464,54	38	447,59	47	427,81	38	304,70	80,85	71,22	76	752,29	32,20	30,52		
	1.02.07.1.02.07.01.19.004.	7,2 Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah PKK yang terbina dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK	236	2.481,23	197	471,70	47	59,19	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										40,43	35,61	40,43	35,61		16,10	15,26	
		Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	1.02.07.1.02.07.01.25.	8. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	15	1.777,50		49,90			0	-								
	1.02.07.1.02.07.01.25.001.	8,1 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang dibangun dan ditingkatkan	13	1.777,50		49,90			0	-	0,00	0,00	0	49,90	0,00	2,81		
		Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2,81	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.07.1.02.07.01.26.	9. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	1144	1.280,45	197	102,41	197	200,00	197	170,25	100,00	85,12	394	272,66	34,44	2,69		
	1.02.07.1.02.07.01.26.001.	9.1 Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	3100	584,55	394	37,85	197	200,00	108	170,25	54,82	85,12	502	208,10	16,19	35,60		
	1.02.07.1.02.07.01.26.003.	9.2 Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Informasi	1906	695,90	394	64,56	0	-	0	-	0,00	0,00	394	64,56	20,67	9,28		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								54,82	85,12	54,82	85,12			18,43	22,44		
		Predikat kinerja								R	T	R	T			SR	SR		
	1.02.07.1.02.07.01.27.	10. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pemetaan Kawasan Perdesaan	224	813,43	20	46,47			0	-								
	1.02.07.1.02.07.01.27.001.	10.1 Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan	Jumlah Lokasi pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Kawasan Perdesaan	5	50,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.07.1.02.07.01.27.002.	10.2 Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan	235	763,43	20	46,47			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.07.1.02.07.01.28.	11. Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	197	1.556,14	10	43,22	45	47,45	8	45,44	17,78	95,76	18	88,66	9,14	5,70		
	1.02.07.1.02.07.01.28.001.	11.1 Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa	Jumlah Desa yang Telah Melakukan Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa	157	500,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.07.1.02.07.01.28.002.	11.2 Evaluasi dan perkembangan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa	180	656,14	20	43,22	36	47,45	8	45,44	22,22	95,76	28	88,66	15,56	13,51		
	1.02.07.1.02.07.01.28.003.	11.3 Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Validasi Data Batas Desa	107	400,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								22,22	95,76	22,22	95,76			5,19	4,50		
		Predikat kinerja								SR	ST	SR	ST			SR	SR		
	1.02.07.1.02.07.01.29.	12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	197	8.481,49	58	1.042,16	50	342,60	58	239,86	116,00	70,01	116	1.282,01	58,88	15,12		
	1.02.07.1.02.07.01.29.002.	12.1 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Kecamatan yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	14	8.481,49	14	1.042,16	14	342,60	14	239,86	100,00	70,01	14	1.282,01	40,00	15,12		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	70,01	100,00	70,01			40,00	15,12		
		Predikat kinerja								S	ST	S	S			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program							13.330,74	65,11	86,22	65,11	86,22			18,26	16,36		
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								R	T	R	T			SR	SR		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								R	T	R	T			SR	SR		
	A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
	B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Letak Geografis Antar Desa																	
	C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
	D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
15.	0.00.00.1.02.08.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	3.951,76	23,00	662,94	100	698,70	88,38	612,59	88,38	87,68	41	1.275,54	40,76	32,28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	0.00.00.1.02.08.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang digunakan	3990	29,18	790	4,55	800	6,00	640	3,15	80,00	52,42	1430	7,70	35,84	26,37		
	0.00.00.1.02.08.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	420	440,76	84	90,28	7	71,40	7	51,73	100,00	72,46	91	142,02	21,67	32,22		
	0.00.00.1.02.08.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan Pajak yang dibayarkan	170	114,00	34	27,99	34	27,36	34	26,99	100,00	98,67	68	54,98	40,00	48,22		
	0.00.00.1.02.08.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terjaga Kebersihannya	10	84,29	2	45,55	2	8,99	2	8,99	100,00	100,00	4	54,54	40,00	64,71		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.08.01.01.009.	1,5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Pendukung dan Peralatan Kerja	140	45,27	26	6,90	28	9,00	25	8,70	89,29	96,67	51	15,60	36,43	34,46		
	0.00.00.1.02.08.01.01.010.	1,6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Alat Tulis	27	84,03	27	17,88	27	15,33	27	15,33	100,00	100,00	54	33,20	200,00	39,51		
	0.00.00.1.02.08.01.01.011.	1,7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	147000	60,82	28953	12,10	29000	13,20	29000	13,20	100,00	100,00	57953	25,30	39,42	41,60		
	0.00.00.1.02.08.01.01.012.	1,8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat listrik dan Elektronik	154	10,26	30	2,00	30	2,00	30	2,00	100,00	100,00	60	4,00	38,96	38,98		
	0.00.00.1.02.08.01.01.015.	1,9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Bahan Informasi yang dibayarkan	80	32,59	16	3,72	16	6,00	12	4,20	75,00	70,00	28	7,92	35,00	24,30		
	0.00.00.1.02.08.01.01.016.	1,1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Operasional yang digunakan	170	177,43	34	29,65	34	34,24	24	15,11	70,59	44,12	58	44,76	34,12	25,23		
	0.00.00.1.02.08.01.01.017.	1,11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum untuk Aparatur	3283	71,83	640	14,40	640	25,60	560	22,40	87,50	87,50	1200	36,80	36,55	51,23		
	0.00.00.1.02.08.01.01.018.	1,12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	311	1.617,35	26	345,70	26	136,47	23	115,80	89,48	84,86	49	461,50	15,84	28,53		
	0.00.00.1.02.08.01.01.019.	1,13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang dibayarkan	742	791,78	-	194	224,00	194	223,00	100,00	99,55	0	223,00	0,00	28,16			
	0.00.00.1.02.08.01.01.020.	1,14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	245	392,17	21	62,22	21	119,13	18	102,00	86,74	85,62	39	164,22	16,01	41,88		
Rata-rata capaian kinerja (%)				91,33		85,13		91,33		85,13				42,13		37,53			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T				SR		SR			
	0.00.00.1.02.08.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	84	938,66	15	141,35	100	6,40	10,53	6,37	10,53	99,52	26	147,72	30,39	15,74		
	0.00.00.1.02.08.01.02.003.	2,1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	2	200,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.02.007.	2,2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	3	26,30	3	25,35	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.02.009.	2,3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	7	46,63	11	46,38	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.02.010.	2,4 Pengadaan meubeler	Jumlah Penyediaan Mebeluer Kantor	102	128,75	16	32,54	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.02.022.	2,5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	8	260,24	1	37,09	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.02.042.	2,6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	4	79,58	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.02.052.	2,7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	36	197,18	0	-	19	6,40	2	6,37	10,53	99,52	2	6,37	5,56	3,23		
Rata-rata capaian kinerja (%)				10,53		99,52		10,53		99,52				0,79		0,46			
Predikat kinerja				SR		ST		SR		ST				SR		SR			
	0.00.00.1.02.08.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	60	98,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.03.005.	3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	300	98,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR				SR		SR			
	0.00.00.1.02.08.01.05.	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	60	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.08.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	3	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR				SR		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.08.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	98	245,00	100	44,18	100	38,30	100	33,96	100,00	88,67	100	78,14	40,82	31,89		
	0.00.00.1.02.08.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	55	245,00	11	44,18	11	38,30	11	33,96	100,00	88,67	22	78,14	40,00	31,89		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	88,67	100,00	88,67			40,00	31,89		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.02.02.1.02.08.01.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	1.02.02.1.02.08.01.15.	6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	6	190,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.02.1.02.08.01.15.003.	6.1 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung	Jumlah SKPD yang mempunyai Data terpilah	32	190,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.02.1.02.08.01.16.	7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	94	2.334,09	66	302,02	100	439,59	55	377,71	55,00	85,92	61	679,73	25,86	29,12		
	1.02.02.1.02.08.01.16.004.	7.1 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesejahteraan dan Keadilan Gender(KG)	Jumlah Bahan Informasi tentang Kesejahteraan dan Keadilan Gender yang diterbitkan	344	396,31	232	103,19	120	20,74	0	15,87	0,00	76,52	232	119,06	67,44	30,04		
	1.02.02.1.02.08.01.16.008.	7.2 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender	96	120,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.02.1.02.08.01.16.012.	7.3 Pelaksanaan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Jumlah Penanganan Kasus Anak yang ditangani	82	1.817,78	53	198,83	20	418,85	22	361,84	110,00	86,39	75	560,67	91,46	30,84		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								55,00	81,46	55,00	81,46			52,97	20,30		
		Predikat kinerja								R	T	R	T			R	SR		
	1.02.02.1.02.08.01.17.	8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	100	521,86	27	82,05	100	124,98	74,00	118,81	74,00	95,07	51	200,86	20,20	38,49		
	1.02.02.1.02.08.01.17.010.	8.1 Pelaksanaan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Advokasi tentang Perlindungan terhadap tindak Kekerasan	222	521,86	60	82,05	50	124,98	37	118,81	74,00	95,07	97	200,86	43,69	38,49		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								74,00	95,07	74,00	95,07			43,69	38,49		
		Predikat kinerja								S	ST	S	ST			SR	SR		
	1.02.02.1.02.08.01.18.	9. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	9	3.525,21	1	695,93	2	409,24	2	331,18	100,00	80,93	2	1.027,12	6,67	29,14		
	1.02.02.1.02.08.01.18.001.	9.1 Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	20	1.588,12	20	320,26	20	208,99	20	159,82	100,00	76,47	20	480,07	40,00	30,23		
	1.02.02.1.02.08.01.18.002.	9.2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan teknis dan Penerapan PPRG	67	410,78	67	81,49	67	85,64	67	77,35	100,00	90,32	67	158,84	40,00	38,67		
	1.02.02.1.02.08.01.18.003.	9.3 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Partisipasi Perempuan yang dibina dalam program P2WKSS dan GSI	482	439,00	100	88,86	50	24,71	0	18,03	0,00	72,97	50	106,90	4,15	24,35		
	1.02.02.1.02.08.01.18.004.	9.4 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam mengelola usaha yang dilatih	130	227,81	20	42,61	0	-	0	-	0,00	0,00	10	42,61	3,08	18,70		
	1.02.02.1.02.08.01.18.007.	9.5 Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Peserta Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	890	859,51	200	162,71	200	89,91	200	75,99	100,00	84,52	200	238,70	8,99	27,77		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								75,00	81,07	75,00	81,07			19,24	27,94		
		Predikat kinerja								S	T	S	T			SR	SR		
	1.02.02.1.02.08.01.20.	10. Program Pengembangan Kota Layak Anak	Angka Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	3000	1.054,54	580	179,93	600	76,01	600	69,73	100,00	91,73	590	249,65	7,87	23,67		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.02.1.02.08.01.20.001.	10.1 Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Jumlah Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak yang dibentuk	21	1.054,54	2	179,93	5	76,01	5	69,73	100,00	91,73	4	249,65	6,67	23,67		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	91,73	100,00	91,73			6,67	23,67		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6.199,92	0	-								
	1.02.08.1.02.08.01.15.	11. Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	17	8.650,86	19	608,66	17	1.229,20	17	846,81	100,00	68,89	18	1.455,46	41,21	16,82		
	1.02.08.1.02.08.01.15.001.	11.1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin	Jumlah Lokasi Kegiatan Pemenuhan PUS ber-KB bagi Keluarga Miskin	15	420,63	15	90,78	3	33,15	1	29,10	33,33	87,80	8	119,89	21,33	28,50		
	1.02.08.1.02.08.01.15.002.	11.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen BOKB	Koordinasi dan Pertemuan Sosialisasi KKBPK	2	172,69	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.08.1.02.08.01.15.005.	11.3 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang dilaksanakan dan diikuti	20	307,78	20	66,17	4	29,09	1	26,38	25,00	90,67	11	92,55	21,00	30,07		
	1.02.08.1.02.08.01.15.006.	11.4 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Koordinasi Tim KB Keliling	10	69,24	10	16,65	-	-	0	-	0,00	0,00	5	16,65	20,00	24,05		
	1.02.08.1.02.08.01.15.007.	11.5 Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Sarana Lapangan bagi petugas lapangan/penyuluhan KB di tingkat Kecamatan yang tersedia	10	4.571,45	10	24,37	2	349,90	0	-	0,00	0,00	5	24,37	20,00	0,53		
	1.02.08.1.02.08.01.15.008.	11.6 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOKB dan Penyediaan Media KIE yang dilaksanakan	135	2.495,99	135	410,69	27	203,96	27	179,14	100,00	87,83	81	589,83	24,00	23,63		
	1.02.08.1.02.08.01.15.009.	11.7 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Sarana KIE KIT	114	589,00	0	-	114	589,00	114	588,50	100,00	99,92	57	588,50	20,00	99,92		
	1.02.08.1.02.08.01.15.010.	11.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dataku	5	24,10	0	-	5	24,10	5	23,68	100,00	98,27	3	23,68	20,00	98,27		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								65,48	80,39	65,48	80,39			18,29	38,12		
		Predikat kinerja								R	T	R	T			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.16.	12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100	711,92	100	69,99	100	3,20	0	1,70	0,00	53,13	50	71,69	20,00	10,07		
	1.02.08.1.02.08.01.16.001.	12.1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Sekolah SMP dan SMA yang mendapatkan Materi tentang KRR	25	341,92	5	69,99	5	3,20	0	1,70	0,00	53,13	3	71,69	4,00	20,97		
	1.02.08.1.02.08.01.16.002.	12.2 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Cakupan Tenaga Pendamping Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang dilatih	270	370,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	53,13	0,00	53,13			2,00	10,48		
		Predikat kinerja								SR	R	SR	R			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.17.	13. Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19	726,30	1	53,68	19	106,86	19	73,50	100,00	68,78	10	127,18	21,43	17,51		
	1.02.08.1.02.08.01.17.002.	13.1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Peserta Akseptor KB aktif dan baru yang mendapatkan Pelayanan KB	200	200,00	-	-	50	21,47	0	18,08	0,00	84,21	0	18,08	0,00	9,04		
	1.02.08.1.02.08.01.17.003.	13.2 Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah Penyediaan Alat Kontrasepsi	200	160,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.08.1.02.08.01.17.005.	13.3 Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Penyaluran Alkon ke Faskes KB/Klinik KB	875	366,30	128	53,68	175	85,39	175	55,42	100,00	64,90	152	109,10	6,93	29,78		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	74,56	50,00	74,56			2,31	12,94		
		Predikat kinerja								SR	S	SR	S			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.18.	14 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	100	26.563,46	100	3.144,42	20	4.579,82	20	2.742,91	100,00	59,89	60	5.887,34	24,00	22,16		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.08.1.02.08.01.18.003.	14.1 Koordinasi Pengelolaan Program (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan dan Koordinasi Pengelolaan Program di Kampung KB	150	10.500,00	30	335,30	30	1.620,20	30	260,64	100,00	16,09	30	595,94	8,00	5,68		
	1.02.08.1.02.08.01.18.005.	14.2 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Cakupan Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	250	331,46	20	84,41	50	39,46	50	38,68	100,00	98,05	35	123,09	5,60	37,14		
	1.02.08.1.02.08.01.18.006.	14.3 Bantuan Operasional KB (Dana Alokasi Khusus)	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan Dana Operasional	20	7.200,00	14	1.025,51	16	1.504,16	14	1.229,21	87,50	81,72	14	2.254,73	28,00	31,32		
	1.02.08.1.02.08.01.18.009.	14.4 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB (Dana Alokasi Khusus/ DAK)	Cakupan Petugas yang menerima Operasional PPKBD dan Sub PPKBD	28440	8.532,00	5664	1.699,20	5688	1.416,00	5664	1.214,38	99,58	85,76	5664	2.913,58	7,97	34,15		
Rata-rata capaian kinerja (%)										96,77	70,40	96,77	70,40			12,39	27,07		
Predikat kinerja										ST	S	ST	S			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.20.	15. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	56	1.063,48	10	181,49	55	241,50	11	221,97	20,45	91,91	11	403,46	7,62	37,94		
	1.02.08.1.02.08.01.20.001.	15.1 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Kelompok PIK R/M yang dibentuk	29	365,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.08.1.02.08.01.20.003.	15.1 Pelaksanaan Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah	Persentase Pengembangan dalam Tahapan PIK KRR	55	698,48	53	181,49	55	241,50	55	221,97	100,09	91,91	54	403,46	39,44	57,76		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,09	91,91	100,09	91,91			19,72	28,88		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.21.	16. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	80	320,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	1.02.08.1.02.08.01.21.001.	16.1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah Penyuluhan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS di Sekolah	26	320,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.08.1.02.08.01.23.	17. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	85	303,85	18	63,08	85	39,35	7	34,32	8,78	87,22	13	97,40	5,99	32,05		
	1.02.08.1.02.08.01.23.001.	17.1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah Anggota Poktan yang dilatih untuk peningkatan peran dan fungsi tribina dan IUPPKS	335	303,85	60	63,08	60	39,35	25	34,32	41,67	87,22	43	97,40	5,07	32,05		
Rata-rata capaian kinerja (%)										41,67	87,22	41,67	87,22			5,07	32,05		
Predikat kinerja										SR	T	SR	T			SR	SR		
Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									7.993,14		5.471,57								
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program)										66,14	83,10	66,14	83,10			15,60	19,40		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										S	T	S	T			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik masih belum selesai pengadaanya baik berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
0.00.00.1.02.09.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		82	12.242,99	50,16	1.606,72	80	2.416,16	76	2205	94,46	91,27	62,86	3812,04	30,59	31,14	DINAS PERHUBUNGAN	
0.00.00.1.02.09.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani		10300	25,00	1000	4,49	850	4,60	850	5	100,00	99,95	1850,00	9,09	17,96	36,35		
0.00.00.1.02.09.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		240	1.126,61	4	214,88	60	212,34	60	210	100,00	98,83	64,00	424,74	26,67	37,70		
0.00.00.1.02.09.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya		259	334,15	6	13,71	62	76,95	50	48	80,65	63,00	56,00	62,19	21,62	18,61		
0.00.00.1.02.09.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya		316	301,95	6	7,50	316	68,94	316	69	100,00	100,00	322,00	76,44	40,76	25,32		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.09.01.01.010.	1,5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	983	385,98	29	53,45	983	74,65	981	74	99,80	99,73	1010,00	127,90	41,10	33,14		
	0.00.00.1.02.09.01.01.011.	1,6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	120375	316,55	11383	69,33	10533	62,19	10540	57	100,07	91,84	21923,00	126,44	18,21	39,94		
	0.00.00.1.02.09.01.01.015.	1,7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	177	22,15	33	3,58	33	3,58	33	3	100,00	83,92	66,00	6,58	37,29	29,68		
	0.00.00.1.02.09.01.01.016.	1,8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan Kantor	73368	664,85	14459	141,67	5500	83,44	5449	67	99,07	80,35	19908,00	208,72	27,13	31,39		
	0.00.00.1.02.09.01.01.017.	1,9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	20961	467,53	4896	98,02	86	84,27	77	76	89,53	89,62	4973,00	173,54	23,73	37,12		
	0.00.00.1.02.09.01.01.018.	1,10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	781	3.985,03	114	786,88	75	605,30	61	485	81,33	80,19	175,00	1272,29	22,41	31,93		
	0.00.00.1.02.09.01.01.019.	1,11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	520	3.877,20			129	921,60	124	922	96,12	100,07	124,00	922,20	23,85	23,79		
	0.00.00.1.02.09.01.01.020.	1,12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	382	736,01	161	213,22	46	218,30	40	189	86,96	86,44	201,00	401,92	52,62	54,61		
Rata-rata capaian kinerja (%)										94,46	89,50	94,46	89,50			29,44	33,30		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
0.00.00.1.02.09.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		64	1.099,85	44,31	123,04	80	355,55	77	333	95,71	93,65	60,44	456,00	37,54	41,46		
0.00.00.1.02.09.01.02.005.	2,1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan		1	39,54	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.00.1.02.09.01.02.010.	2,2 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan		20	150,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.00.1.02.09.01.02.023.	2,3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara		10	207,40	3	38,59	8	89,78	4	84	50,00	93,97	7,00	122,96	70,00	59,29		
0.00.00.1.02.09.01.02.024.	2,4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara		28	267,91	8	51,04	9	109,80	9	103	100,00	94,02	17,00	154,27	60,71	57,58		
0.00.00.1.02.09.01.02.028.	2,5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara		25	165,00	6	33,40	13	59,97	12	50	92,31	83,49	18,00	83,47	72,00	50,59		
0.00.00.1.02.09.01.02.052.	2,6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12956	270,00	0	-	524	96,00	533	95	101,72	99,27	533,00	95,30	4,11	35,29		
Rata-rata capaian kinerja (%)										86,01	92,69	86,01	92,69			34,47	33,79		
Predikat kinerja										T	ST	T	ST			SR	SR		
0.00.00.1.02.09.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		77	274,60	0	-	70	123,09	70	123	99,51	99,61	34,83	122,61	45,35	44,65		
0.00.00.1.02.09.01.03.002.	3,1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan		32	274,60	0	-	203	123,09	202	123	99,51	99,61	40,40	122,61	50,50	44,65		
Rata-rata capaian kinerja (%)										99,51	99,61	99,51	99,61			50,50	44,65		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			R	SR		
0.00.00.1.02.09.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		77	1.991,08	7	22,72	0	-	0	0	0	-	6,67	22,72	8,68	1,14		
0.00.00.1.02.09.01.05.001.	3,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		32	1.650,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.00.1.02.09.01.05.002.	3,2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan		100	250,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
0.00.00.1.02.09.01.05.019.	3,3 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan		5	91,08	1	22,72	0	-	0	0	0	-	1,00	22,72	20,00	24,95		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			6,67	8,32		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.09.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	73	1.359,08	0	-	100	156,35	100	155	100,00	99,29	50,00	155,24	27,40	11,42		
	0.00.00.1.02.09.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	40	544,14	0	-	8	91,99	8	91	100,00	99,03	8,00	91,10	20,00	16,74		
	0.00.00.1.02.09.01.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	214,94	0	-	1	64,36	1	64	100,00	99,67	1,00	64,15	20,00	29,84		
	0.00.00.1.02.09.01.06.006.	5.3 Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	4	600,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	99,35	100,00	99,35			13,33	15,53		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.09.1.02.09.01.	PERHUBUNGAN							8.320,24										
	1.02.09.1.02.09.01.15.	6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Dokumen Standar Perhubungan	58	531,93	1	402,07	0	-	0	0	0	-	1,02	402,07	1,75	75,59		
	1.02.09.1.02.09.01.15.002.	6.1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Jumlah dokumen norma/kebijakan/standar/prosedur bidang perhubungan yang dihasilkan	57	531,93	1	402,07	0	-	0	0	0	-	1,00	402,07	1,75	75,59		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00			1,75	75,59		
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.09.1.02.09.01.16.	7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	58	5.787,09	4	754,35	60	1.333,00	0	1135	0,00	85,16	4,39	1889,53	3,02	32,65		
	1.02.09.1.02.09.01.16.005.	7.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang dipelihara	57	5.187,09	5	754,35	4	1.333,00	0	1135	0,00	85,16	5,00	1889,53	8,77	36,43		
	1.02.09.1.02.09.01.16.006.	7.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	4	600,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	85,16	0,00	85,16			4,39	18,21		
	Predikat kinerja									SR	T	SR	T			SR	SR		
	1.02.09.1.02.09.01.17.	8. Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	74	15.027,03	20,83	2.090,51	70	2.464,22	24	1954	34,60	79,28	45,05	4044,17	60,72	26,91		
	1.02.09.1.02.09.01.17.005.	8.1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah kegiatan penertiban dan pengawasan lalu lintas dan angkutan	341	2.478,03	107	750,22	10	2.175,49	10	1728	100,00	79,44	117,00	2478,32	34,31	100,01		
	1.02.09.1.02.09.01.17.014.	8.2 Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi	100	253,08	100	252,81	0	-	0	0	0	-	100,00	252,81	100,00	99,89		
	1.02.09.1.02.09.01.17.016.	8.3 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah jamaah calon haji yang dilayani	6923	11.095,92	650	1.087,48	650	76,43	0	71	0,00	92,39	650,00	1158,10	9,39	10,44		
	1.02.09.1.02.09.01.17.017.	8.4 Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah angkutan umum yang diuji	2000	750,00	0	-	1000	212,30	730	155	73,00	72,98	730,00	154,94	36,50	20,66		
	1.02.09.1.02.09.01.17.018.	8.5 Fasilitas Perijinan Bidang Perhubungan	Jumlah perizinan bidang perhubungan	400	450,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									57,67	81,60	57,67	81,60			36,04	46,20		
	Predikat kinerja									R	T	R	T			SR	SR		
	1.02.09.1.02.09.01.18.	9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	68	37.832,34	25,23	6.679,70	70	2.759,50	7	2233	9,38	80,92	31,79	8912,71	47,02	23,56		
	1.02.09.1.02.09.01.18.016.	9.1 Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga yang dibangun	31	15.008,84	13	2.954,80	6	2.591,08	0	2065	0,00	79,68	13,00	5019,40	41,94	33,44		
	1.02.09.1.02.09.01.18.017.	9.2 Pembangunan Dermaga (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah dermaga yang dibangun (DAK)	10	19.000,00	2	3.723,41	0	-	0	0	0	-	2,00	3723,41	20,00	19,60		
	1.02.09.1.02.09.01.18.018.	9.3 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Jumlah Halte penumpang	4	500,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.09.1.02.09.01.18.019.	9.4 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	10	674,85	3	1,49	4	168,42	3	168	75,00	100,00	6,00	169,90	60,00	25,18		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.09.1.02.09.01.18.021.	9.5 Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas	20	400,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.09.1.02.09.01.18.022.	9.6 Pengadaan Rambu-rambu Perairan, sungai, dan Penyeberangan	Jumlah Rambu-rambu Perairan, sungai, dan Penyeberangan	50	659,03	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.09.1.02.09.01.18.023.	9.7 Pembangunan Dermaga (Dana Insentif Daerah)	Jumlah Dermaga yang dibangun	11	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.09.1.02.09.01.18.024.	9.8 Pengadaan Sarana Transportasi (Dana Alokasi Khusus)	Jumlah Sarana Transportasi Desa yang diadakan	1	1.589,61	0	-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									37,50	89,84	37,50	89,84			15,24	9,78		
	Predikat kinerja									SR	T	SR	T			SR	SR		
	1.02.09.1.02.09.01.20.	10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tingkat Kendaraan bermotor Laik Jalan	26	2.177,95	13	94,84	60	1.763,52	60	1764	100,00	100,00	36,50	1858,36	56,15	85,33		
	1.02.09.1.02.09.01.20.002.	10.1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor	2	2.177,95	1	94,84	1	1.763,52	1	1764	100,00	100,00	2,00	1858,36	100,00	85,33		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	85,33		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			ST	T		
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				78.323,93		11.773,95		11.371,38		9.901,51								
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									67,88	91,11	67,88	91,11			26,20	28,78		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									S	ST	S	ST			SR	SR		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik, (2) penambahan volume pelaksanaan patroli bertambah drastis dalam rangka penanganan pandemi Covid -19																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
17.	0.00.00.1.02.10.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	7.837,06	95	747,48	100	1.934,86	93	1.726,05	92,52	89,21	94	2.473,53	37,50	31,56	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terlayani	4000	4,19	2148	2,25	800	0,66	717	0,59	89,63	89,63	2865	2,84	71,63	67,73		
	0.00.00.1.02.10.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	120	276,28	24	221,29	12	88,00	12	82,52	100,00	93,77	36	303,81	30,00	109,97		
	0.00.00.1.02.10.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yg dipelihara/ Perizinan kendaraan	12	60,00	#DIV/0!	-	3	12,00	3	10,85	100,00	90,40	3	10,85	25,00	18,08		
	0.00.00.1.02.10.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	5	264,63	5	74,80	27	46,52	27	45,02	100,00	96,78	6	119,82	51,20	45,28		
	0.00.00.1.02.10.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang disediakan	31	145,61	6	28,54	40	23,70	35	20,70	88,50	87,34	17	49,24	53,52	33,82		
	0.00.00.1.02.10.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	6	32,46	2	9,35	6	6,49	6	5,49	100,00	84,58	3	14,83	53,33	45,70		
	0.00.00.1.02.10.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	2	23,50	0	4,50	2	3,60	2	3,55	100,00	98,61	2	8,05	100,00	34,26		
	0.00.00.1.02.10.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / majalah yang diadakan	21	211,11	2	23,75	19	21,77	13	14,39	70,17	66,10	6	38,14	29,90	18,07		
	0.00.00.1.02.10.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Logistik yang disediakan	7500	64,40	1293	11,10	1500	18,79	902	11,29	60,13	60,09	2195	22,39	29,27	34,77		
	0.00.00.1.02.10.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yg disediakan	5	112,52	1	19,39	1	211,18	1	209,39	100,00	99,15	2	228,78	40,00	203,32		
	0.00.00.1.02.10.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	394	2.041,47	56	291,61	29	377,95	19	232,14	65,74	61,42	75	523,74	19,12	25,66		
	0.00.00.1.02.10.01.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	264	3.926,40	11	-	66	1.003,60	66	1.003,60	100,00	100,00	119	1.003,60	45,00	25,56		
	0.00.00.1.02.10.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	356	494,50	18	24,90	29	84,62	18	50,53	60,42	59,71	36	75,43	9,98	15,25		
	0.00.00.1.02.10.01.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	15	180,00	3	36,00	3	36,00	3	36,00	100,00	100,00	6	72,00	40,00	40,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									88,19	84,83	88,19	84,83			42,71	51,25		
	Predikat kinerja									T	T	T	T			SR	R		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.10.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	877,70	100	146,59	100	872,46	90	727,59	90,26	83,39	95	874,18	95,13	99,60		
	0.00.00.1.02.10.01.02.005.	2,1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5	150,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.10.01.02.007.	2,2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	3	12,39	3	8,89	0	-	0	-	0,00	0,00	3	8,89	100,00	71,74		
	0.00.00.1.02.10.01.02.009.	2,3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	5	57,40	5	86,19	0	-	0	-	0,00	0,00	5	86,19	100,00	150,15		
	0.00.00.1.02.10.01.02.022.	2,4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	4	73,41	3	18,93	0	-	0	-	0,00	0,00	3	18,93	80,00	25,79		
	0.00.00.1.02.10.01.02.024.	2,5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang terpelihara	15	118,00	3	21,50	3	37,00	3	36,02	100,00	97,34	6	57,52	40,00	48,74		
	0.00.00.1.02.10.01.02.028.	2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	496	76,50	89	11,09	3	23,48	3	21,35	100,00	90,91	92	32,44	18,60	42,40		
	0.00.00.1.02.10.01.02.052.	2,7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5	390,00	0	-	1	811,98	1	670,23	100,00	82,54	1	670,23	20,00	171,85		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		90,26		100,00		90,26		100,00		90,26		51,23			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T		ST		T		R			
	0.00.00.1.02.10.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	80	197,20	0	-	100	7,51	100	7,51	100,00	100,00	20	7,51	25,00	3,81		
	0.00.00.1.02.10.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	392	197,20	0	-	20	7,51	20	7,51	100,00	100,00	20	7,51	5,10	3,81		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		5,10		3,81			
Predikat kinerja				ST		SR		ST		SR		ST		SR		SR			
	0.00.00.1.02.10.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	100	133,20	100	23,19	100	18,00	100	8,00	100,00	44,44	40	31,19	40,00	23,42		
	0.00.00.1.02.10.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	13	133,20	3	23,19	2	18,00	2	8,00	100,00	44,44	5	31,19	35,38	23,42		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		44,44		100,00		44,44		100,00		35,38		23,42			
Predikat kinerja				ST		SR		ST		SR		ST		SR		SR			
	0.00.00.1.02.10.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	184,07	100	103,14	100	16,32	100	15,00	100,00	91,91	40	118,14	40,00	64,18		
	0.00.00.1.02.10.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	35	94,35	7	49,14	7	10,02	7	9,90	100,00	98,80	14	59,04	40,00	62,58		
	0.00.00.1.02.10.01.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	89,72	1	54,00	1	6,30	1	5,10	100,00	80,95	2	59,10	40,00	65,87		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		89,88		100,00		89,88		100,00		89,88		40,00			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T		ST		T		SR			
	1.02.10.1.02.10.01.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	1.02.10.1.02.10.01.15.	6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peersentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	20	726,94	18	664,49			0	-								
	1.02.10.1.02.10.01.15.007.	6.1 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kebijakan TIK yang terlaksana	2	90,90	2	79,96			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.10.1.02.10.01.15.011.	6.2 Perencanaan, Pengembangan, Pemeliharaan Layanan Nama Domain dan Sub Domain	Jumlah Domain dan Sub Domain go.id	20	72,28	20	63,33			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.10.1.02.10.01.15.013.	6.3 Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengendalian, pengawasan Informasi dan Telekomunikasi	20	563,76	20	521,20			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	1.02.10.1.02.10.01.18.	7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terpenuhiya kerjasama informasi dan media massa.	20	11.788,79	25	15.031,94			0	-								
	1.02.10.1.02.10.01.18.001.	7.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Saluran Informasi Pembangunan Daerah	2	219,18	2	181,59			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.10.1.02.10.01.18.005.	7.2 Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media dan Komunitas	Jumlah Jenis Kemitraan Media dan Komunitas	2	11.569,61	9	14.850,35			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	1.02.10.1.02.10.01.21.	8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	20	24.245,87		-	25	8.016,68	25	9.739,10	100,00	121,49	25	9.739,10	50,00	40,17		
	1.02.10.1.02.10.01.21.012.	8.1 Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profile Desa & Talkshow yang dipublikasikan	128	800,00		-	32	120,74	103	113,78	321,88	94,23	103	113,78	32,19	14,22		
	1.02.10.1.02.10.01.21.013.	8.2 Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Cakupan Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	90	1.000,00		-	12	51,87	6	26,74	50,00	51,56	6	26,74	6,67	2,67		
	1.02.10.1.02.10.01.21.016.	8.3 Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah kerjasama melalui media cetak, online, dan tv	320	18.985,87		-	80	6.995,67	95	8.778,38	118,75	125,48	95	8.778,38	29,69	46,24		
	1.02.10.1.02.10.01.21.017.	8.4 Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah berupa TV dan Radio Daerah	8	3.460,00		-	2	848,40	2	820,20	100,00	96,68	2	820,20	25,00	23,71		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								147,66	91,99	147,66	91,99			23,39	21,71		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.10.1.02.10.01.23.	9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhiya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	80	12.210,59		-	100	1.691,79	36	1.475,82	36,00	87,23	36	1.475,82	45,00	12,09		
	1.02.10.1.02.10.01.23.001.	9.1 Layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Domain Desa / Kel dan Lembaga Pemerintah Daerah	20	578,90		-	20	55,38	6	46,35	30,00	83,69	6	46,35	30,00	8,01		
	1.02.10.1.02.10.01.23.003.	9.2 Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi	Jumlah Pengembangan / Aplikasi / Update Website dan Aplikasi Desa / Kel / Kec / OPD	3	1.047,75		-	3	169,62	2	131,06	66,67	77,27	2	131,06	66,67	12,51		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.10.1.02.10.01.23.004.	9.3 Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Pemberintah Daerah dibidang TIK	160	821,47		-	30	84,42	0	41,41	0,00	49,05	0	41,41	0,00	5,04		
	1.02.10.1.02.10.01.23.010.	9.4 Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Waktu berlangganan bandwith, Konektivitas akses Internet, Intranet dan Komunikasi melalui Jaringan LAN maupun WAN sampai ketinggian Desa	12	3.272,59		-	12	688,21	12	580,69	100,00	84,38	12	580,69	40,00	17,74		
	1.02.10.1.02.10.01.23.011.	9.5 Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen TIK yang dibuat	4	497,15		-	1	27,54	0	27,13	0,00	98,52	0	27,13	0,00	5,46		
	1.02.10.1.02.10.01.23.012.	9.6 Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Jaringan dan Infrastruktur TIK yang dibangun sampai ke Desa	50	4.781,33		-	10	448,34	5	443,54	50,00	98,93	5	443,54	10,00	9,28		
	1.02.10.1.02.10.01.23.015.	9.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, telephone Seluler serta signal	280	1.211,41		-	280	218,28	165	205,64	58,93	94,21	165	205,64	58,93	16,97		
Rata-rata capaian kinerja (%)				43,66		83,72		43,66		83,72		43,66		83,72		29,37		10,72	
Predikat kinerja				SR		T		SR		T		SR		T		SR		SR	
	1.02.10.1.02.10.01.27.	10. Program Pengembangan E-Government	Persentase Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik, Jumlah OPD yang Menyelenggarakan E-Government	4	818,98	3	608,00			0	-								
	1.02.10.1.02.10.01.27.002.	10.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur e-Government	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur E-Government	45	476,56	9	286,39			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.10.1.02.10.01.27.003.	10.2 Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Elektronik, Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aplikasi Elektronik Bidang Komunikasi dan Informasi	1	144,53	1	143,38			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.10.1.02.10.01.27.004.	10.3 Layanan PPID Pemerintah Daerah, Media Center dan Pemantauan Isu Publik	Jumlah Petugas Pengelola PPID, Media Center dan Pemantauan Isu Publik	13	197,89	13	178,24			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
	1.02.14.1.02.10.01.	STATISTIK																	
	1.02.14.1.02.10.01.15.	11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen/buku informasi pembangunan daerah	20	283,75	13	183,28			0	-								
	1.02.14.1.02.10.01.15.001.	11.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah	2	95,45	2	73,31			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.14.1.02.10.01.15.002.	11.2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	1	188,30	1	109,97			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	1.02.14.1.02.10.01.16.	12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	20	800,00		-	25	104,56	15	101,77	60,00	97,33	15	101,77	30,00	12,72		
	1.02.14.1.02.10.01.16.002.	12.1 Pengolahan data statistik Sektoral	Jumlah Buku yang dicetak	400	800,00		-	100	104,56	100	101,77	100,00	97,33	100	101,77	25,00	12,72		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	97,33	100,00	97,33			25,00	12,72		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.15.1.02.10.01.	PERSANDIAN																	
	1.02.15.1.02.10.01.15.	13. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan persandian	20	152,21	18	137,72			0	-								
	1.02.15.1.02.10.01.15.001.	13.1 Penguatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimtek Persandian yang terlaksana	40	152,21	40	137,72			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	1.02.15.1.02.10.01.16.	14. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	20	800,00		-	25	127,66	17	112,06	68,00	87,78	17	112,06	34,00	14,01		
	1.02.15.1.02.10.01.16.006.	14.1 Pengembangan Layanan keamanan Informasi	Cakupan Pengelolaan, Identifikasi dan Analisa keamanan terhadap Informasi / Aset / Fasilitas / Instalasi Vital data dan Informasi yang dikecualikan	90	800,00		-	12	127,66	12	112,06	100,00	87,78	12	112,06	13,33	14,01		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	87,78	100,00	87,78			13,33	14,01		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program							12.789,84		13.912,90				14.933,31				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								97,72	85,58	97,72	85,58			29,50	30,53		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								ST	T	ST	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik (2) Adanya peningkatan kemitraan yang baik dengan media																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 dan Rasionalisasi Anggaran (2) Penetapan Indikator Kinerja dengan capaian tidak sinkron (3) Kurangnya support data dari OPD pembantu PPID																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Membuat regulasi / SOP (2) Membuat Perencanaan kerja (3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketa																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
0.00.00.1.02.11.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		90	2.910,65	19,74	788,18	90	616,26	71	518,36	78,64	84,11	48	1.306,53	53,39	44,89	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
0.00.00.1.02.11.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat	Jumlah materai yang terbeli		1330	6,16	324	1,50	302	1,49	290	1,43	96,03	96,16	614	2,93	46,17	47,54		
0.00.00.1.02.11.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		180	161,56	42	37,78	36	93,39	36	89,92	100,00	96,28	39	127,70	21,67	79,04		
0.00.00.1.02.11.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang		100	97,68	22	21,04	25	24,42	15	13,97	60,00	57,20	37	35,01	37,00	35,84		
0.00.00.1.02.11.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang yang dijaga kebersihannya		11	172,28	11	44,40	11	40,92	11	40,92	100,00	100,00	11	85,32	40,00	49,52		
0.00.00.1.02.11.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara/service		148	35,48	29	7,07	37	8,87	15	3,60	40,54	40,59	44	10,67	29,73	30,06		
0.00.00.1.02.11.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan		37	59,23	37	10,04	37	9,84	37	9,83	100,00	99,94	37	19,87	40,00	33,55		
0.00.00.1.02.11.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan		124419	47,55	22487	8,60	42102	12,45	38101	11,27	90,50	90,50	60588	19,86	48,70	41,76		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.11.01.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.11.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	60	110,28	14	25,08	15	26,88	15	23,15	100,00	86,12	29	48,23	48,33	43,73		
	0.00.00.1.02.11.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah logistik yang disediakan	12960	86,41	3386	22,57	2560	17,55	1960	13,34	76,56	75,99	5346	35,91	41,25	41,56		
	0.00.00.1.02.11.01.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	186,74	3	41,67	2	28,70	2	11,07	100,00	38,57	5	52,74	41,67	28,25		
	0.00.00.1.02.11.01.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	233	1.098,95	74	348,41	36	229,29	32	202,83	88,89	88,46	106	551,24	45,49	50,16		
	0.00.00.1.02.11.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang	596	733,13	149	183,43	67	93,66	49	68,23	73,13	72,85	198	251,67	33,22	34,33		
	0.00.00.1.02.11.01.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	80	115,20	20	28,80	4	28,80	4	28,80	100,00	100,00	24	57,60	30,00	50,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										86,59	80,21	86,59	80,21		35,94	40,38		
	Predikat kinerja										T	T	T	T		SR	SR		
	0.00.00.1.02.11.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	92	287,41	8,30	25,86	90	74,56	64,94	65,64	72,16	88,03	21	91,50	23,08	31,84		
	0.00.00.1.02.11.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang	4	86,78	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.11.01.02.007.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.11.01.02.022.	2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	12	44,55	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.11.01.02.024.	2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	12	92,43	3	18,90	2	19,96	2	19,88	100,00	99,59	5	38,78	41,67	41,95		
	0.00.00.1.02.11.01.02.028.	2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	71	40,44	20	6,96	12	8,00	2	1,50	18,75	18,75	22	8,46	31,34	20,92		
	0.00.00.1.02.11.01.02.052.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3	23,21	0	-	3	46,60	3	44,26	100,00	94,98	3	44,26	100,00	190,69		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										72,92	71,11	72,92	71,11		28,83	42,26		
	Predikat kinerja										S	S	S	S		SR	SR		
	0.00.00.1.02.11.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman Dan Peningkatan Disiplin ASN (%)	90	222,00	20	18,30	0	-	0	-	0,00	0,00	20	18,30	22,22	8,24		
	0.00.00.1.02.11.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	335	117,00	60	18,30	0	-	0	-	0,00	0,00	60	18,30	17,91	15,64		
	0.00.00.1.02.11.01.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	294	105,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00		8,96	7,82		
	Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	0.00.00.1.02.11.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	90	113,38	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.11.01.05.002.	4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	4	58,19	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.11.01.05.003.	4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Pelatihan Teknis yang diikuti	4	55,20	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	1.02.11.1.02.11.01.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
	1.02.11.1.02.11.01.15.	5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi	147	6.387,72	20	1.024,84	37	1.384,40	34	1.097,94	92,00	79,31	54	2.122,78	36,83	33,23		
	1.02.11.1.02.11.01.15.002.	5.1 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi Perizinan IUMK dan Penyuluhan Badan Hukum Koperasi serta Izin Usaha Simpan Pinjam Secara Online (DMIJ Plus Terintegrasi)	1173	615,26	23	11,98	30	36,92	30	36,92	100,00	100,00	53	48,89	4,50	7,95		
	1.02.11.1.02.11.01.15.006.	5.2 Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Musrenbang RKPD, Renja, RKT, PK, LKJP, LPPD-LKP), RKA, DPA dan DPPA)	32	586,17	3	56,99	8	63,01	8	59,72	100,00	94,77	11	116,70	34,72	19,91		
	1.02.11.1.02.11.01.15.011.	5.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi	20	427,46	1	11,89	0	-	0	-	0	-	1	11,89	2,78	2,78		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.11.1.02.11.01.15.013.	5.4 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	63	2.547,09	14	560,69	6	579,30	5	462,57	83,33	79,85	19	1.023,27	29,95	40,17		
	1.02.11.1.02.11.01.15.014.	5.5 Penyelesaian Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Koperasi yang mendapat Fasilitas Legalitas Standarisasi Produk seperti P-IRT, Label	36	2.211,76	6	383,29	12	705,18	12	538,74	100,00	76,40	18	922,03	50,66	41,69		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			76,67		70,20		76,67		70,20						24,52			
	Predikat kinerja			T		S		T		S		T		S		SR			
	1.02.11.1.02.11.01.16.	6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	2947	2.339,95	173	137,45	730	87,53	599	71,12	82,00	81,25	772	208,57	26,19	8,91		
	1.02.11.1.02.11.01.16.006.	6.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Bimtek/Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Studi Komperatif Usaha Mikro dan	315	734,17	0	-	30	43,21	30	42,93	100,00	99,35	30	42,93	9,52	5,85		
	1.02.11.1.02.11.01.16.007.	6.2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian dan Studi Komperatif Kelembagaan Koperasi ke Luar Provinsi (DMI)	662	738,68	111	124,24	30	23,73	0	8,00	0,00	33,71	111	132,24	16,82	17,90		
	1.02.11.1.02.11.01.16.008.	6.3 Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi HAKI dan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi UMKM	784	452,23	23	13,21	50	20,59	50	20,19	100,00	98,06	73	33,40	9,30	7,39		
	1.02.11.1.02.11.01.16.010.	6.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dengan RPJMD 2018-	80	414,88	#DIV/0!	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			66,67		77,04		66,67		77,04						8,91			
	Predikat kinerja			S		T		S		T		S		T		SR			
	1.02.11.1.02.11.01.17.	7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti	6	6.340,93	1	311,36	2	1.097,66	2	860,81	100,00	78,42	3	1.172,18	50,00	18,49		
			Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	25	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.11.1.02.11.01.17.001.	7.1 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah Peserta Sosialisasi Permodalan melalui KUR dan Koperasi sebagai Penyalur Ultra Mikro (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM)	383	612,62	0	-	30	29,31	30	27,81	100,00	94,88	30	27,81	7,83	4,54		
	1.02.11.1.02.11.01.17.003.	7.2 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan	Jumlah Fasilitas yang Diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tepat Sasaran	100	317,53	3	8,70	0	-	0	-	0	-	3	8,70	3,00	2,74		
	1.02.11.1.02.11.01.17.004.	7.3 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.11.1.02.11.01.17.005.	7.4 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil Mikro	Persentase Pengawasan Terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Pengguna Dana	20	285,17	1	9,37	15	25,62	15	21,88	100	85,38	16	31,24	80,00	10,95		
	1.02.11.1.02.11.01.17.006.	7.5 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Fasilitas Desain dan Kemasan (Packaging Design) untuk Produk Usaha Mikro,	20	259,66	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	1.02.11.1.02.11.01.17.008.	7.6 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana bagi Industri Rumah Tangga Produktif dan Bimtek Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	71	2.331,60	8	236,34	6	831,09	6	770,36	100,00	92,69	14	1.006,69	19,72	43,18		
	1.02.11.1.02.11.01.17.009.	7.7 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Mengikuti Promosi/Pameran Produk	93	536,68	8	45,54	30	70,78	14	32,78	46,67	46,31	22	78,31	23,66	14,59		
	1.02.11.1.02.11.01.17.010.	7.8 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Menambah Nilai Tambah Produk Melalui Pelatihan Kelapa dan	132	1.997,67	0	-	30	140,88	0	8,00	0,00	5,68	0	8,00	0,00	0,40		
	Rata-rata capaian kinerja (%)			69,33		64,99		69,33		64,99						16,78			
	Predikat kinerja			S		R		S		R		S		R		SR			
	1.02.11.1.02.11.01.18.	8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	1384	2.230,35	10	16,61	300	39,73	300	38,44	100,00	96,74	310	55,04	22,42	2,47		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.11.1.02.11.01.18.001.	8.1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Persentase cakupan usaha koperasi (DMIJ Plus Terintegrasi) Koperasi Produksi, Konsumen, Simpan	90	417,15	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.11.1.02.11.01.18.004.	8.2 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian, Penyuluhan tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta	4506	531,63	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	1.02.11.1.02.11.01.18.005.	8.3 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT Tepat Waktu, Penilaian Kesehatan dan Pemingkatan	80	830,95	97	16,61	20	39,73	20	38,44	100,00	96,74	117	55,04	146,71	6,62		
	1.02.11.1.02.11.01.18.008.	8.4 Rintisn Penerapan Teknologi Sederhana / Manajemen Modern pada Jenis Usaha	Jumlah Pembentukan Koperasi Desa Agro (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM	8	450,63	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	96,74	100,00	96,74			36,68	1,66		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									3.300,14	2.652,30								
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									78,70	76,71	78,70	76,71			20,08	16,49		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									T	T	T	T			SR	SR		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	0.00.00.1.02.12.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	97	5.080,36	92	824,00	100	1.099,46	100	1.075,00	100,00	97,78	96,08	1899,00	39,70	37,38	DPMPSTP	
	0.00.00.1.02.12.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	5100	24,63	1020	5,00	975	4,50	975	4,00	100,00	88,89	1995,00	9,00	39,12	36,54		
	0.00.00.1.02.12.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	196,93	3	34,00	60	40,00	60	35,00	100,00	87,50	63,00	69,00	35,00	35,04		
	0.00.00.1.02.12.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	110	124,08	17	19,00	22	35,80	22	26,00	99,55	72,63	38,90	45,00	35,36	36,27		
	0.00.00.1.02.12.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	300	234,48	60	36,00	48	52,95	48	53,00	100,00	100,09	108,00	89,00	36,00	37,96		
	0.00.00.1.02.12.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja (Komputer/Laptop/AC)	370	98,57	50	13,00	72	17,20	72	17,00	100,00	98,84	122,00	30,00	32,97	30,44		
	0.00.00.1.02.12.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	31	250,84	31	69,00	31	41,39	31	41,00	100,00	99,06	31,00	110,00	40,00	43,85		
	0.00.00.1.02.12.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar Barang Cetak dan Penggandaan	82320	22,08	16320	4,00	16034	4,68	16034	4,70	100,00	100,43	32354,00	8,70	39,30	39,40		
	0.00.00.1.02.12.01.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	72,50	7	71,00	0	-	0	-	0,00	0,00	7,00	71,00	100,00	97,93		
	0.00.00.1.02.12.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	48	58,72	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan Kantor	20106	251,88	3885	49,00	3950	35,40	3950	35,00	100,00	98,86	7835,00	84,00	38,97	33,35		
	0.00.00.1.02.12.01.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman yang disediakan	6819	262,94	1254	50,00	1092	42,00	1092	42,00	100,00	100,00	2346,00	92,00	34,40	34,99		
	0.00.00.1.02.12.01.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	382	1.856,86	103	474,00	69	382,59	69	376,00	100,00	98,28	172,00	850,00	45,03	45,78		
	0.00.00.1.02.12.01.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	185	1.578,25	0	-	32	442,95	32	439,00	100,00	99,11	32,00	439,00	17,30	27,82		
	0.00.00.1.02.12.01.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	44	47,61	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									78,54	74,55	78,54	74,55			35,25	35,67		
	Predikat kinerja									T	S	T	S			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.1.02.12.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	739,64	80	43,00	100	55,60	100	56,00	100,00	100,72	90,00	99,00	36,00	13,38		
	0.00.00.1.02.12.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	4	80,00	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.02.024.	2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	25	277,44	4	43,00	5	40,00	5	40,00	97,40	100,00	8,87	83,00	35,48	29,92		
	0.00.00.1.02.12.01.02.042.	2.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	195,00	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.02.052.	2.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	187,20			4	15,60	4	16,00	100,00	102,56	4,00	16,00	44,44	8,55		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						98,70	101,28	98,70	101,28			19,98	9,62		
				Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.02.12.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	83	125,29	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	320	61,81	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	320	63,47	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00		
				Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.02.12.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	82	61,81	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	8	61,81	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00		
				Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.02.12.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	156,62	75	23,00	100	29,14	100	29,00	99,90	99,53	87,45	52,00	34,98	33,20		
	0.00.00.1.02.12.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	35	156,62	5	23,00	7	29,14	7	29,00	98,57	99,53	11,90	52,00	34,00	33,20		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						98,57	99,53	98,57	99,53			34,00	33,20		
				Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.1.02.12.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	72	47,61	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.12.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	4	47,61	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00		
				Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.12.1.02.12.01.	PENANAMAN MODAL							1.044,10										
	1.02.12.1.02.12.01.15.	7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	10	2.464,96	2	540,00	2	689,64	2	661,00	93,50	95,85	3,87	1201,00	38,70	48,72		
	1.02.12.1.02.12.01.15.008.	7.1 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Unit Usaha Yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	47	506,56	13	134,00	5	49,38	5	40,00	97,40	81,00	17,87	174,00	38,02	34,35		
	1.02.12.1.02.12.01.15.009.	7.2 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah Aparatur Mengikuti Bimtek Penanaman Modal	8	78,95	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.15.010.	7.3 Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan	6	1.221,67	2	406,00	1	140,26	1	122,00	90,00	86,98	2,90	528,00	48,33	43,22		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.12.1.02.12.01.15.012.	7.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah Sarana Promosi Penanaman Modal	4	83,45	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.15.013.	7.5 Pengembangan Promosi Penanaman Modal.	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dikembangkan	1	74,34	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.15.014.	7.6 Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dana Insentif Daerah/DID)	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan	4	500,00	0	-	4	500,00	4	498,00	100,00	99,60	4,00	498,00	100,00	99,60		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						95,80	89,19	95,80	89,19			31,06	29,53		
				Predikat kinerja						ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.02.12.1.02.12.01.16.	8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha	29	1.191,22	20	537,00	20	162,49	20	153,00	99,35	94,16	19,94	690,00	69,70	57,92		
	1.02.12.1.02.12.01.16.004.	8.1 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan secara online	31	540,33	6	194,00	40	149,77	40	142,00	99,75	94,81	45,90	336,00	148,06	62,18		
	1.02.12.1.02.12.01.16.007.	8.2 Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen RUPM/Master Plan	1	200,00	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.16.009.	8.3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah unit perizinan usaha dan non perizinan yang dilakukan monitoring	3	15,51	1	15,00	-	0	0	-	0,00	0,00	1,00	15,00	33,33	96,74		
	1.02.12.1.02.12.01.16.010.	8.4 Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi	1000	309,35	185	303,00	-	0	0	-	0,00	0,00	185,00	303,00	18,50	97,95		
	1.02.12.1.02.12.01.16.011.	8.5 Pelaksanaan dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah Kerjasama Investasi	5	126,04	1	25,00	1	12,72	1	10,70	90,00	84,15	1,90	35,70	38,00	28,32		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						94,88	89,48	94,88	89,48			47,58	57,04		
				Predikat kinerja						ST	T	ST	T			SR	R		
	1.02.12.1.02.12.01.17.	9. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Daerah	4	61,80					0	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.17.001.	9.1 Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah Dokumen Kajian Potensi / Regulasi Terkait dengan Investasi (Dokumen)	4	61,80	-	0	-	0	0	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-								
				Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.12.1.02.12.01.24.	10. Program Pengendalian dan Penataan Perizinan	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan	2092	576,27	0	-	500	64,19	500	59,00	99,97	91,92	499,87	59,00	23,89	10,24		
	1.02.12.1.02.12.01.24.001.	10.1 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perizinan	Jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan	40	79,06	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.24.003.	10.2 Manajemen Data Perizinan	Jumlah Dokumen Data Perizinan	4	80,69	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.24.005.	10.3 Peningkatan Kinerja Tim Tekhnis Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pelaksanaan Optimalisasi Koordinasi Tim Tekhnis Perizinan dan Non Perizinan	2225	89,82	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.24.006.	10.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah unit perizinan usaha dan non perizinan yang dilakukan monitoring	31	89,30	0	-	5	14,96	5	15,00	100,00	100,24	5,00	15,00	16,13	16,80		
	1.02.12.1.02.12.01.24.007.	10.5 Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi	4450	237,40	0	-	500	49,22	500	44,00	99,97	89,39	499,87	44,00	11,23	18,53		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						99,99	94,82	99,99	94,82			5,47	7,07		
				Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.12.1.02.12.01.25.	11. Program Penataan Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan	535	754,88	80	216,00	105	127,79	105	118,00	100,00	92,34	185,00	334,00	34,58	44,25		
	1.02.12.1.02.12.01.25.001.	11.1 Penyempurnaan Perangkat Pedoman Kerja Pelayanan Perizinan.	Jumlah Dokumen Regulasi Tentang Pelayanan Perizinan	4	63,93	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.02.12.1.02.12.01.25.002.	11.2 Manajemen Pelayanan Perizinan	Jumlah Berkas/Dokumen Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diverifikasi, Analisis dan Evaluasi	550	369,05	100	105,00	110	86,94	110	81,00	99,88	93,16	209,87	186,00	38,16	50,40		
	1.02.12.1.02.12.01.25.003.	11.3 Monitoring Pemberian Perizinan	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring	50	240,50	10	111,00	5	40,84	5	37,00	100,00	90,59	15,00	148,00	30,00	61,54		
	1.02.12.1.02.12.01.25.005.	11.4 Survey Perizinan	Jumlah Unit calon Perizinan	89	81,40	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rata-rata capaian kinerja (%)						99,94	91,88	99,94	91,88			17,04	27,98		
				Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				11.260,45		2.183,00		2.228,30		2.151,00					19,04	20,01		
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								95,20		91,53	95,20	91,53			19,04	20,01		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								ST		ST	ST	ST			SR	SR		
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	0.00.00.1.02.17.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	90	1.919,25	90	378,81	90	582,43	79	498,21	87,32	85,54	34	877,02	37,46	45,70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
	0.00.00.1.02.17.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	1600	10,80	400	2,70	400	2,70	400	2,70	100,00	100,00	800	5,40	50,00	50,00			
	0.00.00.1.02.17.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	131,16	36	31,37	3	120,00	3	97,20	100,00	81,00	39	128,57	21,67	98,03			
	0.00.00.1.02.17.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang	48	65,05	12	11,03	12	59,17	9	41,40	75,00	69,96	21	52,43	43,75	80,59			
	0.00.00.1.02.17.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	7	66,22	7	21,55	7	17,55	7	17,55	100,00	100,00	3	39,11	40,00	59,06			
	0.00.00.1.02.17.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	39	89,41	8	21,55	39	21,55	39	21,55	100,00	100,00	19	43,11	48,00	48,21			
	0.00.00.1.02.17.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	48280	74,17	12070	17,00	12070	15,96	12065	15,95	99,96	99,96	24135	32,95	49,99	44,42			
	0.00.00.1.02.17.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	40	11,62	2	2,90	10	2,90	10	2,90	100,00	100,00	12	5,81	30,00	50,00			
	0.00.00.1.02.17.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	10000	38,74	2500	9,68	2520	9,68	1581	6,07	62,74	62,70	4081	15,76	40,81	40,68			
	0.00.00.1.02.17.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	14752	128,65	3688	18,20	2206	43,58	364	7,20	16,52	16,51	4052	25,40	27,47	19,74			
	0.00.00.1.02.17.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	48	50,40	15	27,30	12	12,60	12	12,60	100,00	100,00	27	39,90	55,83	79,17			
	0.00.00.1.02.17.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	122	593,68	32	167,79	16	125,76	16	125,04	100,00	99,43	48	292,83	39,67	49,33			
	0.00.00.1.02.17.01.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	60	451,20	-	15	112,80	15	112,80	100,00	100,00	15	112,80	25,00	25,00				
	0.00.00.1.02.17.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	159	208,17	43	47,73	19	38,17	19	35,24	100,00	92,33	62	82,96	39,25	39,85			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								88,79	86,30	88,79	86,30			39,34	52,62			
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	R			
	0.00.00.1.02.17.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat	90	344,62	16	12,05	90	89,20	90	88,69	100,00	99,42	42	100,74	47,11	29,23			
	0.00.00.1.02.17.01.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.1.02.17.01.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang	4	100,00	-	0	-	0	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.1.02.17.01.02.009.	2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.1.02.17.01.02.010.	2.4 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.1.02.17.01.02.022.	2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	7	100,82	0	-	1	14,50	1	14,50	100,00	99,99	1	14,50	14,29	14,38			
	0.00.00.1.02.17.01.02.028.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	60	48,20	15	12,05	15	12,05	15	12,05	100,00	100,00	30	24,10	50,00	50,00			
	0.00.00.1.02.17.01.02.052.	2.7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	24	95,60	-	3	62,65	3	62,14	100,00	99,18	3	62,14	12,50	65,00				
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,72	100,00	99,72			10,97	18,48			
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR			
	0.00.00.1.02.17.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	90	79,84	90	14,85	90	19,96	90	18,10	100,00	90,66	36	32,95	40,00	41,27			
	0.00.00.1.02.17.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	104	79,84	26	14,85	23	19,96	23	18,10	100,00	90,66	49	32,95	47,12	41,27			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	90,66	100,00	90,66			47,12	41,27			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
			Predikat kinerja							ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.1.02.17.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	90	50,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.17.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	50,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.1.02.17.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat	90	277,79	0	-	90	52,79	90	40,59	100,00	76,89	18	40,59	20,00	14,61		
	0.00.00.1.02.17.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	8	277,79	0	-	2	52,79	2	40,59	100,00	76,89	2	40,59	25,00	14,61		
			Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00	76,89	100,00	76,89			25,00	14,61		
			Predikat kinerja							ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.1.02.17.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.1.02.17.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.17.1.02.17.01.	PERPUSTAKAAN								0	-								
	1.02.17.1.02.17.01.15.	7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	16	13.053,76	4	446,91	4	650,41	4	604,24	100,00	92,90	8	1.051,15	48,96	8,05		
	1.02.17.1.02.17.01.15.001.	7.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya	Cakupan pengenalan nilai-nilai luhur dan kebiasaan membaca pada anak melalui lomba	252	210,00	60	101,24	60	50,00	60	42,71	100,00	85,42	120	143,95	47,62	68,55		
	1.02.17.1.02.17.01.15.002.	7.2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Unit Perpustakaan Keliling dan ULP Kecamatan yang di Kelola	80	1.270,39	20	345,67	20	358,60	20	344,29	100,00	96,01	40	689,96	50,00	54,31		
	1.02.17.1.02.17.01.15.003.	7.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan	Jumlah Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan	8	80,00	2	-	2	70,00	2	63,23	100,00	90,33	4	63,23	50,00	79,04		
	1.02.17.1.02.17.01.15.004.	7.4 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah Regulasi penyelenggaraan perpustakaan	0	-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.17.1.02.17.01.15.005.	7.5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang dilatih	100	265,49	20	-	20	55,49	20	50,56	100,00	91,12	40	50,56	40,00	19,04		
	1.02.17.1.02.17.01.15.008.	7.6 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Cakupan layanan sarana dan prasarana informasi (Pameran koleksi bahan perpustakaan)	3	90,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.17.1.02.17.01.15.009.	7.7 Penyediaan bahan pustaka perustakaan umum daerah	Koleksi buku yang tersedia di perustakaan daerah	168	337,88	0	-	32	67,91	32	61,32	100,00	90,29	32	61,32	19,05	18,15		
	1.02.17.1.02.17.01.15.012.	7.8 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Gedung perpustakaan Daerah yang dikelola	20	800,00	12	-	12	48,42	12	42,14	100,00	87,03	24	42,14	120,00	5,27		
	1.02.17.1.02.17.01.15.013.	7.9 Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus)	Jumlah Gedung Perpustakaan Daerah	1	10.000,00	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00	90,03	100,00	90,03			36,30	27,15		
			Predikat kinerja							ST	T	ST	T			SR	SR		
	1.02.18.1.02.17.01.	KEARSIPAN																	
	1.02.18.1.02.17.01.16.	8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	90	310,00	83	62,30	90	85,00	83	77,97	92,22	91,73	83	140,27	36,89	45,25		
	1.02.18.1.02.17.01.16.001.	8.1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah kelengkapan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	26	110,00	-	-	5	35,00	5	35,00	100,00	99,99	5	35,00	19,23	31,82		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.18.1.02.17.01.16.002.	8.2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip daerah yang terdapat dan tertata	8	120,00		62,30	2	30,00	2	24,94	100,00	83,15	2	87,25	25,00	72,71		
	1.02.18.1.02.17.01.16.004.	8.3 Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Daerah	Jumlah arsip daerah yang terpelihara	40	80,00		-	10	20,00	10	18,03	100,00	90,15	10	18,03	25,00	22,54		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	91,10	100,00	91,10			23,08	42,35		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.18.1.02.17.01.18.	9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip secara baku	90	261,05	90	-	90	51,05	90	41,39	100,00	81,08	90	41,39	40,00	15,86		
	1.02.18.1.02.17.01.18.003.	9.1 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan di Instansi Pemerintah / Swasta	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang dilatih	100	261,05	20	-	20	51,05	20	41,39	100,00	81,08	40	41,39	40,00	15,86		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	81,08	100,00	81,08			40,00	15,86		
	Predikat kinerja									ST	T	ST	T			SR	SR		
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								1.530,85		1.369,18								
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								98,40	87,97	98,40	87,97				25,93	25,80		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								ST	T	ST	T				SR	SR		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	0.00.00.2.00.01.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	6.215,44	100	730,28	100	1.081,26	98	1.035,11	97,84	95,73	40	1.765,39	39,57	28,40	DINAS PERIKANAN	
	0.00.00.2.00.01.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	7750	23,95	1550	5,60	0	-	0	-	0,00	0,00	1550	5,60	20,00	23,38		
	0.00.00.2.00.01.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	240	373,10	48	58,18	4	75,00	4	48,58	100,00	64,78	52	106,77	21,67	28,62		
	0.00.00.2.00.01.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang	25	48,00	5	9,61	5	8,00	5	6,53	100,00	81,65	10	16,14	40,00	33,63		
	0.00.00.2.00.01.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	14	335,88	3	82,67	6	4,32	6	4,32	100,00	100,00	9	86,99	64,29	25,90		
	0.00.00.2.00.01.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	29	218,97	6	49,71	29	15,72	29	15,72	100,00	100,00	35	65,44	120,69	29,88		
	0.00.00.2.00.01.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	20000	30,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.2.00.01.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	10	23,35	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.2.00.01.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	15392	67,89	3078	12,72	2520	11,52	2783	12,72	110,44	110,42	5861	25,44	38,08	37,47		
	0.00.00.2.00.01.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	66566	479,50	13313	99,47	7488	70,00	6715	62,77	89,68	89,67	20028	162,24	30,09	33,84		
	0.00.00.2.00.01.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120	124,40	24	24,70	24	13,69	24	13,69	100,00	100,00	48	38,39	40,00	30,86		
	0.00.00.2.00.01.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	333	1.635,90	67	327,50	49	221,90	46	206,43	94,45	93,03	113	533,93	34,02	32,64		
	0.00.00.2.00.01.01.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	228	2.556,00	0	-	54	612,00	54	607,00	100,00	99,18	54	607,00	23,68	23,75		
	0.00.00.2.00.01.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	234	298,50	47	60,10	27	49,10	27	57,35	100,00	116,79	74	117,46	31,62	39,35		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									99,46	95,55	99,46	95,55			35,70	26,10		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.2.00.01.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhiya Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan	100	2.255,33	100	329,98	100	51,00	75	39,93	75,00	78,29	35	369,90	35,00	16,40		
	0.00.00.2.00.01.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang	20	540,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.01.01.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang disediakan	26	185,00	1	9,50	0	-	0	-	0,00	0,00	1	9,50	4,17	5,14		
	0.00.00.2.00.01.01.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	95	765,33	19	179,18	5	36,00	5	34,47	100,00	95,74	24	213,65	25,26	27,92		
	0.00.00.2.00.01.01.02.028.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	130	419,00	26	94,80	4	15,00	2	5,46	44,73	36,40	28	100,26	21,38	23,93		
	0.00.00.2.00.01.01.02.042.	2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Kantor yang	400	245,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.2.00.01.01.02.052.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12	101,00	3	46,50	0	-	0	-	0,00	0,00	3	46,50	25,00	46,04		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								72,37	66,07	72,37	66,07			12,63	17,17		
		Predikat kinerja								S	S	S	S			SR	SR		
	0.00.00.2.00.01.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN Dinas Perikanan	72	90,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.01.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	240	90,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.01.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan	72	52,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.01.01.05.003.	4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	9	52,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.01.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Dan Keuangan	72	30,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.01.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	16	30,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.01.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase Tersusunya Rencana Kerja Dinas Perikanan	100	439,59	75	89,33	100	65,63	100	63,25	100,00	96,38	35	152,58	35,00	34,71		
	0.00.00.2.00.01.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	25	439,59	19	89,33	6	65,63	6	63,25	100,00	96,38	10	152,58	40,00	34,71		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	96,38	100,00	96,38			40,00	34,71		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	2.00.01.2.00.01.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN								0	-								
	2.00.01.2.00.01.01.20.	7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya Perikanan	35302	6.615,87		574,08	7400	688,04	0	492,66	0,00	71,60	0	1.066,74	0,00	16,12		
	2.00.01.2.00.01.01.20.001.	7.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Benih unggul yang dihasilkan melalui pembenihan	3477736	902,89	24500	152,45	700000	165,78	19000	116,39	2,71	70,21	43500	268,84	1,25	29,78		
	2.00.01.2.00.01.01.20.002.	7.2 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok pembudidaya binaan yang mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya	16	283,04	3	60,94			0	-	0,00	0,00	3	60,94	18,75	21,53		
	2.00.01.2.00.01.01.20.003.	7.3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	55095	3.825,26	2104	160,84	4000	351,66	2259	248,21	56,48	70,58	4363	409,05	7,92	10,69		
	2.00.01.2.00.01.01.20.004.	7.4 Pelatihan Pembudidaya dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pelaku Agribisnis yang mendapatkan pelatihan	4	255,50	3		5	170,60	2	128,06	40,00	75,06	5	128,06	125,00	50,12		
	2.00.01.2.00.01.01.20.005.	7.5 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Lokasi Budidaya yang dapat dikendalikan kesehatan ikan dan lingkungan nya	15	291,23	3	51,79			0	-	0,00	0,00	3	51,79	20,00	17,78		
	2.00.01.2.00.01.01.20.008.	7.6 Pengembangan Sistem Usaha Budidaya	Unit Budidaya yang dapat dikembangkan sistem usahanya	13	682,95	3	148,06			0	-	0,00	0,00	3	148,06	23,08	21,68		
	2.00.01.2.00.01.01.20.009.	7.7 Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan	jumlah Saranan/Prasarana Balai Benih Ikan yang dibangun/direhabilitasi	4	375,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								33,06	71,95	33,06	71,95			28,00	21,65		
		Predikat kinerja								S	S	SR	S			SR	SR		
	2.00.01.2.00.01.01.21.	8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	387907	38.964,69	387907	6.491,47	77000	3.549,99	0	1.172,49	0,00	33,03	387907	7.663,96	100,00	19,67		
	2.00.01.2.00.01.01.21.001.	8.1 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB binaan yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan	39	930,14	20	456,78	0	-	0	-	0,00	0,00	20	456,78	51,28	49,11		
	2.00.01.2.00.01.01.21.004.	8.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang direhabilitasi	8	170,70	1	20,23	0	-	0	-	0,00	0,00	1	20,23	12,50	11,85		
	2.00.01.2.00.01.01.21.005.	8.3 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Lembaga perdagangan perikanan tangkap yang terdaftar	103	791,89	4	36,80	0	-	0	-	0,00	0,00	4	36,80	3,88	4,65		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
	2.00.01.2.00.01.01.21.006.	8.4 Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi tangkapan nelayan pada perairan laut dan umum	529246	27.975,34	54271	4.726,29	77000	1.750,04	54846	1.172,49	71,23	67,00	109117	5.898,78	20,62	21,09			
	2.00.01.2.00.01.01.21.010.	8.5 Penyediaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap	90	530,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	2.00.01.2.00.01.01.21.022.	8.6 Pembinaan KUB Nelayan dan Koperasi Nelayan	KUB binaan yang mampu meningkatkan kapasitas kelompok	11	242,50		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	2.00.01.2.00.01.01.21.023.	8.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) - (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap	90	6.524,17	18	1.251,37	0	-	0	-	0,00	0,00	18	1.251,37	20,00	19,18			
	2.00.01.2.00.01.01.21.024.	8.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Dana Alokasi Khusus / DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	18	1.799,95		-	18	1.799,95	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								35,61	33,50	35,61	33,50			13,54	13,23			
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	2.00.01.2.00.01.01.22.	9. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	940	1.801,38	940	56,10		-	0	-	0,00	0,00	940	56,10	100,00	3,11			
	2.00.01.2.00.01.01.22.006.	9.1 Peningkatan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang meningkat kinerjanya	125	251,38	25	56,10	0	-	0	-	0,00	0,00	25	56,10	20,00	22,32			
	2.00.01.2.00.01.01.22.007.	9.2 Peningkatan sistem penyuluhan Sumber Daya Ikan	Jumlah lokasi Sumberdaya Ikan Terpelihara	28	1.550,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			10,00	11,16			
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	2.00.01.2.00.01.01.24.	10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	100	249,63	100	50,33		-	0	-	0,00	0,00	100	50,33	100,00	20,16			
	2.00.01.2.00.01.01.24.001.	10.1 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Kajian teknologi tepat guna untuk pengembangan budidaya Perikanan	9	249,63	1	50,33	0	-	0	-	0,00	0,00	1	50,33	11,11	20,16			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			11,11	20,16			
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	2.00.01.2.00.01.01.29.	11. Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan	198	1.507,64	198	161,16	39	52,02	0	46,32	0,00	89,04	198	207,48	100,00	13,76			
	2.00.01.2.00.01.01.29.001.	11.1 Lomba Cipta Menu Produk Perikanan.	Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Produk Perikanan yang dilaksanakan	2	184,09	2	10,11	0	-	0	-	0,00	0,00	2	10,11	100,00	5,49			
	2.00.01.2.00.01.01.29.002.	11.2 Promosi dan Pameran Perikanan.	Hasil prodak perikanan yang dapat dipromosikan dan dipamerkan	20	450,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	2.00.01.2.00.01.01.29.003.	11.3 Pembinaan kelompok usaha kecil	Kelompok usaha kecil yang dapat dibina	4	133,00		-	3	20,48	3	9,85	100,00	48,08	3	9,85	75,00	7,40			
	2.00.01.2.00.01.01.29.004.	11.4 Gerakan Cipta Menu Serba Ikan	Jumlah Menu Serba Ikan	268	740,55	53	151,05	63	31,54	0	36,47	0,00	115,64	53	187,52	19,78	25,32			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	81,86	50,00	81,86			48,69	9,55			
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			SR	SR			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program							5.487,93					11.332,48						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program							65,08	74,22	65,08	74,22			22,19	17,08				
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program							R	S	R	S			SR	SR				
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
22	0.00.00.2.00.02.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	7.968,78	20,34	2.239,08	90	1.654,13	93	1.682,97	103,19	101,74	45	3.922,05	50,31	49,22	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN		
	0.00.00.2.00.02.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlavani	6206	32,28	#DIV/0!	-	12	5,00	12	4,88	100,00	97,60	12	4,88	0,19	15,12			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.2.00.02.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	859,59	27	129,43	12	199,27	12	159,23	100,00	79,90	39	288,65	21,72	33,58		
	0.00.00.2.00.02.01.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	854,16	12	222,82	12	213,43	12	208,16	100,00	97,53	12	430,98	40,00	50,46		
	0.00.00.2.00.02.01.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	60	125,50	10	20,50	60	36,11	56	35,62	93,60	98,64	66	56,12	43,98	44,72		
	0.00.00.2.00.02.01.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	7	193,91	3	74,08	12	72,67	12	96,80	100,00	133,20	15	170,88	83,85	88,13		
	0.00.00.2.00.02.01.01.012.	1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	7	200,00	2	48,92	12	15,00	12	13,89	100,00	92,57	14	62,81	78,36	31,40		
	0.00.00.2.00.02.01.01.015.	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	1	44,00	1	7,83	12	8,00	12	7,94	100,00	99,25	12	15,77	40,00	35,84		
	0.00.00.2.00.02.01.01.016.	1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	27	273,00	8	80,77	12	57,67	12	55,58	97,06	96,38	12	136,35	42,74	49,94		
	0.00.00.2.00.02.01.01.017.	1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	110	55,00	18	8,98	12	8,80	12	8,64	100,00	98,18	30	17,62	27,24	32,04		
	0.00.00.2.00.02.01.01.018.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	416	2.060,00	117	581,31	12	397,82	12	482,21	100,00	121,21	129	1.063,52	31,10	51,63		
	0.00.00.2.00.02.01.01.019.	1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	123	1.017,00	26	219,10	12	252,00	12	231,00	100,00	91,67	38	450,10	31,30	44,26		
	0.00.00.2.00.02.01.01.022.	1.12 Singkronisasi dan Koordinasi Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Penerima Hibah/Bansos	20	1.719,61	20	760,04	20	280,35	0	273,73	0,00	97,64	20	1.033,77	40,00	60,12		
	0.00.00.2.00.02.01.01.027.	1.13 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	59	534,73	9	85,30	12	108,00	12	105,30	100,00	97,50	21	190,60	36,29	35,64		
Rata-rata capaian kinerja (%)										91,59	100,10	91,59	100,10			39,75	44,07		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.2.00.02.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai dengan Syandar Kerja	92	3.151,98	20	410,35	90	375,01	90	633,61	100,00	168,96	44	1.043,96	47,83	33,12		
	0.00.00.2.00.02.01.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	16	650,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.02.01.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	16	600,00	0	-	2	35,00	2	34,90	100,00	99,71	2	34,90	12,50	5,82		
	0.00.00.2.00.02.01.02.010.	2.3 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	18	80,00	2	37,90	2	22,82	2	22,22	100,00	97,37	4	60,12	22,22	75,15		
	0.00.00.2.00.02.01.02.022.	2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	4	140,00	1	31,50	1	25,40	1	11,50	100,00	45,28	2	43,00	50,00	30,71		
	0.00.00.2.00.02.01.02.024.	2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	16	120,00	2	14,91	12	60,40	12	59,31	100,00	98,19	14	74,22	87,50	61,85		
	0.00.00.2.00.02.01.02.028.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	6	79,00	6	23,00	12	22,50	12	20,17	100,00	89,62	18	43,17	288,00	54,64		
	0.00.00.2.00.02.01.02.042.	2.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	65	510,00	9	18,82			0	-	0	0,00	9	18,82	13,85	3,69		
	0.00.00.2.00.02.01.02.050.	2.8 Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	4	120,00	1	41,70	2	118,52	2	118,35	100,00	99,86	3	160,05	75,00	133,38		
	0.00.00.2.00.02.01.02.052.	2.9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	168	852,98	13	242,52	13	380,79	13	367,17	100,00	96,42	26	609,68	15,48	71,48		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	90,79	100,00	90,79			62,73	48,52		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			R	SR		
	0.00.00.2.00.02.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	90	137,40	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.02.01.03.003.	3.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	147	59,40	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.02.01.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	176	78,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.02.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sum	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	90	46,60	20	13,44	0	-	0	-	0,00	0,00	20	13,44	22,22	28,84		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.2.00.02.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	4	46,60	1	13,44	0	-	0	-	0,00	0,00	1	13,44	25,00	28,84		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			25,00	28,84		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.02.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Ketepatan Penyampaian laporan	90	1.594,75	20	324,89	90	384,02	90	403,71	100,00	105,13	44	728,60	48,89	45,69		
	0.00.00.2.00.02.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20	680,00	5	76,53	12	75,00	12	85,65	100,00	114,20	17	162,18	34,00	23,85		
	0.00.00.2.00.02.01.06.003.	5.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	4	84,75	4	14,75	4	14,75	4	14,35	100,00	97,31	4	29,10	40,00	34,34		
	0.00.00.2.00.02.01.06.004.	5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	80,00	1	10,00	2	20,00	2	20,00	100,00	100,00	3	30,00	30,00	37,50		
	0.00.00.2.00.02.01.06.008.	5.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pembangunan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	400	750,00	100	223,60	1	284,27	1	283,71	100,00	99,80	101	507,31	25,25	67,64		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,80	100,00	99,80			25,25	67,64		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	S		
	0.00.00.2.00.02.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan	Persentase Ketepatan Penyampaian laporan	90	2.500,51	20	218,21	90	583,25	90	596,89	100,00	102,34	44	815,11	48,89	32,60		
	0.00.00.2.00.02.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	8	1.163,63	2	183,37	2	176,87	2	172,85	100,00	97,72	4	356,21	50,00	30,61		
	0.00.00.2.00.02.01.07.002.	6.2 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	16	150,00	4	34,84	4	90,50	4	90,34	100,00	99,82	8	125,18	50,00	83,45		
	0.00.00.2.00.02.01.07.003.	6.3 Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diverifikasi	416	1.186,88		-	12	315,88	12	333,71	100,00	105,65	12	333,71	2,88	28,12		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	101,06	100,00	101,06			34,29	47,39		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.13.2.00.02.01.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	1.02.13.2.00.02.01.15.	7. Program Pengembangan dan Kesperasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirausaha muda	79	500,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.15.007.	7.1 Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dengan Masyarakat	Jumlah OKP Yang Disosialisasikan	4	150,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.15.011.	7.2 Pelatihan Manajemen Kepemudaan	Jumlah OKP Yang Dilatih	30	50,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.15.012.	7.3 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Yang Dibina	80	50,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.15.013.	7.4 Temu Wicara Kepemudaan	Jumlah OKP Yang di Undang	980	150,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.15.014.	7.5 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah Orang Yang Dilatih	120	100,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	1.02.13.2.00.02.01.16.	8. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	85	4.805,00	100	1.255,08	90	505,51	0	354,04	0,00	70,04	100	1.609,12	46,92	33,49		
	1.02.13.2.00.02.01.16.001.	8.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Sosialisasi Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan	4	240,00	1	63,72	0	-	0	-	0,00	0,00	1	63,72	25,00	26,55		
	1.02.13.2.00.02.01.16.002.	8.2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera dan Pembinaan siswa/i Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota Polri yang dibina	184	3.605,00	69	1.092,97	70	413,18	70	346,31	100,00	83,82	139	1.439,28	75,54	39,92		
	1.02.13.2.00.02.01.16.006.	8.3 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Lomba	45	150,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.16.012.	8.4 Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda	4	310,00	1	98,39	1	92,33	0	7,73	0,00	8,37	1	106,12	25,00	34,23		
	1.02.13.2.00.02.01.16.013.	8.5 Pendidikan dan Pelatihan Pemuda Berprestasi	Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	8	150,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.16.014.	8.6 Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	Sosialisasi Penyuluhan Narkotika	4	150,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.13.2.00.02.01.16.015.	8.7 Penyusunan Perda Kabupaten Pramuka	Jumlah Perda Kabupaten Pramuka yang disusun	1	-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.13.2.00.02.01.16.016.	8.8 Sosialisasi Implementasi Kabupaten Pramuka	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	100	200,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)							50,00	46,09	50,00	46,09			15,69	12,59			
		Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	1.02.13.2.00.02.01.17.	9. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pembinaan wirausaha muda	90	320,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.17.001.	9.1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan	4	170,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.17.003.	9.2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	JumlahPelaksanaan Pelatihan Keterampilan	4	150,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
		Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	1.02.13.2.00.02.01.19.	10. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	23	400,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.19.001.	10.1 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah Organisasi dan Tenaga Olahraga yang Dibina	3	150,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.19.004.	10.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	jumlah atlit dan cabang olahraga yang dipantau dan dibina	2	100,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.19.005.	10.3 Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	3	150,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
		Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	1.02.13.2.00.02.01.20.	11. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	73	4.040,00	6	1.256,34	90	1.307,23	0	185,68	0,00	14,20	6	1.442,02	8,28	35,69		
	1.02.13.2.00.02.01.20.006.	11.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Kompetisi yang dilaksanakan	8	1.870,00	3	920,71	5	780,00	0	-	0,00	0,00	3	920,71	37,50	49,24		
	1.02.13.2.00.02.01.20.007.	11.2 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat yang dilaksanakan	8	591,00	1	137,50	2	129,84	0	-	0,00	0,00	1	137,50	12,50	23,27		
	1.02.13.2.00.02.01.20.011.	11.3 Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Tradisional yang Diikuti	4	200,00	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.20.013.	11.4 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang dikirim untuk pelatihan	21	370,00	1	95,38	-	0	-	0,00	0,00	1	95,38	4,76	25,78			
	1.02.13.2.00.02.01.20.020.	11.5 Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Cabang Olah Raga yang dibina	32	650,00	2	102,74	5	100,00	0	-	0,00	0,00	2	102,74	6,25	15,81		
	1.02.13.2.00.02.01.20.021.	11.6 Pembinaan Olahraga Mahasiswa	Jumlah Cabor Yang Dikirim	8	159,00	0	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.20.022.	11.7 Pembinaan Olahraga Pelajar	Jumlah Cabor Yang Dikirim	8	200,00	-	2	297,40	0	330,69	0,00	111,19	0	330,69	0,00	165,34			
		Rata-rata capaian kinerja (%)							0,00	27,80	0,00	27,80			8,72	39,92			
		Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	1.02.13.2.00.02.01.23.	12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang Disediakan	220	12.535,00	48	4.639,29	55	6.214,66	28	6.365,11	50,91	102,42	76	11.004,40	34,55	87,79		
	1.02.13.2.00.02.01.23.002.	12.1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan	92	8.050,00	41	4.139,10	24	4.839,74	24	4.700,24	100,00	97,12	65	8.839,34	70,65	109,81		
	1.02.13.2.00.02.01.23.003.	12.2 Peningkatan Pembangunan Sarana Kepemudaan	Jumlah Sarana Kepemudaan yang dibangun/ditingkatkan	8	1.325,00	4	290,62	3	768,67	3	766,78	100,00	99,75	7	1.057,40	87,50	79,80		
	1.02.13.2.00.02.01.23.005.	12.3 Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah sarana olahraga yang tersedia	76	670,00	2	97,96	3	411,98	3	481,84	100,00	116,96	5	579,80	6,58	86,54		
	1.02.13.2.00.02.01.23.006.	12.4 Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhab	80	990,00	1	111,60	6	194,27	3	416,26	50,00	214,27	4	527,86	5,00	53,32		
	1.02.13.2.00.02.01.23.008.	12.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang direhabilitasi	12	1.050,00	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	1.02.13.2.00.02.01.23.009.	12.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang Dipelihara	12	450,00	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)							87,50	132,02	87,50	132,02			28,29	54,91			
		Predikat kinerja							T	ST	T	ST			SR	R			
	1.02.16.2.00.02.01.	KEBUDAYAAN						1.546,88	0	-	-	-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.16.2.00.02.01.15.	13. Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan Budaya Daerah	43	3.820,40	7	987,21	11	150,00	1	13,73	9,09	9,15	8	1.000,94	18,60	26,20		
	1.02.16.2.00.02.01.15.003.	13.1 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah	Jumlah Kebijakan yang disusun	2	200,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.16.2.00.02.01.15.011.	13.2 Penyelenggaraan Acara Keagamaan	Jumlah Acara Keagamaan yang dilaksanakan	12	525,00	2	223,96	-	-	0	-	0,00	0,00	2	223,96	16,67	42,66		
	1.02.16.2.00.02.01.15.012.	13.3 Pelaksanaan Pemilihan Bujang Dara	Jumlah Pemilihan Bujang Dara yang dilaksanakan	4	745,40	1	166,76	-	-	0	-	0,00	0,00	1	166,76	25,00	22,37		
	1.02.16.2.00.02.01.15.014.	13.4 Perlombaan Seni dan Teater	Jumlah Festival Teater Klasik yang dilaksanakan	4	775,00	1	196,29	-	-	0	-	0,00	0,00	1	196,29	25,00	25,33		
	1.02.16.2.00.02.01.15.016.	13.5 Penampilan Kesenian dan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah Penampilan Kesenian dan Keragaman Budaya Daerah yang diikuti	4	725,00	2	322,01	-	-	0	-	0,00	0,00	2	322,01	50,00	44,42		
	1.02.16.2.00.02.01.15.017.	13.6 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Malam Pergantian Tahun yang dilaksanakan	4	350,00	1	78,20	1	50,00	0	-	0,00	0,00	1	78,20	25,00	22,34		
	1.02.16.2.00.02.01.15.018.	13.7 Tampilan Kesenian di dalam dan luar Daerah	Frekuensi Tampilan Kesenian Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	4	500,00	-	-	1	100,00	1	13,73	100,00	13,73	1	13,73	25,00	2,75		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00		13,73		100,00		13,73		23,81		22,84					
		Predikat kinerja		ST		SR		ST		SR		ST		SR					
	1.02.16.2.00.02.01.16.	14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	37	3.355,10	1	424,51	7	240,28	2	223,51	28,57	93,02	3	648,02	8,11	19,31		
	1.02.16.2.00.02.01.16.001.	14.1 Fasilitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Di Bidang Budaya	Jumlah LSM/Organisasi Kepemudaan yang dilibatkan	3	450,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.16.2.00.02.01.16.003.	14.2 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah Kebijakan yang disusun	4	450,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.16.2.00.02.01.16.004.	14.3 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah yang dilaksanakan	3	450,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.16.2.00.02.01.16.011.	14.4 Pengelolaan Pelaksanaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah Museum dan Taman Budaya daerah yang dikelola	8	300,00	1	424,51	0	-	0	-	0,00	0,00	1	424,51	12,50	141,50		
	1.02.16.2.00.02.01.16.016.	14.5 Pengelolaan LAMR Indragiri Hilir	Jumlah Pelstarian Budaya Daerah	4	750,00	-	-	2	142,19	1	81,89	50,00	57,59	1	81,89	25,00	10,92		
	1.02.16.2.00.02.01.16.017.	14.6 Inventarisasi dan Pendaftaran Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	232	455,10	-	-	2	98,09	2	141,63	100,00	144,38	2	141,63	0,86	31,12		
	1.02.16.2.00.02.01.16.018.	14.7 Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan	4	500,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00		100,98		75,00		100,98		5,48		26,22					
		Predikat kinerja		S		ST		S		ST		S		ST					
	1.02.16.2.00.02.01.18.	15. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	10	2.273,50	1	461,23	-	-	0	-	0,00	0,00	1	461,23	10,00	20,29		
	1.02.16.2.00.02.01.18.003.	15.1 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jumlah Tampilan Kesenian yang dilaksanakan	16	923,50	9	461,23	0	-	0	-	0	0,00	9	461,23	56,25	49,94		
	1.02.16.2.00.02.01.18.006.	15.2 Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Jumlah Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah yang dibentuk	3	450,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.16.2.00.02.01.18.007.	15.3 Kegiatan Festival Budaya dan Seni Daerah	Jumlah Festival Budaya dan Seni Daerah yang dilaksanakan	3	450,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.16.2.00.02.01.18.008.	15.4 Penyelenggaraan Festival Musik Tradisional/Modern	Jumlah Festival Musik Tradisional/Modern yang dilaksanakan	3	450,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
		Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR		SR							
	1.02.16.2.00.02.01.21.	16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	20	4.726,92	5	1.637,86	5	1.156,59	1	812,35	20,00	70,24	6	2.450,20	30,00	51,84		
	1.02.16.2.00.02.01.21.001.	16.1 Penyediaan Peralatan Kesenian Tradisional	Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional yang disediakan	84	1.885,00	69	751,98	9	1.006,59	6	653,47	66,67	64,92	75	1.405,45	89,29	74,56		
	1.02.16.2.00.02.01.21.002.	16.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Nilai Budaya	Jumlah Prasarana Penunjang Nilai Budaya yang direhabilitasi	8	1.050,00	2	429,24	1	150,00	1	158,88	100,00	105,92	3	588,12	37,50	56,01		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.16.2.00.02.01.21.003.	16.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Prasarana Nilai Budaya	Jumlah Sarana Prasarana Nilai Budaya yang direhabilitasi	8	1.200,00	3	456,64			0	-	0,00	0,00	3	456,64	37,50	38,05		
	1.02.16.2.00.02.01.21.004.	16.4 Pemeliharaan Prasarana Penunjang Nilai Budaya	Jumlah Prasarana Penunjang Nilai Budaya Yang Dinelihara	6	591,92	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									83,33	85,42	83,33	85,42			41,07	42,16		
	Predikat kinerja									T	T	T	T			SR	SR		
	2.00.02.2.00.02.01.	PARIWISATA							1.658,55	0	-								
	2.00.02.2.00.02.01.15.	17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	14	1.021,00		-	5	195,70	0	193,90	0,00	99,08	0	193,90	0,00	18,99		
	2.00.02.2.00.02.01.15.010.	17.1 Pelaksanaan Pengiriman Duta Pariwisata Ke Luar Daerah	Jumlah Peserta Duta Pariwisata Ke Luar Daerah Yang Dikirim	10	100,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.15.011.	17.2 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Di Dalam dan Luar Negeri	Frekuensi Promosi Pariwisata Yang Dilaksanakan	50	10,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.15.012.	17.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah Database dan Informasi Pariwisata Daerah	4	455,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.15.013.	17.4 Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata	Jumlah Bahan Promosi Yang Disediakan	50	456,00	-	-	2	195,70	2	193,90	100,00	99,08	2	193,90	4,00	42,52		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	99,08	100,00	99,08						
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST						
	2.00.02.2.00.02.01.16.	18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	7	1.029,13		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.16.003.	18.1 Pengembangan jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah Paket Wisata Unggulan yang dikembangkan	3	300,00		0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.16.006.	18.2 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah Tujuan Wisata	4	302,63	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.16.009.	18.3 Pembinaan Generasi Pesona Indonesia (Genni) Inhil	Jumlah Anggota GENPI Yang Dibina	1045	126,50	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.16.010.	18.4 Eksplorasi Destinasi Inventarisasi Destinasi dan Daya Tarik Wisata	Jumlah Destinasi dan Daya Tarik wisata yang dieksplor	6	300,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00						
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR						
	2.00.02.2.00.02.01.17.	19. Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	60	200,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.17.011.	19.1 Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kerjasama Kemitraan yang dihasilkan	3	200,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00						
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR						
	2.00.02.2.00.02.01.18.	20. Program Pengembangan	Jumlah SDM yang Dilatih	1980	1.007,08		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.18.001.	20.1 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Sadar Wisata	Jumlah Kelompok sadar Wisata Yang Dibina	100	200,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.18.002.	20.2 Pelatihan Kader Sadar Wisata dan Santa Pesona	Jumlah Kader Wisata dan Santa Pesona Yang Dilatih	2118	207,08	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.18.003.	20.3 Pelatihan Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dilatih	150	300,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.18.004.	20.4 Pembinaan Saka Pariwisata Daerah	Jumlah Anggota Yang Dibina	120	300,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00						
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR						
	2.00.02.2.00.02.01.21.	21. Program Peningkatan Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	3	350,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.21.007.	21.1 Penyusunan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Yang Disusun	3	200,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.21.008.	21.2 Penyusunan Kajian Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Yang Disusun	4	150,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00						
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR						
	2.00.02.2.00.02.01.22.	22. Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	79	914,24		-	90	100,00	47	9,90	51,86	9,90	47	9,90	59,26	1,08		
	2.00.02.2.00.02.01.22.001.	22.1 Peningkatan Koordinasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku industri dan Usaha Kepariwisata yang dikoordinasi	9	300,00	-	0		-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	2.00.02.2.00.02.01.22.006.	22.2 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Dibina	2706	205,54	-	-	50	100,00	0	9,90	0,00	9,90	0	9,90	0,00	4,82		
	2.00.02.2.00.02.01.22.007.	22.3 Peningkatan Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Bersertifikat	1722	208,70	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.22.008.	22.4 Pelatihan Pengembangan SDM di Bidang Jasa Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata Yang Dilatih	100	200,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	9,90	0,00	9,90			0,00	1,20		
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	2.00.02.2.00.02.01.23.	23. Program Pengembangan dan	Jumlah Event Pariwisata	16	4.254,85	7	1.606,23	4	30,68	1	30,35	25,00	98,92	8	1.636,58	50,00	38,46		
	2.00.02.2.00.02.01.23.001.	23.1 Pelaksanaan event wisata religi	Jumlah Event Wisata Religi yang diselenggarakan	4	2.444,85	1	784,20	1	20,49	1	20,49	100,00	100,00	2	804,68	50,00	32,91		
	2.00.02.2.00.02.01.23.002.	23.2 Peningkatan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru	Jumlah Lokasi Jelajah Wisata Alam dan Field Trip yang dilaksanakan	8	650,00	3	361,26			0	-	0,00	0,00	3	361,26	37,50	55,58		
	2.00.02.2.00.02.01.23.007.	23.3 Penyelenggaraan Event Wisata Khas Daerah	Jumlah Event Wisata Khas Daerah yang dilaksanakan	12	950,00	3	460,77	3	10,20	0	9,87	0,00	96,76	3	470,64	25,00	49,54		
	2.00.02.2.00.02.01.23.008.	23.4 Pelaksanaan Festival Sungai Indragiri	Jumlah Festival Sungai Indragiri yang dilaksanakan	4	210,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									50,00	98,38	50,00	98,38			28,13	34,51		
	Predikat kinerja									SR	ST	SR	ST			SR	SR		
	2.00.02.2.00.02.01.24.	24. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	125	303,70		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.24.006.	24.1 Pembinaan dan Pengawasan Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Ekonomi Keatif	120	203,70	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	2.00.02.2.00.02.01.24.007.	24.2 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Perlindungan HAKI	Jumlah Rekomendasi HAKI Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan	4	100,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00						
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR						
	2.00.02.2.00.02.01.25.	25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	40	12.537,42	7	1.881,79	10	1.076,29	10	1.304,27	100,00	121,18	17	3.186,06	42,50	25,41		
	2.00.02.2.00.02.01.25.001.	25.1 Peningkatan Pembangunan Prasarana Pariwisata	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	672	1.559,31	3	197,04	20	244,67	20	518,92	100,00	212,09	23	715,97	3,42	45,92		
	2.00.02.2.00.02.01.25.002.	25.2 Penyediaan sarana Pariwisata	Jumlah Sarana Pariwisata Disediakan	20	600,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.25.004.	25.3 Peningkatan Pembangunan Prasarana Pariwisata (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	80	9.228,11	4	1.684,75	20	731,62	20	686,45	100,00	93,83	24	2.371,20	30,00	25,70		
	2.00.02.2.00.02.01.25.005.	25.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana Pariwisata yang terpelihara	28	550,00	0	-	5	100,00	5	98,89	100,00	98,89	5	98,89	17,86	17,98		
	2.00.02.2.00.02.01.25.006.	25.5 Rehabitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang direhabilitasi	20	600,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.02.2.00.02.01.25.007.	25.6 Peningkatan Pembangunan Prasarana Parawisata (Dana Insentif Daerah/DID)	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	1	-	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	134,94	100,00	134,94			8,55	14,93		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	2.00.02.2.00.02.01.26.	26. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan	Jumlah Peserta Yang Dilatih	200	2.634,32	48	494,68	50	255,87	50	251,03	100,00	98,11	98	745,71	49,00	28,31		
	2.00.02.2.00.02.01.26.001.	26.1 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Peserta Yang Dilatih	240	720,00	48	127,50	60	127,94	60	125,37	100,00	97,99	108	252,87	45,00	35,12		
	2.00.02.2.00.02.01.26.002.	26.2 Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Peserta Yang Dilatih	240	720,00	48	128,91			0	-	0,00	0,00	48	128,91	20,00	17,90		
	2.00.02.2.00.02.01.26.003.	26.3 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Peserta Yang Dilatih	240	600,00	48	117,75			0	-	0,00	0,00	48	117,75	20,00	19,63		
	2.00.02.2.00.02.01.26.004.	26.4 Pelatihan Mengelola Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Peserta Yang Dilatih	240	594,32	48	120,52	60	127,94	60	125,67	100,00	98,23	108	246,18	45,00	41,42		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	98,11	100,00	98,11			32,50	28,52		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								14.229,23		13.061,05				30.911,24				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								77,34		83,06		83,06			19,96	27,07		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T		T		T			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
23.	0.00.00.2.00.03.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	90	5.441,37	85,50	687,25	90	995,66	90	956,62	100,00	96,08	35	1.643,87	39,00	30,21	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
	0.00.00.2.00.03.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	3552	258,60	0	-	888	3,00	888	3,00	100,00	100,00	888	3,00	25,00	1,16		
	0.00.00.2.00.03.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	120	594,12	24	82,43	4	151,20	4	134,72	100,00	89,10	28	217,15	23,33	36,55		
	0.00.00.2.00.03.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	16	126,60	3	30,06	3	21,10	3	20,67	100,00	97,94	6	50,73	37,50	40,07		
	0.00.00.2.00.03.01.01.007.	1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	20	214,80	0	-	5	52,80	5	52,80	100,00	100,00	5	52,80	25,00	24,58		
	0.00.00.2.00.03.01.01.008.	1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	48	282,97	48	24,70	24	50,97	24	50,97	100,00	100,00	14	75,67	30,00	26,74		
	0.00.00.2.00.03.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	90	196,24	100	23,35	100	54,72	99	54,28	99,40	99,20	199	77,63	221,55	39,56		
	0.00.00.2.00.03.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	90	99,05	100	7,97	100	27,27	100	27,02	99,66	99,08	200	34,99	221,84	35,32		
	0.00.00.2.00.03.01.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	-	26	32,58			0	-	0,00	0,00	26	32,58	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.03.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	6720	92,50	500	3,30	500	7,50	400	6,00	80,00	80,00	900	9,30	13,39	10,05		
	0.00.00.2.00.03.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	14916	193,99	2727	35,27	3450	21,13	3429	21,00	99,39	99,38	6156	56,27	41,27	29,01		
	0.00.00.2.00.03.01.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	7507	159,05	790	16,84	890	27,36	885	27,20	99,46	99,44	1675	44,04	22,32	27,69		
	0.00.00.2.00.03.01.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang diulaksanakan	514	2.536,02	90	383,05	67	360,86	64	344,70	95,82	95,52	154	727,75	30,00	28,70		
	0.00.00.2.00.03.01.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	24	232,20	0	-	6	122,40	6	122,40	100,00	100,00	6	122,40	25,00	52,71		
	0.00.00.2.00.03.01.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang diulaksanakan	263	368,83	29	47,70	35	73,77	33	70,28	95,44	95,26	62	117,98	23,73	31,99		
	0.00.00.2.00.03.01.01.027.	1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	8	86,40	0	-	2	21,60	2	21,60	100,00	100,00	2	21,60	25,00	25,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)							91,28	90,33	91,28	90,33				51,00	27,28		
		Predikat kinerja							ST	T	ST	T				SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat	90	2.070,93	67,50	88,28	90	207,76	87	182,76	96,67	87,97	77	271,04	17,17	13,09		
	0.00.00.2.00.03.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	10	571,30	2	39,48	0	-	0	-	0,00	0,00	2	39,48	20,00	6,91		
	0.00.00.2.00.03.01.02.010.	2.1 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	10	61,90	3	4,50	3	47,40	3	47,20	100,00	99,58	6	51,70	60,00	83,52		
	0.00.00.2.00.03.01.02.022.	2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	8	128,00	3	7,00	0	-	0	-	0,00	0,00	3	7,00	37,50	5,47		
	0.00.00.2.00.03.01.02.023.	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	9	201,61	6	31,30	5	40,21	5	39,76	100,00	98,89	4	71,06	48,89	35,25		
	0.00.00.2.00.03.01.02.026.	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	373	26,25	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.03.01.02.028.	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	51	86,00	26	6,00	10	10,00	10	9,90	100,00	99,00	36	15,90	70,59	18,49		
	0.00.00.2.00.03.01.02.042.	2.1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	7	625,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.03.01.02.052.	2.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	41	370,87	0	-	15	110,15	13	85,90	86,67	77,98	13	85,90	31,71	23,16		
		Rata-rata capaian kinerja (%)							96,67	93,86	96,67	93,86				33,59	21,60		
		Predikat kinerja							ST	ST	ST	ST				SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.2.00.03.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur	90	450,00	20	51,34	0	-	0	-	0,00	0,00	10	51,34	11,11	11,41		
	0.00.00.2.00.03.01.03.005.	3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	1307	450,00	130	51,34	0	-	0	-	0,00	0,00	130	51,34	9,95	11,41		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			9,95	11,41		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas	90	116,16	20	7,84	0	-	0	-	0,00	0,00	10	7,84	11,11	6,75		
	0.00.00.2.00.03.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27	116,16	2	7,84	0	-	0	-	0,00	0,00	2	7,84	7,41	6,75		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			7,41	6,75		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat	90	1.010,97	90	76,44	90	175,81	90	218,85	100,00	124,48	90	295,29	40,00	29,21		
	0.00.00.2.00.03.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20	789,31	5	76,44	5	121,47	5	119,76	100,00	98,60	10	196,20	50,00	24,86		
	0.00.00.2.00.03.01.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	39,70	0	-	1	6,50	1	6,50	100,00	100,00	1	6,50	25,00	16,37		
	0.00.00.2.00.03.01.06.008.	5.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	64	102,51	0	-	16	43,39	32	88,13	203,11	203,11	32	88,13	50,78	85,98		
	0.00.00.2.00.03.01.06.011.	5.4 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8	79,45	0	-	2	4,45	2	4,45	100,00	100,00	2	4,45	25,00	5,60		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								125,78	125,43	125,78	125,43			37,69	33,20		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	90	932,65	90	69,61	90	197,74	90	194,36	100,00	98,29	90	263,97	40,00	28,30		
	0.00.00.2.00.03.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	20	879,75	4	69,61	5	189,84	5	186,46	100,00	98,22	9	256,07	45,00	29,11		
	0.00.00.2.00.03.01.07.002.	6.2 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	8	52,90		-	2	7,90	2	7,90	100,00	100,00	2	7,90	25,00	14,93		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	98,22	100,00	98,22			45,00	29,11		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	1.02.03.2.00.03.01.	PANGAN																	
	1.02.03.2.00.03.01.15.	7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	31	22.633,92	20	1.692,27	41	2.280,15	41	1.881,91	100,00	82,53	61	3.574,18	39,35	15,79		
			Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	91	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.03.2.00.03.01.15.001.	7.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penyaluran Bantuan Daerah Rawan Pangan Pasca Bencana/Kedada Darurat	90	515,65	6	29,34	90	49,50	0	1,80	0,00	3,64	6	31,14	6,33	6,04		
	1.02.03.2.00.03.01.15.002.	7.2 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Jumlah Laporan Data Base Potensi Produk Pangan yang disusun	1	49,00	0	22,64			0	-	0,00	0,00	0	22,64	0,00	46,20		
	1.02.03.2.00.03.01.15.003.	7.3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah Dokumen Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Penduduk yang disusun	4	512,45		-	1	52,65	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.03.2.00.03.01.15.005.	7.4 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Hasil Rapat Dewan Ketahanan Pangan	4	452,70	1	61,70	1	99,37	1	97,32	100,00	97,94	2	159,02	50,00	35,13		
	1.02.03.2.00.03.01.15.009.	7.5 Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Petani yang dibina (KK)	1362	2.355,30	77	133,17	180	171,74	180	145,17	100,00	84,53	257	278,34	18,87	11,82		
			Jumlah KWT yang melaksanakan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	28	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	1.02.03.2.00.03.01.15.011.	7.6 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Jumlah Laporan Berkala Harga Pangan Pokok	48	440,60		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.03.2.00.03.01.15.012.	7.7 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pasca panen yang disediakan	71	2.339,51	2	166,50	50	550,76	5	325,00	10,00	59,01	7	491,50	9,86	21,01		
			Jumlah Sosialisasi Penyebaran Informasi Keamanan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	12	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.03.2.00.03.01.15.013.	7.8 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Pengadaan Beras CPP	69	917,50	1	142,82	16	24,84	0	23,50	0,00	94,61	1	166,32	1,54	18,13		
	1.02.03.2.00.03.01.15.014.	7.9 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa yang di Fasilitas Penguatan Desa Mandiri Pangan	36	1.564,40	0	-	9	47,59	9	43,71	100,00	91,85	9	43,71	25,00	2,79		
	1.02.03.2.00.03.01.15.015.	7.10 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Jumlah Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	43	742,41	35	156,70	50	65,78	0	53,85	0,00	81,87	35	210,55	81,40	28,36		
	1.02.03.2.00.03.01.15.017.	7.11 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	luas Areal tanaman Perkebunan pada Lahan Kering yang dikembangkan	234	2.036,12	10	264,57	30	123,52	0	111,15	0,00	89,99	10	375,73	4,27	18,45		
	1.02.03.2.00.03.01.15.018.	7.12 Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Tani Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	92	756,70	5	35,70	23	67,92	21	65,67	91,30	96,68	26	101,37	28,26	13,40		
	1.02.03.2.00.03.01.15.019.	7.13 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang dibina	12	1.614,40	6	99,30	3	73,14	0	71,50	0,00	97,76	6	170,80	50,00	10,58		
	1.02.03.2.00.03.01.15.020.	7.14 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Jumlah luas lahan penangkar benih Padi (ha)	48	738,95	4	88,38	10	135,65	4	120,78	40,00	89,04	8	209,16	16,67	28,31		
	1.02.03.2.00.03.01.15.022.	7.15 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	68	3.249,50	5	324,76	20	430,02	5	377,34	25,00	87,75	10	702,10	14,71	21,61		
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	20	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.03.2.00.03.01.15.027.	7.16 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya	Jumlah Teknologi Budi Daya yang diteliti/dikembangkan	24	615,00	1	66,35	1	50,94	0	46,67	0,00	91,62	1	113,02	4,17	18,38		
	1.02.03.2.00.03.01.15.029.	7.17 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Pembinaan dan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Padi, jagung)	676	2.278,94	30	100,35	100	180,17	0	150,78	0,00	83,69	30	251,13	4,40	11,02		
	1.02.03.2.00.03.01.15.030.	7.18 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah dilaksanakannya Lokakarya Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu (LCM) serta pengaruhnya terhadap Pola dan Susunan Gizi dan Cita	8	1.454,80		-	2	156,57	0	153,23	0,00	97,86	0	153,23	0,00	10,53		
	1.02.03.2.00.03.01.15.031.	7.19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev Dinas Ketahanan Pangan yang tersedia	4	-		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								29,14	77,99	29,14	77,99			13,14	12,57		
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			SR	SR		
	2.00.03.2.00.03.01.	PERTANIAN																	
	2.00.03.2.00.03.01.15.	8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	675	3.577,33		511,02	200	231,05	0	147,11	0,00	63,67	0	658,13	0,00	18,40		
	2.00.03.2.00.03.01.15.001.	8.1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan	280	624,37	41	177,20			0	-	0,00	0,00	41	177,20	14,64	28,38		
	2.00.03.2.00.03.01.15.002.	8.2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	5	800,00	1	170,39	1	28,89	0	24,36	0,00	84,32	1	194,75	20,00	24,34		
	2.00.03.2.00.03.01.15.003.	8.3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lembaga Petani yang mendapatkan Pelatihan	65	502,96	31	163,42	15	52,16	14	46,38	93,33	88,91	45	209,80	69,23	41,71		
	2.00.03.2.00.03.01.15.006.	8.4 Optimalisasi lahan rawa pasang surut	Luas optimalisasi lahan	1000	1.500,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.03.2.00.03.01.15.007.	8.5 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah Luas lahan yang dioptimalisasikan	300	150,00	0	-	300	150,00	0	76,38	0,00	50,92	0	76,38	0,00	50,92		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								23,33	56,04	23,33	56,04			20,77	29,07		
		Predikat kinerja								SR	R	SR	R			SR	SR		
	2.00.03.2.00.03.01.16.	9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	12	735,00	2	166,57	3	46,91	0	37,26	0,00	79,42	2	203,83	16,67	27,73		
	2.00.03.2.00.03.01.16.007.	9.1 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi hasil pertanian/perkebunan Unggul Daerah	16	735,00	2	166,57	3	46,91	0	37,26	0,00	79,42	2	203,83	12,50	27,73		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	79,42	0,00	79,42			12,50	27,73		
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			SR	SR		
	2.00.03.2.00.03.01.17.	10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor tanaman pangan	2399	3.270,00		84,08	600	268,36	0	211,38	0,00	78,77	0	295,47	0,00	9,04		
	2.00.03.2.00.03.01.17.001.	10.1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat	2	520,00	4	84,08	1	62,70	3	62,77	300,00	100,10	7	146,85	350,00	28,24		
	2.00.03.2.00.03.01.17.002.	10.1.1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat	Jumlah alsintan pertanian/peternakan/perkebunan yang disediakan	22	1.150,00	0	-	10	205,66	10	148,62	100,00	72,26	10	148,62	45,45	12,92		
	2.00.03.2.00.03.01.17.005.	10.2.1 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani yang terlatih	150	300,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.03.2.00.03.01.17.015.	10.3.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air yang disediakan	30	1.300,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								200,00	86,18	200,00	86,18			98,86	10,29		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			ST	SR		
	2.00.03.2.00.03.01.18.	11. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi sektor perkebunan	80	497,77		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.03.2.00.03.01.18.007.	11.1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pengadaan sarpras pertanian (pupuk,benih padi), pengawasan pupuk bersubsidi	30	497,77	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	2.00.03.2.00.03.01.19.	12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani	209	9.038,28	36	1.558,59	50	268,25	36	235,27	72,00	87,70	72	1.793,86	34,47	19,85		
	2.00.03.2.00.03.01.19.001.	12.1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang dilatih	724	854,48	90	107,83	60	59,73	60	55,30	100,00	92,59	90	163,13	12,43	19,09		
	2.00.03.2.00.03.01.19.002.	12.2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang dibayarkan	250	1.715,52	52	367,66	60	208,52	60	179,97	100,00	86,31	52	547,63	20,80	31,92		
	2.00.03.2.00.03.01.19.004.	12.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang	5	400,00	2	68,86	0	-	0	-	0,00	0,00	2	68,86	40,00	17,21		
	2.00.03.2.00.03.01.19.009.	12.4 Penyediaan Sarana Keinformasian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (Dana Alokasi	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang disediakan sarana keinformasian	16	892,64	4	223,16	0	-	0	-	0,00	0,00	4	223,16	25,00	25,00		
	2.00.03.2.00.03.01.19.010.	12.5 Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang disediakan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian	16	921,00	4	230,25	0	-	0	-	0,00	0,00	4	230,25	25,00	25,00		
	2.00.03.2.00.03.01.19.012.	12.6 Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) - Dana Alokasi	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang disediakan	80	2.800,00	16	560,84	0	-	0	-	0,00	0,00	16	560,84	20,00	20,03		
	2.00.03.2.00.03.01.19.013.	12.7 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (Dana Alokasi	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang diakomodir	3	1.454,64		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	89,45	100,00	89,45			20,46	19,75		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	2.00.03.2.00.03.01.20.	13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kesehatan ternak	80	2.476,36	4	536,39	80	81,55	4	77,27	5,00	94,75	8	613,66	10,00	24,78		
	2.00.03.2.00.03.01.20.002.	13.1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Penurunan penyakit menular ternak dan kematian ternak(APBD)	16	690,00	4	89,80	4	81,55	4	77,27	100,00	94,75	8	167,07	50,00	24,21		
	2.00.03.2.00.03.01.20.007.	13.2 Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan - Dana Alokasi Khusus	Jumlah Puskesmas Kecamatan yang dibangun	4	1.786,36	1	446,59			0	-	0,00	0,00	1	446,59	25,00	25,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	94,75	100,00	94,75			37,50	24,61		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	2.00.03.2.00.03.01.21.	14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	72	7.765,00	20	1.224,59	90	561,43	70	543,28	77,78	96,77	90	1.767,87	25,00	22,77		
	2.00.03.2.00.03.01.21.003.	14.1 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Jumlah Bibit Ternak yang didistribusikan	490	7.035,00	54	1.057,82	100	450,12	16	435,63	16,00	96,78	70	1.493,45	14,29	21,23		
			Jumlah Pengadaan Ternak Kecil	1000	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Jumlah Unggas	4400	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.03.2.00.03.01.21.010.	14.2 Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah pembibitan dan perawatan ternak	3892	730,00	800	166,77	800	111,31	600	107,65	75,00	96,72	1400	274,42	35,97	37,59		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								45,50	96,75	45,50	96,75			12,56	14,71		
		Predikat kinerja								SR	ST	SR	ST			SR	SR		
	2.00.03.2.00.03.01.22.	15. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	31	570,00	5	69,45	8	94,37	4	91,69	50,00	97,16	9	161,15	29,03	28,27		
	2.00.03.2.00.03.01.22.006.	15.1 Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan	80	570,00	5	69,45	8	94,37	4	91,69	50,00	97,16	9	161,15	11,25	28,27		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	97,16	50,00	97,16						
		Predikat kinerja								SR	ST	SR	ST						
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								5.409,04									
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								64,11	72,37	64,11	72,37			30,80	20,62		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								R	S	R	S			SR	SR		
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	0.00.00.2.00.03.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi	92	8.556,42	92	1.317,39	90	1.618,51	90	1.338,82	100,00	82,72	36	2.656,21	39,57	31,04	DINAS PERKEBUNAN	
	0.00.00.2.00.03.02.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos untuk administrasi/Surat Menyurat	2	12,31	2	2,32	2	2,44	2	2,28	100,00	93,47	1	4,60	40,00	37,36		
	0.00.00.2.00.03.02.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik, Telepon, Berlangganan TV Kabel dan	240	764,17	48	115,61	12	142,50	12	106,46	100,00	74,71	60	222,07	25,00	29,06		
	0.00.00.2.00.03.02.01.003.	1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang	12	38,63	10	32,08	0	-	0	-	0,00	0,00	10	32,08	83,04	83,04		
	0.00.00.2.00.03.02.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan	30	407,97	5	64,90	4	63,50	4	53,90	100,00	84,88	9	118,79	30,66	29,12		
	0.00.00.2.00.03.02.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	6	167,23	0	-	6	40,25	6	39,45	100,00	98,01	6	39,45	100,00	23,59		
	0.00.00.2.00.03.02.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	18	210,60	17	44,10	17	44,85	17	44,45	100,00	99,11	7	88,55	37,43	42,05		
	0.00.00.2.00.03.02.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak	Ketersediaan Barang Cetak	12	37,92	12	6,83	12	7,10	12	7,10	100,00	100,00	5	13,93	40,00	36,73		
	0.00.00.2.00.03.02.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang	3	61,53	-	-	3	14,25	3	14,25	100,00	100,00	1	14,25	20,00	23,16		
	0.00.00.2.00.03.02.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	73	276,28	16	254,60	14	222,55	14	248,59	100,00	111,70	30	503,19	40,85	182,13		
	0.00.00.2.00.03.02.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Yang disediakan	39509	228,97	6683	38,73	7572	43,33	6907	39,52	91,22	91,21	13590	78,26	34,40	34,18		
	0.00.00.2.00.03.02.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat Rutin, Tamu, Jumat	23124	431,96	2918	54,50	3475	75,48	2552	55,43	73,45	73,43	5470	109,92	23,65	25,45		
	0.00.00.2.00.03.02.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	704	3.587,16	85	532,69	113	544,39	78	372,78	68,62	68,48	163	905,47	23,15	25,24		
	0.00.00.2.00.03.02.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis	62	1.107,00	0	-	16	230,40	16	230,40	100,00	100,00	16	230,40	25,81	20,81		
	0.00.00.2.00.03.02.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	629	864,69	82	113,45	17	122,68	10	66,61	58,82	54,30	92	180,06	14,69	20,82		
	0.00.00.2.00.03.02.01.027.	1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	24	360,00	4	57,60	4	64,80	4	57,60	100,00	88,89	8	115,20	33,33	32,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								92,29	88,44	92,29	88,44			38,13	42,98		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan	54	4.160,23	11	756,08	90	611,77	86	504,58	95,00	82,48	19	1.260,66	35,61	30,30		
	0.00.00.2.00.03.02.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Terbangun	2	1.250,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.03.02.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Sesuai	26	398,63	1	19,33	3	121,63	3	116,21	100,00	95,54	4	135,53	15,27	34,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.2.00.03.02.02.007.	2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	6	11,95	6	11,88	0	-	0	-	0	-	6	11,88	100,00	99,37		
	0.00.00.2.00.03.02.02.009.	2.4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	9	340,28	9	339,55	0	-	0	-	0	-	9	339,55	97,37	99,79		
	0.00.00.2.00.03.02.02.010.	2.5 Pengadaan meubeler	Jumlah Mebeluer Sesuai Kebutuhan	87	403,06	23	91,20	18	75,58	18	75,15	100,00	99,44	41	166,35	46,93	41,27		
	0.00.00.2.00.03.02.02.013.	2.6 Pengadaan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Tanah Milik Pemerintah Daerah	5	315,65	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
	0.00.00.2.00.03.02.02.022.	2.7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana Gedung Kantor yang direhabilitasi	5	80,30	1	15,42	1	16,75	1	15,28	100,00	91,24	2	30,71	39,77	38,24		
	0.00.00.2.00.03.02.02.024.	2.8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara/Service	15	434,66	3	75,21	3	100,04	3	93,32	100,00	93,28	6	168,53	39,60	38,77		
	0.00.00.2.00.03.02.02.042.	2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	2	406,55	1	203,50	0	-	0	-	0	-	1	203,50	49,82	50,05		
	0.00.00.2.00.03.02.02.052.	2.10 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sediakan	3	519,16	0	-	8	297,78	6	204,62	75,00	68,72	1	204,62	40,00	39,41		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									95,00	89,64	95,00	89,64			42,88	44,09		
	Predikat kinerja									ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.02.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan	92	661,25	87,78	129,79	0	-	0	-	0,00	0,00	17,56	129,79	19,08	19,63		
	0.00.00.2.00.03.02.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	316	320,65	144	129,79			0	-	0,00	0,00	144	129,79	45,57	40,48		
	0.00.00.2.00.03.02.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang disediakan	514	340,60	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00			22,78	20,24		
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.02.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki	92	223,47	20	46,10	90	16,45	68	12,43	75,00	75,56	35	58,53	38,04	26,19		
	0.00.00.2.00.03.02.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan	25	138,67	3	13,30	4	8,70	4	8,68	100,00	99,77	7	21,98	26,91	15,85		
	0.00.00.2.00.03.02.05.014.	4.2 Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis	10	84,80	2	32,80	2	7,75	1	3,75	50,00	48,39	3	36,55	29,70	43,10		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									75,00	74,08	75,00	74,08			28,31	29,48		
	Predikat kinerja									S	S	S	S			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.02.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen	92	1.510,28	92	282,32	90	263,53	70	191,57	78,13	72,69	32	473,89	35,29	31,38		
	0.00.00.2.00.03.02.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang disusun	20	136,32	4	25,20	4	23,45	2	13,85	50,00	59,06	6	39,05	30,00	28,65		
	0.00.00.2.00.03.02.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	39,72	1	15,95	1	6,75	1	5,60	100,00	82,96	2	21,55	40,00	54,26		
	0.00.00.2.00.03.02.06.006.	5.3 Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Barang Milik Daerah pada Dinas Perkebunan	5	692,68	4	127,73	5	116,06	5	100,12	100,00	86,27	2	227,84	36,79	32,89		
	0.00.00.2.00.03.02.06.008.	5.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang	375	641,57	61	113,44	72	117,27	45	72,00	62,50	61,40	106	185,44	28,14	28,90		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									78,13	72,42	78,13	72,42			33,73	36,18		
	Predikat kinerja									T	S	T	S			SR	SR		
	0.00.00.2.00.03.02.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan / Dinas / Instansi / Bagian	92	1.179,29	90	205,71	90	205,07	90	179,63	100,00	87,59	36	385,33	39,13	32,67		
	0.00.00.2.00.03.02.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan/Program Kerja	25	1.179,29	4	205,71	5	205,07	5	179,63	100,00	87,59	9	385,33	37,12	32,67		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	87,59	100,00	87,59			37,12	32,67		
	Predikat kinerja									T	T	ST	T			SR	SR		
	1.02.03.2.00.03.02.	PANGAN								0	-								
	1.02.03.2.00.03.02.15.	7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan Lahan Peremajaan, Produksi	92	3.859,75	13	1.073,06	90	1.589,98	26	1.102,46	28,79	69,34	39	2.175,52	42,31	56,36		
	1.02.03.2.00.03.02.15.012.	7.1 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Peralatan dan Pengolahan Hasil Perkebunan	3	1.126,18	1	234,32	4	551,21	4,00	518,80	100,00	94,12	5	753,12	166,67	66,87		
	1.02.03.2.00.03.02.15.013.	7.2 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Luas Areal Tanaman Sagu yang dikembangkan	30	116,98	0	-	30	34,50	0	27,34	0,00	79,25	0	27,34	0,00	23,37		
	1.02.03.2.00.03.02.15.016.	7.3 Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah Bibit tanaman sela pada kebun kelapa yang disediakan	5000	94,87	0	-	2000	44,87	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	1.02.03.2.00.03.02.15.017.	7.4 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	luas tanaman Perkebunan pada Lahan Kering yang	26	98,50	0	-	20	56,24	0	42,80	0,00	76,09	0	42,80	0,00	43,45		
	1.02.03.2.00.03.02.15.022.	7.5 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Bimtek/Pelatihan peningkatan mutu dan	5	1.136,81	1	599,75	2	253,29	1,00	123,32	50,00	48,69	2	723,07	40,00	63,61		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
1.02.03.2.00.03.02.15.027.	7.6	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya	Luas Pengendalian OPT dan Penanganan gangguan Usaha	766	793,97	350	238,99	650	477,43	335	255,65	51,54	53,55	685	494,64	89,38	62,30		
1.02.03.2.00.03.02.15.029.	7.7	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk	Luas Kebun Kelapa yang diremajakan	60	492,44	0	-	150	172,44	0	134,56	0,00	78,03	0	134,56	0,00	27,32		
Rata-rata capaian kinerja (%)				28,79		61,39		28,79		61,39				42,29		40,99			
Predikat kinerja				SR		R		SR		R				SR		SR			
2.00.03.2.00.03.02. PERTANIAN																			
2.00.03.2.00.03.02.15.	8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis dan	29	2.383,09	-	-	5	369,23	5	337,65	100,00	91,45	5	337,65	17,24	14,17		
2.00.03.2.00.03.02.15.001.	8.1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah kelompok/Petani dan Pelaku Agribisnis dilatih	13	1.049,65	0	-	3	167,89	3	147,95	100,00	88,12	3	147,95	23,08	14,10		
2.00.03.2.00.03.02.15.003.	8.2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok Tani/Lembaga yang ditingkatkan kemampuannya	8	1.333,44	0	-	2	201,34	2	189,70	100,00	94,22	2	189,70	25,00	14,23		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		91,17		100,00		91,17				24,04		14,16			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST				SR		SR			
2.00.03.2.00.03.02.16.	9.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Persentase Penyebaran Informasi Produk	72	4.491,84	-	-	90	242,02	90	224,34	100,00	92,70	90	224,34	25,00	4,99		
2.00.03.2.00.03.02.16.007.	9.1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Persentase Pelayanan Informasi Pasar, Potensi, harga komoditas, sentra produksi,	92	2.415,05	0	-	100	242,02	92	224,34	92,12	92,70	92	224,34	100,13	9,29		
2.00.03.2.00.03.02.16.008.	9.2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Peralatan dan Pengolahan Hasil Perkebunan	8	2.076,78	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				92,12		92,70		92,12		92,70				50,07		4,64			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST				SR		SR			
2.00.03.2.00.03.02.17.	10.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan	92	73.213,74	40	1.797,68	90	3.857,33	0	1.054,91	0,00	27,35	40	2.852,59	43,48	3,90		
2.00.03.2.00.03.02.17.001.	10.1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat	Jumlah Varietas Bibit Unggul Lokal, Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk yang diteliti	11	1.408,51	-	-	3	158,18	0	62,80	0,00	39,70	0	62,80	0,00	4,46		
2.00.03.2.00.03.02.17.002.	10.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat	Jumlah Sarana dan Prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang dibangun/Direhabilitasi	17174	64.773,42	103	391,31	582	3.699,15	0	992,11	0,00	26,82	103	1.383,43	0,60	2,14		
2.00.03.2.00.03.02.17.018.	10.3	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Embung (Blokong Kanal/Water Managemen) dan Pintu Air (Pintu Klipyang	50	7.031,81	10	1.406,36	-	-	0	-	0,00	0,00	10	1.406,36	20,00	20,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		33,26		0,00		33,26				6,87		8,86			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR				SR		SR			
2.00.03.2.00.03.02.18.	11.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan	69	32.596,37	5,50	227,81	90	3.174,02	26	681,91	28,57	21,48	31	909,72	45,50	2,79		
2.00.03.2.00.03.02.18.002.	11.1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan/Pertanian Yang	76	24.028,41	2	192,64	7	2.886,13	2	486,70	28,57	16,86	4	679,33	5,26	2,83		
2.00.03.2.00.03.02.18.003.	11.2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Bibit Unggul Daerah yang disediakan	14	1.938,91	3	35,17	3	139,04	0	71,28	0,00	51,27	3	106,45	21,43	5,49		
2.00.03.2.00.03.02.18.006.	11.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lokasi monitoring terhadap perusahaan perkebunan dan Penilaian	7	880,95	0	-	7	148,86	7	123,94	97,71	83,26	7	123,94	97,71	14,07		
2.00.03.2.00.03.02.18.008.	11.4	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah Bibit tanaman sela pada kebun kelapa yang disediakan	15000	246,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
2.00.03.2.00.03.02.18.009.	11.5	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	luas tanaman Perkebunan pada Lahan Kering yang	107	537,85	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
2.00.03.2.00.03.02.18.010.	11.6	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Produksi Perkebunan	Jumlah Bimtek/Pelatihan peningkatan mutu dan Keamanan Produksi	6	1.227,75	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
2.00.03.2.00.03.02.18.011.	11.7	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya	Luas Pengendalian OPT dan Penanganan gangguan Usaha	2465	1.890,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
2.00.03.2.00.03.02.18.012.	11.8	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk	Luas Kebun Kelapa yang diremajakan	363	1.200,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
2.00.03.2.00.03.02.18.013.	11.9	Pengembangan Areal Perkebunan Rakyat	Luas Areal Perkebunan Rakyat yang dikembangkan	165	646,50	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				42,10		50,46		42,10		50,46				13,82		2,49			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR				SR		SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	2.00.03.2.00.03.02.19.	12. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program	92	10.120,05		1.017,20	90	1.669,60	0	1.556,99	0,00	93,26	0	2.574,19	0,00	25,44		
	2.00.03.2.00.03.02.19.001.	12.1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang	41	1.500,16	17	-	10	300,49	8,00	230,66	80,00	76,76	25	230,66	60,98	15,38		
	2.00.03.2.00.03.02.19.002.	12.2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang	537	7.398,83	496	1.017,20	75	1.290,91	75	1.260,98	100,00	97,68	496	2.278,18	92,36	30,79		
	2.00.03.2.00.03.02.19.003.	12.3 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan	20	1.221,07	0	-	20	78,21	20	65,35	100,00	83,56	20	65,35	100,00	5,35		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								93,33	86,00	93,33	86,00			84,45	17,17		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			T	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									13.617,50				14.038,42				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program)								72,43	75,20	72,43	75,20			35,37	24,50		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								S	S	S	S			SR	SR		
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	0.00.00.2.00.06.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	100	5.169,09	20	1.052,41	100	958,07	86	556,60	86,44	58,10	37	1.609,00	37,29	31,13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	0.00.00.2.00.06.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Benda Pos yang di	3	75,38	3	6,60	3	6,75	3	6,75	100,00	100,00	6	13,35	191,67	17,71		
	0.00.00.2.00.06.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	581,13	36	88,05	12	105,00	12	91,22	100,00	86,88	48	179,27	26,67	30,85		
	0.00.00.2.00.06.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang	20	335,93	4	53,82	4	103,37	4	88,88	100,00	85,98	8	142,70	40,00	42,48		
	0.00.00.2.00.06.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah ruangan yang terjaga	16	440,45	3	79,15	12	79,83	3	79,71	25,00	99,85	6	158,86	37,50	36,07		
	0.00.00.2.00.06.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan	Jumlah Peralatan kerja yang	4	154,75	1	26,18	3	45,30	1	10,97	37,34	24,21	2	37,15	53,00	24,00		
	0.00.00.2.00.06.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	53	310,30	53	50,23	50	55,97	49	54,38	98,83	97,16	51	104,61	38,65	33,71		
	0.00.00.2.00.06.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Cetakan dan	270325	178,80	48922	17,60	2468	25,08	2301	23,38	93,24	93,22	51223	40,98	18,95	22,92		
	0.00.00.2.00.06.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	30	259,83	13	7,75	15	8,00	15	8,00	100,00	100,00	15	15,75	20,00	6,06		
	0.00.00.2.00.06.01.01.013.	1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang	19	147,65	19	206,27	0	-	0	-	0,00	0,00	19	206,27	100,00	139,70		
	0.00.00.2.00.06.01.01.015.	1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	600	83,60	120	8,85	100	15,60	72	11,10	71,56	71,15	192	19,95	31,93	23,86		
	0.00.00.2.00.06.01.01.016.	1.11 Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah logistik yang disediakan	13376	140,04	2396	20,00	2520	35,40	1815	25,46	72,02	71,92	4211	45,46	31,48	32,46		
	0.00.00.2.00.06.01.01.017.	1.12 Penyediaan Makanan dan	Jumlah makanan dan minuman	2214	119,91	397	20,40	872	39,92	779	35,64	89,34	89,28	1176	56,04	53,12	46,73		
	0.00.00.2.00.06.01.01.018.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang	435	2.341,31	62	467,51	80	437,86	69	377,59	86,23	86,23	131	845,10	30,02	36,10		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								81,13	83,82	81,13	83,82			51,77	37,90		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			R	SR		
	0.00.00.2.00.06.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat	100	927,83	20	398,71	100	300,75	0	16,80	0,00	5,59	20	415,51	20,00	44,78		
	0.00.00.2.00.06.01.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	5	296,56	3	190,77	1	149,15	0	8,40	0,00	5,63	3	199,17	60,00	67,16		
	0.00.00.2.00.06.01.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang	4	201,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.2.00.06.01.02.042.	2.3 Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Kantor yang	5	169,55	6	207,94	1	40,65	0	8,40	0,00	20,66	6	216,34	120,00	127,59		
	0.00.00.2.00.06.01.02.052.	2.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	34	260,21	0	-	15	110,95	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	8,77	0,00	8,77			45,00	48,69		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.2.00.06.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	40	165,50		-	100	41,30	100	23,10	100,00	55,93	100	23,10	250,00	13,96		
	0.00.00.2.00.06.01.03.005.	3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	368	165,50	0	-	70	41,30	70	23,10	100,00	55,93	70	23,10	19,02	13,96		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	55,93	100,00	55,93			19,02	13,96		
		Predikat kinerja								ST	R	ST	R			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.2.00.06.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas	80	550,00		-			0	-	0,00	0,00	0	0	-	0,00		
	0.00.00.2.00.06.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	26	550,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00						
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR						
	0.00.00.2.00.06.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	100	671,61	20	86,84	100	135,17	96	128,74	96,20	95,24	39	215,58	39,24	32,10		
	0.00.00.2.00.06.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	330	477,86	66	86,84	66	100,17	64	94,11	97,47	93,95	130	180,95	39,49	37,87		
	0.00.00.2.00.06.01.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	25	193,75		-	5	35,00	5	34,63	100,00	98,94	5	34,63	20,00	17,87		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								98,74	96,45	98,74	96,45			29,75	27,87		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.2.00.06.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	100	1.622,07	20	305,07	100	257,86	100	293,51	100,00	113,83	40	598,58	40,00	36,90		
	0.00.00.2.00.06.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Keerja yang disusun	40	1.622,07	8	305,07	8	257,86	8	293,51	100,00	113,83	16	598,58	40,00	36,90		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	113,83	100,00	113,83			40,00	36,90		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	2.00.06.2.00.06.01.	PERDAGANGAN								0	-								
	2.00.06.2.00.06.01.15.	7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok	100	11.234,61		843,53	100	926,43	0	724,61	0,00	78,22	0	1.568,14	0,00	13,96		
	2.00.06.2.00.06.01.15.002.	7.1 Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan	Persentase pembentukan BPSK	30	518,89	30	22,46	30	25,77	30	24,02	100,00	93,20	60	46,47	200,00	8,96		
	2.00.06.2.00.06.01.15.003.	7.2 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan terhadap peredaran Barang dan Jasa dan Penyelenggaraan Pasar Murah	315	4.500,63	7	293,50	10	300,82	13	211,30	130,00	70,24	20	504,80	6,35	11,22		
	2.00.06.2.00.06.01.15.004.	7.3 Pengelolaan dan Pengembangan UPT	Jumlah Pengembangan SDM dan Tenaga Penerima	21	771,14	7	242,91	1	106,07	1	91,46	100,00	86,23	8	334,37	38,10	43,36		
	2.00.06.2.00.06.01.15.005.	7.4 Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Metrologian.	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan pendataan alat	66	668,28	2	11,08	3	78,77	3	69,92	100,00	88,77	5	81,00	7,58	12,12		
	2.00.06.2.00.06.01.15.006.	7.5 Pengembangan dan Penyediaan Informasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Informasi Sarana dan Prasarana Metrologian	5	252,39		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.06.2.00.06.01.15.007.	7.6 Peningkatan Kapasitas Laboratorium UPTP	Jumlah Kalibrasi Alat Metrologi	32	543,87	1	141,00	1	7,96	0	-	0,00	0,00	1	141,00	3,13	25,93		
	2.00.06.2.00.06.01.15.008.	7.7 Sosialisasi dan Pengembangan tertib ukur Metrologian	Jumlah Sosialisasi Tertib ukur dilaksanakan	5	485,33	0	10,40	5	64,91	1	44,68	20,00	68,83	1	55,08	20,00	11,35		
	2.00.06.2.00.06.01.15.009.	7.8 Peningkatan Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat UPTP	Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Uptp	12	1.050,53	63	94,82	4	257,33	4	235,14	100,00	91,38	67	329,96	558,33	31,41		
	2.00.06.2.00.06.01.15.012.	7.9 Monitoring, Evaluasi Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Peredaran Barang dan Jasa di	20	443,55	20	27,37	20	84,81	20	48,11	100,00	56,72	40	75,47	200,00	17,01		
	2.00.06.2.00.06.01.15.013.	7.10 Peningkatan Kapasitas Laboratorium UPTP Kemetrologian Daerah (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Bangunan Gedung Laboratorium Kemetrologian	1	2.000,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								81,25	69,42	81,25	69,42			41,34	16,14		
		Predikat kinerja								S	T	S	T			SR	SR		
	2.00.06.2.00.06.01.17.	8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Kegiatan Peningkatan dan	100	5.968,92	84	900,57	100	574,42	50	176,89	50,00	30,79	134	1.077,46	26,78	18,05		
	2.00.06.2.00.06.01.17.009.	8.1 Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait /Asosiasi	Jumlah Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan luar negeri dan IPSK se Indonesia	13	268,10	2	86,27	2	64,85	2	53,75	100,00	82,89	4	140,02	30,77	52,23		
	2.00.06.2.00.06.01.17.010.	8.2 Pengembangan Kluster Produk	Jumlah Pameran / Expo yang di	33	5.700,83	6	814,30	6	509,58	0	123,14	0,00	24,17	6	937,44	18,18	16,44		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	53,53	50,00	53,53			24,48	34,34		
		Predikat kinerja								R	R	SR	R			SR	SR		
	2.00.06.2.00.06.01.18.	9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pendataan dan informasi harga	100	24.583,16	54	3.660,94	100	1.174,68	100	1.150,37	100,00	97,93	154	4.811,31	30,86	19,57		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	2.00.06.2.00.06.01.18.002.	9.1 Pemberian Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Jumlah Pengembangan Usaha yang diberikan Kemudahan dalam Perijinan	20	300,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	2.00.06.2.00.06.01.18.003.	9.2 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar yang dibangun	1	1.141,19	1	912,63	0	-	0	-	0,00	0,00	1	912,63	100,00	79,97		
	2.00.06.2.00.06.01.18.006.	9.3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase proses Pembentukan SRG	70	9.042,86	30	334,45	70	1.174,68	70	1.150,37	100,00	97,93	100	1.484,82	142,86	16,42		
	2.00.06.2.00.06.01.18.009.	9.4 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Dana Alokasi Khusus/DAK)	Jumlah Pasar yang dibangun	10	14.099,11	2	2.413,86	0	-	0	-	0,00	0,00	2	2.413,86	20,00	17,12		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	97,93	100,00	97,93			65,71	28,38		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			R	SR		
	2.00.06.2.00.06.01.19.	10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	100	2.837,11	100	604,98	100	1.350,21	67	1.188,65	66,66	88,03	83	1.793,63	83,33	63,22		
	2.00.06.2.00.06.01.19.001.	10.1 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan	Jumlah Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan	12	1.034,75	3	264,78	3	193,55	3	184,44	100,00	95,29	6	449,21	50,00	43,41		
	2.00.06.2.00.06.01.19.002.	10.2 Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima	Jumlah Penyuluhan Pengkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima	13	1.802,35	3	340,20	3	1.156,66	3	1.004,21	100,00	86,82	6	1.344,42	46,15	74,59		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	91,06	100,00	91,06			48,08	59,00		
	Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST			SR	R		
	2.00.06.2.00.06.01.21.	11. Program Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	29.431,20	55	2.153,99	100	820,20	27	718,67	26,89	87,62	81	2.872,67	16,29	9,76		
	2.00.06.2.00.06.01.21.001.	11.1 Pembangunan Pasar Pedesaan	Jumlah DED Pasar dan Jumlah Pasar yang di bangun	55	26.593,57	6	2.153,99	11	520,29	2	509,34	18,18	97,90	8	2.663,33	14,55	10,01		
	2.00.06.2.00.06.01.21.002.	11.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan	Jumlah Pasar yang di Rehabilitasi	15	2.747,63	0	-	2	209,91	1	209,34	50,00	99,72	1	209,34	6,67	7,62		
	2.00.06.2.00.06.01.21.003.	11.3 Pembangunan Pasar Pedesaan (Dana Insentif Daerah/DID)	Jumlah Pasar Pedesaan yang dikembangkan	8	90,00	0	-	8	90,00	1	-	12,50	0,00	1	-	12,50	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									26,89	65,87	26,89	65,87			11,24	5,88		
	Predikat kinerja									SR	R	SR	R			SR	SR		
	2.00.07.2.00.06.01.	PERINDUSTRIAN						2.188,43	0	-	-								
	2.00.07.2.00.06.01.15.	12. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peralatan mesin pengolahan kelapa	78	9.739,73	20	409,13	100	529,12	0,00	50,56	0,00	9,56	20	459,68	25,77	4,72		
	2.00.07.2.00.06.01.15.001.	12.1 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah IKM yang dibina	65	9.739,73	1	409,13	15	529,12	0	50,56	0,00	9,56	1	459,68	1,54	4,72		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	9,56	0,00	9,56			1,54	4,72		
	Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	2.00.07.2.00.06.01.16.	13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100	11.566,15	61	1.007,92	100	1.050,65	44	647,74	44,13	61,65	105	1.655,66	21,08	14,31		
	2.00.07.2.00.06.01.16.001.	13.1 Pembinaan bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM yang di bina	432	3.763,23	60	522,41	30	77,60	3	5,97	10,00	7,69	63	528,38	14,58	14,04		
	2.00.07.2.00.06.01.16.002.	13.2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	Jumlah Kecamatan memiliki Database IKM Pengolahan Kelapa dan Kelapa Sawit	5	902,92	1	5,14	5	34,11	0	-	0,00	0,00	1	5,14	20,00	0,57		
	2.00.07.2.00.06.01.16.003.	13.3 Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sarana dan prasarana masyarakat di bidang IKM	44	1.990,88	4	50,68	7	80,11	7	69,60	100,00	86,88	11	120,28	25,00	6,04		
	2.00.07.2.00.06.01.16.004.	13.4 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Pelaku IKM yang memahami prosedur pengajuan izin	78	299,66	3	15,44	4	56,22	2	39,36	50,00	70,01	5	54,80	6,41	18,29		
	2.00.07.2.00.06.01.16.009.	13.5 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Sandang	Jumlah IKM industri sandang yang dibina	22	1.160,62	3	94,40	5	295,19	2	140,81	40,00	47,70	5	235,21	22,73	20,27		
	2.00.07.2.00.06.01.16.011.	13.6 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Perabot	Jumlah IKM industri perabot yang dibina	30	1.629,17	1	32,64	7	293,53	5	256,00	71,43	87,21	6	288,64	20,00	17,72		
	2.00.07.2.00.06.01.16.013.	13.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perbengkelan	Jumlah IKM industri perbengkelan yang dibina	41	1.819,67	9	287,22	8	213,89	3	136,01	37,50	63,59	12	423,23	29,27	23,26		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									44,13	51,87	44,13	51,87			19,71	14,31		
	Predikat kinerja									SR	R	SR	R			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	2.00.07.2.00.06.01.18.	14. Program Penataan Struktur Industri	Cakupan pertumbuhan Industri	20	400,00	0	-	100	608,66	100	507,44	100,00	83,37	100	507,44	100,00	126,86		
	2.00.07.2.00.06.01.18.001.	14.1 Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir	Persentase Penyusunan RPIK	90	400,00	0	-	90	608,66	90	507,44	100,00	83,37	90	507,44	100,00	126,86		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	83,37	100,00	83,37			100,00	126,86		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			ST	ST		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program							8.727,53		6.183,69								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								67,86	67,80	67,86	67,80			38,28	35,00		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								S	S	S	S			SR	SR		
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
	0.00.00.3.00.01.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	99	9.177,90	41	1.664,04	90	1.348,40	85	1073	94,59	79,57	126,33	2736,92	127,61	29,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	0.00.00.3.00.01.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Yang Disediakan	2	51,36	2	9,53	2	7,68	2	8	100,00	99,61	3,98	17,18	39,84	33,44		
	0.00.00.3.00.01.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	420	1.366,00	84	231,46	7	186,40	7	158	100,00	84,97	91,00	389,84	21,67	28,54		
	0.00.00.3.00.01.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	296	426,00	41	78,94	55	110,81	40	116	72,73	104,88	80,66	195,15	27,25	45,81		
	0.00.00.3.00.01.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	9	346,00	9	74,18	9	71,85	9	72	100,00	99,80	17,90	145,89	39,78	42,17		
	0.00.00.3.00.01.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	255,04	30	47,51	30	42,69	30	42	100,00	98,00	59,69	89,35	39,80	35,03		
	0.00.00.3.00.01.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9	158,20	8	27,14	9	23,84	9	24	100,00	99,79	17,25	50,93	38,34	32,20		
	0.00.00.3.00.01.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	10	126,40	1	16,96	2	11,13	2	10	100,00	93,68	3,40	27,38	34,01	21,66		
	0.00.00.3.00.01.01.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	218,00	8	180,56	0	-	0	0	0,00	0,00	8,48	180,56	84,77	82,83		
	0.00.00.3.00.01.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	81	193,00	9	21,87	15	28,80	15	27	100,00	94,48	24,37	49,08	30,09	25,43		
	0.00.00.3.00.01.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	30281	377,90	3222	40,20	6010	27,00	2248	27	37,40	99,86	5469,64	67,16	18,06	17,77		
	0.00.00.3.00.01.01.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	238	309,40	24	30,76	45	41,25	45	41	100,00	99,78	68,86	71,91	28,93	23,24		
	0.00.00.3.00.01.01.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	961	4.878,90	143	875,07	198	712,00	150	497	75,76	69,80	293,33	1372,07	30,52	28,12		
	0.00.00.3.00.01.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	167	232,90	8	8,26	24	38,16	5	6	20,83	14,56	12,95	13,81	7,76	5,93		
	0.00.00.3.00.01.01.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	42	238,80	4	21,60	4	46,80	4	45	100,00	96,15	8,00	66,60	19,05	27,89		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								85,13	88,87	85,13	88,87			32,85	32,15		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
	0.00.00.3.00.01.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	93	4.434,00	16	479,29	90	320,80	0	265	0,00	82,68	16,40	744,51	17,68	16,79		
	0.00.00.3.00.01.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	49	902,75	7	133,05	0	-	0	0	0,00	0,00	6,52	133,05	13,31	14,74		
	0.00.00.3.00.01.01.02.010.	2.2 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	7	591,45	4	131,63	0	-	0	0	0,00	0,00	3,50	131,63	50,06	22,26		
	0.00.00.3.00.01.01.02.020.	2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	22	238,00	0	-	1	15,00	1	9	100,00	60,92	1,00	9,14	4,55	3,84		
	0.00.00.3.00.01.01.02.022.	2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	28	290,00	1	4,38	1	21,00	2	17	200,00	80,29	3,00	21,24	10,71	7,32		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.01.01.02.026.	2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	296	212,00	0	-	14	10,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.01.01.02.028.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	78	262,00	7	22,53	12	35,00	14	32	116,67	90,18	20,71	54,09	26,55	20,65		
	0.00.00.3.00.01.01.02.042.	2.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	2	944,80	1	187,70	2	24,00	2	14	100,00	58,98	2,96	201,86	147,93	21,37		
	0.00.00.3.00.01.01.02.052.	2.8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	993,00	-	-	9	215,80	7	194	77,78	89,67	7,00	193,50	100,00	19,49		
Rata-rata capaian kinerja (%)										99,07	63,34	99,07	63,34			44,14	13,71		
Predikat kinerja										ST	R	ST	R			SR	SR		
	0.00.00.3.00.01.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur	72	194,12	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.01.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	244	121,76	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.01.01.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari tertentu yang disediakan	242	72,36	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.3.00.01.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	92	843,00	12	102,37	90	93,32	64	70	70,71	74,56	75,90	171,95	77,19	8,84		
	0.00.00.3.00.01.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		843,00	6	102,37	11	93,32	7	70	63,64	74,56	12,81	171,95	0,00	20,40		
Rata-rata capaian kinerja (%)										63,64	74,56	63,64	74,56			0,00	20,40		
Predikat kinerja										R	S	R	S			SR	SR		
	0.00.00.3.00.01.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	99	1.233,03	17	208,47	90	118,17	90	136	100,00	115,14	107,43	344,54	108,07	27,94		
	0.00.00.3.00.01.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	16	400,00	3	71,78	3	76,37	3	94	100,00	123,49	5,87	166,09	36,70	41,52		
	0.00.00.3.00.01.01.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	176,80	1	21,44	1	41,80	1	42	100,00	99,89	1,61	63,20	32,25	35,74		
	0.00.00.3.00.01.01.06.012.	5.3 Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal yang disusun	5	656,23	1	115,25	0	-	0	0	0,00	0,00	1,13	115,25	22,61	17,56		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	111,69	100,00	111,69			30,52	15,67		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.3.00.01.01.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi/Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	92	563,25	18	100,85	90	96,55	90	97	100,00	100,00	108,40	197,40	117,83	35,05		
	0.00.00.3.00.01.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	30	563,25	6	100,85	6	96,55	6	97	100,00	100,00	11,77	197,40	39,24	35,05		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			39,24	35,05		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
3.00.01.3.00.01.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
	3.00.01.3.00.01.01.16.	7. Program Kerjasama Pembangunan	Capaian kerjasama pembangunan daerah (%)	86	111,82	86	79,12	0	-	0	0	0,00	0,00	86,00	79,12	100,00	70,76		
	3.00.01.3.00.01.01.16.002.	7.1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Kerjasama	1	111,82	1	79,12	0	-	0	0	0,00	0,00	1,00	79,12	100,00	70,76		
	3.00.01.3.00.01.01.16.008.	7.2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.01.3.00.01.01.16.009.	7.3 Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Lembaga Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.01.3.00.01.01.16.010.	7.4 Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama dengan daerah lain	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			25,00	17,69		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	3.00.01.3.00.01.01.19.	8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	92	1.024,87	17	81,44	90	86,19	0	69	0,00	79,96	17,01	150,36	18,49	14,67		
	3.00.01.3.00.01.01.19.009.	8.1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	119	1.024,87	22	81,44	22	86,19	9	69	40,91	79,96	30,88	150,36	25,95	14,67		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								40,91	79,96	40,91	79,96			25,95	14,67		
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			SR	SR		
	3.00.01.3.00.01.01.20.	9. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	89	985,13	6	49,85	90	152,17	90	98	100,00	64,62	95,80	148,18	107,89	15,04		
	3.00.01.3.00.01.01.20.004.	9.1 Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian Data SIPD	92	985,13	6	49,85	100	152,17	90	98	90,00	64,62	96,43	148,18	20,96	15,04		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								90,00	64,62	90,00	64,62			20,96	15,04		
		Predikat kinerja								T	R	T	R			SR	SR		
	3.00.01.3.00.01.01.21.	10. Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	92	21.901,52	85	2.828,62	90	1.760,68	80	1310	88,89	74,38	165,00	4138,16	35,87	18,89		
	3.00.01.3.00.01.01.21.005.	10.1 Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen yang disusun	2	1.135,22	1	371,03	0	-	0	0	0,00	0,00	1,00	371,03	50,00	32,68		
	3.00.01.3.00.01.01.21.006.	10.2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	2	937,49	1	241,23	0	-	0	0	0,00	0,00	1,00	241,23	50,00	25,73		
	3.00.01.3.00.01.01.21.007.	10.3 Penetapan RPJMD	Perda RPJMD yang ditetapkan	2	118,26	1	49,37	0	-	0	0	0,00	0,00	1,00	49,37	50,00	41,75		
	3.00.01.3.00.01.01.21.008.	10.4 Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Ranperbup RKPD yang dihasilkan	10	2.231,96	2	319,34	2	215,44	2	141	100,00	65,49	4,00	460,44	40,00	20,63		
	3.00.01.3.00.01.01.21.009.	10.5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana	5	2.879,53	1	382,95	1	346,72	1	278	100,00	80,26	2,00	661,24	40,00	22,96		
	3.00.01.3.00.01.01.21.010.	10.6 Penetapan RKPD	Jumlah Perbup RKPD yang dihasilkan	10	164,32	2	9,84	2	12,94	2	9	100,00	71,95	4,00	19,15	40,00	11,65		
	3.00.01.3.00.01.01.21.013.	10.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah lokasi monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	20	382,76	20	64,29	0	-	0	0	0,00	0,00	20,00	64,29	100,00	16,80		
	3.00.01.3.00.01.01.21.020.	10.8 Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana	5	1.040,03	1	131,91	1	116,83	1	99	100,00	85,02	2,00	231,25	40,00	22,23		
	3.00.01.3.00.01.01.21.021.	10.9 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25	1.062,23	5	80,44	7	112,87	7	102	100,00	90,34	12,00	182,42	48,00	17,17		
	3.00.01.3.00.01.01.21.022.	10.10 Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	346	1.747,65	82	269,03	82	193,05	41	149	50,00	77,00	122,52	417,68	35,41	23,90		
	3.00.01.3.00.01.01.21.023.	10.11 Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	355	1.607,33	67	237,09	71	211,96	49	151	69,01	71,33	115,75	388,28	32,60	24,16		
	3.00.01.3.00.01.01.21.028.	10.12 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	3	2.358,01	1	84,71	3	97,04	1	71	33,33	73,01	2,00	155,55	66,67	6,60		
	3.00.01.3.00.01.01.21.029.	10.13 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	3	770,96	1	135,64			0	0	0,00	0,00	1,00	135,64	33,33	17,59		
	3.00.01.3.00.01.01.21.031.	10.14 Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	384	2.048,83	53	281,56	76	259,00	43	145	56,58	56,08	96,00	426,81	25,00	20,83		
	3.00.01.3.00.01.01.21.036.	10.15 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebutanan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	305	1.441,07	60	170,20	57	194,84	45	164	78,95	83,96	105,03	333,79	34,44	23,16		
	3.00.01.3.00.01.01.21.037.	10.16 Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah dokumen Perubahan RPJMD	2	950,00	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.01.3.00.01.01.21.038.	10.17 Penetapan Perubahan RPJMD	Jumlah Perda Perubahan RPJMD	2	550,00	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.01.3.00.01.01.21.039.	10.18 Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perubahan Renstra	2	325,87	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.01.3.00.01.01.21.040.	10.19 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1	150,00	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									78,79	75,45	78,79	75,45		36,08	17,26		
		Predikat kinerja									T	S	T	S		SR	SR		
	3.00.01.3.00.01.01.22.	11. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	89	4.032,31	27	536,17	90	310,31	65	241	72,58	77,66	92,78	777,15	103,78	19,27		
	3.00.01.3.00.01.01.22.017.	11.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	225	1.287,20	32	182,95	43	112,99	22	90	51,16	79,71	54,30	273,02	24,14	21,21		
	3.00.01.3.00.01.01.22.019.	11.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Taerkait	316	1.561,26	37	170,08	39	197,32	31	151	79,49	76,48	68,23	321,00	21,59	20,56		
	3.00.01.3.00.01.01.22.020.	11.3 Kajian Perencanaan, Pengembangan Lingkup Pertanian dan Agribisnis	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	5	1.183,85	1	183,14	0	-	0	0	0,00	0,00	0,93	183,14	18,62	15,47		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									65,32	78,10	65,32	78,10		21,45	19,08		
		Predikat kinerja									R	T	R	T		SR	SR		
	3.00.01.3.00.01.01.23.	12. Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	91	7.054,85	13	1.078,30	90	712,20	82	603	91,27	84,70	95,06	1681,55	104,23	23,84		
	3.00.01.3.00.01.01.23.003.	12.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait	190	955,60	29	155,14	38	62,54	11	49	28,95	78,25	40,00	204,08	21,05	21,36		
	3.00.01.3.00.01.01.23.006.	12.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	10	850,04	2	122,65	1	133,75	1	118	100,00	88,20	3,00	240,62	30,00	28,31		
	3.00.01.3.00.01.01.23.010.	12.3 Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi	Jumlah dokumen yang disusun	5	866,72	1	142,80	1	67,52	1	61	100,00	89,64	2,00	203,32	40,00	23,46		
	3.00.01.3.00.01.01.23.013.	12.4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	174	985,30	27	182,03	35	118,54	35	100	100,00	84,36	62,00	282,03	35,63	28,62		
	3.00.01.3.00.01.01.23.015.	12.5 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	205	983,76	34	176,34	39	48,98	11	44	28,21	89,50	45,00	220,18	21,95	22,38		
	3.00.01.3.00.01.01.23.016.	12.6 Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs	Jumlah Dokumen yang disusun	5	886,18	1	140,64	1	114,72	1	87	100,00	75,61	2	227,38	40,00	25,66		
	3.00.01.3.00.01.01.23.018.	12.7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah dokumen yang disusun	5	883,06	1	158,70	1	99,26	1	87	100,00	87,51	2,00	245,56	40,00	27,81		
	3.00.01.3.00.01.01.23.019.	12.8 Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten Sehat	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait	4	644,19	0	-	1	66,88	1	58	100,00	87,28	1	58,38	25,00	9,06		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									82,14	85,04	82,14	85,04		31,70	23,33		
		Predikat kinerja									T	T	T	T		SR	SR		
	3.00.04.3.00.01.01.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	3.00.04.3.00.01.01.15.	13. Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	83	4.035,67	11	244,01	90	254,74	29	154	31,75	60,49	39,83	398,11	47,87	9,86		
	3.00.04.3.00.01.01.15.001.	13.1 Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah koordinasi rumusan kajian dan pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan	134	644,68	15	120,62	30	104,93	30	51	100,00	48,34	44,55	171,34	33,25	26,58		
	3.00.04.3.00.01.01.15.002.	13.2 Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	15	969,32	2	123,39	3	149,82	3	103	100,00	69,00	5,44	226,77	36,27	23,39		
	3.00.04.3.00.01.01.15.003.	13.3 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	4	329,49	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.04.3.00.01.01.15.004.	13.4 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah topik yang diseminasikan	4	399,87	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.04.3.00.01.01.15.005.	13.5 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang dilaksanakan	4	681,41	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.04.3.00.01.01.15.006.	13.6 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	4	681,41	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.04.3.00.01.01.15.007.	13.7 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan	4	329,49	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										28,57	16,76	28,57	16,76		9,93	7,14		
	Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				55.591,47		7.452,54		5.253,54		4.115,41	833,58	838,39			317,82	231,18		
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										75,78	76,22	75,78	76,22		24,45	17,78		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										S	T	S	T		SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Perubahan SOTK sehingga satu Sub Bidang tidak melaksanakan Kegiatan																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
27.	0.00.00.3.00.02.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	13.521,01	41	2.028,26	100	3.164,86	138	2541,72	137,67	137,67	89,20	4569,98	35,68	33,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	0.00.00.3.00.02.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	6500	43,36	1003	7,34	1300	7,34	602	3,40	46,31	46,28	1605	10,73	24,69	24,75		
	0.00.00.3.00.02.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	480	2.961,80	480	437,57	480	573,64	480	447,67	100,00	78,04	480	885,24	40,00	29,89		
	0.00.00.3.00.02.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanjang	190	640,95	20	62,06	38	115,95	38	31,72	100,00	27,35	58	93,77	30,27	14,63		
	0.00.00.3.00.02.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	36	379,14	36	60,26	36	62,38	36	60,26	100,00	96,60	36	120,51	40,00	31,79		
	0.00.00.3.00.02.01.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	90	67,20	18	13,20	12	14,40	12	14,40	100,00	100,00	30	27,60	33,33	41,07		
	0.00.00.3.00.02.01.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	81	973,72	81	186,95	81	196,33	81	196,33	100,00	100,00	81	383,29	40,00	39,36		
	0.00.00.3.00.02.01.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	248376	1.054,37	81249	312,92	48	266,13	48	262,44	100,00	98,61	81297	575,35	32,73	54,57		
	0.00.00.3.00.02.01.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	17	220,95	14	31,04	17	39,01	17	29,81	100,00	76,41	16	60,85	38,01	27,54		
	0.00.00.3.00.02.01.01.013.	1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13	78,51	13	97,27	0	-	0	0,00	0,00	0,00	13	97,27	40,00	123,88		
	0.00.00.3.00.02.01.01.015.	1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	238	199,03	33	26,85	35	6,50	35	3,55	100,00	54,62	68	30,40	28,68	15,27		
	0.00.00.3.00.02.01.01.016.	1.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	34678	243,26	4500	29,20	4000	34,02	4000	28,21	100,00	82,91	8500	57,40	24,51	23,60		
	0.00.00.3.00.02.01.01.017.	1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	619	459,20	119	92,35	60	62,14	50	36,96	84,15	59,49	170	129,31	27,39	28,16		
	0.00.00.3.00.02.01.01.018.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	375	2.020,91	122	433,16	93	633,08	85	392,09	91,00	61,93	207	825,25	55,10	40,84		
	0.00.00.3.00.02.01.01.019.	1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	176	2.200,36	-	-	44	612,00	44	595,00	100,00	97,22	44	595,00	25,00	27,04		
	0.00.00.3.00.02.01.01.020.	1.15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	450	749,63	44	55,11	299	301,01	281	237,95	94,00	79,05	325	293,06	72,17	39,09		
	0.00.00.3.00.02.01.01.026.	1.16 Penyediaan Jasa Penggunaan Gedung Kantor	Jumlah pembayaran jasa penggunaan Gedung Kantor	30	463,00	5	51,00	60	74,00	60	35,00	100,00	47,30	65	86,00	86,67	18,57		
	0.00.00.3.00.02.01.01.027.	1.17 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	696	765,60	132	132,00	11	166,94	11	166,94	100,00	100,00	143	298,94	20,55	39,05		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								94,72	75,36	94,72	75,36			38,77	36,42		
		Predikat kinerja								57	5	57	5			57	57		
	0.00.00.3.00.02.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	100	3.163,56	66	610,78	100	380,02	43	92	42,86	24,09	54,46	702,33	21,78	22,20		
	0.00.00.3.00.02.01.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	3	750,00	-	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.02.01.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	13	435,20	-	-	10	204,20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.02.01.02.007.	2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	1	1,80	2	7,70	0	-	0	0,00	0,00	0,00	2	7,70	174,50	427,78		
	0.00.00.3.00.02.01.02.022.	2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	16	477,79	34	156,44	0	-	0	0	0,00	0,00	34,00	156,44	212,50	32,74		
	0.00.00.3.00.02.01.02.026.	2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	4	232,50	2	13,49	4	67,50	4	60	100,00	88,71	6	73,37	152,50	31,56		
	0.00.00.3.00.02.01.02.028.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	137	195,00	12	28,37	21	30,00	21	5	100,00	16,23	33,16	33,24	24,20	17,05		
	0.00.00.3.00.02.01.02.052.	2.7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	150	1.071,27	21	404,78	28	78,32	28	27	100,00	34,22	49,04	431,58	32,69	40,29		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								75,00	34,79	75,00	34,79			85,20	78,49		
		Predikat kinerja								5	SR	5	SR			5	57		
	0.00.00.3.00.02.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur (%)	100	348,72	2	5,50	0	-	0	0	0,00	0,00	0,88	5,50	0,35	1,58		
	0.00.00.3.00.02.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	312	283,72	11	5,50	0	-	0	0	0,00	0	11,00	5,50	3,53	1,94		
	0.00.00.3.00.02.01.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	95	65,00	-	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			1,76	0,97		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.3.00.02.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100	437,00	59	194,22	0	-	0	0	0,00	0,00	29,68	194,22	11,87	44,44		
	0.00.00.3.00.02.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	227,11	1	13,70	0	-	0	0	0,00	0	1,41	13,70	10,87	6,03		
	0.00.00.3.00.02.01.05.002.	4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	4	209,89	4	180,52	0	-	0	0	0,00	0	4,00	180,52	100,00	86,01		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			55,44	46,02		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			R	SR		
	0.00.00.3.00.02.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	100	690,94	100	76,81	100	82,42	96	55	96,09	67,19	98,04	132,19	39,22	19,13		
	0.00.00.3.00.02.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	25	117,01	5	27,15	5	6,35	5	5,60	100,00	88,19	10,00	32,75	40,00	27,99		
	0.00.00.3.00.02.01.06.011.	5.2 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10	573,93	2	49,66	6	76,07	6	49,78	100,00	65,44	8,00	99,44	80,00	17,33		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	76,81	100,00	76,81			60,00	22,66		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			R	SR		
	3.00.02.3.00.02.01.	KEUANGAN							2.660,57										
	3.00.02.3.00.02.01.15.	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah (%)	95	15.421,76	10	1.917,97	10	2.660,57	-10	1656	-100,00	62,24	0,00	3573,80	0,00	23,17		
	3.00.02.3.00.02.01.15.015.	6.1 Pengumpulan, Rekonsiliasi, dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Frekuensi Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	69	430,45	0	-	23	94,45	22	83	97,19	87,40	22,35	82,55	32,40	19,18		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.02.3.00.02.01.15.017.	6.2 Penatausahaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang telah sesuai	253	317,43	0	-	103	41,43	103	28	100,00	66,95	103,00	27,74	40,71	8,74		
	3.00.02.3.00.02.01.15.018.	6.3 Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	18611	629,34	0	-	3600	125,34	3385	94	94,02	74,69	3384,72	93,61	18,19	14,87		
	3.00.02.3.00.02.01.15.019.	6.4 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Kecamatan dengan mutu untuk target dan realisasi PAD per Kecamatan secara terukur dan maksimal	13	215,47	12	160,78	0	-	0	0	0,00	0,00	12,48	160,78	95,97	74,62		
	3.00.02.3.00.02.01.15.020.	6.5 Penilaian, Verifikasi, dan Validasi PBB P2, Reklame, dan	Jumlah Wajib Pajak PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	80688	4.583,17	0	-	300000	667,51	138480	277	46,16	41,53	138480,00	277,21	171,62	6,05		
	3.00.02.3.00.02.01.15.021.	6.6 Penetapan dan Penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	Jumlah Penetapan dan penyampaian SPPT PBB P2, Reklame, dan Air Tanah	194324	1.706,74	0	-	303600	752,80	280041	393	92,24	52,16	280040,64	392,68	144,11	23,01		
	3.00.02.3.00.02.01.15.022.	6.7 Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Hotel dan Restoran	Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Restoran	864	413,17	0	-	127	68,17	124	61	98,00	90,16	124,46	61,46	14,41	14,88		
	3.00.02.3.00.02.01.15.023.	6.8 Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet	Jumlah Wajib Pajak Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet	1754	432,62	0	-	250	66,62	241	56	96,20	84,45	240,50	56,26	13,71	13,00		
	3.00.02.3.00.02.01.15.024.	6.9 Pendataan dan Pelayanan Pendaftaran, Penilaian, Verifikasi, Validasi, Penetapan dan Penyampaian Ketetapan BPHTB, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PPI	Jumlah Wajib Pajak BPHTB, Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PPI	1073	378,16	0	-	175	64,16	164	47	93,58	73,89	163,77	47,41	15,26	12,54		
	3.00.02.3.00.02.01.15.025.	6.10 Publikasi, Pameran dan Promosi Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pajak Daerah	5	421,26	0	-	5	28,54	2	11	49,66	40,20	2,48	11,47	49,66	2,72		
			Jumlah Pelaksanaan Promosi	15	-	0	-			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00		
			Jumlah Pelaksanaan Pameran	10	-	0	-			0	0			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.02.3.00.02.01.15.026.	6.11 Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak dan Pengelola Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Pengelola Pajak Daerah yang menerima Reward	400	204,65	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.02.3.00.02.01.15.027.	6.12 Penyuluhan dan Pengelolaan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	3648	438,67	0	-	1000	113,70	913	92	91,30	80,67	913,00	91,72	25,03	20,91		
	3.00.02.3.00.02.01.15.028.	6.13 Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	525	904,92	0	-	120	231,52	116	199	96,67	85,93	116,00	198,93	22,10	21,98		
	3.00.02.3.00.02.01.15.029.	6.14 Penagihan, Penindakan dan Penyitaan	Jumlah Wajib Pajak Daerah	8454	672,45	0	-	500	52,45	500	44	100,00	84,85	500,00	44,50	5,91	6,62		
	3.00.02.3.00.02.01.15.030.	6.15 Pengadaan Space Iklan Pajak Daerah	Jumlah Space Iklan	4	249,79	0	-	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.00.02.3.00.02.01.15.031.	6.16 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4	362,25	0	-	2	57,75	2	40	93,94	68,64	1,88	39,64	46,97	10,94		
	3.00.02.3.00.02.01.15.032.	6.17 Penyusunan, Evaluasi, Kerjasama dan Sosialisasi Peraturan tentang Pendapatan Daerah	Jumlah Peraturan Pendapatan Daerah	9	377,82	0	-	9	78,82	9	66	98,10	83,22	8,83	65,59	98,10	17,36		
			Jumlah Kerjasama	45	-									0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
			Jumlah Sosialisasi	105	-									0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
	3.00.02.3.00.02.01.15.041.	6.18 Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara Periodik	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi, Pengumpulan dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	19	140,92	12	72,75	0	-	0	0	0,00	0,00	12,31	72,75	64,77	51,62		
	3.00.02.3.00.02.01.15.045.	6.19 Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Jumlah pelaksanaan Verifikasi dan Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Daerah	153	633,73	55	206,77	60	217,34	57	165	94,66	75,95	111,67	371,83	72,98	58,67		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.02.3.00.02.01.15.046.	6.20 Pembinaan Administrasi Pembukuan PAD pada UPT dan Instansi Teknis Pengelola PAD	Jumlah UPTD yang mendapat Pembinaan Administrasi Pembukuan Pajak Daerah dan PAD lainnya	14	45,53	14	37,42	0	-	0	0	0,00	0,00	14,00	37,42	100,00	82,19		
	3.00.02.3.00.02.01.15.056.	6.21 Pemungutan PBB dan BPHTB Tahun Berjalan dan Tunggakan	Jumlah Lokasi Pemungutan PBB dan BPHTB Tahun Berjalan dan Tunggakan	20	207,43	12	316,28	0	-	0	0	0,00	0,00	12,40	316,28	62,00	152,47		
	3.00.02.3.00.02.01.15.057.	6.22 Penyampaian SPPT PBB, SKPD/SKRD, Akurasi Perhitungan, Penetapan dan Pengelolaan Surat Berharga PBB, BPHTB dan SKPD/SKRD	Jumlah Jenis dokumen yang dikelola	28	252,67	29	247,82	0	-	0	0	0,00	0,00	29,00	247,82	103,57	98,08		
	3.00.02.3.00.02.01.15.062.	6.23 Pengembangan, Peningkatan dan Evaluasi Data Subjek/Objek Pajak Daerah	jumlah wajib pajak yang didata	500	123,54	268	64,28	0	-	0	0	0,00	0,00	268,25	64,28	53,65	52,03		
	3.00.02.3.00.02.01.15.063.	6.24 Akurasi Pendataan dan Penilaian PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan yang didata	149670	419,44	57720	154,48	0	-	0	0	0,00	0,00	57720,00	154,48	38,56	36,83		
	3.00.02.3.00.02.01.15.064.	6.25 Pemungutan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) Tahun Berjalan dan Tunggakan Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Pajak Daerah Tahun Berjalan dan Tunggakan yang dipungut	4443	172,33	4722	170,53	0	-	0	0	0,00	0,00	4722,00	170,53	106,28	98,96		
	3.00.02.3.00.02.01.15.065.	6.26 Pameran, Promosi dan Sosialisasi Pajak	jumlah pelaksanaan Pameran, Promosi dan Sosialisasi Pajak Daerah	4	66,57	5	64,20	0	-	0	0	0,00	0,00	5,00	64,20	125,00	96,43		
	3.00.02.3.00.02.01.15.067.	6.27 Penyelesaian Keberatan Pajak dan PAD lainnya	Jumlah permohonan Keberatan Pajak dan PAD lainnya yang ditindaklanjuti	20	88,01	17	70,73	0	-	0	0	0,00	0,00	17,24	70,73	86,20	80,37		
	3.00.02.3.00.02.01.15.069.	6.28 Pemeriksaan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penertiban Objek dan Subjek Pajak Daerah	9	358,70	7	212,48	0	-	0	0	0,00	0,00	6,65	212,48	73,87	59,24		
	3.00.02.3.00.02.01.15.070.	6.29 Pembinaan terhadap Wajib Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	2	20,00	0	1,11	0	-	0	0	0,00	0,00	0,13	1,11	6,35	5,54		
	3.00.02.3.00.02.01.15.071.	6.30 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	15	154,54	15	138,35	0	-	0	0	0,00	0,00	15,18	138,35	101,20	89,52		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									89,45	72,71	89,45	72,71		59,62	40,98		
		Predikat kinerja									T	S	T	S		R	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									33.582,99	4.833,54	6.287,87	4.344,48					
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									89,79	64,92	89,79	64,92		50,13	37,59		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									T	R	T	R		R	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Perubahan SOTK sehingga satu Sub Bidang tidak melaksanakan Kegiatan																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
28.	0.00.00.3.00.02.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	15.898,74	20	3.385,51	90	3.453,96	90	2773,88	100,00	80,31	60,00	6159,39	26,67	38,74	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	0.00.00.3.00.02.02.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terlayani	4812	37,30	800	4,36	800	6,30	800	6	100,00	97,51	1600,00	10,51	33,25	28,17		
	0.00.00.3.00.02.02.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	180	906,20	36	152,12	3	195,00	3	136	100,00	69,59	39,00	287,82	21,67	31,76		
	0.00.00.3.00.02.02.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanjang Perizinannya	88	644,61	20	89,73	43	251,61	43	95	100,00	37,85	63,00	184,98	28,64	28,70		
	0.00.00.3.00.02.02.01.007.	1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang dapat dilaksanakan	124	653,24	31	102,38	31	245,81	31	163	100,00	66,37	62,00	265,51	50,00	40,64		
	0.00.00.3.00.02.02.01.008.	1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	15	206,80	1	35,07	1	44,80	1	37	100,00	83,38	2,00	72,42	40,00	35,02		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.02.02.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	160	774,40	40	153,13	40	84,92	40	81	100,00	94,87	80,00	233,69	50,00	30,18		
	0.00.00.3.00.02.02.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	101588	294,35	24257	51,41	25000	38,85	25000	34	100,00	88,01	49257,00	85,60	48,49	29,08		
	0.00.00.3.00.02.02.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	44	304,95	11	18,84	11	53,48	11	34	100,00	63,15	22,00	52,61	50,00	17,25		
	0.00.00.3.00.02.02.01.013.	1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	-	8	24,03	0	-	0	0	0	-	8,00	24,03	0	-		
	0.00.00.3.00.02.02.01.014.	1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	63	117,25	9	10,26	0	-	0	0	0	-	9,00	10,26	14,29	8,75		
	0.00.00.3.00.02.02.01.015.	1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	11800	108,75	2000	17,50	750	18,75	750	17	100,00	89,55	2750,00	34,29	23,31	31,53		
	0.00.00.3.00.02.02.01.016.	1.12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	20479	353,00	4500	35,42	4500	36,00	4500	28	100,00	78,27	9000,00	63,60	43,95	18,02		
	0.00.00.3.00.02.02.01.017.	1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	16539	558,15	3800	86,13	30	111,35	30	97	100,00	87,20	3830,00	183,23	23,16	32,83		
	0.00.00.3.00.02.02.01.018.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	1515	7.618,03	385	1.899,00	345	1.449,13	345	1160	100,00	80,04	730,00	3058,94	48,18	40,15		
	0.00.00.3.00.02.02.01.019.	1.15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	58	870,20	14	207,20	14	220,20	14	219	100,00	99,43	28,00	426,15	48,28	48,97		
	0.00.00.3.00.02.02.01.020.	1.16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	370	509,80	93	115,67	20	104,89	20	99	100,00	94,64	113,00	214,95	30,54	42,16		
	0.00.00.3.00.02.02.01.021.	1.17 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Gedung Kantor	Jumlah Asuransi Kendaraan dan Gedung Kantor yang dibayarkan	23769	552,40	19	105,71	20	158,87	20	142	100,00	89,28	499,00	247,54	50,38	44,81		
	0.00.00.3.00.02.02.01.024.	1.18 Penyediaan Alat Tulis Kantor (PPKD)	Jumlah ATK (PPKD) yang disediakan	112	590,60	27	111,46	29	211,86	29	209	100,00	98,85	56,00	320,89	50,00	54,33		
	0.00.00.3.00.02.02.01.025.	1.19 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (PPKD)	Jumlah Cetak dan Penggandaan (PPKD)	36	798,72	9	166,10	10	222,15	10	216	100,00	97,37	19,00	382,40	52,78	47,88		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	83,26	100,00	83,26			40,74	35,38		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.3.00.02.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	24.093,83	28	10.794,03	100	8.013,34	86	5455,45	85,95	68,08	56,98	16249,48	63,31	67,44		
	0.00.00.3.00.02.02.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	23	15.386,51	13	9.408,19	7	7.197,71	7	4929,29	100,00	68,48	20,30	14337,48	88,26	93,18		
	0.00.00.3.00.02.02.02.007.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0	-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	-	0,00	0,00	0	-		
	0.00.00.3.00.02.02.02.009.	2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	16	1.519,44	4	502,06	8	26,15	8	18,75	100,00	71,70	11,80	520,81	29,50	34,28		
	0.00.00.3.00.02.02.02.010.	2.4 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang	23	308,22	0	-	0	0,00	0	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.02.02.02.022.	2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	8	341,50	-	-	0	0,00	0	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.02.02.02.024.	2.6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	178	2.101,99	29	359,74	43	400,17	43	379,31	100,00	94,79	71,50	739,05	40,17	35,16		
	0.00.00.3.00.02.02.02.028.	2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	1000	709,85	88	63,19	250	69,85	250	44,25	100,00	63,35	337,85	107,44	33,79	15,13		
	0.00.00.3.00.02.02.02.031.	2.8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tanah Milik Pemda	Jumlah tanah milik pemda yang dipelihara	75	865,08	42	165,67	75	247,56	75	73,65	100,00	29,75	58,50	239,32	31,20	27,66		
	0.00.00.3.00.02.02.02.042.	2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	7	1.097,05	2	285,38	0	0,00	0	0,00	0	-	2,00	285,38	28,57	26,01		
	0.00.00.3.00.02.02.02.050.	2.10 Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	330	1.009,60	68	9,80	0	0,00	0	0,00	0	-	68,00	9,80	20,61	0,97		
	0.00.00.3.00.02.02.02.052.	2.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	754,60	-	-	2	71,90	2	10,20	100,00	14,19	2,00	10,20	22,22	1,35		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	57,04	100,00	57,04			26,76	21,25		
Predikat kinerja										ST	R	ST	R			SR	SR		
	0.00.00.3.00.02.02.05.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	90	2.123,92	9	208,45	90	179,39	90	60,08	100,00	33,49	27,00	268,53	30,00	12,64		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.02.02.05.001.	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	136	946,32	9	68,51	27	83,50	27	10,07	100,00	12,06	36,24	78,58	26,65	8,30		
	0.00.00.3.00.02.02.05.002.	3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	16	1.177,60	3	139,93	3	95,89	3	50,01	100,00	52,16	6,44	189,95	40,25	16,13		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	32,11	100,00	32,11			33,45	12,22		
Predikat kinerja										ST	SR	ST	SR			SR	SR		
	0.00.00.3.00.02.02.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	3.797,75	20	893,55	90	731,78	90	643,80	100,00	87,98	37,52	1537,35	41,69	40,48		
	0.00.00.3.00.02.02.06.001.	4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	288	243,10	72	51,46	72	53,10	72	52,30	100,00	98,49	144,00	103,76	50,00	42,68		
	0.00.00.3.00.02.02.06.002.	4.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	228	77,40	57	6,56	57	7,40	57	7,25	100,00	97,95	114,00	13,81	50,00	17,84		
	0.00.00.3.00.02.02.06.004.	4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	40	2.488,07	10	636,36	10	439,94	10	401,02	100,00	91,15	20,00	1037,38	50,00	41,69		
	0.00.00.3.00.02.02.06.010.	4.4 Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	65	727,28	65	148,11	55	179,43	55	132,16	100,00	73,65	76,00	280,27	46,77	38,54		
	0.00.00.3.00.02.02.06.011.	4.5 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8	261,90	2	51,06	48	51,90	48	51,07	100,00	98,40	11,60	102,13	58,00	39,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	91,93	100,00	91,93			50,95	35,95		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
KEUANGAN										5.810,71	0	ST	ST			SR	SR		
	3.00.02.3.00.02.02.15.	5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	95	19.805,70	95	3.698,21	100	4.564,65	100	3445	100,00	75,48	97,50	7143,56	41,16	36,07		
	3.00.02.3.00.02.02.15.003.	5.1 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	65	665,61	65	217,99	55	99,79	28	71	50,00	71,07	70,50	288,91	43,38	43,41		
	3.00.02.3.00.02.02.15.006.	5.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan daerah tentang APBD yang disusun	8	2.907,28	2	661,47	1	861,56	1	777	75,00	90,17	2,75	1438,36	34,38	49,47		
	3.00.02.3.00.02.02.15.007.	5.3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan bupati tentang Penjabaran APBD yang disusun	8	835,18	2	157,68	1	148,63	1	101	50,00	68,10	2,50	258,89	31,25	31,00		
	3.00.02.3.00.02.02.15.008.	5.4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang disusun	8	1.579,05	2	310,04	1	456,16	1	405	100,00	88,74	3,00	714,85	37,50	45,27		
	3.00.02.3.00.02.02.15.009.	5.5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	8	524,04	2	88,07	1	99,80	1	79	100,00	78,92	3,00	166,83	37,50	31,84		
	3.00.02.3.00.02.02.15.010.	5.6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diterbitkan	8	1.037,17	2	198,24	1	143,98	1	135	100,00	93,45	3,00	332,79	37,50	32,09		
	3.00.02.3.00.02.02.15.011.	5.7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diterbitkan	8	867,84	2	152,62	1	124,36	1	107	100,00	86,40	3,00	260,08	37,50	29,97		
	3.00.02.3.00.02.02.15.012.	5.8 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang dapat disusun dan dipublikasikan	109	446,59	23	85,38	30	91,87	30	78	100,00	84,73	53,00	163,22	48,62	36,55		
	3.00.02.3.00.02.02.15.013.	5.9 Penyusunan Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Keuangan Daerah yang terpelihara dan dikembangkan	8	2.795,18	2	625,84	2	556,54	2	464	100,00	83,39	4,00	1089,91	50,00	38,99		
	3.00.02.3.00.02.02.15.016.	5.10 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	persentase aset /barang daerah yang terdata dan terpelihara.	70	1.863,14	25	281,61	70	418,22	70	293	100,00	70,11	95,00	574,80	135,71	30,85		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.02.3.00.02.02.15.034.	5.11 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Penyelenggaraan Anggaran Daerah	Jumlah pelaksanaan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Penyelenggaraan Anggaran Daerah	4	713,97	1	167,04	1	151,72	1	83	100,00	55,01	2,00	250,51	50,00	35,09		
	3.00.02.3.00.02.02.15.043.	5.12 Asistensi dan Penyusunan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Perpajakan BUD yang dapat disusun dan dilaporkan	96	750,02	16	111,30	24	198,60	24	120	100,00	60,53	40,00	231,51	41,67	30,87		
	3.00.02.3.00.02.02.15.059.	5.13 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	12	1.305,36	2	219,47	3	400,22	3	191	100,00	47,82	5,00	410,87	41,67	31,48		
	3.00.02.3.00.02.02.15.060.	5.14 Koordinasi Penyusunan, Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah.	Jumlah pelaksanaan Penyusunan, Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah	8	281,17	2	46,79	1	9,66	0	0	0,00	0,00	2,00	46,79	25,00	16,64		
	3.00.02.3.00.02.02.15.074.	5.15 Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan	Jumlah Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan yang disusun	8	244,07	2	59,43	2	304,78	2	242	100,00	79,55	4,00	301,87	50,00	123,68		
	3.00.02.3.00.02.02.15.075.	5.16 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan dan Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekonsiliasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi yang dapat diikuti	119	991,37	20	176,35	40	254,42	40	162	100,00	63,79	60,00	338,64	50,42	34,16		
	3.00.02.3.00.02.02.15.076.	5.17 Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pengeluaran Kas dan Pembinaan Perbendaharaan Perangkat Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pengeluaran Kas berdasarkan SP2D yang dapat diselenggarakan	16	550,69	4	52,03	3	146,95	3	44	100,00	30,12	7,00	96,29	43,75	17,49		
	3.00.02.3.00.02.02.15.077.	5.18 Penyusunan KUA dan PPAS	Nota kesepakatan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS yang diterbitkan	16	425,00	4	86,84	4	97,41	4	92	100,00	94,03	8,00	178,43	50,00	41,98		
	3.00.02.3.00.02.02.15.078.	5.19 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Regulasi Standar Harga Daerah yang diterbitkan	3	1.022,98	0	-		0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rata-rata capaian kinerja (%)										87,50	69,22	87,50	69,22		44,52	36,88		
	Predikat kinerja										T	S	T	S		SR	SR		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Perubahan SOTK sehingga satu Sub Bidang tidak melaksanakan Kegiatan																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
	3.00.02.3.00.02.02.21.	6. Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan aset daerah	90	4.808,03	90	961,72	90	1.246,06	90	1007	100,00	80,83	108,00	1968,87	48,00	40,95		
	3.00.02.3.00.02.02.21.001.	6.1 Pemutakhiran, Pencatatan dan Pelaporan Aset Daerah	Jumlah Aset Daerah yang dimutakhirkan, tercatat dan dilaporkan	88	2.235,20	21	636,22	21	620,27	21	569	100,00	91,77	42,00	1205,45	47,73	53,93		
	3.00.02.3.00.02.02.21.002.	6.2 Penghapusan Barang dan Inventaris Pemerintah Daerah	Jumlah Barang dan Inventaris Pemerintah Daerah dilakukan Penghapusan	65	813,82	65	68,30	56	216,79	56	127	100,00	58,59	76,20	195,31	46,89	24,00		
	3.00.02.3.00.02.02.21.003.	6.3 Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Pemerintah yang terpelihara	12	1.099,20	4	231,94	4	254,20	4	234	100,00	92,25	4,80	466,43	40,00	42,43		
	3.00.02.3.00.02.02.21.004.	6.4 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah pelaksanaan Pembinaan pengelolaan aset daerah	12	390,47	0	-	3	90,47	3	35	100,00	38,62	3,00	34,94	25,00	8,95		
	3.00.02.3.00.02.02.21.005.	6.5 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Monitoring Aset Daerah yang dikelola	40	269,34	10	25,27	56	64,34	56	41	100,00	64,46	66,00	66,74	66,00	24,78		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	69,14	100,00	69,14					
	Predikat kinerja										ST	S	ST	S					
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program										18.189,19	13.385,71							
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										97,92	67,12				39,28	28,34		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										ST	S	ST	S		SR	SR		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Perubahan SOTK sehingga satu Sub Bidang tidak melaksanakan Kegiatan																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.03.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian (%)	100	5.482,69	39	866,02	100	905,56	80	723	79,89	79,89	55	1589,46	21,81	28,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
	0.00.00.3.00.03.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis benda pos yang disediakan	3	93,64	3	6,41	3	8,44	3	6	100,00	76,20	3	12,84	40,00	13,71		
	0.00.00.3.00.03.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening/tahun)	48	494,68	48	94,39	48	103,60	48	97	100,00	93,20	48	190,95	40,00	38,60		
	0.00.00.3.00.03.01.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibayarkan	15	175,50	3	35,50	3	41,99	3	42	100,00	100,00	6	77,49	40,00	44,15		
	0.00.00.3.00.03.01.01.009.	1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang diperbaiki/Service	210	125,00	35	24,82	47	20,08	46	18	97,87	87,55	81	42,39	38,57	33,91		
	0.00.00.3.00.03.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis kebutuhan ATK	43	414,37	43	74,51	37	69,61	41	70	110,81	100,00	42	144,11	39,07	34,78		
	0.00.00.3.00.03.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	335989	174,48	66650	34,26	64940	34,69	64940	35	100,00	100,00	131590	68,95	39,16	39,52		
	0.00.00.3.00.03.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	1283	87,50	287	16,50	254	12,24	100	5	39,37	38,56	387	21,22	30,16	24,25		
	0.00.00.3.00.03.01.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan	32280	165,00	2500	13,72	3240	16,75	2700	13	83,33	77,26	5200	26,66	16,11	16,16		
	0.00.00.3.00.03.01.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan bakar yang digunakan	15032	169,90	3000	33,90	3007	33,90	2614	26	86,93	75,34	5614	59,44	37,35	34,99		
	0.00.00.3.00.03.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan makan dan minum	180	141,00	6	4,70	20	15,24	17	12	85,00	79,61	23	16,83	12,78	11,94		
	0.00.00.3.00.03.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	694	3.441,63	98	527,33	90	549,03	90	401	100,00	73,08	188	928,58	27,09	26,98		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									91,21	81,89	91,21	81,89		32,75	29,00		
		Predikat kinerja									ST	T	ST	T		SR	SR		
	0.00.00.3.00.03.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana kantor dan pemeliharaan peralatan kerja	93	3.504,76	22	237,07	100	1.751,75	95	1659	94,71	94,71	41	1896,24	43,84	54,10		
	0.00.00.3.00.03.01.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	405,21	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.03.01.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	6	180,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.03.01.02.007.	2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	2	21,00	2	19,85	0	-	0	0	0	-	2	19,85	100,00	94,52		
	0.00.00.3.00.03.01.02.009.	2.4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	9	219,00	6	132,19	0	-	0	0	0	-	6	132,19	66,67	60,36		
	0.00.00.3.00.03.01.02.022.	2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	16	264,60	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.03.01.02.042.	2.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2	80,00	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.03.01.02.051.	2.7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	156	415,13	31	85,03	37	98,93	35	91	94,59	91,55	66	175,60	42,31	42,30		
	0.00.00.3.00.03.01.02.052.	2.8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	267	1.919,83	0	-	219	1.652,83	218	1569	99,54	94,90	218	1568,60	81,65	81,71		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									97,07	93,23	97,07	93,23		36,33	34,86		
		Predikat kinerja									ST	ST	ST	ST		SR	SR		
	0.00.00.3.00.03.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	100	125,80	13	20,15	0	-	0	0	0	-	13	20,15	13,00	16,01		
	0.00.00.3.00.03.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	126	54,60			0	-	0	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.03.01.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan	149	71,20	40	20,15	0	-	0	0	0	-	40	20,15	26,85	28,29		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00		13,42	14,15		
		Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	0.00.00.3.00.03.01.04.	4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	20	487,42	21	372,13	0	-	0	0	0	-	21	372,13	106,00	76,35		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.03.01.04.002.	4.1 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah anggota Korpri yang terbantu dalam proses pemakaman	100	124,17	100	88,59	0	-	0	0	0	-	100	88,59	100,00	71,34		
	0.00.00.3.00.03.01.04.003.	4.2 Pemindahan Tugas PNS	Persentase usulan pemindahan tugas PNS yang ditindaklanjuti	80	199,14	80	126,91	0	-	0	0	0	-	80	126,91	100,00	63,73		
	0.00.00.3.00.03.01.04.004.	4.3 Pelayanan Administrasi dan Pemberhentian/Pensiun PNS	Jumlah administrasi yang dikelola dan terselesaikan	161	164,11	218	156,63	0	-	0	0	0	-	218	156,63	135,40	95,44		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			111,80	76,84		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			ST	T		
	0.00.00.3.00.03.01.05.	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus	75	318,41	12	149,29	0	-	0	0	0	-	12	149,29	16,14	46,89		
	0.00.00.3.00.03.01.05.002.	5.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi yang mendapatkan pemahaman tentang peraturan Perundang - Undangan	3698	318,41	600	149,29	0	-	0	0	0	-	600	149,29	16,22	46,89		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			16,22	46,89		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.3.00.03.01.06.	6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	100	84,60	20	9,68	100	11,76	5	11	5,00	94,05	25	20,74	25,00	24,52		
	0.00.00.3.00.03.01.06.001.	6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	25	84,60	5	9,68	5	11,76	5	11,06	100,00	94,05	10	20,74	40,00	24,52		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	94,05	100,00	94,05			40,00	24,52		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.3.00.03.01.07.	7. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja	Persentase tersusunnya Rencana Kerja	100	80,80	20	5,65	100	8,24	5	5	5,00	66,02	25	11,09	25,00	13,73		
	0.00.00.3.00.03.01.07.001.	7.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	80,80	5	5,65	5	8,24	5	5	100,00	66,02	10	11,09	40,00	13,73		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	66,02	100,00	66,02			40,00	13,73		
		Predikat kinerja								ST	S	ST	S			SR	SR		
	3.00.03.3.00.03.01.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN																	
	3.00.03.3.00.03.01.15.	8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian	76	18.988,14	15	2.320,41	76	2.645,93	74	2193	96,98	82,88	30	4513,45	39,29	23,77		
	3.00.03.3.00.03.01.15.001.	8.1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah PNS yg mengikuti seleksi kompetensi di lingkungan Pemkab. Inhil	2013	4.779,90	29	478,71	62	883,43	62	723	100,00	81,79	91	1201,25	4,52	25,13		
	3.00.03.3.00.03.01.15.002.	8.2 Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka	962	673,14	308	195,22	0	-	0	0	0	-	308	195,22	32,02	29,00		
	3.00.03.3.00.03.01.15.004.	8.3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang dikelola dan terselesaikan	10732	1.084,53	1600	152,54	1600	85,78	1300	73	81,25	85,03	2900	225,48	27,02	20,79		
	3.00.03.3.00.03.01.15.005.	8.4 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian dikelola secara update	2892	716,28	300	112,58	400	91,41	400	77	100,00	83,91	700	189,29	24,20	26,43		
	3.00.03.3.00.03.01.15.008.	8.5 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS berprestasi yang diberi penghargaan	1229	1.407,14	192	301,33	523	127,98	523	117	100,00	91,11	715	417,92	58,18	29,70		
	3.00.03.3.00.03.01.15.009.	8.6 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Persentase kasus pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	100	475,50	100	91,91	100	69,33	100	51	100,00	73,53	100	142,89	40,00	30,05		
	3.00.03.3.00.03.01.15.011.	8.7 Penyeleenggaraan Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti izin belajar dan tugas belajar	2633	2.707,23	137	519,13	200	241,53	139	241	69,50	99,71	276	759,96	10,48	28,07		
	3.00.03.3.00.03.01.15.015.	8.8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	20	396,48	19	57,00	5	21,03	5	11	100,00	52,59	15	68,05	30,06	17,16		
	3.00.03.3.00.03.01.15.017.	8.9 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan Sumpah/ Janji	2100	414,88	82	16,28	350	33,00	358	25	102,29	74,95	440	41,02	20,95	9,89		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.03.3.00.03.01.15.018.	8.10 Pembinaan dan Silaturahmi Aparatur Daerah	Jumlah pembinaan rohani dan silaturahmi yang dilakukan	28	487,80	4	67,17	1	52,54	1	46	100,00	87,75	5	113,27	17,86	23,22		
	3.00.03.3.00.03.01.15.019.	8.11 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Kesegaran Jasmani dan Rekreasi anggota Korpri	60	689,45	3	116,84	1	108,40	1	59	100,00	54,55	4	175,97	6,67	25,52		
	3.00.03.3.00.03.01.15.023.	8.12 Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka (orang)	1928	3.073,14	148	211,72	308	640,74	304	540	98,70	84,33	452	752,04	23,44	24,47		
	3.00.03.3.00.03.01.15.024.	8.13 Pemulangan Pegawai ASN yang Teras dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah anggota Korpri yang terbantu dalam proses pemakaman	100	501,44			100	66,04	100	44	100,00	67,35	100	44,48	40,00	8,87		
	3.00.03.3.00.03.01.15.025.	8.14 Mutasi ASN	Persentase usulan Mutasi ASN yang ditindaklanjuti	80	820,14			80	119,93	80	100	100,00	83,23	100	99,82	50,00	12,17		
	3.00.03.3.00.03.01.15.026.	8.15 Pelayanan Administrasi dan Pemberhentian/Pensiun ASN	Jumlah administrasi ASN yang memasuki BUP yang terkelola dan terselesaikan	944	761,11			200	104,79	212	87	106,00	82,83	212	86,80	22,46	11,40		
Rata-rata capaian kinerja (%)										96,98	78,76	96,98	78,76			27,19	21,46		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
	3.00.03.3.00.03.01.17.	9. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (teknis)	Persentase ASN mengikuti DIKLAT	54	16.972,45	10	4.610,09	51	587,13	50	223	98,04	38,00	20	4833,21	36,90	28,48		
	3.00.03.3.00.03.01.17.001.	9.1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Prajabatan	1486	11.591,96	329	4.099,38	120	83,23	0	61	0,00	73,08	329	4160,20	22,14	35,89		
	3.00.03.3.00.03.01.17.002.	9.2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Struktural	115	3.287,56	4	308,34	12	361,67	0	41	0,00	11,39	4	349,55	3,48	10,63		
	3.00.03.3.00.03.01.17.004.	9.3 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat teknis/fungsional	265	1.347,99	5	151,96	2	90,63	2	79	100,00	86,64	7	230,49	2,64	17,10		
	3.00.03.3.00.03.01.17.006.	9.4 Penataan Sistem Administrasi Kartu Kepegawaian	Jumlah Penerbitan Kartu PNS	1750	257,98	329	50,40	350	51,60	67	43	19,14	82,49	396	92,97	22,63	36,04		
	3.00.03.3.00.03.01.17.007.	9.5 Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti peningkatan kompetensi	280	486,97	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										29,79	63,40	29,79	63,40			10,18	19,93		
Predikat kinerja										SR	R	SR	R			SR	SR		
Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				46.045,06		8.590,49		5.910,37		4.815,26									
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										85,84	79,56	85,84	79,56			36,43	31,26		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										T	T	T	T			SR	SR		
A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Perubahan SOTK sehingga satu Sub Bidang tidak melaksanakan Kegiatan																		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
30.	0.00.00.3.00.05.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	100	10.024,05	100	1.569,59	100	1.408,08	85	1.023,45	85,01	72,68	37	2.593,04	37,00	25,87	INSPEKTORAT DAERAH	
	0.00.00.3.00.05.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	16166	116,40	895	6,44	1000	4,90	983	4,82	98,33	98,28	1878	11,26	11,62	9,67		
	0.00.00.3.00.05.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	480	576,12	96	86,08	8	104,94	8	87,49	100,00	83,37	104	173,57	21,67	30,13		
	0.00.00.3.00.05.01.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	20	198,77	4	42,57	4	55,84	4	41,32	100,00	74,00	8	83,89	40,00	42,20		
	0.00.00.3.00.05.01.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	15	853,96	15	132,13	15	117,87	15	130,50	100,00	110,72	6	262,63	40,00	30,75		
	0.00.00.3.00.05.01.01.012.	1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan	400	127,55	80	58,83	80	2,10	65	1,70	81,25	81,05	145	60,54	36,25	47,46		
	0.00.00.3.00.05.01.01.015.	1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	1080	230,94	216	12,71	216	15,00	186	12,86	86,27	85,73	402	25,57	37,25	11,07		
	0.00.00.3.00.05.01.01.016.	1.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	32509	422,62	4400	57,20	4400	30,10	2888	19,75	65,64	65,63	7288	76,95	22,42	18,21		
	0.00.00.3.00.05.01.01.017.	1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	177	349,84	30	58,11	30	56,55	36	66,59	120,74	117,76	66	124,70	37,41	35,65		
	0.00.00.3.00.05.01.01.018.	1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	1215	6.351,87	174	1.058,67	169	862,46	103	520,70	60,95	60,37	277	1.579,38	22,76	24,86		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
	0.00.00.3.00.05.01.01.019.	1.10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	28	336,00	-	-	7	84,00	7	83,88	100,00	99,86	7	83,88	25,00	24,96			
	0.00.00.3.00.05.01.01.020.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	169	220,00	36	34,94	12	26,33	9	17,97	75,00	68,25	45	52,91	26,63	24,05			
	0.00.00.3.00.05.01.01.027.	1.12 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	16	240,00	2	21,90	4	48,00	4	35,87	100,00	74,73	6	57,77	37,50	24,07			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										90,68	84,98	90,68	84,98		29,88	26,92		
		Predikat kinerja										T	T	T	T		SR	SR		
	0.00.00.3.00.05.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat	100	3.380,66	24	600,59	100	437,64	92	630,97	91,67	144,18	46	1.231,56	46,27	36,43			
	0.00.00.3.00.05.01.02.009.	2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	6	172,90	6	160,72	0	-	0	-	0,00	0,00	6	160,72	100,00	92,96			
	0.00.00.3.00.05.01.02.010.	2.2 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	28	226,07	5	20,48	1	116,45	1	114,35	100,00	98,20	6	134,83	21,43	59,64			
	0.00.00.3.00.05.01.02.022.	2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	232,66	1	59,47	6	53,50	6	53,50	100,00	100,00	7	112,97	140,00	48,56			
	0.00.00.3.00.05.01.02.023.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	26	108,05	3	28,53	4	15,60	4	14,97	100,00	95,96	7	43,50	26,92	40,26			
	0.00.00.3.00.05.01.02.028.	2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	360	185,32	24	14,42	60	19,00	47	14,65	78,33	77,13	71	29,07	19,65	15,69			
	0.00.00.3.00.05.01.02.042.	2.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	5	1.000,00	1	197,93	2	196,21	2	196,21	100,00	100,00	3	394,13	60,00	39,41			
	0.00.00.3.00.05.01.02.050.	2.7 Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	10	500,00	2	98,90	2	48,29	2	48,29	100,00	100,00	4	147,19	40,00	29,44			
	0.00.00.3.00.05.01.02.051.	2.8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	115	180,83	15	20,15	20	21,84	11	11,19	55,00	51,24	26	31,34	22,88	17,33			
	0.00.00.3.00.05.01.02.052.	2.9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	117	774,84	-	-	42	177,80	42	177,80	100,00	100,00	42	177,80	35,90	22,95			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										91,67	90,32	91,67	90,32		51,86	40,69		
		Predikat kinerja										ST	T	ST	T		R	SR		
	0.00.00.3.00.05.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur	100	195,50	26	34,04	0	-	0	-	0	-	26	34,04	26,00	17,41			
	0.00.00.3.00.05.01.03.001.	3.1 Pengadaan Mesin/Kartu	Jumlah mesin absen yang	10	28,00	2	2,98	0	-	0	-	0	-	2	2,98	20,00	10,65			
	0.00.00.3.00.05.01.03.002.	3.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang	470	167,50	85	31,06	0	-	0	-	0	-	85	31,06	18,09	18,54			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00		19,04	14,60		
		Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	0.00.00.3.00.05.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	100	2.746,55	65	264,65	100	119,11	0	-	0,00	0,00	13	264,65	13,00	9,64			
	0.00.00.3.00.05.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95	1.651,75	11	202,37	18	119,11	0	-	0,00	0,00	11	202,37	12,00	12,25			
	0.00.00.3.00.05.01.05.002.	4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang	13	1.094,81	2	62,28	0	-	0	-	0,00	0,00	2	62,28	15,38	5,69			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00		13,69	8,97		
		Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	0.00.00.3.00.05.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan	100	865,29	100	219,18	100	155,34	100	187,09	100,00	120,44	40	406,27	40,00	46,95			
	0.00.00.3.00.05.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	35	865,29	7	219,18	7	155,34	7	187,09	100,00	120,44	14	406,27	40,00	46,95			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	120,44	100,00	120,44		40,00	46,95		
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST		SR	SR		
	3.00.05.3.00.05.01.	PENGAWASAN																		
	3.00.05.3.00.05.01.15.	6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	75	21.632,42	65,76	2.471,81	75	2.339,14	70,96	2.056,56	94,61	87,92	68,36	4.528,37	36,56	20,93			
	3.00.05.3.00.05.01.15.001.	6.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Auditi	500	14.627,50	68	1.348,28	100	1.231,57	123	1.150,39	100,00	93,41	191,00	2.498,67	38,20	17,08			
	3.00.05.3.00.05.01.15.002.	6.2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	30	845,80	6	144,80	6	173,50	6	126,79	100,00	73,08	12,00	271,59	40,00	32,11			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.05.3.00.05.01.15.008.	6.3 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut.	56	4.107,95	65,76	649,90	56	639,37	70,96	518,50	100,00	81,10	68,36	1.168,40	48,83	28,44		
	3.00.05.3.00.05.01.15.009.	6.4 Pengelolaan LHKPN/LHKASN dan LP2P	Persentase ketaatan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan LHKPN / LHKASN dan LP2P	75	849,44	55,02	165,07	75	132,20	62,91	129,80	83,88	98,18	58,97	294,87	31,45	34,71		
	3.00.05.3.00.05.01.15.010.	6.5 Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Persentase kenaikan penyelesaian kerugian negara/daerah	5	1.091,88	4,76	163,75	5	162,51	5,70	131,08	100,00	80,66	5,23	294,83	39,47	27,00		
	3.00.05.3.00.05.01.15.015.	6.6 Pemutakhiran Data tingkat Provinsi/Regional	Jumlah pemutakhiran data	6	109,86														
	Rata-rata capaian kinerja (%)									96,78	85,29	96,78	85,29			39,59	27,87		
	Predikat kinerja									ST	T	ST	T			SR	SR		
	3.00.05.3.00.05.01.16.	8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor sendiri	100	446,10	4	47,73	100	75,32	87	31,72	86,54	42,11	19,06	79,45	19,06	17,81		
	3.00.05.3.00.05.01.16.001.	8.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan kantor	299	446,10	12	47,73	52	75,32	45	31,72	86,54	42,11	57	79,45	19,06	17,81		
	Rata-rata capaian kinerja (%)									86,54	42,11	86,54	42,11			19,06	17,81		
	Predikat kinerja									T	SR	T	SR			SR	SR		
	3.00.05.3.00.05.01.20.	9. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	483	5.021,63	90,00	381,98	94	806,82	83,37	604,54	88,69	74,93	173,37	986,52	35,89	19,65		
	3.00.05.3.00.05.01.20.001.	9.1 Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang mencapai maturitas SPIP level III	60	585,21		1,92												
	3.00.05.3.00.05.01.20.002.	9.2 Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan gratifikasi	5	210,31	1	25,35	1	39,16	1	30,60	100,00	78,15	2	55,95	40,00	26,60		
	3.00.05.3.00.05.01.20.003.	9.3 Review Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen yang direviu	25	342,15	5	18,02	5	70,78	5	73,32	100,00	103,60	10	91,34	40,00	26,70		
	3.00.05.3.00.05.01.20.004.	9.4 Pengawasan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan yang dikeluarkan	20	280,45	4	14,70	4	216,76	4	128,70	100,00	59,38	8	143,40	40,00	51,13		
	3.00.05.3.00.05.01.20.006.	9.5 Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan Daerah.	5	2.370,67	1	321,99	1	480,13	1	371,92	100,00	77,46	2	693,91	40,00	29,27		
	3.00.05.3.00.05.01.20.007.	9.6 Survei Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan	5	1.232,83		-												
	Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	79,65	100,00	79,65			40,00	33,43		
	Predikat kinerja									ST	T	ST	T						
	Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									5.341,45	4.534,33								
	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									80,81	71,82	80,81	71,82			31,64	27,16		
	Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									T	S	T	S			SR	SR		
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya forum monitoring dan evaluasi oleh KPK, Komitmen OPD dalam memenuhi tindak lanjut seluruh indikator, Adanya ruang																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Anggaran yang tidak tercukupi, SDM yang kurang dalam pemenuhan suatu jabatan, Peningkatan mutu SDM dalam pemenuhan																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan t : Adanya kerjasama koordinasi yang baik antar Pemerintah, APIP, OPD dan masyarakat, agar terciptanya Pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD beri : Menjadi APIP yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih bebas dari KKN.																		
31.	0.00.00.3.00.06.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	92	5.159,85	92	1.143,91	95	447,70	79	662,07	83,18	147,88	34	1.805,98	37,18	35,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	0.00.00.3.00.06.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Surat menyurat yang	4140	26,00	590	3,20	650	3,60	618	3,42	95,12	95,00	1208	6,62	29,18	25,44		
	0.00.00.3.00.06.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	120	82,60	24	8,46	2	125,66	2	91,18	100,00	72,56	26	99,64	21,67	120,62		
	0.00.00.3.00.06.01.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang	90	56,40	18	6,65	18	9,80	12	6,04	66,67	61,60	30	12,69	33,33	22,50		
	0.00.00.3.00.06.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	11	151,18	11	23,96	11	37,96	11	29,17	100,00	76,82	4	53,13	40,00	35,14		
	0.00.00.3.00.06.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	219,01	30	28,69	26	24,23	26	24,20	100,00	99,86	11	52,89	37,33	24,15		
	0.00.00.3.00.06.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	7	54,60	7	6,56	7	6,19	7	5,78	100,00	93,33	3	12,34	40,00	22,60		
	0.00.00.3.00.06.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	50	29,36	36	1,28	2	9,17	2	6,32	100,00	68,92	38	7,60	76,00	25,89		
	0.00.00.3.00.06.01.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang	16	720,97	16	781,17			16	339,93	0,00	0,00	6	1.121,11	40,00	155,50		
	0.00.00.3.00.06.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	1263	172,36	200	21,20	208	21,12	187	18,87	89,69	89,35	387	40,07	30,61	23,25		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.06.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	47110	437,57	2375	22,94	3334	41,40	2371	29,43	71,12	71,09	4746	52,37	10,07	11,97		
	0.00.00.3.00.06.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	411	1.893,45	60	214,10	17	114,50	11	73,29	67,35	64,01	71	287,38	17,38	15,18		
	0.00.00.3.00.06.01.01.020.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang	1153	1.316,35	264	25,70	92	54,07	59	34,45	64,59	63,72	323	60,16	28,05	4,57		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
	0.00.00.3.00.06.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan Standar Kerja	83	11.728,25	32	4.243,49	90	976,17	236	2.564,96	262,04	262,76	268	6.808,45	320,75	58,05		
	0.00.00.3.00.06.01.02.002.	2.1 Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	4	1.190,00	-	-	1	626,40	2	961,19	153,45	153,45	2	961,19	38,36	80,77		
	0.00.00.3.00.06.01.02.003.	2.2. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	20	3.085,30	10	1.860,65			0	352,08	0,00	0,00	10	2.212,73	50,00	71,72		
	0.00.00.3.00.06.01.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang	8	674,97	-	-	9	301,97	8	264,97	87,75	87,75	8	264,97	98,72	39,26		
	0.00.00.3.00.06.01.02.022.	2.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	5	109,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.06.01.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	101	246,58	18	31,87	8	41,80	6	25,92	73,32	62,02	24	57,80	23,63	23,44		
	0.00.00.3.00.06.01.02.028.	2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	758	144,40	95	17,28	42	6,00	41	5,95	96,55	99,17	136	23,23	17,88	16,09		
	0.00.00.3.00.06.01.02.041.	2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	9	1.530,00	1	189,13			0	427,56	0,00	0,00	1	616,69	9,13	40,31		
	0.00.00.3.00.06.01.02.042.	2.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	11	4.048,00	4	2.144,55			0	527,29	0,00	0,00	4	2.671,84	36,36	66,00		
	0.00.00.3.00.06.01.02.052.	2.5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	170	700,00	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
	0.00.00.3.00.06.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	92	299,55	10	30,28	95	17,05	90	16,20	95,01	95,01	20	46,48	21,69	15,52		
	0.00.00.3.00.06.01.03.005.	3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	701	299,55	73	30,28	62	17,05	59	16,20	95,01	95,01	132	46,48	18,82	15,52		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
	0.00.00.3.00.06.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan, Keterampilan Khusus dan Pelaksanaan Hari-hari Besar	92	4.345,99	14	652,82	95	362,21	67	166,75	70,86	46,04	16	819,57	17,76	18,86		
	0.00.00.3.00.06.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1776	1.768,23	520	197,74	10	115,56	10	101,14	100,00	87,53	530	298,88	29,84	16,90		
	0.00.00.3.00.06.01.05.019.	4.2 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	50	2.577,76	10	455,09	8	246,66	4	65,60	43,98	26,60	14	520,69	27,04	20,20		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
	0.00.00.3.00.06.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91	1.079,76	20	49,20	90	58,81	65	47,81	72,45	81,29	17	97,01	18,69	8,98		
	0.00.00.3.00.06.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	40	1.079,76	40	49,20	7	58,81	7	47,81	100,00	81,29	47	97,01	117,50	8,98		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
	3.00.05.3.00.06.01.	PENGAWASAN																	
	3.00.05.3.00.06.01.15.	8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	10	248,84	10	176,97	10	30,79	0	13,94	0,00	45,27	10	190,91	100,00	76,72		
	3.00.05.3.00.06.01.15.002.	8.1 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	16	100,58	6	38,79	8	30,79	0	10,54	0,00	34,23	6	49,33	38,56	49,04		
	3.00.05.3.00.06.01.15.004.	8.2 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan		19	148,26	18	138,18	0	-	-	-	0,00	0,00	18	138,18	94,74	93,20		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	
		Predikat kinerja																	
	3.00.06.3.00.06.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							714,05	0	-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.06.3.00.06.01.15.	9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan kebangsaan	1836	4.004,51		636,85	363	292,62	0	252,80	0,00	86,39	0	889,65	0,00	22,22		
	3.00.06.3.00.06.01.15.001.	9.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan	Persentase Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam	90	945,69	90	126,40	90	63,14	0	21,95	0,00	34,76	90	148,35	100,00	15,69		
	3.00.06.3.00.06.01.15.002.	9.2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan	Persentase Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di	90	1.530,51	90	237,59	90	199,61	60	84,05	66,67	42,11	150	321,64	166,67	21,02		
	3.00.06.3.00.06.01.15.003.	9.3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Rakor Pokja Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa yang	27	1.528,31		272,86	1	29,86	1	25,18	100,00	84,30	1	298,04	3,70	19,50		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								55,56	53,72	55,56	53,72			90,12	18,73		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			T	SR		
	3.00.06.3.00.06.01.16.	10. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang dikembangkan	86	1.443,97	80	28,77	80	48,56	80	42,85	100,00	88,25	160	71,62	186,05	4,96		
	3.00.06.3.00.06.01.16.002.	10.1 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Seminar/Talkshow/Diskusi Wawasan Kebangsaan	405	760,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.16.004.	10.2 Kemitraan dan Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah sosialisasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	8	683,97	2	28,77	1	48,56	1	42,85	100,00	88,25	3	71,62	37,50	10,47		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	88,25	100,00	88,25			18,75	5,24		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	3.00.06.3.00.06.01.17.	11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah warga negara yang mengikuti Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan	1179	5.135,18	0	107,39	230	50,00	219	45,83	95,00	91,66	271	153,22	23,01	2,98		
	3.00.06.3.00.06.01.17.001.	11.1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Narkoba dan Pekat	1467	646,33	0	107,39	100	50,00	95	45,83	95,00	91,66	322	153,22	21,95	23,71		
	3.00.06.3.00.06.01.17.002.	11.2 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah sosialisasi tentang keamanan lingkungan yang	10	560,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.17.003.	11.3 Peningkatan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Fasilitasi FKDM yang dilaksanakan	6	270,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.17.004.	11.4 Penanganan Gangguan Keamanan Wilayah	Cakupan Pemantauan Daerah Rawan Konflik	14	300,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.17.005.	11.5 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Stake holder yang difasilitasi dalam peningkatan kerja sama	9	1.350,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.17.006.	11.6 Pendataan dan Pemantauan Orang Asing	Jumlah Data dan Pemantauan Orang Asing	20	346,23		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.17.007.	11.7 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	24	850,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.17.008.	11.8 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan	Jumlah Kasus Kecamatan/Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	37	812,63		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								95,00	91,66	95,00	91,66			2,74	2,96		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	3.00.06.3.00.06.01.18.	12. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah Forum-forum Diskusi	69	2.545,98	9	332,64	90	248,27	74	204,91	82,54	82,54	83	537,55	120,10	21,11		
	3.00.06.3.00.06.01.18.001.	12.1 Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Parpol yang mengikuti Pendidikan Budaya Politik	11	380,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.18.002.	12.2 Pengembangan Kapasitas Partai Politik	Jumlah Parpol yang dikembangkan Kapasitasnya	11	270,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.18.003.	12.3 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah Forum diskusi yang diselenggarakan	13	526,41		82,87	3	49,89	3	42,34	100,00	84,87	3	125,21	23,08	23,78		
	3.00.06.3.00.06.01.18.004.	12.4 Penyusunan Data Base Partai Politik	Jumlah partai politik yang terdata dalam dalam database	11	350,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.18.008.	12.5 Pembinaan dan Pendataan bagi Ormas/LSM	Jumlah Ormas, LSM yang dibina	913	1.019,57		249,77	245	198,38	245	162,57	100,00	81,95	245	412,34	26,83	40,44		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	83,41	100,00	83,41			9,98	12,85		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	3.00.06.3.00.06.01.19.	13. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada dan	95	649,05	45	305,65			0	-	0,00	0,00	45	305,65	47,09	47,09		
	3.00.06.3.00.06.01.19.001.	13.1 Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah pelaksanaan Pemantauan penyelenggaraan	31	649,05	15	305,65			0	-	0,00	0,00	15	305,65	47,09	47,09		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			47,09	47,09		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	3.00.06.3.00.06.01.20.	14. Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas	Persentase cakupan Ormas yang dibina	54	1.331,00		-	80	74,61	0	27,59	0,00	0,00	0	27,59	0,00	2,07		
	3.00.06.3.00.06.01.20.001.	14.1 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas dan LSM yang mengikuti Pembinaan	245	410,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	3.00.06.3.00.06.01.20.002.	14.2 Peningkatan Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas dan LSM yang ditingkatkan dalam kemitraan	245	516,00		-	245	74,61	0	27,59	0,00	0,00	0	27,59	0,00	5,35		
	3.00.06.3.00.06.01.20.003.	14.3 Penyelenggaraan Forum Diskusi Publik	Jumlah Ormas dan LSM yang mengikuti Forum Diskusi Publik	245	405,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1,78		
		Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR					SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program						2.606,78											
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program						67,53	63,70	67,53	63,70					39	20		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program						S	R	S	R					SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Perubahan SOTK sehingga satu Sub Bidang tidak melaksanakan Kegiatan																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
32.	0.00.00.3.00.07.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	99	3.424,54	94	686,39	97	784,07	94	708,87	97,01	90,41	94	1.395,26	38,08	40,74	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	0.00.00.3.00.07.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	1460	9,78	270	1,50	450	2,28	450	2,28	100,00	100,00	720	3,78	49,32	38,65		
	0.00.00.3.00.07.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	240	326,72	48	44,10	4	61,56	4	57,49	100,00	93,39	48	101,60	20,00	31,10		
	0.00.00.3.00.07.01.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	6	225,84	6	43,80	6	43,44	6	43,44	100,00	100,00	6	87,24	40,00	38,63		
	0.00.00.3.00.07.01.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	26	122,00	26	29,85	25	28,00	25	28,00	100,00	100,00	51	57,85	78,46	47,42		
	0.00.00.3.00.07.01.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	30619	25,24	6619	5,73	6012	7,00	5903	6,87	98,19	98,16	12522	12,60	40,90	49,94		
	0.00.00.3.00.07.01.01.012.	1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	8	29,23	8	5,50	10	8,73	10	8,73	100,00	100,00	18	14,23	45,00	48,69		
	0.00.00.3.00.07.01.01.015.	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	295	37,45	59	3,28	36	6,72	36	6,72	100,00	100,00	95	10,00	32,20	26,70		
	0.00.00.3.00.07.01.01.016.	1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	99372	650,00	28392	200,00	7098	150,00	7098	150,00	100,00	100,00	35490	349,99	35,71	53,84		
	0.00.00.3.00.07.01.01.017.	1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	249	94,02	49	19,20	42	16,32	42	16,32	100,00	100,00	91	35,52	36,55	37,78		
	0.00.00.3.00.07.01.01.018.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	257	1.502,32	46	287,14	84	371,83	70	308,43	83,33	82,95	116	595,56	45,14	39,64		
	0.00.00.3.00.07.01.01.019.	1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	6	57,60	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.07.01.01.020.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	185	344,35	20	46,30	64	88,19	59	80,59	92,19	91,38	79	126,89	42,70	36,85		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						97,61	96,90	97,61	96,90					38,83	37,44		
		Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST					SR	SR		
	0.00.00.3.00.07.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	99	828,35	26	149,78	98	148,15	98	140,21	100,00	94,64	50	289,99	50,35	35,01		
	0.00.00.3.00.07.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	2	40,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.07.01.02.009.	2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	2	24,20	2	28,40	0	-	0	-	0,00	0,00	2	28,40	100,00	117,36		
	0.00.00.3.00.07.01.02.010.	2.3 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	1	45,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.07.01.02.022.	2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	7,00	1	7,00	0	-	0	-	0,00	0,00	1	7,00	100,00	100,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.3.00.07.01.02.024.	2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	253	406,95	49	91,95	5	39,40	5	39,40	100,00	100,00	54	131,35	21,34	32,28		
	0.00.00.3.00.07.01.02.028.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	130	59,00	30	11,89	30	17,00	30	16,99	100,00	99,94	60	28,88	46,15	48,95		
	0.00.00.3.00.07.01.02.042.	2.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	3	60,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.07.01.02.051.	2.8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	106	46,00	20	10,54	25	10,55	25	10,16	100,00	96,32	45	20,70	42,45	44,99		
	0.00.00.3.00.07.01.02.052.	2.9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	44	140,20	-	-	11	81,20	11	73,66	100,00	90,71	11	73,66	25,00	52,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	96,74	100,00	96,74			37,22	44,01		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.3.00.07.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparat Perangkat Daerah	74	319,95	0	-	100	74,95	100	74,95	100,00	100,00	20	74,95	27,10	23,43		
	0.00.00.3.00.07.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	116	96,65	0	-	31	26,65	31	26,65	100,00	100,00	31	26,65	26,72	27,57		
	0.00.00.3.00.07.01.03.003.	3.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	165	168,30	0	-	48	48,30	48	48,30	100,00	100,00	48	48,30	29,09	28,70		
	0.00.00.3.00.07.01.03.005.	3.3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	79	55,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			18,61	18,76		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.3.00.07.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparat yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	98	19,88	61	15,43	0	-	0	-	0,00	0,00	61	15,43	62,07	77,65		
	0.00.00.3.00.07.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	70	19,88	14	15,43	0	-	0	-	0,00	0,00	14	15,43	20,00	77,65		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			20,00	77,65		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	T		
	0.00.00.3.00.07.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	98	512,04	8	48,46	97	224,71	97	202,06	100,00	89,92	52	250,52	52,90	48,92		
	0.00.00.3.00.07.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	125	320,27	0	-	25	181,14	25	164,62	100,00	90,88	25	164,62	20,00	51,40		
	0.00.00.3.00.07.01.06.003.	5.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	85	95,92	0	-	17	43,56	17	37,44	100,00	85,95	17	37,44	20,00	39,03		
	0.00.00.3.00.07.01.06.004.	5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	16	45,00	-	0	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.3.00.07.01.06.006.	5.4 Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata	20	50,85	20	48,46	0	-	0	-	0,00	0,00	20	48,46	100,00	95,30		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	88,41	100,00	88,41			35,00	46,43		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.3.00.07.01.07.	6 Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	99	442,95	98	79,64	98	35,65	98	31,71	100,00	88,95	39	111,35	39,68	25,14		
	0.00.00.3.00.07.01.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	45	188,34	9	29,89	3	35,65	3	31,71	100,00	88,95	12	61,60	26,67	32,71		
	0.00.00.3.00.07.01.07.002.	6.2 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	40	254,62	8	49,75	0	-	0	-	0,00	0,00	8	49,75	20,00	19,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	88,95	100,00	88,95			23,33	26,12		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			SR	SR		
	3.00.07.3.00.07.01.	PENANGGULANGAN BENCANA							14.243,12	0	-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
	3.00.07.3.00.07.01.15.	7. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana	95	892,22	95	89,05	95	250,68	84	240,35	88,46	95,88	90	329,40	37,61	36,92			
	3.00.07.3.00.07.01.15.005.	7.1 Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Jumlah Masyarakat yang Sadar dan Peduli Bencana	2	100,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	3.00.07.3.00.07.01.15.006.	7.2 Identifikasi dan Koordinasi Pencegahan Bencana pada Daerah Rawan Bencana	Jumlah daerah yang teridentifikasi rawan bencana	13	273,51	13	51,45	13	125,34	10	121,74	76,92	97,12	23	173,18	70,77	63,32			
	3.00.07.3.00.07.01.15.008.	7.3 Penyusunan Peta Resiko Bencana	Jumlah Peta Risiko Bencana	2	100,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	3.00.07.3.00.07.01.15.009.	7.4 Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa tangguh bencana	2	45,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	3.00.07.3.00.07.01.15.015.	7.5 Penyuluhan Warga Daerah Rawan Bencana	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Daerah Rawan bencana	5	373,72	1	37,61	3	125,34	3	118,61	100,00	94,63	4	156,22	80,00	41,80			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										88,46	95,88	88,46	95,88		30,15	21,02		
		Predikat kinerja										T	ST	T	ST		SR	SR		
	3.00.07.3.00.07.01.16.	8. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan Bencana	98	7.050	98	1.494,84	98	8.236,07	98	5.674	100,00	68,89	98	7.169	40	102			
	3.00.07.3.00.07.01.16.004.	8.1 Pengelolaan Pelaksanaan Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat siaga dan operasional penanggulangan bencana	246	740,24	46	125,45	50	6.702,03	50	4.159,76	100,00	62,07	96	4.285,21	39,02	578,89			
	3.00.07.3.00.07.01.16.012.	8.2 Pelaksanaan Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Jumlah anggota Tim Reaksi Cepat penanganan bencana	385	6.309,68	77	1.369,39	50	1.534,04	50	1.514,39	100,00	98,72	127	2.883,78	32,99	45,70			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	80,39	100,00	80,39		36,01	312,30		
		Predikat kinerja										ST	T	ST	T		SR	ST		
	3.00.07.3.00.07.01.17.	9. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara daerah pasca bencana	96	4.900,38	69	47,02	94	4.386,95	94	2.685,94	100,00	61,23	82	2.732,96	33,96	55,77			
	3.00.07.3.00.07.01.17.007.	9.1 Pelaksanaan dan Koordinasi Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Koordinasi rehabilitasi daerah pasca bencana yang terbangun	9	345,78	1	19,99	1	82,09	1	44,87	100,00	54,66	2	64,86	22,22	18,76			
	3.00.07.3.00.07.01.17.010.	9.2 Pelaksanaan dan Koordinasi Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah Koordinasi pembangunan dan pemulihan sarana dan prasarana publik akibat bencana	5	355,20	1	27,03	1	105,46	1	99,88	100,00	94,72	2	126,92	40,00	35,73	Capaian Kegiatan 2020 Belum Di isi		
	3.00.07.3.00.07.01.17.011.	9.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana Bantuan Hibah BNPB)	Jumlah Jembatan Daerah Pasca Bencana yang dibangun	1	4.199,40		-	1	4.199,40	1	2.541,18	100,00	60,51	1	2.541,18	100,00	60,51			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	60,51	100,00	60,51		54,07	38,33		
		Predikat kinerja										ST	R	ST	R		R	SR		
	3.00.07.3.00.07.01.18.	10. Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Persentase Jumlah penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik korban bencana	99	1.900,49	33	594,46	98	1.369,42	98	1.351,72	100,00	98,71	131	1.946,18	132,25	102,40			
	3.00.07.3.00.07.01.18.003.	10.1 Pengadaan Logistik Bencana	Jumlah logistik bencana yang Tersedia	218	1.065,97	86	397,55	10	193,39	10	185,14	100,00	95,73	96	582,69	44,04	54,66			
	3.00.07.3.00.07.01.18.004.	10.2 Pengelolaan Pelaksanaan Pengiriman, Evaluasi dan Pemantauan Logistik Bencana	Jumlah Operasi pengiriman, evaluasi dan pemantauan logistik bencana	164	155,73	37	17,23	6	9,75	6	9,25	100,00	94,87	43	26,48	25,95	17,00			
	3.00.07.3.00.07.01.18.005.	10.3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Yang tersedia	139	678,79	40	179,68	7	1.166,27	7	1.157,33	100,00	99,23	47	1.337,01	33,81	196,97			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	99,23	100,00	99,23		33,81	196,97		
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST		SR	ST		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program											15.510,64		11.109,95					
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program)										80,95	80,19	98,45	89,67		32,70	81,90		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										T	T	ST	T		SR	ST		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik, (2) penambahan volume pelaksanaan patroli bertambah drastis dalam rangka penanganan pandemi Covid -19																		
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																		
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
33.	0.00.00.4.00.01.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	92	86.757,58	24	17.433,91	90	16.510,66	43	15.171,88	47,33	91,89	67	32.605,79	72,50	37,58	SEKRETARIAT DAERAH	
	0.00.00.4.00.01.02.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja perangkat, materai yang digunakan dalam penyediaan jasa surat menyurat	38500	200,80	6000	29,44	8600	40,80	5919	28,08	68,83	68,82	11919	57,52	30,96	28,64		
	0.00.00.4.00.01.02.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	50	8.340,92	44	1.311,94	50	1.543,00	44	1.415,61	87,89	91,74	87	2.727,55	174,89	32,70		
	0.00.00.4.00.01.02.01.003.	1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	3	2.024,35	3	489,93	5	269,14	2	118,64	44,08	44,08	5	608,57	173,47	30,06		
	0.00.00.4.00.01.02.01.006.	1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	600	838,37	114	121,76	4	167,59	4	155,21	101,06	92,61	118	276,97	19,67	33,04		
	0.00.00.4.00.01.02.01.007.	1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	35	2.903,59	7	569,57	4	619,70	3	528,10	85,22	85,22	10	1.097,68	29,74	37,80		
	0.00.00.4.00.01.02.01.008.	1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	105	2.437,19	21	504,75	20	554,57	20	541,87	100,01	97,71	41	1.046,62	39,05	42,94		
	0.00.00.4.00.01.02.01.010.	1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	48	1.040,05	48	309,21	40	152,12	32	149,91	79,10	98,54	80	459,12	165,92	44,14		
	0.00.00.4.00.01.02.01.011.	1.8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	18785	741,56	3382	132,27	3400	75,41	2557	72,74	75,20	96,46	5939	205,01	31,62	27,65		
	0.00.00.4.00.01.02.01.012.	1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	18	976,94	18	175,96	1	121,09	1	120,71	99,69	99,69	19	296,67	105,54	30,37		
	0.00.00.4.00.01.02.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian bahan bakar minyak serta bahan pelumas untuk keperluan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dan pejabat lainnya	1328031	12.099,77	1	204,71	317000	3.271,55	286330	2.955,03	90,32	90,32	286331	3.159,74	21,56	26,11		
	0.00.00.4.00.01.02.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	5887	33.557,90	471	2.774,45	1675	6.754,01	1646	6.745,52	98,28	99,87	2117	9.519,97	35,96	28,37		
	0.00.00.4.00.01.02.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan jasanya	269	3.103,10	53	7.141,42	60	701,50	59	690,70	98,43	98,46	112	7.832,12	41,66	252,40		
	0.00.00.4.00.01.02.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah yang dilaksanakan	1070	1.958,73	214	515,90	217	245,61	168	215,92	77,39	87,91	382	731,82	35,69	37,36		
	0.00.00.4.00.01.02.01.021.	1.14 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Gedung Kantor	Jumlah Asuransi Kendaraan dan Gedung Kantor yang dibayarkan	5	1.236,90	1	286,13	1	29,54	1	25,56	86,53	86,53	2	311,69	37,31	25,20		
	0.00.00.4.00.01.02.01.023.	1.15 Penyediaan Logistik Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Logistik Makan Minum Tamu, Kegiatan Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	109	15.297,40	22	2.866,47	22	1.965,05	13	1.408,28	59,17	71,67	35	4.274,75	32,13	27,94		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								83,41	87,31	83,41	87,31			65,01	46,98		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			R	SR		
	0.00.00.4.00.01.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	92	42.094,96	25	9.392,22	90	7.439,48	66	7.169,81		1243,65		16.562,03		641,89		
	0.00.00.4.00.01.02.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	76	1.835,39	32	788,64	0	-	0	-	0,00	0,00	32	788,64	42,11	42,97		
	0.00.00.4.00.01.02.02.006.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang disediakan	2824	3.356,70	928	989,11	103	1.280,63	100	1.270,60	97,50	99,22	1028	2.259,70	36,42	67,32		
	0.00.00.4.00.01.02.02.007.	2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	5	1.179,54	1	223,09	1	102,44	1	101,66	99,24	99,24	2	324,75	39,85	27,53		
	0.00.00.4.00.01.02.02.008.	2.4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Belanja Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	496	1.717,92	114	660,66	20	274,58	25	262,11	126,82	95,46	140	922,77	28,19	53,71		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.01.02.02.009.	2.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	101	3.932,35	34	534,11	11	294,00	11	293,22	99,73	99,73	45	827,33	44,53	21,04		
	0.00.00.4.00.01.02.02.010.	2.6 Pengadaan meubeler	Jumlah Pengadaan Meubeler yang disediakan	24	1.391,72	4	228,27	5	457,38	5	448,50	98,06	98,06	9	676,77	37,10	48,63		
	0.00.00.4.00.01.02.02.020.	2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	10	2.124,05	2	789,85	2	903,30	2	887,28	112,56	98,23	4	1.677,13	42,51	78,96		
	0.00.00.4.00.01.02.02.021.	2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	5	461,35	1	83,67			0	-	0,00	0,00	1	83,67	20,00	18,14		
	0.00.00.4.00.01.02.02.022.	2.9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan ruang gedung kantor yang terpelihara	2	3.000,66	2	441,56	2	244,35	2	236,96	96,98	96,98	4	678,52	196,98	22,61		
	0.00.00.4.00.01.02.02.023.	2.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil labatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil labatan	10	1.848,00	2	403,78	2	344,00	2	231,32	79,31	67,24	4	635,10	35,86	34,37		
	0.00.00.4.00.01.02.02.024.	2.11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	80	6.364,06	19	1.139,15	6	1.162,83	5	1.111,66	80,03	95,60	23	2.250,81	29,25	35,37		
	0.00.00.4.00.01.02.02.025.	2.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara perlengkapannya	2	1.470,00	2	130,74	2	450,00	2	444,00	124,39	98,67	4	574,73	224,39	39,10		
	0.00.00.4.00.01.02.02.027.	2.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Rumah jabatan yang dipelihara peralatannya	2	1.030,00	2	349,82	2	240,00	2	238,34	110,39	99,31	4	588,15	210,39	57,10		
	0.00.00.4.00.01.02.02.028.	2.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	8	1.598,42	8	389,05	8	586,81	10	583,34	119,81	99,41	18	972,40	219,81	60,84		
	0.00.00.4.00.01.02.02.040.	2.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Kegiatan dalam rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	80	9.651,35	15	2.240,72	4	1.099,18	4	1.060,83	96,51	96,51	19	3.301,55	23,83	34,21		
	0.00.00.4.00.01.02.02.053.	2.16 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian terkelola secara update	402	1.133,47		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				95,81		88,83		95,81		88,83						84,94			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T						SR			
	0.00.00.4.00.01.02.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	92	826,75	19	143,32	90	157,40	3	150,80		289,74		294,12		106,98		
	0.00.00.4.00.01.02.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	43	105,50	8	18,48	8	19,60	8	19,42	100,00	99,06	16	37,90	37,21	35,92		
	0.00.00.4.00.01.02.03.006.	3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Bupati	Jumlah pakaian dinas Bupati	109	395,25	21	68,26	21	75,40	20	71,91	93,00	95,37	41	140,17	37,18	35,46		
	0.00.00.4.00.01.02.03.007.	3.3 Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Bupati	Jumlah pakaian dinas Wakil Bupati	81	326,00	16	56,58	16	62,40	15	59,48	93,42	95,31	31	116,05	38,21	35,60		
Rata-rata capaian kinerja (%)				95,47		96,58		95,47		96,58						37,53			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T						SR			
	0.00.00.4.00.01.02.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	91	8.909,06	15	1.330,93	90	604,99	52	420,88		83,49		1.799,64		32,54		
	0.00.00.4.00.01.02.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	6	487,33	3	48,88	3	43,61	0	-	0,00	0,00	3	48,88	50,00	10,03		
	0.00.00.4.00.01.02.05.006.	4.2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pengiriman peserta sosialisasi/bimtek/pelatihan teknis luar daerah	57	645,24		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.01.02.05.019.	4.3 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	20	7.776,49	4	1.282,05	4	561,38	3	468,71	83,49	83,49	7	1.750,76	36,70	22,51		
Rata-rata capaian kinerja (%)				83,49		83,49		83,49		83,49						43,35			
Predikat kinerja				T		T		T		T						SR			
	0.00.00.4.00.01.02.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	92	4.815,24	18	598,77	90	683,00	58	557,55		324,24		1.156,32		119,96		
	0.00.00.4.00.01.02.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12	231,75	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.01.02.06.002.	5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	10	823,61	2	113,19	1	186,90	1	155,76	83,34	83,34	3	268,95	28,33	32,66		
	0.00.00.4.00.01.02.06.003.	5.3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	8	231,75		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.01.02.06.004.	5.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5	1.044,28	1	186,27	1	297,18	1	248,21	83,52	83,52	2	434,48	36,70	41,61		
	0.00.00.4.00.01.02.06.005.	5.5 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip SKPD	Jumlah dokumen yang didata dan ditata	30	1.515,94	5	262,51	50	109,81	30	70,77	59,79	64,45	35	333,28	116,31	21,98		
	0.00.00.4.00.01.02.06.006.	5.6 Penataan Manajemen Aset Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Hasil Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Aset	10	504,42	1	36,80	1	89,11	1	82,81	92,93	92,93	2	119,61	19,29	23,71		
	0.00.00.4.00.01.02.06.011.	5.7 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8	231,75		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.01.02.06.012.	5.8 Penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal yang disusun	4	231,75		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				79,89		81,06		79,89		81,06						50,16		29,99	
Predikat kinerja				T		T		T		T						SR		SR	
	0.00.00.4.00.01.02.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	90	463,50		-			0	-		0,00		-		0,00		
	0.00.00.4.00.01.02.07.001.	6.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	4	231,75	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.01.02.07.002.	6.2 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	4	231,75	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00									
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR									
3.00.01.4.00.01.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							50,06		0									
3.00.01.4.00.01.02.21.	7. Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kategori)		100	117,38	100	45,80	100	50,06	100	44,37	100,00	88,62	200	90,16	200,00	76,81		
3.00.01.4.00.01.02.21.001.	7.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah dokumen usulan kegiatan prioritas bidang infrastruktur melalui musrenbang kecamatan		40	117,38	20	45,80	20	50,06	20	44,37	100,00	88,62	40	90,16	100,00	76,81		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		88,62		100,00		88,62						100,00		76,81	
Predikat kinerja				ST		T		ST		T						ST		T	
3.00.02.4.00.01.02.	KEUANGAN					0		278,19		0									
3.00.02.4.00.01.02.16.	8. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas pengelolaan keuangan		92	446,72	100	171,42	90	278,19	90	329,19	100,00	118,33	190	500,61	206,52	112,06		
3.00.02.4.00.01.02.16.006.	8.1 Asistensi Penyusunan RKA/DPA dan DPPA	Jumlah dokumen RKA/ DPA dan DPPA yang diasistensi		16492	446,72	7972	171,42	65	278,19	65	329,19	100,00	118,33	8037	500,61	48,73	112,06		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		118,33		100,00		118,33						48,73		112,06	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST						SR		ST	
3.00.03.4.00.01.02.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN																		
3.00.03.4.00.01.02.15.	9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan data informasi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		83	910,24	80	432,21	80	118,71	80	73,74	100,00	62,12	160	505,95	192,31	55,58		
3.00.03.4.00.01.02.15.005.	9.1 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian dikelola secara update		294	910,24	158	432,21	158	118,71	158	73,74	100,00	62,12	316	505,95	107,48	55,58		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		62,12		100,00		62,12						107,48		55,58	
Predikat kinerja				ST		R		ST		R						ST		R	
3.00.03.4.00.01.02.16.	10. Program Pendidikan Kedisman	Persentase pengiriman peserta sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Teknis Luar Daerah		93	251,64	10	103,50	80	31,49	25	29,58	31,25	93,94	35	133,08	37,72	52,89		
3.00.03.4.00.01.02.16.001.	10.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah pengiriman peserta sosialisasi/bimtek/pelatihan teknis luar daerah		26	251,64	10	103,50	12	31,49	3	29,58	25,00	93,94	13	133,08	50,00	52,89		
Rata-rata capaian kinerja (%)				25,00		93,94		25,00		93,94						50,00		52,89	
Predikat kinerja				SR		ST		SR		ST						SR		R	
4.00.01.4.00.01.02.	KEPALA DAERAH					0		65.317,81		0									
4.00.01.4.00.01.02.15.	11. Program Peningkatan Pelayanan Kedisman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedisman KDH dan Wakil KDH		92	38.051,67	90	7.375,29	90	7.136,63	85	6.993,36	94,44	97,99	175	14.368,66	190,22	37,76		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.01.4.00.01.02.15.001.	11.1 Dialog/ Audiensi dengan Tokoh tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	10	4.408,15	2	789,47	2	41,72	0	31,57	0,00	75,67	2	821,04	20,00	18,63		
	4.00.01.4.00.01.02.15.002.	11.2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan	1034	2.315,00	72	399,06	200	365,00	59	377,67	29,50	103,47	131	776,72	12,67	33,55		
	4.00.01.4.00.01.02.15.004.	11.3 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat Terbatas Pejabat Pemda dan Rapat Koordinasi Perjabat Pemda se- Kab. Inhil	63	4.640,52	0	992,01	17	868,72	0	800,73	0,00	92,17	0	1.792,73	0,00	38,63		
	4.00.01.4.00.01.02.15.005.	11.4 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	650	1.775,70	125	164,80	130	271,00	140	213,17	107,69	78,66	265	377,96	40,77	21,29		
	4.00.01.4.00.01.02.15.006.	11.5 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Kunjungan Kerja DPR RI, DPR RI Dan DPRD Provinsi /kabupaten ke Kab. Inhil (Kunker) yang terfasilitasi	20	151,71	0	-			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.15.007.	11.6 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati Dan Wakil Bupati	Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati	6	646,78	1	12,46	2	89,17	1	51,25	50,00	57,48	2	63,71	33,33	9,85		
	4.00.01.4.00.01.02.15.008.	11.7 Pengelolaan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Kegiatan Resmi Daerah	Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan dan kegiatan resmi daerah yang dilaksanakan	12278	18.382,11	2480	3.981,19	2714	4.357,03	2757	4.338,95	101,58	99,59	5237	8.320,14	42,65	45,26		
	4.00.01.4.00.01.02.15.010.	11.8 Penyediaan Makan Minum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekwensi Makan Minum Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	10385	5.451,60	572	1.036,31	2190	1.144,00	612	1.180,03	27,95	103,15	1184	2.216,34	11,40	40,65		
	4.00.01.4.00.01.02.15.014.	11.9 Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Dana Pengantar tugas Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Malam Pengantar Tugas dan pelaksanaan Serah Terima Jabatan Kepala Daerah	1	280,10	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				45,25		87,17		45,25		87,17		45,25		87,17		22,98			
Predikat kinerja				SR		T		SR		T		SR		T		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.17.	12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase keselarasan produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi	15	43,68	15	42,17			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	15	42,17	100,00	96,54		
	4.00.01.4.00.01.02.17.003.	12.1 Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum	Jumlah Kerjasama dengan instansi terkait dalam penandatanganan MoU	100	43,68	100	42,17	0	-	0	-	0,00	0,00	100	42,17	100,00	96,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		SR		ST			
	4.00.01.4.00.01.02.18.	13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	14	2.185,15	14	2.446,71	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	14	2.446,71	100,00	111,97		
	4.00.01.4.00.01.02.18.001.	13.1 Koordinasi Kerjasama Pemmasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penanganan perkara baik secara litigasi dan non litigasi	5	819,90	5	895,98	0	-	0	-	0,00	0,00	5	895,98	100,00	109,28		
	4.00.01.4.00.01.02.18.002.	13.2 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disusun	50	523,28	50	605,99	0	-	0	-	0,00	0,00	50	605,99	100,00	115,81		
	4.00.01.4.00.01.02.18.005.	13.3 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimtek Peraturan Perundang-undangan	2	468,09	2	467,28	0	-	0	-	0,00	0,00	2	467,28	100,00	99,83		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.01.4.00.01.02.18.006.	13.4 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah produk daerah hukum yang dikordinasi dan konsultasi	50	373,88	50	477,46	0	-	0	-	0,00	0,00	50	477,46	100,00	127,70		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		127,70			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		ST		ST			
	4.00.01.4.00.01.02.20.	14. Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	72	551,08	70	70,29	90	100,79	70	85,21	77,78	84,55	140	155,50	193,91	28,22		
	4.00.01.4.00.01.02.20.001.	14.1 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi	1	137,65	-	-	1	73,16	1	61,81	100,00	84,48	1	61,81	100,00	44,90		
	4.00.01.4.00.01.02.20.002.	14.2 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	80	413,43	70	70,29	80	27,63	70	23,41	87,50	84,72	140	93,70	175,00	22,66		
Rata-rata capaian kinerja (%)				93,75		84,60		93,75		84,60		93,75		137,50		33,78			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T		ST		SR		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.21.	15. Program Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi Pembangunan	92	6.016,28	0	1.368,19	90	1.034,06	0	875,55	0,00	84,67	0	2.243,75	0,00	37,29		
	4.00.01.4.00.01.02.21.002.	15.1 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah FGD Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilaksanakan	5	1.208,77	0	315,18	1	121,27	0	102,37	0,00	84,42	0	417,55	0,00	34,54		
	4.00.01.4.00.01.02.21.004.	15.2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah BUMD penerima Penanaman Modal yang dibina, dipantau dan dievaluasi	4	2.022,30	0	608,76	4	356,96	0	305,98	0,00	85,72	0	914,74	0,00	45,23		
	4.00.01.4.00.01.02.21.005.	15.3 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dibina, dipantau dan dievaluasi	149324	1.425,53	0	265,51	28124	295,40	0	265,15	0,00	89,76	0	530,66	0,00	37,23		
	4.00.01.4.00.01.02.21.008.	15.4 Penyusunan dan Perhitungan Inflasi	Persentase Stabilitas perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir	90	838,55	0	92,37	90	137,64	0	124,32	0,00	90,32	0	216,69	0,00	25,84		
	4.00.01.4.00.01.02.21.011.	15.5 Pelaksanaan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah FGD yang dilaksanakan pada bidang ekonomi dan SDA	37	521,14	0	86,36	8	122,79	0	77,74	0,00	63,31	0	164,10	0,00	31,49		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		82,70		0,00		82,70		0,00		0,00		34,87			
Predikat kinerja				SR		T		SR		T		SR		SR		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.22.	16. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas	4	3.189,76	4	-	5	806,76	5	595,56	100,00	73,82	9	595,56	225,00	18,67		
	4.00.01.4.00.01.02.22.001.	16.1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disusun	125	1.694,25	125	-	25	464,18	25	327,63	100,00	70,58	150	327,63	120,00	19,34		
	4.00.01.4.00.01.02.22.002.	16.2 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru yang dikaji	80	1.495,51	80	-	20	342,57	20	267,93	100,00	78,21	100	267,93	125,00	17,92		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		74,40		100,00		74,40		100,00		122,50		18,63			
Predikat kinerja				ST		S		ST		S		ST		ST		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.23.	17. Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas	72	2.162,70	72	-	90	395,69	90	266,57	100,00	67,37	162	266,57	225,00	12,33		
	4.00.01.4.00.01.02.23.001.	17.1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Produk Hukum daerah	400	450,00	400	-	-	-	0	-	0,00	0,00	400	-	100,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.23.002.	17.2 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Peraturan perundang-undangan	8	1.712,70	8	-	3	395,69	3	266,57	100,00	67,37	11	266,57	137,50	15,56		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		67,37		100,00		67,37		100,00		118,75		7,78			
Predikat kinerja				ST		S		ST		S		ST		ST		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.24.	18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase layanan bantuan hukum	3	3.388,87	3	-	4	990,93	4	708,26	100,00	71,47	7	708,26	218,75	20,90		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.01.4.00.01.02.24.001.	18.1 Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum	Jumlah Kerjasama dengan instansi terkait dalam penanadatangan MoU	125	174,22	125	-	25	89,62	25	75,65	100,00	84,41	150	75,65	120,00	43,42		
	4.00.01.4.00.01.02.24.002.	18.2 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penanganan perkara baik secara litigasi dan non litigasi	20	3.214,65	20	-	5	901,31	5	632,61	100,00	70,19	25	632,61	125,00	19,68		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		77,30		100,00		77,30		122,50		31,55					
Predikat kinerja				ST		I		ST		I		ST		SR					
	4.00.01.4.00.01.02.31.	19. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.	Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyarakatan	92	263.498,73	85	19.920,69	90	44.063,59	80	33.516,07	88,89	76,06	165	53.436,76	179,35	20,28		
	4.00.01.4.00.01.02.31.001.	19.1 Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kesra dan Kemasyarakatan.	Jumlah pelaksanaan Koordinasi bidang keagamaan, social dan kemasyarakatan	830	3.431,32	106	577,41	166	520,39	69	215,29	41,57	41,37	175	792,71	21,08	23,10		
	4.00.01.4.00.01.02.31.002.	19.2 Pengelolaan dan Vertifikasi Hibah dan Bantuan Sosial untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Hibah Bansos untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan	20	2.581,74	10	583,92	20	474,13	18	408,19	90,00	86,09	28	992,11	140,00	38,43		
	4.00.01.4.00.01.02.31.003.	19.3 Sosialisasi Program Akselerasi UKS/Madrasah	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UKS/M di sekolah yang mandiri dan kreatif	760	2.276,12	47	230,61			0	-	0,00	0,00	47	230,61	6,18	10,13		
	4.00.01.4.00.01.02.31.004.	19.4 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDM dan Peningkatan Kesejahteraan di bidang agama	20	40.690,00	18	6.713,98	20	6.487,26	17	5.192,05	85,00	80,03	35	11.906,03	175,00	29,26		
	4.00.01.4.00.01.02.31.005.	19.5 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Bidang Seni, Budaya, Olahraga dan Bahasa	Jumlah Peserta Peserta Pekan Olah Raga dan Seni Diniyah, Peserta Identifikasi Bakat Agama dan Peserta Musabaqah Qiraatul Kutub serta Prestasi pada Pelaksanaan Porsadin	2275	3.089,44	260	286,33	0	-	0	3,45	0,00	0,00	260	289,78	11,43	9,38		
	4.00.01.4.00.01.02.31.006.	19.6 Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Hafiz Hafizah, Khat Khattah, Qari Qariah, Mufassir Mufassirah, tim syarhil dan tim fahmil yang mendapatkan pembinaan dan pelathan	Jumlah Hafiz Hafizah, Khat Khattah, Qari Qariah, Mufassir Mufassirah, tim syarhil dan tim fahmil yang mendapatkan pembinaan dan pelathan	1245	4.751,82	125	568,10	0	-	0	-	0,00	0,00	125	568,10	10,04	11,96		
	4.00.01.4.00.01.02.31.007.	19.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan yang dibangun	1489	159.765,84	112	3.065,01	335	30.879,96	268	24.916,80	80,00	80,69	380	27.981,81	25,52	17,51		
	4.00.01.4.00.01.02.31.008.	19.8 Penyelenggaraan Acara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan	40	27.005,93	8	4.680,24	8	2.490,63	5	1.373,89	62,50	55,16	13	6.054,13	32,50	22,42		
	4.00.01.4.00.01.02.31.009.	19.9 Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Jumlah penyediaan sarana prasarana MTQ Propinsi dan Kabupaten	20	1.745,53	4	322,12	3	49,11	2	20,29	66,67	41,33	6	342,41	30,00	19,62		
	4.00.01.4.00.01.02.31.010.	19.10 Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Sosial kemasyarakatan yang dibina	60	12.731,75	12	1.965,25	12	2.451,10	7	959,65	58,33	39,15	19	2.924,90	31,67	22,97		
	4.00.01.4.00.01.02.31.011.	19.11 Penyelenggaraan Hari Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan hari-hari besar agama Islam yang dilaksanakan	25	5.429,25	6	927,74	6	711,01	4	426,46	66,67	59,98	10	1.354,20	40,00	24,94		
Rata-rata capaian kinerja (%)				68,84		60,48		68,84		60,48		61,97		24,78					
Predikat kinerja				S		R		S		R		R		SR					
	4.00.01.4.00.01.02.32.	20. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	92	7.400,25	100	1.624,82	90	906,50	90	860,16	100,00	94,89	190	2.484,98	206,52	33,58		
	4.00.01.4.00.01.02.32.001.	20.1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Pemerintah Pusat dan Provinsi	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi untuk kegiatan DAK dan Bankeu Propinsi Riau	20	527,51	4	107,57	4	63,81	4	55,75	100,00	87,37	8	163,32	40,00	30,96		
	4.00.01.4.00.01.02.32.002.	20.2 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah dokumen usulan kegiatan prioritas bidang infrastruktur melalui musrenbang kecamatan	60	176,15	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.32.003.	20.3 Koordinasi POKJA Program Air Minum Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	Jumlah Rapat Koordinasi POKJA Sanitasi	20	438,92	4	103,27	4	40,27	4	38,62	100,00	95,91	8	141,89	40,00	32,33		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.01.4.00.01.02.32.004.	20.4 Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman serta Pertanahan	Jumlah koordinasi pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman serta pertanahan.	26	423,87	4	92,96	4	38,45	4	38,16	100,00	99,25	8	131,12	30,77	30,93		
	4.00.01.4.00.01.02.32.005.	20.5 Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah koordinasi pembangunan bidang Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	26	426,49	4	88,92	4	39,03	4	38,73	100,00	99,24	8	127,65	30,77	29,93		
	4.00.01.4.00.01.02.32.006.	20.6 Koordinasi Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	5	701,08	1	116,44	1	157,97	1	154,59	100,00	97,86	2	271,03	40,00	38,66		
	4.00.01.4.00.01.02.32.007.	20.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan monitoring pembangunan serta rasio realisasi fisik dan keuangan melalui E-Money	10	3.807,12	2	716,40	20	518,86	20	489,38	100,00	94,32	22	1.205,78	220,00	31,67		
	4.00.01.4.00.01.02.32.008.	20.8 Penyusunan dan Pengembangan Analisa Standar Belanja	Persentase ASB yang telah terintegrasi	92	390,40	50	399,26	100	48,12	100	44,93	100,00	93,37	150	444,19	163,04	113,78		
	4.00.01.4.00.01.02.32.009.	20.9 Asistensi Penyusunan RKA/DPA dan DPPA	Jumlah dokumen RKA/ DPA dan DPPA yang diasistensi	25560	508,70	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				87,50		83,42		87,50		83,42				70,57		38,53			
Predikat kinerja				T		T		T		T				S		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.33.	21. Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	92	15.205,76	100	3.096,52	90	3.112,08	100	2.365,81	111,11	76,02	200	5.462,34	217,39	35,92		
			Level Maturitas ULP	4	-	3	-			3	-	0,00	0,00	6	-	150,00	#DIV/0!		
	4.00.01.4.00.01.02.33.001.	21.1 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang Terlatih Dalam Hal Pengadaan Barang dan Jasa	20	1.032,64	2	344,57	2	267,17	3	182,29	150,00	68,23	5	526,85	25,00	51,02		
	4.00.01.4.00.01.02.33.002.	21.2 Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sosialisasi/Bimtek/Penyuluhan Pengembangan Akan Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Yang Terstandar dan Profesional	9	1.249,02	1	132,56	1	103,37	1	99,14	100,00	95,91	2	231,70	22,22	18,55		
	4.00.01.4.00.01.02.33.003.	21.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa nya di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	669	9.187,61	104	1.877,33	20	2.108,32	20	1.544,66	100,00	73,26	124	3.421,98	18,54	37,25		
	4.00.01.4.00.01.02.33.004.	21.4 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Layanan Pengadaan Secara Elektronik	55	3.540,30	12	742,07	12	633,23	12	539,73	100,00	85,23	24	1.281,80	43,64	36,21		
	4.00.01.4.00.01.02.33.005.	21.5 Manajemen Sistem Informasi Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase penerapan Manajemen Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Cepat, Tepat, dan Profesional	72	196,18	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				112,50		80,66		112,50		80,66				27,35		35,76			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T				SR		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.34.	22. Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Publikasi Protokol dan Acara	Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	86	17.268,95	94	3.715,37	80	4.388,71	20	3.964,37	24,78	90,33	113	7.679,74	131,88	44,47		
	4.00.01.4.00.01.02.34.001.	22.1 Pembinaan dan Pengembangan Informasi, Publikasi dan Kehumasan	Persentase publikasi kegiatan Pemerintah daerah	92	7.467,55	94	1.696,86	100	1.912,10	83	1.711,03	82,58	89,48	176	3.407,89	191,78	45,64		
	4.00.01.4.00.01.02.34.002.	22.2 Pelaksanaan Keprotokolan, Upacara, Acara dan Tamu	Cakupan pelaksanaan Keprotokolan, Upacara, Acara dan Tamu	92	5.590,70	68	880,50	100	1.436,05	100	1.412,37	100,00	98,35	168	2.292,87	182,60	41,01		
	4.00.01.4.00.01.02.34.003.	22.3 Penyelenggaraan Dokumentasi Visualisasi dan Publikasi Pemerintah	Jumlah Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir	1	630,00	90	1.138,01	0	-	0	-	0,00	0,00	90	1.138,01	9015,00	180,64		
	4.00.01.4.00.01.02.34.004.	22.4 Peliputan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir	Persentase dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	92	2.460,79	0	-	100	883,22	66	698,25	65,97	79,06	66	698,25	71,71	28,38		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.01.4.00.01.02.34.005.	22.5 Pendistribusian Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang menerima pendistribusian Media Cetak dan Bahan bacaan	68	262,02	0	-	68	38,24	68	35,41	100,00	92,60	68	35,41	100,00	13,51		
	4.00.01.4.00.01.02.34.006.	22.6 Pembuatan Dokumentasi/ Visualisasi Hasil Liputan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir	3	333,87	0	-	3	113,87	3	104,54	100,00	91,81	3	104,54	100,00	31,31		
	4.00.01.4.00.01.02.34.007.	22.7 Monitoring Issue Publik pada Media Massa	Jumlah Laporan dan Analisa Isu Media	5	281,98	0	-	1	5,24	1	2,77	100,00	52,74	1	2,77	20,00	0,98		
	4.00.01.4.00.01.02.34.008.	22.8 Pengadaan Peralatan Dokumentasi	Jumlah peralatan dokumentasi	4	242,04	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				78,36		72,01		78,36		72,01		78,36		72,01		1383,01			
Predikat kinerja				T		S		T		S		T		S		ST			
	4.00.01.4.00.01.02.35.	23. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi pemerintahan	100	6.134,90	0	1.017,22	90	1.509,69	221	1.209,19	245,56	80,09	221	2.226,41	221,44	36,29		
	4.00.01.4.00.01.02.35.001.	23.1 Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Batas Kecamatan/Daerah	Persentase penanganan kasus pertanahan	27	814,06	0	147,16	4	196,67	4	180,76	100,00	91,91	4	327,93	14,81	40,28		
	4.00.01.4.00.01.02.35.002.	23.2 Pendataan dan Inventarisasi Nama-nama Rupa Bumi Unsur Alami dan Buatan dalam Gasetir Nasional	Jumlah kecamatan yang disurvei dan Pembuatan Peta Berskala Kecamatan se Kab. Inhil	5	738,96	0	76,69	3	407,69	0	237,22	0,00	58,19	0	313,91	0,00	42,48		
	4.00.01.4.00.01.02.35.003.	23.3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahunan	Jumlah laporan LPPD	10	1.018,95	0	262,04	2	239,26	0	211,50	0,00	88,40	0	473,54	0,00	46,47		
	4.00.01.4.00.01.02.35.004.	23.4 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ke DPRD	5	722,98	0	121,68	1	75,00	0	68,10	0,00	90,80	0	189,78	0,00	26,25		
	4.00.01.4.00.01.02.35.006.	23.5 Asosiasi Perhimpunan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Kegiatan Asosiasi Perhimpunan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kerjasama Antar Daerah yang diikuti	30	560,62	0	101,05	5	199,05	5	184,25	100,00	92,56	5	285,30	16,67	50,89		
	4.00.01.4.00.01.02.35.007.	23.6 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah Lingkup Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Evaluasi	15	1.040,02	0	308,60	3	228,90	0	206,65	0,00	90,28	0	515,24	0,00	49,54		
	4.00.01.4.00.01.02.35.009.	23.7 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah DESK dan Sekretariat DESK serta monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2023 di Kabupaten	1	224,08	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.35.010.	23.8 Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Jumlah Kelengkapan Persyaratan-Persyaratan Administrasi Proses Daerah Otonomi Baru (DOB) Indragiri Selatan	2	320,00	0	-	3	163,13	0	120,71	0,00	74,00	0	120,71	0,00	37,72		
	4.00.01.4.00.01.02.35.011.	23.9 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri yang difasilitasi	8	231,75	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.35.012.	23.10 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerjasama Luar Negeri yang difasilitasi	4	231,75	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.35.013.	23.11 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dievaluasi	12	231,75	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		83,73		100,00		83,73		100,00		83,73		4,50			
Predikat kinerja				ST		T		ST		T		ST		T		SR			
	4.00.01.4.00.01.02.36.	24. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Organisasi	Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	94	4.549,13	55	974,82	85	563,93	63	451,01	73,87	79,98	118	1.425,83	125,44	31,34		
	4.00.01.4.00.01.02.36.001.	24.1 Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Perbub yang ditetapkan	3	167,03	3	145,56			0	-	0,00	0,00	3	145,56	100,00	87,15		
	4.00.01.4.00.01.02.36.002.	24.2 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi hasil Analisa Jabatan ASN dan Analisis beban kerja yang disusun secara efektif dan efisien	5	403,72	1	88,53	55	98,98	34	84,29	61,82	85,16	35	172,82	700,00	42,81		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.01.4.00.01.02.36.003.	24.3 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab. Inhil yang diterbitkan	10	956,18	1	169,47	1	95,55	1	79,63	100,00	83,34	2	249,10	20,00	26,05		
		24.4	Jumlah SOP di Lingkungan Pemkab. Inhil yang ditetapkan	10	-	-	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	#DIV/0!		
	4.00.01.4.00.01.02.36.004.	24.5 Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perda/Perbup yang di tetapkan	351	1.249,28	1	305,59	1	201,52	1	162,17	100,00	80,47	2	467,76	0,57	37,44		
		24.6	Jumlah Perbup tentang tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang diterbitkan	5	-	4	-			4	-	0,00	0,00	8	-	160,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.36.005.	24.7 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah yang dicapai.	410	1.772,92	55	265,66	61	167,89	63	124,93	102,93	74,41	118	390,59	28,76	22,03		
Rata-rata capaian kinerja (%)										91,19	80,85	91,19	80,85			168,22	35,91		
Predikat kinerja										ST	T	ST	T			ST	SR		
	4.00.01.4.00.01.02.37.	25. Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	92	1.155,48	81	654,13	100	308,44	0	270,08	0,00	87,56	81	924,22	88,04	79,99		
	4.00.01.4.00.01.02.37.001.	25.1 Tim Terpadu Trantibum Linmas Lintas Sektoral	Jumlah Gejolak yang terjadi dimasyarakat yang ditangani	5	445,11	5	148,49	1	144,43	0	122,84	0,00	85,05	5	271,32	100,00	60,96		
	4.00.01.4.00.01.02.37.002.	25.2 Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi	12	317,03	12	76,86	12	164,01	0	147,25	0,00	89,78	12	224,10	100,00	70,69		
	4.00.01.4.00.01.02.37.003.	25.3 Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Desa	Jumlah Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	1	201,93	1	152,55	0	-	0	-	0,00	0,00	1	152,55	100,00	75,55		
	4.00.01.4.00.01.02.37.004.	25.4 Pelaksanaan Evaluasi dan Koordinasi kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Koordinasi Permasalahan dan Solusi Tenga Kerja, Transmigrasi, Perpustakaan dan Kearsipan Tim/Satgas yang dilaksanakan	50	140,93	45	131,91	0	-	0	-	0,00	0,00	45	131,91	90,00	93,60		
	4.00.01.4.00.01.02.37.005.	25.5 Percepatan dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat transmigrasi	Jumlah Koordinasi dalam rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi yang dilaksanakan	6	50,47	6	42,49	0	-	0	-	0,00	0,00	6	42,49	100,00	84,18		
	4.00.01.4.00.01.02.37.009.	25.6 Pelaksanaan Evaluasi Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi	Desa yang melaksanakan Pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Ekonomi sesuai Petunjuk Teknis Operasional	0	-	0	101,85	0	-	0	-	0,00	0,00	0	101,85	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.37.010.	25.7 Bimtek Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	Jumlah Bimtek Sistem Informasi Kearsipan yang dilaksanakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.37.011.	25.8 Penataan Penyusunan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Perda/ Perbud tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.37.012.	25.9 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Bagi Kepala Desa dan Ketua BPD	Jumlah peserta yang mendapatkan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Bagi Kepala Desa dan Ketua BPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.01.4.00.01.02.37.013.	25.10 Pelaksanaan Koordinasi dan Asistensi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi dan Asistensi yang dilaksanakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.014.00.01.02.37.014.	25.11 Evaluasi Pelaksanaan Perbup tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	87,41	0,00	87,41			100,00	65,82		
		Predikat kinerja								SR	T	SR	T			ST	R		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									91.191,78		76.109,01						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								79,11	82,84	79,11	82,84			42,67	41,68		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			R	R		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
34.	0.00.00.4.00.02.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	92	53.244,29	90	10.466,26	90	12.052,33	72	10.745,19	80,48	89,15	32	21.211,45	35,31	39,84	SEKRETARIAT DPRD	
	0.00.00.4.00.02.02.01.002.	1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	25	4.522,80	25	843,45	25	1.068,20	25	829,56	100,00	77,66	10	1.673,01	40,00	36,99		
	0.00.00.4.00.02.02.01.006.	1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya	750	624,78	150	117,59	128	135,00	106	110,44	82,81	81,81	256	228,03	34,13	36,50		
	0.00.00.4.00.02.02.01.007.	1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	10	1.506,60	2	345,01	2	97,75	2	42,41	100,00	43,38	4	387,42	40,00	25,71		
	0.00.00.4.00.02.02.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	25	2.367,18	25	448,40	25	614,00	25	517,02	100,00	84,21	10	965,42	40,00	40,78		
	0.00.00.4.00.02.02.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perlatan kerja yang dipelihara/Service	750	721,00	150	137,71	136	136,20	123	122,93	90,44	90,26	273	260,64	36,40	36,15		
	0.00.00.4.00.02.02.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	1.634,39	30	347,37	30	205,06	30	202,41	100,00	98,71	60	549,79	200,00	33,64		
	0.00.00.4.00.02.02.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	825020	814,75	160144	167,61	200000	668,00	200000	668,00	100,00	100,00	360144	835,61	43,65	102,56		
	0.00.00.4.00.02.02.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	53	543,66	53	102,88	53	128,96	53	126,95	100,00	98,44	106	229,84	200,00	42,28		
	0.00.00.4.00.02.02.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	1275	2.234,62	255	273,17	49	449,92	38	342,36	77,55	76,09	293	615,53	22,98	27,55		
	0.00.00.4.00.02.02.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	16092	2.833,40	3778	440,25	2318	615,38	1761	467,60	75,99	75,99	5539	907,86	34,42	32,04		
	0.00.00.4.00.02.02.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1278	2.782,28	258	416,14	254	634,25	188	466,74	74,02	73,59	446	882,88	34,90	31,73		
	0.00.00.4.00.02.02.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	3201	20.404,49	715	5.562,18	587	4.865,89	598	4.956,83	101,87	101,87	1313	10.519,01	41,02	51,55		
	0.00.00.4.00.02.02.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	1548	4.322,22	-	281	652,16	281	322,90	100,00	49,51	281	322,90	18,15	7,47			
	0.00.00.4.00.02.02.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	1450	2.990,30	290	373,28	298	621,93	159	330,68	53,36	53,17	449	703,96	30,97	23,54		
	0.00.00.4.00.02.02.01.027.	1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	262	4.941,84	50	891,21	49	1.284,48	49	1.238,35	100,00	96,41	99	2.129,56	37,79	43,09		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								90,40	80,07	90,40	80,07			56,96	38,11		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			R	SR		
	0.00.00.4.00.02.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	92	20.600,58	68	4.920,28	90	4.919,78	68	3.906,31	75,50	79,40	54	8.826,59	59,11	42,85		
	0.00.00.4.00.02.02.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	5	1.860,25	1	432,46	2	705,85	2	674,04	100,00	95,49	3	1.106,51	60,00	59,48		
	0.00.00.4.00.02.02.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	31	1.194,18	12	816,80	14	216,36	0	-	0,00	0,00	12	816,80	38,71	68,40		
	0.00.00.4.00.02.02.02.007.	2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	9	236,30	9	305,07			0	-	0,00	-	9	305,07	100,00	129,11		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.02.02.02.008.	2.4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	10	144,10	10	157,64			0	-	0,00	-	10	157,64	100,00	109,39		
	0.00.00.4.00.02.02.02.009.	2.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	13	1.073,30	13	1.303,04			0	-	0,00	-	13	1.303,04	100,00	121,40		
	0.00.00.4.00.02.02.02.010.	2.6 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	2	927,78	1	117,39	3	85,68	3	95,61	100,00	111,60	4	213,00	40,00	22,96		
	0.00.00.4.00.02.02.02.011.	2.7 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi yang disediakan	3	90,10	3	82,25	0	-	0	-	0,00	-	3	82,25	100,00	91,28		
	0.00.00.4.00.02.02.02.016.	2.8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	53	1.017,30		-	24	1.102,25	24	1.141,15	100,00	103,53	24	1.141,15	45,28	112,17		
	0.00.00.4.00.02.02.02.020.	2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara	34	1.719,75	12	297,85	4	424,35	3	370,66	75,00	87,35	15	668,51	44,12	38,87		
	0.00.00.4.00.02.02.02.023.	2.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	35	2.490,00	7	290,99	7	481,00	5	320,13	71,43	66,56	12	611,12	34,29	24,54		
	0.00.00.4.00.02.02.02.024.	2.11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	34	2.647,68	7	529,56	5	519,95	5	382,85	100,00	73,63	12	912,40	35,29	34,46		
	0.00.00.4.00.02.02.02.025.	2.12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang terpelihara	6	1.300,00	6	211,17	5	262,50	5	249,01	100,00	94,86	11	460,18	36,67	35,40		
	0.00.00.4.00.02.02.02.027.	2.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan Dinas yang terpelihara	154	280,80	30	53,46	5	56,70	5	56,13	100,00	99,00	35	109,59	22,73	39,03		
	0.00.00.4.00.02.02.02.028.	2.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	505	1.051,35	56	115,90	53	152,25	52	150,55	98,89	98,89	108	266,46	21,47	25,34		
	0.00.00.4.00.02.02.02.042.	2.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	14	1.341,75	8	205,85	3	128,85	3	117,77	91,40	91,40	11	323,62	30,69	24,12		
	0.00.00.4.00.02.02.02.050.	2.16 Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	13	779,75	5	0,85	1	6,75	0	-	0,00	0,00	5	0,85	38,46	0,11		
	0.00.00.4.00.02.02.02.052.	2.17 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	631	2.446,20		-	326	777,30	146	348,41	44,79	44,82	146	348,41	23,14	14,24		
Rata-rata capaian kinerja (%)				75,50		74,39		75,50		74,39		75,50		74,39		51,23		55,90	
Predikat kinerja				S		S		S		S		S		S		R		R	
	0.00.00.4.00.02.02.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	92	3.460,23	56	707,17	90	356,83	56	222,27	62,32	62,29	112	929,44	24,37	26,86		
	0.00.00.4.00.02.02.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	2928	3.460,23	708	707,17	406	356,83	253	222,27	62,32	62,29	961	929,44	32,82	26,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)				62,32		62,29		62,32		62,29		62,32		62,29		32,82		26,86	
Predikat kinerja				R		R		R		R		R		R		SR		SR	
	0.00.00.4.00.02.02.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	92	1.110,03	26	181,88	90	202,15	0	-	0,00	0,00	26	181,88	28,55	16,38		
	0.00.00.4.00.02.02.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	88	1.110,03	24	181,88	17	202,15	0	-	0,00	0,00	24	181,88	27,27	16,38		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27,27		16,38			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
	0.00.00.4.00.02.02.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	92	721,24	90	131,81	90	145,09	90	137,80	100,00	94,98	180	269,61	39,13	37,38		
	0.00.00.4.00.02.02.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	150	226,93	30	37,35	2	45,43	2	40,63	100,00	89,44	32	77,99	21,33	34,37		
	0.00.00.4.00.02.02.06.002.	5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	100	152,08	20	29,20	2	30,63	2	28,71	100,00	93,74	22	57,91	22,00	38,08		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.02.02.06.004.	5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	60	342,23	12	65,26	1	69,03	1	68,46	100,00	99,17	13	133,72	21,67	39,07		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	94,12	100,00	94,12			21,67	37,17		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.02.02.07.	6. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase peningkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	92	191,29	90	31,40	90	38,03	78	32,92	86,67	86,56	168	64,32	36,52	33,62		
	0.00.00.4.00.02.02.07.002.	6.1 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen RKT yang disusun	375	191,29	75	31,40	75	38,03	65	32,92	86,67	86,56	140	64,32	37,33	33,62		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								86,67	86,56	86,67	86,56			37,33	33,62		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			SR	SR		
	4.00.01.4.00.02.02.	KEPALA DAERAH																	
	4.00.01.4.00.02.02.15.	7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi	92	6.268,95	73	2.688,21	90	3.379,25	73	2.626,86	81,61	77,73	146	5.315,07	159,18	84,78		
	4.00.01.4.00.02.02.15.013.	7.1 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan	1632	6.268,95	1011	2.688,21	685	3.379,25	559	2.626,86	81,61	77,73	1570	5.315,07	96,20	84,78		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								81,61	77,73	81,61	77,73			96,20	84,78		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			ST	T		
	4.00.02.4.00.02.02.	DEW																	
	4.00.02.4.00.02.02.15.	8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	92	186.113,19	55	42.451,31	90	40.708,35	55	36.509,05	61,32	89,68	110	78.960,36	47,91	42,43		
	4.00.02.4.00.02.02.15.001.	8.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang di Bahas	Jumlah Peraturan Daerah yang di Bahas	45	19.933,06	9	3.768,20	9	3.800,69	9	2.961,88	100,00	77,93	18	6.730,08	40,00	33,76		
	4.00.02.4.00.02.02.15.003.	8.2 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1357	9.610,49	357	2.219,44	313	2.277,14	291	2.343,93	92,97	102,93	648	4.563,37	47,75	47,48		
	4.00.02.4.00.02.02.15.004.	8.3 Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna	126	10.369,26	38	2.867,53	35	2.425,09	26	1.823,48	74,29	75,19	64	4.691,01	50,79	45,24		
	4.00.02.4.00.02.02.15.005.	8.4 Kegiatan Reses	Jumlah Reses dan Aspirasi yang diserap	15	31.157,03	3	4.456,63	3	3.338,98	3	3.066,47	100,00	91,84	6	7.523,10	40,00	24,15		
	4.00.02.4.00.02.02.15.006.	8.5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan kerja yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD	14065	79.255,00	2813	24.449,46	4430	25.180,62	3567	23.022,84	80,52	91,43	6380	47.472,30	45,36	59,90		
	4.00.02.4.00.02.02.15.007.	8.6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	9	11.474,89	1	1.275,76	1	332,71	0	641,46	0,00	192,80	1	1.917,22	11,11	16,71		
	4.00.02.4.00.02.02.15.008.	8.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5	304,89	-	-	1	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.02.4.00.02.02.15.009.	8.8 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up	184	3.872,86	45	766,23	1	432,00	0	431,84	0,00	99,96	45	1.198,06	24,46	30,93		
	4.00.02.4.00.02.02.15.010.	8.9 Pengelolaan Risalah DPRD	Jumlah Risalah Rapat	70	2.097,07	14	682,24	23	349,03	18	443,87	78,26	127,17	32	1.126,12	45,71	53,70		
	4.00.02.4.00.02.02.15.011.	8.10 Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah Pemenuhan Logistik Rumah Tangga Pimpinan	36289	11.826,80	7089	1.965,81	6032	2.572,09	5260	1.773,28	87,20	68,94	12349	3.739,09	34,03	31,62		
	4.00.02.4.00.02.02.15.012.	8.11 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan	1974	6.211,84	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								61,32	92,82	61,32	92,82			30,84	31,23		
		Predikat kinerja								R	ST	R	ST			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								61.801,80	54.180,40								
										69,73	71,00	69,73	71,00			44,29	40,51		
										S	S	S	S			SR	SR		
	A.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
	B.	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran																	
	C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
	D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
35.	0.00.00.4.00.03.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.429,08	95	324,79	100	277,27	56	248,96	55,51	89,79	75	573,75	30,10	40,15	KECAMATAN TEMBILAHAN	
	0.00.00.4.00.03.01.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	4224	18,82	800	3,60	800	3,60	800	3,60	100,00	100,00	1600	7,20	37,88	38,26		
	0.00.00.4.00.03.01.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	120	83,84	24	18,84	2	24,00	14	22,83	680,15	95,14	38	41,67	31,34	49,71		
	0.00.00.4.00.03.01.01.007.	1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan	15	118,95	3	21,60	3	32,40	4	32,40	116,67	100,00	7	54,00	43,33	45,40		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.01.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	11	115,23	11	24,11	11	27,01	12	26,15	106,07	96,81	23	50,25	41,21	43,61		
	0.00.00.4.00.03.01.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	23	138,92	23	28,35	23	28,61	23	28,44	98,26	99,41	45	56,79	39,45	40,88		
	0.00.00.4.00.03.01.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	64625	59,56	11278	10,57	10780	11,22	10636	11,07	98,66	98,66	21914	21,64	33,91	36,33		
	0.00.00.4.00.03.01.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	3	9,06	3	1,60	3	1,51	3	1,51	100,00	100,00	6	3,11	40,00	34,33		
	0.00.00.4.00.03.01.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	74,95	1	74,95			0	-	0,00	0,00	1	74,95	69,00	100,00		
	0.00.00.4.00.03.01.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	10	12,15	2	2,40	2	2,40	2	2,40	100,00	100,00	4	4,80	40,00	39,51		
	0.00.00.4.00.03.01.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	4100	43,40	676	6,74	1000	9,00	846	8,05	84,61	89,44	1523	14,79	37,13	34,08		
	0.00.00.4.00.03.01.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	26674	228,05	6023	29,75	1500	24,85	1307	22,05	87,15	88,73	7330	51,80	27,48	22,71		
	0.00.00.4.00.03.01.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	85	454,15	12	87,88	24	98,28	18	76,06	75,91	77,39	31	163,95	36,03	36,10		
	0.00.00.4.00.03.01.01.027.	1.13 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibavarkan	10	72,00	2	14,40	2	14,40	2	14,40	116,67	100,00	4	28,80	43,33	40,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				83,33		80,00		83,33		80,00						40,01			
Predikat kinerja				T		T		T		T		T				SR			
	0.00.00.4.00.03.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	96	325,75	85	82,48	100	51,20	95	47,76	94,58	93,28	90	130,24	37,57	39,98		
	0.00.00.4.00.03.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	28	28,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.01.02.024.	2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	26	59,50	6	17,83	7	19,40	7	18,31	100,00	94,37	13	36,14	49,08	60,74		
	0.00.00.4.00.03.01.02.028.	2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	67	53,45	14	10,30	19	13,35	17	11,95	88,90	89,51	31	22,25	45,81	41,63		
	0.00.00.4.00.03.01.02.042.	2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	60,00	1	54,35			0	-	0,00	0,00	1	54,35	25,00	90,59		
	0.00.00.4.00.03.01.02.052.	2.5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13	124,80		-	8	18,45	8	17,50	94,85	94,85	8	17,50	58,37	14,02		
Rata-rata capaian kinerja (%)				94,58		92,91		94,58		92,91						35,65			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST				SR			
	0.00.00.4.00.03.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	60	39,45	11	8,35			0	-	0,00	0,00	11	8,35	18,60	21,17		
	0.00.00.4.00.03.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	164	39,45	93	8,35			0	-	0,00	0,00	93	8,35	56,71	21,17		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00									
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR				SR			
	0.00.00.4.00.03.01.07.	4. Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	100	115,08	100	21,55	100	21,56	100	21,56	100,00	100,00	100	43,11	40,00	37,46		
	0.00.00.4.00.03.01.07.001.	4.1 Penyusunan Program Kerja	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun	25	115,08	5	21,55	6	21,56		21,56	100,00	100,00	11	43,11	44,00	37,46		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		100,00		100,00		100,00									
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST							
4.00.03.4.00.03.01.	KECA								10.820,67	0	-								
4.00.03.4.00.03.01.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan		100	47.542,49	85	6.165,84	100	10.820,67	34	2.398,06	33,82	22,16	59	8.563,90	23,76	18,01		
4.00.03.4.00.03.01.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan		45	70,86	9	10,38	9	12,18	9	11,18	100,00	91,79	18	21,56	40,00	30,43		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.01.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	4001	343,87	960	77,06	800	83,06	771	80,05	96,34	96,38	1731	157,11	43,26	45,69		
	4.00.03.4.00.03.01.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	8	422,12	3	128,87	1	89,53	1	48,27	100,00	53,92	4	177,14	49,50	41,96		
	4.00.03.4.00.03.01.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	5	588,81	1	122,79	1	89,15	1	77,71	100,00	87,17	2	200,51	40,00	34,05		
	4.00.03.4.00.03.01.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	1	37,23	1	21,23			0	-	0,00	0,00	1	21,23	20,00	57,02		
	4.00.03.4.00.03.01.15.007.	5.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tembilahan Kota	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Kota	90	1.296,58	83	175,87	90	150,78	90	137,64	100,00	91,29	173	313,51	38,43	24,18		
	4.00.03.4.00.03.01.15.008.	5.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tembilahan Hilir	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Hilir	90	1.319,40	87	257,01	90	156,33	90	143,44	100,00	91,76	177	400,45	39,30	30,35		
	4.00.03.4.00.03.01.15.009.	5.8 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Pekan Arba	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pekan Arba	90	1.246,53	50	139,79	90	141,22	90	127,07	100,00	89,98	140	266,87	31,00	21,41		
	4.00.03.4.00.03.01.15.010.	5.9 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Sungai Beringin	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Beringin	90	1.185,96	83	124,08	90	120,54	90	114,91	100,00	95,33	173	238,99	38,45	20,15		
	4.00.03.4.00.03.01.15.011.	5.10 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Seberang Tembilahan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Seberang Tembilahan	90	1.111,92	86	115,37	90	114,72	90	93,58	100,00	81,57	176	208,95	39,00	18,79		
	4.00.03.4.00.03.01.15.012.	5.11 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Sungai Perak	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Perak	90	1.148,30	85	122,45	90	111,34	90	102,04	100,00	91,65	175	224,49	38,85	19,55		
	4.00.03.4.00.03.01.15.013.	5.12 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	90	1.036,52	78	91,81	90	80,08	90	67,55	100,00	84,35	168	159,36	37,26	15,37		
	4.00.03.4.00.03.01.15.014.	5.13 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	90	1.032,52	84	163,42	90	83,59	90	70,04	100,00	83,79	174	233,46	38,68	22,61		
	4.00.03.4.00.03.01.15.046.	5.14 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	22	597,47	10	262,24			0	-	0,00	0,00	10	262,24	44,30	43,89		
	4.00.03.4.00.03.01.15.049.	5.15 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Kota	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Kota	90	686,24	20	16,71	90	281,99	0	-	0,00	0,00	20	16,71	22,13	2,44		
	4.00.03.4.00.03.01.15.050.	5.16 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Hilir	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hilir	90	1.084,17	65	81,14	90	380,71	0	-	0,00	0,00	65	81,14	14,50	7,48		
	4.00.03.4.00.03.01.15.051.	5.17 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pekan Arba	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pekan Arba	90	2.043,60	47	140,37	90	506,68	0	-	0,00	0,00	47	140,37	10,46	6,87		
	4.00.03.4.00.03.01.15.052.	5.18 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Beringin	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Beringin	90	2.111,85	70	266,57	90	510,92	0	-	0,00	0,00	70	266,57	15,66	12,62		
	4.00.03.4.00.03.01.15.053.	5.19 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Seberang Tembilahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan	90	2.102,34	79	317,33	90	452,65	0	-	0,00	0,00	79	317,33	17,60	15,09		
	4.00.03.4.00.03.01.15.054.	5.20 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Perak	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Perak	90	2.184,51	90	354,30	90	530,25	0	-	0,00	0,00	90	354,30	19,94	16,22		
	4.00.03.4.00.03.01.15.055.	5.21 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	90	2.330,19	55	250,09	65	503,10	0	-	0,00	0,00	55	250,09	12,14	10,73		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.01.15.056.	5.22 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	90	2.338,67	87	344,61	90	509,30	0	-	0,00	0,00	87	344,61	19,40	14,74		
	4.00.03.4.00.03.01.15.077.	5.23 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembilahan Kota	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Kota	90	2.233,76	90	333,65	90	438,03	90	395,59	100,00	90,31	180	729,23	40,00	32,65		
	4.00.03.4.00.03.01.15.078.	5.24 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hilir	90	1.835,83	90	236,40	90	339,31	90	244,90	100,00	72,18	180	481,30	40,00	26,22		
	4.00.03.4.00.03.01.15.079.	5.25 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Arba	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pekan Arba	90	876,40	90	114,00	90	213,34	90	196,52	100,00	92,11	180	310,52	40,00	35,43		
	4.00.03.4.00.03.01.15.081.	5.26 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seberang Tembilahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan	90	817,66	90	118,04	90	267,37	90	142,58	100,00	53,33	180	260,62	40,00	31,87		
	4.00.03.4.00.03.01.15.082.	5.27 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Perak	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Perak	90	735,49	90	115,00	90	189,77	90	164,70	100,00	86,79	180	279,70	40,00	38,03		
	4.00.03.4.00.03.01.15.083.	5.28 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	90	589,81	85	77,40	85	216,92	47	121,77	55,23	56,13	132	199,17	29,35	33,77		
	4.00.03.4.00.03.01.15.084.	5.29 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	90	581,33	89	69,56	90	210,72	25	58,52	27,73	27,77	114	128,08	25,41	22,03		
	4.00.03.4.00.03.01.15.088.	5.30 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Kota (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Kota	90	1.480,55	41	170,25	90	366,00	0	-	0,00	0,00	41	170,25	46,00	11,50		
	4.00.03.4.00.03.01.15.089.	5.31 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Hilir (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hilir	90	1.480,55	38	157,58	90	366,00	0	-	0,00	0,00	38	157,58	42,50	10,64		
	4.00.03.4.00.03.01.15.090.	5.32 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pekan Arba (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pekan Arba	90	1.480,55	45	184,15	90	366,00	0	-	0,00	0,00	45	184,15	49,70	12,44		
	4.00.03.4.00.03.01.15.091.	5.33 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Beringin (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Beringin	90	1.480,55	43	178,87	90	366,00	0	-	0,00	0,00	43	178,87	48,30	12,08		
	4.00.03.4.00.03.01.15.092.	5.34 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Seberang Tembilahan (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan	90	1.480,55	44	181,16	90	366,00	0	-	0,00	0,00	44	181,16	48,90	12,24		
	4.00.03.4.00.03.01.15.093.	5.35 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Perak (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Perak	90	1.480,55	45	184,29	90	366,00	0	-	0,00	0,00	45	184,29	49,70	12,45		
	4.00.03.4.00.03.01.15.094.	5.36 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Seberang Tembilahan Barat (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	90	1.480,55	41	167,68	75	366,00	0	-	0,00	0,00	41	167,68	45,30	11,33		
	4.00.03.4.00.03.01.15.095.	5.37 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	90	1.480,55	41	169,12	90	366,00	0	-	0,00	0,00	41	169,12	45,60	11,42		
	4.00.03.4.00.03.01.15.166.	5.38 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Beringin	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Beringin	90	808,15		125,20	90	209,10	0	-	0,00	0,00	0	125,20	0,00	15,49		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.01.15.190.	5.39 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	6	100,00	-	-	6	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.191.	5.40 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tembilahan Kota	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.192.	5.41 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tembilahan Hilir	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.193.	5.42 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Pekan Arba	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.194.	5.43 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Sungai Beringin	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.195.	5.44 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Seberang Tembilahan	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.196.	5.45 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Sungai Perak	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.197.	5.46 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Seberang Tembilahan Barat	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.01.15.198.	5.47 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								39,54	33,72	39,54	33,72			27,47	16,45		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				49.451,85	6.603,02	11.170,70			2.716,34								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								79,36	76,66	79,36	76,66			34,38	33,66		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
36.	0.00.00.4.00.03.02.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	94	1.279,72	95	283,73	100	295,75	100	300,36	100,46	101,56	98	584,09	41,59	45,64	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
	0.00.00.4.00.03.02.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	1750	12,75	350	2,55	350	2,55	350	2,55	100,00	100,00	700	5,10	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.02.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	12	111,00	12	22,18	12	22,20	12	22,20	100,00	100,00	24	44,38	40,00	39,98		
	0.00.00.4.00.03.02.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	7	400,17	7	102,27	6	113,08	6	118,05	100,00	104,40	13	220,31	37,14	55,06		
	0.00.00.4.00.03.02.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	24	77,95	24	16,08	24	16,08	24	16,08	100,00	100,00	48	32,16	40,00	41,26		
	0.00.00.4.00.03.02.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	68926	47,57	12044	8,31	50	10,00	50	10,00	100,00	100,00	12094	18,31	17,55	38,49		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.02.01.015.	1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	480	48,00	96	9,60	96	9,60	96	9,60	100,00	100,00	192	19,20	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.02.01.016.	1.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	2610	17,29	870	5,76	870	5,76	870	5,76	100,00	100,00	1740	11,52	66,67	66,67		
	0.00.00.4.00.03.02.01.017.	1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	55	70,00	11	14,00	11	14,00	11	14,00	100,00	100,00	22	28,00	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.02.01.018.	1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	30	173,10	6	33,87	9	21,30	9	21,30	100,00	99,98	15	55,16	49,60	31,87		
	0.00.00.4.00.03.02.01.020.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	75	105,90	15	21,12	40	21,18	40	20,83	100,00	98,32	55	41,94	73,33	39,60		
	0.00.00.4.00.03.02.01.027.	1.11 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	27	216,00	6	48,00	6	60,00	6	60,00	100,00	100,00	12	108,00	44,44	50,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			44,44	50,00		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.02.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	476,84	75	31,94	100	63,60	99	61,30	98,51	96,38	87	93,24	34,70	19,55		
	0.00.00.4.00.03.02.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	2	170,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.02.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	3	80,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.02.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	48	43,04	8	7,44	10	8,90	10	8,90	100,00	100,00	18	16,34	38,12	37,96		
	0.00.00.4.00.03.02.02.028.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	35	20,00	7	4,00	7	4,00	7	4,00	100,00	100,00	14	8,00	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.02.02.042.	2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	25,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.02.02.050.	2.6 Pengadaan Furniture dan Interior Gedung Kantor	Jumlah Furniture dan Interior Gedung Kantor yang disediakan	3	10,00		-	3	10,00	4	10,00	133,33	100,00	4	10,00	133,33	100,00		
	0.00.00.4.00.03.02.02.051.	2.7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	55	26,30	0	-	12	5,70	8	3,40	66,67	59,66	8	3,40	14,55	12,93		
	0.00.00.4.00.03.02.02.052.	2.8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18	102,50	2	20,50	3	35,00	3	35,00	100,00	100,00	5	55,50	27,78	54,15		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	91,93	100,00	91,93			31,72	30,63		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.02.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	100	80,50	75	29,50	100	18,25	100	18,25	100,00	100,00	88	47,75	35,00	59,32		
	0.00.00.4.00.03.02.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	100	33,00	25	8,25	25	8,25	25	8,25	100,00	100,00	50	16,50	50,00	50,00		
	0.00.00.4.00.03.02.03.004.	3.2 Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang disediakan	50	12,50	25	6,25			0	-	0,00	0,00	25	6,25	50,00	50,00		
	0.00.00.4.00.03.02.03.005.	3.3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	157	35,00	67	15,00	45	10,00	45	10,00	100,00	100,00	112	25,00	71,52	71,43		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			57,17	57,14		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			R	R		
	4.00.03.4.00.03.02.	KECA							3.112,30	0	-								
	4.00.03.4.00.03.02.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	13.916,10	18	2.604,63	100	3.112,30	62	808,78	61,91	25,99	40	3.413,41	40,14	24,53		
	4.00.03.4.00.03.02.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	84,25	1	16,85	3	16,85	3	16,85	100,00	100,00	4	33,70	32,00	40,00		
	4.00.03.4.00.03.02.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	45	329,65	13	89,65	12	78,00	12	78,00	100,00	100,00	25	167,65	55,56	50,86		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.02.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	31	412,52	15	145,93	5	114,40	5	114,40	100,00	100,00	20	260,33	63,06	63,11		
	4.00.03.4.00.03.02.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	18	825,86	9	371,78	3	119,21	3	119,21	101,50	100,00	12	490,98	66,92	59,45		
	4.00.03.4.00.03.02.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	2	50,50	2	10,10	2	10,10	2	10,10	111,39	100,00	4	20,20	42,28	40,00		
	4.00.03.4.00.03.02.15.015.	4.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tembilahan Hulu	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Hulu	90	1.262,48	90	229,05	90	165,62	90	164,76	100,00	99,48	180	393,81	40,00	31,19		
	4.00.03.4.00.03.02.15.016.	4.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tembilahan Barat	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tembilahan Barat	90	1.112,24	90	223,98	90	128,06	90	127,84	100,00	99,82	180	351,82	40,00	31,63		
	4.00.03.4.00.03.02.15.046.	4.8 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	4	234,00	3	229,57	0	0	0	-	0,00	0,00	3	229,57	34,80	98,11		
	4.00.03.4.00.03.02.15.047.	4.9 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	3	463,38	1	142,62	0	0	0	-	0,00	0,00	1	142,62	33,00	30,78		
	4.00.03.4.00.03.02.15.048.	4.10 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba desa/kelurahan	4	40,13	4	157,39	4	8,03	4	8,03	100,00	100,00	8	165,41	40,00	412,24		
	4.00.03.4.00.03.02.15.057.	4.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Hulu	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hulu	90	948,80	90	252,35	90	321,46	0	-	0,00	0,00	90	252,35	40,00	26,60		
	4.00.03.4.00.03.02.15.058.	4.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Barat	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Barat	90	1.809,63	90	242,10	90	339,31	0	-	0,00	0,00	90	242,10	40,00	13,38		
	4.00.03.4.00.03.02.15.096.	4.13 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Hulu (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Hulu	100	1.480,55	47	174,96	100	366,00	0	-	0,00	0,00	47	174,96	47,00	11,82		
	4.00.03.4.00.03.02.15.097.	4.14 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tembilahan Barat (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tembilahan Barat	100	1.480,55	100	105,00	100	366,00	0	-	0,00	0,00	100	105,00	40,00	7,09		
	4.00.03.4.00.03.02.15.149.	4.15 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembilahan Hulu	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hulu	90	1.971,20	87	113,30	90	398,56	75	338,48	83,81	84,93	163	451,78	36,16	22,92		
	4.00.03.4.00.03.02.15.150.	4.16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembilahan Barat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Barat	90	1.110,37	90	100,00	90	380,71	69	300,86	77,06	79,02	159	400,86	35,41	36,10		
	4.00.03.4.00.03.02.15.190.	4.17 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	5	100,00	-	-	5	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.02.15.199.	4.18 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tembilahan Hulu	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.02.15.200.	4.19 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tembilahan Barat	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								57,28	56,66	57,28	56,66			36,12	51,33		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	R		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								15.753,15	2.949,80	3.489,90	1.188,69						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								62,35	60,72	62,35	60,72						
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								R	R	R	R						
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
C.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
37.	0.00.00.4.00.03.03.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	800,77	95	191,03	100	173,59	99	141,74	99,48	81,65	97	332,77	38,90	41,56	KECAMATAN TEMPULING	
	0.00.00.4.00.03.03.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlavani	1092	62,70	800	45,90	800	4,20	800	3,96	100,00	94,29	1600	49,86	58,61	79,52		
	0.00.00.4.00.03.03.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	36	82,49	7	19,41	36	16,27	36	15,95	100,00	98,02	43	35,36	47,78	42,87		
	0.00.00.4.00.03.03.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	60	34,65	12	4,00	12	4,65	12	4,65	100,00	100,00	24	8,65	40,00	24,96		
	0.00.00.4.00.03.03.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	10	41,57	10	8,31	12	17,90	12	17,49	100,00	97,71	22	25,81	44,00	62,08		
	0.00.00.4.00.03.03.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	30	61,01	30	12,03	30	13,38	30	13,26	100,00	99,07	60	25,28	40,00	41,44		
	0.00.00.4.00.03.03.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	15200	15,00	3040	3,13	7000	5,48	7000	4,47	100,00	81,57	10040	7,60	66,05	50,67		
	0.00.00.4.00.03.03.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	5	11,45	5	2,29	5	2,29	5	2,29	100,00	100,00	10	4,58	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.03.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9	46,28	9	46,28			0	-	0,00	0,00	9	46,28	100,00	100,00		
	0.00.00.4.00.03.03.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	3	15,40	3	4,20	12	4,20	12	4,20	100,00	100,00	15	8,40	100,00	54,55		
	0.00.00.4.00.03.03.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	778	5,51	43	0,30	70	1,63	70	1,52	100,00	93,00	113	1,82	14,58	33,01		
	0.00.00.4.00.03.03.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	125	13,50	25	2,70	25	2,70	25	2,60	100,00	96,30	50	5,30	40,00	39,26		
	0.00.00.4.00.03.03.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	30	152,93	4	22,19	5	30,59	3	12,55	60,00	41,02	7	34,74	24,20	22,71		
	0.00.00.4.00.03.03.01.019.	1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	8	91,80	-	-	2	43,20	2	43,20	100,00	100,00	2	43,20	25,00	47,06		
	0.00.00.4.00.03.03.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	102	144,90	17	20,29	18	27,10	11	15,61	61,11	57,59	28	35,90	27,36	24,78		
	0.00.00.4.00.03.03.01.027.	1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	3	21,60	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									93,93	89,12	93,93	89,12		44,51	44,19		
		Predikat kinerja									ST	T	ST	T		SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.03.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	428,35	75	9,50	100	75,73	100	75,73	100,24	100,00	88	85,23	35,05	19,90		
	0.00.00.4.00.03.03.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	3	57,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.006.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang disediakan	11	12,00	5	4,50	0	-	0	-	0,00	0,00	5	4,50	45,45	37,50		
	0.00.00.4.00.03.03.02.008.	2.3 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	3	6,00	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.009.	2.4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	5	5,00	5	5,00	0	-	0	-	0,00	0,00	5	5,00	100,00	100,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.010.	2.5 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	3	23,70	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.021.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	6	24,02	0	-	1	4,00	1	4,00	100,00	100,00	1	4,00	16,67	16,65		
	0.00.00.4.00.03.03.02.022.	2.7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedyne Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang ternelihara	6	18,98	-	-	6	6,98	6	6,98	100,00	100,00	6	6,98	100,00	36,78		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.03.02.024.	2.8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	36	20,00		-	9	5,00	9	5,00	100,00	100,00	9	5,00	25,00	25,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.028.	2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	15	15,00		-	6	6,00	6	6,00	100,00	100,00	6	6,00	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.042.	2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	21	202,50		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.03.02.052.	2.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	44,15		-	6	53,75	6	53,75	100,00	100,00	6	53,75	60,00	121,74		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			35,19	34,33		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.03.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	100	71,22	100	5,64	100	11,76	100	11,76	100,00	100,00	100	17,40	40,00	24,43		
	0.00.00.4.00.03.03.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	107	35,34	17	5,64	17	11,76	17	11,76	100,00	100,00	34	17,40	31,76	49,24		
	0.00.00.4.00.03.03.03.004.	3.2 Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang disediakan	51	17,94		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.03.03.005.	3.3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	51	17,94		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			10,59	16,41		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.03.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	80	40,00		-			0	-		0,00		-		0,00		
	0.00.00.4.00.03.03.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	24	40,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00						
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR						
	0.00.00.4.00.03.03.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	80	36,42		-	100	9,42	100	9,42	100,00	100,00	100	9,42	50,00	25,86		
	0.00.00.4.00.03.03.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	30	28,85		-	6	7,85	6	7,85	100,00	100,00	6	7,85	20,00	27,21		
	0.00.00.4.00.03.03.06.011.	5.2 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8	7,57		-	6	1,57	6	1,57	100,00	100,00	6	1,57	75,00	20,74		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00	100,00	100,00			47,50	23,97		
Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.03.	KECAMATAN							5.765,47	0	-								
	4.00.03.4.00.03.03.15.	6. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	25.210,85	84	2.421,34	100	5.765,47	39	1.595,99	38,95	27,68	61	4.017,32	24,59	15,93		
	4.00.03.4.00.03.03.15.001.	6.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	50	74,77	10	16,76	10	14,50	10	14,50	100,00	100,00	20	31,26	40,00	41,81		
	4.00.03.4.00.03.03.15.002.	6.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	670	401,44	117	62,44	120	78,78	100	56,04	83,33	71,13	217	118,48	32,33	29,51		
	4.00.03.4.00.03.03.15.003.	6.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	53	555,86	14	146,67	8	133,94	5	76,46	65,62	57,08	19	223,13	36,53	40,14		
	4.00.03.4.00.03.03.15.004.	6.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	6	673,98	2	148,73	2	132,25	2	111,64	100,00	84,42	4	260,37	66,67	38,63		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.03.15.005.	6.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	6	20,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.021.	6.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Sungai Salak	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Salak	100	1.223,36	95	20,23	100	157,02	100	140,72	100,00	89,62	95	160,95	38,00	13,16		
	4.00.03.4.00.03.03.15.022.	6.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tempuling	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tempuling	100	1.081,63	93	286,57	100	121,80	100	113,57	100,00	93,24	93	400,13	37,20	36,99		
	4.00.03.4.00.03.03.15.023.	6.8 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Pangkalan Tuiuh	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pangkalan Tuiuh	100	1.106,97	99	-	100	127,69	100	113,24	100,00	88,68	99	113,24	39,60	10,23		
	4.00.03.4.00.03.03.15.024.	6.9 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tanjung Pedada	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tanjung Pedada	100	1.127,89	100	159,68	100	133,40	100	121,45	100,00	91,04	100	281,13	40,00	24,92		
	4.00.03.4.00.03.03.15.046.	6.10 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	19	568,75	7	218,63			0	-	0,00	0,00	7	218,63	38,00	38,44		
	4.00.03.4.00.03.03.15.047.	6.11 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	95	200,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.048.	6.12 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba desa/kelurahan	2	74,00		-	2	18,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.059.	6.13 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Tuiuh	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pangkalan Tuiuh	95	689,63	93	71,80	95	232,63	95	206,79	100,00	88,89	93	278,59	39,20	40,40		
	4.00.03.4.00.03.03.15.060.	6.14 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pedada	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pedada	95	493,93	95	-	95	121,00	95	121,00	100,00	100,00	95	121,00	40,00	24,50		
	4.00.03.4.00.03.03.15.063.	6.15 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Salak	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Salak	95	1.735,14	95	199,40	95	459,87	0	-	0,00	0,00	95	199,40	40,00	11,49		
	4.00.03.4.00.03.03.15.064.	6.16 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tempuling	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tempuling	95	2.112,46	95	194,29	95	598,41	0	-	0,00	0,00	95	194,29	40,00	9,20		
	4.00.03.4.00.03.03.15.065.	6.17 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pangkalan Tuiuh	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pangkalan Tuiuh	95	2.230,37	74	-	95	487,39	0	-	0,00	0,00	74	-	31,20	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.066.	6.18 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tanjung Pedada	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pedada	95	2.426,07	33	202,12	95	599,02	0	-	0,00	0,00	33	202,12	35,00	8,33		
	4.00.03.4.00.03.03.15.098.	6.19 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Salak (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Salak	95	1.480,55	0	-	95	366,00	54	171,07	56,84	46,74	54	171,07	56,84	11,55		
	4.00.03.4.00.03.03.15.099.	6.20 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tempuling (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tempuling	95	1.480,55	53	179,11	95	366,00	54	164,01	56,84	44,81	107	343,11	45,14	23,17		
	4.00.03.4.00.03.03.15.100.	6.21 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pangkalan Tuiuh (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pangkalan Tuiuh	95	1.480,55	48	139,59	95	369,51	54	185,51	56,84	50,20	102	325,10	42,74	21,96		
	4.00.03.4.00.03.03.15.101.	6.22 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tanjung Pedada (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pedada	95	1.480,55	31	139,92	95	366,00	0	-	0,00	0,00	31	139,92	33,00	9,45		
	4.00.03.4.00.03.03.15.167.	6.23 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Salak	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Salak	95	1.184,86		146,49	95	260,15	0	-	0,00	0,00	0	146,49	0,00	12,36		
	4.00.03.4.00.03.03.15.168.	6.24 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tempuling	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tempuling	95	807,54		88,93	95	121,61	0	-	0,00	0,00	0	88,93	0,00	11,01		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.03.15.190.	6.25 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	2	100,00		-	2	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.201.	6.26 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Sungai Salak	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.202.	6.27 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tempuling	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.203.	6.28 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Pangkalan Tujuh	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.03.15.204.	6.29 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tanjung Pedada	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								44,78	40,23	44,78	40,23			26,60	15,77		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			25.786,84		2.627,51		5.862,38		1.692,90								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program						87,74		85,87		87,74	85,87			32,88	26,94		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program						T		T		T	T			SR	SR		
A.																			
B.																			
C.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
38.	0.00.00.4.00.03.04.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	1.173,84	90	220,66	100	241,53	42	226,88	41,85	93,94	66	447,54	26,37	38,13	KECAMATAN BATANG TUAKA	
	0.00.00.4.00.03.04.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	500	26,08	100	5,28	993	5,20	993	5,20	100,00	100,00	1093	10,48	43,72	40,18		
	0.00.00.4.00.03.04.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	30,14	2	3,88	12	6,00	12	5,80	100,00	96,73	12	9,68	80,00	32,13		
	0.00.00.4.00.03.04.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanj Perizinannya	65	36,25	3	2,62	13	7,05	8	3,73	61,54	52,94	11	6,35	17,39	17,52		
	0.00.00.4.00.03.04.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	18	146,45	18	25,49	15	30,00	15	30,00	100,00	100,00	33	55,49	36,67	37,89		
	0.00.00.4.00.03.04.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	37	68,60	37	19,12	34	12,37	34	12,37	100,00	100,00	71	31,49	38,38	45,90		
	0.00.00.4.00.03.04.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	39816	46,01	10109	11,60	7702	6,84	7702	6,83	100,00	99,99	17811	18,43	44,73	40,06		
	0.00.00.4.00.03.04.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	100	26,50	100	4,50	5	5,50	5	5,50	100,00	100,00	105	10,00	42,00	37,74		
	0.00.00.4.00.03.04.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	24,91	5	23,76			0	-	0,00	0,00	5	23,76	95,36	95,36		
	0.00.00.4.00.03.04.01.015.	1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	10800	45,72	1205	5,02	1080	4,32	800	3,12	74,07	72,22	2005	8,14	18,56	17,80		
	0.00.00.4.00.03.04.01.016.	1.10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	4500	50,63	890	10,11	900	10,13	900	10,13	100,00	100,07	1790	20,24	39,77	39,99		
	0.00.00.4.00.03.04.01.017.	1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4083	71,56	791	10,76	2000	27,20	2000	29,36	100,00	107,94	2791	40,12	68,36	56,06		
	0.00.00.4.00.03.04.01.018.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	35	223,00	7	34,28	16	26,05	9	14,23	56,25	54,63	16	48,51	45,49	21,75		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.04.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	152	262,80	17	42,65	70	72,08	70	71,80	100,00	99,61	87	114,45	56,97	43,55		
	0.00.00.4.00.03.04.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	15	115,20	3	21,60	4	28,80	4	28,80	100,00	100,00	7	50,40	46,67	43,75		
Rata-rata capaian kinerja (%)				85,13		84,58		85,13		84,58						48,15			
Predikat kinerja				T		T		T		T						SR			
	0.00.00.4.00.03.04.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	853,27	85	233,46	100	37,11	79	33,33	78,95	89,81	82	266,79	32,79	31,27		
	0.00.00.4.00.03.04.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	7	142,46	6	116,93	0	-	0	-	0,00	0,00	6	116,93	82,08	82,08		
	0.00.00.4.00.03.04.02.009.	2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	4	79,66	4	76,99	0	-	0	-	0,00	0,00	4	76,99	100,00	96,64		
	0.00.00.4.00.03.04.02.010.	2.3 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	11	60,87	11	20,46	0	-	0	-	0,00	0,00	11	20,46	40,00	33,61		
	0.00.00.4.00.03.04.02.024.	2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	5	59,00	1	14,10	1	13,00	1	9,27	71,31	71,31	2	23,37	34,26	39,61		
	0.00.00.4.00.03.04.02.028.	2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	196	60,00	19	4,99	34	10,40	34	10,35	100,00	99,52	53	15,34	26,89	25,57		
	0.00.00.4.00.03.04.02.052.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40	451,28	-	-	1	13,71	1	13,71	100,00	100,00	1	13,71	2,50	3,04		
Rata-rata capaian kinerja (%)				90,44		90,28		90,44		90,28						47,62			
Predikat kinerja				T		T		T		T						SR			
	0.00.00.4.00.03.04.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	60	49,70	-	-	100	27,80	99	33,70	99,00	121,22	99	33,70	66,00	67,81		
	0.00.00.4.00.03.04.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	32	39,20	-	-	45	27,80	45	33,70	100,00	121,22	45	33,70	140,63	85,97		
	0.00.00.4.00.03.04.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	40	10,50	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		121,22		100,00		121,22						70,31			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST						S			
	1.02.07.4.00.03.04.29.	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	20	489,79	20	399,30	0	-	0	-	0,00	0,00	10	399,30	50,00	81,52		
	1.02.07.4.00.03.04.29.002.	4.1 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	100	489,79	100	399,30	0	-	0	-	0,00	0,00	100	399,30	100,00	81,52		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00						100,00			
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR						ST			
	4.00.03.4.00.03.04.	KECA																	
	4.00.03.4.00.03.04.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	8.216,24	80	1.126,38	100	1.654,12	16	453,58	15,99	27,42	48	1.579,96	19,20	19,23		
	4.00.03.4.00.03.04.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	500	62,62	100	12,87	200	18,00	200	18,20	100,00	101,11	300	31,07	60,00	49,61		
	4.00.03.4.00.03.04.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	4924	151,04	2676	61,91	2000	49,53	2000	48,83	100,00	98,59	4676	110,74	94,97	73,32		
	4.00.03.4.00.03.04.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	249	560,31	81	196,64	15	78,86	15	85,71	100,00	108,68	96	282,35	38,56	50,39		
	4.00.03.4.00.03.04.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	6	521,35	2	117,06	2	85,89	2	73,17	100,00	85,19	4	190,23	61,00	36,49		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.04.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	48	174,48	48	48,49			0	-	0,00	0,00	48	48,49	40,00	27,79		
	4.00.03.4.00.03.04.15.038.	5.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Sungai Piring	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Piring	100	1.143,29	39	170,22	100	135,82	85	113,99	85,00	83,92	124	284,20	49,69	24,86		
	4.00.03.4.00.03.04.15.046.	5.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	15	492,60	9	262,92			0	-	0,00	0,00	9	262,92	59,40	53,37		
	4.00.03.4.00.03.04.15.047.	5.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	197	510,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.04.15.080.	5.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Piring	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Piring	100	1.168,95	92	113,70	100	591,02	0	-	0,00	0,00	92	113,70	36,98	9,73		
	4.00.03.4.00.03.04.15.102.	5.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Piring (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Piring	100	1.480,55	99	42,57	100	366,00	0	-	0,00	0,00	99	42,57	39,54	2,88		
	4.00.03.4.00.03.04.15.117.	5.11 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Piring	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Piring	100	1.751,05	100	100,00	100	129,00	90	113,70	90,00	88,14	190	213,70	76,00	12,20		
	4.00.03.4.00.03.04.15.190.	5.12 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	2	100,00		-	2	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.04.15.205.	5.13 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Sungai Piring	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								47,92	47,14	47,92	47,14			42,78	26,20		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			10.782,83		1.979,80		1.960,56		747,49								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								80,87	85,80	80,87	85,80			52,22	39,16		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			R	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
39.	0.00.00.4.00.03.05.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.288,67	95	273,41	100	227,37	59	226,37	58,83	99,56	77	499,78	30,77	38,78	KECAMATAN CONCONG	
	0.00.00.4.00.03.05.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	6470	101,98	1294	76,20	1294	6,44	1294	6,44	100,00	100,00	2588	82,64	40,00	81,04		
	0.00.00.4.00.03.05.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	49,20	2	5,40	24	8,86	24	8,12	100,00	91,63	3	13,52	40,00	27,47		
	0.00.00.4.00.03.05.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	89,08	12	17,61	12	23,92	12	23,92	100,00	100,00	24	41,52	40,00	46,61		
	0.00.00.4.00.03.05.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	33	57,57	33	11,02	33	14,00	33	14,00	100,00	99,99	66	25,02	40,00	43,46		
	0.00.00.4.00.03.05.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	62553	26,48	16256	5,87	21624	6,20	21624	6,20	100,00	100,00	37880	12,07	60,56	45,57		
	0.00.00.4.00.03.05.01.016.	1.6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	6894	56,65	1566	12,05	1800	3,96	1800	3,94	100,00	99,53	3366	15,99	48,83	28,23		
	0.00.00.4.00.03.05.01.017.	1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	90	51,51	18	9,99	18	10,38	18	10,38	100,00	100,00	36	20,37	40,00	39,55		
	0.00.00.4.00.03.05.01.018.	1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	35	198,65	6	28,06	10	23,79	10	23,70	100,00	99,62	16	51,76	46,57	26,05		
	0.00.00.4.00.03.05.01.019.	1.9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ Teknis yang dibayarkan	4	33,60		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.05.01.020.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	390	539,95	76	90,43	74	113,01	74	112,86	100,00	99,87	150	203,29	38,43	37,65		
	0.00.00.4.00.03.05.01.027.	1.11 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	10	84,00	2	16,80	2	16,80	2	16,80	100,00	100,00	4	33,60	40,00	40,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,06	100,00	99,06			39,49	37,78		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.05.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	102,90	50	7,20	100	22,97	93	22,97	93,34	100,00	72	30,17	28,67	29,32		
	0.00.00.4.00.03.05.02.011.	2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi yang disediakan	4	19,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.05.02.024.	2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	64	14,40	32	7,20	8	4,17	8	4,17	100,00	100,00	40	11,37	62,50	78,92		
	0.00.00.4.00.03.05.02.028.	2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	120	9,00	0	-	24	4,31	24	4,31	100,00	100,00	24	4,31	20,00	47,83		
	0.00.00.4.00.03.05.02.052.	2.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	60,00	-	-	2	14,50	2	14,50	100,00	100,00	2	14,50	16,67	24,17		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			24,79	37,73		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.05.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	100	101,00	100	15,00	100	15,00	50	15,00	50,00	100,00	75	30,00	30,00	29,70		
	0.00.00.4.00.03.05.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perengkapannya yang disediakan	268	101,00	40	15,00	40	15,00	40	15,00	100,00	100,00	80	30,00	29,78	29,70		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			29,78	29,70		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.05.	KECA																	
	4.00.03.4.00.03.05.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	8.413,33	80	1.856,58	100	1.643,25	43	928,86	42,95	56,53	61	2.785,44	24,59	33,11		
	4.00.03.4.00.03.05.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	30	74,71	6	13,68	6	13,68	6	13,68	100,00	100,00	12	27,36	40,00	36,62		
	4.00.03.4.00.03.05.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	66	318,00	18	87,40	12	57,60	12	57,60	100,00	100,00	30	145,00	45,45	45,60		
	4.00.03.4.00.03.05.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	22	481,62	9	170,12	3	105,15	3	101,95	100,00	96,96	12	272,07	55,06	56,49		
	4.00.03.4.00.03.05.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya masyarakat yang dilaksanakan	11	708,85	3	190,89	2	107,09	2	107,09	100,00	100,00	5	297,97	45,45	42,04		
	4.00.03.4.00.03.05.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	2	210,01	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.05.15.006.	4.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	116	58,29	-	-	28	14,02	28	14,02	100,00	100,00	28	14,02	24,14	24,05		
	4.00.03.4.00.03.05.15.045.	4.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Concong Luar	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Concong Luar	95	838,80	88	276,20	95	59,70	95	59,70	100,00	100,00	183	335,90	38,53	40,05		
	4.00.03.4.00.03.05.15.046.	4.8 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	24	672,50	24	668,72	-	-	0	-	0,00	0,00	24	668,72	100,00	99,44		
	4.00.03.4.00.03.05.15.047.	4.9 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	4	450,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.05.15.087.	4.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Concong Luar	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Concong Luar	95	1.805,41	95	173,20	95	520,20	36	196,51	37,78	37,78	131	369,71	27,56	20,48		
	4.00.03.4.00.03.05.15.103.	4.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Concong Luar (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Concong Luar	95	1.480,55	43	165,97	95	366,00	47	180,57	49,34	49,34	89	346,54	94,18	23,41		
	4.00.03.4.00.03.05.15.156.	4.12 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Concong Luar	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Concong Luar	95	1.114,59	95	110,40	95	199,82	95	197,75	100,00	98,96	190	308,15	40,00	27,65		
	4.00.03.4.00.03.05.15.190.	4.13 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	5	100,00	-	-	5	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.05.15.206.	4.14 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Concong Luar	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										71,56	71,18	71,56	71,18			36,46	29,70		
Predikat kinerja										S	S	S	S			SR	SR		
Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program										9.905,91	2.152,19	1.908,59	1.193,20						
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										92,89	92,56	92,89	92,56			32,63	33,73		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										ST	ST	ST	ST			SR	SR		
A. Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																			
B. Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																			
C. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																			
D. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																			
40.	0.00.00.4.00.03.06.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.047,46	100	210,70	100	235,29	94	207,66	94,04	88,26	97	418,35	38,81	39,94	KECAMATAN ENOK	
	0.00.00.4.00.03.06.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	3170	15,30	650	3,15	650	3,15	650	3,15	100,00	100,00	1300	6,30	41,01	41,18		
	0.00.00.4.00.03.06.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2	73,80	2	18,00	2	19,80	2	19,58	100,00	98,86	4	37,58	40,00	50,91		
	0.00.00.4.00.03.06.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanjang Perizinannya	5	12,50	1	1,42	1	2,50	1	2,50	100,00	100,00	2	3,92	31,34	31,34		
	0.00.00.4.00.03.06.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	154,53	12	52,65	10	30,33	10	30,33	100,00	100,00	22	82,98	36,67	53,70		
	0.00.00.4.00.03.06.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	27	30,35	25	5,25	27	8,41	27	8,15	100,00	96,85	52	13,40	38,65	44,15		
	0.00.00.4.00.03.06.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	45235	28,40	9468	5,69	10384	6,24	10384	6,24	100,00	100,00	19852	11,93	43,89	42,01		
	0.00.00.4.00.03.06.01.013.	1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9	12,00	9	11,87	0	-	0	-	0,00	0,00	9	11,87	100,00	98,92		
	0.00.00.4.00.03.06.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	3000	17,50	600	3,00	900	4,50	900	4,50	100,00	100,00	1500	7,50	50,00	42,86		
	0.00.00.4.00.03.06.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	1884	21,24	400	4,16	500	5,20	500	5,15	100,00	99,00	900	9,31	47,77	43,82		
	0.00.00.4.00.03.06.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	38	66,40	10	16,00	9	14,40	9	14,40	100,00	100,00	19	30,40	50,00	45,78		
	0.00.00.4.00.03.06.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	40	212,55	6	33,89	10	37,35	8	27,72	80,00	74,20	14	61,61	35,73	28,99		
	0.00.00.4.00.03.06.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	12	93,60	-	-	4	28,80	4	28,80	100,00	100,00	4	28,80	33,33	30,77		
	0.00.00.4.00.03.06.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	161	266,19	18	47,31	46	64,71	36	49,95	77,59	77,19	54	97,26	33,64	36,54		
	0.00.00.4.00.03.06.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	25	43,10	5	8,30	7	9,90	5	7,20	64,94	72,73	10	15,50	38,18	35,96		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										94,04	93,76	94,04	93,76		44,30	44,78		
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST		SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.06.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	323,10	100	7,00	100	84,85	100	84,26	100,00	99,30	100	91,26	40,00	28,24			
	0.00.00.4.00.03.06.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	90	75,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.06.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	3	40,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.06.02.021.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	65	12,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.06.02.022.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	48,35		-	3	38,35	3	38,01	100,00	99,11	3	38,01	60,00	78,61			
	0.00.00.4.00.03.06.02.024.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	8	33,00	2	7,00	2	7,00	2	7,00	100,00	100,00	4	14,00	47,58	42,42			
	0.00.00.4.00.03.06.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	90	27,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.06.02.052.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	87,75		-	6	39,50	6	39,25	100,00	99,37	6	39,25	30,00	44,73			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	99,49	100,00	99,49		19,65	23,68		
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST		SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.06.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	80	12,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
	0.00.00.4.00.03.06.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	45	8,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.06.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	15	4,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00					
		Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR					
	4.00.03.4.00.03.06.	KECAMATAN							5.658,27	0	-									
	4.00.03.4.00.03.06.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	26.232,79	70	3.069,72	100	5.658,27	40	1.351,32	39,62	23,88	55	4.421,04	21,92	16,85			
	4.00.03.4.00.03.06.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	57,28	1	12,78	1	10,19	1	10,19	100,00	100,00	2	22,98	40,00	40,12			
	4.00.03.4.00.03.06.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	649	270,62	170	67,68	150	59,51	150	59,51	100,00	100,00	320	127,19	49,31	47,00			
	4.00.03.4.00.03.06.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	25	1.014,56	8	274,13	2	69,28	2	59,94	100,00	86,52	10	334,07	39,99	32,93			
	4.00.03.4.00.03.06.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	16	551,25	4	128,05	4	128,93	4	105,97	100,00	82,19	8	234,01	50,00	42,45			
	4.00.03.4.00.03.06.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	3	55,40	3	12,90	3	1,30	2	0,70	66,67	53,85	5	13,60	33,33	24,55			
	4.00.03.4.00.03.06.15.030.	4.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Enok	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Enok	90	1.362,78	89	257,02	90	128,03	90	122,39	100,00	95,60	179	379,41	39,77	27,84			
	4.00.03.4.00.03.06.15.031.	4.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Pusaran	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pusaran	90	1.225,68	89	521,90	90	160,91	90	156,74	100,00	97,41	179	678,64	39,68	55,37			
	4.00.03.4.00.03.06.15.032.	4.8 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Teluk Medan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Teluk Medan	90	1.239,39	86	231,55	90	128,03	90	122,92	100,00	96,01	176	354,47	39,05	28,60			
	4.00.03.4.00.03.06.15.033.	4.9 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Pantai Seberang Makmur	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pantai Seberang Makmur	90	1.146,63	84	235,18	90	128,03	90	126,35	100,00	98,69	174	361,54	38,71	31,53			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.06.15.046.	4.10 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	20	572,50	16	419,69			0	-	0,00	0,00	16	419,69	79,75	73,31		
	4.00.03.4.00.03.06.15.047.	4.11 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	10	634,49	2	160,70			0	-	0,00	0,00	2	160,70	18,08	25,33		
	4.00.03.4.00.03.06.15.072.	4.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Enok	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Enok	90	1.611,96	90	188,94	90	381,63	0	-	0,00	0,00	90	188,94	20,00	11,72		
	4.00.03.4.00.03.06.15.073.	4.13 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pusaran	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pusaran	90	1.670,46	-	-	90	467,28	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.06.15.074.	4.14 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Teluk Medan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Medan	90	2.159,25	0	-	90	510,62	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.06.15.075.	4.15 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pantai Seberang Makmur	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pantai Seberang Makmur	90	1.798,25	0	-	90	514,62	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.06.15.104.	4.16 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Enok (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Enok	90	1.480,55	0	-	90	366,00	28	112,97	31,11	30,87	28	112,97	31,11	7,63		
	4.00.03.4.00.03.06.15.105.	4.17 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pusaran (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pusaran	90	1.480,55	0	-	90	366,00	44	177,32	48,89	48,45	44	177,32	48,89	11,98		
	4.00.03.4.00.03.06.15.106.	4.18 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Teluk Medan (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Medan	90	1.480,55	0	-	90	366,00	35	140,65	38,89	38,43	35	140,65	38,89	9,50		
	4.00.03.4.00.03.06.15.107.	4.19 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pantai Seberang Makmur (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pantai Seberang Makmur	90	1.480,55	0	-	90	366,00	40	155,66	44,44	42,53	40	155,66	44,44	10,51		
	4.00.03.4.00.03.06.15.169.	4.20 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pusaran	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pusaran	90	1.249,54		106,20	90	252,74	0	-	0,00	0,00	0	106,20	0,00	8,50		
	4.00.03.4.00.03.06.15.170.	4.21 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Medan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan	90	760,75		78,00	90	209,40	0	-	0,00	0,00	0	106,20	0,00	13,96		
	4.00.03.4.00.03.06.15.171.	4.22 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pantai Seberang Makmur	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pantai Seberang Makmur	90	1.121,75		225,60	90	205,40	0	-	0,00	0,00	0	78,00	0,00	6,95		
	4.00.03.4.00.03.06.15.189.	4.23 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Enok	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Enok	90	1.308,04		149,40	90	338,39	0	-	0,00	0,00	0	225,60	0,00	17,25		
	4.00.03.4.00.03.06.15.190.	4.24 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	7	100,00	-	-	7	100,00	0	-	0,00	0,00	0	149,40	0,00	149,40		
	4.00.03.4.00.03.06.15.207.	4.25 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Enok	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.06.15.208.	4.26 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Pusaran	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.06.15.209.	4.27 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Teluk Medan	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.06.15.210.	4.28 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Pantai Seberang Makmur	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								39,62	0,00	39,62	0,00			23,25	24,16		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program								27.615,35	3.287,41	5.978,41	1.643,23						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								77,89	64,42	77,89	64,42			29,07	30,87		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	R	T	R			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
41.	0.00.00.4.00.03.07.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	886,69	73	118,15	100	156,43	93	146,33	92,73	93,54	83	264,48	33,17	29,83	KECAMATAN GAUNG	
	0.00.00.4.00.03.07.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	2690	13,46	291	1,50	1000	1,50	1000	1,50	100,00	100,00	1291	3,00	48,01	22,28		
	0.00.00.4.00.03.07.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	4	59,34	0	6,50	4	9,00	4	9,00	100,00	100,00	4	15,50	43,95	26,12		
	0.00.00.4.00.03.07.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanjang Perizinannya	20	21,40	3	3,00	4	3,00	4	3,00	100,00	100,00	7	6,00	33,70	28,04		
	0.00.00.4.00.03.07.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	108,00	2	21,60	12	25,60	12	25,60	100,00	100,00	14	47,20	48,00	43,70		
	0.00.00.4.00.03.07.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Yang Dikeluarkan	30	54,55	5	9,65	30	9,65	30	9,65	100,00	100,00	35	19,30	46,81	35,38		
	0.00.00.4.00.03.07.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	4	20,88	1	3,00	4	3,12	4	3,12	100,00	100,00	5	6,12	45,52	29,31		
	0.00.00.4.00.03.07.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	15	46,50	4	11,10	10	9,10	10	9,10	100,00	100,00	14	20,20	36,29	43,45		
	0.00.00.4.00.03.07.01.013.	1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	17,50	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.07.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	8876	64,74	1065	8,18	1310	10,06	1310	10,06	100,00	100,00	2375	18,24	26,76	28,17		
	0.00.00.4.00.03.07.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	190	89,56	15	5,40	15	30,96	15	30,96	100,00	100,00	30	36,36	15,71	40,60		
	0.00.00.4.00.03.07.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	15	82,42	1	6,22	5	12,44	1	2,34	20,00	18,81	2	8,56	14,10	10,39		
	0.00.00.4.00.03.07.01.020.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	253	308,35	34	42,00	36	42,00	36	42,00	100,00	100,00	70	84,00	27,47	27,24		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								92,73	92,62	92,73	92,62			32,19	27,89		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.07.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat (%)	95	462,97	74	4,77	95	25,00	95	25,00	100,00	100,00	85	29,77	35,60	6,43		
	0.00.00.4.00.03.07.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	2	150,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.07.02.010.	2.1 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	6	202,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.07.02.026.	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	46	44,95	4	1,00	2	2,00	2	2,00	100,00	100,00	6	3,00	12,60	6,67		
	0.00.00.4.00.03.07.02.028.	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	29	27,54	3	3,77	1	3,00	1	3,00	100,00	100,00	4	6,77	14,81	24,58		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.07.02.052.	2.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	37,98	0	-	2	20,00	2	20,00	100,00	100,00	2	20,00	50,00	52,67		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			15,48	16,78		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.07.	KECA							1.790,95	0	-								
	4.00.03.4.00.03.07.15.	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	87	9.153,27	23	1.917,70	80	1.790,95	57	889,30	71,50	49,66	40	2.807,00	46,11	30,67		
	4.00.03.4.00.03.07.15.001.	3.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	85	128,21	17	15,27	10	15,27	10	15,27	100,00	100,00	27	30,53	31,76	23,82		
	4.00.03.4.00.03.07.15.002.	3.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Dokumen/ Perizinan Yang Dikeluarkan	263	254,97	48	44,04	30	59,14	30	59,14	100,00	100,00	78	103,18	29,66	40,47		
	4.00.03.4.00.03.07.15.003.	3.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	21	988,33	12	468,83	5	119,90	5	113,13	100,00	94,35	17	581,96	80,95	58,88		
	4.00.03.4.00.03.07.15.004.	3.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	11	569,00	2	112,25	3	119,65	3	102,25	100,00	85,46	5	214,50	45,45	37,70		
	4.00.03.4.00.03.07.15.005.	3.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	3	204,76	2	33,80	2	33,40	0	2,40	7,19	7,19	2	36,20	14,29	17,68		
	4.00.03.4.00.03.07.15.042.	3.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Kuala Lahang	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Kuala Lahang	100	1.059,24	100	134,00	100	157,56	90	142,05	90,00	90,16	190	276,05	38,00	26,06		
	4.00.03.4.00.03.07.15.046.	3.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	16	418,75	16	170,34			0	-	0,00	0,00	16	170,34	40,00	40,68		
	4.00.03.4.00.03.07.15.047.	3.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	11	929,46	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.07.15.108.	3.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kuala Lahang (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuala Lahang	100	1.480,55	89	189,86	100	366,00	50	181,61	50,00	49,62	139	371,47	27,80	25,09		
	4.00.03.4.00.03.07.15.120.	3.10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Lahang	100	1.311,97	83	342,86	100	337,76	82	273,45	82,00	80,96	165	616,31	33,00	46,98		
	4.00.03.4.00.03.07.15.172.	3.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kuala Lahang	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuala Lahang	100	1.608,03		406,45	100	382,27	0	-	0,00	0,00	0	406,45	0,00	25,28		
	4.00.03.4.00.03.07.15.190.	3.12 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	3	100,00		-	3	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.07.15.211.	3.13 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Kuala Lahang	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								57,20	55,25	57,20	55,25			26,22	26,36		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			10.502,93		2.040,62		1.972,38		1.060,63								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								83,31	82,62	83,31	82,62			24,63	23,68		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
42.	0.00.00.4.00.03.08.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.139,04	100	192,10	100	236,19	89	194,96	89,49	82,54	95	387,06	37,90	33,98	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
	0.00.00.4.00.03.08.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	5017	25,35	950	4,26	950	4,80	950	4,80	100,00	100,00	1900	9,06	37,87	35,74		
	0.00.00.4.00.03.08.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	4	100,38	4	15,76	4	17,58	4	14,13	91,75	80,36	8	29,89	191,75	29,78		
	0.00.00.4.00.03.08.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Tenaga Kebersihan kantor yang dibayarkan	20	210,06	4	40,05	4	57,39	4	57,22	100,00	99,71	8	97,27	40,00	46,30		
	0.00.00.4.00.03.08.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	27	77,73	27	14,35	9	15,38	9	15,18	100,00	98,66	36	29,52	133,33	37,98		
	0.00.00.4.00.03.08.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	174000	52,20	36000	9,94	30000	9,00	26944	8,08	89,81	89,81	62944	18,02	36,17	34,52		
	0.00.00.4.00.03.08.01.016.	1.6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	1800	17,00	300	3,00	300	3,00	300	3,00	100,00	100,00	600	6,00	33,33	35,29		
	0.00.00.4.00.03.08.01.017.	1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3800	66,50	700	12,25	1	12,25	1	10,61	100,00	86,57	701	22,86	18,45	34,37		
	0.00.00.4.00.03.08.01.018.	1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	31	171,07	6	27,11	7	33,44	3	16,25	44,46	48,59	9	43,36	29,39	25,34		
	0.00.00.4.00.03.08.01.020.	1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	301	418,75	59	65,39	62	83,35	49	65,70	79,37	78,82	108	131,09	35,95	31,30		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								89,49	86,95	89,49	86,95			61,81	34,52		
		Predikat kinerja								T	T	T	T			R	SR		
	0.00.00.4.00.03.08.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	298,38	80	62,74	100	20,28	100	19,06	100,00	93,98	90	81,80	36,00	27,41		
	0.00.00.4.00.03.08.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	1	64,82	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.08.02.006.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang disediakan	4	18,00	4	14,85	0	-	0	-	0,00	0,00	4	14,85	100,00	82,50		
	0.00.00.4.00.03.08.02.007.	2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	3	32,02	3	19,77	0	-	0	-	0,00	0,00	3	19,77	100,00	61,74		
	0.00.00.4.00.03.08.02.008.	2.4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	2	4,85	2	1,85	0	-	0	-	0,00	0,00	2	1,85	100,00	38,14		
	0.00.00.4.00.03.08.02.009.	2.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	4	18,80	4	18,70	0	-	0	-	0,00	0,00	4	18,70	100,00	99,47		
	0.00.00.4.00.03.08.02.022.	2.6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	4	16,42	2	2,42	0	-	0	-	0,00	0,00	2	2,42	50,00	14,74		
	0.00.00.4.00.03.08.02.024.	2.7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	22	20,45	5	4,15	6	4,30	6	3,90	100,00	90,70	11	8,05	50,00	39,36		
	0.00.00.4.00.03.08.02.028.	2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	4	6,50	2	1,00	2	1,00	2	1,00	100,00	100,00	4	2,00	100,00	30,77		
	0.00.00.4.00.03.08.02.040.	2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang direhabilitasi	400	9,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.08.02.042.	2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	57,54	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.08.02.052.	2.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	49,98	-	4	14,98	4	14,16	100,00	94,53	4	14,16	40,00	28,33			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	95,07	100,00	95,07			58,18	35,91		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			R	SR		
	0.00.00.4.00.03.08.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	100	69,60	100	21,62	100	16,80	100	16,80	100,00	100,00	100	38,42	40,00	55,20		
	0.00.00.4.00.03.08.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	177	69,60	48	21,62	48	16,80	48	16,80	100,00	100,00	96	38,42	54,04	55,20		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	100,00	100,00	100,00			54,04	55,20		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			R	R		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.08.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	80	13,00		-			0	-		0,00		-		0,00		
	0.00.00.4.00.03.08.05.002.	4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	400	13,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.08.	KECA							4.255,99	0	-								
	4.00.03.4.00.03.08.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	19.947,75	100	3.140,87	100	4.255,99	57	1.594,57	57,42	37,47	79	4.735,44	31,48	23,74		
	4.00.03.4.00.03.08.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	60	67,25	12	10,85	12	11,40	12	11,40	100,00	100,00	24	22,25	40,00	33,09		
	4.00.03.4.00.03.08.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	100	67,92	100	29,64	100	8,16	100	7,80	100,00	95,59	200	37,44	40,00	55,12		
	4.00.03.4.00.03.08.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	24	633,22	8	164,23	3	94,49	2	65,12	81,34	68,91	10	229,34	43,50	36,22		
	4.00.03.4.00.03.08.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	9	561,34	2	108,46	1	78,58	1	78,12	100,00	99,42	3	186,58	33,33	33,24		
	4.00.03.4.00.03.08.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	5	244,34	5	57,71			0	-	0,00	0,00	5	57,71	20,00	23,62		
	4.00.03.4.00.03.08.15.006.	5.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	92	203,51	18	39,41	54	39,41	54	39,41	100,00	100,00	72	78,82	78,26	38,73		
	4.00.03.4.00.03.08.15.036.	5.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Teluk Pinang	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Teluk Pinang	90	1.182,60	90	191,46	90	129,77	90	125,39	100,00	96,62	180	316,85	40,00	26,79		
	4.00.03.4.00.03.08.15.037.	5.8 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Tanjung Harapan	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Tanjung Harapan	90	1.023,36	90	168,45	90	105,84	90	99,90	100,00	94,39	180	268,35	40,00	26,22		
	4.00.03.4.00.03.08.15.040.	5.9 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Sungai Empat	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sungai Empat	90	1.073,88	90	268,89	90	118,47	69	90,86	76,73	76,70	159	359,75	35,35	33,50		
	4.00.03.4.00.03.08.15.046.	5.10 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	19	561,95	19	519,21			0	-	0,00	0,00	19	519,21	100,00	92,39		
	4.00.03.4.00.03.08.15.047.	5.11 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	8	726,72	3	167,46			0	-	0,00	0,00	3	167,46	37,50	23,04		
	4.00.03.4.00.03.08.15.109.	5.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Teluk Pinang (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Pinang	90	1.480,55	90	149,51	90	366,00	45	182,37	49,83	49,83	135	331,88	29,97	22,42		
	4.00.03.4.00.03.08.15.110.	5.13 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tanjung Harapan (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Harapan	90	1.480,55	90	148,25	90	366,00	45	182,39	49,83	49,83	135	330,64	29,97	22,33		
	4.00.03.4.00.03.08.15.111.	5.14 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Empat (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Empat	90	1.480,55	90	158,07	90	377,81	43	181,86	48,14	48,14	133	339,93	29,63	22,96		
	4.00.03.4.00.03.08.15.127.	5.15 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Pinang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Pinang	90	1.301,16	90	192,50	90	262,03	90	251,63	100,00	96,03	180	444,13	40,00	34,13		
	4.00.03.4.00.03.08.15.128.	5.16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Harapan	90	396,20	90	56,10	90	103,16	90	100,16	100,00	97,09	180	156,26	40,00	39,44		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET		
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)				
	4.00.03.4.00.03.08.15.129.	5.17 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Empat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Empat	90	945,64	90	111,10	90	178,16	90	178,16	100,00	100,00	180	289,26	40,00	30,59				
	4.00.03.4.00.03.08.15.173.	5.18 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Teluk Pinang	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Pinang	90	1.618,84	90	139,84	90	457,99	0	-	0,00	0,00	90	139,84	20,00	8,64				
	4.00.03.4.00.03.08.15.174.	5.19 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Tanjung Harapan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Harapan	90	2.523,80	90	250,07	90	616,86	0	-	0,00	0,00	90	250,07	20,00	9,91				
	4.00.03.4.00.03.08.15.175.	5.20 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sungai Empat	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Empat	90	1.974,36	90	209,67	90	541,86	0	-	0,00	0,00	90	209,67	20,00	10,62				
	4.00.03.4.00.03.08.15.190.	5.21 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
	4.00.03.4.00.03.08.15.212.	5.22 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Teluk Pinang	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
	4.00.03.4.00.03.08.15.213.	5.23 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Tanjung Harapan	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
	4.00.03.4.00.03.08.15.214.	5.24 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Sungai Empat	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
		Rata-rata capaian kinerja (%)										57,42	55,84	57,42	55,84			32,40	25,96		
		Predikat kinerja										R	R	R	R			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program										21.467,77	3.417,33	4.529,26	1.825,39						
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program										86,73	84,46	86,73	84,46			41,29	30,32		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																			
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																			
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																			
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																			
43.	0.00.00.4.00.03.09.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	1.135,92	90	196,85	100	292,97	100	261,04	100,00	89,10	95	457,89	38,08	40,31	KECAMATAN KATEMAN			
	0.00.00.4.00.03.09.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	3680	11,04	736	2,21	436	1,80	436	1,80	100,00	100,00	1172	4,01	31,85	36,30				
	0.00.00.4.00.03.09.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	72,91	2	4,76	3	14,80	3	14,80	100,00	100,00	5	19,56	32,20	26,83				
	0.00.00.4.00.03.09.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	114,24	11	21,05	7	25,99	7	25,99	100,00	100,00	18	47,04	30,07	41,17				
	0.00.00.4.00.03.09.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	17	20,39	17	3,53	17	6,26	17	6,26	100,00	100,00	34	9,79	40,00	48,01				
	0.00.00.4.00.03.09.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	89259	50,77	18234	10,16	19418	11,34	19418	11,19	100,00	98,63	37652	21,35	42,18	42,06				
	0.00.00.4.00.03.09.01.018.	1.6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	46	259,23	10	51,82	17	66,09	14	53,44	82,35	80,86	24	105,26	52,17	40,60				
	0.00.00.4.00.03.09.01.020.	1.7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	197	355,35	21	57,51	55	119,90	47	100,77	85,45	84,05	68	158,28	34,52	44,54				
	0.00.00.4.00.03.09.01.027.	1.8 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	35	252,00	6	45,80	7	46,80	7	46,80	100,00	100,00	13	92,60	38,20	36,75				
		Rata-rata capaian kinerja (%)										95,98	95,44	95,98	95,44			37,65	39,53		
		Predikat kinerja										ST	ST	ST	ST			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.09.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	39,01	0	-	100	24,01	100	23,86	100,00	99,40	50	23,86	62,50	61,17		
	0.00.00.4.00.03.09.02.052.	2.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	39,01		-	4	24,01	4	23,86	100,00	99,40	4	23,86	100,00	61,17		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	99,40	100,00	99,40			100,00	61,17		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			ST	R		
	4.00.03.4.00.03.09.	KECA																	
	4.00.03.4.00.03.09.15.	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	19.986,94	90	2.892,38	100	4.425,07	82	1.469,72	81,99	33,21	86	4.362,10	34,50	21,82		
	4.00.03.4.00.03.09.15.001.	3.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	106,80	1	17,40	1	18,30	1	18,30	100,00	100,00	2	35,70	40,00	33,43		
	4.00.03.4.00.03.09.15.002.	3.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	90	146,63	18	25,92	30	52,95	30	52,95	100,00	100,00	48	78,87	53,33	53,79		
	4.00.03.4.00.03.09.15.003.	3.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	48	1.186,54	10	262,61	3	94,03	3	83,43	100,00	88,73	13	346,05	26,75	29,16		
	4.00.03.4.00.03.09.15.004.	3.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	5	584,40	1	127,69	2	111,82	2	111,82	100,00	100,00	3	239,51	60,00	40,98		
	4.00.03.4.00.03.09.15.025.	3.5 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Taga Raja	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Taga Raja	94	1.039,46	88	122,03	94	302,11	94	299,56	100,00	99,15	182	421,58	38,80	40,56		
	4.00.03.4.00.03.09.15.026.	3.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Amal Bhakti	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Amal Bhakti	94	890,33	24	88,76	94	71,13	94	65,73	100,00	92,41	118	154,48	25,20	17,35		
	4.00.03.4.00.03.09.15.027.	3.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Bandar Sri Gemilang	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Bandar Sri Gemilang	94	1.092,96	49	164,94	94	116,67	94	111,66	100,00	95,71	143	276,60	30,40	25,31		
	4.00.03.4.00.03.09.15.046.	3.8 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	18	616,25	1	51,11			0	-	0,00	0,00	1	51,11	8,00	8,29		
	4.00.03.4.00.03.09.15.047.	3.9 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	5	721,92	1	181,55			0	-	0,00	0,00	1	181,55	19,60	25,15		
	4.00.03.4.00.03.09.15.067.	3.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Taga Raja	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Taga Raja	93	1.642,94	93	188,00	93	350,08	0	-	0,00	0,00	93	188,00	20,00	11,44		
	4.00.03.4.00.03.09.15.068.	3.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Amal Bhakti	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Amal Bhakti	93	2.149,04	93	212,06	93	538,68	0	-	0,00	0,00	93	212,06	20,00	9,87		
	4.00.03.4.00.03.09.15.069.	3.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Bandar Sri Gemilang	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bandar Sri Gemilang	93	2.197,50	93	195,00	93	544,43	0	-	0,00	0,00	93	195,00	20,00	8,87		
	4.00.03.4.00.03.09.15.112.	3.13 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Taga Raja (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Taga Raja	92	1.480,55	92	370,14	92	366,00	0	-	0,00	0,00	92	370,14	20,00	25,00		
	4.00.03.4.00.03.09.15.113.	3.14 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Amal Bhakti (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Amal Bhakti	93	1.480,55	93	370,14	93	366,00	0	-	0,00	0,00	93	370,14	20,00	25,00		
	4.00.03.4.00.03.09.15.114.	3.15 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Bandar Sri Gemilang (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bandar Sri Gemilang	93	1.480,55	93	275,20	93	366,00	0	-	0,00	0,00	93	275,20	20,00	18,59		
	4.00.03.4.00.03.09.15.139.	3.16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taga Raja	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Taga Raja	96	1.277,06	96	69,26	96	369,94	96	369,94	100,00	100,00	192	439,20	40,00	34,39		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.09.15.140.	3.17 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Amal Bhakti	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Amal Bhakti	96	770,96	96	70,59	96	181,34	96	180,74	100,00	99,67	192	251,33	40,00	32,60		
	4.00.03.4.00.03.09.15.141.	3.18 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandar Sri Gemilang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Bandar Sri Gemilang	95	722,50	95	100,00	95	175,59	95	175,59	100,00	100,00	190	275,59	40,00	38,14		
	4.00.03.4.00.03.09.15.190.	3.19 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	2	100,00		-	2	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.09.15.215.	3.20 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Taga Raja	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.09.15.216.	3.21 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Amal Bhakti	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.09.15.217.	3.22 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Bandar Sri Gemilang	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)							50,00		48,78	50,00	48,78			24,64	21,72		
		Predikat kinerja							SR		SR	SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			21.161,87		3.089,23		4.742,05		1.754,62								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program							81,99		81,21	81,99	81,21			54,10	40,81		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program							T		T	T	T			S	R		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
44.	0.00.00.4.00.03.10.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	1.206,57	100	222,86	100	216,27	93	201,92	92,54	93,37	96	424,79	38,51	35,21	KECAMATAN KEMPAS	
	0.00.00.4.00.03.10.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terlayani	3425	16,50	685	2,10	2	2,10	2	2,10	100,00	100,00	687	4,20	20,06	25,45		
	0.00.00.4.00.03.10.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	72,00	3	12,23	12	15,00	12	13,55	100,00	90,30	15	25,78	40,00	35,80		
	0.00.00.4.00.03.10.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang terbayarkan x bulan	2	18,00	2	18,00			0	-	0,00	0,00	2	18,00	100,00	100,00		
	0.00.00.4.00.03.10.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	30	86,06	30	13,40	30	18,19	30	18,19	100,00	100,00	60	31,59	40,00	36,70		
	0.00.00.4.00.03.10.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak / digandakan	41360	10,34	4560	1,50	8000	2,00	8000	2,00	100,00	100,00	12560	3,50	30,37	33,85		
	0.00.00.4.00.03.10.01.013.	1.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	3,00	1	2,85			0	-	0,00	0,00	0	2,85	0,00	95,00		
	0.00.00.4.00.03.10.01.015.	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	12	3,60		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.10.01.016.	1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak	7518	78,42	1180	9,35	1600	14,56	973	9,35	60,84	64,22	2153	18,70	28,64	23,84		
	0.00.00.4.00.03.10.01.017.	1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan yang disediakan makanan dan minuman	15	94,48	3	18,12	3	10,84	2	7,00	64,58	64,58	5	25,12	32,92	26,59		
	0.00.00.4.00.03.10.01.018.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke Pekanbaru/ kota lainnya di luar Kabupaten	30	171,68	6	32,52	10	17,50	10	16,98	100,00	97,03	16	49,50	53,33	28,83		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.10.01.019.	1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran yang terbayarkan x bulan	13	146,40		-	4	38,40	4	38,40	100,00	100,00	4	38,40	30,77	26,23		
	0.00.00.4.00.03.10.01.020.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke tembilang/daerah lainnya di dalam kabupaten	302	436,49	39	87,61	60	85,68	60	82,36	100,00	96,12	99	169,96	32,78	38,94		
	0.00.00.4.00.03.10.01.026.	1.13 Penyediaan Jasa Penggunaan Gedung kantor	Jumlah jasa penggunaan gedung x bulan	12	55,20	12	10,80	12	12,00	12	12,00	100,00	100,00	24	22,80	40,00	41,30		
	0.00.00.4.00.03.10.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	24	14,40	24	14,40			0	-	0,00	0,00	24	14,40	100,00	100,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				92,54		91,22		92,54		91,22						39,20		43,75	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST						SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.10.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	94	191,90	94	5,67	100	20,20	69	15,17	69,35	75,12	82	20,84	34,76	10,86		
	0.00.00.4.00.03.10.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbeli	4	91,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.10.02.017.	2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1	1,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.10.02.022.	2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	5	25,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.10.02.024.	2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	111	42,90	15	5,67	15	8,20	6	3,17	38,71	38,71	21	8,84	18,74	20,62		
	0.00.00.4.00.03.10.02.051.	2.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipekanjang Perizinannya	1	1,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.10.02.052.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	3	31,00		-	2	12,00	2	12,00	100,00	100,00	2	12,00	66,67	38,71		
Rata-rata capaian kinerja (%)				69,35		69,35		69,35		69,35						14,24		9,89	
Predikat kinerja				S		S		S		S						SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.10.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	100	28,70	100	4,20	100	4,90	100	4,90	100,00	100,00	100	9,10	40,00	31,71		
	0.00.00.4.00.03.10.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	94	28,70	14	4,20	14	4,90	14	4,90	100,00	100,00	28	9,10	29,53	31,71		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		100,00		100,00		100,00						29,53		31,71	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST						SR		SR	
	4.00.03.4.00.03.10.	KECA																	
	4.00.03.4.00.03.10.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	37	13.978,86	14	1.985,55	37	2.932,93	19	583,11	52,20	19,88	17	2.568,66	18,20	18,38		
	4.00.03.4.00.03.10.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan / rekomendasi Perencanaan Pembangunan yang diusulkan oleh Desa dan Kelurahan	4000	49,72	800	9,03	800	9,19	800	9,19	100,00	100,00	1600	18,22	40,00	36,64		
	4.00.03.4.00.03.10.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Dokumen / Berkas yang dikeluarkan oleh kecamatan	300	293,50	60	59,00	60	59,80	60	59,80	100,00	100,00	120	118,80	40,00	40,48		
	4.00.03.4.00.03.10.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Organisasi yang kegiatan nya terakomodir diantaranya kegiatan PKK, Bansos Rastra, serta kegiatan Hari Kemerdekaan	10	459,92	2	142,60	2	78,51	2	60,16	76,63	76,63	3	202,76	32,53	44,08		
	4.00.03.4.00.03.10.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah peserta MTQ yang mewakili kecamatan (orang) serta jumlah Lembaga Adat yang berpartisipasi pada Kegiatan Grebee Suro	15	727,06	3	115,60	3	136,27	2	96,55	70,85	70,85	5	212,15	32,57	29,18		
	4.00.03.4.00.03.10.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olahraga yang terakomodir seperti Kegiatan Bupati Cup	5	206,36	1	28,09			0	-	0,00	0,00	1	28,09	18,80	13,61		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.10.15.006.	4.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1	224,05	1	224,05			0	-	0,00	0,00	1	224,05	92,00	100,00		
	4.00.03.4.00.03.10.15.029.	4.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Kempas Jaya	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kempas Jaya	450	937,46	59	211,60	1	83,20	1	82,98	100,00	99,75	60	294,59	13,22	31,42		
	4.00.03.4.00.03.10.15.044.	4.8 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Harapan Tani	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Harapan Tani	450	948,11	0	-	1	85,70	1	85,49	100,00	99,77	1	85,49	0,22	9,02		
	4.00.03.4.00.03.10.15.046.	4.9 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	8	322,00	7	229,53			0	-	0,00	0,00	7	229,53	83,00	71,28		
	4.00.03.4.00.03.10.15.047.	4.10 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	8	709,59	2	173,60			0	-	0,00	0,00	2	173,60	30,50	24,47		
	4.00.03.4.00.03.10.15.071.	4.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kempas Jaya	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kempas Jaya	90	534,79	0	-	85	341,77	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.10.15.086.	4.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Harapan Tani	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Harapan Tani	90	999,13	89	327,00	85	377,36	0	-	0,00	0,00	89	327,00	39,60	32,73		
	4.00.03.4.00.03.10.15.115.	4.13 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kempas Jaya (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kempas Jaya	90	1.480,55	15	165,66	85	366,00	42	179,76	49,11	49,11	57	345,42	63,39	23,33		
	4.00.03.4.00.03.10.15.116.	4.14 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Harapan Tani (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Harapan Tani	90	1.480,55	90	30,27	85	374,24	13	55,30	14,78	14,78	103	85,57	22,79	5,78		
	4.00.03.4.00.03.10.15.161.	4.15 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kempas Jaya	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kempas Jaya	90	2.385,21	73	177,53	85	378,25	76	339,25	89,65	89,69	149	516,78	33,13	21,67		
	4.00.03.4.00.03.10.15.162.	4.16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Tani	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Harapan Tani	90	1.920,87	71	92,00	85	342,66	70	280,60	81,92	81,89	141	372,60	31,27	19,40		
	4.00.03.4.00.03.10.15.190.	4.17 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	5	100,00		-	5	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.10.15.218.	4.18 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Kempas Jaya	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.10.15.219.	4.19 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Harapan Tani	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								52,20	52,16	52,20	52,16			30,16	26,48		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				15.406,03		2.218,28		3.174,31		805,11							
										Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program		78,52		78,19		78,52		78,19	
										Predikat Kinerja Dari Seluruh Program		T		T		T		T	
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
45.	0.00.00.4.00.03.11.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	948,90	88	176,37	100	228,88	100	223,73	100,00	97,75	94	400,10	37,52	42,16	KECAMATAN KEMUNING	
	0.00.00.4.00.03.11.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	1813	9,85	400	2,10	450	5,85	450	5,85	100,00	100,00	400	7,95	22,06	80,74		
	0.00.00.4.00.03.11.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	32,56	1	4,55	3	7,69	3	7,41	100,00	96,38	4	11,96	56,80	36,74		
	0.00.00.4.00.03.11.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	20	24,82	4	5,70	4	3,90	4	3,90	100,00	100,00	8	9,60	40,00	38,68		
	0.00.00.4.00.03.11.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	3	86,01	3	17,64	3	30,44	3	30,44	100,00	100,00	6	48,08	80,00	55,90		
	0.00.00.4.00.03.11.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	25	24,61	25	5,42	22	4,68	22	4,68	100,00	100,00	47	10,10	75,20	41,06		
	0.00.00.4.00.03.11.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	60128	25,13	13255	4,72	22546	7,59	22546	7,59	100,00	100,00	35801	12,31	59,54	48,99		
	0.00.00.4.00.03.11.01.016.	1.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan Kantor	4445	34,13	980	7,65	830	6,47	830	6,47	100,00	100,00	1810	14,11	40,72	41,35		
	0.00.00.4.00.03.11.01.017.	1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1427	57,10	0	12,56	288	10,72	288	10,72	100,00	100,00	288	23,28	20,18	40,77		
	0.00.00.4.00.03.11.01.018.	1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	26	161,88	5	27,35	8	25,22	8	21,57	100,00	85,53	13	48,92	50,15	30,22		
	0.00.00.4.00.03.11.01.019.	1.10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	15	166,22	4	36,00	4	36,00	4	36,00	100,00	100,00	8	72,00	53,33	43,32		
	0.00.00.4.00.03.11.01.020.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	154	271,18	14	40,68	32	78,33	32	77,10	100,00	98,44	46	117,78	30,16	43,43		
	0.00.00.4.00.03.11.01.027.	1.12 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	6	55,41	2	12,00	2	12,00	2	12,00	100,00	100,00	4	24,00	66,67	43,32		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00		98,36		100,00	98,36			49,57	45,38		
		Predikat kinerja						ST		ST		ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.11.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	243,64	90	10,20	100	7,50	100	7,50	100,00	100,00	95	17,70	38,00	7,26		
	0.00.00.4.00.03.11.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	3	86,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.11.02.024.	2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	18	38,14	5	10,20	4	7,50	4	7,50	100,00	100,00	9	17,70	50,00	46,41		
	0.00.00.4.00.03.11.02.042.	2.3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	4	53,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.11.02.052.	2.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	66,50		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00		100,00		100,00	100,00			12,50	11,60		
		Predikat kinerja						ST		ST		ST	ST			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.11.	KECA																	
	4.00.03.4.00.03.11.15.	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	8.402,08	93	1.247,40	100	1.807,25	100	748,38	100,00	41,41	96	1.995,78	38,57	23,75		
	4.00.03.4.00.03.11.15.001.	3.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	95,40	1	19,22	1	17,66	1	17,66	100,00	100,00	2	36,88	40,15	38,66		
	4.00.03.4.00.03.11.15.002.	3.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	12	256,94	3	54,60	3	52,92	3	52,92	100,00	100,00	6	107,52	46,48	41,85		
	4.00.03.4.00.03.11.15.003.	3.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	29	951,11	6	168,55	3	229,20	3	226,96	100,00	99,02	9	395,51	29,81	41,58		
	4.00.03.4.00.03.11.15.004.	3.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	5	645,51	1	164,55	1	85,40	1	83,00	100,00	97,19	2	247,55	45,49	38,35		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.11.15.043.	3.5 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Selensen	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Selensen	100	1.144,20	12	122,69	100	136,05	100	125,34	100,00	92,13	112	248,04	112,05	21,68		
	4.00.03.4.00.03.11.15.047.	3.6 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	5	708,38	1	113,91			0	-	0,00	0,00	0	113,91	0,00	16,08		
	4.00.03.4.00.03.11.15.085.	3.7 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Selensen	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selensen	100	1.924,05	13	283,39	100	477,52	0	-	0,00	0,00	13	283,39	12,62	14,73		
	4.00.03.4.00.03.11.15.144.	3.8 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selensen	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Selensen	100	995,95	16	156,50	100	242,50	100	242,50	100,00	100,00	116	399,00	115,58	40,06		
	4.00.03.4.00.03.11.15.176.	3.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Selensen (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selensen	100	1.480,55		164,00	100	366,00	0	-	0,00	0,00	0	164,00	0,00	11,08		
	4.00.03.4.00.03.11.15.190.	3.10 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	8	100,00		-	8	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.11.15.220.	3.11 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Selensen	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)							60,00		58,83	60,00	58,83			36,56	24,01		
		Predikat kinerja							R		R	R	R			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			9.594,62		1.433,98		2.043,63		979,61								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program							86,67		85,73	86,67	85,73			32,88	26,99		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program							T		T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
46.	0.00.00.4.00.03.12.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	1.021,81	100	258,18	100	217,09	92	207,37	92,06	95,52	96	465,55	38	45,56	KECAMATAN KERITANG	
	0.00.00.4.00.03.12.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	3750	24,00	850	2,48	350	9,60	66	1,80	18,75	19	916	4,28	24	18		
	0.00.00.4.00.03.12.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	72,00	3	13,90	12	7,80	12	7,80	100,00	100	15	21,70	100	30		
	0.00.00.4.00.03.12.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	4	3,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	124,22	12	28,16	12	44,38	12	44,38	100,00	100,00	24	72,54	40,00	58,40		
	0.00.00.4.00.03.12.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	24	42,81	24	7,58	24	7,83	24	7,83	100,00	100,00	48	15,41	40,00	36,00		
	0.00.00.4.00.03.12.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	20964	10,04	3824	1,29	4121	1,91	3872	1,80	93,95	94,66	7696	3,09	36,71	30,79		
	0.00.00.4.00.03.12.01.012.	1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	32	9,56	32	1,18	1	2,13	1	2,13	100,00	100,00	33	3,31	41,25	34,59		
	0.00.00.4.00.03.12.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	120	5,04	24	0,56	24	1,68	24	1,68	100,00	100,00	48	2,24	40,00	44,44		
	0.00.00.4.00.03.12.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	2720	21,94	382	-			0	-	0,00	0,00	382	-	14,04	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.12.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	34	39,60	8	9,60	4	4,56	4	4,56	100,00	100,00	12	14,16	35,29	35,76		
	0.00.00.4.00.03.12.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	32	166,16	8	25,81	5	20,55	5	18,84	100,00	91,68	13	44,65	40,63	26,87		
	0.00.00.4.00.03.12.01.020.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	190	428,46	55	154,43	79	102,26	79	102,15	100,00	99,89	134	256,58	28,21	59,88		
	0.00.00.4.00.03.12.01.027.	1.13 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	22	75,00	6	13,20	2	14,40	2	14,40	100,00	100,00	8	27,60	36,36	36,80		
Rata-rata capaian kinerja (%)				92,06		91,36		92,06		91,36		92,06		91,36		36,69		31,65	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST		ST		SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.12.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	573,15	93	21,00	100	31,60	100	31,60	100,00	100,00	96	52,60	38,56	9,18		
	0.00.00.4.00.03.12.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	4	226,20	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.007.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.009.	2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	1	4,80	1	4,00			0	-	0,00	0,00	1	4,00	100,00	83,33		
	0.00.00.4.00.03.12.02.010.	2.4 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	3	36,00	3	12,00	2	13,00	2	13,00	100,00	100,00	5	25,00	166,67	69,44		
	0.00.00.4.00.03.12.02.015.	2.5 Pengadaan Kendaraan jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan jabatan/dinas / Operasional	3	60,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.016.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	8	8,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.021.	2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	100	12,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.022.	2.8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	200	20,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.024.	2.9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	3	22,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.028.	2.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	76	30,35	12	5,00	11	4,10	11	4,10	100,00	100,00	23	9,10	30,26	29,98		
	0.00.00.4.00.03.12.02.041.	2.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	100	20,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.042.	2.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	3	100,80	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.02.052.	2.13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	33,00		-	2	14,50	2	14,50	100,00	100,00	2	14,50	50,00	43,94		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		26,69		17,44	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST		ST		SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.12.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	80	32,90		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	38	17,30	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.03.004.	3.2 Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang disediakan	25	7,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.12.03.005.	3.3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	27	8,10	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
	4.00.03.4.00.03.12.	KECA		1.161,50		1.161,50		1.161,50		1.161,50		1.161,50		1.161,50		1.161,50		1.161,50	
	4.00.03.4.00.03.12.15.	3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	9.207,63	65	1.238,32	100	1.161,50	56	104,48	55,56	9,00	60	1.342,81	24,07	14,58		
	4.00.03.4.00.03.12.15.001.	3.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	56,06	1	16,93	1	12,14	1	11,96	100,00	98,56	2	28,89	40,00	51,53		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.12.15.002.	3.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	3624	85,92	500	11,36	87	28,56	87,00	28,56	100,00	100,00	587	39,92	16,20	46,46		
	4.00.03.4.00.03.12.15.003.	3.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	33	1.232,92	8	273,78	2	80,99	2,00	73,99	100,00	91,36	10	347,77	30,88	28,21		
	4.00.03.4.00.03.12.15.004.	3.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	12	328,25	6	149,70	2	32,85	2	32,79	100,00	99,80	8	182,48	66,67	55,59		
	4.00.03.4.00.03.12.15.005.	3.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	1	69,83		-		-		-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.12.15.041.	3.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Kotabaru Rete	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Kotabaru Rete	100	801,60	45	278,68	100	58,60	100,00	53,40	100,00	91,13	145	332,08	145,00	41,43		
	4.00.03.4.00.03.12.15.046.	3.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	38	1.010,97	38	297,72			0,00	-	0,00	0,00	38	297,72	100,00	29,45		
	4.00.03.4.00.03.12.15.047.	3.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	10	1.021,52	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.12.15.118.	3.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kotabaru Rete (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kotabaru Rete	90	1.480,55	0	-	90	366,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.12.15.177.	3.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kotabaru Rete	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kotabaru Rete	90	1.529,88		154,20			0	-	0,00	0,00	0	154,20	0,00	10,08		
	4.00.03.4.00.03.12.15.178.	3.11 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Rete	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kotabaru Rete	100	1.390,12		55,96	90	382,36	0	-	0,00	0,00	0	55,96	0,00	4,03		
	4.00.03.4.00.03.12.15.190.	3.12 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	1	100,00		-	1	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.12.15.221.	3.13 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Kotabaru Rete	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								55,56	53,43	55,56	53,43			30,67	20,52		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			9.813,68		1.259,32		1.193,10		136,08								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								82,54	81,60	82,54	81,60			23,51	17,40		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
47.	0.00.00.4.00.03.13.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	893,68	64	108,74	100	150,96	56	141,17	55,56	93,51	60	249,91	23,98	27,96	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
	0.00.00.4.00.03.13.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	2775	12,45	375	1,65	600	1,90	600	2,37	100,00	125,16	975	4,02	35,14	32,31		
	0.00.00.4.00.03.13.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2	16,50	1	2,18	24	3,00	24	3,00	100,00	100,00	5	5,18	49,12	31,36		
	0.00.00.4.00.03.13.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	85,10	9	13,27	12	18,73	12	16,76	100,00	89,48	21	30,03	34,20	35,29		
	0.00.00.4.00.03.13.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	23	44,11	23	8,00	23	8,72	23	8,46	100,00	97,05	46	16,46	40,00	37,31		
	0.00.00.4.00.03.13.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	14572	18,64	543	0,21	11425	1,75	11425	1,83	100,00	104,51	543	2,04	3,72	10,95		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.13.01.012.	1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	5	15,00	3	2,50	3	1,38	3	1,25	100,00	90,22	6	3,75	24,00	24,97		
	0.00.00.4.00.03.13.01.015.	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	2160	10,80	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.13.01.016.	1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	11103	87,13	1493	9,17	1848	11,14	1848	11,08	100,00	99,46	3341	20,25	30,09	23,24		
	0.00.00.4.00.03.13.01.017.	1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	24	24,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.13.01.018.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	16	92,78	0	-	5	12,26	4	8,80	80,00	71,77	4	8,80	25,00	9,48		
	0.00.00.4.00.03.13.01.019.	1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	10	60,00	2	12,00	2	12,00	2	12,00	100,00	100,00	4	24,00	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.13.01.020.	1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	297	427,16	32	59,77	58	80,09	58	75,62	100,00	94,42	90	135,39	30,20	31,69		
Rata-rata capaian kinerja (%)				98,00		97,21		98,00		97,21						25,96			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST						SR			
	0.00.00.4.00.03.13.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	301,88	65	41,63	100	90,14	63	84,56	62,50	93,80	64	126,19	25,50	41,80		
	0.00.00.4.00.03.13.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	3	103,00	-	-	2	67,00	2	65,26	100,00	97,40	2	65,26	66,67	63,35		
	0.00.00.4.00.03.13.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	15,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.13.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	48	24,00	-	-	8	3,60	4	1,80	50,00	50,00	4	1,80	8,33	7,50		
	0.00.00.4.00.03.13.02.028.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	90	17,00	0	-	16	2,04	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.13.02.041.	2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	1	45,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.13.02.042.	2.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	41,63	1	41,63	-	-	0	-	0,00	0,00	1	41,63	100,00	100,00		
	0.00.00.4.00.03.13.02.052.	2.7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	150	56,25	-	-	75	17,50	75	17,50	100,00	100,00	75	17,50	50,00	31,11		
Rata-rata capaian kinerja (%)				62,50		61,85		62,50		61,85						32,14			
Predikat kinerja				R		R		R		R						SR			
	0.00.00.4.00.03.13.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	100	16,80	-	-	100	7,50	100	7,50	100,00	100,00	100	7,50	40,00	44,64		
	0.00.00.4.00.03.13.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	40	16,00	-	-	20	7,50	20	7,50	100,00	100,00	20	7,50	50,00	46,88		
	0.00.00.4.00.03.13.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	20	0,80	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		100,00		100,00		100,00						25,00			
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST						SR			
	0.00.00.4.00.03.13.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	60	14,74	0	-	0	-	0	-	-	0,00	0	-	-	0,00		
	0.00.00.4.00.03.13.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	14,74	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00									
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR									
	4.00.03.4.00.03.13.	KECA																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.13.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	8.859,11	50	928,74	100	1.542,75	100	121,06	100,00	7,85	75	1.049,79	30,00	11,85		
	4.00.03.4.00.03.13.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	40	48,92	6	13,10	8	7,86	8	7,41	100,00	94,21	14	20,51	34,60	41,92		
	4.00.03.4.00.03.13.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1108	223,88	231	62,03	200	40,40	200	39,39	100,00	97,50	431	101,42	38,90	45,30		
	4.00.03.4.00.03.13.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	20	1.070,41	3	152,23	4	69,21	2	34,91	50,45	50,45	5	187,14	23,29	17,48		
	4.00.03.4.00.03.13.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	6	433,53	1	127,56	1	55,85	1	45,18	100,00	80,89	2	172,74	40,67	39,84		
	4.00.03.4.00.03.13.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	1	115,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.13.15.006.	5.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12	12,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.13.15.035.	5.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Sapat	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Sapat	100	925,81	52	79,31	100	83,41	62	51,90	61,55	62,22	114	131,21	113,55	14,17		
	4.00.03.4.00.03.13.15.046.	5.8 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	39	969,00	9	399,91	0	-	0	-	0,00	0,00	0	399,91	0,00	41,27		
	4.00.03.4.00.03.13.15.047.	5.9 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	4	460,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.13.15.119.	5.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sapat (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sapat	100	1.480,55	0	-	95	366,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.13.15.179.	5.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Sapat	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sapat	100	2.030,76	0	-	95	380,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.13.15.180.	5.12 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sapat	100	889,24	0	-	95	340,02	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sapat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sapat	0	-	95	94,60			0	-								
	4.00.03.4.00.03.13.15.190.	5.13 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	7	100,00	0	-	7	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.13.15.222.	5.14 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Sapat	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	0	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)		41,20		38,53		41,20		38,53				17,93		14,28			
		Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR				SR		SR			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program		10.086,20		1.079,11		1.791,35		354,28									
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program		75,42		74,40		75,42		74,40				25,26		22,41			
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program		S		S		S		S				SR		SR			
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
48.	0.00.00.4.00.03.14.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.037,17	68	181,47	100	198,42	93	192,25	93,14	96,89	81	373,72	32,27	36,03	KECAMATAN MANDAH	
	0.00.00.4.00.03.14.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	2300	9,12	100	2,04	430	1,50	430	1,50	100,00	100,00	530	3,54	23,04	38,82		
	0.00.00.4.00.03.14.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	24	45,48	24	2,84	24	8,40	7	2,81	30,21	33,44	31	5,65	130,21	12,43		
	0.00.00.4.00.03.14.01.003.	1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4	14,82	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.14.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	11	75,46	11	14,66	11	21,01	11	21,01	100,00	100,00	22	35,67	200,00	47,28		
	0.00.00.4.00.03.14.01.009.	1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	8	4,00	4	2,00			0	-	0,00	0,00	0	2,00	0,00	50,00		
	0.00.00.4.00.03.14.01.010.	1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	22	40,59	22	7,74	22	7,98	22	7,98	100,00	100,00	44	15,71	200,00	38,72		
	0.00.00.4.00.03.14.01.011.	1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	25856	6,48	69	0,89	5220	1,31	5220	1,31	100,00	100,00	5289	2,20	20,46	33,93		
	0.00.00.4.00.03.14.01.012.	1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	100	7,52	99	1,98	6	1,00	6	1,00	100,00	100,00	105	2,98	104,61	39,65		
	0.00.00.4.00.03.14.01.014.	1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	11,62	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.14.01.015.	1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	120	18,36	24	2,40	24	3,00	21	2,60	87,50	86,67	45	5,00	37,50	27,23		
	0.00.00.4.00.03.14.01.016.	1.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	10448	87,20	35	5,40	1820	15,90	1820	15,90	100,00	100,00	1855	21,30	17,76	24,43		
	0.00.00.4.00.03.14.01.017.	1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	75	49,40	15	8,00	15	9,80	15	9,80	100,00	100,00	30	17,80	40,00	36,03		
	0.00.00.4.00.03.14.01.018.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	21	110,64	4	20,25	4	23,00	4	22,99	100,00	99,96	8	43,24	38,10	39,09		
	0.00.00.4.00.03.14.01.020.	1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	355	484,50	81	98,86	43	91,14	43	90,96	100,00	99,81	124	189,82	34,93	39,18		
	0.00.00.4.00.03.14.01.027.	1.15 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	10	72,00	2	14,40	2	14,40	2	14,40	100,00	100,00	4	28,80	40,00	40,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						93,14		93,32		93,14	93,32			59,11	31,12		
		Predikat kinerja						ST		ST		ST	ST			R	SR		
	0.00.00.4.00.03.14.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	247,90	0	-	100	47,23	100	47,23	100,00	100,00	50	47,23	20,00	19,05		
	0.00.00.4.00.03.14.02.010.	2.1 Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan	3	36,30		-	3	16,03	3	16,03	100,00	100,00	3	16,03	100,00	44,16		
	0.00.00.4.00.03.14.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	100	30,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.14.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	17	17,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.14.02.028.	2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	4	14,00		-	3	6,95	3	6,95	100,00	100,00	3	6,95	75,00	49,64		
	0.00.00.4.00.03.14.02.042.	2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	60,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.14.02.052.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	90,60		-	4	24,25	4	24,25	100,00	100,00	4	24,25	33,33	26,77		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00		100,00		100,00	100,00			34,72	20,09		
		Predikat kinerja						ST		ST		ST	ST			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.14.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	100	38,75	0	-	100	20,90	100	20,90	100,00	100,00	50	20,90	20,00	53,94		
	0.00.00.4.00.03.14.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	60	27,50		-	25	11,00	25	11,00	100,00	100,00	25	11,00	41,67	40,00		
	0.00.00.4.00.03.14.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	33	11,25		-	25	9,90	25	9,90	100,00	100,00	25	9,90	75,76	88,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00		100,00		100,00	100,00			58,71	64,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			R	R		
	0.00.00.4.00.03.14.06.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	40	2,73		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.14.06.011.	4.1 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4	2,73		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.14.	KECA								1.621,67	0	-	-						
	4.00.03.4.00.03.14.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	8.922,96	79	1.864,74	100	1.621,67	62	567,18	62,46	34,97	71	2.431,92	28,23	27,25		
	4.00.03.4.00.03.14.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	85	43,34	17	7,01	17	10,80	17	10,80	100,00	100,00	34	17,81	40,00	41,09		
	4.00.03.4.00.03.14.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1746	319,12	350	64,93	13	59,09	13	59,08	100,00	100,00	363	124,01	20,79	38,86		
	4.00.03.4.00.03.14.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	33	830,56	13	316,68	4	63,56	4	63,56	100,00	100,00	17	380,23	51,54	45,78		
	4.00.03.4.00.03.14.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	15	713,71	3	111,95	3	121,27	3	121,27	100,00	100,00	6	233,22	40,00	32,68		
	4.00.03.4.00.03.14.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	2	40,00		18,00			0	-	0,00	0,00	0	18,00	0,00	45,00		
	4.00.03.4.00.03.14.15.006.	5.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah desa /kelurahan yang di monitoring evaluasi	85	127,00	13	71,17	17	28,00	17	27,98	100,00	99,93	30	99,15	35,09	78,07		
	4.00.03.4.00.03.14.15.039.	5.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Khairiah Mandah	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Khairiah Mandah	90	809,13	74	332,73	90	62,94	90	61,21	100,00	97,25	164	393,93	182,74	48,69		
	4.00.03.4.00.03.14.15.046.	5.8 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	12	407,41	10	365,62			0	-	0,00	0,00	10	365,62	81,67	89,74		
	4.00.03.4.00.03.14.15.047.	5.9 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	16	1.032,13	5	123,72			0	-	0,00	0,00	5	123,72	31,25	11,99		
	4.00.03.4.00.03.14.15.132.	5.10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Khairiah Mandah	90	638,66	18	375,53	85	259,08	74	223,28	87,06	86,18	92	598,81	102,22	93,76		
	4.00.03.4.00.03.14.15.181.	5.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Khairiah Mandah	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Khairiah Mandah	90	2.281,34		77,40	90	450,94	0	-	0,00	0,00	0	77,40	0,00	3,39		
	4.00.03.4.00.03.14.15.182.	5.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Khairiah Mandah (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Khairiah Mandah	90	1.480,55		-	90	366,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.14.15.190.	5.13 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	7	100,00		-	7	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.14.15.223.	5.14 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Khairiah Mandah	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								62,46	62,12	62,46	62,12			41,81	37,79		
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program				10.249,50	2.046,21		1.888,22		827,55					38,87	30,60			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program							88,90	88,86	88,90	88,86					SR	SR		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program							T	T	T	T								
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																		
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
49.	0.00.00.4.00.03.15.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	1.108,56	89	221,96	100	216,24	62	206,75	62,46	95,61	76	428,71	30,25	38,67	KECAMATAN PELANGIRAN		
	0.00.00.4.00.03.15.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlavani	4518	30,21	889	5,05	889	5,05	889	4,91	100,00	97,15	889	9,96	19,68	32,95			
	0.00.00.4.00.03.15.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibavarkan	3	50,98	3	9,85	1	10,00	1	9,21	100,00	92,16	4	19,06	52,93	37,40			
	0.00.00.4.00.03.15.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	10	72,00	10	14,40	10	14,40	10	13,20	100,00	91,67	20	27,60	40,00	38,33			
	0.00.00.4.00.03.15.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	23	49,00	23	9,74	23	9,79	23	9,79	100,00	99,99	46	19,53	40,00	39,85			
	0.00.00.4.00.03.15.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	39571	38,11	6836	6,58	7987	7,69	7987	7,67	100,00	99,65	6836	14,25	17,28	37,38			
	0.00.00.4.00.03.15.01.016.	1.6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	15775	117,16	3069	22,75	1744	22,65	1744	22,43	100,00	99,01	3069	45,18	19,45	38,56			
	0.00.00.4.00.03.15.01.018.	1.7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	32	167,96	4	23,50	10	36,19	10	29,25	100,00	80,82	14	52,75	43,75	31,41			
	0.00.00.4.00.03.15.01.020.	1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	403	556,13	91	126,09	86	105,47	86	105,30	100,00	99,84	177	231,39	43,92	41,61			
	0.00.00.4.00.03.15.01.027.	1.9 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibavarkan	13	27,00	2	4,00	2	5,00	2	5,00	100,00	100,00	4	9,00	30,77	33,33			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00	95,59	100,00	95,59			34,20	36,76			
		Predikat kinerja								ST	ST	ST	ST			SR	SR			
	0.00.00.4.00.03.15.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	275,36	100	193,93	100	14,25	44	9,96	44,44	69,89	72	203,89	28,89	74,04			
	0.00.00.4.00.03.15.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	191,19	1	189,69			0	-	0,00	0,00	1	189,69	99,00	99,21			
	0.00.00.4.00.03.15.02.022.	2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	50	26,60		-	10	5,65	10	5,65	100,00	100,00	10	5,65	20,00	21,24			
	0.00.00.4.00.03.15.02.024.	2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	10	23,67	2	4,24	2	4,60	2	4,31	100,00	93,70	4	8,55	39,80	36,13			
	0.00.00.4.00.03.15.02.052.	2.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11	33,90		-	2	4,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								44,44	43,04	44,44	43,04			39,70	39,15			
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	0.00.00.4.00.03.15.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	60	47,88		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.15.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	81	47,88		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR			
	4.00.03.4.00.03.15.	KECA							1.677,76	0	-									
	4.00.03.4.00.03.15.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	90	8.995,00	72	1.474,02	90	1.677,76	6	416,92	6,97	24,85	39	1.890,94	17,43	21,02			
	4.00.03.4.00.03.15.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	761	162,44	150	31,85	150	31,85	150	31,85	100,00	100,00	300	63,70	39,42	39,21			
	4.00.03.4.00.03.15.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	557	377,32	159	107,18	100	67,51	100	67,49	100,00	99,96	259	174,67	46,50	46,29			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
	4.00.03.4.00.03.15.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	61	815,97	16	201,97	12	136,93	10	108,47	83,33	79,22	26	310,44	42,62	38,05			
	4.00.03.4.00.03.15.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	5	397,32	1	85,71	1	55,35	1	55,35	100,00	99,99	2	141,06	40,00	35,50			
	4.00.03.4.00.03.15.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	4	200,46	4	40,07	4	27,34	4	26,34	100,00	96,34	8	66,41	40,00	33,13			
	4.00.03.4.00.03.15.15.028.	4.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Pelangiran	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pelangiran	90	927,83	84	129,77	80	71,79	80	67,87	100,00	94,53	164	197,64	36,38	21,30			
	4.00.03.4.00.03.15.15.046.	4.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	0	766,84	0	41,51			0	-	0,00	0,00	0	41,51	55,30	5,41			
	4.00.03.4.00.03.15.15.047.	4.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	6	751,68	2	201,15			0	-	0,00	0,00	2	201,15	32,33	26,76			
	4.00.03.4.00.03.15.15.070.	4.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pelangiran	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pelangiran	90	1.988,75	88	334,86	80	358,71	0	-	0,00	0,00	88	334,86	98,00	16,84			
	4.00.03.4.00.03.15.15.121.	4.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pelangiran (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pelangiran	90	1.480,55	21	180,56	80	366,00	0	-	0,00	0,00	21	180,56	23,00	12,20			
	4.00.03.4.00.03.15.15.153.	4.11 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelangiran	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pelangiran	90	925,84	90	119,40	80	362,27	70	315,47	87,50	87,08	160	434,87	35,56	46,97			
	4.00.03.4.00.03.15.15.190.	4.12 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	2	100,00		-	2	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	4.00.03.4.00.03.15.15.224.	4.13 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Pelangiran	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)								60,98	59,74	60,98	59,74			37,62	24,74			
		Predikat kinerja								R	R	R	R			SR	SR			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			10.426,80		1.889,91		1.908,25		633,63		66,12							
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								68,48	66,12	68,48	66,12			37,17	33,55			
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								S	S	S	S			SR	SR			
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																		
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
50.	0.00.00.4.00.03.16.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	1.247,44	96	214,89	100	233,62	77	213,71	76,69	91,48	86	428,60	34,72	34,36	KECAMATAN PULAU BURUNG		
	0.00.00.4.00.03.16.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	4755	27,82	755	3,92	900	3,00	900	3,00	100,00	100,00	755	6,92	15,88	24,86			
	0.00.00.4.00.03.16.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2	62,40	1	6,32	2	5,42	1	2,26	41,68	41,68	2	8,58	22,34	13,74			
	0.00.00.4.00.03.16.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	7	31,57	7	8,41	7	17,24	7	17,24	100,00	100,00	14	25,65	40,00	81,24			
	0.00.00.4.00.03.16.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	19	75,05	19	16,45	19	14,60	19	14,53	100,00	99,49	38	30,98	40,00	41,27			
	0.00.00.4.00.03.16.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	44094	41,02	8936	7,32	14040	7,50	14040	8,20	100,00	109,33	8936	15,52	20,27	37,84			
	0.00.00.4.00.03.16.01.012.	1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	10	3,82	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.16.01.015.	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	1800	13,00	360	1,80	0	-	0	-	0,00	0,00	360	1,80	20,00	13,85		
	0.00.00.4.00.03.16.01.016.	1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	5935	41,55	665	4,66	1000	4,90	343	2,10	34,29	42,86	1008	6,76	16,98	16,26		
	0.00.00.4.00.03.16.01.018.	1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	36	200,29	8	45,59	9	26,34	3	13,92	37,53	52,85	11	59,51	30,72	29,71		
	0.00.00.4.00.03.16.01.019.	1.10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	3	31,20	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.01.020.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	521	719,73	73	120,44	58	154,62	58	152,47	100,00	98,61	131	272,91	25,14	37,92		
Rata-rata capaian kinerja (%)										76,69	80,60	76,69	80,60			21,03	26,97		
Predikat kinerja										T	T	T	T			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.16.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	458,40	0	6,50	100	51,00	33	10,00	33,33	19,61	17	16,50	6,69	3,60		
	0.00.00.4.00.03.16.02.002.	2.1 Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	1	110,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.003.	2.2 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	100,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.005.	2.3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	1	36,00	0	-	1	36,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.006.	2.4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang disediakan	1	15,25	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.007.	2.5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	1	7,50	1	6,50	0	-	0	-	0,00	0,00	1	6,50	100,00	86,67		
	0.00.00.4.00.03.16.02.009.	2.6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	3	21,05	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.021.	2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	1	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.022.	2.8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	2	18,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.041.	2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	1	25,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.042.	2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	25,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.051.	2.11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	8	8,60	0	-	5	5,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.02.052.	2.12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	77,00	0	-	5	10,00	5	10,00	100,00	100,00	5	10,00	55,56	12,99		
Rata-rata capaian kinerja (%)										33,33	33,33	33,33	33,33			12,96	8,30		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.16.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	60	34,50	-	-	-	-	0	-	-	0,00	-	-	-	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	25	7,50	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.03.004.	3.2 Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang disediakan	25	15,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.16.03.005.	3.3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	25	12,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Predikat kinerja										SR	SR	SR	SR			SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.16.	KECA							338,69	0	-								
	4.00.03.4.00.03.16.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	90	2.547,05	77	402,77	90	338,69	77	230,57	85,93	68,08	77	633,34	34,25	24,87		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET	
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)			
	4.00.03.4.00.03.16.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	70	67,87	14	10,84	15	12,50	15	12,50	100,00	100,00	29	23,34	41,43	34,39			
	4.00.03.4.00.03.16.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	736	263,59	179	62,41	150	52,18	130	44,96	86,67	86,16	309	107,37	41,98	40,73			
	4.00.03.4.00.03.16.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	13	435,93	7	179,42	2	76,36	2	75,46	100,00	98,82	9	254,87	71,48	58,47			
	4.00.03.4.00.03.16.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	9	623,99	2	117,03	2	97,66	2	97,66	100,00	100,00	4	214,69	44,44	34,41			
	4.00.03.4.00.03.16.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	2	79,42	2	33,07			0	-	0,00	0,00	2	33,07	100,00	41,63			
	4.00.03.4.00.03.16.15.006.	4.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa yang Yang di Evaluasi	14	15,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	4.00.03.4.00.03.16.15.046.	4.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	7	311,25	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	4.00.03.4.00.03.16.15.047.	4.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	14	650,00		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	4.00.03.4.00.03.16.15.190.	4.9 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	7	100,00		-	7	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		Rata-rata capaian kinerja (%)									77,33	77,00	77,33	77,00			33,26	23,29		
		Predikat kinerja									T	T	T	T			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									4.287,39		624,16		623,31		454,28			
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									62,45	63,64	62,45	63,64			16,81			
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									R	R	R	R			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																		
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																		
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																		
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																		
51.	0.00.00.4.00.03.17.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.089,46	60	209,14	100	260,15	68	196,25	67,88	75,44	64	405,39	25,55	37,21	KECAMATAN RETEH		
	0.00.00.4.00.03.17.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	2100	10,25	420	2,05	400	2,05	400	1,95	100,00	95,12	420	4,00	20,00	39,00			
	0.00.00.4.00.03.17.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	63,00	2	7,45	3	12,60	1	4,11	32,62	32,62	3	11,56	17,12	18,34			
	0.00.00.4.00.03.17.01.006.	1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	5	12,50	1	1,65	1	2,50	1	1,50	59,88	59,88	1	3,15	25,18	25,18			
	0.00.00.4.00.03.17.01.008.	1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	12	124,13	12	24,83	12	28,43	12	28,43	100,00	100,00	24	53,25	40,00	42,90			
	0.00.00.4.00.03.17.01.010.	1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	16	40,06	16	8,01	16	8,01	16	8,01	100,00	100,00	32	16,02	40,00	40,00			
	0.00.00.4.00.03.17.01.011.	1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	60000	25,15	0	5,03	12000	5,03	12000	4,71	100,00	93,64	0	9,74	0,00	38,73			
	0.00.00.4.00.03.17.01.013.	1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	1,50		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.17.01.015.	1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	60	12,50	12	2,50	12	2,50	0	-	0,00	0,00	12	2,50	20,00	20,00			
	0.00.00.4.00.03.17.01.016.	1.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	4250	39,10	842	7,73	850	7,82	210	1,92	24,71	24,53	1052	9,65	24,74	24,67			
	0.00.00.4.00.03.17.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1718	75,90	0	-	6	19,56	6	19,56	100,00	100,00	6	19,56	0,35	25,77			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.17.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	10	78,76	2	19,54	6	21,80	1	3,02	16,67	13,85	3	22,56	30,00	28,65		
	0.00.00.4.00.03.17.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	9	43,20	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	320	503,42	62	118,36	62	140,26	50	113,45	80,65	80,88	112	231,81	35,00	46,05		
	0.00.00.4.00.03.17.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	10	60,00	2	12,00	2	9,60	2	9,60	100,00	100,00	4	21,60	39,00	36,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				67,88		66,71		67,88		66,71		67,88		66,71		20,81		27,52	
Predikat kinerja				S		S		S		S		S		S		SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.17.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	233,88	100	17,98	100	18,08	100	17,85	100,00	98,73	100	35,82	40,00	15,32		
	0.00.00.4.00.03.17.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	50,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	2	40,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.009.	2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	1	2,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.011.	2.4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi yang disediakan	2	2,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.021.	2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	5	5,50	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.022.	2.6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	12	34,38	12	10,48	12	10,48	12	10,31	100,00	98,42	24	20,79	200,00	60,47		
	0.00.00.4.00.03.17.02.024.	2.7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	5	27,00	1	5,30	1	5,40	1	5,34	100,00	98,80	2	10,64	39,60	39,39		
	0.00.00.4.00.03.17.02.028.	2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	20	11,00	4	2,20	4	2,20	4	2,20	100,00	100,00	8	4,40	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.041.	2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	2	30,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.042.	2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	2	30,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.02.052.	2.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	2,00	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		99,21		100,00		99,21		100,00		99,21		25,42		12,71	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST		ST		SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.17.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	100	50,40	100	6,30	100	6,30	100	6,30	100,00	100,00	100	12,60	40,00	25,00		
	0.00.00.4.00.03.17.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	70	31,50	14	6,30	14	6,30	14	6,30	100,00	100,00	28	12,60	40,00	40,00		
	0.00.00.4.00.03.17.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	94	18,90	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		20,00		20,00	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST		ST		SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.17.05.	4. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	72	18,00	-	-	-	-	0	-	-	0,00	-	-	-	0,00		
	0.00.00.4.00.03.17.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	8	18,00	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
	4.00.03.4.00.03.17.	KECAMATAN																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.17.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	18.596,75	74	2.941,12	100	4.550,76	40	526,38	39,93	11,57	57	3.467,50	22,77	18,65		
	4.00.03.4.00.03.17.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	127,57	1	23,81	1	25,51	1	20,78	100,00	81,44	2	44,59	39,40	34,96		
	4.00.03.4.00.03.17.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	4	233,75	4	57,77	7	84,78	7	79,78	100,00	94,10	11	137,55	54,80	58,84		
	4.00.03.4.00.03.17.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	35	879,68	11	266,73	3	134,20	2	97,69	80,41	72,79	14	364,42	39,46	41,43		
	4.00.03.4.00.03.17.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	10	611,31	2	122,26	2	71,69	2	71,69	100,00	100,00	4	193,95	40,00	31,73		
	4.00.03.4.00.03.17.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	2	66,00	2	18,00	2	18,00	2	18,00	100,00	100,00	4	36,00	40,00	54,55		
	4.00.03.4.00.03.17.15.018.	5.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Pulau Kijang	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Pulau Kijang	90	1.046,28	85	104,34	90	91,10	69	73,56	77,19	80,74	155	177,89	34,36	17,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.019.	5.7 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Madani	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Madani	90	1.060,26	94	262,16	90	102,19	59	68,32	65,61	66,86	153	330,48	34,07	31,17		
	4.00.03.4.00.03.17.15.020.	5.8 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Metro	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Metro	90	993,88	96	105,65	90	95,07	55	55,87	61,11	58,76	151	161,51	33,53	16,25		
	4.00.03.4.00.03.17.15.046.	5.9 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	23	571,65	23	564,15			0	-	0,00	0,00	23	564,15	99,00	98,69		
	4.00.03.4.00.03.17.15.047.	5.10 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	6	761,34	4	444,98			0	-	0,00	0,00	0	444,98	0,00	58,45		
	4.00.03.4.00.03.17.15.061.	5.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Madani	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Madani	90	2.118,39	23	220,50	90	519,88	5	28,15	5,08	5,41	27	248,64	30,42	11,74		
	4.00.03.4.00.03.17.15.062.	5.12 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Metro	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Metro	90	2.364,99	25	189,61	90	573,23	4	26,52	4,63	4,63	29	216,12	32,35	9,14		
	4.00.03.4.00.03.17.15.122.	5.13 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pulau Kijang (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pulau Kijang	90	1.480,55	16	175,77	90	380,81	50	197,23	55,56	51,79	66	373,00	14,63	25,19		
	4.00.03.4.00.03.17.15.123.	5.14 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Madani (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Madani	90	1.480,55	16	175,71	90	380,81	50	197,32	55,56	51,82	66	373,03	14,63	25,20		
	4.00.03.4.00.03.17.15.124.	5.15 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Metro (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Metro	90	1.480,55	0	-	90	548,75	30	182,75	33,30	33,30	30	182,75	33,30	12,34		
	4.00.03.4.00.03.17.15.183.	5.16 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Pulau Kijang	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pulau Kijang	90	977,91		-	90	304,61	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.184.	5.16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Madani	0	-	88	124,10	90	426,05	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.185.	5.16 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Madani	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Metro			88	85,60	90	220,79	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.186.	5.17 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Metro	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pulau Kijang	90	1.942,09		-	90	173,30	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.17.15.190.	5.20 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.225.	5.21 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Madani	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.226.	5.22 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Metro	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.17.15.227.	5.23 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Pulau Kiang	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00	-	-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								39,93	38,17	39,93	38,17			23,48	22,90		
		Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR			SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			19.988,49		3.174,54		4.835,29		746,77								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								76,95	76,02	76,95	76,02			17,94	16,63		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								T	T	T	T			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
52.	0.00.00.4.00.03.18.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.166,70	100	209,33	100	203,93	94	191,87	93,75	94,09	97	401,20	38,83	34,39	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
	0.00.00.4.00.03.18.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terlayani	4825	21,06	965	3,44	680	2,94	680	2,94	100,00	100,00	965	6,38	20,00	30,29		
	0.00.00.4.00.03.18.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Air dan Internet	1	19,18	1	3,20	1	5,60	1	4,52	100,00	80,71	2	7,72	40,00	40,24		
	0.00.00.4.00.03.18.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	14	59,32	14	11,64	14	13,35	14	13,30	100,00	99,63	28	24,95	40,00	42,06		
	0.00.00.4.00.03.18.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	32	85,68	32	13,89	32	16,95	32	16,75	100,00	98,84	64	30,64	40,00	35,76		
	0.00.00.4.00.03.18.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	63490	75,02	12698	15,21	11730	11,44	11730	11,44	100,00	100,00	12698	26,65	20,00	35,52		
	0.00.00.4.00.03.18.01.012.	1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	100	10,50	100	1,76	6	1,95	6	1,84	100,00	94,50	106	3,59	42,40	34,23		
	0.00.00.4.00.03.18.01.016.	1.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	889	7,82	148	1,29	155	1,25	155	1,22	100,00	97,47	303	2,51	34,08	32,07		
	0.00.00.4.00.03.18.01.017.	1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	245	68,98	49	12,86	22	13,26	22	12,79	100,00	96,39	71	25,64	28,98	37,17		
	0.00.00.4.00.03.18.01.018.	1.9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	30	141,52	6	10,07	5	8,08	3	4,04	60,00	50,00	9	14,11	30,00	9,97		
	0.00.00.4.00.03.18.01.019.	1.10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	12	72,00	-	-	3	14,40	3	14,40	100,00	100,00	3	14,40	25,00	20,00		
	0.00.00.4.00.03.18.01.020.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah yang dilaksanakan	408	557,20	84	118,13	54	102,72	54	100,84	100,00	98,17	138	218,97	33,82	39,30		
	0.00.00.4.00.03.18.01.027.	1.12 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	7	48,42	3	17,84	2	12,00	1	7,80	65,00	65,00	4	25,64	61,43	52,96		
		Rata-rata capaian kinerja (%)								93,75	90,06	93,75	90,06			34,64	34,13		
		Predikat kinerja								ST	T	ST	T			SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.18.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	335,29	92	43,94	100	99,41	40	84,51	40,00	85,01	66	128,46	26,48	38,31		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.18.02.002.	2.1 Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	1	24,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.003.	2.2 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	22,75		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.005.	2.3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	2	50,00		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.007.	2.4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	6	-	2	43,94	0	-	0	-	0,00	0,00	0	43,94	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.009.	2.5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	7	37,80		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.011.	2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Instansi yang disediakan	35	30,10		-	2	2,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.021.	2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	1	8,29		-	1	8,29	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.022.	2.8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1	15,30		-	1	15,30	1	15,26	100,00	99,74	1	15,26	100,00	99,74		
	0.00.00.4.00.03.18.02.024.	2.9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	4	10,90		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.041.	2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi	2	18,53		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.042.	2.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	9,50		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.051.	2.12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	12	6,73		-	3	1,83	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.02.052.	2.13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	86	101,40		-	8	71,50	8	69,25	100,00	96,85	8	69,25	9,30	68,29		
Rata-rata capaian kinerja (%)				40,00		39,32		40,00		39,32						8,41		12,93	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR						SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.18.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	60	22,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-		0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	26	12,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.03.005.	3.2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	20	10,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR						SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.18.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	80	24,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-		0,00		
	0.00.00.4.00.03.18.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	3	24,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00		0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
Predikat kinerja				SR		SR		SR		SR						SR		SR	
	4.00.03.4.00.03.18.	KECAMATAN									-								
	4.00.03.4.00.03.18.15.	5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	8.189,10	75	1.099,91	100	1.651,53	56	592,71	55,56	35,89	65	1.692,62	26,11	20,67		
	4.00.03.4.00.03.18.15.001.	5.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	5	32,14	1	6,15	1	7,55	1	7,55	100,00	100,00	2	13,70	40,00	42,62		
	4.00.03.4.00.03.18.15.002.	5.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	111	462,09	19	89,37	20	79,20	20	79,20	100,00	100,00	39	168,57	35,32	36,48		
	4.00.03.4.00.03.18.15.003.	5.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	10	246,73	2	82,09	3	75,81	3	60,90	100,00	80,33	5	142,99	47,80	57,95		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.18.15.004.	5.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	9	564,84	2	95,49	2	80,14	2	78,06	100,00	97,41	4	173,56	44,44	30,73		
	4.00.03.4.00.03.18.15.005.	5.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	3	223,63	3	47,36			0	-	0,00	0,00	3	47,36	20,00	21,18		
	4.00.03.4.00.03.18.15.017.	5.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Benteng	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Benteng	100	1.104,87	93	262,40	100	122,92	100	118,65	100,00	96,53	193	381,05	38,60	34,49		
	4.00.03.4.00.03.18.15.046.	5.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	5	257,50	3	152,62			0	-	0,00	0,00	3	152,62	52,00	59,27		
	4.00.03.4.00.03.18.15.047.	5.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	7	696,75	3	192,08			0	-	0,00	0,00	3	192,08	36,43	27,57		
	4.00.03.4.00.03.18.15.125.	5.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Benteng (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Benteng	100	1.480,55	26	31,06	100	366,00	0	-	0,00	0,00	26	31,06	26,00	2,10		
	4.00.03.4.00.03.18.15.165.	5.10 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Benteng	100	1.421,04	100	141,30	100	249,97	100	248,34	100,00	99,35	200	389,64	40,00	27,42		
	4.00.03.4.00.03.18.15.187.	5.11 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Benteng	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Benteng	100	1.498,96		-	100	469,95	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.18.15.190.	5.12 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	6	100,00		-	6	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.18.15.228.	5.13 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Benteng	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									55,56	53,01	55,56	53,01		29,28	26,14		
		Predikat kinerja									R	R	R	R		SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program									9.737,09	1.353,19	1.954,88	869,09					
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program									63,10	60,80	63,10	60,80		14,47	14,64		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program									R	R	R	R		SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
53.	0.00.00.4.00.03.19.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	1.157,90	81	164,69	100	208,62	92	164,20	91,76	78,71	86	328,89	34,53	28,40	KECAMATAN TANAH MERAH	
	0.00.00.4.00.03.19.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	3898	95,19	726	19,94	1200	6,00	1062	5,31	88,50	88,50	1788	25,25	45,87	26,53		
	0.00.00.4.00.03.19.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	4	72,00	1	2,21	4	12,00	3	7,75	79,36	64,60	4	9,96	94,36	13,84		
	0.00.00.4.00.03.19.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	8	118,00	5	18,00	8	40,60	8	36,00	94,33	88,67	13	54,00	31,67	45,76		
	0.00.00.4.00.03.19.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	35	64,45	35	10,06	35	12,00	35	12,00	100,00	100,00	70	22,06	40,00	34,23		
	0.00.00.4.00.03.19.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	101276	24,76	15364	3,84	19240	4,81	19240	4,76	100,00	98,97	15364	8,60	15,17	34,74		
	0.00.00.4.00.03.19.01.013.	1.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	10,00	2	8,00			0	-	0,00	0,00	2	8,00	80,00	80,00		
	0.00.00.4.00.03.19.01.015.	1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	60	6,00	12	1,20	12	1,20	12	1,10	100,00	91,67	24	2,30	40,00	38,33		
	0.00.00.4.00.03.19.01.016.	1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	4792	32,24	800	5,68	750	5,32	750	5,18	100,00	97,37	1550	10,86	32,35	33,68		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.19.01.017.	1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	42	45,36	6	7,04	8	8,08	8	8,08	100,00	100,00	14	15,12	33,33	33,33		
	0.00.00.4.00.03.19.01.018.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	24	145,69	2	12,98	8	4,27	7	3,29	87,50	77,05	9	16,27	37,83	11,17		
	0.00.00.4.00.03.19.01.020.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	358	513,01	50	69,74	82	107,14	49	63,53	59,63	59,30	99	133,27	27,76	25,98		
	0.00.00.4.00.03.19.01.027.	1.12 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	5	31,20	1	6,00	1	7,20	1	7,20	100,00	100,00	2	13,20	40,00	42,31		
Rata-rata capaian kinerja (%)				91,76		87,83		91,76		87,83		91,76		87,83		43,19		34,99	
Predikat kinerja				ST		T		ST		T		ST		T		SR		SR	
	0.00.00.4.00.03.19.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	90	100,70	90	5,00	90	17,30	90	17,20	100,00	99,42	90	22,20	40,00	22,05		
	0.00.00.4.00.03.19.02.028.	2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	90	26,30	18	5,00	10	5,90	10	5,80	100,00	98,31	28	10,80	31,11	41,06		
	0.00.00.4.00.03.19.02.052.	2.2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	74,40	-	-	10	11,40	10	11,40	100,00	100,00	10	11,40	125,00	15,32		
Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00		99,15		100,00		99,15		100,00		99,15		78,06		28,19	
Predikat kinerja				ST		ST		ST		ST		ST		ST		T		SR	
	0.00.00.4.00.03.19.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	90	38,00	90	7,60	90	8,80	82	-	90,91	0,00	86	7,60	38,18	20,00		
	0.00.00.4.00.03.19.03.005.	3.1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	91	38,00	19	7,60	22	8,80	20	7,20	90,91	81,82	39	14,80	42,86	38,95		
Rata-rata capaian kinerja (%)				90,91		81,82		90,91		81,82		90,91		81,82		42,86		38,95	
Predikat kinerja				T		T		T		T		T		T		SR		SR	
4.00.03.4.00.03.19. KECAMATAN																			
	4.00.03.4.00.03.19.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	90	8.787,23	64	1.042,80	90	1.845,21	49	363,37	54,92	19,69	57	1.406,17	25,16	16,00		
	4.00.03.4.00.03.19.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	50	93,48	10	19,00	11	14,80	11	14,80	100,00	100,00	21	33,80	42,00	36,16		
	4.00.03.4.00.03.19.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	868	529,45	164	106,33	120	77,50	120	76,67	100,00	98,92	284	182,99	32,72	34,56		
	4.00.03.4.00.03.19.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	28	423,52	12	176,31	3	70,90	2	42,30	59,66	59,66	13	218,61	48,11	51,62		
	4.00.03.4.00.03.19.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya masyarakat yang dilaksanakan	15	593,14	2	84,80	3	85,80	3	76,50	100,00	89,16	5	161,30	35,00	27,19		
	4.00.03.4.00.03.19.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	4	324,54	4	62,79	4	17,10	4	14,40	100,00	84,21	8	77,19	40,00	23,78		
	4.00.03.4.00.03.19.15.034.	4.6 Pelaksanaan Stimulasi Pembangunan Kelurahan Kuala Enok	Persentase pelaksanaan operasional Kantor Kelurahan Kuala Enok	90	1.083,80	59	173,71	90	110,98	70	83,47	77,78	75,22	129	257,19	28,56	23,73		
	4.00.03.4.00.03.19.15.046.	4.7 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	17	518,75	4	-	-	-	0	-	0,00	0,00	4	-	25,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.19.15.047.	4.8 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	4	620,00	0	215,87	-	-	0	-	0,00	0,00	0	215,87	0,00	34,82		
	4.00.03.4.00.03.19.15.076.	4.9 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kuala Enok	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuala Enok	90	1.987,57	0	-	90	493,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.19.15.126.	4.10 Pembangunan Sarana/Prasarana Kelurahan Kuala Enok (DAU Tambahan)	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kuala Enok	90	1.480,55	90	111,00	90	548,14	60	351,96	66,67	64,21	150	462,96	33,33	31,27		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	4.00.03.4.00.03.19.15.188.	4.11 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuala Enok	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Enok	90	932,43		93,00	90	227,00	0	-	0,00	0,00	0	93,00	0,00	9,97		
	4.00.03.4.00.03.19.15.190.	4.12 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	5	100,00		-	5	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	4.00.03.4.00.03.19.15.229.	4.13 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Kelurahan Kuala Enok	Jenis pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan	4	100,00		-	4	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)			54,92		51,94		54,92		51,94				21,90	21,01			
		Predikat kinerja			R		R		R		R				SR	SR			
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			10.083,83		1.220,09		2.079,93		544,77								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program			84,40		80,19		84,40		80,19				46,50	30,79			
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program			T		T		T		T				SR	SR			
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
54.	0.00.00.4.00.03.20.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	1.239,05	87	222,95	100	189,19	92	176,55	91,97	93,32	89	399,49	35,75	32,24	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	
	0.00.00.4.00.03.20.01.001.	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	4859	23,88	831	4,86	1080	5,04	1080	5,04	100,00	100,00	1911	9,90	39,33	41,46		
	0.00.00.4.00.03.20.01.002.	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2	71,70	2	12,10	12	14,50	8	10,20	70,34	70,34	4	22,30	40,00	31,10		
	0.00.00.4.00.03.20.01.008.	1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	7	100,80	7	14,40	7	23,80	7	23,80	100,00	100,00	14	38,20	40,00	37,90		
	0.00.00.4.00.03.20.01.010.	1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	25	68,72	25	14,20	25	14,69	25	14,69	100,00	100,00	50	28,89	40,00	42,04		
	0.00.00.4.00.03.20.01.011.	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	21366	25,03	3560	5,08	5224	5,85	5224	5,73	100,00	97,95	3560	10,81	16,66	43,20		
	0.00.00.4.00.03.20.01.016.	1.6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	7598	68,81	1297	12,38	1505	13,76	1505	13,76	100,00	100,00	2802	26,14	36,88	37,99		
	0.00.00.4.00.03.20.01.017.	1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	778	21,78	118	3,30	132	3,70	132	3,70	100,00	100,00	250	7,00	32,13	32,13		
	0.00.00.4.00.03.20.01.018.	1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	47	243,90	6	41,16	8	17,72	5	10,17	57,39	57,39	10	51,33	21,51	21,05		
	0.00.00.4.00.03.20.01.019.	1.9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	36	28,80	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
	0.00.00.4.00.03.20.01.020.	1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	423	585,62	74	115,46	40	90,14	40	89,46	100,00	99,25	114	204,92	26,95	34,99		
		Rata-rata capaian kinerja (%)			91,97		91,66		91,97		91,66				29,35	32,19			
		Predikat kinerja			ST		ST		ST		ST				SR	SR			
	0.00.00.4.00.03.20.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	241,16	73	10,80	100	21,18	0	-	0,00	0,00	37	10,80	14,60	4,48		
	0.00.00.4.00.03.20.02.003.	2.1 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1	45,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.20.02.005.	2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	2	56,01	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.20.02.009.	2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	2	12,80	2	10,80			0	-	0,00	0,00	2	10,80	84,38	84,38		
	0.00.00.4.00.03.20.02.022.	2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	7	26,18	0	-	7	13,68	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.20.02.042.	2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1	30,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian RPJMD pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Perubahan) Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH	KET
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
	0.00.00.4.00.03.20.02.052.	2.6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18	71,18	0	-	7	7,50	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00		14,06	14,06		
		Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	0.00.00.4.00.03.20.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	60	12,50		1.137,06	0	-	0	-	0	-		1.137,06		37902,11		
	0.00.00.4.00.03.20.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	14	6,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
	0.00.00.4.00.03.20.03.004.	3.2 Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang disediakan	14	3,00		1.137,06	0	-	0	-	0	-	0	1.137,06	0,00	37902,11		
	0.00.00.4.00.03.20.03.005.	3.3 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	14	3,50	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR		SR	SR		
	4.00.03.4.00.03.20.	KECA																	
	4.00.03.4.00.03.20.15.	4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100	2.717,05	93	741,40	100	358,15	73	223,87	72,70	62,51	83	965,26	33,20	35,53		
	4.00.03.4.00.03.20.15.001.	4.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	65	91,24	13	16,89	13	18,50	13	17,96	100,00	97,07	26	34,84	40,00	38,19		
	4.00.03.4.00.03.20.15.002.	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	72	289,65	12	47,65	15	60,50	15	60,50	100,00	100,00	27	108,15	37,50	37,34		
	4.00.03.4.00.03.20.15.003.	4.3 Pembinaan Organisasi, Kelembagaan dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	13	479,74	5	158,11	2	92,40	1	58,66	63,48	63,48	6	216,77	48,23	45,18		
	4.00.03.4.00.03.20.15.004.	4.4 Pembinaan keagamaan, seni dan budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	5	547,25	1	96,46	1	86,75	1	86,75	100,00	100,00	2	183,21	40,00	33,48		
	4.00.03.4.00.03.20.15.005.	4.5 Pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga yang terbina di masyarakat	1	251,12	1	49,31			0	-	0,00	0,00	1	49,31	100,00	19,64		
	4.00.03.4.00.03.20.15.006.	4.6 Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat	Panjang tanggul mekanik yang dibangun/direhabilitasi	10	365,00	8	270,80			0	-	0,00	0,00	8	270,80	76,00	74,19		
	4.00.03.4.00.03.20.15.007.	4.7 Pelaksanaan Proses Penataan Desa/Kelurahan, Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	4	593,05	1	102,19			0	-	0,00	0,00	1	102,19	25,00	17,23		
	4.00.03.4.00.03.20.15.190.	4.8 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu Khusus Kecamatan)	Jumlah Tema Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan yang disosialisasikan kepada masyarakat	8	100,00		-	8	100,00	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		Rata-rata capaian kinerja (%)									72,70	72,11	72,70	72,11		45,84	33,16		
		Predikat kinerja									S	S	S	S		SR	SR		
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program			4.209,75		975,14		568,52		400,41								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program								54,89	40,94	54,89	40,94			22,31	19,85		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program								R	SR	R	SR			SR	SR		
A.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama antar bidang yang baik																	
B.		Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Adanya Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid - 19 termasuk Rasionalisasi Anggaran, (2) Masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaannya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola)																	
C.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui																	
D.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan Kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi																	
		Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program Perangkat Daerah									77,85	76,77	77,85	76,77		35,37	33,16		
		Predikat Kinerja Dari Seluruh Program Perangkat Daerah									T	T	T	T		SR	SR		

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2020 memberikan implikasi dalam pencapaian target-target indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Target dan capaian indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 serta Provinsi Riau dan Nasional ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40.
Pencapaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2020

No.	Indikator	Target Kab. Indragiri Hilir	Capaian Kab. Indragiri Hilir	Capaian Provinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.50	0.34	-1.12	-2.07
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kapita/Tahun)	62.02	68.60	76.63	56.90
3	Inflasi (%)	3.70	3.30	2.42	1.68
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7.40	5.93	6.82	10.19
5	IPM	67.53	66.54	72.71	71.94
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.00	67.85	71.60	71.47
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.26	7.23	9.14	8.48
8	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.76	11.91	13.20	12.98
9	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	11,448.14	12,724.00	10,675.00	11,010.00
10	Gini Ratio	0.32	0.31	0.32	0.38
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.14	4.35	6.32	7.07

Sumber: BPS Indragiri Hilir (2021), BPS Provinsi Riau (2021) dan BPS (2021)

Pada tahun 2020, target indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,50% dengan capaian masih dibawah target yaitu sebesar 0,34% sehingga realisasi kinerja sebesar 6,18% dan

terkategori Sangat Rendah. Capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 ini yaitu sebesar 0,34% relatif lebih tinggi dibanding capaian indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (-1,12%), dan capaian pertumbuhan ekonomi nasional (-2,07%). Kondisi ini tidak terlepas dampak pandemi COVID-19. Konsumsi rumah tangga menjadi pembentuk utama PDRB Kabupaten Indragiri Hilir dari sisi pengeluaran dengan nilai berkisar 42,65% hingga 46,55% dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, terjadi penurunan terhadap konsumsi rumah tangga menjadi 44,54% dari tahun sebelumnya. Net ekspor menduduki posisi kedua yang berkontribusi dalam membentuk PDRB Kabupaten Indragiri dengan nilai 24,71% - 30,55% selama tahun 2016-2020. Begitu pula dengan konsumsi pemerintah, secara umum mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Pada tahun 2019 dan 2020, kontribusi konsumsi pemerintah mencapai 3,10% - 3,18 % terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir. Walaupun terjadi peningkatan dalam kontribusi PDRB, namun terjadi penurunan dalam hal pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2020 menjadi -7,87%. Hal ini terjadi karena adanya *refocussing* anggaran untuk kegiatan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

Pada tahun 2020, target PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 62,02 juta/kapita/tahun. Realisasi indikator PDRB per kapita sebesar Rp 68,60 juta/kapita/tahun sehingga realisasi kinerja sebesar 110,61% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding capaian PDRB per kapita Provinsi Riau (Rp 76,63 juta/kapita/tahun), namun lebih tinggi dibanding capaian PDRB per kapita Nasional (Rp 56,90 juta/kapita/tahun). Relatif tingginya capaian kinerja indikator PDRB ini tidak terlepas dari relatif rendahnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang hanya sebesar -0,10%, dibawah pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 0,34%. Upaya

mengairahkan sektor pertanian yang didukung oleh industri pengolahan akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, karena kedua sektor ini merupakan tumpuan pertumbuhan sektor - sektor lainnya.

Pada tahun 2020, indikator inflasi ditargetkan sebesar 3,70%. Capaian indikator ini jauh lebih baik yaitu sebesar 3,30% (inflasi ringan) dengan realisasi kinerja sebesar 112,12% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 ini, relatif lebih tinggi dibanding dengan inflasi Provinsi Riau (2,42%). Upaya terus mempertahankan tingkat inflasi yang rendah perlu terus dilakukan dengan terus memperhatikan dan mengantisipasi faktor penyebabnya seperti kelancaran distribusi barang dan jasa, sistem tata niaga, peran pemerintah dan perilaku sektor keuangan.

Pada tahun 2020, target tingkat kemiskinan di Kabupaten Hilir sebesar 7,40%, sementara realisasi tingkat kemiskinan sebesar 5,93% sehingga realisasi kinerja indikator ini sebesar 124,79% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,93% lebih baik dibanding capaian Provinsi Riau (6,82%) dan Nasional (10,19%) Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hilir melalui Program/kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan *stakeholder* lainnya cukup sinergis dan berhasil.

Pada tahun 2020, target indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,53% dengan capaian indikator sebesar 66,54% sehingga realisasi kinerja indikator sebesar 98,53% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski realisasi kinerja indikator ini Sangat Tinggi, namun capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau dan Nasional. Rendahnya capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini disebabkan rendahnya capaian komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama

Sekolah (RLH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian keempat komponen pembentuk IPM Kabupaten Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau dan Nasional. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan percepatan pencapaian indikator IPM adalah dengan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan keempat komponen IPM diatas.

Pada tahun 2020, target indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,32 dengan realisasi capaian sebesar 0,31 yang berarti bahwa pemerataan pembangunan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir (ketimpangan rendah) dengan realisasi kinerja sebesar 103,125% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir lebih baik dibandingkan dengan Nasional (0,38 atau pemerataan sedang).

Pada tahun 2020, target indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,14% dengan realisasi capaian sebesar 4,35% sehingga realisasi kinerja indikator ini sebesar 61,46% yang terkategori Sedang. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau (6,32%) dan Nasional (7,07%). Capaian yang baik dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terdiri dari rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang diuraikan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan yang memiliki nilai prioritas dan berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di tahun rencana serta prioritas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dan Nasional

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

2. Pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. Hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian

masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi - kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 menambah berat pertumbuhan ekonomi karena untuk memutus mata rantai penyebaran, kita dipaksa untuk membatasi kegiatan, sehingga roda perekonomian berjalan sangat lambat, walaupun dapat tumbuh secara positif dengan nilai yang sangat kecil yaitu 0,34%. Diperlukan adanya sebuah terobosan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi.

4. Kemiskinan dan Pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi - kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2020 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non - fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah

perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumber daya alam dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek - objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi - institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Pembangunan ekonomi perdesaan

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh

Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh *Stakeholder* untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

10. Fungsi terminal bandar laksamana Indragiri menjadi terminal penumpang dan barang.

Pembangunan Terminal Bandar Laksamana Indragiri terletak di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2010 lalu. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu serta berkembangnya industri - industri di beberapa wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan semakin tingginya kegiatan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan transportasi. Kota Tembilahan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pusat pengembangan pembangunan, pusat pemerintahan, perdagangan, industri, serta pusat pelayanan sosial seperti pusat pendidikan, kesehatan serta distribusi barang dan jasa.

Ketersediaan fasilitas terminal baik fasilitas umum maupun fasilitas penunjang, pengoperasian dan pelaksanaan terminal, serta pemeliharaan

terminal. Untuk itu dalam upaya memaksimalkan penggunaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri perlu ditingkatkan fungsi menjadi terminal penumpang dan barang dan mengupayakan agar masyarakat untuk menggunakan Terminal Bandar Laksamana Indragiri dan meningkatkan kedisiplinan pemilik jasa dan pengguna angkutan penumpang dan barang.

11. Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh.

Dalam rangka Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menyusun Perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan melakukan pengadaan tanah sehingga bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan urusan dasar dan tugas / fungsi tiap perangkat daerah.

2.3.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trennya menurun 4,68% pada tahun 2016 dan 3,59% pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,19% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 0,34%. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir selain disebabkan oleh kelembaban ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19 dan juga belum

berkembangnya sektor – sektor lainnya diluar sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar serta konstruksi.

- PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki tren meningkat yaitu dari Rp 55,76 juta/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi Rp 68,60 juta/kapita/tahun pada tahun 2020, namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan PDRB per kapita yang cenderung terus meningkat.
- Jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir (44,29 ribu) lebih tinggi dibanding kabupaten tetangga (Indragiri Hulu sebesar 26,66 ribu) pada tahun 2020, namun masih lebih rendah dibanding Kabupaten Pelalawan (45,88 ribu) dengan kinerja penurunan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan yaitu dari 85,73% tahun 2018 menjadi 120,48% pada tahun 2020.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

- Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indragiri Hilir sebesar 66,54 adalah yang terendah dibanding IPM kabupaten Indragiri Hulu (69,83) dan Pelalawan (71,56) serta Provinsi Riau (72,71), masih jauh dari capaian IPM minimal dunia (80). Selama periode 2016 – 2020, meski perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir cenderung mengalami peningkatan namun kinerja indikator IPM trennya menurun dan dibawah target RPJMD.
- Pada tahun 2020, Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 11,91 tahun adalah terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (12,36 tahun) dan Pelalawan (12,24 tahun). Selama periode 2016 – 2020, kinerja indikator harapan lama sekolah trennya mengalami peningkatan tetapi masih dibawah target RPJMD.
- Pada tahun 2020, rata - rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,23 tahun adalah yang terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (8,38 tahun) dan Pelalawan (8,50

tahun). Selama periode 2016 – 2020, kinerja indikator rata - rata lama sekolah trendnya mengalami peningkatan namun masih dibawah target RPJMD.

- APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 104,31%, terendah dibandingkan APK SD/MI kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (115,35%) dan Pelalawan (110,74%) pada tahun 2018. Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator APK SD/MI trennya berfluktuatif meningkat.
- APK SMP/MTs Indragiri Hilir sebesar 98,33%, tertinggi dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (88,28%) dan Pelalawan (87,87%) pada tahun 2018, namun capaian APK ini masih dibawah target RPJMD. Namun, pada tahun 2020 APK SMP/MTs telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kinerja sebesar 100,72%.
- Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,85 tahun adalah yang terendah dibanding angka harapan hidup kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (70,25 tahun) dan Pelalawan (71,16 tahun). Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator ini trennya berfluktuatif mengalami peningkatan.
- Prevalensi balita gizi sebesar 4,30% (Tahun 2017), lebih tinggi dibanding prevalensi Provinsi Riau yang sebesar 1,64%. Namun, untuk tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 0,03 dengan kinerja 196,67%.
- Pada tahun 2020, Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,35%. Capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 ini lebih baik dibanding capaian Kabupaten tetangga Indragiri Hulu (4,91%), Pelalawan (5,99%) dan Provinsi Riau (6,32%). Selama periode 2016 – 2020, realisasi kinerja indikator pengangguran terbuka trennya berfluktuatif menurun, dalam

artian jumlah pengangguran terbuka semakin mengalami peningkatan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- Relatif stagnannya cakupan fasilitas seni yang sekaligus menggambarkan masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.
- Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
- Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub – klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

2.3.2.2. Aspek Pelayanan Umum

a. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

- Selama periode 2016 – 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir berkisar antara 94,62% - 96,20% yang berarti ada sekitar 3,80% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian ADM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2019 lebih rendah dibanding capaian APM Indragiri Hulu (98,44%) dan Provinsi Riau (97,32%).
- Selama periode 2016 – 2020, APM SMP/MTs Indragiri Hilir berkisar antara 79,96% - 82,39%, yang berarti ada sekitar 17,61% - 20,04% penduduk usia 13 - 15 yang belum sekolah.
- Selama periode 2016 – 2020, APS 7 – 12 tahun Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 98,43% pada tahun 2016 menjadi 99,75% pada tahun 2020, yang berarti sebesar 0,25% - 1,57% penduduk umur 7 – 12 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI.
- APS 13 – 15 tahun Indragiri Hilir selama periode 2016 – 2020 berkisar antara 90,77% - 92,13%, yang menggambarkan bahwa

penduduk umur 13 - 15 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebesar 7,87% - 9,23%.

- Persentase bangunan SD/MI dengan kondisi baik hanya sebesar 24,61%. Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 23,53%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (28,40%), Pelalawan (34,00%) dan Provinsi Riau 29%).
- Persentase bangunan SMP/MTs di Indragiri Hilir dengan kondisi baik hanya sebesar 19,70%. Bangunan SMP/MTS dengan kondisi baik di Indragiri Hilir hanya 20,15%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (25,15%), Pelalawan (39,76%) dan Provinsi Riau (28,54%).
- Masih terdapat sekitar 28,18% guru yang belum berkualifikasi S1/D.IV sehingga yang bersangkutan belum tersertifikasi sebagai guru.

2. Kesehatan

- Rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah setiap 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir kekurangan sekitar 398 tempat tidur lagi.
- Rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,032 (norma 0,15) pada tahun 2020, lebih rendah dibandingkan capaian rasio dokter Indragiri Hulu tahun 2020 yang sebesar 0,041. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 52 dokter spesialis sehingga rasionya ideal.
- Rasio dokter umum per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,064 (norma 0,40). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan tambahan dokter umum sebanyak 205 orang dokter umum.
- Rasio dokter gigi per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu 0,032 (norma 0,11). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan 48 orang dokter gigi.

- Rasio perawat per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,97 (norma 1,1), Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan perawat sekitar 200 orang lagi.
- Rasio Bidan per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,59 (norma 1,0). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 693 orang Bidan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (4,52%) dan Mantap (57,84%), masih dibawah target dan standar Nasional (80%).
- Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (58,32%) dan Mantap (43,36%), masih dibawah standar Nasional.
- Proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 30%, masih dibawah target yang ditetapkan (32%)
- Rendahnya kualitas insfrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap insfrastruktur tersebut.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2019 hanya sebesar 21,49% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 20 unit - 162 unit per tahun selama periode 2009 - 2017. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.868 unit rumah.
- Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 22%.
- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman.

- Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permendagri 20 % dari Luas Perkotaan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Rasio rumah ber IMB baru 2,30% dari total rumah yang ada di Indragiri Hilir.
- Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk masih rendah yaitu 0,04 sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang optimal.
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 10% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
- Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
- Dukungan anggaran pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana masih rendah.
- Pengalokasian dana siap pakai tidak berada di BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sehingga sulit diakses ketika terjadi bencana dalam rangka penanggulangan bencana.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah terdampak bencana belum terlaksana dengan baik karena terbentuk anggaran.
- Kurangnya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana dan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6. Sosial

- Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem

layanan dan rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).

- Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.
- Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

b. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau dengan capaian kinerja yang terus menurun.
- Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir sebesar 3,89%.
- Kegiatan pemberian pelatihan kewirausahaan kepada tenaga kerja pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran akibat di *recofussing* untuk penanganan COVID-19.
- Tidak berjalannya peranan dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks pembangunan gender (IPG) Indragiri Hilir sebesar 82,34% adalah yang terendah dibandingkan IPG kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indragiri Hilir yaitu sebesar 61,05% juga termasuk yang terendah dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Masih lemahnya kelembagaan/institusi yang mendukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak,

kurangnya pemahaman tentang kota layak anak serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menuju kota layak anak.

3. Pangan

- Selama periode 2016 – 2020, belum tersedia regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pertanian

- Persentase luas tanah yang bersertifikat baru sebesar 41,39%.
- Belum memadainya SDM dalam bidang Sistem Pendaftaran Tanah.
- Masih terdapatnya aset kekayaan daerah yang belum memiliki bukti autentik, sehingga rawan terjadi penyerobotan.

5. Lingkungan Hidup

- Belum memiliki laboratorium lingkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
- Belum adanya pejabat Fungsional PPLHD DAN PPNS Lingkungan dalam upaya melakukan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
- Masih tingginya pencemaran lingkungan hidup.
- Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
- Persentase penanganan sampah masih belum optimal, baru sekitar 81,49%.
- Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.
- Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/controll landfill*).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Cakupan penerbitan kartu keluarga mencapai 226%
- Kepemilikan KTP (e-KTP) hanya 99% dari total penduduk Indragiri Hilir yang harus ber KTP.
- Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 556 per 1.000 penduduk Indragiri Hilir. Masih ada 456 penduduk dari 1.000 penduduk yang belum ada akta kelahiran.
- Keterbatasan peralatan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan.
- Tidak sinkronnya data penduduk baik jumlah penduduk ataupun LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) karena tidak dilaporkan secara berkala dari Kecamatan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program DMIJ telah berhasil meningkatkan ketersediaan infrastruktur desa namun belum mendorong secara signifikan ekonomi masyarakat desa.
- Capaian desa maju masih sangat rendah yaitu hanya 79 desa, nihil desa dengan status desa Mandiri dan masih ada sebanyak 17 desa dengan status Sangat Tertinggal.
- Masih sangat lemahnya kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa memanage kegiatan - kegiatan desa.
- Masih rendahnya pengelolaan administrasi keuangan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Cakupan peserta KB aktif masih 64,10%.
- Cakupan PUS peserta KB masih 77,82%.
- Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh anak, remaja dan bina lansia.
- Belum optimalnya peran masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga

(KKB/PK) serta pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.

- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Masih kurangnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- Masih kurangnya tenaga (petugas lapangan), sarana dan prasarana.

9. Perhubungan

- Kurangnya SDM Teknis Perhubungan baik Kualitas Maupun Kuantitas dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Kurangnya Ketersediaan Produk Hukum baik peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- Kurangnya sarana Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Belum beroperasi secara maksimal UPT pengujian kendaraan bermotor , terminal dan perpakiran pada Dinas Perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Kurangnya Pemeliharaan dan atau peningkatan Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih rendahnya pemenuhan standar layanan angkutan di kabupaten Indragiri Hilir.

10. Komunikasi dan Informatika

- Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi aktif di Indragiri Hilir sebesar 67,00%.

- Usaha mikro dan kecil persentasenya sebesar 72,00%.
- Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.
- Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah.
- Sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif rendah kualitas.
- Kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan UKM, Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

12. Penanaman Modal

- Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 449 milyar, dibawah target Rp 11.112 milyar tahun 2020.
- Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 274,38 juta, dibawah target USD 108 juta.
- Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
- Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BP2MPD.
- Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinan penanaman modal.
- Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendah persentase wirausaha muda.
- Masih rendah cakupan pembinaan olahraga.
- Masih rendah cakupan pelatih yang bersertifikat.
- Masih rendah cakupan pembinaan atlet muda.
- Pembinaan olahraga belum beroreantasi prestasi.

14. Statistik

- Data-data untuk pengukuran indikator kinerja pada RPJMD banyak yang tidak tersedia di Indragiri Hilir Dalam Angka, kecamatan dalam Angka, PDRB, Statistik Daerah dan Indikator kesejahteraan serta terbitan lainnya.
- Koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten khususnya SKPD dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.

15. Persandiaan

- Urusan persandian ini belum mendapat perhatian cukup oleh pemerintah daerah.

16. Kebudayaan

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih terbatas.
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.
- Mulai ditinggalkannya nilai - nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat.
- Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan bangunan bersejarah.

17. Perpustakaan

- Jumlah perpustakaan yang masih terbatas yaitu sebanyak 4.972 orang.
- Koleksi buku perpustakaan yang masih terbatas dengan pelayanan yang belum baik.

18. Kearsipan

- Masih relatif rendahnya pengelolaan arsip secara baku yaitu sebesar 30,36%.
- Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas untuk pengelola kearsipan yaitu sebanyak 3 orang.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

- Pandemi COVID-19 memaksa semua orang untuk mengurangi interaksi guna mencegah penyebaran sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 22.047 wisatawan pada tahun 2020.
- Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.

2. Pertanian

- Produksi beras Indragiri Hilir belum mencukupi konsumsi penduduk Indragiri Hilir.
- Produktivitas kelapa masih rendah yaitu 1,217 ton kopra/hektar .
- Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 2,515 ton CPO/hektar, diibawah produktivitas perkebunan besar Indragiri Hilir (4,24 ton CPO/hektar).
- Pembangunan infrastruktur kebun terutama pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran yang masih jauh dibawah kebutuhan.
- Kegiatan rehabilitasi/peremajaan kebun kelapa belum dapat menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Harga kelapa petani PIR maupun petani non PIR berfluktuatif dan cenderung rendah.

3. Perdagangan

- Nilai ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir yang cenderung terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai USD 409,15 juta.
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

4. Perindustrian

- Nilai produksi usaha menengah kecil masih rendah dibawah target yang telah ditetapkan.
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB relatif masih rendah yaitu 24,05%.
- Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah dan kewirausahaan masyarakat.
- Masih rendahnya jumlah industri pengolahan, bahkan industri pengolahan kelapa terus menurun jumlahnya.
- Rendahnya daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Transmigrasi

- Kegiatan-kegiatan ketransmigrasian secara terbatas pada transmigrasi lokal.

6. Kelautan dan Perikanan

- Produksi perikanan Indragiri Hilir masih mengandalkan perikanan tangkap dan sangat terbatas pada perikanan budidaya.
- Konsumsi ikan penduduk Indragiri Hilir yang rata - ratanya sebesar 39,69 ton/kapita perlu didorong meningkat menjadi 50,80 ton/kapita/tahun.
- Masih terdapatnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.
- Terjadinya konflik antara sesama nelayan dalam hal menentukan lokasi penangkapan.

- Rendahnya kemampuan petani pembudidaya tambak dalam hal merevitalisasi tambaknya.

d. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- Terbatasnya Sumber daya kuantitas (fungsional) dan kualitas rencana pembangunan.
- Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
- Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2. Keuangan

- Realisasi Pendapatan daerah yang kurang tercapai.
- Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
- Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.
- Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

- Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
- Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai oleh sebagian pejabat struktural kepada PNS bawahannya yang indiscipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

4. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurang kewajiban pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum dan terjadinya demonstrasi yang memprotes pemerintah.
- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan Heterogenitas dan Multikultural yang terjadi perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi memunculkan akses - akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.
- Meningkatnya Penyakit Masyarakat seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, berupa kasus pecandu narkoba yang semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

- Masih sedikit pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.

- Penelitian yang dilakukan spasial dan tidak komprehensif sehingga sukar diterapkan.

6. Pengawasan

- Masih banyak temuan APIP yang belum ditindak lanjuti. Persentase APIP yang ditindaklanjuti sebesar 70,96%.
- Masih terbatas jumlah personel APIP yang hanya 12 orang dan idealnya sebanyak 45 orang.
- Lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga kejadian serupa berulang kembali.

7. Sekretariat Dewan

- Rasio pembahasan prolegda yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 98,31% menjadi 100% tahun 2020.

2.3.2.3. Aspek Daya Saing

- Pengeluaran Per Kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 10.382 ribu, lebih rendah dibanding pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hulu (Rp 10.738 ribu), Pelalawan (Rp 12.149) dan Provinsi Riau (Rp 11.255) tahun 2019.
- Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Indragiri Hilir telah berada pada angka 130,34 yang berarti petani di Indragiri Hilir tidak lagi mengalami defisit artinya kenaikan harga produksi relatif lebih besar dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani naik, lebih besar dari pengeluarannya.
- Rumah tangga yang menggunakan listrik masih 51,50% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi kinerja indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik menurun dari 98,59% pada tahun 2015 menjadi 93,64% pada tahun 2019.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih

berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Tahun 2021 ini mencakup: Pertama, menjelaskan tantangan dan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial, ekonomi dan keuangan, baik di tingkat global maupun domestik, serta penjelasan tentang upaya yang dilakukan beberapa negara di dunia untuk mengatasi pandemi tersebut. Kedua, memberikan ilustrasi perkembangan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 serta respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah atas perubahan baseline ekonomi 2020. Ketiga, menguraikan tentang tantangan fundamental perekonomian jangka menengah-panjang sebagai tantangan bagi Indonesia untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) yang menjadi landasan pikir dalam perumusan kebijakan fiskal 2021. Keempat, menjelaskan perkembangan perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir dan perkiraan tahun 2022, upaya recovery perekonomian nasional dan reformasi belanja dan pendapatan negara, serta arah dan strategi kebijakan makro fiskal tahun 2021.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

Sejalan dengan Tema RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Menuju Pemantapan Kemajuan Martabat dan Marwah Indragiri Hilir”.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya adalah Arah kebijakan dan strategi pembangunan Propinsi Riau pada RKPD 2022 adalah sebagai berikut :

1. Industri;
2. Pertanian;;

3. Pariwisata;
4. Infrastruktur;
5. Sumber Daya Manusi; dan
6. Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang prima.

Terkait Visi dan Misi Daerah pada tahun 2022 yang terkait pada bidang ekonomi adalah pada misi kedelapan yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah dengan Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3,61-4,9%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,65-4,97%, IPM diproyeksikan sebesar 70,29-70,69%, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,32 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 3,84%. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana sasaran dan target yang harus dicapai sesuai RKPD pada tahun 2022, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan	INDRAGIRI HILIR		
			2020	Target 2021	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,34	3,6-4,3	3,61-4,9
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,93	6,9-7,4	5,65-4,97
3	IPM	Indeks	66,54	67,66	70,29-70,69
4	Gini Ratio	Indeks	0,310	0,32	0,32
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	4,9-5,2	3,84

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 65,02 triliun rupiah. Secara nominal, nilai

PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,28 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 62,70 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 60,18 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 65,02 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2020 mengalami percepatan sekitar 0,34 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya kontribusi berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 46,78% (angka ini naik dari 44,68% di tahun 2019), lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 24,05% (angka ini naik dari 23,63% di tahun 2019), namun mengalami penurunan pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,14% (turun dari 17,55% di tahun 2019).

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 — 2020, dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (persen), 2016 — 2020

Kategori	INDRAGIRI HILIR				
	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,09	48,03	44,74	44,68	46,78
B Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,83	1,27	0,96	0,79
C Industri Pengolahan	24,48	23,65	24,13	23,63	24,05
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi	5,34	5,58	6,12	6,28	5,88
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,12	15,50	16,92	17,55	16,14
H Transportasi dan Pergudangan	1,08	1,08	1,14	1,15	0,93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,44	0,48	0,47	0,38
J Informasi dan Komunikasi	0,55	0,56	0,61	0,64	0,65
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,55	0,60	0,59	0,58
L Real Estat	0,78	0,80	0,86	0,88	0,86
M,N Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,73	1,74	1,78	1,76	1,66
P Jasa Pendidikan	0,56	0,56	0,61	0,63	0,62

Kategori	INDRAGIRI HILIR				
	2016	2017	2018	2019	2020
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,14	0,15	0,16	0,18
R,S,T,U Jasa lainnya	0,43	0,46	0,52	0,54	0,42
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2021

Perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yaitu sebesar 3,89% ini masih dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional (5,3% - 5,5%), namun akibat Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir berkisar 2,3 - 3,2%. Pada awal 2019 hingga awal juni 2019, harga komoditas andalan Kabupaten Indragiri Hilir seperti produk kelapa dan kelapa sawit selalu berfluktuatif menurun pada level yang rendah. Kondisi ini diperparah juga kedepannya dengan semakin menguatnya 'perang dagang' antara China dan USA sehingga turut menekan komoditas andalan Indragiri di Pasar Dunia. Meski perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir masih dibawah target, namun telah memberikan pertumbuhan positif sehingga juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2019 Nilai inflasi sebesar 2,4% dan sedikit meningkat pada tahun 2020. Inflasi di Kota Tembilahan pada akhir tahun 2020 (Desember 2020 dengan tahun dasar 2018=100) tercatat inflasi sebesar 3,30 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,43 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,71 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,63 persen; perlengkapan, peralatan, dan

pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen; kesehatan sebesar 1,84 persen; transportasi sebesar 0,09 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -1,51 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; pendidikan sebesar 3,21 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 10,04 persen; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,97 persen.

Pada bulan Mei 2021, Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,01 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,82. Tingkat inflasi tahun kalender Mei 2021 sebesar 0,53 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020) sebesar 2,04 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,34 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3.
IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tembilahan Mei 2021, Tahun
Kalender 2021, dan tahun ke tahun menurut Kelompok Pengeluaran
(2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2020	IHK Desember 2020	IHK Mei 2021	Tingkat Inflasi Mei 2021 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Mei 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	104,68	106,26	106,82	0,01	0,53	2,04	0,0100
Makanan, Minuman, dan Tembakau	106,94	108,65	109,40	-0,33	0,69	2,30	-0,1082
Pakaian dan Alas Kaki	101,55	102,15	102,20	0,00	0,05	0,64	0,0000
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,42	102,67	103,62	-0,05	0,93	1,17	-0,0101
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,35	102,28	103,28	0,08	0,98	0,91	0,0039
Kesehatan	100,88	102,32	102,25	-0,10	-0,07	1,36	-0,0020
Transportasi	103,65	102,12	101,89	0,00	-0,23	-1,70	0,0000
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,5	97,44	97,94	0,51	0,51	-0,57	0,0244
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,09	102,50	102,50	0,00	0,00	1,39	0,0000
Pendidikan	103,1	106,41	106,41	0,00	0,00	3,21	0,0000
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	104,03	112,50	112,50	0,00	0,00	8,14	0,0000
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,39	120,05	121,05	1,34	0,83	4,91	0,1013

¹⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2021 terhadap IHK April 2021.

²⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2021 terhadap IHK Desember 2020.

³⁾ Persentase perubahan IHK Mei 2021 terhadap IHK Mei 2020

Target inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yaitu sebesar 3,96% masih berada dalam range target RKP 2022. Target inflasi Kabupaten Indragiri Hilir ini akan dapat dicapai apabila dapat mengendalikan atau menjamin ketersediaan dan distribusi ketiga kelompok yang memberi andil inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.1.2. Kemiskinan, IPM, Gini Ratio dan Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2018, Tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,05%, Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi 6,54% atau menurun sebesar 0,51% dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Indragiri Hilir sebesar 5,93% atau menurun sebesar 0,61% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 diperkirakan target sebesar 6,9-7,4%(Target RKPD 2021). Target RKPD pada tahun 2022, diperkirakan angka kemiskinan 5,65-4,97% Kabupaten Indragiri Hilir. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi			Target RKPD 2021	Target RKPD 2022
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,05	6.54	5,93	6,9-7,4	5,65-4,97

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Indragiri Hilir masih sebesar 66,51 dan tahun 2019 sebesar 66,84 dengan kenaikan sebesar 0,33. Pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 66,54%. Pada Target RKPD tahun 2021 angka IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,66%. Jika mengacu kepada peningkatan IPM Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2020 yaitu sebesar 0,33 per tahun. Maka Proyeksi IPM RKPD Tahun 2022 sebesar 70,29-70,69%. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM Kabupaten Indragiri Hilir perlu komitmen yang kuat untuk peningkatan 4 komponen utama pembentuk IPM : Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Riel Per Kapita. Data IPM diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi			Target RKPD 2021	Target RKPD 2022
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,51	66,84	66,54	67,66	70,29-70,69

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2018, gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir masih sebesar 0,330. Pada tahun 2019 gini ratio Indragiri Hilir sedikit membaik menjadi

0,301. Pada tahun 2020 gini ratio Indragiri Hilir sedikit naik menjadi 0,310. Target RKPD 2021 sebesar 0,32. Sedangkan Proyeksi RKPD tahun 2022 masih pada nilai sebesar 0,32.

Tabel 3.6
Gini Ratio Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi			Target RKPD 2021	Target RKPD 2022
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
Gini Ratio	0,330	0,301	0,301	0,32	0,32

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,96%, sudah dibawah besaran pengangguran terbuka yang ditetapkan RKP 2020. Pada tahun 2019, pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir naik menjadi 4,55%. Pada tahun 2020, pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi 4,35%. Pada tahun 2021 di targetkan pada RKPD pada angka 4,9-5,2% dan pada proyeksi tahun 2022, diperkirakan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,84%, namun akibat Pandemi COVID-19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir bekisar 5,2 – 5,7%. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator Makro	Realisasi			Target RKPD 2021	Target RKPD 2022
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,96	4,55	4,35	4,9-5,2	3,84

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat

terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2017 hingga tahun 2020, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (*one day service*).

3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
5. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
6. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Badan Pendapatan Daerah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
2. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
3. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan.

Dalam implementasinya, kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2019-2023 rata-rata realisasi Pendapatan Daerah cenderung

mengalami penurunan (lihat Tabel 3.4). Penurunan Pendapatan ini dikarenakan :

1. Dengan akan diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN yang akan dimulai pada Bulan Desember 2021, sehingga potensi perhitungan targetnya menjadi nol.
2. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Presiden Jokowi menandatangani UU baru ini pada 10 Juni 2020 lalu, sehingga belum dipastikan kewenangan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta pajak air tanah mengalami kemerosotan.
3. Pajak Hotel dan Restoran juga stagnan dan akan kembali turun, mengingat hampir sebagian kontribusi penerimaan bersumber dari makan minum dan kegiatan perangkat daerah akan mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan, dan hal ini berpengaruh pada pajak hiburan dimana adanya pembatasan aktivitas.
4. Kebijakan diambil nantinya adalah pemberian stimulus berupa kebijakan fiskal berupa pemberian keringanan, pengurangan dan atau penghapusan baik berupa denda dan atau pokok.

5. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah
6. Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada tahun 2019 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.2.009.010.470.891, menurun menjadi Rp.1.576.380.107.786 pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari Rp.153.746.222.015 pada tahun 2019 menjadi Rp.182.522.701.764 pada tahun 2022.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah, komponen Pendapatan Pajak Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan mengalami peningkatan, sedangkan Komponen Pendapatan Retribusi Daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari Rp.101.431.717.326 pada tahun 2019 menjadi Rp. 121.984.479.802 pada tahun 2022. Pendapatan Pajak Daerah meningkat dari Rp.35.514.403.295 pada tahun 2019 menjadi Rp.44.372.729.622 pada tahun 2022.

Pendapatan Retribusi Daerah menurun dari Rp.6.437.046.218 menjadi Rp.4.240.022.500 pada tahun 2022. Selanjutnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari Rp.10.363.055.176 menjadi Rp.11.925.469.840 pada tahun 2022.

Pendapatan Transfer Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari Rp.1.772.028.998.441 pada tahun 2019 menjadi Rp.1.322.139.006.022 pada tahun 2022. Seluruh komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum, mengalami penurunan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun dari Rp.1.662.049.038.630 pada tahun 2019 menjadi Rp.1.221.202.388.000 pada tahun 2022. Pendapatan Transfer Antar Daerah menurun dari Rp.109.979.959.811 pada tahun 2019 menjadi Rp.100.936.618.022 pada tahun 2022.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari Rp.83.235.250.436 pada tahun 2019 menjadi Rp.71.718.400.000 pada tahun 2022.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode yang berkenaan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir paling tidak selaras dengan peningkatan kebutuhan (biaya) yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan, hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Proyeksi Belanja Pegawai khususnya Gaji terjadi penurunan, dikarenakan belum dialokasikan Belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru PNS serta Tambahan Penghasilan Guru melalui Dana Alokasi Khusus.
2. Belanja Gedung Pemerintah pada tahun 2022 diperuntukkan untuk pembangunan gedung Pelayanan Publik.
3. Pada 2021 dilihat dari porsi belanja lebih besar dibandingkan tahun 2022, bahwa pada tahun 2021 lebih banyak menangani ruas jalan dan

irigasi non status, namun pada tahun 2022 fokus menangani jalan dan irigasi kewenangan kabupaten.

Jumlah Belanja Daerah penurunan dari Rp.1.983.886.222.422 pada tahun 2019 menjadi Rp.1.900.387.533.317 pada tahun 2022. Seluruh komponen Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan, sedangkan Belanja Modal dan Belanja Transfer mengalami penurunan, karena tidak memasukkan Proyeksi Belanja Dana Alokasi Khusus. Jumlah Belanja Operasi mengalami kenaikan dari Rp.1.423.026.699.338 pada tahun 2019 menjadi Rp.1.432.316.775.873 pada tahun 2022. Jumlah Belanja Modal menurun dari Rp.257.568.468.821 pada tahun 2019 menjadi Rp.140.139.735.807 pada tahun 2022. Jumlah Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp.43.000.000.000 pada tahun 2022. Sedangkan Belanja Transfer mengalami penurunan dari Rp.303.291.054.263 pada tahun 2019 menjadi Rp.284.931.021.637 pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari usulan masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan dan telah dibahas bersama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rencana program prioritas tahun 2022 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 dan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi

Riau tahun 2022. Peningkatan anggaran untuk program-program prioritas yang diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik maka diharapkan tingkat pencapaian indikator pembangunan pada tahun 2022 akan terwujud.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan

daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi oleh penggunaan SILPA cenderung meningkat dari Rp.80.465.539.348 pada tahun 2019 menjadi Rp.324.007.425.531 pada tahun 2022. Sebaliknya Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari Rp.10.425.000.000 pada tahun 2019 menjadi Rp.0, pada tahun 2022, dikarenakan masa berlakunya. Konsekuensi dari penurunan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Netto yang cenderung meningkat. Penerimaan Netto Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari Rp.70.040.539.348 pada tahun 2019 menjadi Rp.324.007.425.531 pada tahun 2022.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun Berjalan 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.746.222.015	180.933.541.320	201.726.817.167	182.522.701.764	229.399.008.499
4.1.01	Pajak Daerah	35.514.403.295	55.499.238.207	44.782.806.331	44.372.729.622	46.148.073.736
4.1.02	Retribusi Daerah	6.437.046.218	2.991.279.434	7.447.058.900	4.240.022.500	8.491.542.376
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.363.055.176	9.949.705.156	12.210.656.772	11.925.469.840	12.781.030.634
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	101.431.717.326	112.493.318.523	137.286.295.164	121.984.479.802	161.978.361.754
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.772.028.998.441	1.707.840.440.112	1.679.277.731.206	1.322.139.006.022	1.792.504.747.434
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.662.049.038.630	1.599.047.295.747	1.575.329.451.630	1.221.202.388.000	1.683.700.923.817
4.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.979.959.811	108.793.144.365	103.948.279.576	100.936.618.022	108.803.823.617
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83.235.250.436	95.782.968.757	71.718.400.000	71.718.400.000	71.718.400.000
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	83.235.250.436	95.782.968.757	71.718.400.000	71.718.400.000	71.718.400.000
	Jumlah Pendapatan	2.009.010.470.891	1.984.556.950.189	1.952.722.948.373	1.576.380.107.786	2.093.622.155.934
5.	BELANJA					
5.1.	BELANJA OPERASI	1.423.026.699.338	1.369.383.454.984	1.557.482.138.974	1.432.316.775.873	1.521.121.271.277
5.1.01	Belanja Pegawai	805.680.053.515	772.661.201.566	906.688.209.923	759.346.953.393	792.796.875.831
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	569.823.115.548	535.532.315.991	585.558.234.551	616.464.369.350	663.324.395.446

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun Berjalan 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5	6	7
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	44.716.210.276	56.176.452.427	59.225.174.500	54.173.573.130	60.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	807.320.000	1.013.485.000	4.010.520.000	2.331.880.000	3.000.000.000
5.2.	BELANJA MODAL	257.568.468.821	264.520.277.990	137.820.529.924	140.139.735.807	186.674.196.964
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	88.500.000	2.321.000.000	450.000.000	599.425.910
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.309.578.417	123.885.138.656	39.102.910.495	30.951.893.307	41.229.704.012
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.290.352.929	80.172.866.481	20.482.282.330	36.934.508.500	49.198.891.912
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.301.475.990	51.429.112.768	72.003.437.099	65.403.624.000	87.121.392.933
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.000.200	5.118.163.397	3.910.900.000	4.849.710.000	6.460.092.953
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	28.653.061.285	3.826.496.687	-	1.550.000.000	2.064.689.245
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	21.292.987.673	25.720.345.428	43.000.000.000	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	21.292.987.673	25.720.345.428	43.000.000.000	5.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER	303.291.054.263	307.794.824.193	285.040.482.703	284.931.021.637	418.826.687.693
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.412.277.609	4.905.377.893	4.769.478.203	4.660.017.137	5.463.961.611
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	296.878.776.654	302.889.446.300	280.271.004.500	280.271.004.500	413.362.726.082
	Jumlah Belanja	1.983.886.222.422	1.962.991.544.840	2.006.063.497.029	1.900.387.533.317	2.131.622.155.934
	Total Surplus/(Defisit)	25.124.248.469	21.565.405.349	(53.340.548.656)	(324.007.425.531)	(38.000.000.000)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun Berjalan 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN					
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.465.539.348	97.164.787.818	269.989.085.592	324.007.425.531	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.465.539.348	97.164.787.818	269.989.085.592	324.007.425.531	50.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.465.539.348	97.164.787.818	269.989.085.592	324.007.425.531	50.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.425.000.000	3.700.000.000	-	-	12.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.425.000.000	3.700.000.000	-	-	12.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.425.000.000	3.700.000.000	-	-	12.000.000.000
	Pembiayaan Netto	70.040.539.348	93.464.787.818	269.989.085.592	324.007.425.531	38.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	95.164.787.818	115.030.193.167	216.648.536.936	-	-

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun

negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum.
- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 di samping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dan RKP Nasional Tahun 2022. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dan sasaran tahun keempat (2022) dapat kami sajikan pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 tahun keempat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketatan hukum				
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1 Penegakan disiplin ASN	1 Memantapkan sosialisasi peraturan tentang disiplin ASN secara kontinu
				2 Memantapkan pembinaan kepada ASN yang indisipliner dan reward kepada ASN berprestasi
			2 Pencegahan KKN	1 Memantapkan sosialisasi peraturan anti KKN
				2 Memantapkan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan				
							dengan lembaga penegak hukum			
						3	Memantapkan pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)			
					3	Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1	Memantapkan perumusan perencanaan pembangunan		
							2	Memantapkan sistem dan penyerbarluasan informasi perencanaan berbasis <i>information technolgy</i> (IT)		
							3	Memantapkan penyebarluasan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis <i>information technolgy</i> (IT)		
					4	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala	1	Memantapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan internal Perangkat Daerah		
							2	Memantapkan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah		
					2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN
									2	Memantapkan sarana dan prasarana pelayanan publik
							2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik
		2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan							
		Misi 2:								
		Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah								
		2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan	1	Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan kabupaten	
								2	Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan lingkungan	
2	Peningkatan upaya peningkatan jalan					1	Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan kabupaten			
						2	Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan lingkungan			
3	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					1	Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten			
						2	Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan			
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak					1	Peningkatan jaringan perpipaan air minum	1	Memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pendanaan peningkatan jaringan perpipaan air minum	
								2	Memantapkan penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri	
				2	Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	1	Memantapkan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman			
						2	Membangun instalasi pengolahan air minum (IPA) yang bersumber dari sumur bor			

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan								
		3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1	Peningkatan pembangunan drainase di lingkungan pemukiman	1	Memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan drainase							
						2	Memantapkan capaian kinerja pembangunan drainase							
						2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan pemukiman	1	Memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran rehabilitasi/pemeliharaan drainase					
								2	Memantapkan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan drainase					
							3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman	1	Memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan IPAL				
									2	Memantapkan capaian kinerja pembangunan IPAL				
					4	Peningkatan upaya penataan dan pengelolaan lingkungan pemukiman dan pemakaman	1	Memantapkan upaya penataan bangunan						
							2	Memantapkan tata kelola lingkungan pemakaman						
							3	Memantapkan upaya pemberdayaan komunitas perumahan						
							2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1	Meningkatnya layanan angkutan darat	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat	1	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan darat
													2	Memantapkan sarana dan prasarana angkutan darat
													3	Memantapkan pengawasan kelayakan sarana angkutan darat
2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan darat											
		2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan uji kelayakan angkutan darat											
		3	Menertibkan pengelolaan Tepi jalan umum											
2	Meningkatnya layanan angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	1	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan									
				2	Memantapkan sarana dan prasarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan									
				3	Memantapkan pengawasan kelayakan sarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan									
		2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan									
				2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan kelengkapan angkutan air									
				Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat										
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian	1	Memantapkan infrastruktur pertanian							
						2	Memantapkan SDM pertanian							
						3	Memantapkan kelembagaan pertanian							
						4	Memantapkan alat dan mesin pertanian							

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan			
						5	Memantapkan pembiayaan usaha pertanian		
						6	Memantapkan penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim		
						7	Memastikan kecukupan dan kontinuitas ketersediaan sarana produksi		
						8	Memantapkan koordinasi lintas sektor		
				2	Penguatan daya saing produk pertanian	1	Mewujudkan efisiensi produksi pertanian		
						2	Mewujudkan harga produk pertanian yang bersaing		
						3	Memantapkan pemasaran produk pertanian		
				2	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya	1	Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
								2	Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
								3	Memantapkan SDM perikanan
		4	Memantapkan kelembagaan perikanan						
		5	Memantapkan infrastruktur perikanan						
		6	Memantapkan pembiayaan usaha perikanan						
		7	Memantapkan penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim						
		8	Memantapkan koordinasi lintas sektor						
		2	Penguatan daya saing produk perikanan			1	Mewujudkan efisiensi produksi perikanan		
						2	Mewujudkan harga produk perikanan yang bersaing		
				3	Memantapkan pemasaran produk perikanan				
		3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata	1	Memantapkan promosi objek-objek dan daya tarik wisata		
						2	Memantapkan penyelenggaraan even-even pariwisata		
				2	Pengembangan destinasi wisata	1	Memantapkan infrastruktur pariwisata		
						2	Memantapkan wisata alam		
						3	Memantapkan wisata budaya dan religi		
						4	Memantapkan wisata agro		
				3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	1	Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang kuat		
						2	Memantapkan SDM Pariwisata		
						3	Memantapkan koordinasi lintas sektor		
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan			1	Meningkatnya Tutupan Lahan	1	Peningkatan tutupan dan performance hutan	1	Memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi, perubahan, ataupun perawatan yang berdampak terhadap tutupan lahan
						2	Memantapkan ruang terbuka hijau		

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
			2	Peningkatan kondisi tutupan tanah	1 Memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan erosi tanah dan air limpasan 2 Memantapkan upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air
			3	Peningkatan konservasi badan air	1 Memantapkan upaya menjaga proporsi hutan di sepadan sungai/ danau 2 Memantapkan upaya konservasi badan air
			4	Peningkatan kondisi habitat	1 Memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati 2 Memantapkan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati
		2	1	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara	1 Memantapkan pengawasan terhadap emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin 2 Memantapkan pengawasan terhadap emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya
			2	Peningkatan pengendalian pencemaran udara	1 Memberlakukan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif 2 Membangun komitmen antara para pemangku kepentingan
		3	1	Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air	1 Memantapkan pengawasan terhadap pencemaran air 2 Memantapkan upaya pemulihan (restorasi) pencemaran pada sumber air
			2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global	1 Memantapkan upaya mempertahankan ketersediaan air yang cukup bagi aktivitas makhluk hidup 2 Memantapkan upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air
			3	Pengendalian penggunaan air	1 Memantapkan pengawasan terhadap penggunaan air 2 Mengintensifkan kampanye efisiensi penggunaan air
			4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi	1 Memantapkan pengawasan terhadap tingkat erosi dan sedimentasi 2 Memantapkan upaya pemulihan (restorasi) erosi dan sedimentasi
		4	1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.	1 Memaksimalkan sarana dan prasarana persampahan 2 Megedepankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan		
						3	Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.	
					2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan	1	Memantapkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan persampahan
							2	Memantapkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R
Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa								
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.	1	Memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) secara merata, dan terjangkau di setiap desa.	
						2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).	
						3	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD	
						4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.	
						5	Memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.	
					2	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.	1	Memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.
							2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
							3	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
							4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.
							5	Memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar.
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1	Penguatan upaya promotif dan preventif	1	Memantapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	
						2	Memantapkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
						3	Meningkatan upaya kesehatan masyarakat	

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan			
				2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1	Memantapkan upaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan		
						2	Memantapkan pengawasan obat dan makanan		
						3	Memantapkan obat asli Indonesia		
						4	Memantapkan upaya pengadaan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan		
						5	Mempercepat standarisasi pelayanan kesehatan		
						6	Memantapkan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
						7	Memantapkan pelayanan kesehatan anak balita		
						8	Memantapkan mutu pelayanan BLUD		
						9	Memantapkan sumberdaya kesehatan		
						10	Memantapkan manajemen dan informasi kesehatan		
				3	Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	1	Mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat		
						2	Memantapkan upaya pengembangan lingkungan hidup sehat		
				4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1	Memantapkan pelayanan keluarga berencana		
						2	Memantapkan upaya keselamatan ibu dan anak		
3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1	Peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat	1	Memantapkan pendapatan masyarakat				
				2	Mengendalikan inflasi				
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1	Peningkatan kuantitas sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan pembangunan sarana rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan		
						2	Membangun sarana rumah ibadah sesuai kebutuhan		
				2	Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan peningkatan pembangunan sarana rumah ibadah		
						2	Memantapkan sarana rumah ibadah		
				3	Peningkatan upaya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah		
						2	Memantapkan upaya rehabilitasi sarana rumah ibadah		
				2	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1	Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan	1	Memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan umat beragama
								2	Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktivitas keagamaan
		2	Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan			1	Memantapkan forum kerjasama antara umat beragama		
						2	Memantapkan kegiatan kerjasama antara umat beragama		
Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan									
5.1	Meningkatkan	1	Meningkatnya	1	Peningkatan kuantitas	1	Memantapkan angka melek huruf		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	partisipasi sosial	partisipasi perempuan dalam pembangunan	dan kualitas pendidikan perempuan	perempuan
				2 Memantapkan angka rata-rata lama sekolah perempuan
				3 Memantapkan angka harapan lama sekolah perempuan
			2 Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan perempuan	1 Memantapkan usia harapan hidup perempuan
				2 Memantapkan cakupan pelayanan kesehatan bagi perempuan
		2 Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat	1 Peningkatan kepedulian sosial	1 Memantapkan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
				2 Memantapkan kepedulian sosial kepada korban bencana
				3 Memantapkan penerimaan zakat
				4 Memantapkan jumlah hewan kurban
			2 Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Memantapkan jumlah kelompok tani
				2 Memantapkan jumlah koperasi
				3 Memantapkan jumlah lembaga keuangan berbasis masyarakat
				4 Memantapkan jumlah LSM
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga swasta	1 Memantapkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan
				2 Memantapkan partisipasi perempuan dalam partai politik
				3 Memantapkan partisipasi perempuan dalam lembaga swasta
			2 Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi	1 Memantapkan partisipasi angkatan kerja perempuan
				2 Memantapkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian
		2 Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1 Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Memantapkan kelas kelompok tani
				2 Memantapkan koperasi berkualitas
				3 Mempercepat transformasi UED-SP menjadi BUMDes
			2 Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Memantapkan cakupan pelayanan kelompok tani
				2 Memantapkan cakupan pelayanan koperasi
				3 Memantapkan cakupan pelayanan BUMDes
		3 Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1 Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	1 Memantapkan kualitas panti sosial
				2 Memantapkan kualitas LSM
				3 Memantapkan kualitas lembaga PKK
				4 Memantapkan kualitas Posyandu
				5 Memantapkan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga
			2 Peningkatan peran kelembagaan sosial	1 Memantapkan cakupan pelayanan panti sosial
				2 Memantapkan cakupan pelayanan LSM

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan	
						3	Memantapkan cakupan pelayanan lembaga PKK
						4	Memantapkan cakupan pelayanan Posyandu
						5	Memantapkan cakupan pelayanan organisasi kepemudaan dan olah raga
Misi 6: Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial							
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas	1	Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana dan perdata
						2	Memantapkan wawasan kebangsaan
						3	Memantapkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas
				2	Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas	1	Memantapkan penegakan hukum dengan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, kesetaraan dan akuntabel
						2	Memantapkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya penindakan tindak kriminalitas
						2	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi
		2	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat				
		3	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan				
		4	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi				
		2	Peningkatan hak-hak politik (political liberty)	1	Memantapkan upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih		
				2	Memantapkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan		
				3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)	1	Memantapkan upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil
						2	Memantapkan peran DPRD
		3	Memantapkan peran Partai Politik				
		4	Memantapkan peran birokrasi Pemda				
		3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
						2	Memantapkan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
						3	Memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
						4	Memantapkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan		
							korban kekerasan	
						5	Memantapkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
				2	Peningkatan penanganan dan penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	
						2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
		4	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS,korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	1	Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	
						2	Memantapkan upaya memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat	
						3	Mengoptimalkan sarana dan prasarana tanggap darurat kepada korban bencana yang dievakuasi	
						4	Memantapkan upaya memberikan jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	
				2	Peningkatan upaya penertiban PMKS	1	Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMKS	
						2	Melakukan pengamanan dan pembinaan terhadap PMKS	
		5	Menurunnya resiko bencana	1	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.	1	Memantapkan alokasi anggaran penanggulangan bencana daerah	
						2	Memantapkan efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan daerah	
						3	Memantapkan dan memantapkan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah	
						4	Mewujudkan penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan pemerintah daerah.	
				2	Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.	1	Memantapkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah	
						2	Menggalang kemitraan dengan lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)	
				3	Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.	1	Menjamin transparansi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana	
						2	Memantapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai efektivitas penanggulangan bencana daerah	
				4	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	1		Mengoptimalkan strategi penyadaran publik untuk memantapkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan	
						2	Memantapkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset,
						3	Menyusun penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas kabupaten berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.
				5	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.	1	Membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar dinas/instansi terkait secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala
						2	Memantapkan tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan memantapkan alternatif moda penyebaran, strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat
						2	Memantapkan kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.
				6	Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.	1	Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
						2	Mengimplemantasikan kegiatan pemulihan bencana berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran							
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran	1	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Peningkatan upaya penyusunan dan penyebaran data dan informasi ketenagakerjaan	1	Menyusun data dan informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel
						2	Mengintensifkan even-even bursa tenaga kerja
				2	Peningkatan upaya meningkatkan investasi yang bersifat padat karya	1	Memberikan kemudahan kepada investor-investor yang memantapkan usaha padat karya, terutama yang memprioritaskan menyerap tenaga kerja lokal
						2	Memberikan prioritas kepada investor-investor yang akan memantapkan usaha berbasis pada sumberdaya lokal
		2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja	1	Memantapkan lulusan S1/S2/S3
						2	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

No	Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan					
						3	Memantapkan sekolah menengah kejuruan berbasis sumberdaya lokal				
							Memantapkan perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal				
				2	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1	Memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				
						2	Memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat				
						3	Memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan	1	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1	Peningkatan perlindungan sosial berbasis masyarakat miskin	1	Menyusun data dan informasi kemiskinan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel secara berkala				
						2	Memberikan bantuan penanganan kesehatan kepada masyarakat miskin				
						3	Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin				
						4	Memantapkan sistem jaminan kesejahteraan sosial daerah				
				2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1	Memantapkan bantuan raskin dan/atau biaya langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin				
						2	Memantapkan penanganan daerah rawan pangan				
						2	Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1	Memantapkan produktivitas pertanian dan perikanan
										2	Mengupayakan harga produk pertanian dan perikanan yang bersaing
		3	Mengurangi beban biaya usahatani dan usaha perikanan dengan memberikan bantuan/subsidi								
		4	Memantapkan pembangunan rumah bagi fakir miskin								
		2	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin	1	Memantapkan kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan						
				2	Memantapkan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro						

Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah							
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi	1	Menumbuhkembangkan komoditi, produk, dan jenis usaha unggulan daerah
						2	Memantapkan daya saing sektoral
						3	Memantapkan potensi pariwisata dan kebudayaan
						4	Memantapkan ekonomi kreatif
						5	Mewujudkan efisiensi ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Penurunan kesenjangan pendapatan	6 Memantapkan infrastruktur ekonomi
				7 Memantapkan perlindungan konsumen
				1 Memantapkan nilai tukar petani
				2 Mengendalikan inflasi
				3 Memberikan bantuan pengembangan usaha produktif
		2 Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	1 Pengembangan kluster industri daerah	1 Mempercepat penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten (RIPIK)
				2 Menetapkan komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RIPIK yang tertuang dalam bentuk Perda
				3 Mempercepat terbentuknya klaster industri produk unggulan daerah
			2 Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah	1 Mempercepat penetapan kompetensi inti industri daerah dalam bentuk perda
				2 Menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri
				3 Menjalin kemitraan dalam pengembangan kompetensi inti industri dengan perusahaan-perusahaan menengah dan besar
		3 Meningkatnya investasi daerah	1 Peningkatan promosi investasi	1 Menyusun dokumen masterplan dan bisnis plan pengembangan komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah
				2 Memantapkan penyelenggaraan even-even promosi investasi
				3 Mengintensifkan diseminasi dokumen promosi investasi (ringkasan masterplan/bisnis plan) melalui media massa dan elektronik
			2 Pemberian kemudahan dan insentif investasi	1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur, memperjelas waktu dan biaya pengurusan
				2 Memberikan tax allowance kepada investor yang berinvestasi pada komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah, melakukan pendidikan vokasi, dan bermitra dengan usaha mikro
				3 Memberikan tax holiday kepada usaha mikro
				4 Membebaskan perusahaan modal ventura sebagai objek PPh.
		4 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1 Peningkatan ketersediaan pangan	1 Memantapkan produksi pangan daerah, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
				2 Mengendalikan impor pangan pokok
				3 Memantapkan upaya pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan
				4 Memantapkan cadangan pangan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
			2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	1	Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi pangan secara berkala
					2	Melakukan operasi pasar terhadap pangan pokok sesuai kebutuhan
					3	Memantapkan toko tani kabupaten
			3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	1	Mengintensifkan pemantauan terhadap produk pangan
					2	Mengintensifkan upaya pengalakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			4	Penguatan kelembagaan ketahanan pangan	1	Memantapkan dan menintensifkan peranan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
					2	Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural”** melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 – 6,0;

2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,5 – 6,2 persen;
4. Rasio Gini pada angka 0,376 – 0,378 (Nilai);
5. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,44 – 73,48;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8 0 27,1 persen;
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104 ; dan
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 -105.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 di samping mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2022, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2022 sesuai dengan tema yaitu **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima”**.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Sejalan dengan Tema RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Menuju Pemantapan Kemajuan Martabat dan Marwah Indragiri Hilir”**. Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,9%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 4,97%, IPM diproyeksikan sebesar 67,92, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,32 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 3,84%.

Isu strategis di Kabupaten Indragiri Hilir dengan permasalahan pembangunan yang paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional, sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terus ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik akan terus ditingkatkan.

2. Pemantapan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan

dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit bunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari. namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi

apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis .

Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaan nya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

10. Peningkatan fungsi terminal bandar laksamana Indragiri menjadi terminal penumpang dan barang.

Pembangunan Terminal Bandar Laksamana Indragiri terletak di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2010 lalu.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu serta berkembangnya industri-industri di beberapa wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan semakin tingginya kegiatan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan transportasi. Kota Tembilahan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pusat pengembangan pembangunan, pusat pemerintahan, perdagangan, industri, serta pusat

pelayanan sosial seperti pusat pendidikan, kesehatan serta distribusi barang dan jasa.

Ketersediaan fasilitas terminal baik fasilitas umum maupun fasilitas penunjang, pengoperasian dan pelaksanaan terminal, serta pemeliharaan terminal. Untuk itu dalam upaya memaksimalkan penggunaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri perlu ditingkatkan fungsi menjadi terminal penumpang dan barang dan mengupayakan agar masyarakat untuk menggunakan Terminal Bandar Laksamana Indragiri dan meningkatkan kedisiplinan pemilik jasa dan pengguna angkutan penumpang dan barang.

11. Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh.

Dalam rangka Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menyusun Perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan melakukan pengadaan tanah sehingga bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka kebijakan terkait penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
3. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
4. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri dan penguatan kesehatan masyarakat;
7. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
8. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi Covid-19;
9. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan.

Adapun Arah Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi

- a. Pembangunan infrastruktur, aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
- b. Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja;
- c. Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.

2. Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah

- a. Pemanfaatan creative financing, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
- b. Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah.
- c. Dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (KDD) untuk pelaksanaan creative financing melalui skema pendanaan terintegrasi (integrated funding).

3. Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Tahun 2022

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
Pemantapan pemerataan pem- angunan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pembangunan Prasarana Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	Mutasi dan Promosi ASN
	Pengembangan Kompetensi ASN
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pengembangan Kompetensi Teknis
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Pendampingan dan Asistensi
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Administrasi Tata Pemerintahan
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	Peningkatan Kapasitas DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	Fasilitasi Tugas DPRD
Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Penataan Pendaftaran Penduduk
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	Pelayanan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pengelolaan Sampah
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Mewujudkan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	Investigasi Kejadian Kebakaran
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	PROGRAM PENATAAN DESA

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Penyelenggaraan Penataan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN
	Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam rangka mengatasi permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang diperoleh dari hasil reses para anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dibagi pada beberapa Urusan, sebagaimana tabel 4.3. berikut :

Tabel : 4.3.

Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

URUSAN	PERMASALAHAN
1. PENDIDIKAN	• Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan • Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan • Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan S1 • Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan
2. KESEHATAN	• Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan • Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit • Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu • Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Imunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	• Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak • Rendahnya Ketersediaan Air Bersih • Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Kebutuhan • Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai • Perlunya Penanggulangan Longsoran Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai • Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai • Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai • Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	• Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni • Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang Memadai dan Rusak
5. LINGKUNGAN HIDUP	• Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan • Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
6. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• Dukungan SDM untuk Trantibum.
7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	• Terbatasnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal
8. SOSIAL	• Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan • Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional • Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat • Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti
9. KETENAGAKERJAAN	• Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

URUSAN	PERMASALAHAN
	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
10. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan.
11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Pengelolaan BUMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender - Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
13. PERHUBUNGAN	Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik
15. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	- Perlunya Bantuan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat - Minimnya Pengembangan UMKM
16. PERPUSTAKAAN	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
17. KEARSIPAN	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
18. KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Masih Rendahnya Produksi Perikanan - Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan - Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan - Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
19. PARIWISATA	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisata

URUSAN	PERMASALAHAN
	• Kurangnya Event Kepariwisataaan Penunjang Promosi Wisata Daerah • Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
20. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	• Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga • Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga • Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan • Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
21. KEBUDAYAAN	• Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya • Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
22. PERTANIAN	• Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani • Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen • Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Belum tersedia pengaturan air di lahan pertanian dan perkebunan • Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Minimnya Sarana Prasarana Perbenihan Pertanian

URUSAN	PERMASALAHAN
	Kurangnya Penyediaan Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pangan
23. PERDAGANGAN	Minimnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
24. PERINDUSTRIAN	Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
25. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Terbatasnya SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional
26. PENANGGULANGAN BENCANA	Minimnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
27. KEPALA DAERAH	- Perlunya Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai - Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
28. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Peningkatan Kapasitas Dewan
29. KECAMATAN	Minimnya SDM Kecamatan

Tabel : 4.4

Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERMASALAHAN POKOK-POKOK FIKIRAN
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Kapasitas Dewan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Perlunya Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah yang Memadai
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Dukungan SDM untuk Trantibum.
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi	Minimnya SDM Kecamatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERMASALAHAN POKOK-POKOK FIKIRAN
Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang Memadai dan Rusak
Peningkatan Kualitas SDM Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
Peningkatan Kualitas SDM Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Masih Rendahnya Produksi Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERMASALAHAN POKOK-POKOK FIKIRAN
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
Peningkatan Kualitas SDM Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Peningkatan Kualitas SDM Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Peningkatan Kualitas SDM Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan S1
Peningkatan Kualitas SDM Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Rendahnya Ketersediaan Air Bersih
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Perlunya Penanggulangan Longsoran Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisata
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Kurangnya Event Kepariwisata Penunjang Promosi Wisata Daerah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERMASALAHAN POKOK-POKOK FIKIRAN
Saing Daerah	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	kesadaran masyarakat dalam melakukan Imunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan.
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut :

Tabel 4.5.

Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
	Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketatan hukum							
	1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	69	90.361.616.506	99.863.826.632
		1.1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP (predikat)	BB	35.796.666.922	37.889.289.732
					Nilai LPPD (Nilai)	Sangat Tinggi		
					Opini BPK atas LKPD (predikat)	WTP		
					Keterbukaan informasi (%)	60		
4.00.01.17.			1.1.1.1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase keselarasan produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi	0	-	-
4.00.01.18.			1.1.1.2	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	0	-	-
4.00.01.20.			1.1.1.3	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	0,8	80.000.000	65.000.000
			1.1.1.4	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Organisasi	Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	0,9	1.006.977.109	880.000.000
			1.1.1.5	Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	1	3.161.235.377	2.661.235.377
3.00.01.21.			1.1.1.6	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kategori)	Sangat Tinggi	4.614.307.712	3.387.734.000
					Persentase Indikator Program Daerah yang terukur (%)	1	-	-
			1.1.1.8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas pengelolaan keuangan	1	169.669.000	-
			1.1.1.9	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi pemerintahan	1	898.760.000	1.492.993.600

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
3.00.03.16.			1.1.1.10	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengiriman peserta sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Teknis Luar Daerah	1	205.120.000	-
3.00.01.20.			1.1.1.11	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	1	180.000.000	190.584.890
3.00.04.15.			1.1.1.12	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Berbasis Kelapa (%)	1	240.000.000	848.175.000
3.00.03.15.			1.1.1.13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian	0,78	4.636.402.500	3.672.730.000
					Persentase ketersediaan data informasi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1	-	-
3.00.03.17			1.1.1.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (teknis)	Persentase ASN mengikuti DIKLAT	0,52	3.151.837.500	7.066.445.400
3.00.02.15.			1.1.1.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	1	6.459.539.750	8.721.784.465
					Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah	188929,0395	-	-
3.00.02.21.			1.1.1.18	Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan aset daerah	1	1.155.000.000	1.609.210.000
1.02.07.28.			1.1.1.19	Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	197 Desa	200.000.000	150.000.000
1.02.07.26.			1.1.1.20	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	197 Orang	200.000.000	250.000.000
1.02.07.18.			1.1.1.21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan	100 Orang	300.000.000	200.000.000
3.00.05.15.			1.1.1.22	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	1	4.653.697.000	3.441.131.000
					Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	-	-
3.00.05.16.			1.1.1.24	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor sendiri	0,6	98.836.000	75.321.000
			1.1.1.25	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	96	1.077.665.000	1.031.945.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
			1.1.1.26	Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas	1	538.090.000	500.000.000
			1.1.1.27	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase layanan bantuan hukum	1	738.440.393	1.050.000.000
			1.1.1.28	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas	1	797.158.120	250.000.000
1.01.03.34.			1.1.1.29	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	0,6	1.000.000.000	213.039.900
1.01.03.35.			1.1.1.30	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	0,2	212.360.093	86.152.800
1.01.03.36.			1.1.1.31	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	0,2	21.571.368	45.807.300
		1.1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,12	54.564.949.584	61.974.536.900
			1.1.2.1	Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Publikasi Protokol dan Acara	Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	0,82	2.812.395.259	4.570.000.000
					Nilai Keterbukaan Informasi	53,2%	-	-
4.00.01.15.			1.1.2.2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	1	9.261.266.200	7.897.841.000
					Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan	1	-	-
3.00.01.16.			1.1.2.4	Program Kerjasama Pembangunan	Capaian kerjasama pembangunan daerah (%)	1	540.000.000	-
1.02.06.15.			1.1.2.5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	0,1961	1.887.484.500	178.338.000
1.02.10.15.			1.1.2.6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	0	-	-
1.02.10.18.			1.1.2.7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terpenuhi kerjasaa informasi dan media massa.	0	-	-
				Program Pengembangan e-Government	Persentase Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik, Jumlah OPD yang Menyelenggarakan E-Government	0	-	-
			1.1.2.9	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	0,25	4.844.725.000	5.258.877.900
			1.1.2.10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhi Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	1	3.075.289.000	1.780.456.700

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
			1.1.2.11	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen/buku informasi pembangunan daerah	0	-	-
			1.1.2.12	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	0,25	200.000.000	100.647.000
			1.1.2.13	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan persandian	0	-	-
			1.1.2.14	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	0,25	200.000.000	99.338.000
4.00.02.15.			1.1.2.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Perda, Keputusan DPRD, tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan, meningkatnya kegiatan Anggota Dewan, Pokok-pokok dan Rencana Kerja Dewan serta terlaksananya Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan	1	31.094.076.025	40.991.337.300
1.02.18.18.			1.1.2.16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip secara baku	19,8%	70.000.000	45.325.000
			1.1.2.17	Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	1	102.000.000	-
			1.1.2.18	Program Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	324.337.600	500.000.000
			1.1.2.19	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	51.000.000	450.000.000
			1.1.2.20	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	1	102.376.000	102.376.000
	Total Pagu Misi 1						90.361.616.506	99.863.826.632
	Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah							
	2.1.	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat			Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar (%)	31,703	142.717.733.821	100.074.527.606
		2.1.1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan		Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	26,08	116.744.856.353	77.454.467.500
					Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	25,66	-	-
1.01.03.15.			2.1.1.1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jumlah yang Jalan Terbangun	280.18 KM	80.918.811.212	33.083.050.000
1.01.03.18.			2.1.1.2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,1875	7.073.794.253	15.169.995.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
1.01.03.23.			2.1.1.3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	0,2166	464.822.680	200.000.000
1.01.03.31.			2.1.1.4	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	0,21	152.451.466	64.547.500
			2.1.1.5	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	0,2	282.317.135	92.047.500
1.01.03.32.			2.1.1.6	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	0,22	142.659.606	57.462.500
1.01.04.15.			2.1.1.7	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat dan Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	18 Unit	27.710.000.000	28.787.365.000
					Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	40 KM	-	-
		2.1.2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air Bersih layak layak		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air Bersih layak (%)	45,83	12.257.117.468	3.838.672.106
1.01.02.21.			2.1.2.1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	0,8	150.000.000	1.000.000.000
1.01.03.24.			2.1.2.2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik	0,1679	3.959.285.060	1.150.458.000
			2.1.2.3	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1	1.342.640.000	1.571.594.106
3.00.01.19.			2.1.2.4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	1	200.000.000	116.000.000
1.01.03.25.			2.1.2.5	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	0,2	164.144.520	620.000.000
1.01.03.30.			2.1.2.6	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	2900 SR	6.441.047.888	-
		2.1.3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak		Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	63,472	13.715.760.000	18.781.388.000
1.01.03.16.			2.1.3.2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang terpenuhi	6.3 KM	4.200.000.000	5.488.640.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
1.01.04.17.			2.1.3.3	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	5 Ha	1.150.000.000	990.000.000
1.01.04.18.			2.1.3.4	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah daya tampung TPU	1 Lokasi	1.300.000.000	2.884.748.000
1.01.04.19.			2.1.3.5	Program Penataan Bangunan	Jumlah bangunan ber IMB	2 Unit	4.030.000.000	9.418.000.000
1.02.05.24.			2.1.3.6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	8 Lokasi	3.035.760.000	-
	2.2.	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan			Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)	32	10.034.033.000	11.960.235.000
		2.2.1	Meningkatnya layanan angkutan darat		Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)	39,43	1.200.000.000	1.040.780.000
1.02.09.15.			2.2.1.1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Dokumen Standar Perhubungan	0	-	-
1.02.09.16.			2.2.1.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	0,1	1.200.000.000	1.040.780.000
1.02.09.20.			2.2.1.3	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tingkat Kendaraan bermotor Laik Jalan	0	-	-
		2.2.2.	Meningkatnya layanan angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan		konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)	48	8.834.033.000	10.919.455.000
1.02.09.17.			2.2.1.1	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	0,1	3.175.000.000	1.485.235.000
1.02.09.18.			2.2.1.2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0,1	5.659.033.000	9.434.220.000
	Total Pagu Misi 2						152.751.766.821	112.034.762.606
	Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat							
	3.1.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif			PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Juta)	35088933,25	55.184.196.395	40.857.725.700
		3.1.1.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian		PDRB sektor pertanian (Rp juta)	34750175,06	31.168.078.395	24.310.519.700
2.00.03.16.			3.1.1.1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan	1	832.000.000	1.235.000.000
					Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	3 kali	-	-
2.00.03.17.			3.1.1.2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan kebun masyarakat	1	17.871.433.395	11.835.000.000
					Produksi sektor tanaman pangan	110,57 Ton	-	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
2.00.03.18.			3.1.1.3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan	1	5.789.438.000	5.977.827.700
					Produksi sektor perkebunan (ton)		197.765.000	-
2.00.03.19.			3.1.1.4	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program dan penyebarluasan informasi penyuluhan	1	4.110.852.000	2.321.692.000
					Pertemuan penyuluh pendamping petani	85 Kali	-	-
2.00.03.20.			3.1.1.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kesehatan ternak	1.2	546.590.000	140.000.000
2.00.03.21.			3.1.1.6	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Ketersediaan populasi ternak		1.820.000.000	2.801.000.000
					- Ternak besar	150	-	-
					- Ternak Kecil	300	-	-
					- Ternak Unggas	16.500	-	-
		3.1.2.	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan		PDRB sektor pertanian (Rp juta)	34750175,06	10.301.565.000	11.045.206.000
2.00.01.20.			3.1.2.1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	4500 Ton	1.522.500.000	1.794.000.000
2.00.01.21.			3.1.2.2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	79.000 ton	7.819.569.000	7.908.360.000
2.00.01.24.			3.1.2.3	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	1	65.000.000	80.000.000
2.00.01.22.			3.1.2.4	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	29 orang	537.846.000	312.846.000
2.00.01.29.			3.1.2.5	Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun	39,80 Kg/Kapita/Th	356.650.000	950.000.000
		3.1.3.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata		PDRB sektor pariwisata (Rp juta)	338758,184	13.714.553.000	5.502.000.000
1.02.16.15.			3.1.3.1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan Budaya Daerah	7 Event	1.150.000.000	575.000.000
			3.1.3.2	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang Dilatih	180 Orang	300.000.000	-
2.00.02.15.			3.1.3.3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	350.000.000	310.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
2.00.02.16.			3.1.3.4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	2 daya tarik	350.000.000	100.000.000
			3.1.3.5	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	1 Kerjasama	100.000.000	-
2.00.02.21.			3.1.3.6	Program Peningkatan Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-
2.00.02.22.			3.1.3.7	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	0,25	100.000.000	250.000.000
2.00.02.23.			3.1.3.8	Program Pengembangan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Event Pariwisata	11 Event	950.000.000	1.270.000.000
2.00.02.24.			3.1.3.9	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	40 Usaha	100.000.000	-
			3.1.3.10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	5 Unit	3.357.028.000	200.000.000
1.02.16.16.			3.1.3.11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	2 Cagar Budaya	1.000.000.000	800.000.000
1.02.16.18.			3.1.3.12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	2 Event	650.000.000	350.000.000
			3.1.3.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	4 Unit	1.291.917.000	1.447.000.000
			3.1.3.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	5 Unit	3.357.028.000	200.000.000
			3.1.3.15	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisata	Jumlah Peserta Yang Dilatih	200 Orang	658.580.000	-
	3.2.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	54,79	1.804.891.000	-
		3.2.1.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan		Indeks tutupan lahan (indeks)	24,71	496.556.400	671.510.000
1.02.05.17.			3.2.1.1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Tutupan Lahan Hijau	3 Pembinaan	362.556.400	149.000.000
1.02.05.18.			3.2.1.2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		-	400.000.000
1.02.05.19.			3.2.1.3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	2 Dokumen	134.000.000	122.510.000
		3.2.2.	Meningkatnya Kualitas Udara		Indeks kualitas udara (indeks)	92,09	262.778.200	80.277.000
1.02.05.20.			3.2.2.1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan	45 Pengujian	262.778.200	80.277.000
		3.2.3.	Meningkatnya Kualitas Air		Indeks kualitas air (indeks)	57,61	522.778.200	3.689.707.400
1.02.05.16.			3.2.3.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Kasus	24 Kegiatan usaha	522.778.200	491.707.400

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
					Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional			
1.01.04.16.			3.2.3.2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	110 Unit	11.195.166.000	3.198.000.000
		3.2.4.	Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan		Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)	67	522.778.200	8.893.521.100
1.02.05.15.			3.2.4.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah	18,25 Ton	522.778.200	8.893.521.100
	Total Pagu Misi 3						56.989.087.395	40.857.725.700
	Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa							
	4.1.	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	68,08	396.508.484.987	289.325.166.170
		4.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar		Angka Melek Huruf (%)	99,78	137.250.168.000	104.584.901.000
					Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,38	-	-
					Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,96	-	-
1.01.01.15.			4.1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga PAUD Terakreditasi	0,86	6.263.541.120	2.585.000.000
			4.1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Ketersediaan Sekolah- (Per 10.000 Penduduk Usia 7-12 Tahun)	0,7995	118.609.116.498	92.683.300.000
					Rasio Ketersediaan Sekolah- (Per 10.000 Penduduk Usia 13-15 Tahun)	0,7628	-	-
					Angka Kelulusan SD/MI	1	-	-
					Angka Kelulusan SMP/MTs	1	-	-
					Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	0,945	-	-
					Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	0,8801	-	-
1.01.01.18.			4.1.1.3	Program Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi (PKBM)	1	705.000.000	305.000.000
					Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi (LKP)	0,91	-	-
1.01.01.20.			4.1.1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI)	600 Orang	2.553.006.750	320.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
					Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	667 Orang	-	-
1.01.01.21.			4.1.1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	1	8.312.707.632	7.890.253.000
1.02.17.15.			4.1.1.6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4,57%	726.796.000	590.619.000
1.02.18.16.			4.1.1.7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dilestarikan pada LKD	0,1	80.000.000	210.729.000
		4.1.2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (tahun)	68,4	254.686.270.170	181.132.318.170
1.01.02.15.			4.1.2.1	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di Puskesmas	0,7	9.467.281.000	-
1.01.02.16.			4.1.2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	246.120 Kunjungan	52.239.000.000	23.359.663.700
					Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	1	-	-
					Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	1	-	-
1.01.02.17.			4.1.2.2	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	1	100.000.000	112.500.000
1.01.02.19.			4.1.2.3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	0,5	245.000.000	2.520.027.468
					Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	1	-	-
					Persentase penyampaian Informasi kesehatan	0	-	-
1.01.02.22.			4.1.2.4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan	0,5	715.300.000	3.445.142.000
					Cakupan Peserta Sosialisasi HIV/AIDS, dll (%)	1	-	-
					Cakupan Peserta Sosialisasi penanggulangan penyakit menular	1	-	-
1.01.02.23.			4.1.2.5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	1	2.180.000.000	1.075.269.250
					Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	1	-	-
					Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	1	-	-
					Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	0	-	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
1.01.02.25.			4.1.2.6	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	32 PKM	36.987.562.700	25.174.900.340
					Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	1	-	-
1.01.02.28.			4.1.2.7	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	1	150.000.000	1.225.623.000
1.01.02.30.			4.1.2.8	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	0,8	50.000.000	470.435.000
1.01.02.32.			4.1.2.9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase AKI dan AKB	0,1	400.000.000	726.590.500
1.01.02.33.			4.1.2.10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	0,9	111.480.983.584	113.578.983.584
					Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	1	-	-
					Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas 9%)	1	-	-
			4.1.2.11	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajemen Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT	27 PKM	2.650.000.000	2.063.880.000
					Persentase Kualitas Data Terintegrasi	0,8	-	-
					Persentase Peningkatan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kesehatan	0,8	-	-
1.02.08.15.			4.1.2.12	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	0,17	1.580.796.780	210.000.000
1.02.08.16.			4.1.2.13	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	1	180.000.000	145.000.000
1.02.08.18.			4.1.2.14	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	20 Kec	5.316.400.000	120.000.000
1.02.08.20.			4.1.2.15	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	0,6	200.000.000	270.000.000
1.02.08.23.			4.1.2.16	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	0,8728	60.000.000	100.000.000
1.01.02.26.			4.1.2.17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	1	28.698.506.662	5.270.597.328
					Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	1	-	-
					Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1	-	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
							-	-
1.01.02.27.			4.1.2.18	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	1	552.213.000	150.000.000
					Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	1	-	-
					Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	1	-	-
1.02.08.17.			4.1.2.19	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,2103	173.260.000	40.000.000
1.02.08.21.			4.1.2.20	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	1	100.000.000	-
			4.1.2.21	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	0,8	859.966.444	671.297.000
1.01.02.20.			4.1.2.22	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	0,06	300.000.000	402.409.000
		4.1.3.	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	11677,1	4.572.046.817	3.607.947.000
1.02.11.15.			4.1.3.1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi	35 Klpk	1.686.250.000	1.335.734.000
1.02.11.16.			4.1.3.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang mengikuti diklat	240 Koperasi	712.000.000	273.574.000
1.02.11.17.			4.1.3.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipasi	3 Kali	1.612.628.500	1.536.039.000
					Pengembangan industri rumah tangga	30 Klpk	-	-
2.00.06.19.			4.1.3.4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	1	561.168.317	462.600.000
	4.2.	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa			Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1:402	51.008.184.784	37.341.480.000
		4.2.1.	Meningkatnya sarana rumah ibadah		Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1:402	51.008.184.784	37.341.480.000
			4.2.1.1	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.	Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyarakatan	1	51.008.184.784	37.341.480.000
	Total Pagu Misi 4						447.516.669.771	326.666.646.170
	Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
	5.1.	Meningkatkan partisipasi sosial			Cakupan partisipasi sosial (%)	54,65	63.434.390.984	61.483.743.470
		5.1.1.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender IPG (Indeks)	83,29	1.000.000.000	1.160.000.000
1.02.07.19.			5.1.1.1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/Kelurahan	236 Desa/Kel	1.000.000.000	1.160.000.000
		5.1.2.	Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	26	62.434.390.984	60.323.743.470
1.02.07.29.			5.1.2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	96 Desa	3.553.325.000	3.600.000.000
4.00.03.15.			5.1.2.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	0	-	3.600.000.000
4.00.03.15.			5.1.2.3	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	0,9	58.881.065.984	53.123.743.470
	5.2.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat			Jumlah Desa dengan peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun (Desa)	48	21.508.135.450	27.996.286.750
		5.2.1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,8	1.068.950.450	1.625.000.000
1.02.02.16.			5.2.1.1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	1	250.000.000	640.000.000
1.02.02.17.			5.2.1.2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	1	80.000.000	80.000.000
1.02.02.18.			5.2.1.3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	2 Kebijakan	688.950.450	905.000.000
			5.2.1.4	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	0,149253731	50.000.000	-
		5.2.2.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat		Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi (%)	88	1.200.000.000	800.000.000
1.02.07.16.			5.2.2.1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif Membangun Desa	197 BUM Desa	1.100.000.000	800.000.000
			5.2.2.2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pemetaan Kawasan Perdesaan	46 Desa	100.000.000	-

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
		5.2.3.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat		Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (%)	63	19.239.185.000	25.571.286.750
3.00.01.23.			5.2.3.1	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	1	1.090.000.000	1.329.472.000
1.02.13.15.			5.2.3.2	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirausaha muda	0,2	200.000.000	-
1.02.13.16.			5.2.3.3	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0,2	1.280.000.000	1.150.000.000
			5.2.3.4	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pembinaan wirausaha muda	0,2	100.000.000	-
			5.2.3.5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	7 Cabor	150.000.000	-
			5.2.3.6	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	0,2	820.000.000	2.675.000.000
1.02.13.23.			5.2.3.7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan	39 Unit	3.250.000.000	6.475.000.000
1.02.07.17.			5.2.3.8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	0,2	12.349.185.000	13.941.814.750
1.02.07.25.			5.2.3.9	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Desa	15 Unit	-	-
	Total Pagu Misi 5						84.942.526.434	89.480.030.220
	Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial							
	6.1.	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial			Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)		30.948.873.413	29.719.951.100
		6.1.1.	Menurunnya angka kriminalitas		Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	4350	3.411.229.000	4.065.500.000
1.01.05.16.			6.1.1.1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	20 kali	775.000.000	700.000.000
1.01.05.16.			6.1.1.2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	0,16	446.229.000	700.000.000
3.00.06.17.			6.1.1.3	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	250 Orang	200.000.000	615.500.000
1.01.05.15.			6.1.1.4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan	222 kali	1.430.000.000	950.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
					ketentraman masyarakat			
1.01.05.15.			6.1.1.5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0,14	370.000.000	950.000.000
			6.1.1.6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan petugas linmas	0,9	190.000.000	150.000.000
		6.1.2.	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi		Indeks demokrasi Indonesia (indeks)	0	2.900.000.000	1.310.000.000
3.00.06.			6.1.2.1	Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas	Jumlah Forum Dialog Publik dan Rekom yang diterbitkan untuk Pendaftaran Ormas dan Riset	4 Kali	500.000.000	400.000.000
3.00.06.15.			6.1.2.2	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan	500 Orang	950.000.000	410.000.000
3.00.06.16.			6.1.2.3	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	3 Keg	430.000.000	150.000.000
3.00.06.18.			6.1.2.4	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah Forum-forum Diskusi Politik	0,95	770.000.000	350.000.000
3.00.06.19.			6.1.2.5	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada dan Pemilu	0	-	-
3.00.06.19.			6.1.2.6	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Mempersiapkan Petugas Pengamanan Tahapan Pemilu / Pilkada dan Pilkadaes	300 kali	250.000.000	-
		6.1.3.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Jumlah Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)	46	180.000.000	280.000.000
1.02.02.20.			6.1.3.1	Program Pengembangan Kota Layak Anak	Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	650 Poin	180.000.000	280.000.000
		6.1.4.	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa)	2247	620.784.058	403.177.000
			6.1.4.1	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	1	620.784.058	403.177.000
		6.1.5.	Menurunnya resiko bencana		Luas wilayah terdampak bencana (Km2)	1,042732	23.836.860.355	23.661.274.100
3.00.07.15.			6.1.5.1	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana	0,97	150.000.000	200.000.000
3.00.07.16.			6.1.5.2	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan Bencana	0,98	1.508.400.000	1.650.500.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD	
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022	
3.00.07.17.			6.1.5.3	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara daerah pasca bencana	0,95	100.000.000	150.000.000	
3.00.07.18.			6.1.5.4	Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Persentase Jumlah penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik korban bencana	0,98	280.000.000	291.800.000	
1.01.05.25.			6.1.5.5	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	0,33	1.159.452.000	1.032.896.000	
1.01.05.42.			6.1.5.6	Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,27	331.941.353	2.135.000.000	
1.01.03.17.			6.1.5.7	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor yang dibangun	250 M	511.284.690	541.476.500	
1.01.03.19.			6.1.5.8	Program rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	0,1875	7.073.794.253	560.000	
1.01.03.28.			6.1.5.9	Program pengendalian banjir	Panjang parit (anak sungai) yang dinormalisir	75 KM	12.721.988.058	17.659.041.600	
	Total Pagu Misi 6						30.948.873.413	29.719.951.100	
	Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran								
	7.1.	Menurunkan tingkat pengangguran			Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,86	830.000.000	1.761.000.000	
		7.1.1.	Meningkatnya kesempatan kerja			Tingkat kesempatan kerja (%)	370.000.000	860.000.000	
1.02.01.16.			7.1.1.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		besaran pencari kerja yang ditempatkan	0,0286	370.000.000	860.000.000
			7.1.2.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Tenaga Kerja Terlatih (%)	31,678	460.000.000	901.000.000
1.02.01.15.			7.1.2.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Besaran pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	20 Orang	85.000.000	96.000.000
1.02.01.17.			7.1.2.2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Besaran kasus yang diselesaikan melalui PB	0,4676	155.000.000	400.000.000
2.00.08.15.			7.1.2.3	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	750 KK	188.000.000	260.000.000
2.00.08.16.			7.1.2.4	Program Transmigrasi Lokal		Cakupan bina transmigrasi	1dok/225 kk/3 unit	32.000.000	145.000.000
	7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase penduduk miskin (%)	7,3	4.016.212.251	8.139.500.000	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
		7.2.1.	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin		Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	0,2	2.428.849.661	2.777.800.000
1.01.06.16.			7.2.1.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	0,2	1.312.868.432	1.324.000.000
1.01.06.18.			7.2.1.2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	0,2	82.165.340	175.000.000
1.01.06.20.			7.2.1.3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	0,2	194.139.357	270.000.000
1.01.06.30.			7.2.1.4	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	0,2	200.000.000	71.000.000
1.01.06.32.			7.2.1.5	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani	0,2	311.184.592	269.800.000
1.01.06.33.			7.2.1.6	Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis, Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar	0,2	328.491.939	668.000.000
		7.2.2.	Meningkatkan daya beli penduduk miskin		Pengeluaran per kapita penduduk miskin (Rp per kapita per hari)	11677,10039	1.587.362.590	5.361.700.000
1.01.06.15.			7.2.2.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan	0,2	716.892.337	3.422.700.000
1.01.06.21.			7.2.2.2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah yang Menerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	0,2	397.270.743	1.139.000.000
1.01.06.25.			7.2.2.3	Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keuarga Harapan yang dibina	0,2	473.199.510	800.000.000
	Total Pagu Misi 7						4.846.212.251	9.900.500.000
	Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.							
	8.1.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah			Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,26	29.493.604.311	23.714.048.500
		8.1.1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan		Indeks gini (indeks)	0,32	10.330.070.294	5.026.581.000
					Laju inflasi (%)	3,6	-	-
			8.1.1.1	Program Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi Pembangunan	1	1.194.694.416	950.000.000
3.00.01.22.			8.1.1.2	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	1	682.000.000	534.928.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
2.00.06.21.			8.1.1.3	Program Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	1	5.659.375.878	3.255.000.000
2.00.07.15.			8.1.1.4	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan mesin pengolahan kelapa	1	2.124.400.000	180.000.000
1.02.11.18.			8.1.1.5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Koperasi Aktif (Jumlah)	285 Koperasi	669.600.000	106.653.000
		8.1.2.	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan		Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	44,63	9.755.854.217	5.335.439.000
					Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	28,56		
2.00.06.15.			8.1.2.1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	1	2.219.804.066	799.560.000
2.00.06.17.			8.1.2.2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	1.131.500.000	780.000.000
2.00.06.18.			8.1.2.3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pendataan dan informasi harga	1	3.919.821.000	1.495.879.000
2.00.07.16.			8.1.2.4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	2.484.729.151	2.260.000.000
2.00.07.18.			8.1.2.5	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan pertumbuhan Industri	1	-	-
		8.1.3.	Meningkatnya investasi daerah		Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	6810	979.728.800	605.028.500
					Nilai investasi PMA (Juta US\$)	419	-	-
1.02.12.15.			8.1.3.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Kali	354.932.500	275.491.000
1.02.12.16.			8.1.3.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha	0,2	311.734.000	90.941.000
1.02.12.24.			8.1.3.3	Program Pengendalian dan Penataan Perizinan	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan	1100 Izin	159.191.500	83.523.500
1.02.12.17.			8.1.3.4	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya Jumlah Potensi Sumberdaya sarana dan Prasarana Daerah	1 Potensi	20.500.000	-
1.02.12.25.			1.3.5	Program Penataan Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan	110 Izin	133.370.800	155.073.000
		8.1.4.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	89,9	8.427.951.000	12.747.000.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	RPJMD		RKPD
						Target	Tahun 2022	Tahun 2022
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	86,2	-	-
1.02.03.16.			8.1.4.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	91,90%	2.757.000.000	4.249.000.000
1.02.03.15.			8.1.4.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktivitas padi per hektar	42,19 %	3.271.350.000	4.249.000.000
					Produksi Holtikultura	6350	-	-
1.02.03.16.			8.1.4.3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk perkebunan	1	2.399.601.000	4.249.000.000
	Total Pagu Misi 8						29.493.604.311	23.714.048.500

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2022 akan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, meliputi :

Tabel 4.6.

Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022

Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	- Pengembangan Pertanian	- Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.		
- Peningkatan fungsi terminal bandar laksamana Indragiri menjadi terminal penumpang dan barang.	- Pengembangan Industri	- Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh.		
- Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.	- Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	- Pengembangan Pariwisata	- Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
- Pemantapan pemerataan pembangunan.	- Pembangunan Infrastruktur	- Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
- Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi		
- Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.		- Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.	- Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang prima	- Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.		

Tabel 4.7.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2022 dengan PN RKPD 2022

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat yang menerima bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang dibina	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis, Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	21 Orang	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	58 Persen	DINAS KETENAGAKERJAAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				DAN TRANSMIGRASI
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB	53 Persen	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura (%)	40 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/Kelurahan	236 Desa/Kel	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	197 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	344 Koperasi	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Kali	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha	56 Persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Daerah	1 Potensi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Pengendalian dan Penataan Perizinan	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan	493 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Penataan Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan	107 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pendataan dan informasi harga	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peralatan mesin pengolahan kelapa	84 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	574 KK	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Transmigrasi Lokal	Cakupan bina transmigrasi	346 KK	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	82 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi Pembangunan	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TEMBILAHAN
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TEMPULING
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN BATANG TUAKA
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan	100 Persen	KECAMATAN CONCONG

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		Infrastruktur Kelurahan		
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN ENOK
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	96 Persen	KECAMATAN GAUNG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KATEMAN
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	40 Persen	KECAMATAN KEMPAS
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KEMUNING
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KERITANG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN MANDAH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN PELANGIRAN
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan	100 Persen	KECAMATAN PULAU BURUNG

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		Infrastruktur Kelurahan		
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN RETEH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TANAH MERAH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	70 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah Jembatan yang terbangun	210; 0 KM; Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	21; 0 Persen; Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	22 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik	15 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	20 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	70 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	2056 SR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	3; 0 Unit; KM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	5 Hektar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah daya tampung TPU	1 Lokasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	5 KM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	8 Lokasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	7 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	86 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	2 Kebijakan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif Membangun Desa	19 BUM Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	90 Persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pemetaan Kawasan Perdesaan	29 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	60 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	79 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	71 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirausaha muda	90 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pembinaan wirausaha muda	90 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	7 Cabor	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang Disediakan	55 Unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	83 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI); 2. Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	2251; 0 Orang; Orang	DINAS PENDIDIKAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	99 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di Puskesmas	65 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	263565 Kunjungan	DINAS KESEHATAN
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	12 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	40 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Angka Kesakitan	60 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	30 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	90 Persen	DINAS KESEHATAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	70 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase AKI dan AKB	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	80 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	1. Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT; 2. Persentase Kualitas Data Terintegrasi; 3. Persentase Peningkatan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kesehatan	27; 0; 0 PKM; Persen; Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	21 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	3 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll (%)	20 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	64 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	18 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	24 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi penannnggulan penyakit menular	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Mata			
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	90 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	90 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	90 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	17 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	20 Kecamatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	64 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	85 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil	37 Kelompok	DINAS KOPERASI DAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Menengah yang kondusif	yang dibina dan difasilitasi	UM	USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	737 Kelompok	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti; 2. Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	1; 0 Kali; Kelompok	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	5 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.	Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyaratan	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	103 Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah	22 Ton	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Kasus Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional	28 Kegiatan usaha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Tutupan Lahan Hijau	2 Pembinaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	80 Persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	2 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan	24 Pengujian	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan Budaya Daerah	12 Tampilan Kesenian	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	10 Kegiatan	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	3 Festival Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	5 Unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	7788 Ton	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	77172 ton	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	220 orang	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	100 Persen	DINAS PERIKANAN
	Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan	39 Kg/Kapita/Th	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	2 daya tarik	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	20 Kerjasama	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang Dilatih	540 Orang	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	45 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Event Pariwisata	4 Event	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	25 Peserta	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangunan	10 Unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	183 Kelompok Tani	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	3 kali	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor tanaman pangan	694 Ton	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi sektor perkebunan	80 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani	50 Kali	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kesehatan ternak	80 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	5 kali	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani	9 Kelompok Tani	DINAS PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan	100 Persen	DINAS PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan kebun masyarakat	100 Persen	DINAS PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan	58 Persen	DINAS PERKEBUNAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program dan penyebarluasan informasi penyuluhan	100 Persen	DINAS PERKEBUNAN
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor dalam kondisi baik	117 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi Turap/Talud/Bronjong yang di rehabilitasi/Pelihara	20 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program pengendalian banjir	Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik	51 KM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	55 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	95 kali	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	20 kali	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan petugas linmas	82 Persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	39 Persen	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Program Pengembangan Kota Layak Anak	Angka Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	600 Poin	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	90 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	100 Persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan	109 Orang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	158 Orang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	32 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	25 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhi Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	25 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	25 Persen	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip secara baku	9 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	78 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah (%)	94 Persen	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	91 Persen	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan aset daerah	100 Persen	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian	76 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (teknis)	Persentase ASN mengikuti DIKLAT	51 Persen	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				SUMBERDAYA MANUSIA
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	68 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	73 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor sendiri	100 Persen	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	99 Nilai	INSPEKTORAT DAERAH
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan kebangsaan	404 Orang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang dikembangkan	100 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah warga negara yang mengikuti Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	333 Orang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah Forum-forum Diskusi Politik	71 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas	Persentase cakupan Ormas yang dibina	79 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana	96 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan Bencana	98 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara daerah pasca bencana	95 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Persentase Jumlah penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik korban bencana	100 Persen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	57 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas	5 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase layanan bantuan hukum	4 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP; 2. Level Maturitas ULP	100; 0 Persen; (Level)	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Publikasi Protokol dan Acara	Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	82 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi pemerintahan	99 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Organisasi	Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	94 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	100 Persen	SEKRETARIAT DPRD

Tabel 4.8.

**Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2022 dengan
Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2022**

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pengembangan Pertanian	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	7788 Ton	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	77172 ton	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	220 orang	DINAS PERIKANAN
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	100 Persen	DINAS PERIKANAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	39 Kg/Kapita/Th	DINAS PERIKANAN
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	183 Kelompok Tani	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	3 kali	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor tanaman pangan	694 Ton	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi sektor perkebunan	80 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani	50 Kali	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kesehatan ternak	80 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100 Persen	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	5 kali	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan Petani	9 Kelompok	DINAS PERKEBUNAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		Perkebunan dan Pelaku Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani	Tani	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan	100 Persen	DINAS PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan kebun masyarakat	100 Persen	DINAS PERKEBUNAN
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan	58 Persen	DINAS PERKEBUNAN
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program dan penyebarluasan informasi penyuluhan	100 Persen	DINAS PERKEBUNAN
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI); 2. Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	2251; 0 Orang; Orang	DINAS PENDIDIKAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	99 Persen	DINAS PENDIDIKAN
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di	65 Persen	DINAS KESEHATAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		Puskesmas		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	263565 Kunjungan	DINAS KESEHATAN
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	12 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	40 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Angka Kesakitan	60 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	30 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	90 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	70 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase AKI dan AKB	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	80 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	1. Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajemen Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT; 2. Persentase Kualitas Data Terintegrasi; 3. Persentase Peningkatan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kesehatan	27; 0; 0 PKM; Persen; Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	21 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	3 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll (%)	20 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	64 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	18 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	24 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi penanggulangan penyakit menular	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	90 Persen	RUMAH SAKIT UMUM

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				DAERAH RAJA MUSA
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	90 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	90 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	100 Persen	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat yang menerima bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang dibina	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani	100 Persen	DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis, Gelandangan serta terkirimnya	100 Persen	DINAS SOSIAL

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		Orang Terlantar		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	21 Orang	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	58 Persen	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB	53 Persen	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	7 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	86 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	2 Kebijakan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang	19 BUM Desa	DINAS PEMBERDAYAAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Pedesaan	Aktif Membangun Desa		MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	90 Persen	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/Kelurahan	236 Desa/Kel	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pemetaan Kawasan Perdesaan	29 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	197 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	17 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	20 Kecamatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	64 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	100 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	85 Persen	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi	37 Kelompok UM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	737 Kelompok	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti; 2. Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	1; 0 Kali; Kelompok	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirausaha muda	90 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program peningkatan peran serta	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93 Persen	DINAS PARIWISATA,

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	kepemudaan			PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pembinaan wirausaha muda	90 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	7 Cabor	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	60 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang Disediakan	55 Unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	5 Persen	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	100 Persen	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	574 KK	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program Transmigrasi Lokal	Cakupan bina transmigrasi	346 KK	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	83 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan	Persentase Peningkatan kualitas	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Sosial dan Keagamaan.	kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyarakatan		
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TEMBILAHAN
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TEMPULING
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN BATANG TUAKA
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN CONGONG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN ENOK
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	96 Persen	KECAMATAN GAUNG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KATEMAN
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	40 Persen	KECAMATAN KEMPAS
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KEMUNING

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KERITANG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN MANDAH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN PELANGIRAN
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN PULAU BURUNG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN RETEH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TANAH MERAH
	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	100 Persen	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
Pengembangan Parwisata	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seri Pengembangan Budaya Daerah	12 Tampilan Kesenian	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	10 Kegiatan	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	3 Festival Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	5 Unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	2 daya tarik	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	20 Kerjasama	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang Dilatih	540 Orang	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	45 Persen	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Event Pariwisata	4 Event	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	25 Peserta	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	10 Unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	70 Persen	DINAS KESEHATAN
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik; 2. Jumlah Jembatan yang terbangun	210; 0 KM; Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik; 2. Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	21; 0 Persen; Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	22 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik	15 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	20 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	70 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	2056 SR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
		bersertifikat		RUANG
	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	100 Persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat; 2. Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	3; 0 Unit; KM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	5 Hektar	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah daya tampung TPU	1 Lokasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	5 KM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	8 Lokasi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	60 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	79 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	71 Persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 4.9

Keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas pada RKPD Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Apk Paud	94.7 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Aps Sd	115.6 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Aps Smp	110.2 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kurikulum			Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Lembaga Paud Yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal	90 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kurikulum			Dinas Pendidikan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan	90 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan	90 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik	90 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik	90 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Dinas Kesehatan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			Dinas Kesehatan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Dinas Kesehatan

PRIORITAS PROVINSI		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	60 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan/Gedung Dalam Kondisi Baik	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	75 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	75 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (Rtrw/Rdtr)	100 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	45 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	75 Hektar	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pemantapan Pembangunan	Pemerataan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Psu	75 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada / Kebijakan Kdh	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	100 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran	100 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Rehabilitasi Sosial			Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja			Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (Pb)	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Perlindungan Perempuan			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Perlindungan Khusus Anak			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun	0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar	65 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 Dan Bahan Berbahaya Lainnya Yang Dikelola	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Pplh Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	1 Kali	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber-Ktp Per Satuan Penduduk	0,75 Rasio	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Opd/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel	75 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pengendalian Penduduk			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Presentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar	70 Persen	Dinas Perhubungan
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Program Pengelolaan Pelayanan	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	70 Persen	Dinas Perhubungan
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	65 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhi Sistem Pelayanan Informasi Berbasis Tik	90 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	90 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi			Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya Saing	90 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Promosi Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Penanaman Modal	100 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	70 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pd Yang Menggunakan Sistem Persandian	30 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	2 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya	4 Festival Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Kesenian Tradisional	1 Tampil Kesenian	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	4 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pembinaan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Daerah Yang Disimpan Dan Dilestarikan Pada Lkd	100 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	90 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			Dinas Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			Dinas Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	44,68 Kg/Kapita/Th	Dinas Perikanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Prasarana Pariwisata Yang Terpenuhi	70 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	35 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pembinaan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			Dinas Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Dinas Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	90 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Dinas Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan Opt	90 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Perizinan Usaha Pertanian			Dinas Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyuluhan Pertanian			Dinas Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	100 Kelompok	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Difasilitasi	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Ekspor			Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang	85 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	85 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	85 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Usaha Industri	50 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi			Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi	100 Persen	Sekretariat DPRD

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Rpjmd Kedalam Rkpd	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Renstra Rkpd Dan Renja)	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Opd Tepat Waktu Sesuai Sop	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Apbd Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Opd Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	90 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pad Terhadap Pendapatan	10,02 Persen	Badan Pendapatan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Kepegawaian Daerah			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Daerah Yang Diikutkan Dalam Iga	80 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	40 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Inspektorat Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			Inspektorat Daerah
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			Kecamatan
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Kecamatan
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Kecamatan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Kecamatan
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kecamatan
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/ Pengembangan Kompetensi	50 Persen	Dinas Pendidikan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan merupakan rencana kegiatan prioritas Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari hasil rumusan dari berbagai forum pembahasan terhadap usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD yang disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah. Selain itu, dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Riau Tahun 2022.

Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 disajikan dalam dua tabel yaitu Tabel 5.1 yang menyajikan rekapitulasi pagu menurut perangkat daerah dan Tabel 5.2 yang menyajikan program, kegiatan dan pagu dari setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Tabel 5.1.

Rekapitulasi Pagu Menurut Perangkat Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

NO	URUSAN	PAGU	OPD
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	467,197,987,250.00	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	171,763,073,065.00	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	90,781,795,142.00	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	8,407,707,764.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	18,461,791,153.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122,728,165,929.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44,030,151,878.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19,479,312,812.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10,852,934,520.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8,798,091,840.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13,369,719,345.00	DINAS SOSIAL
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6,489,591,838.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8,762,661,838.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1,512,592,000.00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	URUSAN	PAGU	OPD
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17,629,432,118.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,592,108,390.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27,816,073,987.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	908,930,000.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18,416,165,459.00	DINAS PERHUBUNGAN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15,038,131,162.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10,443,340,363.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12,521,221,264.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	15,678,162,658.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1,335,000,000.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4,200,565,626.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	107,499,300.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,882,184,727.00	DINAS PERIKANAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2,438,690,000.00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27,628,691,683.00	DINAS PERKEBUNAN
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	20,312,888,328.00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

NO	URUSAN	PAGU	OPD
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10,388,779,181.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4,786,440,250.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	200,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
36	SEKRETARIAT DAERAH	88,824,025,124.00	SEKRETARIAT DAERAH
37	SEKRETARIAT DPRD	101,107,220,040.00	SEKRETARIAT DPRD
38	PERENCANAAN	11,280,825,165.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
39	KEUANGAN	356,535,005,632.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
40	KEUANGAN	18,709,484,172.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
41	KEPEGAWAIAN	11,665,351,241.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
42	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,712,549,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
43	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,060,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
44	INSPEKTORAT DAERAH	10,809,636,007.00	INSPEKTORAT DAERAH
45	KECAMATAN	10,723,776,820.00	KECAMATAN TEMBILAHAN
46	KECAMATAN	4,609,779,530.00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
47	KECAMATAN	5,630,676,644.00	KECAMATAN TEMPULING
48	KECAMATAN	3,245,673,857.00	KECAMATAN BATANG TUAKA
49	KECAMATAN	2,458,849,791.00	KECAMATAN CONCONG
50	KECAMATAN	4,427,521,417.00	KECAMATAN ENOK
51	KECAMATAN	2,909,863,537.00	KECAMATAN GAUNG
52	KECAMATAN	4,191,558,633.00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
53	KECAMATAN	3,715,686,089.00	KECAMATAN KATEMAN
54	KECAMATAN	4,022,653,778.00	KECAMATAN KEMPAS
55	KECAMATAN	2,973,556,975.00	KECAMATAN KEMUNING
56	KECAMATAN	3,521,173,844.00	KECAMATAN KERITANG
57	KECAMATAN	2,717,276,169.00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
58	KECAMATAN	3,114,825,828.00	KECAMATAN MANDAH
59	KECAMATAN	3,170,885,008.00	KECAMATAN PELANGIRAN
60	KECAMATAN	2,695,357,046.00	KECAMATAN PULAU BURUNG
61	KECAMATAN	4,503,283,064.00	KECAMATAN RETEH
62	KECAMATAN	2,742,912,300.00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
63	KECAMATAN	3,132,218,677.00	KECAMATAN TANAH MERAH

NO	URUSAN	PAGU	OPD
64	KECAMATAN	2,385,564,946.00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
65	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15,630,462,113.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH KESELURUHAN	1,900,387,533,317.00	

Tabel 5.2.

Rekapitulasi Pagu Prioritas Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

NO	PRIORITAS DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp.)	Persentase (%)
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	15	97	300	487.314.494.433,00	41,36%
2	Pemantapan pemerataan pembangunan	10	29	80	152.821.953.405,00	12,97%
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	30	66	132	39.527.507.000,00	3,35%
4	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	11	22	56	11.751.000.000,00	1,00%
5	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	4	20	89	155.896.923.750,00	13,23%
6	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	17	60	170	185.207.064.194,00	15,72%
7	Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	25	64	143	48.142.199.904,00	4,09%
8	Mewujudkan kerukunan ketentraman dan ketertiban	6	20	50	18.446.070.000,00	1,57%
9	Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui program DMIJ Plus Terintegrasi	79	175	351	42.898.316.938,00	3,64%

NO	PRIORITAS DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp.)	Persentase (%)
10	Peningkatan fungsi terminal bandar laksamana indragiri menjadi terminal penumpang dan barang	2	14	30	12.353.620.900,00	1,05%
11	Pengembangan kawasan cepat tumbuh	1	2	5	1.099.999.800,00	0,09%
12	Pendukung Prioritas	7	34	91	22.824.689.600,00	1,94%
JUMLAH		207	603	1497	1.178.283.839.924,00	100,00%

Tabel 5.3
Sandangan Prioritas Daerah dan Indikator Kinerja Program
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	94.7 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD	115.6 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SMP	110.2 Persen	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Lembaga Paud Yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal	90 Persen	Dinas Pendidikan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan	90 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan	90 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik	90 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik	90 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	60 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan/Gedung Dalam Kondisi Baik	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	75 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	75 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih	90 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	100 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	45 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	75 Hektar	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Psu	75 Persen	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola	100 Persen	Dinas Sosial
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (Pb)	100 Persen	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun	0	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar	65 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 Dan Bahan Berbahaya Lainnya Yang Dikelola	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Pplh Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	1 Kali	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber-Ktp Per Satuan Penduduk	0,75 Rasio	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Opd/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan	90 Persen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel	75 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	90 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Presentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar	70 Persen	Dinas Perhubungan
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	70 Persen	Dinas Perhubungan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	90 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya Saing	90 Persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Penanaman Modal	100 Persen	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	70 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Dan Daya Saing Daerah	Kapasitas Kepramukaan			Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	2 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya	4 Festival Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Kesenian Tradisional	1 Tampil Kesenian	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	4 Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Daerah Yang Disimpan Dan Dilestarikan Pada Lkd	100 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	90 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	44,68 Kg/Kapita/Th	Dinas Perikanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Prasarana Pariwisata Yang Terpenuhi	70 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	35 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pembinaan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100 Persen	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	90 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam	Program Pengendalian	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan	100 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan,

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)		Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan Opt	90 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	100 Kelompok	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Difasilitasi	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang	85 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	85 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	85 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Usaha Industri	50 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Inforamsi Industri Nasional	100 Persen	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	Sekretariat Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi	100 Persen	Sekretariat Dprd
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Rpjmd Kedalam Rkpd	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Renstra Rkpd Dan Renja)	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Opd Tepat Waktu Sesuai Sop	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Apbd Tepat Waktu	100 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Opd Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	90 Persen	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pad Terhadap Pendapatan	10,02 Persen	Badan Pendapatan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Daerah Yang Diikutkan Dalam Iga	80 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	40 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/ Pengembangan Kompetensi	50 Persen	Dinas Pendidikan

Tabel 5.4
Sandangan Prioritas Daerah Untuk Indikator Sasaran Dan Indikator
Kinerja program Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SMP
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Lembaga Paud Yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal
Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendukungnya
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dalam Kondisi Baik
Pemantapan Pemerataan Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan/Gedung Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sdm Jasa Konstruksi Yang Terlatih
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Psu
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada / Kebijakan KDH
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/ Penanganan Kebencanaan
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
		Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan Yang Menerima Bantuan Sosial
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terkelola
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (Pb)
	Indeks Inovasi Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan
	Indeks Inovasi Daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pemenuhan Rth Yang Memenuhi Standar
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 Dan Bahan Berbahaya Lainnya Yang Dikelola
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH Dari Izin Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Yang Ditindaklanjuti
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Ditangani
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Opd/Lembaga Pengguna Daerah Yang Menggunakan Data Kependudukan
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Dmij Plus Terintegrasi	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik
	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa
	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan Secara Akuntabel
	Partisipasi Lembaga Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Dan Masyarakat Dalam Membangun Desa
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Presentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Llaj Yang Sesuai Standar
	Rata-Rata Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Wilayah	Program Pengelolaan Pelayanan	Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis Tik
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya Saing
	Nilai Investasi Daerah (Rp.Milyar)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Penanaman Modal
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Dan Statistik Yang Terintegrasi
	Rata-Rata Capaian Indeks Pelayanan Publik (Prediket)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pd Yang Menggunakan Sistem Persandian
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Keragaman Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Kesenian Tradisional
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Daerah Yang Disimpan Dan Dilestarikan Pada LKD
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita Tahunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Prasarana Pariwisata Yang Terpenuhi
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pembinaan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Asuh(Aman,Sehat,Utuh Dan Halal)
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan Opt
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Difasilitasi
	Indeks Inovasi Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan Yang Representatif
	Indeks Inovasi Daerah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lainnya
	Indeks Inovasi Daerah	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Standar Tera/Tera Ulang
	Indeks Inovasi Daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Indeks Inovasi Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Usaha Industri
	Indeks Inovasi Daerah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemanfaatan Sistem Inforamsi Industri Nasional
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Perbulan/Kapita)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
	Indeks Inovasi Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD Dan Renja)
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Tepat Waktu Sesuai SOP
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Daerah Yang Diikutkan Dalam IGA
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Mewujudkan Kerukunan Ketentraman Dan Ketertiban	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Ketahanan Sosial Dan Budaya
	Angka Pelanggaran Trantibmas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD
	Nilai AKIP (Predikat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/ Pengembangan Kompetensi

Tabel 5.5
Data Program/Kegiatan APBD Kab. Inhil Tahun 2022 Penunjang
Program/Kegiatan APBD Prov. Riau Tahun 2022

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Daya Manusia	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
Infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
Sumber Daya Manusia	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Sumber Daya Manusia	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
Sumber Daya Manusia	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sumber Daya Manusia	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
Sumber Daya Manusia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Sumber Daya Manusia	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Pertanian	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Pertanian	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Pertanian	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pertanian	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Sumber Daya Manusia	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
Sumber Daya Manusia	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Sumber Daya Manusia	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk
Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Sumber Daya Manusia	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Infrastruktur	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Pariwisata	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Sumber Daya Manusia	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pertanian	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian
Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
Industri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Industri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Industri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Industri	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Industri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD KAB. INHIL	PROGRAM PROVINSI RIAU
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Selanjutnya untuk rencana program, kegiatan dan pagu per kegiatan dari setiap perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														DINAS PENDIDIKAN
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						467.197.987.250							702.562.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	344.423.571.850						22 Nilai	558.260.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	persen		persen	90 persen	333.313.000						90 persen	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				5 Dokumen	333.313.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	5 Dokumen	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	337.580.587.250						1 Tahun	550.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ANS				1 Tahun	337.580.587.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	1 Tahun	550.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	Tahun		Tahun	1 Tahun	24.000.000						1 Tahun	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor Dibayarkan				1 Tahun	24.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing		1 Tahun	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang didata dan diolah	Orang		Orang	100 Orang	212.266.825						100 Orang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 1 02.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata dan diolah				100 orang	212.266.825	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Pegawai Negeri Sipil	100 orang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	2.387.354.775						100 Persen	2.945.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				10 jenis	14.220.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	10 jenis	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 jenis	444.732.125	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	3 jenis	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4 jenis	128.418.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	4 jenis	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				11 Jenis	45.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	11 Jenis	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				10 eksemplarsr	370.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	10 eksemplarsr	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				134 kali	337.349.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	134 kali	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sekolah yang akan dilakukan inventarisasi				35 sekolah	500.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	35 sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan elektronisasi data yang dikelola				100 persen	547.384.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	100 persen	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen		persen	100 persen	774.000.000						100 persen	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 rekening	187.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	3 rekening	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				46 orang	586.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	46 orang	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	unit		unit	3 unit	3.112.050.000						3 unit	3.630.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Kenyamanan kerja aparaturnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				3 unit	75.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	OPD	3 unit	85.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4 Jenis	36.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	OPD	4 Jenis	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	3.000.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	OPD	1 Unit	3.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD	Persen		Persen	115.6 Persen	122.093.520.840						115.6 Persen	143.252.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen		Persen	115.6 Persen	80.832.430.880						115.6 Persen	98.850.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SD/MI yang dibangun				24 Ruang	5.195.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	24 Ruang	10.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun				10 Sekolah	1.062.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	10 Sekolah	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 2 02.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeleur SD/MI yang diadakan				2150 Unit	3.500.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	2150 Unit	10.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Beasiswa SD				722 Orang	1.000.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	722 Orang	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Tingkat SD/MI				15000 Siswa /i	150.000.180	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	15000 Siswa /i	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah pelaksanaan monitoring pembangunan sarana dan prasarana sekolah SD/MI yang dilakukan				124 Kali	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	124 Kali	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa, Pembina dan Pelatih Seleksi dan Pembinaan Peserta Lomba Bidang Sains, Olahraga dan Seni Siswa SD				124 Orang	32.144.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	124 Orang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Bantu Daerah Penerima Honor				13 Orang	16.267.414.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	13 Orang	17.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif				2668 Orang	-						2668 Orang	-	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Karier				40 Orang	327.241.550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	40 Orang	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Bimtek Kegiatan Mutu Satuan Pendidikan Dasar				84 Orang	24.561.650	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	84 Orang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri penerima dana BOS				520 Sekolah	52.906.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	520 Sekolah	54.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang dibina dalam pengelolaan Dana BOS				410 Sekolah	167.669.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SD/MI Se Kabupaten Indragiri Hilir	410 Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Monitoring Kurikulum 2013 Tingkat SMP yang dilaksanakan	Sekolah		Sekolah	29 Sekolah	32.810.628.810						29 Sekolah	35.282.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 2 02.02 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang SMP/MTs yang Dibangun				14 Ruang	2.980.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	14 Ruang	3.180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun				4 Sekolah	450.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	4 Sekolah	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah	Jumlah Ruang SMP/MTs yang direhab				1 Sekolah	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	1 Sekolah	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeleur SMP yang diadakan				2655 Unit	2.170.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2655 Unit	2.270.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Beasiswa				330 Orang	803.561.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	330 Orang	950.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Ujian Sekolah Tingkat SMP				6255 Siswa	112.551.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	6255 Siswa	220.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta lomba yang mewakili Kabupaten Inhil Ke Tingkat Provinsi				28 Orang	93.085.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	28 Orang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 2 02.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tunjangan tenaga pendidik dan Kependidikan non pns pada sekolah menengah pertama yang disediakan				1021 Orang	6.570.542.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	1021 Orang	7.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik yang mengikuti sosialisasi				40 Orang	384.376.560	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	40 Orang	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Monitoring Kurikulum 2013 Tingkat SMP yang dilaksanakan				29 Sekolah	47.838.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	29 Sekolah	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Penerima Dana BOS				109 Sekolah	18.812.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	109 Sekolah	19.812.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Dana BOS				136 Sekolah	236.673.400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	136 Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio guru terhadap murid pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen		persen	100 persen	8.109.951.150						100 persen	8.620.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun				13 Sekolah	2.396.941.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	13 Sekolah	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 2 02.03 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang direhab				1 Sekolah	310.236.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	1 Sekolah	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD				162 Orang	265.621.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	162 Orang	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Visitasi dan Monitoring Lembaga PAUD				162 Kali	201.929.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	162 Kali	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Guru Bantu Daerah Penerima Honor				2 Orang	3.965.233.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	2 Orang	4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif				650 Orang	-						650 Orang	-	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru yang lulus PPG dan mendapat Sertifikat Pendidik				40 Orang	320.249.550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	40 Orang	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendidik				20 Orang	-						20 Orang	-	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Bimtek Kelembagaan dan Manajemen PAUD				120 Orang	649.741.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	120 Orang	720.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	persen		persen	100 persen	340.510.000						100 persen	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 1 2 02.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga Pendidik Non Formal yang mengikuti pelatihan				70 Peserta	155.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 Peserta	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 2 02.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Visitasi dan Monitoring Lembaga Nonformal				102 Kali	185.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	102 Kali	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	50 Persen	680.894.560						50 Persen	1.050.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 3 02.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal	Sekolah		Sekolah	550 Sekolah	271.352.560						550 Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 3 02.01 4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar				120 Orang	271.352.560	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	120 Orang	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 3 02.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal	Sekolah		Sekolah	450 Sekolah	409.542.000						450 Sekolah	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1 1 3 02.02 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum Paud				120 Orang	409.542.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	120 Orang	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						135.269.929.608							137.020.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	88.004.446.798						22 Nilai	88.560.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	90 Persen 90 Persen	460.031.027 -						90 Persen 90 Persen	500.000.000 -	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				9 Dukumen	221.855.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		9 Dukumen	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun				3 Laporan	238.175.227	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		3 Laporan	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	75.495.587.771						100 Persen	75.560.000.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN				1 Tahun	75.457.008.871	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Tahun	75.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dukumen	38.578.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Dukumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	123.370.000						100 Persen	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daaerah yang ditata				8 Unit	123.370.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		8 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	279.999.200						90 Persen	330.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Data	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Data	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				1 Diklat	179.999.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Diklat	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	594.319.400						100 Persen	740.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				15 Set	243.945.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		15 Set	270.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 Jenis	140.175.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Jenis	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis	14.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		4 Jenis	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				36 Eksempl ar	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		36 Eksempl ar	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi K daerah yang dilaksanakan				40 Kali	183.449.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		40 Kali	200.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	148.350.000						90 Persen	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan				4 Unit	148.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		4 Unit	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	90 Persen	10.728.589.400						90 Persen	10.840.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang terlayani				1500 Lembar	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1500 Lembar	20.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				7 Rekening	525.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		7 Rekening	550.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				37 Jenis	54.984.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		37 Jenis	70.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya				30 Ruang	10.133.005.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Ruang	10.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	174.200.000						90 Persen	270.000.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya				15 Unit	92.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		15 Unit	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service				223 Unit	60.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		223 Unit	90.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara				9 Ruang	22.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		9 Ruang	50.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen		Persen	95 Persen	45.729.748.360						95 Persen	46.750.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Fasyankes sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	9.110.724.410						90 Persen	9.360.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun				1 Unit	241.093.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Unit	270.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah kegiatan penunjang pembangunan dan peningkatan sarkes				1 Kali	1.326.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Kali	1.350.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas BLUD dan Pemantapannya				30 Puskesmas	128.800.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		30 Puskesmas	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi				2 Unit	2.875.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		2 Unit	2.900.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarpras Pustu yang di sediakan				1 Unit	225.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Unit	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ketersediaan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya				10 Unit	1.342.638.110	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		10 Unit	1.370.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 2 02.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas dan jaringannya				1 Jenis	2.218.569.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Jenis	2.240.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas yang Hasil dilakukan pemeliharaan				1 Puskesmas	177.625.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Puskesmas	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Sarana Prasarana Pustu yang Dilakukan				1 Kali	474.817.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Kali	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Obat, BMHP dan Vaksin ke Puskesmas Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemanfaatan sistem Eletronik logistik obat dan BMHP di UPTD IFK Kab. Inhil				30 Puskesmas	101.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		30 Puskesmas	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Fasyankes sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	34.449.230.100						90 Persen	35.080.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Program KIA				30 Puskesmas	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	180.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Balita yang diberikan Imunisasi				10 Balita	120.000.150	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Balita	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kasus Gizi dan Balita Stunting				1 Kali	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Kali	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BIAS di kabupaten Indragiri hilir				30 Puskesmas	59.999.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	80.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas yang telah di evaluasi program lansia				30 Puskesmas	50.000.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	80.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan				130 Orang	514.826.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		130 Orang	550.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang mendapatkan pelayanan kesehatan				13916 Orang	701.963.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		13916 Orang	730.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 2 02.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi				30 Puskesmas	150.000.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	180.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan limbah dan sampah fasyankes				30 Puskesmas	203.798.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	230.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengembangan media promosi				30 Puskesmas	845.955.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	870.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi pelayanan kesehatan				30 Puskesmas	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	180.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Menular Yang Berpotensi KLB/Wabah yang dilaksanakan				47 Kali	99.999.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		47 Kali	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan				30 Puskesmas	300.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	330.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan NAPZA				30 Puskesmas	250.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	280.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 Orang	148.459.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		100 Orang	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular				10 Kali	349.998.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Kali	370.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Peserta terlayani bagi peserta				100 Persen	27.707.640.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		100 Persen	27.730.000.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase Tertanggulangnya Biaya Pelayanan Kesehatan dan Rujukan				90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan untuk Peningkatan peran serta masyarakat demi terwujudnya kesehatan				20 Orang	343.520.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		20 Orang	370.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Laboratorium yang dikelola dan dipelihara				1 Laboratorium	324.941.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Laboratorium	350.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Keliling yang disediakan				1 Unit	884.860.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Unit	910.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi Distribusi Kefarmasian				30 Sarana	423.265.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Sarana	450.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dinilai berprestasi				15 Puskesmas	450.000.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		15 Puskesmas	480.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 2 02.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Fogging Fokus DBD				11 Kali	120.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		11 Kali	150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase penggunaan IT dalam Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	1.461.104.950						100 Persen	1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.03 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan yang dirangkum dari data-data dinkes & Pkm				1 Dukumen	216.268.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		1 Dukumen	250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase terbentuknya sistem pengelolaan dan penyimpanan data terpadu				90 Persen	576.150.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		90 Persen	600.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.03 3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Akses Jaringan di wilayah kerja puskesmas yang ditingkatkan				30 Puskesmas	668.686.550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Fasilitas Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	708.688.900						100 Persen	760.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.04 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional				1 Kegiatan	506.835.300	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Sungailiran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		1 Kegiatan	530.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 2 02.04 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sarana				83 Sarana	201.853.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		83 Sarana	230.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen		Persen	60 Persen	580.596.950						60 Persen	660.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 3 02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Persen		Persen	90 Persen	349.987.150						90 Persen	400.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 3 02.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Ketersediaan tenaga kesehatan				100 Orang	149.987.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		100 Orang	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 3 02.02 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Puskesmas/loka Karya Mini Tribunal				30 Puskesmas	199.999.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	230.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 3 02.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	Persen		Persen	90 Persen	230.609.800						90 Persen	260.000.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase SDM yang berkompetensi	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 3 02.03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan, jenis, dan kualitas tenaga kesehatan di setiap fasyankes (sesuai standar)				10 Desa	230.609.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		10 Desa	260.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pengawasan Toko Obat, Apotek dan Keamanan Pangan yang Beredar Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	251.092.900						100 Persen	270.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 02.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	153.135.800						100 Persen	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 02.04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengawasan terhadap sarana TTU/TPM dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				30 Puskesmas	153.135.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		30 Puskesmas	170.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 02.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	97.957.100						100 Persen	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 4 02.05 1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya				2 Kali	97.957.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		2 Kali	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen		Persen	85 Persen	704.044.600						85 Persen	780.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	239.514.600						100 Persen	260.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat				30 Puskesmas	239.514.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		30 Puskesmas	260.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 5 02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen		Persen	100 Persen	114.530.000						100 Persen	140.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 5 02.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan promosi, sosialisasi, pembinaan dan edukasi hidup bersih dan sehat				30 Puskesmas	114.530.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		30 Puskesmas	140.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 5 02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persen		Persen	100 Persen	350.000.000						100 Persen	380.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 5 02.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang di beri pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar				30 Puskesmas	350.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		30 Puskesmas	380.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.928.706.480							1.950.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.928.706.480						100 Persen	1.950.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.928.706.480						100 Persen	1.950.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.928.706.480	Kab. Indragiri Hilir, Kampas, Kampas Jaya	Pendapatan dari BLUD		0		100 Persen	1.950.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.524.972.074							1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.524.972.074						100 Persen	1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.524.972.074						100 Persen	1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.524.972.074	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Pangkalan Tujuh	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		100 Persen	1.550.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.202.096.688							3.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	3.202.096.688						100 Persen	3.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	3.202.096.688						100 Persen	3.250.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	3.202.096.688	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	3.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.212.807.774							2.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.212.807.774						100 Persen	2.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2.212.807.774						100 Persen	2.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	2.212.807.774	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	2.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.760.100.492							2.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.760.100.492						100 Persen	2.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2.760.100.492						100 Persen	2.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	2.760.100.492	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	2.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.722.465.095							1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.722.465.095						100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.722.465.095						100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.722.465.095	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.208.360.885							1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.208.360.885						100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.208.360.885						100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.208.360.885	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.758.672.800							1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.758.672.800						100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.758.672.800						100 Persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 persen	1.758.672.800	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Kuala Lahang			Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	0	100 persen	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.034.700.893							1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.034.700.893						100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.034.700.893						100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.034.700.893	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.127.741.595							1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.127.741.595						100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.127.741.595						100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.127.741.595	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Concong Luar	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.584.883.161							1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.584.883.161						100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.584.883.161						100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.584.883.161	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						770.460.241							800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	770.460.241						100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	770.460.241						100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	770.460.241	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.563.280.419							2.700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.563.280.419						100 Persen	2.700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2.563.280.419						100 Persen	2.700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	2.563.280.419	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Seberida	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	2.700.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.088.191.690							1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.088.191.690						100 Persen	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.088.191.690						100 Persen	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.088.191.690	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Pengalihan	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						758.202.889							800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	758.202.889						100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	758.202.889						100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	758.202.889	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	800.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.286.840.000							1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.286.840.000						100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.286.840.000						100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.286.840.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Pengalihan	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.207.600.000							2.230.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.207.600.000						100 Persen	2.230.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2.207.600.000						100 Persen	2.230.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	2.207.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Pulaukijang	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	2.230.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						646.577.552							700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	646.577.552						100 Persen	700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	646.577.552						100 Persen	700.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	646.577.552	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang Benteng	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	700.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.034.888.185							1.070.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.034.888.185						100 Persen	1.070.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.034.888.185						100 Persen	1.070.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.034.888.185	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.070.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.437.459.045							1.470.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.437.459.045						100 Persen	1.470.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.437.459.045						100 Persen	1.470.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.437.459.045	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.470.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						407.590.280							430.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	407.590.280						100 Persen	430.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	407.590.280						100 Persen	430.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	407.590.280	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Batang Tumu	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	430.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.068.324.695							1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.068.324.695						100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.068.324.695						100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.068.324.695	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Pendapatan dari BLUD			0	100 Persen	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.562.301.090							1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.562.301.090						100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.562.301.090						100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.562.301.090	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	Pendapatan dari BLUD		0		100 Persen	1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.116.471.870							1.150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.116.471.870						100 Persen	1.150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	1.116.471.870						100 Persen	1.150.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	1.116.471.870	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Pulauburung	Pendapatan dari BLUD		0		100 Persen	1.150.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KESEHATAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						479.447.564							500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	479.447.564						100 Persen	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	479.447.564						100 Persen	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	479.447.564	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Saka Rotan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0		100 Persen	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						90.781.795.142							111.250.795.142	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	88.735.809.142						100 Persen	94.690.795.142	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	25.430.795.142						100 Persen	25.430.795.142	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya				229 Orang	25.430.795.142	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Karyawan/ Karyawati RSUD Puri Husada Tembilahan		229 Orang	25.430.795.142	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	210.150.000						100 Persen	260.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jam Karyawan/karyawati yang mendapat pendidikan pelatihan formal				80 Jam	210.150.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Karyawati RSUD Puri Husada Tembilahan	80 Jam	260.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.216.464.000						100 Persen	1.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan				19 Jenis	126.024.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	19 Jenis	150.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Pasien				5 Paket	900.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	5 Paket	1.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan				59 Kali	190.440.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	59 Kali	350.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	6.823.400.000						100 Persen	7.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				120 Rekening	1.871.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	120 Rekening	2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung Pelayanan dan Manajemen yang terjaga kebersihannya				2 Gedung	4.952.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	2 Gedung	5.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan				192 Orang	-						192 Orang	-	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	persen		persen	100 persen	55.055.000.000						100 persen	60.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan				100 Persen	55.055.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	karyawan /Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	100 Persen	60.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan Obat-obatan dan pendukungnya	Persen		Persen	100 Persen	1.970.986.000						100 Persen	16.515.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	1.949.706.000						100 Persen	6.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2 02.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang tersedia				1 Paket	529.586.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	1 Paket	2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2 02.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Rumah Sakit yang di adakan				45 Jenis	1.420.120.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	45 Jenis	4.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	21.280.000						100 Persen	10.015.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2 02.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi HIV				60 Orang	14.080.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	60 Orang	15.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 2 02.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Operasional Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular yang tersedia				1 Paket	7.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	1 Paket	10.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan tentang perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen		Persen	100 Persen	75.000.000						100 Persen	45.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 5 02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebijakan PHBS dan berwawasan kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	50.000.000						100 Persen	25.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 5 02.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Orang yang di lakukan promkes di Rumah Sakit				30 Orang	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Karyawan / Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	30 Orang	25.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 5 02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen		Persen	100 Persen	25.000.000						100 Persen	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1 2 5 02.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pemberian Materi Promosi Kesehatan yang di laksanakan				50 Kali	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Karyawan/Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan	50 Kali	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						8.407.707.764							10.289.507.764	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	8.081.707.764						100 Persen	9.879.507.764	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyewdianaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	3.916.707.764						100 Persen	3.916.707.764	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedian Gaji ASN				52 Orang	3.916.707.764	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Daerah Insentif		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	3.916.707.764	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	199.160.000						90 Persen	302.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalsi Listrik dan Penerangan Kantor				100 Persen	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah Insentif		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	30.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan dan Urusan Pemerintah				90 Persen	95.801.300	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	125.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				90 Persen	30.655.700	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	50.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Daerah	Insentif		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				90 Persen	12.703.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	17.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Makan dan Minum Pasien dan Petugas Ramadhan				90 Persen	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	80.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1.957.840.000						100 Persen	3.140.800.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Persen	8.240.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	3 Kegiatan	100 Persen	12.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Jasa Komubnikasi ,Air dan Listrik				100 Persen	80.000.000		Dana Daerah	Insentif		3 Kegiatan	100 Persen	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen	1.869.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif		3 Kegiatan	100 Persen	3.028.800.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persen		Persen	90 Persen	8.000.000						90 Persen	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	3 Kegiatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				90 Persen	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	3 Kegiatan	90 Persen	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1 2 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	3 Kegiatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Telaksananya Kegiatan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2.000.000.000						100 Persen	2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tecapainya Kegiatan BLUD				100 Persen	2.000.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	1 Kegiatan	100 Persen	2.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	326.000.000						90 Persen	410.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen		Persen	90 Persen	316.000.000						90 Persen	390.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						-		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	4 Kegiatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kebutuhan Obat Rumah Sakit				90 Persen	120.000.000		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	4 Kegiatan	90 Persen	180.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai					90 Persen	196.000.000		Dana Daerah	Insentif		4 Kegiatan	90 Persen	210.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						-		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	4 Kegiatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	10.000.000						100 Persen	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						-		Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	3 Kegiatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan				100 Persen	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	Dana Daerah	Insentif	Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	3 Kegiatan	100 Persen	20.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1 2 2 02.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						-					3 Kegiatan		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						18.461.791.153							21.260.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	17.960.791.153						100 Persen	20.360.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4.622.791.153						100 Persen	5.000.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga ASN				59 Orang	4.622.791.153	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		59 Orang	5.000.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	816.200.000						100 Persen	1.450.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39 jenis	32.856.650	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		39 jenis	50.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				3 Jenis	425.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		3 Jenis	600.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				30 jenis	207.813.350	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	100%	30 jenis	500.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				50 Kali	149.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	100%	50 Kali	300.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	4.019.200.000						100 Persen	4.330.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1000 jenis	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Persen	1000 jenis	30.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan				5 jenis	272.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Persen	5 jenis	300.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kesehatan				65 Orang	3.736.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Persen	65 Orang	4.000.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	2.600.000		Pendapatan dari BLUD				100 Persen	80.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional				5 unit	1.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	5 unit	50.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang terpelihara				10 unit	1.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	10 unit	30.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelaksanaan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	8.500.000.000						100 Persen	9.500.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM
1 2 1 02.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit				100 Persen	8.500.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		100%		100 Persen	9.500.000.000	RUMAH SAKIT DAERAH RAJA MUSA UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen		Persen	90 Persen	501.000.000						90 Persen	900.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2 2 02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Sarana, prasarana dan penunjang medik sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	501.000.000						100 Persen	900.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2 2 02.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat yang di Kalibrasi				3 Unit	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan sebesar	3 Unit	200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
							-		DAK Fisik - Bidang Kesehatan Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan					-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2 2 02.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan BHP				90 Jenis	315.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan sebesar	90 Jenis	500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1 2 2 02.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BHP yang dibelanjakan				10 Jenis	36.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan sebesar	10 Jenis	200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						122.728.165.929							128.864.574.228	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	12.668.305.974						10 Dokumen	13.301.721.273	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	8.456.179.274						100 Persen	8.878.988.238	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				70 Orang	8.448.899.474	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen capaian kinerja	70 Orang	8.871.344.448	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				10 Dokumen	7.279.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan Dokumen capaian kinerja	10 Dokumen	7.643.790	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	70 Persen	301.470.000						70 Persen	316.543.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				25 Diklat	301.470.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		25 Diklat	316.543.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							-		PENDAPATAN TRANSFER					-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 3 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.714.810.675						100 Persen	1.800.551.209	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				90 Jenis	268.171.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Dinas PUTR	90 Jenis	281.580.338	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				8 Jenis	170.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Dinas PUTR	8 Jenis	178.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				10 Jenis	72.558.925	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Dinas PUTR	10 Jenis	76.186.871	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				40 Ekslemplar	3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Dinas PUTR	40 Ekslemplar	3.780.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				168 Kali	1.200.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Dinas PUTR	168 Kali	1.260.504.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	1.669.593.000						100 Persen	1.753.072.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	11.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	12.075.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				10 Rekening	272.393.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Rekening	286.012.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				86 Orang	1.385.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 Orang	1.454.985.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	526.253.025						100 Persen	552.565.676	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				9 Unit	55.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	57.750.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				32 Unit	108.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit	113.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				201 Unit	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201 Unit	26.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				89 Unit	338.253.025	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 Unit	355.165.676	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi baik	Persen		Persen	60 Persen	27.386.243.855						60 Persen	28.755.556.049	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	70 Persen	21.344.200.405						70 Persen	22.411.410.426	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.01 4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencanaan				6 Dokumen	1.170.552.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	6 Dokumen	1.229.080.230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah panjang turap/talud/bronjong di wilayah sungai yang di bangun				86 Meter	925.499.950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	86 Meter	971.774.948	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah pmbangunan turap/talud/bronjong di wilayah sungai yang dikendalikan				20 Kecamatan	-						20 Kecamatan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.01 27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah panjang sungai/kali yang dinormalisasi				112 Km	19.136.451.955	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	112 Km	20.093.274.553	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah pelaksanaan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali yang di monitoring dan dievaluasi				20 Kecamatan	-						20 Kecamatan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi pengelolaan air baku / air permukaan yang dikeluarkan				15 izin	111.695.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	15 izin	117.280.695	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	60 Persen	6.042.043.450						60 Persen	6.344.145.623	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.02 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				12 KM	1.832.828.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten Indragiri Hilir	12 KM	1.924.470.240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 2 02.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang di monitoring dan dievaluasi				20 Kecamatan	4.209.214.650	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten Indragiri Hilir	20 Kecamatan	4.419.675.383	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				12 KM	-						12 KM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit		Unit	11 Unit	10.587.870.000						11 Unit	11.117.263.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	SR		SR	15625 SR	-						15625 SR	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 3 02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SR SPAM kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	70 Persen	10.587.870.000						70 Persen	11.117.263.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 3 02.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen DED Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin yang disusun				12 Dokumen	1.691.750.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	12 Dokumen	1.776.338.025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 3 02.01 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang jaringan perpipaan dan sambungan rumah yang dibangun				1500 SR	7.423.079.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	1500 SR	7.794.232.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 3 02.01 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan dan sambungan rumah yang dibangun				1500 SR	1.043.040.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	1500 SR	1.095.192.525	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 3 02.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pencapaian Sub Kegiatan				100 Persen	430.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	100 Persen	451.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan/gedung dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	16.027.647.500						90 Persen	16.829.029.875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 8 02.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	16.027.647.500						90 Persen	16.829.029.875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 8 02.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan				87 Kali	15.969.095.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan/Gedung di wilayah Kabupaten/Kota	87 Kali	16.767.550.590	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 8 02.01 9	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Monitoring Survey dan Pemetaan RTBL dan IMB yang dilaksanakan				90 Kali	58.551.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan/Gedung di wilayah Kabupaten/Kota	90 Kali	61.479.285	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
							-		PENDAPATAN TRANSFER					-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 #	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	75 Persen	53.817.536.400						75 Persen	56.508.413.220	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	74 Persen	53.817.536.400						74 Persen	56.508.413.220	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pencapaian Sub Kegiatan				100 Persen	3.148.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	100 Persen	3.305.925.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 3	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Ruas Jalan yang di terangi				20 Persen	987.546.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	20 Persen	1.036.923.405	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 3 # 02.01 8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di Rekonstruksi				6,09 Km	15.203.990.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	6,09 Km	15.964.189.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi				1 Km	10.179.780.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	1 Km	10.688.769.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan Wilayah III yang dibangun				15 Unit	17.895.096.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	15 Unit	18.789.851.325	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah jembatan Wilayah II yang dibangun				5 Unit	-						5 Unit	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah jembatan Wilayah I yang dibangun				10 Unit	-						10 Unit	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Di Rehabilitasi				47 Unit	5.709.119.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	47 Unit	5.994.575.790	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Jumlah Jembatan Yang Di Rehabilitasi Secara Swakelola				10 Unit	-						10 Unit	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan yang dilaksanakan				2 Dokumen	693.504.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Rehabilitasi/Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	2 Dokumen	728.179.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 #	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen		Persen	90 Persen	440.562.200						90 Persen	462.590.311	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang terlatih	Persen		Persen	90 Persen	125.187.950						90 Persen	131.447.348	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kopetensi				100 Orang	125.187.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	100 Orang	131.447.348	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	211.539.450						100 Persen	222.116.423	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.02 7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data ASBU yang di update				1 Dokumen	211.539.450	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	1 Dokumen	222.116.423	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Cakupan Monev Jasa Konstruksi	Persen		Persen	100 Persen	103.834.800						100 Persen	109.026.540	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.04 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Kompeten dibidangnya				33 Rekomendasi	103.834.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	33 Rekomendasi	109.026.540	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 3 #	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	Persen		Persen	100 Persen	1.800.000.000						100 Persen	1.890.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	603.686.600						2 Dokumen	633.870.930	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Berita Acara yang ada				1 Dokumen	603.686.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RTRW dan RRTR Kabupaten ditetapkan	1 Dokumen	633.870.930	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Ruang yang Tersusun sesuai dengan Peraturan dan Perundangan-Undangan	Persen		Persen	1 Persen	219.637.500						1 Persen	230.619.375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang tersedia				1 Dokumen	219.637.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	1 Dokumen	230.619.375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Lama Waktu Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Hari		Hari	4 Hari	404.737.700						4 Hari	424.974.585	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Inventarisasi Pemakaian dan pengembangan lahan terkait investasi dan pembangunan Daerah				1 Dokumen	404.737.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	424.974.585	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen		Persen	100 Persen	571.938.200						100 Persen	600.535.110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.04 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Berita Acara Laporan				20 Laporan	278.449.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	20 Laporan	292.371.555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1 3 # 02.04 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Berkas Informasi Tata Ruang				100 Berkas	293.489.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	100 Berkas	308.163.555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						44.030.151.878							12.508.570.132	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.459.588.228						22 Nilai	7.515.648.832	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	186.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 4 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun				1 Laporan	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Laporan	186.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	5.647.214.928						3 Dokumen	5.550.925.532	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN				1 Tahun	5.487.464.928	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Tahun	5.391.175.532	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				3 Laporan	159.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Laporan	159.750.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	121.200.000						100 Persen	121.200.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan				8 Orang	121.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan kerukunan dan ketertiban	0	8 Orang	121.200.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Orang		Orang	5 Orang	27.500.000						5 Orang	27.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				5 Orang	27.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	5 Orang	27.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	483.989.500						100 Persen	473.189.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 4 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan				6 Jenis	17.422.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan pemerataan pembangunan	0	6 Jenis	17.422.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor				100 Persen	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	100 Persen	6.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jamuan makan minum rapat yang tersedia				15 Kali	77.095.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	15 Kali	77.095.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah logistik yang disediakan Jumlah Cetakan yang disediakan				8 Jenis 26 Ls	- 36.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	8 Jenis 26 Ls	- 36.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penggandaan yang disediakan Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				40000 Lembar 14 Media	- 33.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdayasaing	0	40000 Lembar 14 Media	- 33.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 4 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan				69 Kali	319.872.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	69 Kali	302.472.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	975.233.800						100 Persen	995.633.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran				2550 Buah	12.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	2550 Buah	12.900.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan				5 Rekening	295.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	5 Rekening	295.260.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				26 Jenis	93.473.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	26 Jenis	93.473.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga supir yang dibayarkan				1 Orang	573.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Orang	594.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan				4 Orang	-						4 Orang	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah tenaga jasa administrasi/Teknis yang dibayarkan				37 Orang	-						37 Orang	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	204.450.000						100 Persen	160.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				25 Unit	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	25 Unit	45.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara				5 Unit	-						5 Unit	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya				20 Unit	20.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	20 Unit	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 4 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service				4 Jenis	20.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	4 Jenis	20.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara				10 Ruang	126.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	10 Ruang	62.100.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara				2 Jenis	13.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	2 Jenis	13.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen		Persen	45 Persen	1.875.000.000						45 Persen	1.872.549.850	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	1.517.658.950						100 Persen	1.517.658.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.03 2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Site plan dan DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota				7 Dokumen	681.860.300	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	0	7 Dokumen	681.860.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								- Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Semua Kelurahan						-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								- Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan						-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.03 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun				10 Unit	835.798.650	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	0	10 Unit	835.798.650	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
								- Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan						-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Persen		Persen	100 Persen	52.551.750						100 Persen	50.101.600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.05 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pemanfaatan Rumah Susun dan atau Rumah Khusus				1 Laporan	52.551.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	0	1 Laporan	50.101.600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	304.789.300						100 Persen	304.789.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 2 02.06 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di Monitoring				10 unit	304.789.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	0	10 unit	304.789.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar		Hektar	75 Hektar	1.083.133.500						75 Hektar	1.083.133.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 4 3 02.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	BKM		BKM	2 BKM	857.329.300						2 BKM	857.329.300	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3 02.02 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Saluran Drainase yang disusun				2 Dokumen	433.627.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	2 Dokumen	433.627.700	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3 02.02 3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Penerima Program KOTAKU				8 BKM	423.701.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	8 BKM	423.701.600	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3 02.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	Persen		Persen	100 Persen	225.804.200						100 Persen	225.804.200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 3 02.03 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun				20 Unit	225.804.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	0	20 Unit	225.804.200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki				6 Unit	-						6 Unit	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar		Hektar	75 Hektar	537.237.950						75 Hektar	537.237.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 4 02.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Persen		Persen	100 Persen	537.237.950						100 Persen	537.237.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 4 02.01 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (BSRLH) yang diberikan				17 Unit	537.237.950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	0	17 Unit	537.237.950	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU	Persen		Persen	75 Persen	33.075.192.200						75 Persen	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 5 02.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persen		Persen	75 Persen	33.075.192.200						75 Persen	1.500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 5 02.01 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen DED Perencanaan Prasarana Permukiman dan Jalan Jerambah Di Kabupaten Indragiri Hilir				12 Dokumen	2.026.832.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			20 Kecamatan	12 Dokumen	500.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 4 5 02.01 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Dikembangkan Jumlah Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Di Kabupaten Indragiri Hilir Jumlah Peribadatan Yang Dibangun/ Rehab Jumlah Sarana, Prasarana TPU Yang Dibangun Luas Tanah Untuk Pemakaman Yang Disediakan Panjang Jalan Yang Dibangun Pada Kegiatan Jalan Lingkungan Wilayah I, II, III Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Dibangun				20 Kawasan 1 Lokasi 73 Unit 2 Unit 0 Hektar 26.4 KM 1.4 KM	30.098.128.700 - - - - -	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			20 Kecamatan	20 Kawasan 1 Lokasi 73 Unit 2 Unit 0 Hektar 26.4 KM 1.4 KM	500.000.000 - - - -	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 5 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	DATA EVALUASI DAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan pemukiman yang dilaksanakan				20 Kecamatan 197 Kali	950.230.750 -	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			20 Kecamatan	20 Kecamatan 197 Kali	500.000.000 -	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						19.479.312.812							23.508.612.812	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	17.015.042.662						22 Nilai	19.058.612.812	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	24.000.000						90 Persen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				14 Dokumen	24.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	14 Dokumen	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	12.333.612.812 -						100 Persen 100 Persen	12.333.612.812 -	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				170 Orang	12.333.612.812	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	170 Orang	12.333.612.812	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	355.000.000						100 Persen	900.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase aparaturnya yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	95 Persen	-						95 Persen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya yang disediakan				400 Stel	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		400 Stel	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/ dilaksanakan				7 Diklat	350.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		7 Diklat	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.398.139.850						100 Persen	1.645.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				16 Jenis	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		16 Jenis	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				55 Jenis	404.400.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		55 Jenis	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				7 Jenis	30.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		7 Jenis	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				7 Jenis	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		7 Jenis	35.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				20000 Ekse mplar	156.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		20000 Ekse mplar	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				246 Kali	777.009.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		246 Kali	900.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	95 Persen	292.500.000						95 Persen	750.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diadakan				1 Unit	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		1 Unit	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan				34 Unit	277.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		34 Unit	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	95 Persen	2.437.790.000						95 Persen	3.110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				97 Persen	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		97 Persen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				36 Rekening	79.590.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		36 Rekening	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				191 Orang	2.353.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		191 Orang	3.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 5 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	95 Persen	174.000.000						95 Persen	270.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				45 Unit	64.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		45 Unit	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				100 Unit	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		100 Unit	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		1 Unit	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KIDH	Persen		Persen	100 Persen	2.464.270.150						100 Persen	4.450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen		Persen	95 Persen	1.718.198.150						95 Persen	3.300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang dilaksanakan				805 Kali	999.320.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		805 Kali	2.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.01 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Trantibum				120 Kali	24.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		120 Kali	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.01 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum/Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan				3 Kali	104.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		3 Kali	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.01 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelantikan/Pengukuhan Satlinmas yang dilaksanakan				612 Orang	135.419.850	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		612 Orang	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.01 7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang dilaksanakan				30 Kali	453.928.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		30 Kali	700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	Persen		Persen	95 Persen	543.800.000						95 Persen	900.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.02 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengamatan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda/Perbup yang dilaksanakan				336 Kali	205.810.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%		336 Kali	500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 5 2 02.02 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Perbup				12 Kali	337.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	12 Kali	400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Berkompeten dibidangnya	Persen		Persen	95 Persen	202.272.000						95 Persen	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 5 2 02.03 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS Satpol PP yang dikembangkan kapasitasnya				5 orang	202.272.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	5 orang	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.852.934.520							13.535.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	6.297.748.020						22 Nilai	5.435.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen laporan capaian kinerja	Persen		Persen	100 Persen	85.400.000						100 Persen	250.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja SKPD yang disusun				6 Dokumen	85.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen dan laporan	6 Dokumen	250.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang		Orang	47 Orang	4.331.644.920						47 Orang	2.000.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
		Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Orang		Orang	47 Orang	-						47 Orang	-	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan				47 orang	4.331.644.920	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Aparatur Sipil Negara	47 orang	2.000.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.356.083.100						100 Persen	1.625.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan yang disediakan				15 jenis	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	15 jenis	25.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				68 Jenis	376.021.550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	68 Jenis	500.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan				2 Jenis	204.686.550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	2 Jenis	400.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 jenis	15.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	5 jenis	150.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				1080 Exsemplar	542.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	1080 Exsemplar	50.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN
1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				63 kali	215.725.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi Umum	63 kali	500.000.000	DINAS KEBAKARAN PENYELAMATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 5 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	persen		persen	100 persen	403.620.000						100 persen	760.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	2.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi kantor umum	100 Persen	60.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	58.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi kantor umum	4 Rekening	230.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan				76 Orang	343.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi kantor umum	76 Orang	470.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	121.000.000						100 Persen	800.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapngan yang dipelihara				15 Unit	96.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana	15 Unit	300.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				7 Unit	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana	7 Unit	150.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 unit	20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana	1 unit	350.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	4.407.448.700						100 Persen	6.000.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 3 02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	4.373.947.000						100 Persen	5.500.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 3 02.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan yang disediakan				5 Jenis	3.311.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publiik		Kesiapsiagaan Petugas dan sarana prasarana	5 Jenis	4.000.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 3 02.02 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah SDM yang bersertifikat sebagai pengelola penanganan kebakaran				3 Orang	1.062.197.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publiik		Kesiapsiagaan Petugas dan sarana prasarana	3 Orang	1.500.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN
1 5 3 02.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	satredkar	Kelompok		Kelompok	10 Kelompo k	33.501.700						10 Kelompo k	500.000.000	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PEMADAM DAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 5 3 02.04 2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kelembagaan penanganan kebakaran dan hari jadi yang di bentuk dikecamatan				10 Kelompok	33.501.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase kelembagaan penanganan kebakaran yang aktif	10 Kelompok	500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	147.737.800						100 Persen	2.100.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 02.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun ,	Persen		Persen	100 Persen	41.781.800						100 Persen	1.500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 02.01 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah sarana prasarana evakuasi dan penanganan korban yang dilakukan				15 Jenis	41.781.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran	15 Jenis	1.500.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 02.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi dan proteksi Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	64.470.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 02.02 1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pralatan Proteksi kebakaran yang didata				450 Unit	64.470.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna APAR	450 Unit	250.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 02.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	hasil Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	41.486.000						100 Persen	350.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 5 4 02.03 1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi				8 Kejadian	41.486.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kejadian Kebakaran	8 Kejadian	350.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.798.091.840							8.798.091.840	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	5.671.371.840						90 Persen	5.671.371.840	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	161.187.900						90 Persen	161.187.900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				9 Dokumen	28.044.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen penganggaran dan perencanaan	9 Dokumen	28.044.900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				25 Dokumen	133.143.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen penganggaran dan perencanaan	25 Dokumen	133.143.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 5 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	3.829.179.840						100 Persen	3.829.179.840	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				35 Orang	3.765.091.840	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaporan Keuangan dan Aset	35 Orang	3.765.091.840	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				9 Dokumen	64.088.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaporan Keuangan dan Aset	9 Dokumen	64.088.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Stell		Stell	98 Stell	131.180.000						98 Stell	131.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				98 Stel	131.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pakaian Dinas / Operasional dan Kelengkapan	98 Stel	131.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	643.173.000						100 Persen	643.173.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				10 Jenis	6.115.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelancaran administrasi kantor	10 Jenis	6.115.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Jenis	110.460.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelancaran administrasi kantor	5 Jenis	110.460.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4 Jenis	238.308.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelancaran administrasi kantor	4 Jenis	238.308.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	7.017.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelancaran administrasi kantor	3 Jenis	7.017.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				816 Exemplar	8.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelancaran administrasi kantor	816 Exemplar	8.600.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				70 Kali	272.673.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelancaran administrasi kantor	70 Kali	272.673.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	390.830.000						90 Persen	390.830.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				10 Unit	390.830.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		10 Unit	390.830.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	90 Persen	113.641.100						90 Persen	113.641.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 5 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	2.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi perkantoran	100 Persen	2.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	62.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi perkantoran	4 Rekening	62.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				4 Orang	48.441.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administrasi perkantoran	4 Orang	48.441.100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	402.180.000						100 Persen	402.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				33 Unit	329.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		33 Unit	329.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				25 Unit	7.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		25 Unit	7.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	66.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		1 Unit	66.180.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Pengangan Kebencanaan	Persen		Persen	100 Persen	3.126.720.000						100 Persen	3.126.720.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyebaran informasi tentang daerah rawan bencana	Laporan		Laporan	100 Laporan	60.000.000						100 Laporan	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Risiko Bencana yang disusun				4 Laporan	60.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD		4 Laporan	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Orang		Orang	100 Orang	756.800.000	- Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan					100 Orang	756.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang peduli Bencana dikawasan rawan bencana				80 Orang	60.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Pangkalan Tujuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah Bencana	Terdampak	80 Orang	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
								- Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Pekan Tua							- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 5 3 02.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana yang tersedia				66 unit	321.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Daerah Bencana	Terdampak	66 unit	321.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.02 5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang terkoordinasi pasca bencana				6 Kali	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Daerah Bencana	Terdampak	6 Kali	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang terkoordinasi pasca bencana				3 Kali	250.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Mewujudkan kerukunan dan ketertiban	Daerah Bencana	Terdampak	3 Kali	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.02 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah TRC yang Terlatih				55 Orang	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Daerah Bencana	Terdampak	55 Orang	25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana	Kejadian		Kejadian	100 Kejadian	2.309.920.000							100 Kejadian	2.309.920.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang di tanggulangi				45 Kejadian	2.114.920.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		54 OPD		45 Kejadian	2.114.920.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 02.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Korban Bencana yang disediakan				200 Paket	195.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		54 OPD		200 Paket	195.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-								-	DINAS SOSIAL
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						13.369.719.345								15.177.702.500	DINAS SOSIAL
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.332.069.495							22 Nilai	8.171.551.500	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	36.000.000							100 persen	41.000.000	DINAS SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 6 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	persen		persen	100 persen	-	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Rencana kegiatan dan Anggaran	100 persen	-	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	3.838.719.345						100 persen	4.222.591.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	persen		persen	90 persen	151.815.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	37 orang	4.222.591.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan	persen		persen	90 persen	151.815.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara	3 kali	174.587.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	1.680.795.150						100 persen	1.865.132.500	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				6 jenis	5.350.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	6 jenis	6.152.500	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				51 Jenis	168.010.900	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	51 Jenis	193.212.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				11 Jenis	224.550.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	11 Jenis	258.232.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				14 Jenis	74.360.250	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	14 Jenis	85.514.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				61 Eksemplar	677.800.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	61 Eksemplar	711.690.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				213 kali	530.724.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	213 kali	610.332.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen		persen	100 persen	620.600.000						100 persen	713.480.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat dan materai				100 Persen	11.200.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	100 Persen	12.880.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				6 rekening	225.400.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	6 rekening	259.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan				31 Orang	384.000.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	31 Orang	441.600.000	DINAS SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 6 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	persen		persen	100 persen	1.004.140.000						100 persen	1.154.761.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				6 unit	219.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	6 unit	251.850.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				36 unit	25.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	36 unit	28.980.000	DINAS SOSIAL
1 6 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 unit	759.940.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial	3 unit	873.931.000	DINAS SOSIAL
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen		Persen	100 Persen	3.649.706.000						100 Persen	4.197.160.000	DINAS SOSIAL
1 6 2 02.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	orang		orang	27 orang	2.014.925.000						27 orang	2.317.163.000	DINAS SOSIAL
1 6 2 02.01 2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah masyarakat miskin, perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil yang di bantu dan didampingi				357 orang	2.014.925.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	357 orang	2.317.163.000	DINAS SOSIAL
1 6 2 02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)	persen		persen	100 persen	1.634.781.000						100 persen	1.879.997.000	DINAS SOSIAL
1 6 2 02.03 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Pahlawan, Veteran Pejuang maupun Pembela Kemerdekaan yang diberi Tali Asih				158 orang	268.386.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	158 orang	308.643.000	DINAS SOSIAL
1 6 2 02.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS dan Kelompok Masyarakat yang di bantu				120 orang	402.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	120 orang	462.875.000	DINAS SOSIAL
1 6 2 02.03 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM Keluarga dan kelompok masyarakat yang di layani dan dibantu				341 orang	963.895.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	341 orang	1.108.479.000	DINAS SOSIAL
1 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban Tindak Kekerasan yang menerima bantuan sosial	Persen		Persen	100 Persen	116.430.000						100 Persen	133.894.000	DINAS SOSIAL
1 6 3 02.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Cakupan Penanganan orang terlanjar	persen		persen	100 persen	116.430.000						100 persen	133.894.000	DINAS SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 6 3 02.01 1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah orang terlantar yang di tangani				30 orang	116.430.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Orang Terlantar yang di pulangkan ke tempat asalnya	30 orang	133.894.000	DINAS SOSIAL
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen		Persen	100 Persen	1.640.930.100						100 Persen	1.950.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 4 02.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	persen		persen	100 persen	86.064.000						100 persen	100.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 4 02.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang di bantu dan dilayani				24 orang	86.064.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Disabilitas	24 orang	100.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 4 02.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	persen		persen	100 persen	1.554.866.100						100 persen	1.850.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 4 02.02 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pendamping PKH di tingkatan SDMnya				85 orang	629.800.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Kesejahteraan (PMKS)	85 orang	750.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 4 02.02 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang di layani				40 orang	85.065.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Kesejahteraan (PMKS)	40 orang	100.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 4 02.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah anak dan lanjut usia yang di layani				340 orang	840.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Kesejahteraan (PMKS)	340 orang	1.000.000.000	DINAS SOSIAL
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen		Persen	100 Persen	266.628.250						100 Persen	306.550.000	DINAS SOSIAL
1 6 5 02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin	persen		persen	100 persen	266.628.250						100 persen	306.550.000	DINAS SOSIAL
1 6 5 02.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM yang di tangani				70552 KPM	136.245.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Kesejahteraan (PMKS)	70552 KPM	156.600.000	DINAS SOSIAL
1 6 5 02.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS dan Kelompok Masyarakat yang di bantu				260 orang	130.383.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyandang Kesejahteraan (PMKS)	260 orang	149.950.000	DINAS SOSIAL
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen		Persen	100 Persen	288.466.000						100 Persen	331.735.000	DINAS SOSIAL
1 6 6 02.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Kecamatan		Kecamatan	20 Kecamatan	288.466.000						20 Kecamatan	331.735.000	DINAS SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 6 6 02.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah kejadian bencana alam yang di tangani				20 kecamatan	288.466.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat yang terkena dampak Bencana di 20 Kecamatan	20 kecamatan	331.735.000	DINAS SOSIAL
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	75.489.500						100 Persen	86.812.000	DINAS SOSIAL
1 6 7 02.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman makam Pahlawan yang terpelihara	TMP		TMP	1 TMP	75.489.500						1 TMP	86.812.000	DINAS SOSIAL
1 6 7 02.01 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara				1 TMP	75.489.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti	1 TMP	86.812.000	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.489.591.838							7.323.091.839	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	5.574.591.838						22 Nilai	5.928.091.839	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	pesen		pesen	100 pesen	58.350.000						100 pesen	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				7 dokumen	31.930.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertras Kab. Inhil	7 dokumen	55.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				5 dokumen	26.420.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertras Kab. Inhil	5 dokumen	45.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	4.469.591.838						100 persen	4.469.591.839	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				32 orang	4.469.591.838	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Disnakertrans Kab. Inhil	32 orang	4.469.591.839	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	perse		perse	100 perse	370.735.000						100 perse	492.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				6 jenis	5.306.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	6 jenis	7.500.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				2 jenis	13.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	2 jenis	35.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				8 jenis	43.005.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	8 jenis	65.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 jenis	16.304.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	2 jenis	25.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				50 exemplar	80.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	50 exemplar	10.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				47 kali	212.570.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	47 kali	350.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen		persen	100 persen	576.700.000						100 persen	658.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	215.860.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	100 persen	250.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 rekening	139.440.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	3 rekening	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				13 orang	221.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	13 orang	258.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen		persen	100 persen	99.215.000						100 persen	208.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
2 7 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				27 unit	19.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	27 unit	25.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				14 unit	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	14 unit	15.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				53 unit	15.965.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Kab. Inhil	Disnakertrans	53 unit	18.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 7 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	54.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Disnakertrans Kab. Inhil	2 unit	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peresentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen		Persen	100 Persen	165.000.000						100 Persen	350.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 02.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	165.000.000						100 persen	350.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 02.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kompetensi				5 orang	124.684.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		5 orang	250.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 02.01 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama antar lembaga/sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja				6 kali	40.316.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		6 kali	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkanPersentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	persen		persen	85 persen	600.000.000						85 persen	710.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 02.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pasar kerja	persen		persen	100 persen	600.000.000						100 persen	710.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		Cakupan Penerbitan Perpanjangan IMTA	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 02.01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja				3000 orang	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pencari Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir	3000 orang	150.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 02.01 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dalam Bentuk Kelompok Kerja				180 orang	560.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pencari Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir	180 orang	560.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen		Persen	100 Persen	150.000.000						100 Persen	335.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 5 02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Jumlah Perselisihan Hunungan Industrial	persen		persen	90 persen	150.000.000						90 persen	335.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 5 02.02 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir				10 kasus	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan di Kab. Inhil	10 kasus	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 7 5 02.02 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey KHL yang dilakukan				10 kali	70.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan di Kab. Inhil	10 kali	135.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7 5 02.02 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsotek				100 persen	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan di Kab. Inhil	100 persen	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						-							-	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						200.000.000							300.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi	persen		persen	100 persen	133.400.000						100 persen	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 3 02.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan penempatan transmigrasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	133.400.000						1 dokumen	200.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 3 02.01 2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen/laporan kondisi sarana prasarana wilayah transmigrasi				1 laporan	32.845.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu				Warga Transmigrasi di Kab. Inhil	1 laporan	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 3 02.01 4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola				1 lokasi	33.155.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Transmigrasi di Kab. Inhil	1 lokasi	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 3 02.01 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diberikan penyuluhan/pengarahan				1 lokasi	34.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Transmigrasi di Kab. Inhil	1 lokasi	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 3 02.01 7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM				225 orang	33.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Transmigrasi di Kab. Inhil	225 orang	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	persen		persen	100 persen	66.600.000						100 persen	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 4 02.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah lokasi transmigrasi yang dikelola	lokasi		lokasi	1 lokasi	66.600.000						1 lokasi	100.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 4 02.01 1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang diberikan pengarahan tentang Peningkatan SDM				225 orang	33.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Transmigrasi di Kab. Inhil	225 orang	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 4 02.01 2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mengelola prasarana, sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi				225 orang	33.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Transmigrasi di Kab. Inhil	225 orang	50.000.000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.762.661.838							9.156.353.430	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	6.573.916.238						100 Persen	6.850.171.430	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	320.666.500						90 Persen	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				9 Dokumen	320.666.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SAKIP SKPD	9 Dokumen	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4.451.591.838						100 Persen	4.674.171.430	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				40 Orang	4.451.591.838	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Sipil Negara (ASN)	40 Orang	4.674.171.430	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.053.855.400						100 Persen	1.069.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				5 Jenis	2.824.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	5 Jenis	3.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 8 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				7 Jenis	177.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	7 Jenis	180.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	37.629.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	3 Jenis	39.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				20 Jenis	38.207.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	20 Jenis	40.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				720 Eksemplar	136.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	DP2KBP3A Kab. Inhil	720 Eksemplar	137.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				104 Kali	662.035.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	104 Kali	670.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	403.332.500						100 Persen	405.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				100 Persen	4.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	100 Persen	5.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 8 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				9 Rekening	90.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	9 Rekening	90.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				24 Orang	309.232.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		DP2KBP3A Kab. Inhil	24 Orang	310.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	344.470.000						100 Persen	352.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				34 Unit	90.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DP2KBP3A Kab. Inhil	34 Unit	92.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				50 Unit	45.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DP2KBP3A Kab. Inhil	50 Unit	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				2 Unit	209.070.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DP2KBP3A Kab. Inhil	2 Unit	210.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen		Persen	1.81 Persen	785.000.000						1.81 Persen	824.250.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG dengan kategori baik	Persen		Persen	10 Persen	190.000.000						10 Persen	199.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengintegrasikan Perencanaan, Penganggaran yang responsif Gender				380 OPD	190.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		OPD	380 OPD	199.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-							-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 8 2 02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	135.000.000						100 Persen	141.750.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 02.02 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				40 Orang	135.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	OPD dan Mitra Kerja terkait	40 Orang	141.750.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen		Persen	100 Persen	460.000.000						100 Persen	483.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 02.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan				5 Lembaga	460.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	OPD dan Mitra Kerja terkait	5 Lembaga	483.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-							-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persen		Persen	5 Persen	332.000.000						5 Persen	356.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 3 02.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prevelensi Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Persen		Persen	100 Persen	292.000.000						100 Persen	306.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 3 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan				40 Orang	292.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO	40 Orang	306.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-							-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 8 3 02.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen		Persen	100 Persen	40.000.000						100 Persen	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 3 02.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Perempuan yang terlayani				6 Kasus	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO	6 Kasus	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak dalam upaya peningkatan kualitas keluarga	Persen		Persen	100 Persen	240.000.000						100 Persen	252.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4 02.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pendampingan dalam peningkatan Kualitas Keluarga	Persen		Persen	100 Persen	90.000.000						100 Persen	94.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4 02.01 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Informasi tentang Kesejahteraan dan Keadilan Gender yang diterbitkan				1 Terbitan	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Terbitan	52.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4 02.01 3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Keluarga				1 Kebijakan	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Kebijakan	42.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4 02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen		Persen	100 Persen	150.000.000						100 Persen	157.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4 02.02 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Kesejahteraan Ketahanan Keluarga				30 Orang	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	30 Orang	157.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen		Persen	100 Persen	91.745.600						100 Persen	96.332.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 5 02.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persen		Persen	100 Persen	91.745.600						100 Persen	96.332.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 8 5 02.01 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang diterbitkan				1 Terbitan	91.745.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja Terkait	1 Terbitan	96.332.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen		Persen	100 Persen	400.000.000						100 Persen	420.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6 02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen		Persen	100 Persen	400.000.000						100 Persen	420.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6 02.02 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pencapaian Kluster Hak Anak				2 Kluster	400.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdayasaing	OPD dan Mitra Peduli Anak	2 Kluster	420.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-							-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pemenuhan Anak yang berkebutuhan Khusus	Persen		Persen	100 Persen	340.000.000						100 Persen	357.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 7 02.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen		Persen	100 Persen	340.000.000						100 Persen	357.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 7 02.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Anak yang terlayani				20 Kasus	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	20 Kasus	52.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							-							-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 7 02.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Informasi dan Edukasi tentang Perlindungan terhadap Tindak Kekerasan				180 Orang	290.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdayasaing	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	180 Orang	304.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						908.930.000							859.376.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	158.930.000						1 Kebijakan	166.876.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 2 02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Kebijakan		Kebijakan	1 Kebijakan	158.930.000						1 Kebijakan	166.876.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Jumlah Mitra dalam Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Program KKBPK	Mitra		Mitra	2 Mitra	-						2 Mitra	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 2 02.01 1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan terkait Program KKBPK				1 Kebijakan	118.930.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	1 Kebijakan	124.876.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 2 02.01 6	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan tentang Pendidikan Kependudukan				5 Sekolah	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Mitra Kerja terkait	5 Sekolah	42.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	Persen		Persen	91.94 Persen	460.000.000						91.94 Persen	440.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Ketersediaan Tenaga Penyuluh/Petugas Lapangan (PKB/PLKB)	Persen		Persen	100 Persen	150.000.000						100 Persen	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.02 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang mendapatkan Pembinaan Program KKBPK				50 Orang	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petugas Lapangan (PKB/PLKB, IMP serta PPKB dan Sub PPKB)	50 Orang	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 3 02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Faskes KB)	Fasilitas Kesehatan		Fasilitas Kesehatan	38 Fasilitas Kesehatan	210.000.000						38 Fasilitas Kesehatan	220.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Lokasi Kegiatan PUS Ber-KB bagi Keluarga Miskin				3 Lokasi	70.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pasangan Usia Subur (PUS)	3 Lokasi	73.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.03 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja				5 Sekolah	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pasangan Usia Subur (PUS)	5 Sekolah	52.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Peserta Akseptor KB Aktif dan baru yang mendapatkan Pelayanan KB				50 Orang	90.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pasangan Usia Subur (PUS)	50 Orang	94.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Per		Per	50 Per	100.000.000						50 Per	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 3 02.04 1	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Pasangan Usia Subur (PUS)	3 Organisasi	110.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Anggota Kelompok Kegiatan Ber-KB	Persen		Persen	63.46 Persen	290.000.000						63.46 Persen	252.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 4 02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen		Persen	63.46 Persen	170.000.000						63.46 Persen	126.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 4 02.01 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pendamping Kelompok Kegiatan yang dilatih				50 Orang	170.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Kelompok Kegiatan (Poktan) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, UPPKS dan PIK-R)	50 Orang	126.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 4 02.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen		Persen	63.46 Persen	120.000.000						63.46 Persen	126.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 # 4 02.02 3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra Organisasi kemasyarakatan yang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Kelompok	120.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Kelompok Kegiatan (Poktan) (BKB, BKR, BKL, PPPKS, UPPKS dan PIK-R)	1 Kelompok	126.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						17.629.432.118							17.401.483.718	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	6.575.264.543						22 Nilai	6.617.288.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	89.101.300						90 Persen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				11 Dokumen	89.101.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD		11 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4.914.088.118						100 Persen	4.914.088.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				40 Orang	4.914.088.118	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN Kantor DLHK		40 Orang	4.914.088.118	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	229.200.000						100 Persen	229.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				13 Orang	229.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Barang Milik Daerah		13 Orang	229.200.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	775.572.950						100 Persen	774.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan				5 Jenis	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prasarana di OPD		5 Jenis	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				9 Jenis	150.839.450	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prasarana di OPD		9 Jenis	160.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4 Jenis	60.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prasarana di OPD		4 Jenis	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				6 Jenis	21.312.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prasarana di OPD		6 Jenis	22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				7 Eksemplar	61.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana di OPD	7 Eksemplar	12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				118 Kali	467.261.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana di OPD	118 Kali	495.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	446.167.000						100 Persen	455.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat				100 Persen	7.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD DLHK	100 Persen	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	103.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD DLHK	2 Rekening	105.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan				27 Orang	335.287.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD DLHK	27 Orang	340.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	121.135.175						100 Persen	145.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas (Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				6 Unit	70.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana di OPD	6 Unit	85.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas (Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				39 Unit	44.135.175	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana di OPD	39 Unit	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				28 Unit	7.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana di OPD	28 Unit	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen lingkungan yang disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	499.118.000						2 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 2 02.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen		Persen	100 Persen	99.118.000						100 Persen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 2 02.01 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPLH yang tersedia				2 Dokumen	99.118.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 2 02.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Data-data untuk Penyusunan Dokumen KLHS	Persen		Persen	100 Persen	400.000.000						100 Persen	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 2 02.02 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tersedia				1 Dokumen	400.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen KLHS	1 Dokumen	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Indeks		Indeks	60.32 Indeks	787.299.375						60.32 Indeks	460.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 3 02.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan yang dimonitoring	Lokasi		Lokasi	9 Lokasi	124.405.200						9 Lokasi	220.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 3 02.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Sampel Sungai yang diperiksa kualitas airnya				3 Sungai	72.254.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Air dan Udara	3 Sungai	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 3 02.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Sosialisasi Kampung Iklim yang dilaksanakan				2 Kali	52.150.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Air dan Udara	2 Kali	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 3 02.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang direhabilitasi	Ha		Ha	100 Ha	662.894.175						100 Ha	240.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 3 02.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas udaranya				8 Lokasi	71.636.175	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lahan	8 Lokasi	120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 3 02.03 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah titik pemasangan alat pantau tinggi muka air tanah				20 Titik	591.258.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lahan	20 Titik	120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen		Persen	65 Persen	264.765.750						65 Persen	270.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 4 02.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang ditangani	Persen		Persen	60 Persen	264.765.750						60 Persen	270.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 4 02.01 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola				4 Lokasi	264.765.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			RTH	4 Lokasi	270.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	limbah B3 dan bahan berbahaya lainnya yang dikelola	Ton		Ton	3670 Ton	76.862.000						3670 Ton	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 5 02.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang tertangani	Persen		Persen	60 Persen	76.862.000						60 Persen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 5 02.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Fasyankes yang diberi sosialisasi pengelolaan limbah medis/Covid-19				40 Fasyanke s	76.862.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Usaha	40 Fasyanke s	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	202.066.000						100 Persen	240.278.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 6 02.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang diawasi yang persetujuan lingkungannya dan atau persetujuan pemerintah di terbitkan oleh kabupaten	Unit Usaha		Unit Usaha	17 Unit Usaha	202.066.000						17 Unit Usaha	240.278.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		Persentase perusahaan yang taat aturan lingkungan secara administrasi maupun teknis	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 6 02.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan				30 Rekomendasi	51.788.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Usaha	30 Rekomendasi	90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 6 02.01 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang diawasi yang persetujuan lingkungannya dan atau persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Kabupaten				17 Unit Usaha	150.278.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Usaha	17 Unit Usaha	150.278.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali		Kali	1 Kali	63.411.500						1 Kali	68.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 9 02.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Peduli Lingkungan	Persen		Persen	100 Persen	63.411.500						100 Persen	68.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # 9 02.01 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang diberikan penghargaan Adiwiyata				6 Sekolah	63.411.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah	6 Sekolah	68.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # #	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	35.850.000						100 Persen	68.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # # 02.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	35.850.000						100 Persen	68.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # # 02.01 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat pengaduan yang ditangani				7 Kali	35.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lingkungan	7 Kali	68.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # #	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	9.124.794.950						100 Persen	9.477.917.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # # 02.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang terpelihara dan berfungsi baik	Persen		Persen	90 Persen	9.124.794.950						90 Persen	9.477.917.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # # 02.01 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayarkan				425 Orang	5.853.111.350	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penanganan Sampah	425 Orang	6.813.767.350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
							-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu						-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # # 02.01 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan				2 Kali	820.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penanganan Sampah	2 Kali	111.671.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 # # 02.01 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan/dipelihara				30 Jenis	2.451.683.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penanganan Sampah	30 Jenis	2.552.479.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10.592.108.390							10.811.828.390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	9.829.499.090						22 Nilai	10.010.712.390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	80.880.000						90 Persen	85.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				7 Dokumen	80.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Laporan Kinerja Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	7 Dokumen	85.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	6.236.108.390						1 Tahun	6.236.108.390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan				45 Orang	6.236.108.390	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		ASN Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	45 Orang	6.236.108.390	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.392.659.700						100 Persen	1.462.304.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				5 Jenis	9.826.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	5 Jenis	10.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				9 Jenis	743.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	9 Jenis	781.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				4 Jenis	65.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	4 Jenis	68.754.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Jenis	22.999.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	2 Jenis	24.150.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				24 Eksemplar	3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	24 Eksemplar	3.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan				97 Kali	546.854.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	97 Kali	574.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	295.880.000						90 Persen	311.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan				2 Unit	295.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	2 Unit	311.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	90 Persen	1.429.591.000						90 Persen	1.502.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				90 Persen	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	90 Persen	6.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				4 Rekening	129.080.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	4 Rekening	135.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				93 Orang	1.294.511.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	93 Orang	1.360.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	90 Persen	394.380.000						90 Persen	414.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara				22 Unit	34.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	22 Unit	35.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	330.380.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	1 Unit	347.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				50 Unit	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sarana dan Prasarana Disduk dan Pencapil Kab. Inhil	50 Unit	31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio		Rasio	0,75 Rasio	402.790.000						0,75 Rasio	422.930.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terlayani Sesuai SOP	Persen		Persen	90 Persen	188.750.000						90 Persen	198.188.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 2 02.01 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan yang di terbitkan dokumen kependudukan				75 Jiwa	49.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir	75 Jiwa	52.290.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 2 02.01 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang di terbitkan				34000 Keping	89.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir	34000 Keping	93.765.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan				24000 Lembar	-						24000 Lembar	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah KTP-el yang di terbitkan				25000 Keping	-						25000 Keping	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 2 02.01 6	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah SKP/SKD WNI yang di terbitkan				2400 Berkas	49.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir	2400 Berkas	52.133.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 2 02.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen		Persen	90 Persen	214.040.000						90 Persen	224.742.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 2 02.02 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko KIA yang diadakan				36000 Keping	214.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir	36000 Keping	224.742.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen		Persen	90 Persen	69.975.000						90 Persen	73.473.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 3 02.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Akta Kelahiran	Lembar		Lembar	4000 Lembar	69.975.000						4000 Lembar	73.473.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 3 02.01 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan				4000 Dokumen	69.975.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang belum memiliki Akta Kelahiran	4000 Dokumen	73.473.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen		Persen	90 Persen	289.844.300						90 Persen	304.713.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 4 02.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan	PKS		PKS	7 PKS	14.000.000						7 PKS	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.01 2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan				7 PKS	14.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD di Kabupaten Indragiri Hilir	7 PKS	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jenis pelayanan kependudukan yang menggunakan IT	Persen		Persen	100 Persen	96.570.000						100 Persen	101.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.02 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi tentang administrasi kependudukan				20 Kecamatan	96.570.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir	20 Kecamatan	101.400.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan database kependudukan	Persen		Persen	90 Persen	179.274.300						90 Persen	188.313.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.03 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan				5 OPD	36.224.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD dan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir	5 OPD	38.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.03 5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi administrasi kependudukan				3000 jiwa	39.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD dan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir	3000 jiwa	41.213.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 # 4 02.03 8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah buku mengenai data kependudukan yang dipublikasikan				110 Buku	103.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	OPD dan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir	110 Buku	109.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						27.816.073.987							21.670.679.307	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	5.606.587.507						100 Persen	5.111.241.207	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	-						22 Nilai	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	65.750.000						90 Persen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	65.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		8 Dokumen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	3.530.146.307						100 Persen	3.530.146.307	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				29 Orang	3.530.146.307	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		29 Orang	3.530.146.307	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.223.995.200						100 Persen	854.244.467	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan				6 Jenis	4.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		6 Jenis	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				7 Jenis	91.821.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		7 Jenis	101.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4 Jenis	44.375.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		4 Jenis	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				8 Jenis	18.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		8 Jenis	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				240 Eksemplar	429.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		240 Eksemplar	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				205 Kali	634.239.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		205 Kali	670.994.467	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	35.430.000						100 Persen	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				5 Set	35.430.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		5 Set	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	602.486.000						100 Persen	401.850.433	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat				100 Persen	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				48 Rekening	93.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Rekening	96.850.433	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan				41 Orang	503.946.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	41 Orang	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	148.780.000						100 Persen	225.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				8 Unit	101.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Unit	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6 Unit	47.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen		Persen	90 Persen	4.816.082.580						90 Persen	1.100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 2 02.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen		Persen	90 Persen	4.816.082.580						90 Persen	1.100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 2 02.01 2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Validasi Data Batas Desa				50 Desa	3.338.612.580	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	50 Desa	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 2 02.01 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Lokasi Kegiatan Pelaksanaan TMMD				2 Desa	1.477.470.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	2 Desa	1.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen		Persen	90 Persen	197.517.850						90 Persen	192.955.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 3 02.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Kerjasama antar desa yang terlaksana	Persen		Persen	90 Persen	197.517.850						90 Persen	192.955.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 3 02.01 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Kawasan Perdesaan				47 Orang	197.517.850	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	47 Orang	192.955.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan secara Akuntabel	Persen		Persen	75 Persen	14.702.983.750						75 Persen	13.266.483.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	Persen		Persen	75 Persen	14.702.983.750						75 Persen	13.266.483.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Jumlah Perangkat Desa yang Mendapatkan Pembinaan				50 Orang	502.466.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			197 Desa	50 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 4 02.01 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Informasi				73 Orang	643.830.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	73 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang Mendapatkan Pembinaan				25 Orang	350.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	25 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan yang Diikuti				20 Kecamatan	66.920.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	20 Kecamatan	71.185.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa				36 Desa	17.870.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	36 Desa	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Aktif membangun Desa				48 BUMDes	1.222.038.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	48 BUMDes	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengadakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa				0 Desa	-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	0 Desa	1.367.298.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang telah Melakukan Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan				58 Desa/Kelurahan	342.895.450	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			197 Desa	58 Desa/Kelurahan	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pendamping Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi				230 Orang	11.048.649.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			197 Desa	230 Orang	10.728.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 4 02.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi				73 Desa	508.314.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			197 Desa	73 Desa	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen		Persen	90 Persen	2.492.902.300						90 Persen	2.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 5 02.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Persen		Persen	90 Persen	2.492.902.300						90 Persen	2.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 5 02.01 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan yang dibina				8 Lembaga	1.075.197.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 LAD	8 Lembaga	750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Lembaga Adat dan Sosial Budaya yang dibina				30 LAD	-						30 LAD	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah PKK yang dibina dan berjalannya 10 Program Pokok PKK				55 Desa/Kelurahan	-						55 Desa/Kelurahan	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 5 02.01 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang memiliki Produk Hasil Desa dalam Menunjang PAD				55 Desa	290.050.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 LAD	55 Desa	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 5 02.01 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat yang ditampilkan dalam Gelar TTG				7 Alat	218.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 LAD	7 Alat	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 # 5 02.01 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang dibentuk dan Berjalannya 10 Program Pokok PKK				55 Desa/Ke-lurahan	909.655.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 LAD	55 Desa/Ke-lurahan	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PERHUBUNGAN
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						18.416.165.459							41.011.929.459	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	9.662.224.759						22 Nilai	21.092.988.759	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	90 Persen 90 Persen	152.304.750 -						90 Persen 90 Persen	352.068.750 -	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				8 Laporan	152.304.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	8 Laporan	352.068.750	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6.070.423.559						100 Persen	13.078.423.559	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				60 Orang	6.062.544.559	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan Tunjangan ASN beserta Dokumen Laporan Keuangan	60 Orang	13.062.544.559	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Laporan	7.879.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gaji dan Tunjangan ASN beserta Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	15.879.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	141.320.000						100 Persen	341.320.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset Milik Daerah yang ditata				2929 Unit	141.320.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Manajemen Aset Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	2929 Unit	341.320.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	90 Persen	381.238.000						90 Persen	781.238.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				12 Diklat	381.238.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara yang Melaksanakan Diklat	12 Diklat	781.238.000	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.088.941.100						100 Persen	2.593.941.100	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				45 Jenis	212.463.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	45 Jenis	512.463.100	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				5 Jenis	113.576.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	5 Jenis	313.576.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				26 Jenis	127.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	26 Jenis	327.450.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				36 Eksemplarr	3.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	36 Eksemplarr	8.850.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				269 Kali	631.602.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	269 Kali	1.431.602.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	1.576.797.350						100 Persen	3.384.797.350	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	7.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Penunjang Operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	15.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	291.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Penunjang Operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	4 Rekening	591.300.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				139 Orang	1.277.597.350	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Penunjang Operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	139 Orang	2.777.597.350	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	90 Persen	251.200.000						90 Persen	561.200.000	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				4 Unit	105.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset-aset Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	4 Unit	255.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				9 Unit	89.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset-aset Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	9 Unit	189.700.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				10 Unit	56.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aset-aset Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	10 Unit	116.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen		Persen	70 Persen	4.663.587.750						70 Persen	10.533.587.750	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	Persen		Persen	90 Persen	373.242.800						90 Persen	773.242.800	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.02 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia				15 Unit	373.242.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir	15 Unit	773.242.800	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi standard	Persen		Persen	85 Persen	1.445.338.900						85 Persen	3.445.338.900	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.03 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang di Pelihara				10 Unit	1.445.338.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terminal	10 Unit	3.445.338.900	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji kir angkutan umum yang terlaksana	Persen		Persen	85 Persen	1.450.193.250						85 Persen	3.020.193.250	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Sediakan				1 Unit	1.387.014.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jalan beserta Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan Uji KIR	1 Unit	2.887.014.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.05 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan/ Angkutan Umum yang di Lakukan Pengujian				750 Unit	63.179.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pengguna Jalan beserta Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan Uji KIR	750 Unit	133.179.250	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen		Persen	80 Persen	376.490.000						80 Persen	776.490.000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota yang di Laksanakan				73 Kali	376.490.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pengemudi Kendaraan Bermotor Beserta Pemilik Angkutan	73 Kali	776.490.000	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persen		Persen	85 Persen	1.018.322.800						85 Persen	2.518.322.800	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 02.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang di Sediakan				36 Unit	1.018.322.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengguna Angkutan		36 Unit	2.518.322.800	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen		Persen	70 Persen	4.090.352.950						70 Persen	9.385.352.950	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 3 02.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen		Persen	80 Persen	4.090.352.950						80 Persen	9.385.352.950	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 3 02.12 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rasio ijin trayek Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibuat	Persen		Persen	80 Persen 70 Dokumen	- 75.740.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 Wilayah		80 Persen 70 Dokumen	- 155.740.000	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
2 # 3 02.12 2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan/Dermaga yang di Bangun				70 Unit	4.014.612.950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5 Wilayah		70 Unit	9.229.612.950	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.038.131.162							17.124.845.612	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.070.567.162						22 Nilai	7.893.476.612	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	21.057.000						90 Persen	21.057.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				7 Dokumen	21.057.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab. Inhil	7 Dokumen	21.057.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	3.981.331.162						100 Persen	3.981.331.162	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				30 Orang	3.967.731.162	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	30 Orang	3.967.731.162	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	13.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	1 Dokumen	13.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	37.800.000						100 Persen	37.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				3 Orang	37.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	3 Orang	37.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	13.316.000						100 Persen	92.400.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				125 Stel	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	125 Stel	62.400.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	13.316.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	2 Diklat	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	590.639.550						100 Persen	789.895.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				3 Jenis	6.265.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	3 Jenis	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				27 Jenis	184.981.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	27 Jenis	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				35 Jenis	-						35 Jenis	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Jenis	74.471.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	1 Jenis	39.880.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	-						3 Jenis	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				6 Jenis	20.015.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	6 Jenis	20.015.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				350 Eksemplar	35.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	350 Eksemplar	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				87 Kali	269.907.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	87 Kali	580.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				100 Kali	-						100 Kali	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	438.490.000						100 Persen	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				7 Unit	438.490.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	7 Unit	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	1.900.833.450						100 Persen	2.424.393.450	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				20 Persen	2.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	20 Persen	2.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	476.440.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	4 Rekening	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				4 Orang	1.421.893.450	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	4 Orang	1.421.893.450	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				84 Orang	-						84 Orang	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	87.100.000						100 Persen	46.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlh Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				3 Unit	31.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	3 Unit	31.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				3 Unit	-						3 Unit	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				100 Unit	55.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Diskominfo Persantik Kab.Inhil	100 Unit	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Persen		Persen	65 Persen	7.075.334.000						65 Persen	7.922.149.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan	Persen		Persen	100 Persen	7.075.334.000						100 Persen	7.922.149.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profile Desa dan Talkshow yang dipublikasikan				34 Publikasi	99.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		- Jurnalis - Masyarakat 54 OPD	34 Publikasi	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama yang dikelola Melalui Media Cetak, Online dan TV				80 Kontrak Kerjasama	6.277.610.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		- Jurnalis - Masyarakat 54 OPD	80 Kontrak Kerjasama	7.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Penyediaan Informasi Publik yang dikelola dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik				20 Plyn InformasiPublik	75.585.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		- Jurnalis - Masyarakat 54 OPD	20 Plyn InformasiPublik	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah yang dikelola Berupa TV, Radio, Website dan Facebook, Aplikasi InPas				5 JnsSaluran Informasi	622.149.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		- Jurnalis - Masyarakat 54 OPD	5 JnsSaluran Informasi	622.149.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen		Persen	90 Persen	892.230.000						90 Persen	1.309.220.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup pemda yang dikelola	Persen		Persen	90 Persen	133.000.000						90 Persen	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.01 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain/Sub Domain yang didaftarkan				30 OPD/Perangkat Daerah	70.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 OPD	30 OPD/Perangkat Daerah	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.01 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditatalaksanankan dan diawasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	63.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30 OPD	30 Perangkat Daerah	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi	Persen		Persen	90 Persen	759.230.000						90 Persen	1.059.220.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.02 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				9 Perangkat Daerah	132.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	9 Perangkat Daerah	132.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 3 02.02 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola				11 Unit	63.666.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	11 Unit	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.02 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Arus Bisnis yang dikembangkan				2 Aplikasi	277.220.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	2 Aplikasi	277.220.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Infrastruktur TIK-nya dikembangkan dan dikelola				34 Perangkat Daerah	86.344.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	34 Perangkat Daerah	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek TIK				4 Orang	-						4 Orang	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 3 02.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan				280 Kali	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	280 Kali	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						100.000.000							200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan statistik yang terintegrasi	Persen		Persen	100 Persen	100.000.000						100 Persen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100.000.000						100 Persen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan				55 Data	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54 OPD	55 Data	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
							-							-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						100.000.000							200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen		Persen	30 Persen	100.000.000						30 Persen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian	Persen		Persen	30 Persen	100.000.000						30 Persen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2 # 2 02.01 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Informasi yang diamankan				2 Sistem Informasi	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 OPD		2 Sistem Informasi	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.443.340.363							12.302.705.893	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	6.960.807.813						100 Persen	7.227.517.093	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	5.122.740.363						100 Persen	5.122.740.363	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				30 Orang	5.122.740.363	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	30 ASN	30 Orang	5.122.740.363	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	48.000.000						100 Persen	57.600.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				4 Orang	48.000.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD		4 Orang	57.600.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	33.836.000						100 Persen	40.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				30 stel	13.500.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		30 stel	15.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	20.336.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		2 Diklat	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	1.288.061.450						100 persen	1.451.520.490	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				50 Jenis	92.999.550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD		50 Jenis	153.080.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	67.691.650	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD		2 Jenis	92.754.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				8 Jenis	115.333.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD		8 Jenis	120.333.250	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 Eksemplar	482.080.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD		12 Eksemplar	490.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				348 Kali	529.957.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD		348 Kali	595.353.240	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	48.900.000						100 Persen	49.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 Unit	48.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN		2 Unit	49.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	358.800.000						100 Persen	411.803.200	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat				100 Persen	2.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen		100 Persen	2.743.200	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	91.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen		3 Rekening	91.540.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				22 Orang	264.720.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen		22 Orang	317.520.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	60.470.000						100 Persen	94.853.040	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara yang dipelihara dan dipepanjang perizinannya (Roda 4 dan Roda 2)				28 Unit	41.120.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		28 Unit	45.569.500	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				37 Unit	10.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	37 Unit	19.421.540	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				17 Unit	8.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17 Unit	29.862.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi		Koperasi	100 Koperasi	98.500.000						100 Koperasi	214.380.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 2 02.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	Persen		Persen	100 Persen	98.500.000						100 Persen	214.380.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 2 02.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) yang diterbitkan				10 Dokumen	98.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		100 Koperasi	10 Dokumen	214.380.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen		Persen	90 Persen	125.000.000						90 Persen	444.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 3 02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Didinev	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	125.000.000						40 Koperasi	444.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 3 02.01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap koperasi dan usaha mikro yang dilakukan				2 Kali	60.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Koperasi	2 Kali	229.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 3 02.01 2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi				30 Koperasi	65.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Koperasi	30 Koperasi	215.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP koperasi Sehat	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	138.750.000						40 Koperasi	419.850.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 4 02.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Dilakukan Penilaian	Persen		Persen	90 Persen	138.750.000						90 Persen	419.850.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 4 02.01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai				60 Koperasi	70.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Koperasi	60 Koperasi	238.140.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 4 02.01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu				10 Koperasi	68.250.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40 Koperasi	10 Koperasi	181.710.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya saing	Persen		Persen	90 Persen	247.000.000						90 Persen	480.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 5 02.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Koperasi		Koperasi	90 Koperasi	247.000.000						90 Koperasi	480.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 5 02.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian				30 Orang	247.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90 Koperasi	30 Orang	480.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM aktif	Kali; Kelompok		Kali; Kelompok	90 Kali; Kelompok	1.717.471.550						90 Kali; Kelompok	2.261.458.800	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 7 02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Yang Mandiri	Persen		Persen	90 Persen	1.717.471.550						90 Persen	2.261.458.800	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 7 02.01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem ODS				5001 Usaha Mikro	140.593.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		7500 UMKM	5001 Usaha Mikro	408.100.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 7 02.01 2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Permodalan melalui KUR dan Jumlah Usaha Mikro yang bermitra				30 Orang	36.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		7500 UMKM	30 Orang	170.660.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 7 02.01 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi P-IRT dan Halal				60 Orang	133.513.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		7500 UMKM	60 Orang	154.102.800	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 7 02.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan				50 Dokumen	1.252.639.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		7500 UMKM	50 Dokumen	1.352.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 7 02.01 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan				10 Dokumen	154.726.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		7500 UMKM	10 Dokumen	176.596.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset UMKM	Persen		Persen	2 Persen	1.155.811.000						2 Persen	1.255.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 8 02.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen		Persen	1 Persen	1.155.811.000						1 Persen	1.255.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 # 8 02.01 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kelompok Usaha Mikro yang di fasilitasi				19 kelompok UKM	1.155.811.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.515 Usaha Mikro	19 kelompok UKM	1.255.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.521.221.264							12.327.198.264	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	11.242.750.114						22 Nilai	11.242.750.114	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	40.775.750						100 Persen	40.775.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				7 Dokumen	40.775.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	7 Dokumen	40.775.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4.655.924.264						100 Persen	4.655.924.264	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				35 Orang	4.655.924.264	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	35 Orang	4.655.924.264	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	16.500.000						100 Persen	16.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	16.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	2 Diklat	16.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	5.894.384.093						100 Persen	5.894.384.093	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				47 Jenis	5.170.099.193	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	47 Jenis	5.170.099.193	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				10 Jenis	56.455.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	10 Jenis	56.455.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	16.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	3 Jenis	16.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				121 Kali	651.179.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	121 Kali	651.179.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	556.900.000						100 Persen	556.900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	4.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	4.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				9 Rekening	54.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	9 Rekening	54.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				37 Orang	497.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	37 Orang	497.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	78.266.007						100 Persen	78.266.007	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				14 Unit	56.666.007	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	14 Unit	56.666.007	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				30 Unit	21.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	30 Unit	21.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah sektor yang berhasil di promosikan	Sektor		Sektor	1 Sektor	640.000.200						1 Sektor	640.000.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 3 02.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir	Kali		Kali	1 Kali	640.000.200						1 Kali	640.000.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 3 02.01 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti/dilaksanakan				1 Kali	640.000.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER			Investor Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta Investor Luar Negeri	1 Kali	640.000.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan penanaman modal	Persen		Persen	100 Persen	345.000.000						100 Persen	150.977.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 4 02.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani	Dokumen		Dokumen	575 Dokumen	345.000.000						575 Dokumen	150.977.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 4 02.01 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan nonperizinan yang terdaftar melalui sistem OSS dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (SIMPATI)				575 Dokumen	225.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		575 Dokumen	30.977.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 4 02.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Unit Perizinan tertentu yang di monitoring				20 Unit	80.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		20 Unit	80.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 4 02.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan dan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan				20 Orang	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		20 Orang	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kedisiplinan pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha	Persen		Persen	100 Persen	179.999.700						100 Persen	179.999.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 5 02.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	179.999.700						3 Kegiatan	179.999.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 5 02.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pemantauan				3 Pelaku Usaha	72.715.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		3 Pelaku Usaha	72.715.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 5 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan				40 Pelaku Usaha	48.167.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		40 Pelaku Usaha	48.167.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 5 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan				3 Pelaku Usaha	59.116.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		3 Pelaku Usaha	59.116.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sistem Informasi Penanaman Modal	Huruf		Huruf	A Huruf	113.471.250						A Huruf	113.471.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 6 02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	113.471.250						1 Kegiatan	113.471.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 # 6 02.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana				1 Kegiatan	113.471.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN TRANSFER		0		1 Kegiatan	113.471.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						15.678.162.658							16.255.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.378.162.658						22 Nilai	7.645.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	576.016.000						90 Persen	610.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja yang disusun				4 Dokumen	359.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	4 Dokumen	380.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun				5 Dokumen	216.116.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	5 Dokumen	230.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4.902.992.658						100 Persen	4.900.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN				35 Orang	4.878.242.658	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	35 Orang	4.850.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				1 Dokumen	14.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	50 Persen	10.120.000						50 Persen	25.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	10.120.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	2 Diklat	25.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	966.591.750						100 Persen	1.070.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				15 Jenis	20.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	15 Jenis	30.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				10 Jenis	124.131.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	10 Jenis	140.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				5 Jenis	75.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	5 Jenis	95.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	135.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	3 Jenis	150.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				1 Eksemplar	4.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	1 Eksemplar	15.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				40 Kali	407.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	40 Kali	420.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Usulan Hibah dan bansos yang diverifikasi				60 Proposal	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	60 Proposal	220.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	21.303.250						100 Persen	40.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 Unit	21.303.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Aparatur Negeri Sipil Disparporabud Kab Inhil	2 Unit	40.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	766.139.000						100 Persen	810.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				33 Persen	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	33 Persen	20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	165.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	3 Rekening	180.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				63 Orang	596.139.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	63 Orang	610.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	10 Persen	135.000.000						10 Persen	190.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				4 Unit	65.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	4 Unit	80.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				2 Unit	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	2 Unit	50.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				5 Unit	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara Disparporabud Kab Inhil	5 Unit	60.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		Persen	70 Persen	1.070.000.000						70 Persen	1.175.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan Cakupan Pemuda dan Kepemudaan yang dibina Jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera dan Pembinaan siswa/i Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota Polri yang dibina	Persen Persen Orang		Persen Orang	90 Persen 90 Persen 46 Orang	920.000.000 - -						90 Persen 90 Persen 46 Orang	980.000.000 - -	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.01 6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana kepemudaan yang Disediakan/dipelihara				3 Unit	120.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kab Inhil	3 Unit	140.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.01 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang mengikuti binlat Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				50 Orang	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat Kab Inhil	50 Orang	220.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah tahapan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				3 Kali	600.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat Kab Inhil	3 Kali	620.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan	Persen		Persen	90 Persen	150.000.000						90 Persen	195.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.02 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Sosialisasi kewirausahaan yang Dilaksanakan				5 Kali	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	5 Kali	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang diberikan bantuan				1 Organisasi	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat Kab Inhil	1 Organisasi	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	Persen		Persen	100 Persen	6.380.000.000						100 Persen	6.545.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Olahraga Pendidikan yang didibina dan dikembangkan	persen		persen	80 persen	2.375.000.000						80 persen	2.500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Cakupan Olahraga Pendidikan yang didibina dan dikembangkan	Persen		Persen	80 Persen	-						80 Persen	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit		Unit	30 Unit	-						30 Unit	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disediakan				30 Unit	2.375.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kab Inhil	30 Unit	2.500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan/dikuti	Persen		Persen	100 Persen	1.495.000.000						100 Persen	1.570.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan				7 Event	795.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	7 Event	850.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Diikuti				5 Cabor	700.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	5 Cabor	720.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Olahraga Prestasi yang dibina dan dikembangkan	Persen		Persen	80 Persen	630.000.000						80 Persen	665.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah Atlet Yang Dibina	Orang		Orang	10 Orang	-						10 Orang	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Yang Dikirim Untuk Pelatihan	Orang		Orang	10 Orang	-						10 Orang	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Pelaksanaan Seleksi Atlit Olahraga Inhil	Orang		Orang	10 Orang	-						10 Orang	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Yang Dibina				10 Orang	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	10 Orang	65.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.03 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Yang Dikirim Untuk Pelatihan				6 Orang	580.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	6 Orang	600.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 3 02.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Organisasi Olahraga yang dibangun dan dikembangkan	Persen		Persen	80 Persen	1.740.000.000						80 Persen	1.650.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya Hibah Uang kepada Organisasi ke Olahragaan				100 Persen	1.740.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat Kab Inhil	100 Persen	1.650.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Olahraga Rekreasi yang dibangun dan dikembangkan	Persen		Persen	80 Persen	140.000.000						80 Persen	160.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kali		Kali	2 Kali	-						2 Kali	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Yang Dilaksanakan				2 Kali	140.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kab Inhil	2 Kali	160.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan Kepramukaan	Persen		Persen	100 Persen	850.000.000						100 Persen	890.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 4 02.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang dibangun dan dikembangkan	Persen		Persen	100 Persen	850.000.000						100 Persen	890.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 4 02.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang diberikan bantuan				1 Organisasi	650.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kab Inghil	1 Organisasi	670.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 4 02.01 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana kepramukaan yang Disediakan/dipelihara				1 Unit	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kab Inghil	1 Unit	220.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.335.000.000							1.415.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Keragaman budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya		Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	1.198.820.000						2 Cagar Budaya	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen		Persen	90 Persen	460.000.000						90 Persen	480.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.02 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kelompok Kebudayaan yang diberikan bantuan				35 Kelompok	460.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat Kab Inhil	35 Kelompok	480.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Adat yang dibangun	Persen		Persen	90 Persen	738.820.000						90 Persen	770.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.03 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Adat yang dilaksanakan				2 Kali	588.820.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat Kab Inhil	2 Kali	600.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 2 02.03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana Prasarana kebudayaan Yang Direhabilitasi/ dibangun				3 Unit	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kab Inhil	3 Unit	170.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival Kesenian Tradisional	Tampil Kesenian		Tampil Kesenian	1 Tampil Kesenian	75.000.000						1 Tampil Kesenian	90.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen		Persen	90 Persen	75.000.000						90 Persen	90.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
		Cakupan Tampilan kesenian yang dibina	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 3 02.01 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Frekuensi Tampilan Kesenian dalam dan ke Luar Daerah				3 3 Kali	75.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kab Inhil	3 3 Kali	90.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Cagar Budaya		Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	61.180.000						4 Cagar Budaya	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 5 02.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola	Persen		Persen	90 Persen	61.180.000						90 Persen	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2 # 5 02.02 2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikembangkan				2 Cagar Budaya	61.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kab Inhil	2 Cagar Budaya	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						-							-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.438.690.000							2.430.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Prasarana yang terpenuhi	Persen		Persen	70 Persen	1.192.690.000						70 Persen	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 2 02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	Persen		Persen	90 Persen	482.610.000						90 Persen	500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 2 02.01 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan				3 Event	482.610.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	3 Event	500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 2 02.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar	Persen		Persen	80 Persen	650.000.000						80 Persen	670.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 2 02.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata Yang direhab/Dibangun				1 Unit	650.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan pemerataan pembangunan	Masyarakat Kab Inhil	1 Unit	670.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 2 02.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	60.080.000						100 Persen	80.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 2 02.04 1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin Usaha Pariwisata Yang diterbitkan				15 Rekomendasi	60.080.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kab Inhil	15 Rekomendasi	80.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen		Persen	35 Persen	1.046.000.000						35 Persen	1.060.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 3 02.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Ketertarikan atas Promosi pariwisata	Persen		Persen	100 Persen	1.046.000.000						100 Persen	1.060.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 3 02.01 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi pariwisata Yang Dilaksanakan				5 Jenis	1.046.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kab Inhil	5 Jenis	1.060.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000						100 Persen	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 5 02.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen		Persen	80 Persen	200.000.000						80 Persen	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3 # 5 02.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kompeten dibidangnya				100 Persen	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat Kab Inhil	100 Persen	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.200.565.626							6.758.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	4.041.680.626						22 Nilai	5.983.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	55.106.000						100 Persen	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				3 Dokumen	55.106.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	2.608.064.926						100 Persen	2.800.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				26 Orang	2.608.064.926	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	26 Orang	2.800.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	50 Persen	-						50 Persen	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				26 Stel	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	26 Stel	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				4 Diklat	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4 Diklat	180.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	729.573.700						100 Persen	400.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				11 Jenis	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Perkantoran	11 Jenis	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				15 Jenis	31.177.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Perkantoran	15 Jenis	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	27.990.450	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Perkantoran	3 Jenis	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				8 Jenis	61.370.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Perkantoran	8 Jenis	62.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				2500 Eksemplar	507.420.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Perkantoran	2500 Eksemplar	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				41 Kali	100.116.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Perkantoran	41 Kali	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	604.936.000						100 Persen	1.403.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	2.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58 Non ASN	100 Persen	3.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	112.536.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58 Non ASN	4 Rekening	850.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				58 Orang	490.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58 Non ASN	58 Orang	550.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	44.000.000						100 Persen	1.115.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				14 Unit	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14 Unit	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				15 Unit	4.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15 Unit	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				5 Unit	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5 Unit	1.000.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah bahan bacaan perpustakaan	Persen		Persen	70 Persen	158.885.000						70 Persen	775.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		Persentase Tenaga pengelolaan perpustakaan Pendidikan dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Persen		Persen	70 Persen	-						70 Persen	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Kelengkapan bahan bacaan perpustakaan	Persen		Persen	70 Persen	155.585.000						70 Persen	400.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		Persentase Tenaga Pengelola Perpustakaan Pendidikan Dasar, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Persen		Persen	70 Persen	-						70 Persen	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Pendidikan Dasar yang dibina				40 Sekolah/ Madrasah	135.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan Sekolah, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	40 Sekolah/ Madrasah	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina				7 Perpustakaan khusus	7.585.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan Sekolah, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	7 Perpustakaan khusus	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang dilayani				65000 Orang	5.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan Sekolah, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	65000 Orang	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi buku Perpustakaan yang disediakan				1000 Ekstemplar	7.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan Sekolah, Khusus, Desa, Kelurahan dan Kecamatan	1000 Ekstemplar	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Baca dan Literasi yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	3.300.000						100 Persen	375.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.02 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta Didik yang diikutsertakan				60 Orang	3.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa, Mahasiswa dan Masyarakat	60 Orang	75.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.02 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung yang dibangun				5 Unit	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Siswa, Mahasiswa dan Masyarakat	5 Unit	300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						107.499.300							300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	Persen		Persen	100 Persen	107.499.300						100 Persen	300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 # 2 02.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Arsip secara baku Persentase Arsip Dinamis yang terpelihara	Persen Persentase		Persen Persentase	90 Persen 100 Persentase	- 107.499.300						90 Persen 100 Persentase	- 300.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang dilatih				25 OPD	34.999.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51 OPD	25 OPD	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dipelihara				500 Dokumen	19.999.550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51 OPD	500 Dokumen	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2 # 2 02.01 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diaudit dan dibina				55 OPD	52.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			51 OPD	55 OPD	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						-							-	DINAS PERIKANAN
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						11.882.184.727							17.115.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	6.452.596.527						100 Persen	8.265.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen Persen Persen Persen		Persen Persen Persen Persen	90 Persen 100 Persen 90 Persen 100 Persen	196.506.975 - - -						90 Persen 100 Persen 90 Persen 100 Persen	165.000.000 - - -	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				5 Dokumen	133.120.475	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Perikanan Dinas Kabupaten Indragiri Hilir	5 Dokumen	90.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				4 Dokumen	63.386.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Perikanan Dinas Kabupaten Indragiri Hilir	4 Dokumen	75.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	4.630.184.727 -						100 Persen 100 Persen	6.000.000.000 -	DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				39 orang	4.630.184.727	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Dinas Kabupaten Indragiri Hilir	39 orang	6.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	34.732.000						100 Persen	200.000.000	DINAS PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				40 Stel	-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	40 Stel	100.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	34.732.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	2 Diklat	100.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	993.105.000						100 Persen	1.085.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				10 Jenis	20.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	10 Jenis	80.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				8 Jenis	102.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	8 Jenis	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	112.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	3 Jenis	160.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				4 Jenis	18.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	4 Jenis	25.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				1776 Eksemplar	153.920.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	1776 Eksemplar	20.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				190 kali	585.935.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	190 kali	650.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	73.900.000						100 Persen	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas yang disediakan				3 Unit	73.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	3 Unit	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	336.167.825						100 Persen	365.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	100 persen	5.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	99.380.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	4 Rekening	110.000.000	DINAS PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				18 orang	233.787.825	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	18 orang	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	188.000.000						100 Persen	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				6 Unit	93.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	6 Unit	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 Unit	45.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Unit	75.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				60 Unit	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	60 Unit	75.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	76500 Ton	2.842.491.100						76500 Ton	5.575.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase KUB/Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan Saprasi Penangkapan ikan	Persen		Persen	100 Persen	2.565.171.900						100 Persen	5.100.000.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase KUB yang mendapatkan bantuan Saprasi Penangkapan ikan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah jenis data perikanan tangkap yang dihasilkan				3 Jenis	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	3 Jenis	100.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.01 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikan kepada KUB/Kelompok				8 Unit	-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	8 Unit	2.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.01 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan yang di Bantu				37 Kelompo k	2.465.171.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	37 Kelompo k	3.000.000.000	DINAS PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 3 02.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persen		Persen	100 Persen	124.999.900						100 Persen	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.02 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah KUB/Kelompok Nelayan Binaan yang mampu Meningkatkan Pendapatan Nelayan				10 Kelompok	124.999.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	10 Kelompok	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	152.319.300						100 Persen	325.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.03 1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mengikuti Prosedur Penyelenggaraan dan Pnegelolaan Perikanan				3 Unit	-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	3 Unit	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 3 02.03 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang di Kelola (TPI)				3 Unit	152.319.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	3 Unit	175.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	2850 Ton	2.312.097.250						2850 Ton	2.775.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki izin usaha budidaya perikanan	Persen		Persen	100 Persen	70.873.500						100 Persen	75.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.01 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Unit Budidaya yang dapat dikembangkan sistem usahanya				3 Usaha	70.873.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	3 Usaha	75.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persen		Persen	100 Persen	90.199.950						100 Persen	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.02 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan Binaan yang Meningkatkan Pendapatan Pembudidaya				5 Pokdakan	90.199.950	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui program DMII Plus Terintegrasi	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	5 Pokdakan	100.000.000	DINAS PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 4 02.02 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Mengikuti Pelatihan				5 orang	-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	5 orang	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pembudidayaan yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	2.151.023.800						100 Persen	2.450.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.04 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data Perikanan Budidaya				3 Jenis	170.357.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	3 Jenis	170.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan perikanan				8 Unit	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	8 Unit	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.04 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Yang Dibantu				20 Pokdakan	1.354.166.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	20 Pokdakan	1.500.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.04 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Budidaya yang dapat kendalikan kesehatan ikan dan lingkungannya				3 Lokasi	112.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	3 Lokasi	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 4 02.04 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Lokasi Pembudidayaan yang dipantau				6 Lokasi	84.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	6 Lokasi	100.000.000	DINAS PERIKANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 4 02.04 6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kajian Pengembangan Lahan Budidaya Perikanan				1 Dokumen	230.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	1 Dokumen	230.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	Kg/Kapita/Th		Kg/Kapita/Th	44,68 Kg/Kapita/Th	274.999.850						44,68 Kg/Kapita/Th	500.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 6 02.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan disalurkan	Persen		Persen	100 Persen	125.000.000						100 Persen	150.000.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PERIKANAN
3 # 6 02.01 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prodak Perikanan yang dipromosikan dan dipamerkan				25 Jenis	125.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan	25 Jenis	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 6 02.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia dan disalurkan	Persen		Persen	100 Persen	149.999.850						100 Persen	350.000.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase pembudidayaan ikan Skala Mikro dan Kecil yang memiliki Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PERIKANAN
3 # 6 02.03 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Menu Serba Ikan yang dikonsumsi dan diolah				67 menu	149.999.850	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pelaku Usaha Perikanan	67 menu	200.000.000	DINAS PERIKANAN
3 # 6 02.03 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Usaha Kecil yang dibina				2 kelompok	-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Perikanan	2 kelompok	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						-							-	DINAS PERKEBUNAN
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						27.628.691.683							35.323.932.079	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	10.690.640.079						22 Nilai	10.689.007.079	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen		dokumen	14 dokumen	681.109.470						14 dokumen	681.109.470	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				6 dokumen	531.292.870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Dinas Perkebunan	6 dokumen	531.292.870	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun				4 laporan	28.286.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan	4 laporan	28.286.600	DINAS PERKEBUNAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun				4 dokumen	121.530.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perkebunan	4 dokumen	121.530.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen		Persen	100 Persen	7.046.285.779						100 Persen	7.046.285.779	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN				1 tahun	7.039.835.779	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 1 tahun	7.039.835.779	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 laporan	6.450.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 1 laporan	6.450.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	282.600.000						100 Persen	285.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan gedung kantor yang dibayar				4 orang	57.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 4 orang	60.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset barang milik daerah pada dinas perkebunan yang didata				5 jenis	225.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 5 jenis	225.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	27.000.000						100 Persen	30.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				6 orang	27.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 6 orang	30.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen	1.752.730.330						100 Persen	1.777.024.330	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				3 jenis	14.473.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 3 jenis	14.473.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				20 jenis	253.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 20 jenis	253.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan				2 jenis	126.760.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 2 jenis	126.760.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	10.337.330	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Aparatur Daerah	Perangkat 12 bulan	10.337.330	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan				21 media	620.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 21 media	620.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri				156 kali	728.160.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah	Perangkat 156 kali	752.454.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga operator dan tenaga kebersihan yang dibayar	orang		orang	28 orang	560.974.500						28 orang	560.974.500	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				3 jenis	2.418.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan karyawan/ti dinas perkebunan	3 jenis	2.418.500	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	142.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan karyawan/ti dinas perkebunan	4 Rekening	142.500.000	DINAS PERKEBUNAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan				27 orang	416.056.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan karyawan/ti dinas perkebunan	27 orang	416.056.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	329.240.000						100 Persen	297.913.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				3 jenis	90.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah Perangkat	3 jenis	90.800.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan				10 jenis	45.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah Perangkat	10 jenis	14.473.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	192.640.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Daerah Perangkat	1 unit	192.640.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.13	Penataan Organisasi	jumlah dokumen anjab dan ABK yang disusun	dokumen		dokumen	2 dokumen	10.700.000						2 dokumen	10.700.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 1 02.13 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen analisis jabatan (anjab) analisis beban kerja (ABK) yang disusun				2 dokumen	10.700.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas perkebunan	2 dokumen	10.700.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen		Persen	90 Persen	4.115.047.000						90 Persen	5.709.925.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2 02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah sarana dan prasarana perkebunan yang disediakan	jenis		jenis	11 jenis	3.921.530.000						11 jenis	5.209.925.000	DINAS PERKEBUNAN
		Jumlah varietas bibit unggul dan blok penghasil tinggi yang di tetapkan	komoditas		komoditas	3 komoditas	-						3 komoditas	-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2 02.01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Varietas bibit unggul lokal, Blok Penghasil tinggi dan pohon induk yang di tetapkan				3 komoditas	209.925.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani dan kelompok tani	3 komoditas	209.925.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2 02.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana perkebunan/pertanian yang disediakan				11 jenis	3.711.605.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani dan kelompok tani	11 jenis	5.000.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2 02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah bibit unggul yang disediakan	batang		batang	8000 batang	193.517.000						8000 batang	500.000.000	DINAS PERKEBUNAN
		luas lahan pangan yang diremajakan	Ha		Ha	4 Ha	-						4 Ha	-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2 02.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit unggul yang di sediakan				3 komoditas	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok tani dan penangkar benih	3 komoditas	200.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 2 02.02 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit tanaman sela pada tanaman kelapa yang disediakan				8000 Batang	143.517.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok tani dan penangkar benih	8000 Batang	300.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Persen		Persen	90 Persen	9.357.929.604						90 Persen	15.175.000.000	DINAS PERKEBUNAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 3 02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah dokumen kawasan pembangunan komoditas perkebunan	dokumen		dokumen	5 dokumen	1.412.934.700						5 dokumen	1.675.000.000	DINAS PERKEBUNAN
		jumlah lahan pangan perkebunan yang dibangun	ha		ha	10 ha	-						10 ha	-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.01 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas lahan pangan perkebunan yang di remajakan				4 Ha	75.184.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani dan kelompok tani	4 Ha	200.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase Pelayanan informasi pasar, potensi, harga komoditas, sentra produksi, fasilitas dan pembukaan akses pasar produk perkebunan				90 persen	775.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	petani dan kelompok tani	90 persen	775.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.01 4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah masterplan kawasan dan komoditas perkebunan yang di susun				5 dokumen	562.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	petani dan kelompok tani	5 dokumen	700.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	jumlah jalan produksi yang dibangun	lokasi		lokasi	4 lokasi	7.944.994.904						4 lokasi	13.500.000.000	DINAS PERKEBUNAN
		jumlah pintu air yang dibangun	unit		unit	3 unit	-						3 unit	-	DINAS PERKEBUNAN
		jumlah prasarana pertanian yang disediakan	lokasi		lokasi	4 lokasi	-						4 lokasi	-	DINAS PERKEBUNAN
		panjang tanggul yang dibangun	km		km	152.4 km	-						152.4 km	-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.02 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	panjang tanggul mekanik yang dibangun				152.4 KM	6.606.808.904	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN Asli DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Petani dan kelompok tani	152.4 KM	10.000.000.000	DINAS PERKEBUNAN
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.02 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan produksi yang dibangun				4 lokasi	550.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Petani dan kelompok tani	4 lokasi	2.000.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 3 02.02 6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu air yang dibangun				3 unit	440.330.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Petani dan kelompok tani	3 unit	1.000.000.000	DINAS PERKEBUNAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 3 02.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan				3 Unit	347.856.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Petani dan kelompok tani	3 Unit	500.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen		Persen	85 Persen	1.440.075.000						85 Persen	1.400.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 5 02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas kebun kelapa/sawit yang diremajakan	kecamatan		kecamatan	20 kecamatan	1.440.075.000						20 kecamatan	1.400.000.000	DINAS PERKEBUNAN
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PERKEBUNAN
		tersedianya data perubahan iklim bagi petani	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 5 02.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT yang ditangani				700 Ha	330.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		petani dan kelompok tani	700 Ha	400.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 5 02.01 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah dampak perubahan iklim yang ditangani				20 kecamatan	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	petani dan kelompok tani	20 kecamatan	300.000.000	DINAS PERKEBUNAN
							-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						-	DINAS PERKEBUNAN
3 # 5 02.01 5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas kebun kelapa yang diremajakan				30 Ha	860.075.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		petani dan kelompok tani	30 Ha	700.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Persen		Persen	100 Persen	250.000.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 6 02.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi izinnya	perusahaan		perusahaan	26 perusahaan	250.000.000						26 perusahaan	250.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 6 02.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin perusahaannya				26 perusahaan	250.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perusahaan	26 perusahaan	250.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen		Persen	100 Persen	1.775.000.000						100 Persen	2.100.000.000	DINAS PERKEBUNAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 7 02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah bpp yang dihadiri pertemuan bulannannya jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya jumlah pelatihan petani yang dilaksanakan jumlah penyuluh perkebunan yang dibayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya	bpp kelompok kali orang		bpp kelompok kali orang	8 bpp 3 kelompok 1 kali 75 orang	1.775.000.000 - - -						8 bpp 3 kelompok 1 kali 75 orang	2.100.000.000 - - -	DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN
3 # 7 02.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh perkebunan yang di bayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya				75 orang	1.420.000.000 -	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			petani, kelompok tani dan penyuluh	75 orang	1.500.000.000 -	DINAS PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN
3 # 7 02.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Jumlah Kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya				3 kelompok	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok tani dan penyuluh	3 kelompok	200.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 7 02.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang dihadiri pertemuan Bulanannya				8 BPP	115.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok tani dan penyuluh	8 BPP	200.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3 # 7 02.01 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan petani yang dilaksanakan				1 kali	140.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			petani, kelompok tani dan penyuluh	1 kali	200.000.000	DINAS PERKEBUNAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-							-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.512.592.000							1.911.910.400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura				0	561.400.000						0	346.080.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 2 02.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Persen		Persen	70 Persen	561.400.000						70 Persen	346.080.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 2 02.01 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang di Bangun				2 Unit	246.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Gabungan Tani	2 Unit	228.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 9 2 02.01 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Alat Pasca Panen yang di adakan				5 Unit	315.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	118.080.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekerjaan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Persen		Persen	75 Persen	582.192.000						75 Persen	1.133.830.400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang disalurkan	Persen		Persen	100 Persen	173.192.000						100 Persen	204.230.400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang tersedia	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Harga Pangan Pokok Berkala yang di Laporkan dan Pembuatan Prognosa Kebutuhan Pangan Pokok (NBM)				2 Dokumen	39.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat	2 Dokumen	47.160.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lahan hortikultura yang di berdayakan				20 Hektar	62.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat	20 Hektar	74.400.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah LDPM dan PUPM yang di Bina dan di Bantu				5 Gapoktan	71.892.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat	5 Gapoktan	82.670.400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah	Persen		Persen	75 Persen	103.000.000						75 Persen	620.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah lahan Tanaman Pangan yang di berdayakan				50 Hektar	103.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Petugas BPP di Kecamatan, ASN dan Non ASN pada Dinas PTPHP	50 Hektar	120.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.02 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras CPP yang di adakan				15 Ton	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Petugas BPP di Kecamatan, ASN dan Non ASN pada Dinas PTPHP	15 Ton	500.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen		Persen	87.4 Persen	306.000.000						87.4 Persen	309.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.04 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Kuesioner yang di lakukan pencacahan data				405 Kuesioner	114.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Masyarakat	405 Kuesioner	129.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 3 02.04 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival Pangan Lokal dan Lokakarya yang di laksanakan				2 Kali	192.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Masyarakat	2 Kali	180.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah KWT yang melaksanakan pemanfaatan lahan perkarangan				5 KWT	-						5 KWT	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun				0	306.000.000						0	360.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 4 02.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang di beri bantuan	Kecamatan		Kecamatan	2 Kecamatan	306.000.000						2 Kecamatan	360.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 4 02.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan yang di Salurkan				150 Paket	306.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Masyarakat di Lokasi Rawan Pangan	150 Paket	360.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	63.000.000						100 Persen	72.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 5 02.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen		Persen	90 Persen	63.000.000						90 Persen	72.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2 9 5 02.01 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan yang di Lakukan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar				5 Kecamatan	63.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Pedagang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Masyarakat	5 Kecamatan	72.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						-							-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						20.312.888.328							20.174.931.144	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	16.959.244.328						22 Nilai	17.899.571.144	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	764.155.000						90 Persen	632.586.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				6 Dokumen	489.855.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN DAN NON ASN DPTPHP	6 Dokumen	303.426.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				9 Dokumen	274.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN DAN NON ASN DPTPHP	9 Dokumen	329.160.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	14.239.480.328						100 Persen	14.951.454.344	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				123 Orang	14.239.480.328	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN PPPK	123 Orang	14.951.454.344	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	128.000.000						100 Persen	153.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				4 Orang	128.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aset BMD pada Dinas PTPHP	4 Orang	153.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Pelaksanaan Inventarisasi Aset SKPD				10 Kecamatan	-						10 Kecamatan	-	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	59.430.000						90 Persen	71.316.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				130 Stel	59.430.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	ASN DAN NON ASN Pada Dinas PTPHP	130 Stel	71.316.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	778.649.000						100 Persen	934.378.800	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Jenis	170.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada DPTPHP	12 Jenis	204.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				9 Jenis	78.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada DPTPHP	9 Jenis	93.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Jenis	19.234.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada DPTPHP	12 Jenis	23.080.800	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				1680 Eksampar	11.000.000		PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada DPTPHP	1680 Eksampar	13.200.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				207 Kali	500.415.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada DPTPHP	207 Kali	600.498.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	658.530.000						100 Persen	771.036.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 %	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada Dinas PTPHP	90 %	3.600.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				14 Rekening	139.530.000		PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada Dinas PTPHP	14 Rekening	167.436.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				42 Orang	516.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN DAN NON ASN Pada Dinas PTPHP	42 Orang	600.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	90 Persen	331.000.000						90 Persen	385.200.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	52.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aset BMD pada Dinas PTPHP	2 Unit	62.400.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				5 Unit	44.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aset BMD pada Dinas PTPHP	5 Unit	40.800.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				8 Unit	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aset BMD pada Dinas PTPHP	8 Unit	240.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				50 Unit	35.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aset BMD pada Dinas PTPHP	50 Unit	42.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Ton		Ton	100 Ton	1.992.712.000						100 Ton	530.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 2 02.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Monev Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen		Persen	90 Persen	279.000.000						90 Persen	200.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 2 02.01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Prapanen yang di sediakan				4 Unit	279.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Pengelola UPJA, Petugas Lapangan Dinas PTPHP, Penyuluh	4 Unit	200.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 2 02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembibitan Ternak	Persen		Persen	75 Persen	147.200.000						75 Persen	210.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 2 02.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang di IB				900 Ekor	147.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Sapi Ternak Milik Kelompok Tani dan Masyarakat	900 Ekor	210.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 2 02.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Bibit Ternak	Persen		Persen	75 Persen	1.566.512.000						75 Persen	120.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 2 02.05 1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak yang di adakan				2375 Ekor	1.566.512.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani dan Masyarakat	2375 Ekor	120.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen		Persen	90 Persen	648.000.000						90 Persen	806.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 3 02.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen		Persen	85 Persen	277.000.000						85 Persen	350.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 3 02.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah lahan yang di budidayakan				20 Ha	277.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani dan Masyarakat	20 Ha	350.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 3 02.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun	Persen		Persen	85 Persen	371.000.000						85 Persen	456.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 3 02.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana yang di bangun				4 Unit	371.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Masyarakat, Petugas BPP dan Petugas Lapangan	4 Unit	456.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	Persen		Persen	100 Persen	156.000.000						100 Persen	190.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 4 02.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular	Persen		Persen	75 Persen	75.000.000						75 Persen	100.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 4 02.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kecamatan yang di Tangani Penanggulangan Penyakit Menular Ternak				4 Kecamatan	75.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani dan Masyarakat	4 Kecamatan	100.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 4 02.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Monev Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen		Persen	75 Persen	81.000.000						75 Persen	90.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 4 02.04 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Penyuluhan ASUH yang di laksanakan				8 Kali	81.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Masyarakat dan Petugas Lapangan	8 Kali	90.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persen		Persen	90 Persen	82.800.000						90 Persen	99.360.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 5 02.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan OPT	Persen		Persen	85 Persen	82.800.000						85 Persen	99.360.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 5 02.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				1 Kali	82.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Masyarakat Tani, dan Penyuluh Pertanian	1 Kali	99.360.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok		Kelompok	100 Kelompok	474.132.000						100 Kelompok	650.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 7 02.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen		Persen	90 Persen	474.132.000						90 Persen	650.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 7 02.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang menerima UKB (Uang Kerja Bimbingan)				110 Orang	267.183.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Kelompok Tani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh Pertanian	110 Orang	350.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 7 02.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang di latih				50 Orang	153.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh Pertanian	50 Orang	200.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3 # 7 02.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pertemuan Penyuluhan yang dilaksanakan				2 Kali	53.948.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kelompok Tani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluh Pertanian	2 Kali	100.000.000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						-							-	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						10.388.779.181							13.427.219.431	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	6.958.696.281						22 Nilai	7.777.219.431	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	513.165.900						90 Persen	665.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				6 Dokumen	385.460.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				OPD	6 Dokumen	490.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				6 Dokumen	127.705.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	6 Dokumen	175.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	5.013.179.431						100 Persen	5.037.219.431	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				50 Orang	4.977.219.431	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	50 Orang	4.977.219.431	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang din dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah				1 Laporan	35.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD	1 Laporan	60.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Diklat		Diklat	7 Diklat	39.034.000						7 Diklat	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				7 Diklat	39.034.000	Kab. Indragiri Hilir Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	7 Diklat	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	682.936.900						100 Persen	1.175.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				30 Jenis	25.972.500	Kab. Indragiri Hilir Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	30 Jenis	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Jenis	104.100.900	Kab. Indragiri Hilir Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	3 Jenis	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	57.200.000	Kab. Indragiri Hilir Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	3 Jenis	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				5 Jenis	25.319.500	Kab. Indragiri Hilir Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	5 Jenis	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				120 Eksemplar	16.000.000	Kab. Indragiri Hilir Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	120 Eksemplar	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				105 Kali	454.344.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	105 Kali	650.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	251.800.000						100 Persen	305.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				100 Persen	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	100 Persen	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				7 Rekening	150.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	7 Rekening	170.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				10 Orang	95.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		OPD	10 Orang	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	458.580.050						100 Persen	445.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				20 Unit	98.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD	20 Unit	175.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				30 uNIT	46.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD	30 uNIT	70.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	313.180.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD	1 Unit	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	173.751.000						100 Persen	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2 02.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Persen		Persen	100 Persen	119.904.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2 02.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin yang diberikan				5 izin	119.904.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	5 izin	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2 02.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Cakupan Penerbitan SKA	Persen		Persen	100 Persen	53.847.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2 02.07 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan				100 Persen	53.847.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	100 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen		Persen	100 Persen	1.292.535.000						100 Persen	2.200.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3 02.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	944.275.000						100 Persen	1.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3 02.01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah DED dan Pasar yang dibangun				13 Unit	653.174.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	13 Unit	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3 02.01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan retribusi yang dilaksanakan				4 Kali	291.101.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat	4 Kali	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 3 02.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		Persen	100 Persen	348.260.000						100 Persen	700.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3 02.02 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembinaan ketertarikan yang dilaksanakan				6 Kali	348.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	6 Kali	700.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting lainnya	Persen		Persen	100 Persen	336.589.900						100 Persen	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4 02.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen		Persen	100 Persen	307.489.900						100 Persen	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4 02.01 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengawasan yang dilakukan				30 Kali	307.489.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Distributor / Pedagang	30 Kali	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4 02.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Monev Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen		Persen	100 Persen	29.100.000						100 Persen	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4 02.02 2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga yang dilaksanakan				20 Kecamatan	29.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Distributor / Pedagang	20 Kecamatan	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Eksportir Bersih Perdagangan	Milyar Rupiah		Milyar Rupiah	409,15 Milyar Rupiah	859.725.000						409,15 Milyar Rupiah	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 5 02.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketertarikan Konsumen calon konsumen terhadap hasil Promosi	Persen		Persen	100 Persen	859.725.000						100 Persen	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 5 02.01 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang diikuti				8 Kali	859.725.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	OPD		8 Kali	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen		Persen	85 Persen	505.434.000						85 Persen	950.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 6 02.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	505.434.000						100 Persen	950.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 6 02.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang dilaksanakan				11 Kali	243.907.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengguna Alat UTTP	11 Kali	400.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 6 02.01 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan yang dilaksanakan				26 Kali	58.583.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengguna Alat UTTP	26 Kali	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 6 02.01 3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan dan Pengembangan SDM yang dilakukan				5 Kali	202.944.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengguna Alat UTTP	5 Kali	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen		Persen	85 Persen	262.048.000						85 Persen	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 7 02.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Persen		Persen	85 Persen	262.048.000						85 Persen	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 7 02.01 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Pembentukan SRG				100 Persen	262.048.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat		100 Persen	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 #	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.786.440.250							5.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persen		Persen	85 Persen	4.661.631.250						85 Persen	5.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2 02.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen		Persen	100 Persen	4.661.631.250						100 Persen	5.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 2 02.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi yang dilakukan				10 Kali	852.871.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	IMK		10 Kali	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 # 2 02.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang di dibina				45 IKM	3.808.760.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IMK	45 IKM	4.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penerbitan Usaha Industri	Persen		Persen	50 Persen	70.395.000						50 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3 02.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	70.395.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 3 02.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah izin industri yang di berikan rekomendasi				5 Izin	70.395.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	5 Izin	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan sistem Inforamsi Industri nasional	Persen		Persen	100 Persen	54.414.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4 02.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Ckupan Informasi Industri yang disediakan untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persen		Persen	100 Persen	54.414.000						100 Persen	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 # 4 02.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Pengolahan Data yang di lakukan				5 Kali	54.414.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	5 Kali	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	SEKRETARIAT DAERAH
4 1	SEKRETARIAT DAERAH						88.824.025.124							98.312.681.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	56.164.501.724						22 Nilai	62.353.843.500	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	858.023.175						90 Persen	1.025.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				2 Dokumen	234.619.150	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 1 02.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasikan				1 Dokumen	258.591.975	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan				1 Dokumen	78.410.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dikoordinasikan				1 Dokumen	38.056.150	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasikan				1 Dokumen	25.923.150	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				2 Dokumen	58.858.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				2 Dokumen	163.564.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	180.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	19.423.805.929						100 Persen	21.382.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				179 Orang	17.892.328.284	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	179 Orang	19.700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				7 Orang	417.481.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	7 Orang	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				4 Orang	407.125.920	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	4 Orang	450.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				2 Dokumen	283.557.775	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	278.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Laporan yang disusun				1 Dokumen	67.591.225	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	74.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				3 Dokumen	284.809.425	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	3 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun				2 Dokumen	70.912.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Dokumen	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	118.624.000						100 Persen	131.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				8 Stel	45.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	8 Stel	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				2 Diklat	73.424.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Diklat	81.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	13.855.233.000						100 Persen	15.566.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				2 Jenis	130.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Jenis	143.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				7 Jenis	421.937.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	7 Jenis	470.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Jenis	199.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	5 Jenis	219.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	2.728.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Jenis	3.001.350.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	106.417.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	3 Jenis	118.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Acara Kunjungan Tamu yang difasilitasi				40 Kali	450.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	40 Kali	495.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				16812 Kali	9.709.879.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	16812 Kali	11.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan elektronisasi data yang dikelola				100 Persen	109.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	119.900.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	3.346.500.000						100 Persen	3.681.150.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	40.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	44.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				50 Rekening	1.584.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	50 Rekening	1.742.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				5 Jenis	304.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	5 Jenis	334.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				86 Orang	1.418.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	86 Orang	1.560.350.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	2.697.250.000						100 Persen	2.966.975.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	300.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Unit	330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				49 Unit	1.538.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	49 Unit	1.692.845.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	599.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	8 Unit	659.670.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	57.260.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Unit	62.986.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	201.340.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	4 Unit	221.474.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1.018.725.620						100 Persen	1.120.918.500	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Objek Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada KDH dan WKDH				9 Rekening	176.072.620	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	9 Rekening	194.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.11 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Bupati/Wakil Bupati yang disediakan				28 Stel	163.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	28 Stel	180.268.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.11 3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati				2 Kali	78.773.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	2 Kali	86.650.500	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.11 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rincian Objek Dana Penunjang Operasional yang diberikan kepada KDH dan WKDH				1 Rekening	600.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Rekening	660.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	4.946.340.000						100 Persen	5.600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 1 02.12 1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				16 Kegiatan	3.126.545.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	16 Kegiatan	3.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.12 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 Kegiatan	1.819.795.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	12 Kegiatan	2.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.13	Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan IKM minimal 80	Persen		Persen	100 Persen	750.000.000						100 Persen	815.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.13 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN, Perda dan Perbup yang ditetapkan				4 Dokumen	259.843.150	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	4 Dokumen	285.827.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.13 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi				85 Persen	51.349.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	85 Persen	56.485.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.13 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan SOP dan Hasil Monitoring Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab. Inhil yang diterbitkan				1 Dokumen	185.660.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	205.327.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.13 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah yang dicapai.				7 Nilai	253.146.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	7 Nilai	267.461.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	9.150.000.000						100 Persen	10.065.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.14 1	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan fasilitasi Keprotokolan yang terlaksana				100 Persen	3.037.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	100 Persen	3.341.580.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.14 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan komunikasi pimpinan yang difasilitasi				100 Persen	3.049.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	100 Persen	3.354.560.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 02.14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir				3 Jenis	3.062.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	3 Jenis	3.368.860.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	27.789.523.400						100 Persen	30.601.479.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	1.850.000.000						100 Persen	2.112.003.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 2 02.01 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan yang menerima Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/Kota terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau				0 Kecamatan	1.033.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	0 Kecamatan	1.213.633.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah pelaksanaan evaluasi terkait Pengukuran Tingkat dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				20 Kecamatan	-						20 Kecamatan	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Rapat Koordinasi Pemda Se Kab. Inhil yang difasilitasi				15 Kali	-						15 Kali	-	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.01 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang disurvei terkait pendataan dan inventarisasi Namanama Rupabumi Unsur Alami dan Buatan dalam Gasetir Nasional				0 Kecamatan	223.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	0 Kecamatan	245.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Kelurahan yang di Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan DAU Tambahan (APBN) dan Dana Pendampingan (APBD Kabupaten)				0 Kelurahan	-						0 Kelurahan	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Pembuatan Peta berskala Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan				1 Kecamatan	-						1 Kecamatan	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Persyaratan Administrasi Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Indragiri Selatan dan Indragiri Hilir Utara yang dilaksanakan				0 Persyaratan	-						0 Persyaratan	-	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.01 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten				3 Laporan	593.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			FORKOPIMDA, Masyarakat, 54 OPD, dan 20 Kecamatan	3 Laporan	653.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah yang dilaksanakan				4 Kegiatan	-						4 Kegiatan	-	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan keagamaan	Persen		Persen	100 Persen	24.579.523.750						100 Persen	26.993.476.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.02 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Bantuan Sarana Keagamaan yang disediakan				7 Jenis	9.167.677.410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak Mampu	7 Jenis	10.084.445.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 2 02.02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Jumlah Mahasiswa Tidak Mampu yang diberikan Bantuan Jumlah Pembinaan Terhadap Organisasi Sosial Keagamaan yang dilaksanakan				15 Kali 305 Orang 10 Kali	- 2.835.941.940 -	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak Mampu	15 Kali 305 Orang 10 Kali	- 3.119.536.000 -	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.02 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Organisasi Sosial Keagamaan yang diberikan bantuan Jumlah pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Peserta Didik yang mengikuti identifikasi Bakat				355 Organisasi 10 Jenis 200 Orang	12.575.904.400 - -	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak Mampu	355 Organisasi 10 Jenis 200 Orang	13.789.495.000 - -	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Persen		Persen	100 Persen	909.999.850						100 Persen	1.001.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.03 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi				25 Ranperda	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum	25 Ranperda	220.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.03 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum yang diberikan				4 Perkara	509.999.850	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum	4 Perkara	561.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.03 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dapat diakses melalui website jdiid				25 Produk Hukum Daerah	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum	25 Produk Hukum Daerah	220.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	449.999.800						100 Persen	495.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.04 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang difasilitasi				3 Kali	319.999.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Daerah-Daerah yang berada di Wilayah Perbatasan	3 Kali	352.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 02.04 3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dievaluasi				1 Laporan	130.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Daerah-Daerah yang berada di Wilayah Perbatasan	1 Laporan	143.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian yang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	4.870.000.000						100 Persen	5.357.358.500	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 3 02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi / kebijakan Perekonomian Daerah daerah yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	1.050.000.000						100 Persen	1.155.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina, dipantau dan dievaluasi				3 BUMD	550.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM)	3 BUMD	605.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.01 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Stabilitas Perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir				1 Laporan	250.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM)	1 Laporan	275.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.01 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Pengembangan dan Perluasan UKM yang dipantau dan dievaluasi				1 Laporan	250.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM)	1 Laporan	275.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Fasilitas Rapat Koordinasi TAPD	Persen		Persen	100 Persen	650.000.000						100 Persen	714.998.500	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.02 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah asistensi dokumen RKA, DPA dan DPPA yang dilaksanakan				195 Kali	163.405.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir	195 Kali	179.745.500	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang difasilitasi				12 Kali	-						12 Kali	-	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.02 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi Penyusunan Program Pembangunan yang difasilitasi				12 Kali	332.293.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir	12 Kali	365.523.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.02 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan monitoring pembangunan Daerah yang disusun				1 Dokumen	154.301.400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	169.730.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	2.650.000.000						100 Persen	2.915.360.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.03 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola				130 Paket	1.548.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/ Penyedia Barang/ Jasa	130 Paket	1.703.570.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 1 3 02.03 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Layanan Pengadaan Secara Elektronik				55 Perangkat Daerah	706.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/ Penyedia Barang/ Jasa	55 Perangkat Daerah	777.730.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.03 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek/ Penyuluhan Pengembangan Akan Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Yang Terstandar dan Profesional yang dilaksanakan				1 Kali	394.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/ Penyedia Barang/ Jasa	1 Kali	434.060.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan potensi sumber daya alam	Persen		Persen	100 Persen	520.000.000						100 Persen	572.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.04 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dibina, dipantau dan dievaluasi				30938 KPM	250.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	30938 KPM	275.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 02.04 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil evaluasi terkait Penambahan Instalasi Listrik yang sudah atau belum terpasang				1 Laporan	270.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	1 Laporan	297.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	SEKRETARIAT DPRD
4 2	SEKRETARIAT DPRD						101.107.220.040							106.057.634.998	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	58.833.819.940						22 Nilai	61.775.564.993	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai Standar	Persen		Persen	90 Persen	384.234.100						90 Persen	403.445.700	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				75 Dokumen	47.462.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	75 Dokumen	49.835.700	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				30 Dokumen	336.771.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	30 Dokumen	353.610.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Persen		Persen	100 Persen	6.168.867.798						100 Persen	6.477.365.516	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				65 Orang	5.361.006.048	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	65 Orang	5.629.110.678	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				12 Dokumen	339.652.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	356.634.600	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				20 Dokumen	468.209.750	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	20 Dokumen	491.620.238	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	1.370.490.500						100 Persen	1.439.015.025	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dibayarkan				53 Orang	1.370.490.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	53 Orang	1.439.015.025	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja Baik	Persen		Persen	100 Persen	1.374.833.000						100 Persen	1.443.574.650	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				555 Stel	424.090.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	555 Stel	445.294.500	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				16 Diklat	239.372.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	16 Diklat	251.340.600	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				20 Kali	711.371.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	20 Kali	746.939.550	SEKRETARIAT DPRD
							-							-	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	10.489.368.050						100 Persen	11.013.836.448	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan yang disediakan				53 Jenis	199.490.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	53 Jenis	209.465.498	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				158 Jenis	2.379.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	158 Jenis	2.497.992.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				14 Jenis	834.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	14 Jenis	876.309.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				5 Jenis	654.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	5 Jenis	687.309.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				30 Jenis	636.008.150	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	30 Jenis	667.808.550	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				255 Eksemplar	426.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	255 Eksemplar	447.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				888 Kali	5.359.668.950	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	888 Kali	5.627.652.400	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1.063.112.000						100 Persen	1.116.267.600	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				5 Unit	292.882.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN	5 Unit	307.526.100	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun				4 Unit	770.230.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN	4 Unit	808.741.500	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen		Persen	100 Persen	2.294.035.650						100 Persen	2.408.737.400	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				25 Rekening	1.104.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN	25 Rekening	1.160.124.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan				63 Orang	1.189.155.650	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN	63 Orang	1.248.613.400	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan Baik	Persen		Persen	100 Persen	2.666.180.000						100 Persen	2.799.489.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				7 Unit	480.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	7 Unit	504.945.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				157 Unit	602.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	157 Unit	632.205.000	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				150 Unit	303.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	150 Unit	318.318.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				44 Unit	806.180.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	44 Unit	846.489.000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				3 Unit	323.390.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	3 Unit	339.559.500	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				116 Unit	150.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	116 Unit	157.972.500	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	25.100.214.592						100 Persen	26.355.225.230	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Rincian Objek Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD				45 Rekening	24.129.013.992	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	45 Rekening	25.335.464.600	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.15 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up				45 Orang	971.200.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sekretariat DPRD	45 Orang	1.019.760.630	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	7.922.484.250						100 Persen	8.318.608.425	SEKRETARIAT DPRD
4 2 1 02.16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang difasilitasi				505 Kali	4.966.978.350	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	505 Kali	5.215.327.230	SEKRETARIAT DPRD
							-							-	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 1 02.16 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pemenuhan Logistik Rumah Tangga Pimpinan				7300 Kali	2.955.505.900	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	7300 Kali	3.103.281.195	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang di Fasilitas	Persen		Persen	100 Persen	42.273.400.100						100 Persen	44.282.070.005	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase Rapat-rapat Pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	persen		persen	90 persen	3.660.473.000						90 persen	3.843.496.600	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.01 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang di Bahas				9 Buah	3.660.473.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	9 Buah	3.843.496.600	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase Rapat-rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi				100	905.175.000						100	950.433.750	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.02 3	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat Paripurna				36 Kali	905.175.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	36 Kali	950.433.750	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan	persen		persen	90 persen	1.868.274.050						90 persen	1.961.687.753	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.04 2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan				2 Kali	1.868.274.050	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	1.961.687.753	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen		persen	90 persen	4.518.225.550						90 persen	4.744.136.828	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.05 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses dan Aspirasi yang diserap				3 Kali	4.518.225.550	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	4.744.136.828	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yang difasilitasi	persen		persen	90 persen	1.597.149.000						90 persen	1.677.006.400	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 2 02.07 2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Risalah Rapat dan Bahan Komunikasi dan Publikasi				14 Buah	1.597.149.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	14 Buah	1.677.006.400	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.08	Fasilitasi Tugas DPRD	persentase Rekomendasi yang dihasilkan dari Kunjungan Kerja DPRD	persen		persen	100 persen	29.724.103.500						100 persen	31.105.308.675	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan kerja yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD				2813 Kali	25.804.633.500	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	2813 Kali	26.989.865.175	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 02.08 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Keprotokolan				658 Kali	3.919.470.000	Kab. Indragiri Hilir Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	658 Kali	4.115.443.500	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1	PERENCANAAN						11.280.825.165							12.558.033.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.911.041.064						22 Nilai	8.550.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	191.577.725						100 Persen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				5 Dokumen	74.193.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	80.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan kinerja SKPD yang disusun				3 Dokumen	117.384.225	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	46 Orang	5.730.184.739						46 Orang	5.765.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	-						1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				49 orang	5.640.784.739	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	49 orang	5.675.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	89.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	1 Dokumen	90.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa keamanan gedung kantor dibayarkan	orang		orang	4 orang	62.400.000						4 orang	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan gedung kantor dibayarkan				4 Orang	62.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	4 Orang	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Yang disediakan	Stel		Stel	50 Stel	211.673.550						50 Stel	230.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Diklat		Diklat	5 Diklat	-						5 Diklat	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang disediakan				56 Stel	27.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	56 Stel	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				23 Diklat	184.673.550	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	23 Diklat	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	Jenis		Jenis	9 Jenis	1.088.101.850						9 Jenis	1.700.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplarr		Eksemplarr	17 Eksemplarr	-						17 Eksemplarr	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	-						3 Jenis	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jenis		Jenis	9 Jenis	-						9 Jenis	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah jens peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis		Jenis	31 Jenis	-						31 Jenis	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali		Kali	164 Kali	-						164 Kali	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik dan penerangan yang disediakan				9 Jenis	50.041.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	9 Jenis	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				34 Jenis	178.736.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	34 Jenis	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan				2500 Liter	120.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	2500 Liter	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk Jamuan Tamu				40 LS	-						40 LS	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat				50 LS	-						50 LS	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan				11 Jenis	38.840.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	11 Jenis	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				17 Exemplar	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	17 Exemplar	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				185 Kali	675.484.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	185 Kali	1.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Buah		Buah	500 Buah	289.203.200						500 Buah	105.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening		Rekening	6 Rekening	-						6 Rekening	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang		Orang	5 Orang	-						5 Orang	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				500 Buah / Lembar	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	500 Buah / Lembar	5.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				6 Rekening	198.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6 Rekening	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 orang	85.603.200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5 orang	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset tetap Lainnya yang dipelihara	unit		unit	1 unit	337.900.000						1 unit	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah kendaraan Dinas jabatan/operasional/Lapangan yang dipelihara	unit		unit	44 unit	-						44 unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah kendaraan Dinas jabatan/operationan/Lapangan yang dipelihara	unit		unit	44 unit	-						44 unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor Atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit		unit	15 unit	-						15 unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya				44 Unit	129.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan milik Daerah	Barang	44 Unit	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang dipelihara				1 Unit	24.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan milik Daerah	Barang	1 Unit	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bagunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				15 Unit	184.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan milik Daerah	Barang	15 Unit	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen		Persen	100 Persen	1.189.999.800						100 Persen	1.357.533.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	501.935.050						2 Dokumen	650.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pertemuan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang terlaksana				1 Kali	72.273.050	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	54 OPD	1 Kali	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.01 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Musrenbang yang terlaksana				1 Kali	162.337.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	54 OPD	1 Kali	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.01 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun				3 Dokumen	267.325.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	3 Dokumen	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang di pelihara dan atau dikembangkan	Aplikasi		Aplikasi	1 Aplikasi	162.811.500						1 Aplikasi	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.02 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan				1 Aplikasi	162.811.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembinaan dan Pemanfaatan data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD	1 Aplikasi	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 2 02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-		-	0 -	525.253.250						0 -	532.533.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 2 02.03 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	-						10 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 2 02.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat daerah Terkait				10 Kali	446.650.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	54 OPD		10 Kali	450.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 2 02.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun				10 Dokumen	78.602.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	54 OPD	10 Dokumen	82.533.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD dan RENJA)	Persen		Persen	100 Persen	2.179.784.301						100 Persen	2.650.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		Persen	100 Persen	860.000.000						100 Persen	1.175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.01 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya				38 Kali	144.955.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	tes		38 Kali	175.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.01 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	84.124.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	tes		1 Dokumen	275.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang disusun				1 Dokumen	133.612.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	tes		1 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 1 3 02.01 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait				41 Kali	121.670.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		tes	41 Kali	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.01 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	106.005.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		tes	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.01 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi dengan Stakeholder terkait				1 Dokumen	269.631.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		tes	1 Dokumen	275.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait				35 Kali	-						35 Kali	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen yang disusun, jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	759.784.301						1 Dokumen	875.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		, jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait	kali		kali	62 kali	-						62 kali	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan, jumlah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkaitn pembangunan daerah bidang kewilayahan	kali		kali	45 kali	-						45 kali	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.02 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	399.784.301	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah Terkait				80 Kali	-						80 Kali	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.02 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat daerah Taerkait				95 Kali	360.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	95 Kali	375.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5 1 3 02.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur	kali		kali	33 kali	560.000.000						33 kali	600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	kali		kali	37 kali	-						37 kali	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 1 3 02.03 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				54 Kali	368.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan pemerataan pembangunan	perencanaan infrastruktur kewilayahan	bidang dan	54 Kali	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 1 3 02.03 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				53 Kali	191.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perencanaan infrastruktur kewilayahan	bidang dan	53 Kali	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.060.000.000							1.111.509.265	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang diikutkan dalam IGA	Persen		Persen	80 Persen	1.060.000.000						80 Persen	1.111.509.265	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	Persen		Persen	40 Persen	-						40 Persen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 5 2 02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Peraturan Kelitbang yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	464.199.300						1 Dokumen	486.509.265	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 5 2 02.01 1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Potensi Daerah yang difasilitasi				1 Dokumen	114.199.300	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Perencanaan Penelitian Pengembangan	Bidang dan	1 Dokumen	119.009.265	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2 02.01 12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang dikelola				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Perencanaan Penelitian Pengembangan	Bidang dan	1 Dokumen	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2 02.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah peraturan kelitbang yang dihasilkan				1 Perbup	250.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Pubiik		Perencanaan Penelitian Pengembangan	Bidang dan	1 Perbup	262.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2 02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bidang teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	595.800.700						1 Dokumen	625.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan	Terbitan		Terbitan	3 Terbitan	-						3 Terbitan	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Topik yang diseminasikan	Topik		Topik	1 Topik	-						1 Topik	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2 02.04 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan				1 Dokumen	123.766.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	1 Dokumen	125.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2 02.04 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah topik yang diseminasikan				1 Topik	246.233.100	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	1 Topik	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 5 2 02.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal/Buletin/Majalah Ilmiah yang diterbitkan				3 Terbitan	225.800.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		54 OPD	3 Terbitan	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2	KEUANGAN						18.709.484.172							23.401.544.260	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	14.953.595.472						22 Nilai	17.204.744.147	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	99.872.400						22 Nilai	128.418.311	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				2 Dokumen	60.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Pendapatan Daerah kab. Inhil	2 Dokumen	94.860.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun				5 Dokumen	39.272.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Pendapatan Daerah kab. Inhil	5 Dokumen	33.558.311	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	11.509.484.172						100 Persen	12.040.039.386	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan				90 orang	11.509.484.172	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	90 orang	12.040.039.386	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	71.506.000						90 Persen	116.055.450	BADAN DAERAH PENDAPATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	50 Persen	-						50 Persen	-	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				45 Stel	45.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah	45 Stel	84.500.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.398.599.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah	2 Diklat	31.555.450	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan				14 Jenis	28.081.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Bapenda Kab. Inhil	14 Jenis	28.081.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				56 Jenis	283.662.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Bapenda Kab. Inhil	56 Jenis	425.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				6 Jenis	137.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Bapenda Kab. Inhil	6 Jenis	150.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				46 Jenis	225.840.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Bapenda Kab. Inhil	46 Jenis	230.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				51 eksemplar	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Bapenda Kab. Inhil	51 eksemplar	18.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				304 Kali	713.856.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Bapenda Kab. Inhil	304 Kali	715.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	48.900.000						100 Persen	1.366.750.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 Unit	48.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	2 Unit	1.366.750.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	1.514.908.500						100 Persen	1.552.400.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	7.334.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	100 Persen	7.400.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Dibayarkan				72 rekening	592.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	72 rekening	595.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penggunaan jasa gedung kantor				6 Unit	915.034.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	6 Unit	950.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				59 Orang	-						59 Orang	-	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	310.325.000						100 Persen	435.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				38 Unit	115.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	38 Unit	115.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				45 Unit	71.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	45 Unit	75.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	53.925.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	2 Unit	150.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 Unit	70.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil	3 Unit	95.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen		Persen	10,02 Persen	3.755.888.700						10,02 Persen	6.196.800.113	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen		Persen	10.2 Persen	3.755.888.700						10.2 Persen	6.196.800.113	BADAN DAERAH PENDAPATAN
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen		Persen	4.5 Persen	-						4.5 Persen	-	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang disusun				1 Dokumen	22.114.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	1 Dokumen	246.818.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Peraturan / Kebijakan yang disusun / ditetapkan				6 Dokumen	107.414.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	6 Dokumen	170.017.848	BADAN DAERAH PENDAPATAN
							-							-	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peraturan / Kebijakan yang disosialisasikan				2 Jenis	47.992.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	2 Jenis	219.914.288	BADAN DAERAH PENDAPATAN
							-							-	BADAN DAERAH PENDAPATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 4 02.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah yang diadakan / dikembangkan				2 Jenis	251.239.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	2 Jenis	287.438.580	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek/Subjek Pajak Daerah yang dilakukan Pendataan/dilayani dalam pendataan dan pendaftaran				3990 WP	269.928.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	3990 WP	1.045.987.594	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis basis data pajak daerah yang di kelola				9 jenis	20.155.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	9 jenis	275.407.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek/Subjek Pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB yang dilakukan Penilaian, Verifikasi dan Validasi				5120 WP	676.947.400	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	5120 WP	1.100.587.540	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek / Subjek Pajak Daerah yang ditetapkan dan disampaikan				203225 WP	719.075.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	203225 WP	850.000.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek/Subjek pajak Yang diberikan pelayanan dan konsultasi				3000 WP	334.346.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	3000 WP	356.083.640	BADAN DAERAH PENDAPATAN
							-							-	BADAN DAERAH PENDAPATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 4 02.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang diteliti dan diverifikasi				12 Laporan	153.036.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	12 Laporan	258.911.567	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan				18150 WP	763.578.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	18150 WP	832.214.926	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penyelesaian atas keberatan pajak daerah				510 WP	105.706.900	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	510 WP	120.928.694	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				200 WP	222.757.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	200 WP	239.990.436	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5 2 4 02.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah jenis retribusi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				3 Jenis	61.597.300	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		11 (Sebelas) Jenis Pajak	3 Jenis	192.500.000	BADAN DAERAH PENDAPATAN
							-							-	BADAN DAERAH PENDAPATAN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2	KEUANGAN						356.535.005.632							357.913.765.437	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	21.648.383.725						22 Nilai	22.278.500.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	17.972.000						10 Dokumen	22.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun				2 Dokumen	9.726.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	2 Dokumen	12.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				72 Dokumen	8.246.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	72 Dokumen	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	15.996.236.995						100 Persen	16.156.500.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				64 Orang	15.990.583.995	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	64 Orang	16.150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				60 Dokumen	6.553.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	60 Dokumen	6.500.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	311.888.180						100 Persen	350.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				34 Diklat	194.163.580	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	34 Diklat	200.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan				4 Kegiatan	117.724.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	4 Kegiatan	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	2.149.546.050						100 Persen	2.230.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				11 Jenis	36.646.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	11 Jenis	40.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				6 Jenis	150.463.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	6 Jenis	160.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				17 Jenis	5.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	17 Jenis	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				6 Jenis	206.176.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	6 Jenis	220.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				11 Jenis	72.425.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	11 Jenis	80.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				3200 Eksemplar	18.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	3200 Eksemplar	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				400 Kali	1.660.185.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	400 Kali	1.700.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	31.800.000						100 Persen	65.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				5 Unit	31.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	5 Unit	65.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	519.200.000						100 Persen	555.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	100 Persen	10.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	163.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	3 Rekening	185.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				19 Orang	348.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	19 Orang	360.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	2.621.740.500						100 Persen	2.900.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				42 Unit	458.140.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	42 Unit	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				75 Unit	457.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	75 Unit	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				2 Unit	1.624.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	2 Unit	1.800.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				257 Unit	81.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKAD KAB. INHIL	257 Unit	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	331.856.645.737						100 Persen	332.265.265.437	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	1.554.986.700						100 Persen	1.763.889.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA/PPAS yang diterbitkan				2 Dokumen	74.539.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Dokumen	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan KUPA/PPAS yang diterbitkan				2 Dokumen	65.915.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Dokumen	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 2 02.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun				8 Dokumen	825.639.700	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	8 Dokumen	900.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun				2 Dokumen	448.003.400	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Dokumen	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dilaksanakan				5 Kali	140.889.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	5 Kali	163.889.600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan layanan perbendaharaan daerah sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	889.645.100						100 Persen	1.000.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.02 5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dilaksanakan				29 Kali	131.050.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	29 Kali	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang disusun				24 Dokumen	380.560.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	24 Dokumen	400.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.02 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan				2 Kali	128.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Kali	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang disusun				1 Dokumen	249.485.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	1 Dokumen	300.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) sesuai SAP dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	919.744.100						100 Persen	990.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 2 02.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun				4 Dokumen	103.481.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	4 Dokumen	120.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun				2 Dokumen	392.910.100	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Dokumen	400.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun				4 Dokumen	295.491.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	4 Dokumen	320.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun				1 Dokumen	127.862.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	1 Dokumen	150.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	327.931.021.637						100 Persen	327.931.021.637	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah persentase anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir				100 Persen	280.271.004.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			54 OPD	100 Persen	280.271.004.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah persentase anggaran Dana Darurat dan Mendesak terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir				100 Persen	43.000.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	100 Persen	43.000.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah persentase anggaran Dana Bagi Hasil terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir				100 Persen	4.660.017.137	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	100 Persen	4.660.017.137	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pemanfaatan SIPD	Persen		Persen	100 Persen	561.248.200						100 Persen	580.354.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 2 02.05 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang diimplementasikan dan terpelihara				2 Aplikasi	561.248.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Aplikasi	580.354.200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen		Persen	90 Persen	3.029.976.170						90 Persen	3.370.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset dan Barang Daerah yang dimanfaatkan dengan tepat sesuai aturan	Persen		Persen	100 Persen	3.029.976.170						100 Persen	3.370.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun				2 Dokumen	845.218.800	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Dokumen	950.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi				10 Dokumen	48.602.200	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	10 Dokumen	60.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Unit	1.231.482.670	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	4 Unit	1.350.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dioptimalisasikan				2 Jenis	233.443.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	2 Jenis	260.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah yang disusun				10 Dokumen	463.933.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	10 Dokumen	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 02.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan				3 Kali	207.296.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54 OPD	3 Kali	250.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3	KEPEGAWAIAN						11.665.351.241							11.779.270.345	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.667.133.506						22 Nilai	7.231.386.845	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	49.200.000						90 Persen	36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				5 dokumen	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	5 dokumen	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				5 dokumen	37.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	5 dokumen	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	5.299.966.241						100 Persen	5.203.176.845	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 3 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				45 orang	5.299.966.241	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	45 orang	5.203.176.845	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	50 Persen	158.580.500						50 Persen	190.360.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi	Persen		Persen	40 Persen	-						40 Persen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.05 7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas				100 persen	69.061.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	100 persen	125.360.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan				55 Kegiatan	89.519.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	55 Kegiatan	65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1.070.700.960						100 Persen	1.433.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				19 Jenis	16.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	19 Jenis	16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				35 Jenis	262.366.960	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	35 Jenis	585.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	60.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	2 Jenis	64.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Jenis	34.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	12 Jenis	35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				6456 Eksemplar	30.474.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	6456 Eksemplar	33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				140 kali	666.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	140 kali	700.350.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	60.000.000						100 Persen	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 unit	60.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	2 unit	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	151.129.500						100 Persen	153.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 3 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	100 persen	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				48 rekening	103.602.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	48 rekening	98.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 orang	39.527.500	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	3 orang	35.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	877.556.305						100 Persen	155.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				32 unit	101.376.305	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	32 unit	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				42 unit	24.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	42 unit	25.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				2 unit	751.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN di Lingkungan BKPSDM	2 unit	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Hasil Penelitian Mandiri Tim Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Nilai		Nilai	270 Nilai	3.998.217.735						270 Nilai	4.547.883.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang di angkat melalui Seleksi Pengadaan ASN	Persen		Persen	60 Persen	922.656.750						60 Persen	1.560.070.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.01 4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka				350 orang	525.746.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	350 orang	891.220.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.01 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah administrasi ASN yang memasuki BUP yang dikelola dan terselesaikan				220 orang	124.421.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	220 orang	200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Korpri yang terfasilitasi..				4 kali	169.564.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	4 kali	250.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 3 2 02.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Penerbitan Kartu ASN				190 orang	43.889.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	190 orang	51.595.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Elektronik Kepegawaian terkelola secara update				5150 orang	59.036.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	5150 orang	167.255.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya	Persen		Persen	80 Persen	560.384.185						80 Persen	447.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.02 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah usulan Mutasi ASN yang ditindaklanjuti				500 orang	301.681.250	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Se Kabupaten Indragiri Hilir	500 orang	207.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terkelola dan terselesaikan				1200 orang	258.702.935	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Se Kabupaten Indragiri Hilir	1200 orang	240.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN	Persen		Persen	48 Persen	1.798.955.800						48 Persen	1.887.322.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.03 1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti seleksi dan peningkatan kompetensi				161 orang	1.154.427.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN Se Kabupaten Indragiri Hilir	161 orang	1.262.322.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti izin belajar dan tugas belajar				120 orang	644.528.200	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN Se Kabupaten Indragiri Hilir	120 orang	625.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik	Persen		Persen	90 Persen	716.221.000						90 Persen	653.491.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang ditindaklanjuti				4 Laporan	264.546.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	4 Laporan	183.391.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN berprestasi yang diberi penghargaan				440 orang	295.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	440 orang	295.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti				100 persen	95.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	100 persen	95.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 3 2 02.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Disiplin ASN yang dilaksanakan				20 kecamatan	61.575.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	20 kecamatan	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.712.549.000							3.791.081.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen		Persen	53 Persen	2.712.549.000						53 Persen	3.791.081.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 4 2 02.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Persen		Persen	80 Persen	277.549.000						80 Persen	352.025.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 4 2 02.01 3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Aparatur yang terfasilitasi mengikuti diklat teknis				8 orang	277.549.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN se Kabupaten Indragiri Hilir	8 orang	352.025.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 4 2 02.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pim / Diklat Penjenjangan	Persen		Persen	100 Persen	2.435.000.000						100 Persen	3.439.056.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar / Prajabatan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5 4 2 02.02 7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Aparatur yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Dasar dan Diklat Penjenjangan				152 orang	2.435.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			ASN Se Kabupaten Indragiri Hilir	152 orang	3.439.056.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						-							-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1	INSPEKTORAT DAERAH						10.809.636.007							12.496.812.807	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	7.874.772.507						22 Nilai	8.736.983.807	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	11.880.000						90 Persen	15.730.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				7 Dokumen	11.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inspektorat Daerah	7 Dokumen	15.730.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	6.496.838.307						100 Persen	6.681.900.607	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				53 Orang	6.496.838.307	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Daerah Inspektorat	53 Orang	6.681.900.607	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	234.068.500						100 Persen	257.400.000	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan				3 Diklat	234.068.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			kantor dan aparatur Inspektorat	3 Diklat	257.400.000	INSPEKTORAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	678.075.700						100 Persen	1.385.577.600	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				2 Jenis	3.566.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan aparatur Inspektorat Daerah	2 Jenis	3.922.600	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Jenis	25.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan aparatur Inspektorat Daerah	5 Jenis	193.248.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4 Jenis	98.771.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan aparatur Inspektorat Daerah	4 Jenis	108.647.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				8 Eksemplar	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan aparatur Inspektorat Daerah	8 Eksemplar	23.760.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				30 Kali	535.538.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Gedung dan aparatur Inspektorat Daerah	30 Kali	1.056.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	90.000.000						100 Persen	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				6 unit	90.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana aparatur	6 unit	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	300.410.000						100 Persen	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				100 Persen	3.510.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor dan aparatur Inspektorat daerah	100 Persen	5.385.600	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	128.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor dan aparatur Inspektorat daerah	4 Rekening	141.790.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				14 Orang	168.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor dan aparatur Inspektorat daerah	14 Orang	170.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	63.500.000						100 Persen	79.200.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				11 Unit	27.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana aparatur	11 Unit	29.700.000	INSPEKTORAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				30 Unit	11.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana aparatur	30 Unit	16.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 1 02.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	25.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana aparatur	2 Unit	33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi	Nilai		Nilai	85 Nilai	2.548.458.750						85 Nilai	2.951.196.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi	Nilai		Nilai	85 Nilai	2.100.028.000						85 Nilai	2.458.396.000	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase tindak lanjut temuan	Persen		Persen	74 Persen	-						74 Persen	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Pemerintah Daerah				5 LHA	132.124.800	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	5 LHA	214.054.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Keuangan Pemerinta Daerah				5 LHA	148.230.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	5 LHA	320.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				5 LHR	363.757.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	5 LHR	399.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 LHR	20.930.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	1 LHR	38.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Audit Dana Desa				15 LHA	196.949.700	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	15 LHA	268.394.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal				2 Laporan	664.548.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	2 Laporan	527.659.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.01 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP				77 %	573.488.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	77 %	690.489.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi	Nilai		Nilai	85 Nilai	448.430.750						85 Nilai	492.800.000	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	Persen		Persen	77 Persen	-						77 Persen	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.02 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				77 %	243.070.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	77 %	267.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 2 02.02 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu				5 %	205.360.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemda Kab Inhil	5 %	225.500.000	INSPEKTORAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	74 Persen	386.404.750						74 Persen	808.633.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 02.02	Pendampingan dan Asistensi	Laporan hasil monitoring	Laporan		Laporan	40 Laporan	386.404.750						40 Laporan	808.633.000	INSPEKTORAT DAERAH
		Persentase Penurunan jumlah temuan	Persen		Persen	74 Persen	-						74 Persen	-	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 02.02 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan pembangunan reformasi birokrasi				17 OPD	75.065.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Desa	17 OPD	82.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 02.02 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan				4 Laporan	281.837.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Desa	4 Laporan	504.151.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 1 3 02.02 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Survei Penegakan Integritas Yang Dikeluarkan				1 Laporan	29.502.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD dan Desa	1 Laporan	221.982.000	INSPEKTORAT DAERAH
							-	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						-	INSPEKTORAT DAERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						8.597.266.820							8.411.446.820	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	8.480.050.220						100 Persen	8.269.246.820	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				8 Dokumen	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	8 Dokumen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen		Persen	100 Persen	7.995.776.820						100 Persen	7.995.776.820	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan				14 Bulan	7.995.776.820	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Aparatur Kecamatan	14 Bulan	7.995.776.820	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	19.200.000						100 Persen	14.400.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan kantor yang dibayarkan				2 Orang	19.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintah Kecamatan Tembilahan	2 Orang	14.400.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen	287.550.150						100 Persen	104.070.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibutuhkan				10 jenis	1.800.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	10 jenis	1.850.000	KECAMATAN TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan perlengkapan yang disediakan				25 jenis	44.683.550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	25 jenis	15.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat				24 kegiatan	64.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	24 kegiatan	20.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan				10000 lembar	11.486.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	10000 lembar	6.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				24 eksemplar	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	24 eksemplar	2.400.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan				52 paket	162.280.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	52 paket	58.820.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	159.723.250						100 Persen	137.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terlayani				380 lembar	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	380 lembar	3.800.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan wifi				2 Rekening	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kecamatan	2 Rekening	24.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer pelayanan umum yang terakomodir				14 orang	128.223.250	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	14 orang	109.200.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	17.800.000						100 Persen	18.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				1 unit	17.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	1 unit	10.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				13 unit	-	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	13 unit	8.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	16.581.600						100 Persen	28.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	10.000.000						100 Persen	10.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingka Kecamatan Tembilahan				100 Persen	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan				Aparatur Kecamatan	100 Persen	10.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	6.581.600						100 Persen	18.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan				700 rekomendasi	6.581.600	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	700 rekomendasi	18.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	52.900.000						100 Persen	90.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina dan Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	52.900.000						100 Persen	90.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kegiatan	52.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	1 kegiatan	90.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	47.735.000						100 Persen	24.200.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	47.735.000						100 Persen	24.200.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina dan Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 lembaga	41.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Pemerintahan Kecamatan Tembilahan	3 lembaga	14.200.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada musrenbang kecamatan				9 dokumen	5.775.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Pemerintahan Kecamatan Tembilahan	9 dokumen	10.000.000	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						159.460.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	159.460.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	159.460.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana yang dibutuhkan				300000000 r upiah	159.460.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	300000000 r upiah	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan				100 Persen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						174.950.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	174.950.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	174.950.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						174.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat		-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						345.400.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	345.400.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	345.400.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hilir				100 Persen	345.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						254.600.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	254.600.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	254.600.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Beringin				100 Persen	254.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						220.600.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	220.600.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	220.600.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Aparatur di Kelurahan				6 Lembaga	220.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiperak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	6 Lembaga	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Perak				100 Persen	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						334.500.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	334.500.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	334.500.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pekan Arba				100 Persen	334.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekan Arba			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						184.900.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	184.900.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	184.900.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana yang dibutuhkan				300000000 r upiah	184.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	300000000 r upiah	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Seberang Tembilahan				100 Persen	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing		100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN TEMBILAHAN
							-				Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing			-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN						452.100.000							-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	452.100.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	452.100.000						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Aparatur di Kelurahan				6 Lembaga	452.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kelurahan dan Masyarakat Kecamatan Tembilahan	6 Lembaga	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Kota				100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
7 1	KECAMATAN						3.976.579.530							4.009.704.530	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	3.778.468.530						100 Persen	3.792.729.530	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	3.494.079.530						100 Persen	3.494.079.530	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				34 Orang	3.494.079.530		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN di Wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu	34 Orang	3.494.079.530	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	21.600.000						100 Persen	48.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				5 Orang	21.600.000					Jasa Tenaga Keamanan Kantor	5 Orang	48.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	5.400.000						100 Persen	8.250.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				45 Stel	5.400.000					Aparatur Sipil Negara	45 Stel	8.250.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	125.637.500						100 Persen	130.075.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				20 Jenis	41.367.500					Apraratur Sipil Negara	20 Jenis	36.045.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jeniis	18.000.000					Apraratur Sipil Negara	3 Jeniis	14.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4 Jenis	14.630.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Apraratur Sipil Negara	4 Jenis	14.630.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				8 Eksemplar	4.800.000					Apraratur Sipil Negara	8 Eksemplar	9.600.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				56 Kali	46.840.000					Apraratur Sipil Negara	56 Kali	55.800.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	112.451.500						100 Persen	93.725.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	4.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Sipil Negara	90 Persen	2.550.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				24 Rekening	29.700.000					Aparatur Sipil Negara	24 Rekening	22.200.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				7 Orang	78.351.500					Aparatur Sipil Negara	7 Orang	68.975.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	19.300.000						100 Persen	18.600.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				10 Unit	11.800.000					Barang Milik Daerah	10 Unit	14.600.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				6 Unit	7.500.000					Barang Milik Daerah	6 Unit	4.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	21.650.000						100 Persen	54.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	21.650.000						100 Persen	54.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				5 Jenis	21.650.000	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kelurahan				Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat serta Desa/Kelurahan	5 Jenis	54.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	6.000.000						100 Persen	18.125.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	6.000.000						100 Persen	18.125.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				4 Kegiatan	6.000.000					Lembaga Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Hulu	4 Kegiatan	18.125.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	75.200.000						100 Persen	64.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	100 Persen	75.200.000						100 Persen	64.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				3 Kegiatan	75.200.000					Kegiatan Keagamaan dan MTQ	3 Kegiatan	64.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	95.261.000						100 Persen	80.850.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen	95.261.000						100 Persen	80.850.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 Kelompok	91.410.000					Masyarakat dan ASN	3 Kelompok	64.000.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				300 Usulan	3.851.000					Masyarakat dan ASN	300 Usulan	16.850.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN									-							-	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN									199.300.000							199.300.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	199.300.000						100 Persen	199.300.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	199.300.000						100 Persen	199.300.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Barat				100 Persen	199.300.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kelurahan Tembilahan Barat	100 Persen	199.300.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN									-							-	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1	KECAMATAN									433.900.000							433.900.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	433.900.000						100 Persen	433.900.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	433.900.000						100 Persen	433.900.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Barat				100 Persen	433.900.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Tembilahan Hulu	100 Persen	433.900.000	KECAMATAN HULU	TEMBILAHAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN									-							-	KECAMATAN TEMPULING	
7 1	KECAMATAN									4.806.176.644							4.893.020.000	KECAMATAN TEMPULING	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	4.636.726.644						22 Nilai	4.573.500.000	KECAMATAN TEMPULING	
7 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	persen		persen	90 persen	28.000.000						90 persen	35.000.000	KECAMATAN TEMPULING	
7 1 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				2 dokumen	18.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	2 dokumen	20.000.000	KECAMATAN TEMPULING	
7 1 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				5 dokumen	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	5 dokumen	15.000.000	KECAMATAN TEMPULING	
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	4.225.176.644						100 persen	4.300.000.000	KECAMATAN TEMPULING	
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				34 orang	4.225.176.644	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat	34 orang	4.300.000.000	KECAMATAN TEMPULING	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang berkinerja baik	persen		persen	100 persen	5.000.000						100 persen	18.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				18 stel	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kantor Camat	18 stel	18.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	141.116.000						100 persen	108.500.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				8 jenis	1.439.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	8 jenis	3.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				36 jenis	98.425.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	36 jenis	50.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 jenis	5.935.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	3 jenis	7.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 jenis	2.407.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	2 jenis	4.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				42 eksemplar	4.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	42 eksemplar	4.500.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				27 kali	28.710.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	27 kali	40.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen		persen	100 persen	204.934.000						100 persen	46.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	110.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	100 persen	4.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 rekening	16.308.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	3 rekening	17.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 orang	78.626.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak				Kantor Camat Tempuling	3 orang	25.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	persen		persen	100 persen	32.500.000						100 persen	66.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				9 unit	7.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	9 unit	10.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	20.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	1 unit	50.000.000	KECAMATAN TEMPULING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				4 unit	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Tempuling	4 unit	6.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	71.400.000						100 Persen	75.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	persen		persen	90 persen	71.400.000						90 persen	75.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				2 jenis	71.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kecamatan Tempuling	2 jenis	75.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	44.900.000						100 Persen	135.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	persen		persen	100 persen	44.900.000						100 persen	135.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kegiatan	44.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat kecamatan Tempuling	1 kegiatan	135.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	53.150.000						100 Persen	109.520.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	persen		persen	90 persen	53.150.000						90 persen	109.520.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				9 kelompok	43.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 kelurahan dan 5 Desa	9 kelompok	95.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				45 usulan	10.150.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 kelurahan dan 5 Desa	45 usulan	14.520.000	KECAMATAN TEMPULING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMPULING
7 1	KECAMATAN						302.100.000							500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	302.100.000						100 Persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen		persen	90 persen	302.100.000						90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Salak				90 persen	302.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Kelurahan Sungai Salak	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	KECAMATAN TEMPULING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMPULING
7 1	KECAMATAN						194.800.000							500.000.000	KECAMATAN TEMPULING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	194.800.000						100 Persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen		persen	90 persen	194.800.000						90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tempuling				90 persen	194.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Tempuling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Kelurahan Tempuling	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMPULING
7 1	KECAMATAN						152.100.000							500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	152.100.000						100 Persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen		persen	90 persen	152.100.000						90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pangkalan Tujuh				90 persen	152.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Pangkalan Tujuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Tujuh	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TEMPULING
7 1	KECAMATAN						175.500.000							500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	175.500.000						100 Persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	persen		persen	90 persen	175.500.000						90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Pidada				90 persen	175.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Tanjungpidada	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pidada	90 persen	500.000.000	KECAMATAN TEMPULING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1	KECAMATAN						3.245.673.857							3.570.241.243	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	2.959.566.557						90 Persen	3.255.523.213	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	22 Orang	2.583.398.249						22 Orang	2.841.738.074	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				22 Orang	2.583.398.249	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	22 Orang	2.841.738.074	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dibayarkan	Orang		Orang	3 Orang	57.600.000						3 Orang	63.360.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dibayarkan				3 Orang	28.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Orang	31.680.000	KECAMATAN BATANG TUAKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan				3 Orang	28.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan		0	3 Orang	31.680.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya				18 Ruangan	-						18 Ruangan	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jenis		Jenis	100 Jenis	270.908.308						100 Jenis	297.999.139	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis		Jenis	100 Jenis	-						100 Jenis	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis		Jenis	100 Jenis	-						100 Jenis	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis		Jenis	100 Jenis	-						100 Jenis	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jenis		Jenis	100 Jenis	-						100 Jenis	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah rekening yang dibayarkan	Jenis		Jenis	2 Jenis	-						2 Jenis	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				10 Jenis	91.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	10 Jenis	1.001.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				100 Jenis	179.999.908	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	100 Jenis	197.999.899	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				100 Jenis	14.410.650	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan		0	100 Jenis	15.851.715	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				100 Jenis	6.396.750	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan		0	100 Jenis	7.036.425	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				1 Eksemplar	3.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	1 Eksemplar	3.960.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				12 Kali	66.410.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan an Kebudayaan		0	12 Kali	73.051.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan surat menyurat	Persen		Persen	100 Persen	38.160.000						100 Persen	41.976.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening		Rekening	3 Rekening	-						3 Rekening	-	KECAMATAN BATANG TUAKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Orang		Orang	3 Orang	-						3 Orang	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	9.360.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Rekening	10.296.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 Orang	28.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	3 Orang	31.680.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	9.500.000						1 Unit	10.450.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit		Unit	8 Unit	-						8 Unit	-	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional/lapangan yang dipelihara				1 Unit	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	8.800.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				8 Unit	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Unit	1.650.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	33.370.000						100 Persen	36.707.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	33.370.000						100 Persen	36.707.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Persen	33.370.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	36.707.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	207.900.000						100 Persen	228.690.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Piring	Persen		Persen	100 Persen	207.900.000						100 Persen	228.690.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Piring				100 Persen	207.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	100 Persen	228.690.000	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	44.837.300						100 Persen	49.321.030	KECAMATAN BATANG TUAKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah organisasi, kelembagaan, dan masyarakat yang dibina	Kelompok		Kelompok	30 Kelompok	44.837.300						30 Kelompok	49.321.030	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				30 Kelompok	26.442.000	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	0	30 Kelompok	29.086.200	KECAMATAN BATANG TUAKA
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada Musrenbang kecamatan				10 Usulan	18.395.300	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan pemerataan pembangunan	0	10 Usulan	20.234.830	KECAMATAN BATANG TUAKA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN CONCONG
7 1	KECAMATAN						2.258.849.791							2.258.849.791	KECAMATAN CONCONG
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.063.849.791						100 Persen	2.063.849.791	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen		Persen	100 Persen	1.791.649.791						100 Persen	1.791.649.791	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN				1 Tahun	1.791.649.791	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Kecamatan	1 Tahun	1.791.649.791	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persen		Persen	100 Persen	177.100.000						100 Persen	177.100.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan				5 Set	16.430.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Kecamatan	5 Set	16.430.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang Tersedia				3 Set/Kegiatan	33.670.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Kecamatan	3 Set/Kegiatan	33.670.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan				70 Kali	127.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Kecamatan	70 Kali	127.000.000	KECAMATAN CONCONG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan	Tahun		Tahun	7 Kali	-						7 Kali	-	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	87.000.000						1 Tahun	87.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Kantor				1 Tahun	87.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Kecamatan	1 Tahun	87.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	Tahun		Tahun	1 Tahun	- 8.100.000						1 Tahun	- 8.100.000	KECAMATAN CONCONG KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN CONCONG
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara				10 Unit	8.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	10 Unit	8.100.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	130.000.000						100 Persen	130.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia umat beragama	Tahun		Tahun	1 Tahun	130.000.000						1 Tahun	130.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan				95 %	130.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Kelompok Masyarakat Umat Beragama	95 %	130.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	65.000.000						100 Persen	-	KECAMATAN CONCONG KECAMATAN CONCONG
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen	65.000.000						100 Persen	65.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat yang di Fasilitasi				2 Kelompok	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	2 Kelompok	50.000.000	KECAMATAN CONCONG
							-							-	KECAMATAN CONCONG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6 02.01 13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				6 Dokumen	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	6 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN CONCONG
							-							-	KECAMATAN CONCONG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN CONCONG
7 1	KECAMATAN						200.000.000							200.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	200.000.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN CONCONG
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan				95 Persen	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Concong Luar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	95 Persen	200.000.000	KECAMATAN CONCONG
							-		DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan					-	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN ENOK
7 1	KECAMATAN						3.629.021.417							3.480.521.417	KECAMATAN ENOK
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	3.434.121.917						100 Persen	3.322.021.417	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	26 Orang	3.265.021.417						26 Orang	3.265.021.417	KECAMATAN ENOK
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				26 Orang	3.265.021.417	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	26 Orang	3.265.021.417	KECAMATAN ENOK	
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	%		%	100 %	75.008.500						100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Set	5.222.500	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	1 Set	-	KECAMATAN ENOK	
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan				342 liter	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	342 liter	-	KECAMATAN ENOK	
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				7 Kali	-					7 Kali	-	KECAMATAN ENOK	
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.436.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1		-	KECAMATAN ENOK	
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				600 Eksemplar	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	600 Eksemplar	-	KECAMATAN ENOK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan				48 kali	55.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	48 kali	-	KECAMATAN ENOK
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan				3 kali	-						3 kali	-	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	%	%	100 %	94.092.000							100 %	57.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Lembar	1.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	100 Lembar	2.000.000	KECAMATAN ENOK
		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				10 Orang	-						10 Orang	-	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	17.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	2 Rekening	-	KECAMATAN ENOK
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				9 Orang	74.772.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	9 Orang	55.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	58.730.000							100 Persen	58.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Dokumen	Dokumen	100 Dokumen	58.730.000							100 Dokumen	58.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				100 Jenis	58.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	100 Jenis	58.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen	Persen	100 Persen	86.895.500							100 Persen	55.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	86.895.500							2 Kegiatan	55.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kegiatan	86.895.500	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2	2 Kegiatan	55.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	Persen	100 Persen	49.274.000							100 Persen	45.500.000	KECAMATAN ENOK
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan masyarakat yang dibina	Kelompok	Kelompok	3 Kelompok	49.274.000							3 Kelompok	45.500.000	KECAMATAN ENOK
		Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	%	%	100 %	-							100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 Kelompok	44.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3	3 Kelompok	38.500.000	KECAMATAN ENOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6 02.01 13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				70 Usulan	4.774.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3	70 Usulan	7.000.000	KECAMATAN ENOK
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN ENOK
7 1	KECAMATAN						154.500.000							100.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	154.500.000						100 Persen	100.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan	%		%	100 %	154.500.000						100 %	100.000.000	KECAMATAN ENOK
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Medan				100 %	154.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Telukmedan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8	100 %	100.000.000	KECAMATAN ENOK
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN ENOK
7 1	KECAMATAN						205.600.000							300.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													100.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													100.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						-	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Panteiseberang Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	205.600.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN ENOK
		Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pantai Seberang Makmur	%		%	100 %	205.600.000						100 %	200.000.000	KECAMATAN ENOK
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pantai Seberang Makmur				100 %	205.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Panteiseberang Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8	100 %	200.000.000	KECAMATAN ENOK
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN ENOK
7 1	KECAMATAN						230.100.000							230.100.000	KECAMATAN ENOK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	230.100.000						100 Persen	230.100.000	KECAMATAN ENOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Enok	%		%	100 %	230.100.000						100 %	230.100.000	KECAMATAN ENOK
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Enok				100 %	230.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8		100 %	230.100.000	KECAMATAN ENOK
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN ENOK
7 1	KECAMATAN						208.300.000							200.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	208.300.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pusaran	%		%	100 %	208.300.000						100 %	200.000.000	KECAMATAN ENOK
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN ENOK
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pusaran				100 %	208.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Pusaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8		100 %	200.000.000	KECAMATAN ENOK
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN GAUNG
7 1	KECAMATAN						2.727.863.937							2.783.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.562.126.387						100 Persen	2.598.500.000	KECAMATAN GAUNG
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	KECAMATAN GAUNG
		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	22 Nilai	-						22 Nilai	-	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	2.377.863.687						1 Tahun	2.400.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	2.377.863.687	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Kecamatan	100 Persen	2.400.000.000	KECAMATAN GAUNG	
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	146.662.700						1 Tahun	160.500.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Kecamatan	4 Rekening	5.000.000	KECAMATAN GAUNG	
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan				17 Jenis	10.142.450	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Aparatur Kecamatan	17 Jenis	10.500.000	KECAMATAN GAUNG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	61.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	100 Persen	65.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan				4 Jenis	5.000.250	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	4 Jenis	5.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan				3 Kali	65.520.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	3 Kali	75.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	32.600.000						100 Persen	33.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan				300 Lembar	2.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	300 Lembar	2.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	9.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	4 Rekening	9.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya				12 Ruangan	21.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	12 Ruangan	22.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	5.000.000						100 Persen	5.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya				4 Unit	2.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	4 Unit	2.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara				7 Unit	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	7 Unit	3.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	22.000.000						100 Persen	22.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen		Persen	90 Persen	22.000.000						90 Persen	22.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen/ Perizinan Yang Dikeluarkan				47 Rekomendasi	22.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Gaung, Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	47 Rekomendasi	22.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	14.300.000						100 Persen	15.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	14.300.000						100 Persen	15.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina				100 Persen	14.300.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	100 Persen	15.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	28.700.000						100 Persen	30.000.000	KECAMATAN GAUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	100 Persen	28.700.000						100 Persen	30.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kali	28.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	2 Kali	30.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100.737.550						100 Persen	117.500.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	100.737.550						100 Persen	117.500.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik				100 Persen	85.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	100 Persen	100.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik				100 Persen	15.737.550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan	100 Persen	17.500.000	KECAMATAN GAUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN GAUNG
7 1	KECAMATAN						181.999.600							200.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	181.999.600						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	181.999.600						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN GAUNG
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan				100 Persen	181.999.600	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Lahang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	200.000.000	KECAMATAN GAUNG
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN GAUNG
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN GAUNG
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN GAUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN GAUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1	KECAMATAN						3.458.858.633							3.458.858.633	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	3.268.128.633						90 Persen	3.268.128.633	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	3.080.858.633						100 Persen	3.080.858.633	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				29 Orang	3.080.858.633	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	ASN	29 Orang	3.080.858.633	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	78.590.000						100 Persen	78.590.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	50 Persen	-						50 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				29 Jenis	17.353.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Kantor Camat Gaung, Anak Serka	29 Jenis	17.353.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	10.580.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Kantor Camat Gaung, Anak Serka	3 Jenis	10.580.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				1 Jenis	4.321.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Kantor Camat Gaung, Anak Serka	1 Jenis	4.321.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				60 Kali	46.336.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	ASN di Lingkungan Kantor Camat Gaung, Anak Serka	60 Kali	46.336.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	95.180.000						100 Persen	95.180.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	50 Persen	-						50 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat kebutuhan surat menyurat				100 Persen	2.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Camat Anak Serka	Gaung	100 Persen	2.300.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Rekening yang dibayarkan				4 Rekening	19.380.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Anak Serka	Gaung	4 Rekening	19.380.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				6 Orang	73.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Anak Serka	Gaung	6 Orang	73.500.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	13.500.000							100 Persen	13.500.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	-							100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	90 Persen	-							90 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	-							100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				8 Unit	7.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Anak Serka	Gaung	8 Unit	7.000.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Anak Serka	Gaung	1 Unit	6.000.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	500.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Anak Serka	Gaung	4 Unit	500.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	24.450.000							100 Persen	24.450.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani	Pesen		Pesen	100 Pesen	24.450.000							100 Pesen	24.450.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	-							100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	-							100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Persen	24.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Camat Anak Serka	Gaung	100 Persen	24.450.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	2.000.000							100 Persen	2.000.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	2.000.000							100 Persen	2.000.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	-	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Camat Gaung Anak Serka	100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	92.888.000						100 Persen	92.888.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	100 Persen	92.888.000						100 Persen	92.888.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kegiatan	92.888.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Camat Gaung Anak Serka dan TP PKK Kecamatan Gaung Anak Serka	2 Kegiatan	92.888.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	71.392.000						100 Persen	71.392.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen	71.392.000						100 Persen	71.392.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 Kelompok	66.842.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Gaung Anak Serka	3 Kelompok	66.842.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				60 Usulan	4.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Gaung Anak Serka	60 Usulan	4.550.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1	KECAMATAN						231.600.000							231.600.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	231.600.000						100 Persen	231.600.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	231.600.000						100 Persen	231.600.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Sungai Empat				100 Persen	231.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Sungaiempat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Empat Lurah Sungai	100 Persen	231.600.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1	KECAMATAN						360.700.000							360.700.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	360.700.000						100 Persen	360.700.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	360.700.000						100 Persen	360.700.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Teluk Pinang				100 Persen	360.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Telukpinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Pinang Lurah Teluk	100 Persen	360.700.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1	KECAMATAN						140.400.000							140.400.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	140.400.000						100 Persen	140.400.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	140.400.000						100 Persen	140.400.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanjung Harapan				100 Persen	140.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Anak Serka, Tanjungharapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kantor Lurah Tanjung Harapan	100 Persen	140.400.000	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KATEMAN
7 1	KECAMATAN						3.047.286.089							3.408.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.918.770.589						100 Persen	3.281.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Tahun		Tahun	1 Tahun	2.666.286.089						1 Tahun	3.000.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	2.666.286.089	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	100 Persen	3.000.000.000	KECAMATAN KATEMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	139.429.500						100 Persen	160.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				17 Jenis	59.744.500	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	17 Jenis	70.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				17103 Jenis	22.955.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	17103 Jenis	30.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				65 kali	56.730.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	65 kali	60.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan surat menyurat	Persen		Persen	100 Persen	113.055.000						100 Persen	121.000.000	KECAMATAN KATEMAN
		Jumlah Rekening yang dibayarkan	Tahun		Tahun	1 Tahun	-						1 Tahun	-	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				100 Persen	9.000.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	100 Persen	10.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	29.620.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	3 Rekening	31.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi baik				100 Persen	74.435.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	100 Persen	80.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	45.900.000						100 Persen	50.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	45.900.000						1 Kegiatan	50.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				100 Persen	45.900.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	100 Persen	50.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	82.615.500						100 Persen	77.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen	82.615.500						100 Persen	77.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				100 Persen	65.615.500	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	100 Persen	60.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				100 Persen	17.000.000	Kab. Indragiri Hilir Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	100 Persen	17.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KATEMAN
7 1	KECAMATAN						178.200.000							200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	178.200.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	178.200.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan				100 Persen	178.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Bandar Sri Gemilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KATEMAN
7 1	KECAMATAN						345.100.000							400.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	345.100.000						100 Persen	400.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	345.100.000						100 Persen	400.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan				100 Persen	345.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	400.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KATEMAN
7 1	KECAMATAN						145.100.000							200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	145.100.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	145.100.000						100 Persen	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN KATEMAN
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan				100 Persen	145.100.000	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Amal Bakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas tata kelola pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	200.000.000	KECAMATAN KATEMAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KEMPAS
7 1	KECAMATAN						3.406.353.778							3.462.500.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	19 Orang	3.304.576.778						19 Orang	3.407.500.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Tahun		Tahun	1 Tahun	3.008.353.778						1 Tahun	3.100.000.000	KECAMATAN KEMPAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				19 Orang	3.008.353.778	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	19 Orang	3.100.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	152.223.000						100 Persen	161.500.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Jenis	44.318.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	3 Jenis	45.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Jenis	11.475.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	1 Jenis	15.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				4 Eksemplar	1.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	4 Eksemplar	1.500.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				69 Kali	95.230.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	69 Kali	100.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen		Persen	100 Persen	133.200.000						100 Persen	135.000.000	KECAMATAN KEMPAS
		Jumlah Rekening yang dibayarkan	Tahun		Tahun	1 Tahun	-						1 Tahun	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	4.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	90 Persen	5.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	13.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	3 Rekening	14.000.000	KECAMATAN KEMPAS
							-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				4 Orang	115.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	4 Orang	116.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	10.800.000						100 Persen	11.000.000	KECAMATAN KEMPAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				6 Unit	10.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	6 Unit	11.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	52.129.000						100 Persen	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	52.129.000						1 Kegiatan	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				3 Kegiatan	52.129.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Kecamatan	3 Kegiatan	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	49.648.000						100 Persen	55.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen	49.648.000						100 Persen	55.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Kelompok	39.248.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	2 Kelompok	40.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				800 usulan	10.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kecamatan	800 usulan	15.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KEMPAS
7 1	KECAMATAN						367.000.000							-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	367.000.000						100 Persen	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	367.000.000						100 Persen	-	KECAMATAN KEMPAS
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kempas Jaya				90 Persen	367.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Kempas Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	90 Persen	-	KECAMATAN KEMPAS
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KEMPAS
7 1	KECAMATAN						249.300.000							250.000.000	KECAMATAN KEMPAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	249.300.000						100 Persen	250.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	249.300.000						100 Persen	250.000.000	KECAMATAN KEMPAS
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan				100 Persen	249.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur Kelurahan dan Masyarakat	100 Persen	250.000.000	KECAMATAN KEMPAS
							-				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik			-	KECAMATAN KEMPAS
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KEMUNING
7 1	KECAMATAN						2.801.096.975							3.064.576.975	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.554.918.975						100 Persen	2.690.766.975	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	2.432.973.225						1 Tahun	2.432.973.225	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				20 Orang	2.432.973.225	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 OPD	20 Orang	2.432.973.225	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Non Program RPJMD	%		%	100 %	500.000						100 %	15.000.000	KECAMATAN KEMUNING
		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				2 orang	500.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wilayah Kantor Camat Kemuning	2 orang	15.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana yang di Butuhkan set	Jenis		Jenis	25 Jenis	98.388.550						25 Jenis	150.693.750	KECAMATAN KEMUNING
		Dana yang di Butuhkan Liter				728 Liter	-						728 Liter	-	KECAMATAN KEMUNING
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				7 jenis	21.524.800	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 jenis	25.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	6.464.250	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	19.184.250	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Jenis	6.483.500	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	8.983.500	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				44 kali	63.916.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	44 kali	97.526.000	KECAMATAN KEMUNING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	90 Persen	12.057.200						90 Persen	80.100.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				85 Persen	5.925.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		85 Persen	9.500.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening	2.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		2 rekening	10.600.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				10 Orang	3.232.200	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		10 Orang	60.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	11.000.000						100 Persen	12.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				11 unit	11.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		11 unit	12.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	67.350.000						100 %	143.050.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana yang di Butuhkan	%		%	100 %	62.730.000						100 %	138.050.000	KECAMATAN KEMUNING
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				2 Jenis	62.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 OPD		2 Jenis	138.050.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dana yang diButuhkan	Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	4.620.000						2 Rekomendasi	5.000.000	KECAMATAN KEMUNING
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	-						2 Rekomendasi	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				2 Jenis	4.620.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 OPD		2 Jenis	5.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali		Kali	1 Kali	97.060.000						1 Kali	110.760.000	KECAMATAN KEMUNING
		Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kali		Kali	2 Kali	-						2 Kali	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dana Yang diButuhkan	Kali		Kali	1 Kali	97.060.000						1 Kali	110.760.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				3 Kegiatan	97.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 OPD		3 Kegiatan	110.760.000	KECAMATAN KEMUNING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	81.768.000						100 Persen	120.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	%		%	100 %	81.768.000						100 %	120.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	%		%	100 %	-						100 %	-	KECAMATAN KEMUNING
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				9 kelompok	67.057.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 OPD		9 kelompok	100.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				2 usulan	14.711.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 OPD		2 usulan	20.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KEMUNING
7 1	KECAMATAN						172.460.000							600.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	172.460.000						100 Persen	600.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	172.460.000						100 %	600.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 3 02.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selensen				100 persen	141.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 OPD		100 persen	300.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Selensen				100 Persen	30.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 OPD		100 Persen	300.000.000	KECAMATAN KEMUNING
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KERITANG
7 1	KECAMATAN						3.212.973.844							3.594.140.594	KECAMATAN KERITANG
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	3.108.073.844						100 Persen	3.475.250.594	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.826.143.594						100 Persen	3.108.757.594	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				27 orang	2.826.143.594	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN		27 orang	3.108.757.594	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	9.800.000						100 Persen	14.000.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				28 Stel	9.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pegawai Kantor Camat		28 Stel	14.000.000	KECAMATAN KERITANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	142.740.250						100 Persen	162.373.000	KECAMATAN KERITANG	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				2 Jenis	2.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Camat	Kantor	2 Jenis	2.585.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				8 Jenis	41.710.250	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Camat	Kantor	8 Jenis	50.000.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	13.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Camat	Kantor	2 Jenis	14.740.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4 Jenis	1.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Camat	Kantor	4 Jenis	3.000.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 Eksemplar	1.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Camat	Kantor	12 Eksemplar	1.320.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				116 Kali	82.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Camat	Kantor	116 Kali	90.728.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Roda 2	Unit		Unit	1 Unit	21.000.000						1 Unit	23.100.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan				1 unit	21.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Barang Milik Daerah	1 unit	23.100.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	88.200.000						100 Persen	97.020.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 Persen	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operasional Kantor	100 Persen	3.300.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening	15.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operasional Kantor	2 rekening	17.160.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				8 Orang	69.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Operasional Kantor	8 Orang	76.560.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	20.190.000						100 Persen	70.000.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	16.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	2 Unit	20.000.000	KECAMATAN KERITANG	
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	4.190.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	1 Unit	50.000.000	KECAMATAN KERITANG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	10.500.000						100 Persen	11.550.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persen		Persen	100 Persen	10.500.000						100 Persen	11.550.000	KECAMATAN KERITANG
		Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN KERITANG
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				100 Persen	10.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17 Desa/Kelurahan	100 Persen	11.550.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	47.200.000						100 Persen	51.920.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	47.200.000						100 Persen	51.920.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya yang di Laksanakan				1 kegiatan	47.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Khafilah MTQ Kecamatan Keritang	1 kegiatan	51.920.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	47.200.000						100 Persen	55.420.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	47.200.000						100 Persen	55.420.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi /Kelembagaan dan Masyarakat yang dibina				2 Kelompok	42.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Musrenbang Kecamatan, Kegiatan HUT RI Kecamatan dan Kegiatan PKK	2 Kelompok	46.420.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah rekomendasi usulan kecamatan pada musrenbang kecamatan				850 usulan	5.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Musrenbang Kecamatan, Kegiatan HUT RI Kecamatan dan Kegiatan PKK	850 usulan	9.000.000	KECAMATAN KERITANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN KERITANG
7 1	KECAMATAN						308.200.000							318.200.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	308.200.000						100 Persen	318.200.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	308.200.000						100 Persen	318.200.000	KECAMATAN KERITANG
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kotabaru Reteh				100 Persen	308.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Kotabaru Reteh	100 Persen	318.200.000	KECAMATAN KERITANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN INDRAGIRI
7 1	KECAMATAN						2.498.676.169							2.708.837.169	KECAMATAN INDRAGIRI
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	2.353.626.169						90 Persen	2.375.494.669	KECAMATAN INDRAGIRI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang		orang	17 orang	2.155.676.169						17 orang	2.155.676.169	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				17 Orang	2.155.676.169	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur	17 Orang	2.155.676.169	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali		kali	166 kali	113.250.000						166 kali	165.118.500	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				23 jenis	8.751.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Sarana dan prasarana Aparatur	23 jenis	9.037.500	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 jenis	16.675.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sarana dan prasarana Aparatur	2 jenis	31.300.000	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4576 lembar	2.144.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Sarana dan prasarana Aparatur	4576 lembar	4.531.000	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				166 kali	85.680.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Sarana dan prasarana Aparatur	166 kali	120.250.000	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan surat menyurat	persen		persen	100 persen	43.700.000						100 persen	39.200.000	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
		Jumlah Rekening yang dibayarkan	rekening		rekening	2 rekening	-						2 rekening	-	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				100 persen	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Penunjang Perkantoran	100 persen	2.700.000	KECAMATAN INDRAGIRI	KUALA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening	3.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Penunjang Perkantoran	2 rekening	3.000.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 Orang	39.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Penunjang Perkantoran	5 Orang	33.500.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		unit	5 unit	41.000.000						5 unit	15.500.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				6 unit	25.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Kecamatan	6 unit	11.000.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				1 unit	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Kecamatan	1 unit	-	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				5 unit	1.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintahan Kecamatan	5 unit	4.500.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	4.350.000						100 Persen	40.400.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	jenis		jenis	1 jenis	4.350.000						1 jenis	40.400.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				1 jenis	4.350.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Pemerintahan Kecamatan	1 jenis	40.400.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	46.000.000						100 Persen	72.080.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	46.000.000						1 kegiatan	72.080.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 kegiatan	46.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Suku dan Umat Beragama	1 kegiatan	72.080.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	94.700.000						100 Persen	220.862.500	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina	kelompok		kelompok	2 kelompok	94.700.000						2 kelompok	220.862.500	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 kelompok	87.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Lembaga kemasyarakatan	2 kelompok	212.800.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				400 usulan	7.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Lembaga kemasyarakatan	400 usulan	8.062.500	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1	KECAMATAN						218.600.000							453.550.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	218.600.000						100 Persen	453.550.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	persen		persen	100 persen	218.600.000						100 persen	453.550.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				1 kegiatan	218.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Sapat	1 kegiatan	453.550.000	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
							-				Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing			-	KECAMATAN INDRAGIRI KUALA
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN MANDAH
7 1	KECAMATAN						2.704.425.828							2.897.800.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	90 Persen	2.538.335.828						90 Persen	2.672.800.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	2.329.425.828						100 Persen	2.400.000.000	KECAMATAN MANDAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				20 Orang	2.329.425.828	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Mandah	20 Orang	2.400.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	16.800.000						100 Persen	14.400.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				2 Orang	16.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	2 Orang	14.400.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	persen		persen	100 persen	12.800.000						100 persen	30.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				27 Stel	12.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Mandah	27 Stel	30.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	156.924.750						100 Persen	204.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				9 Jenis	60.056.500	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	9 Jenis	80.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 jenis	13.576.500	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	2 jenis	20.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Jenis	1.281.750	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	1 Jenis	1.600.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				24 Eksemplar	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	24 Eksemplar	2.400.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				46 Kali	79.610.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	46 Kali	100.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	22.385.250						100 Persen	24.400.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				90 Persen	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Mandah	90 Persen	2.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				12 Rekening	2.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	12 Rekening	2.400.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				2 Orang	17.585.250	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Mandah	2 Orang	20.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	36.800.000						100 Persen	60.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 2 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Pemerintah Umum yang tertangani	Persen		Persen	90 Persen	8.000.000						90 Persen	30.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 2 02.01 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 persen	8.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah				17 Desa/kelurahan	80 persen	30.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen		Persen	90 Persen	28.800.000						90 Persen	30.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				5 Jenis	28.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5 Jenis	30.000.000	KECAMATAN MANDAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	86.990.000						100 Persen	100.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	100 Persen	86.990.000						100 Persen	100.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kegiatan	86.990.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Mandah	2 Kegiatan	100.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	42.300.000						100 Persen	65.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	90 Persen	42.300.000						90 Persen	65.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Kelompok	28.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16 Desa 1 Kelurahan	2 Kelompok	50.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				17 usulan	13.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16 Desa 1 Kelurahan	17 usulan	15.000.000	KECAMATAN MANDAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN MANDAH
7 1	KECAMATAN						410.400.000							500.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	410.400.000						100 Persen	500.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	410.400.000						100 Persen	500.000.000	KECAMATAN MANDAH
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Khairiah Mandah				90 persen	410.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Khairiah Mandah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Khairiah Mandah	90 persen	500.000.000	KECAMATAN MANDAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1	KECAMATAN						2.881.985.008							2.905.921.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.701.385.008						100 Persen	2.741.400.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang		orang	26 orang	2.488.985.008						26 orang	2.500.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
		Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang		orang	27 orang	-						27 orang	-	KECAMATAN PELANGIRAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				26 orang	2.488.985.008	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	26 orang	2.500.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	persen		persen	100 persen	6.000.000						100 persen	-	KECAMATAN PELANGIRAN KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				1 orang	6.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	1 orang	6.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	157.700.000						100 persen	-	KECAMATAN PELANGIRAN KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan				23 Jenis	67.036.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	23 Jenis	75.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang Tersedia				3 Jenis	16.210.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	3 Jenis	17.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Jenis	5.474.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	2 Jenis	6.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan				63 Kali	68.980.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	63 Kali	75.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN KECAMATAN PELANGIRAN
							-							-	KECAMATAN PELANGIRAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	persen		persen	100 persen	32.200.000						100 persen	32.400.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				240 Buah	3.040.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	240 Buah	2.400.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening	9.960.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	2 rekening	10.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				2 Orang	19.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	2 Orang	20.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	persen		persen	100 persen	16.500.000						100 persen	-	KECAMATAN PELANGIRAN KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				1 Unit	1.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	1 Unit	5.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	1 Unit	-	KECAMATAN PELANGIRAN KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	25.500.000						100 Persen	30.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	persen		persen	100 persen	25.500.000						100 persen	30.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				5 Jenis	25.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	5 Jenis	30.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	75.850.000						100 Persen	94.971.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	persen		persen	100 persen	75.850.000						100 persen	94.971.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 Kegiatan	75.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan dan Masyarakat	1 Kegiatan	94.971.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	79.250.000						100 Persen	39.550.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	79.250.000						1 Tahun	39.550.000	KECAMATAN PELANGIRAN
		Persentase Desa yang tertib Administrasi	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				1 Kelompok	64.300.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	1 Kelompok	19.775.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				149 Usulan	14.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik		Aparatur Kecamatan	149 Usulan	19.775.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1	KECAMATAN						288.900.000							350.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	288.900.000						100 Persen	350.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	pesen		pesen	100 pesen	288.900.000						100 pesen	350.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Pelangiran				90 Persen	288.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Kelurahan Pelangiran	90 Persen	350.000.000	KECAMATAN PELANGIRAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1	KECAMATAN						2.695.357.046							2.695.157.046	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	2.535.571.046						100 persen	2.535.571.046	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang		orang	25 orang	2.334.357.046						25 orang	2.334.357.046	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				25 orang	2.334.357.046	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 kegiatan	25 orang	2.334.357.046	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	stel		stel	25 stel	10.000.000						25 stel	10.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				25 stel	10.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 kegiatan	25 stel	10.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	142.730.500						100 persen	142.730.500	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				5 jenis	850.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	5 jenis	850.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				17 jenis	17.542.500	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	17 jenis	17.542.500	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 jenis	9.060.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	1 jenis	9.060.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				2 jenis	6.748.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	2 jenis	6.748.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				92 kali	108.530.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 kegiatan	92 kali	108.530.000	KECAMATAN PULAU BURUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen		persen	100 persen	48.483.500						100 persen	48.483.500	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				100 persen	2.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 kegiatan	100 persen	2.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 rekening	7.440.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 kegiatan	2 rekening	7.440.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 orang	39.043.500	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 kegiatan	3 orang	39.043.500	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	720.000						100 Persen	720.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	persen		persen	100 persen	720.000						100 persen	720.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				15 jenis	720.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 kegiatan	15 jenis	720.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	persen		persen	100 persen	10.224.000						100 persen	10.224.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan	kelompok		kelompok	2 kelompok	10.224.000						2 kelompok	10.224.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				2 kegiatan	10.224.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	2 kegiatan	2 kegiatan	10.224.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	80.320.000						100 Persen	80.320.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	persen		persen	100 persen	80.320.000						100 persen	80.320.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 kegiatan	80.320.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 kegiatan	2 kegiatan	80.320.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	68.522.000						100 Persen	68.322.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	persen		persen	100 persen	68.522.000						100 persen	68.322.000	KECAMATAN PULAU BURUNG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 kelompok	53.522.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 kegiatan	2 kelompok	53.322.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang				700 usulan	15.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 kegiatan	700 usulan	15.000.000	KECAMATAN PULAU BURUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN RETEH
7 1	KECAMATAN						3.783.383.064							3.783.383.064	KECAMATAN RETEH
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	3.649.882.264						100 Persen	3.649.882.264	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	3.397.383.264						100 Persen	3.397.383.264	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				27 Orang	3.397.383.264	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	27 Orang	3.397.383.264	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	14.400.000						100 Persen	14.400.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				3 Orang	14.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	3 Orang	14.400.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	159.149.000						100 Persen	159.149.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				16 Jenis	19.064.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	16 Jenis	19.064.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	10.725.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	3 Jenis	10.725.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Jenis	4.950.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	2 Jenis	4.950.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 Eksemplar	2.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	12 Eksemplar	2.500.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				123 Kali	121.910.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	123 Kali	121.910.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	30.000.000						100 Persen	30.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 Unit	30.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	Aparatur	2 Unit	30.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	37.150.000						100 Persen	37.150.000	KECAMATAN RETEH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				90 Persen	1.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	90 Persen	1.800.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	10.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	2 Rekening	10.800.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 Orang	24.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	5 Orang	24.550.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Unit		Unit	2 Unit	11.800.000						2 Unit	11.800.000	KECAMATAN RETEH
7 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				2 Unit	11.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	2 Unit	11.800.000	KECAMATAN RETEH
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	21.636.600						100 Persen	21.636.600	KECAMATAN RETEH
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Persen		Persen	100 Persen	21.636.600						100 Persen	21.636.600	KECAMATAN RETEH
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				3 Jenis	21.636.600	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	3 Jenis	21.636.600	KECAMATAN RETEH
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	84.730.000						100 Persen	84.730.000	KECAMATAN RETEH
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	100 Persen	84.730.000						100 Persen	84.730.000	KECAMATAN RETEH
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 Kegiatan	84.730.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat & Aparatur	1 Kegiatan	84.730.000	KECAMATAN RETEH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	27.134.200						100 Persen	27.134.200	KECAMATAN RETEH
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	100 Persen	27.134.200						100 Persen	27.134.200	KECAMATAN RETEH
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				3 Kelompok	16.419.700	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		3 Kelompok	16.419.700	KECAMATAN RETEH
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				70 Usulan	10.714.500	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		70 Usulan	10.714.500	KECAMATAN RETEH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN RETEH
7 1	KECAMATAN						383.900.000							383.900.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	383.900.000						100 Persen	383.900.000	KECAMATAN RETEH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	383.900.000						90 Persen	383.900.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Pulau Kijang				90 Persen	383.900.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Pulaukijang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	90 Persen	383.900.000	KECAMATAN RETEH
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	KECAMATAN RETEH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN RETEH
7 1	KECAMATAN						165.000.000							165.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	165.000.000						100 Persen	165.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	165.000.000						90 Persen	165.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan Madani				90 Persen	165.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	90 Persen	165.000.000	KECAMATAN RETEH
							-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	KECAMATAN RETEH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN RETEH
7 1	KECAMATAN						171.000.000							171.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	171.000.000						100 Persen	171.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	171.000.000						90 Persen	171.000.000	KECAMATAN RETEH
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan metro				90 Persen	171.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	90 Persen	171.000.000	KECAMATAN RETEH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1	KECAMATAN						2.494.512.300							2.516.911.800	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	2.359.205.800						100 Persen	2.366.305.800	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	2.060.512.300						100 Persen	2.060.512.300	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				18 Orang	2.060.512.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur	18 Orang	2.060.512.300	KECAMATAN SUNGAI BATANG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	14.400.000						100 Persen	14.400.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dibayarkan				2 Orang	14.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Aparatur	2 Orang	14.400.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	stel		stel	24 stel	11.500.000						24 stel	11.500.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				23 stel	11.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	23 stel	11.500.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	197.693.500						100 Persen	203.693.500	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				4 Jenis	830.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	4 Jenis	830.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				47 Jenis	55.817.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	47 Jenis	60.817.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	28.802.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	3 Jenis	28.802.500	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 Jenis	6.264.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	3 Jenis	7.264.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
							-	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan						-	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				68 Kali	105.980.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan sarana prasarana penunjang	68 Kali	105.980.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	75.100.000						100 Persen	76.200.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				95 Persen	1.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Operasional Kantor	95 Persen	1.300.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				3 Rekening	11.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Operasional Kantor	3 Rekening	12.500.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				6 Orang	62.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Operasional Kantor	6 Orang	62.400.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jenis		Jenis	2 Jenis	18.550.000						2 Jenis	18.550.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jenis		Jenis	2 Jenis	18.550.000						2 Jenis	18.550.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				2 Jenis	18.550.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan aparatur	2 Jenis	18.550.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	90 Persen	85.960.500						90 Persen	98.960.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	90 Persen	85.960.500						90 Persen	98.960.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				2 Kegiatan	85.960.500	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	2 Kegiatan	98.960.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	90 Persen	30.796.000						90 Persen	33.096.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan Pemerintahan Desa secara Baik	Persen		Persen	90 Persen	30.796.000						90 Persen	33.096.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 Kelompok	23.296.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Organisasi Masyarakat dan	2 Kelompok	25.296.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				1 dokumen	7.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Masyarakat dan	1 dokumen	7.800.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN BATANG SUNGAI
7 1	KECAMATAN						248.400.000							300.000.000	KECAMATAN BATANG SUNGAI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	248.400.000						90 Persen	300.000.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Benteng	Persen		Persen	90 Persen	248.400.000						90 Persen	300.000.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Benteng				90 Persen	248.400.000	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan aparatur	90 Persen	300.000.000	KECAMATAN SUNGAI BATANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1	KECAMATAN						2.886.218.677							2.894.380.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.519.018.677						100 Persen	2.525.380.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	2.095.218.677						100 Persen	2.096.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				16 Orang	2.095.218.677	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16 ASN	16 Orang	2.096.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	17.500.000						90 Persen	17.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				25 Stel	17.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16 Orang	25 Stel	17.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	284.660.000						90 Persen	287.880.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				25 Jenis	49.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	25 Jenis	50.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	50.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	3 Jenis	50.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Jenis	10.553.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	2 Jenis	12.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				12 Eksemplar	2.880.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	12 Eksemplar	2.880.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				213 Kali	172.227.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kegiatan	213 Kali	173.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	119.140.000						100 Persen	121.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				95 Persen	9.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan	95 Persen	9.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				5 Rekening	25.540.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan	5 Rekening	26.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				11 Orang	84.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kegiatan	11 Orang	86.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen		Persen	90 Persen	2.500.000						90 Persen	2.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 1 02.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				10 Unit	2.500.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 unit	10 Unit	2.500.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	64.450.000						100 Persen	65.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	64.450.000						100 Persen	65.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				2 Kegiatan	64.450.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Kelompok Kegiatan	2 Kegiatan	65.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	114.000.000						100 Persen	115.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	114.000.000						100 Persen	115.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 Kegiatan	114.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kelompok Kegiatan	1 Kegiatan	115.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	188.750.000						100 Persen	189.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	188.750.000						100 Persen	189.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				11 Kelompok	174.750.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kelompok Kegiatan	11 Kelompok	175.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				100 usulan	14.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kelompok Kegiatan	100 usulan	14.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1	KECAMATAN						246.000.000							250.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	246.000.000						100 Persen	250.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3 02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen		Persen	95 Persen	246.000.000						95 Persen	250.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7 1 3 02.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kuala Enok				95 Persen	246.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Kelompok Masyarakat	95 Persen	250.000.000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN						-							-	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1	KECAMATAN						2.385.564.946							2.274.658.864	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	2.086.885.946						100 Persen	1.986.099.864	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	1.671.564.946						100 persen	1.670.917.864	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	persen		persen	100 persen	-						100 persen	-	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				1 Tahun	1.671.564.946	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jumlah Gaji ASN	1 Tahun	1.670.917.864	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	317.701.000						100 persen	210.792.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				21 Jenis	44.751.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	21 Jenis	27.530.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				5 Jenis	31.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	5 Jenis	17.076.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4241 lembar	5.480.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	4241 lembar	3.290.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				108 kali	236.270.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa	108 kali	162.896.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	47.700.000						100 persen	47.750.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Lainnya yang dibangun				1 unit	47.700.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Desa	1 unit	47.750.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	persen		persen	100 persen	49.920.000						100 persen	56.640.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				100 Persen	4.320.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan, Desa	100 Persen	4.320.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				1 Rekening	12.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan, Desa	1 Rekening	12.000.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				4 Orang	33.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan, Desa	4 Orang	40.320.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	55.850.000						100 Persen	54.800.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 2 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	persen		persen	100 persen	55.850.000						100 persen	54.800.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 2 02.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi perijinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				1 Jenis	55.850.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa dan Kelurahan	1 Jenis	54.800.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	persen		persen	100 persen	45.842.000						100 persen	45.622.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 3 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen		persen	100 persen	45.842.000						100 persen	45.622.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 3 02.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	45.842.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	45.622.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Persen		Persen	100 Persen	101.050.000						100 Persen	100.670.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 5 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	persen		persen	100 persen	101.050.000						100 persen	100.670.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 5 02.01 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang dilaksanakan				1 Kegiatan	101.050.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa, Kelurahan	1 Kegiatan	100.670.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen		Persen	100 Persen	95.937.000						100 Persen	87.467.000	KECAMATAN BELENGKONG TELUK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 6 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	persen		persen	100 persen	95.937.000						100 persen	87.467.000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 6 02.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi, kelembagaan dan masyarakat yang dibina				2 kelompok	77.814.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa		2 kelompok	69.344.000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7 1 6 02.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Rekomendasi Usulan Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan				65 Usulan	18.123.000	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa		65 Usulan	18.123.000	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-							-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						15.630.462.113							16.200.480.614	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	11.893.092.113						100 Persen	12.276.242.114	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	140.105.650						90 Persen	147.110.933	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen		Persen	90 Persen	-						90 Persen	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun				10 Dokumen	140.105.650	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	147.110.933	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	4.330.092.113						100 Persen	4.335.092.113	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				38 Orang	4.330.092.113	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelaporan		38 Orang	4.335.092.113	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	100 Persen	107.281.000						100 Persen	112.645.050	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	-						100 Persen	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan				26 Stel	15.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil Negara (ASN)		26 Stel	16.380.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/ dilaksankan				5 Diklat	91.681.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil Negara (ASN)		5 Diklat	96.265.050	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	3.788.801.750						100 Persen	4.104.241.838	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				44 Jenis	59.171.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir		44 Jenis	62.129.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 1 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				50 Jenis	3.090.156.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	50 Jenis	3.370.663.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Jenis	34.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	1 Jenis	35.910.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				7 Jenis	5.998.750	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	7 Jenis	6.298.688	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan				221 Eksemplar	28.160.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	221 Eksemplar	29.568.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				163 Kali	571.116.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Aparatur Sipil Negara (ASN), Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	163 Kali	599.671.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	902.150.000						100 Persen	947.257.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun				3 Unit	902.150.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	3 Unit	947.257.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Persen		Persen	100 Persen	228.505.600						100 Persen	239.930.880	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan surat menyurat				90 Persen	27.600.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	90 Persen	28.980.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	147.200.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	2 Rekening	154.560.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 Orang	53.705.600	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	3 Orang	56.390.880	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	2.396.156.000						100 Persen	2.389.963.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 1 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara				18 Unit	57.800.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kendaraan Dinas, Instansi Vertikal	18 Unit	60.690.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				4 Unit	2.338.356.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Kendaraan Dinas, Instansi Vertikal	4 Unit	2.329.273.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	900.000.000						100 Persen	945.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	900.000.000						100 Persen	945.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 02.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan				8 Kegiatan	291.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa, Ormas.	8 Kegiatan	305.550.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 02.01 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan				250 Peserta	375.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa, Ormas.	250 Peserta	393.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Seminar Pembauran Kebangsaan & Rapat FPK yang dilaksanakan				100 Orang	159.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa, Ormas.	100 Orang	166.950.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 2 02.01 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara				50 Peserta	75.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Mahasiswa, Ormas.	50 Peserta	78.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	1.605.370.000						100 Persen	1.685.638.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persen		Persen	100 Persen	1.605.370.000						100 Persen	1.685.638.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 3 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Partai Politik yang di bina				11 Parpol	1.405.370.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Partai Politik dan Masyarakat	11 Parpol	1.475.638.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 1 3 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan				200 Masyarakat	200.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Partai Politik dan Masyarakat	200 Masyarakat	210.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	645.000.000						100 Persen	677.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	645.000.000						100 Persen	677.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan				282 Ormas/LSM	645.000.000	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			282 Ormas/LSM	282 Ormas/LSM	677.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	Persen		Persen	100 Persen	275.000.000						100 Persen	288.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		Persen	100 Persen	275.000.000						100 Persen	288.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Honorarium 1 Kali yang diselenggarakan Jumlah Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan				6 Kegiatan 6 Kegiatan	275.000.000 -	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			6 Kegiatan	6 Kegiatan	288.750.000 -	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Persen		Persen	100 Persen	312.000.000						100 Persen	327.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	312.000.000						100 Persen	327.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 02.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Intelijen yang dilaksanakan				4 Kali	68.550.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, di Wilayah Inhil	4 Kali	71.978.025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 02.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dipantau				20 Kecamatan	243.449.500	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, di Wilayah Inhil	20 Kecamatan	255.621.975	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							1.900.387.533.317							2.215.657.711.556	

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Penetapan indikator kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023

No	Indikator	Target Tahun	
		2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.40	5.54
2	Laju Inflasi (%)	3.50	3.4
3	Indeks Gini (Indeks)	0.31	0.31
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,20	7,10
5	Indeks Pembangunan Manusia - IPM (%)	68.9	69.72
6	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.62	7.86
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.26	13.56
8	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,80	70,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.61	2.38
10	Tingkat kesempatan kerja (%)	97.39	97.62
11	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)	29.75	34.08
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih layak (%)	48.92	52
13	Opini BPK atas LKPD (Prediket)	WTP	WTP
14	Nilai AKIP (Prediket)	BB	A

No	Indikator	Target Tahun	
		2022	2023
15	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72.00	79.00
16	Nilai LPPD (Prediket)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
17	Keterbukaan Informasi (%)	80.00	95.00
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,65	89,22
19	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	65.00	65.00
20	Jumlah Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)	51	57
21	Jumlah PMKS yang Tertangani (Jiwa)	750.00	500.00
22	Indeks Pembangunan Gender (%)	83.59	83.89
23	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	65.78	66.78
24	Jumlah Desa dengan peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun (Desa)	48	49
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	55.66	56.54
26	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	7.491	8.24
27	Nilai investasi PMA (Juta US\$)	461	507
28	Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (%)	44.18	43.72
29	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	28.63	28.71
30	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	11910.64	12148.86
31	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	90.9	91.9
32	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	87.2	88.2
33	Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	4300	4250
34	Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar	33.32	36.10
35	Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	27.25	30.75
36	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	64.52	65.56
37	Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)	52	77
38	Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)	59	84
39	konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)	68	93
40	PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Ribu)	36,890,891.08	38,692,848.92
41	PDRB sektor pertanian (Rp Ribu)	36,890,891.08	38,692,848.92
42	PDRB sektor pariwisata (Rp Ribu)	356,298.73	373,839.28
43	Indeks tutupan lahan (indeks)	24.71	24.72
44	Indeks kualitas udara (indeks)	92.29	92.5
45	Indeks kualitas air (indeks)	60.30	62.99
46	Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)	66.38	65.48
47	Angka Melek Huruf (%)	99.80	99.85

No	Indikator	Target Tahun	
		2022	2023
48	Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1:396	1:390
49	Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1:396	1:390
50	Cakupan partisipasi sosial (%)	55.80	56.95
51	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	28.00	30.00
52	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi (%)	89.00	90.00
53	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (%)	64.00	65.00
54	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)	65.00	65.00
55	Luas wilayah terdampak bencana (Km2)	0.86	0.68
56	Tenaga Kerja Terlatih (%)	33.38	35.09
57	Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	20.50	21.25
58	Pengeluaran per kapita penduduk miskin (Rp per kapita per hari)	11,910.64	12,148.86

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.2 digunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dan
Perkiraan Maju Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun	
		2022	2023
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	54.399,70	58.207,67
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	6,50	7,00
1.1.3.	Inflasi (%)	3,50	3,40
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	64,69	66,07
1.1.5.	Indeks Gini (Indeks)	0,31	0,31
1.1.6.	Indeks Williamson (Indeks)	0,22	0,21
1.1.7.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	52,71	52,39

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun	
		2022	2023
1.1.8.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,20	7,10
1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial		
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	68,90	69,72
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,26	13,56
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,62	7,86
1.2.3.	APK SD/MI (%)	105,47	106,97
1.2.4.	APK SMP/MTs (%)	101,78	102,03
1.2.5.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,80	70,00
1.2.6.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,70	0,60
1.2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,61	2,38
1.2.8.	Nilai AKIP (Prediket)	BB	A
1.2.9.	Nilai LPPD (Prediket)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.2.10.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	72,00	79,00
1.2.11.	Keterbukaan Informasi (%)	80,00	95,00
1.2.12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	87,65	89,22
1.2.13.	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	65,00	65,00
1.2.14.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)	76,00	78,00
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	58,00	60,00
1.3.2.	Jumlah Lapangan Olahraga (Lapangan)	997,00	1.000,00
II	Aspek Pelayanan Umum		
2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar		
2.1.1.	Pendidikan		
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	97,0000	100,0000
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	79,00	80,00
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	100,00	100,00
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	95,00	96,00
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,01	0,01
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,03	0,02
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	80,00	82,00
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (%)	76,00	79,00
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	790,00	810,00
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	1.010,00	1.011,00
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	98,00	100,00
2.1.2.	Kesehatan		
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,0042	0,0042
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0410	0,0420
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,0460	0,0480
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,4000	0,5000
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,0200	0,0250
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,0860	0,0860
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,6400	0,6500

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun	
		2022	2023
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	26,00	30,00
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	76,73	80,23
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	55,00	60,00
2.1.3.5.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	36,00	38,00
2.1.3.6.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	80,00	81,00
2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman		
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	26,00	28,00
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,30	0,25
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	13,00	10,00
2.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	6,00	7,00
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,06	0,07
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	99,00	100,00
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	90,00	100,00
2.1.6.	Sosial		
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	98,00	100,00
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	96,00	100,00
2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
2.2.1.	Tenaga Kerja		
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,00	67,00
	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,39	97,62
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	86,00	87,00
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	87,00	90,00
2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	83,59	83,89
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	65,78	66,78
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	95,00	96,00
2.2.3.	Pangan		
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100,00	100,00
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	96,50	100,00
2.2.4.	Pertanahan		
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	46,00	47,00
2.2.5.	Lingkungan Hidup		
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	99,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun	
		2022	2023
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	85,00	86,00
2.2.5.3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	54,05	54,30
2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	95,00	100,00
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	90,00	100,00
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	950,00	1.000,00
2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236,00	236,00
2.2.7.2.	Pertambahan Jumlah Desa Maju (Desa)	2,00	2,00
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	100,00	100,00
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	100,00	100,00
2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	78,00	80,00
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	81,00	83,00
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	100,00	100,00
2.2.9.	Perhubungan		
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	81,00	83,00
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	92,00	95,00
2.2.9.3.	Tersedianya angkutan perairan yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	95,00	97,00
2.2.10	Komunikasi dan Informatika		
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100,00	100,00
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100,00	100,00
2.2.11.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah		
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	70,00	71,00
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	71,00	72,00
2.2.12.	Penanaman Modal		
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	13.938,00	15.611,00
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	136,00	152,00
2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun	
		2022	2023
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	8,00	9,00
2.2.14	Statistik		
2.2.14.1.	Buku “Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka” (Judul)	1,00	1,00
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20,00	20,00
2.2.15	Persandian		
2.2.16	Kebudayaan		
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5,00	5,00
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2,00	2,00
2.2.17.	Perpustakaan		
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	7.772,00	8.472,00
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.	23.462,00	23.612,00
2.2.18.	Kearsipan		
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (5)	70,00	80,00
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	7,00	8,00
2.3.	Layanan Pilihan		
2.3.1.	Pariwisata		
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	5.000	5.500
2.3.2.	Pertanian		
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	4,25	4,30
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	67.215,42	69.915,42
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	1,27	1,30
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar)	2,90	3,00
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	44,18	43,72
2.3.3.	Perdagangan		
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	300,00	330,00
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,50	14,60
2.3.4.	Perindustrian		
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	61.210,22	61.835,22
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	28,63	28,71
2.3.5.	Transmigrasi		
2.3.6.	Kelautan dan Perikanan		
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	61.080,60	62.080,60
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	45,07	46,67
2.4.	Urusan Penunjang		
2.4.1.	Perencanaan Pembangunan		
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun	
		2022	2023
	Perda/Perkada		
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100,00	100,00
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	100,00
2.4.2.	Keuangan		
2.4.1.	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP
2.4.3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan		
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (SK)	3,00	2,00
2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan		
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	95,00	100,00
2.4.5.	Pengawasan		
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	90,00	100,00
2.4.6.	Sekretariat Dewan		
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	97,00	100,00
III.	Aspek Daya Saing		
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	11.910,64	12.148,86
3.1.2.	Nilai Tukar Petani	112,00	115,00
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	70,00	75,00
3.3.	Fokus Iklim Investasi		
3.3.1.	Angka Kriminalitas (Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk)	3,00	3,50
3.4.	Fokus Sumberdaya Manusia		
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	46,32	45,92

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan baik dari Pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Indragiri Hilir dan memperhatikan kebijakan nasional khususnya untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

 **BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

H. MUHAMMAD WARDAN